BUMN UNTUK INDONESIA

PERTAMINA GAS NEGARA



STRENGTHENING PRESENCE

LAPORAN TAHUNAN 2023 ANNUAL REPORT

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk



STRENGTHENING PRESENCE

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk terus memperkuat kehadirannya dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk itu, PGN menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkokoh keberadaannya di tengah pasar yang dinamis.

Selama tahun 2023, PGN telah menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi, baik melalui ekspansi infrastruktur, peningkatan kapabilitas teknologi, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan, maupun secara konsisten menambah portofolio pelanggan baru untuk mencapai target volume pengelolaan gas bumi. Beragam inisiatif yang telah dilakukan mencerminkan tekad PGN untuk tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri, tetapi juga menjelajahi peluang baru dan memimpin perubahan di bidangnya.

PGN akan terus menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan fokus penguatan fundamental dan inovasi, PGN siap mengukir masa depan energi yang mengedepankan keberlanjutan.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is committed to continuing to strengthen its presence in the natural gas transmission and distribution sector. To that end, PGN is implementing strategic and innovative measures to strengthen its presence in a dynamic market.

Throughout 2023, PGN has made various efforts to increase its presence, both through infrastructure expansion, improvement of its technological capabilities, strategic collaboration with stakeholders and consistently adding new customer portfolios to achieve the target volume of natural gas management. The various initiatives that have been undertaken reflect PGN's determination to not only be a major player in the industry, but also to explore new opportunities and lead change in its field.

PGN will continue to deliver value to customers, stakeholders and society at large. With a focus on strengthening fundamentals, innovation and sustainability, PGN is ready to build a more sustainable energy future.

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

2019



OPEN TO THE WORLD

Di tahun 2019, PGN membangun pengalaman bisnisnya untuk mengembangkan hubungan secara global. Bermula dari menyediakan energi baik untuk negeri, kemudian PGN siap untuk meluaskan bisnisnya di ranah global. Upaya ini kemudian menjadi tema Laporan Tahunan PGN 2019 yaitu "*Open to the World*".

In 2019, PGN built on its business experiences to develop relations globally. Initially providing good energy for the country, the PGN was then ready to expand its business on a global scale. This effort later became the theme of the PGN's 2019 Annual Report, "Open to the World".

2020



ANSWERING THE CHALLENGES

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi PGN karena berbagai dinamika yang terjadi. Namun, tantangan bukanlah halangan, juga bukan situasi yang dihadapi dengan keluhan, apalagi menyerah. PGN menyikapi tantangan sebagai bagian dari proses perjalanan. Tantangan yang ada menjadi wahana mengasah kemampuan, inovasi, dan kesiapan seluruh Perwira PGN untuk menjawabnya. Tak sekadar untuk melewatinya dengan selamat, juga menjadikannya sebagai pijakan untuk berkembang.

The year 2020 was quite a challenging year for PGN due to various dynamics that occurred. However, challenges are not obstacles, nor situations to be faced with complaints, let alone with giving up. The PGN deals with the challenges as part of a journey process. Those challenges serve as a medium for honing skills, innovation, and the readiness of all PGN employees to answer them. Not only to get through the challenging situations safely, but we are also committed to treating them as a foothold for further development.

2021



GREATER COLLABORATION STRONGER SYNERGY

Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), PGN berkomitmen membangun jaringan gas bumi di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2021, semangat "*One Energy, One* Pertamina" diwujudkan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik demi masa depan berkelanjutan yang sejahtera. Kini saatnya, PGN memantapkan langkah, menyongsong tantangan ke depan dengan percaya diri serta bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih kuat.

As a Gas Subholding company and part of PT Pertamina (Persero) Oil and Gas Holding, PGN is committed to establishing natural gas networks in various regions. Throughout 2021, the spirit of One Energy, One Pertamina is manifested by promoting synergy and collaboration to support the Government in providing better energy sources for a prosperous and sustainable future. It is now time for PGN to steady its steps, face future challenges with confidence, and transform to become better, bigger, and stronger.

2022



GROWING TOWARDS ENERGY SOLUTION

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki peran penting dalam upaya memastikan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui upaya memperkuat pasokan dan memperluas pembangunan infrastruktur gas bumi. PGN sebagai *Subholding Gas*, juga memiliki peran pada masa transisi energi Indonesia menuju *Net Zero Emission* (NZE) di 2060. Gas bumi yang memiliki sifat pembakaran lebih bersih dibandingkan energi lain, dapat menurunkan emisi hingga 40% dan akan menjadi salah satu solusi untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia hingga 377 ton CO2 pada 2035. Untuk mendukung upaya tersebut, selama tahun 2022 PGN terus melakukan terobosan bisnis, mengembangkan infrastruktur serta peningkatan pemanfaatan gas bumi menuju Perusahaan yang menyediakan solusi energi bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk sektor komersial, industri, kelistrikan, transportasi dan rumah tangga.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) plays an important role in ensuring national energy resilience through efforts to strengthen supply and expand the development of natural gas infrastructure. As a Gas Subholding, PGN also plays a role during Indonesia's energy transition phase toward Net Zero Emission (NZE) by 2060. Natural gas, which has cleaner combustion properties compared to other energies, can reduce emissions by up to 40% and will become one of the solutions to meet the target of Indonesia's emission reduction by up to 377 tons of CO2 in 2035. To support these efforts, throughout 2022 PGN continued to make business breakthroughs, develop infrastructure and increase the utilization of natural gas toward a Company that provides energy solutions for the people of Indonesia, mainly for commercial, industrial, electricity, transportation and household sectors.



2023

STRENGTHENING PRESENCE

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk terus memperkuat kehadirannya dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk itu, PGN menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkokoh keberadaannya di tengah pasar yang dinamis.

Selama tahun 2023, PGN telah menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi, baik melalui ekspansi infrastruktur, peningkatan kapabilitas teknologi, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan, maupun secara konsisten menambah portofolio pelanggan baru untuk mencapai target volume pengelolaan gas bumi. Beragam inisiatif yang telah dilakukan mencerminkan tekad PGN untuk tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri, tetapi juga menjelajahi peluang baru dan memimpin perubahan di bidangnya.

PGN akan terus menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan fokus penguatan fundamental dan inovasi, PGN siap mengukir masa depan energi yang mengedepankan keberlanjutan.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is committed to continuing to strengthen its presence in the natural gas transmission and distribution sector. To that end, PGN is implementing strategic and innovative measures to strengthen its presence in a dynamic market.

Throughout 2023, PGN has made various efforts to increase its presence, both through infrastructure expansion, improvement of its technological capabilities, strategic collaboration with stakeholders and consistently adding new customer portfolios to achieve the target volume of natural gas management. The various initiatives that have been undertaken reflect PGN's determination to not only be a major player in the industry, but also to explore new opportunities and lead change in its field.

PGN will continue to deliver value to customers, stakeholders and society at large. With a focus on strengthening fundamentals, innovation and sustainability, PGN is ready to build a more sustainable energy future.

DAFTAR ISI
Contents

2 KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

4 DAFTAR ISI
Contents

12 IKHTISAR CAPAIAN 2023
Performance Highlights 2023

14 TUJUH PROGRAM GASIFIKASI NASIONAL
Seven National Gasification Programs

01. KILAS KINERJA
Performance Highlights

20 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Important Financial Data Highlights

22 KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

24 KINERJA OPERASIONAL
Operational Performance

26 KINERJA SAHAM
Stock Performance

28 AKSI KORPORASI
Corporate Action

28 PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/ PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM
Temporary Suspension of Shares Trading/Delisting of Shares

29 KINERJA OBLIGASI
Bond Performance

30 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

42 PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023

02. LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

56 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

- 56 TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI
  Macroeconomic and Industrial Review
- 58 PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI
  Assessment of the Board of Directors' Performance
- 61 PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI
  Oversight of Strategy Execution by the Board of Directors
- 61 FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI
  Oversight and Advisory Functions to the Board of Directors
- 62 PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI
  Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors
- 64 PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KEBERLANJUTAN
  Our View of the Implementation of Governance and Sustainability
- 65 PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
  Assessment of Performance of Our Supporting Committees
- 66 PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
  Changes in the Composition of the Board of Commissioners
- 67 PENUTUP
  Closing

71 LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

- 72 TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI
  Macroeconomic and Industrial Review
- 74 STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
  Strategy and Strategic Policies
  - 76 Peranan Direksi dalam Perumusan Serta Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Strategis
    Our Role as the Board of Directors in the Formulation and Execution of Strategies and Strategic Policies
  - 76 Proses Penerapan Strategi dan Kebijakan Strategis yang Efektif
    The Process of Effective Strategy and Strategic Policy Implementation
- 77 PENCAPAIAN KINERJA 2023
  2023 Achievements
  - 79 Perbandingan Kinerja Keuangan *Year on Year*
    Year on Year Comparison in Financial Performance
  - 80 Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan
    Comparison Between Achieved and Targeted Results
  - 81 Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Mitigasinya
    Challenges Faced and Mitigation Measures
- 83 PROSPEK USAHA
  Business Prospect
- 86 PENERAPAN TATA KELOLA
  Governance Practice
- 88 PENERAPAN NILAI KEBERLANJUTAN
  Applying Sustainability Values
- 90 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
  Increased Use of Domestic Products (P3DN)
- 91 PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI
  Changes in the Composition of Board of Directors Members
- 93 PENUTUP
  Closing

96 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Liability Statement Letter

- 96 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
  Statement of the Board of Commissioners on Responsibility for the 2023 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
- 97 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
  Statement of the Board of Directors on Responsibility for the 2023 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk

03. PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

100 **SEKILAS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**
About PT Perusahaan Gas Negara Tbk

101 **RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN**
Brief History of the Company

102 **PERKEMBANGAN BISNIS PERUSAHAAN**
Development of the Company's Business

104 **LOGO PERUSAHAAN**
Company Logo

106 **VISI DAN MISI**
Vision and Mission

- 106 **VISI**
  Vision
- 106 **MISI**
  Mission

107 **BUDAYA PERUSAHAAN**
Corporate Culture

108 **BIDANG USAHA**
Nature of Businesses

- 108 **KEGIATAN USAHA**
  Business Activites
- 111 **PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN**
  Products or Services
- 112 **SUBHOLDING GAS**
  Gas Subholding
  - 113 **Lingkup Bisnis Subholding Gas**
    Gas Subholding's Scope of Businesses
  - 114 **Penyedia Solusi Energi Terintegrasi**
    Provider of Integrated Energy Solution

116 **PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL**
Operator of National Natural Gas Infrastructures

117 **WILAYAH OPERASI PGN**
PGN Operation Regions

118 **STRUKTUR ORGANISASI**
Organizational Structure

119 **STRUKTUR USAHA**
Bussiness Structures

120 **PROFIL DEWAN KOMISARIS**
Profile of the Board of Commissioners

126 **PROFIL DIREKSI**
Profile of the Board of Directors

132 **PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PGN SELAMA TAHUN BUKU 2023 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2023**
Changes in the Composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners During the 2023 Fiscal Year and After the 2023 Fiscal Year

133 **PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS**
Profile of Gas Subholding Employees

- 134 **JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA**
  Number of Gas Subholding Employees by Education and Ages
- 135 **JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN**
  Number of Gas Subholding Employees by Position Group and Employment Status
- 136 **JAMINAN KESETARAAN GENDER DAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GENDER**
  Gender Equality Guarantee and the Number of Employees by Genders

137 **PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS***
The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

144 **KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**
Occupational Health and Safety Policies

145 **INFORMASI PEMEGANG SAHAM**
Information of Shareholders

149 **STRUKTUR SUBHOLDING GAS**
Subholding Gas Structure

150 **INFORMASI ENTITAS ANAK DAN AFILIASI**
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

157 **KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM**
Chronology of Share Listing

- 157 ***MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN* (MSOP/ESOP)**
  Management and Employee Stock Option Plan (MSOP/ESOP)
- 157 **PEMECAHAN SAHAM**
  Stock Split
- 158 **PEMBELIAN SAHAM KEMBALI**
  Share Buyback

161 **KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI**
Chronology of Bond Listing

- 161 **UTANG OBLIGASI PGN**
  PGN Bonds Payable
- 161 **UTANG OBLIGASI SEI**
  SEI Bonds Payable

163 **NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**
Name and Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions

- 163 **KANTOR AKUNTAN PUBLIK**
  Public Accounting Firm
- 163 **BIRO ADMINISTRASI EFEK**
  Securities Administration Bureau
- 164 **BURSA EFEK INDONESIA**
  Indonesia Stock Exchange
- 164 **LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK**
  Securities Rating Agency
- 165 **LEMBAGA PEMERINGKAT ESG RISK RATING**
  ESG Risk Rating Agency

165 **DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI**
List of Association Memberships

166 **INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN**
Information on Company's Website

04. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

170 TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI
Macroeconomic and Industrial Overview

172 TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

172 SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI
Trading and Transmission Business Segment

178 SEGMEN USAHA EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS
Oil and Gas Exploration and Production Business Segment

180 SEGMEN USAHA LAINNYA
Other Business Segments

184 URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

185 LAPORAN LABA RUGI
Income Statement

185 Pendapatan
Income

186 Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue

186 Laba Bruto
Gross Profit

186 Beban Umum dan Administrasi
General and Administrative Expenses

187 Laba Operasi
Operating Profit

187 Pendapatan Keuangan
Financial Income

187 Beban Keuangan
Financial Expenses

187 Laba/(Rugi) Selisih Kurs
Profit/(Loss) Exchange Difference

187 Bagian Laba Ventura Bersama
Joint Venture Profit Share

188 Pembalikan/(Provisi) Atas Sengketa Pajak
Reversal/(Provision) for Tax Disputes

188 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Profit/(Loss) Before Income Tax

188 Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense

189 Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income/(Loss)

189 Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

189 Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

190 Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity

190 Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests

190 LAPORAN POSISI KEUANGAN
Statement of Financial Position

190 Total Aset
Total Assets

190 Aset Lancar
Current Assets

191 Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

191 Liabilitas
Liabilities

192 Liabilitas Jangka Pendek
Short-term Liabilities

192 Liabilitas Jangka Panjang
Long Term Liabilities

193 Ekuitas
Equity

193 LAPORAN ARUS KAS
Cash Flow Statement

195 KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
Ability to Pay Debt

195 TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Receivables Collectibility Level

196 STRUKTUR MODAL
Capital Structure

197 IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Material Commitment for Capital Expenditure

198 REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
Realization of Capital Expenditure

200 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Report Date

201 PROSPEK USAHA
Business Outlook

208 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2023
Comparison of Target and Realization 2023

209 ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/ PRODUKSI DAN PEMASARAN
Analysis of Operations/ Production and Marketing Realization Achievement

210 ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/RUGI
Analysis of Profit/Loss Realization Achievement

210 ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM
Analysis of HR Development Achievements

211 RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG
Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year

214 ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

214 PANGSA PASAR
Market Share

215 PROFIL PELANGGAN
Customer Profile

216 PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN
Adjustment of PGN Natural Gas Selling Price

217 **PERBANDINGAN DAYA SAING HARGA JUAL GAS BUMI PGN DENGAN BAHAN BAKAR LAIN**
Comparison of Competitiveness of PGN Natural Gas Selling Prices with Other Fuels

221 **STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN**
Marketing Communication Strategies

223 **PENGEMBANGAN PRODUK**
Product Development

225 ***POSITIONING* PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN**
Product Positioning in the Market and Consumers

225 **ALOKASI DANA/BIAYA PEMASARAN/BIAYA PENGELOLAAN PELANGGAN DAN EFISIENSI**
Allocation of Funds/ Marketing Costs/ Customer Management Fees and Efficiency

227 **TEKNOLOGI INFORMASI**
Information Technology

227 **FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS**
Strategic Focus and Policy

227 **PROGRAM KERJA UTAMA**
Primary Program

228 **PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK AKSES INFORMASI PERUSAHAAN**
Utilization of Technology to Access Company Information

229 **TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER**
Information Technology Governance and Cyber Security

230 **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI**
Development of HR Competence in Information Technology

230 **RENCANA DAN STRATEGI 2024**
Plans and Strategies for 2024

231 **KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN**
Dividend Payment Policy

231 **PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN**
Announcement and Payment of Dividends

232 **REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

233 **INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL**
Material Informationi Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

236 **INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI**
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions

238 **PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Amendments to Laws and Regulations

241 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**
Changes in Accounting Policies

243 **KONTRIBUSI KEPADA NEGARA**
Contribution to the Country

244 **PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN**
Achievement of KPIs and Company Health Level

245 **INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA**
Information on Business Continuity

245 **HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA**
Factors with Significant Impact Potentials on Business Continuity

245 **ASESMEN MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA**
Management Assessment to Manage Potentials with Significant Influence on Business Continuity

246 **ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN**
Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

247 **ASESMEN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN TERHADAP PENGARUH TERSEBUT**
Management Assessments and Decisions Regarding these Influences

05. TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

250 **TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Corporate Governance

250 **PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**
Implementation of Good Corporate Governance

250 **DASAR HUKUM**
Legal Basis

251 **KILAS BALIK GCG**
GCG Milestones

255 **TUJUAN PENERAPAN GCG**
Objectives of GCG Implementation

256 **PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**
Good Corporate Governance Principles

257 **STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Corporate Governance Structure

257 **KEBIJAKAN GCG DI PGN**
GCG Policy at PGN

259 **MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG PGN**
Strengthening GCG Implementation at PGN

260 **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**
General Meeting of Shareholders (GMS)

260 **PEMEGANG SAHAM**
Shareholders

260 **Hak Pemegang Saham**
Shareholders' Rights

262 **Tanggung Jawab Pemegang Saham**
Shareholders' Responsibilities

263 **PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2022**
Implementation of the 2022 GMS

268 **PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023**
GMS Implementation in 2023

278 **DEWAN KOMISARIS**
Board of Commissioners

278 **TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**
Responsibilities of the Board of Commissioners

279 **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS**
Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners

280 ***BOARD MANUAL* KOMISARIS**
Board Manual of the Board of Commissioners

280 **RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN**
Concurrent Positions and Conflicts of Interest

281 **PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS**
Implementation of Duties of the Board of Commissioners

284 **PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS**
Determination of Remuneration of the Board of Commissioners

286 **RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Meeting of the Board of Commissioners and Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

298 **PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**
Performance Assessment of the Company's Board of Commissioners

300 **PENILAIAN KINERJA DIREKSI PERSEROAN**
Performance Assessment of the Company's Board of Directors

301 **PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS**
Assessment on the Performance of Committees of the Board of Commissioners

303 **KOMISARIS INDEPENDEN**
Independent Commissioners

303 **KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN**
Criteria for the Appointment of Independent Commissioners

304 **KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN**
Composition and Membership of Independent Commissioners

305 **PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN**
Independence Statement of Independent Commissioners

306 **DIREKSI**
Board of Directors

306 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI**
Scope of Works and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

309 ***BOARD MANUAL* DIREKSI**
Board Manual of the Board of Directors

310 **RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI**
Concurrent Positions and Conflicts of Interest of the Board of Directors

310 **PROSEDUR DAN DASAR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI**
Procedures and Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

312 **RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI**
Meetings and Decisions of the Board of Directors

334 **PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI**
Assessment on Performance of Committees under the Board of Directors

335 **PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors

335 **KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Policy on Training and/or Competency Improvement of the Board of Commissioners and Board of Directors

335 **PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023**
Training and/or Competency Improvement of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

339 **KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU**
Policy on Introduction Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

339 **PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2023**
Introductory Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

340 **KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

342 **HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI**
Affiliated Relationship Among Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

343 **KOMITE-KOMITE**
Committees

343 **KOMITE AUDIT**
Audit Committee

352 **KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**
Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

364 **KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA**
Risk Management and Business Development Monitoring Committee

374 **SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS**
Board Of Commissioners Secretary

375 **PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS**
Training Programs for the Board of Commissioners Secretary

375 **PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2023**
Duties of the Board of Commissioners Secretary 2023

376 **SEKRETARIS PERUSAHAAN**
Corporate Secretary

376 **FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB *CORPORATE SECRETARY***
Functions and Responsibilities of the Corporate Secretary

377 **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CORPORATE SECRETARY***
Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

377 **STRUKTUR ORGANISASI**
Organizational Structure

378 **PELAKSANAAN TUGAS *CORPORATE SECRETARY* TAHUN 2023**
Implementation of Corporate Secretary Duties in 2023

379 **KETERBUKAAN INFORMASI**
Disclosure of Information

379 **PROGRAM PELATIHAN *CORPORATE SECRETARY***
Training Program for Corporate Secretary

380 **INTERNAL AUDIT**
Internal Audit

380 **PROFIL *CHIEF AUDIT EXECUTIVE***
Profile of Chief Audit Executive

380 **DASAR PENGANGKATAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE***
Basis of Appointment of the Chief Audit Executive

381 **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE***
Appointment and Dismissal of Chief Audit Executive

381 **KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN**
Position of Internal Audit in the Company's Structure

381 **PIAGAM AUDIT**
Audit Charter

382 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
Duties and Responsibilities

382 **Tugas**
Duties

382 **Tanggung Jawab**
Responsibilities

383 **Wewenang**
Authority

384 **KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DENGAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT**
Policy and Implementation of Meeting Frequency with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

384 **JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT**
Number of Internal Audit Personnel

384 **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**
Competency Development of Human Resources

385 **SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT**
Internal Audit Professional Certification

385 **PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2023**
Implementation of Internal Audit Activities During 2023

386 **TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT**
Follow-Up to Audit Recommendations

388 **PENDAMPINGAN AUDITOR EKSTERNAL**
Assistance for External Auditors

388 **LAIN-LAIN**
Others

388 **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Internal Control System

388 **KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Conformity of the Internal Control System

389 **PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN**
Financial and Operational Control, as well as Compliance with Legislations

389 **KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018**
Conformity of Internal Control System with ISO 31000:2018

389 **EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Evaluation on the Effectiveness of the Internal Control System

390 **PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

391 **FUNGSI KEPATUHAN**
Compliance Function

392 **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
Procurement of Goods and Services

394 **KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI**
Anti-Bribery and Corruption Policy

394 **PROGRAM DAN PROSEDUR**
Programs and Procedures

395 **PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI**
Anti-corruption Training/Sosialization

396 **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**
Gratification Control

396 **PENGELOLAAN GRATIFIKASI**
Gratification Management

397 **ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI**
Ethics Related to Gratification

397 **LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2023**
Gratification Control Report 2023

397 **BUDAYA ANTI GRATIFIKASI**
Anti-Gratification Culture

398 **PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM**
Prevention against Insider Trading

399 **PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**
Management of State Officials' Wealth Reports

399 **KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN**
State Officials' Wealth Reports (LHKPN) Submission and Management Policy

399 **WAJIB LAPOR LHKPN**
LHKPN Compulsory Report

399 **PENGELOLA LHKPN PGN**
PGN LHKPN Management

399 **PELAKSANAAN LHKPN TAHUN 2023**
LHKPN Implementation in 2023

400 **SISTEM MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management System

400 **PROFIL DIVISION HEAD RISK MANAGEMENT**
Profile of Division Head Risk Management

401 **TUGAS SATUAN KERJA RISK MANAGEMENT**
Risk Management Working Unit Duties

402 **TUGAS DAN FUNGSI *RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM***
Risk Management Champions Team Duties and Functions

403 **IMPLEMENTASI *FRAMEWORK* ISO 31000:2018**
Implementation of ISO 31000:2018 Framework

403 **PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management Information Systems Development

404 **EVALUASI ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management System Evaluation

405 ***ROADMAP* PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management Roadmap

406 **SERTIFIKASI PERSONEL**
Personnel Certification

406 **PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN**
Risk Management in the Company

407 **STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management Governance Structure

408 **PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN**
Program to Improve Company's Risk Awareness Culture

409 **IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS**
Business Continuity Management System Implementation

410 **PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO**
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

412 **PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI**
Legal Cases

418 **INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF**
Information on Administrative Sanctions

419 **PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN SERTA ASPEK KEBERLANJUTAN**
Management and Control of Tax and Sustainability Aspects

420 KODE ETIK PERUSAHAAN
Company's Code of Ethics

420 POKOK-POKOK KODE ETIK
Code of Ethics Principles

422 PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI
Code of Ethics Commitments for All Levels

422 PENYEBARLUASAN KODE ETIK
Code of Ethics Dissemination

423 UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK
Code of Ethics Implementation and Enforcement Efforts

423 SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK
Sanctions for Code of Ethics Violation

423 PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2023
Violation of the Code of Ethics and Sanctions in 2023

423 *MONITORING* DAN EVALUASI
Monitoring and Evaluation

424 PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN
PGN Corporate Culture Development and Employee Engagement Improvement

427 PROGRAM ESOP/MSOP
ESOP/MSOP Program

428 URAIAN SINGKAT KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN
Brief Description of Management Share Ownership Disclosure Policy

429 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
Whistleblowing System

429 CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN
Mechanism to Submit Violation Report

430 PROSES *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
Whistleblowing System Process

431 PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*
Protection for Whistleblowers

432 PENANGANAN PENGADUAN
Handling of Complaints

433 PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN
Parties Authorized to Manage Reports

434 HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA
Complaint Handling and Follow-up Results

434 PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2023
Complaints via the Whistleblowing System in 2023

435 PENYUSUNAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements Preparations

436 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN
Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

436 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN
Transparency of Company's Financial Conditions

436 TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN
Transparency of Company Non-Financial Conditions

437 PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
Conflict of Interest Guidelines

439 AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor

439 PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor Appointment Process

441 JASA LAIN
Other Services

442 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data

444 PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance

444 PENERAPAN PARAMETER BUMN
BUMN (State-Owned Enterprises) Parameters Implementation

445 PENERAPAN PARAMETER ACGS (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD)
Implementation of ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) Parameters

447 PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

458 PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)
Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

485 RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2024
GCG Strengthening Plan for 2024

06. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

488 IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance Highlights

490 IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN
Sustainability Implementation

493 PILAR LINGKUNGAN
Environmental Pillar

495 PILAR SOSIAL
Social Pillars

498 PILAR TATA KELOLA
Governance Pillar

07. LAPORAN KEUANGAN
Financial Statement

500 LAPORAN KEUANGAN
Financial Statement

08. REFERENSI
References

748 REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

767 LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Appendix VII - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises



IKHTISAR CAPAIAN 2023
Performance Highlights 2023

Dalam dua tahun terakhir *trend* kenaikan Dividen *Payout Ratio* dan *Dividend Yield* mencerminkan komitmen kami dalam memberikan nilai kompetitif kepada pemegang saham namun juga menandai tingkat kesehatan keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan masa depan Perusahaan.

In the last two years, the upward trend in the Dividend Payout Ratio and Dividend Yield reflects our steadfast commitment to provide competitive value to shareholders while marking the Company's strong and healthy finance and future growth prospects.

Tren Dividen *Payout Ratio* Dua Tahun Terakhir
Trends in Dividend Payout Ratio Over the Last Two Years

>60%

Tren Dividen *Yield* Dua Tahun Terakhir
Dividend Yield Trends Over the Last Two Years

>7%

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
The Soundness Level

Peringkat Berdiri Sendiri
Stand Alone Rating

aa(idn)-stable

Peringkat Akhir
Final Rating

AA+(idn)-stable

Tingkat Kesehatan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada Tahun Buku 2023
The Soundness Level for PT Perusahaan Gas Negara Tbk in Financial Year 2023

AAA **Sangat Sehat**
Excellent Soundness

PENINGKATAN VOLUME NIAGA, TRANSMISI GAS, TRANSPORTASI MINYAK
Larger Volume of Commercial, Gas Transmission, Oil Transportation

3% **8%** **305%**

Volume Niaga, Transmisi Gas dan Transportasi Minyak meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan volume transmisi eksisting & peningkatan gas bumi dari lapangan Jambangan Tiung Biru melalui pipa transmisi Gresik-Semarang, serta beroperasinya secara penuh pipa minyak Rokan.

Trading Volume, Gas Transmission and Oil Transportation increased in line with economic recovery, increased existing transmission volume & increased natural gas from the Jambangan Tiung Biru field via the Gresik-Semarang transmission pipeline, and as the Rokan oil has pipeline commenced operations in full.

TATA KELOLA
Governance

PUGKI
APPLY UNTUK "SELURUH PRINSIP".
"All Principles" applied

Adoption Rate ACGS
ACGS Adoption Rate

72,73%
(dari standar yang diharapkan untuk diterapkan dan melebihi standar minimum dari maksimal 193)
(of the standards expected to be applied and above the minimum standards of a maximum of 193)

OJK
FSA

Comply untuk seluruh aspek
Fully Complied

KEPUASAN PELANGGAN
Customer Satisfaction

Indeks kepuasan pelanggan – *Customer Satisfaction Index* (CSI)
Customer satisfaction index – Customer Satisfaction Index (CSI)

4,58 **Sangat Baik** Very Good

Indeks Loyalitas Pelanggan – *Customer Loyalty Index* (CLI)
Customer Loyalty Index (CLI)

4,59 **Sangat Baik** Very Good

Indeks Skala 1-5
Scale Index 1-5

Tingkat Keinginan Pelanggan Memberikan Rekomendasi Untuk Menggunakan Produk dan Layanan PGN (*Net Promoter Score*)
Level of Customer Eagerness to Recommend PGN Products and Services (Net Promoter Score)

58,18 **High to promote**

Indeks Skala <-30 - >30
Scale Index <-30 - >30

4 FOKUS KEBERLANJUTAN PGN
4 PGN's Sustainability Focus

1. Mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* melalui peningkatan penggunaan gas bumi pada masa transisi energi;
2. Melindungi alam;
3. Membangun program kemasyarakatan yang kohesif dan tangguh; dan
4. Menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

1. Supporting the achievement of the Net Zero Emission target through more use of natural gas during the energy transition period;
2. Protecting the Nature;
3. Building cohesive and resilient community programs; And
4. Running responsible business.

ESG SCORE
ESG SCORE

24,7

BUDAYA ORGANISASI
Corporate Culture

Sebagai bagian dari *Holding* Migas, PGN turut mengimplementasikan *core values* BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai budaya perusahaan. Perwira *Subholding Gas* yang merupakan sebutan kepada seluruh pekerja PGN Grup berperan penting sebagai *agent of change* dalam mengimplementasikan budaya Perusahaan.

As part of oil and Gas Holding, PGN also implements the core values of SOE AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as a corporate culture. Gas Subholding Perwira, which is another name for all PGN Group's Employees play a significant role as agent of change in implementing the Company culture.

AKHLAK

PENGHARGAAN INTERNASIONAL
International Award

The International Annual Report Competition Awards oleh 2023 International ARC Awards
The International Annual Report Competition Awards given by 2023 International ARC Awards

Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Gas Negara Tbk mendapatkan penghargaan dari ARC *Awards*, Kompetisi Laporan Tahunan Terbesar Dunia, New York, Amerika. Laporan Tahunan Perusahaan mendapat penghargaan:
- *Gold Winner* untuk *Chairman's Letter/ Presentation:Sustainability Report*: Asia/*Pacific*
- *Bronze Winner* untuk *Script/Writing*: *Energy*
- *Honor Winner* untuk *Chairman's Letter/Presentation*: *Energy*

PT Perusahaan Gas Negara Tbk's 2022 Annual Report received an award from the ARC Awards, the World's Largest Annual Report Competition, New York, America. The Company's Annual Report received awards as:
- Gold Winner for Chairman's Letter/ Presentation:Sustainability Report: Asia/Pacific
- Bronze Winner for Script/Writing: Energy
- Honor Winner for Chairman's Letter/Presentation: Energy

KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
Infrastructure Availability

100%

PGN senantiasa mewujudkan *Operation Excellent* melalui upaya implementasi Sistem Manajemen Aset Infrastruktur Gas berbasiskan standar internasional ISO 55001 dan penerapan berbagai Kebijakan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur gas PGN yang merupakan tulang punggung penyaluran gas bumi nasional didukung dengan teknologi yang memadai untuk memastikan operasional infrastruktur dan penyaluran gas dapat berjalan dengan menjamin faktor keamanan, keselamatan, kehandalan dan lingkungan.

PGN senantiasa meninjau kesesuaian untuk memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan demi peningkatan mutu dan layanan operasional infrastruktur serta penyaluran gas.

PGN strives for Operation Excellent through efforts to implement a Gas Infrastructure Asset Management System based on the ISO 55001 international standard and the implementation of various other policies.

The availability of PGN gas infrastructure, which is the backbone of the national natural gas distribution system, is supported by adequate technology to ensure that infrastructure operations and gas distribution can run smoothly while ensuring security, safety, reliability, and environmental factors.

PGN always reviews compliance to ensure continuous improvements to improve the quality and operational services of gas infrastructure and distribution.

LINGKUNGAN
Environment

Limbah
Waste

Penurunan jumlah limbah B3 sebesar 1.039 ton (menurun sebesar 7,09% dari tahun 2022)
A decrease of 1,039 ton of B3 waste (down by 7.09 from the amount in 2022)

Energi
Energy

Penurunan konsumsi energi sebesar 26.203,93 GJ (meningkat sebesar 3,49% dari tahun 2022
A decrease of 26,203.93 GJ in energy consumption (up by 3.49% from the amount in 2022)

Emisi
Emission

Penurunan tingkat emisi sebesar 598,39 Ton CO_2 eq (meningkat sebesar 172% dari tahun 2022)
A decrease of 598.39 Ton CO_2 eq in emission level (up by 172% from the amount in 2022)

PERWIRA SUBHOLDING GAS
Gas Subholding Employees

3.318 **Pekerja**
Employees

0,0108 **Tingkat *Turnover***
Turnover Level

Keterikatan Pegawai
Employee Engagement

4,45 **Indeks Skala 1-5**
Scale Index 1-5

TUJUH PROGRAM GASIFIKASI NASIONAL

Seven National Gasification Programs

SAPTA PGN+

PGN Sayang Ibu PGN Love Mothers



Program pengembangan jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga.

Natural gas network development program for household sector.

PGN Mendukung Industri Khusus
PGN Supports Special Industries



- **Program penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 91.K/2023.**
- **Dukungan penyediaan gas untuk *new captive market* (portofolio hilir pemanfaatan gas bumi).**
- A Natural gas supply program for 7 specific industrial sectors as stipulated in MEMR Decree Number No. 91.K/2023.
- Gas supply support for new captive markets (downstream portfolio of natural gas utilization).

PGN untuk Listrik Nasional
PGN for National Electricity



Program penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL, Keputusan Menteri ESDM No. 135/2021 dan Keputusan Menteri ESDM No. 249/2022.

Natural gas supply program for the electricity sector is in accordance with Electricity Supply Business Plan RUPTL, MEMR Decree Number 135/2021 and MEMR Decree Number 249/2022.

PGN Retail dan Industri Umum
PGN for Retail and General Industries



Program penyediaan gas bumi untuk sektor industri umum melalui pipa maupun non-pipa.
Natural gas supply program for the general industrial sector through pipes and non-pipes.

PGN Sektor Maritim
PGN for Maritime Sector



Program konversi transportasi sektor laut menjadi berbahan bakar LNG.
Conversion Program to LNG Fuel for marine transportation sector.

PGN Sektor Darat
PGN for Land Sector



Program konversi transportasi sektor darat menjadi berbahan bakar LNG.
Conversion Program to LNG Fuel for land transportation sector.

PGN Masuk Desa
PGN Penetrates Villages



Pemanfaatan *pellet* sebagai sumber alternatif energi untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non-pipa PGN (*Enabler Program*).

Utilization of pellets as an alternative energy source for communities located beyond the reach of PGN's pipeline and non-pipeline infrastructure (Enabler Program).

+Going Global
+Going Global



Program pengembangan bisnis PGN di Internasional melalui *trading* serta pengembangan infrastruktur niaga dan pengangkutan gas bumi.

PGN's international business development program through trading and the development of commercial infrastructure and natural gas carriers.

01.

KILAS KINERJA

Performance Highlights





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Important Financial Data Highlights

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Pendapatan	3.646.304.165,00	3.568.594.775,00	3.036.100.956,00	2.885.536.105,00	3.848.717.684,00	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(2.912.724.687,00)	(2.788.052.353,00)	(2.449.252.234,00)	(2.415.518.454,00)	(2.621.348.716,00)	Cost of Revenues
Laba Bruto	733.579.478,00	780.542.422,00	586.848.722,00	470.017.651,00	1.227.368.968,00	Gross Profit
Beban Niaga & Infrastruktur	-	-	-	-	(439.144.207,00)	Trading and infrastructure expenses
Beban Umum & Administrasi	(201.720.154,00)	(198.664.089,00)	(167.098.168,00)	(144.106.334,00)	(269.785.012,00)	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lain-lain	24.623.337,00	29.097.489,00	37.477.725,00	41.956.047,00	62.091.786,00	Other Income
Beban Lain-lain	(14.065.047,00)	(18.800.468,00)	(36.912.649,00)	(64.152.453,00)	(34.197.787,00)	Other Expenses
Laba Operasi	542.417.614,00	592.175.354,00	420.315.630,00	303.714.911,00	546.333.748,00	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(18.530.605,00)	(49.471.093,00)	47.623.265,00	(479.070.456,00)	(266.431.257,00)	Other Income (Expenses)
Laba/(rugi) sebelum Pajak Penghasilan	523.887.009,00	542.704.261,00	467.938.895,00	(175.355.545,00)	279.902.491,00	Profit/(loss) beforeIncome Tax
Beban Pajak Penghasilan	(147.271.108,00)	(141.361.720,00)	(103.404.760,00)	(40.412.269,00)	(166.921.296,00)	Income Tax Expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00	(215.767.814,00)	112.981.195,00	Profit/(loss) for the Year
Jumlah Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	14.934.137,00	(11.436.356,00)	(11.540.867,00)	4.480.897,00	16.801.653,00	Total Other Comprehensive Income/(Loss)
Total Penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00	(211.286.917,00)	129.782.848,00	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the Year
Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Profit/(loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	278.091.179,00	326.239.697,00	303.823.865,00	(264.773.584,00)	67.584.090,00	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	98.524.722,00	75.102.844,00	60.710.270,00	49.005.770,00	45.397.105,00	Non-controlling Interests
Total	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00	(215.767.814,00)	112.981.195,00	Total
Total Penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Total Comprehensive Income/ (Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	293.025.316,00	314.803.341,00	292.213.202,00	(260.154.344,00)	83.701.431,00	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	98.524.722,00	75.102.844,00	60.780.066,00	48.867.427,00	46.081.417,00	Non-controllingInterests
Total	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00	(211.286.917,00)	129.782.848,00	Total
Laba/(rugi) bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Dasar dan Dilusian	0,011	0,013	0,013	(0,011)	0,003	Earning/(Loss) per share attributable to owners of the parent entity – basic anddiluted
EBITDA	1.085.552.739*)	1.218.815.618,00*)	855.001.519,87	696.855.137,55	1.040.191.752,00	EBITDA

*) Memperhitungkan laba/(rugi) selisih kurs dan bagian laba dari ventura bersama
Taking into account the gain/(loss) on foreign exchange and profits from joint ventures

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Total Aset Lancar	1.892.425.055,00	2.212.365.073,00	2.191.174.530,00	2.005.785.786,00	2.204.651.127,00	Total Current Assets
Total Aset Tidak Lancar	4.706.813.414,00	4.982.494.909,00	5.319.774.372,00	5.528.200.609,00	5.169.062.029,00	Total Non-current Assets
Total Aset	**6.599.238.469,00**	**7.194.859.982,00**	**7.510.948.902,00**	**7.533.986.395,00**	**7.373.713.156,00**	**Total Assets**
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.462.417.579 ,00	992.569.575,00	880.909.800,00	1.183.155.336,00	1.123.361.297,00	Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.596.417.511,00	2.760.519.769,00	3.345.114.544,00	3.395.392.204,00	3.016.050.978,00	Total Non-current Liabilites
Total Liabilitas	**3.058.835.090,00**	**3.753.089.344,00**	**4.226.024.344,00**	**4.578.547.540,00**	**4.139.412.275,00**	**Total Liabilities**
Total Ekuitas	**3.540.403.379,00**	**3.441.770.638,00**	**3.284.924.558,00**	**2.955.438.855,00**	**3.234.300.881,00**	**Total Equity**
Belanja Modal	**231.898.089,00**	**214.818.556,00**	**308.609.745,00**	**299.908.000,00**	**218.806.279,00**	**Capital Expenditure**
Modal Kerja Bersih	**430.007.476,00**	**1.219.795.498,00**	**1.310.264.730,00**	**822.630.450,00**	**1.081.289.830,00**	**Net Working Capital**
Jumlah Investasi pada Entitas Lain	**307.204.288,00**	**302.802.841,00**	**338.967.517,00**	**341.091.360,00**	**365.897.864,00**	**Total Investments in Associated**

Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flows

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Arus kas dari aktivitas operasi	723.688.604,00	969.699.872,00	581.705.258,00	416.874.630,00	817.892.001,00	Cash flows from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi	(57.667.488,00)	30.381.919,00	(117.178.339,00)	41.041.668,00	(946.176.927,00)	Cash flows from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(878.205.110,00)	(995.743.678,00)	(133.687.716,00)	(312.509.912,00)	(156.048.185,00)	Cash flows from financing activities
Kas setara kas awal tahun	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00	1.179.044.518,00	1.040.376.489,00	1.315.234.446,00	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas setara kas akhir tahun	1.244.731.682,00	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00	1.179.044.518,00	1.040.376.489,00	Cash and cash equivalents at end of year

Rasio Keuangan
Financial Ratios

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratios						
Current Ratio (X)	1,29	2,23	2,49	1,70	1,96	Current Ratio (X)
Cash Ratio (X)	0,85	1,46	1,71	1,00	0,93	Cash Ratio (X)
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratios						
Gross Profit Margin (%)	20,12	21,87	19,33	16,29	31,89	Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)	7,63	9,14	10,01	(9,18)	1,76	Net Profit Margin (%)
ROE (%)	7,85	9,48	9,25	(8,96)	2,09	ROE (%)
ROA (%)	4,21	4,53	4,05	(3,51)	0,92	ROA (%)
Rasio Pertumbuhan | Growth Ratios						
Sales Growth Rate (%)	2,18	17,54	5,22	(25,03)	(0,56)	Sales Growth Rate (%)
Net Profit Growth Rate (%)	(14,76)	7,38	214,75	(491,77)	(77,84)	Net Profit Growth Rate (%)
Rasio Pemodalan | Leverage Ratios						
Debt to Equity (%)	43,65	62,46	89,82	104,66	83,14	Debt to Equity (%)
Debt to Asset (%)	23,42	29,88	39,28	41,06	56,14	Debt to Asset (%)
Rasio Saham | Stock Price Ratios						
Price to Earning (X)	6,38	8,31	7,69	(10,74)	55,99	Price to Earning (X)
Price to Book Value (X)	0,50	0,79	0,71	0,96	1,17	Price to Book Value (X)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

PENDAPATAN NETO
Net Revenues
Juta USD | Millions USD

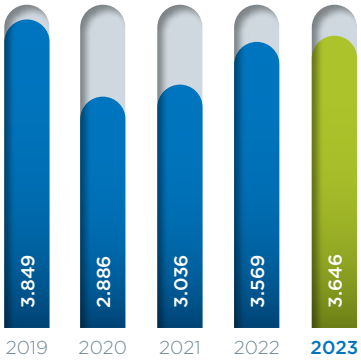

EBITDA
EBITDA
Juta USD | Millions USD

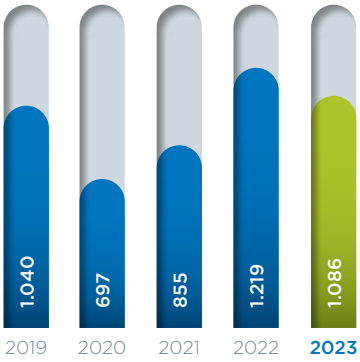

LABA OPERASI
Operating Profit
Juta USD | Millions USD

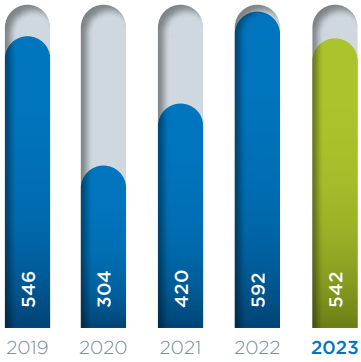

LABA BERSIH*)
Net Profit*)
Juta USD | Millions USD

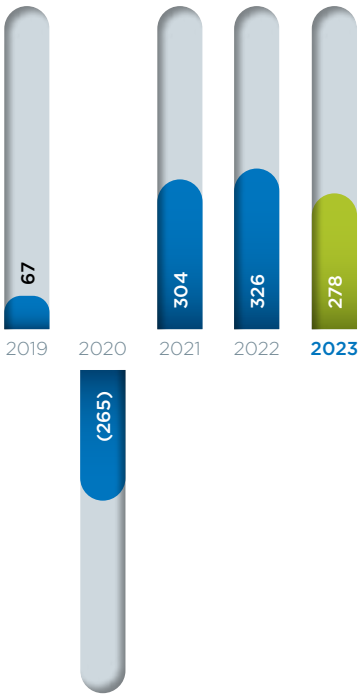

TOTAL ASET
Total Assets
Juta USD | Millions USD

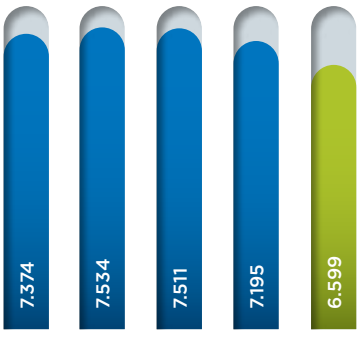

TOTAL LIABILITAS
Total Liabilities
Juta USD | Millions USD

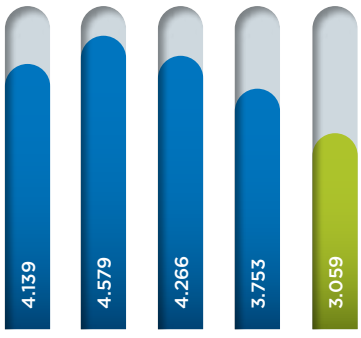

*) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Profit for the year attributable to owners of the parent entity

TOTAL EKUITAS
Total Equities
Juta USD | Millions USD

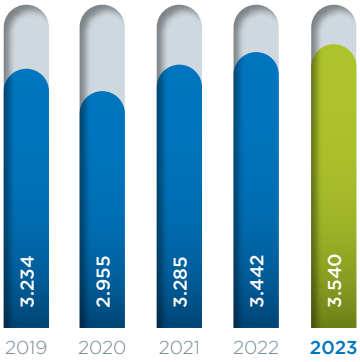

DEBT TO EQUITY RATIO
Debt to Equity Ratio
dalam % | in %

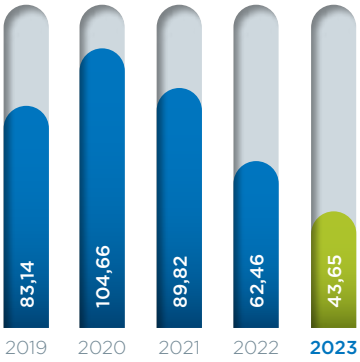

CURRENT RATIO
Current Ratio
dalam X | in X

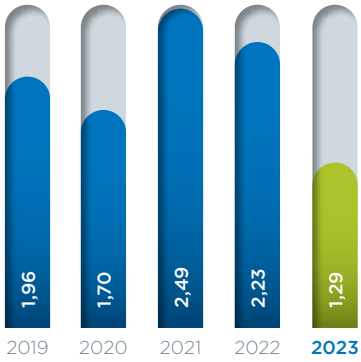

SALES GROWTH RATIO
Sales Growth Ratio
dalam % | in %

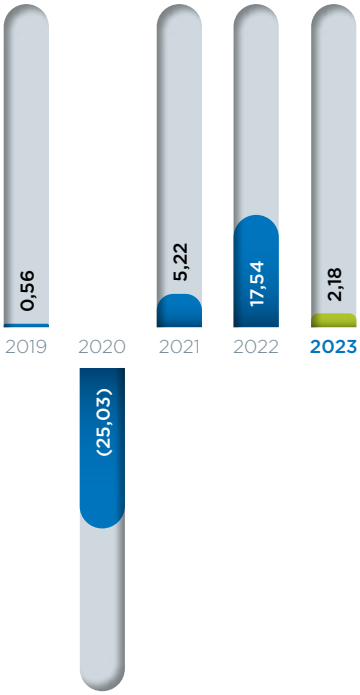

PRICE TO EARNING RATIO
Price to Earning Ratio
dalam X | in X

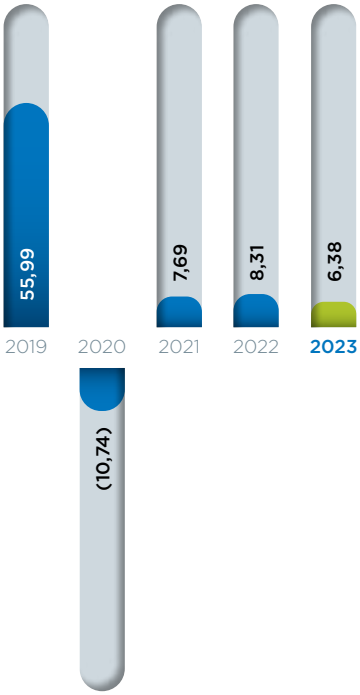

ROE
ROE
dalam X | in X

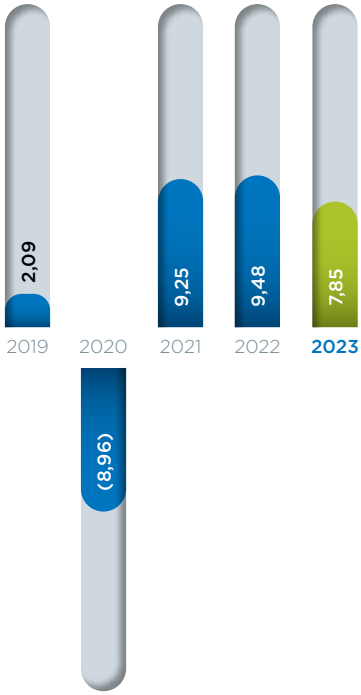

KINERJA OPERASIONAL
Operational Performance

VOLUME DISTRIBUSI
Distribution Volumes
BBTUD | BBTUD

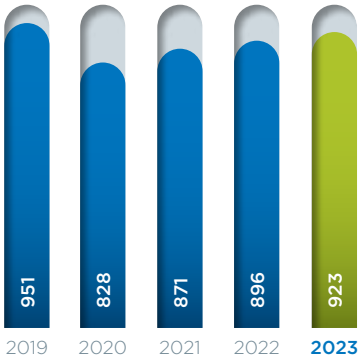

VOLUME *LIFTING*
Lifting Volumes
MMBOE | MMBOE

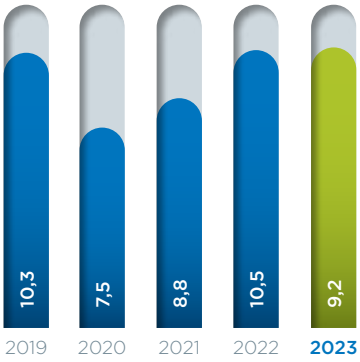

VOLUME TRANSMISI
Transmission Volumes
MMSCFD | MMSCFD

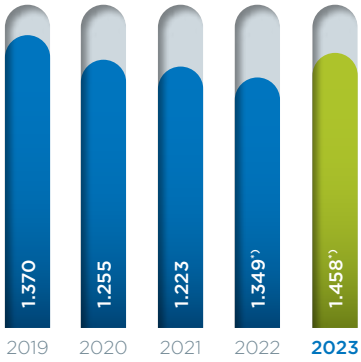

JUMLAH PELANGGAN
Number of Customers
Pelanggan | Customers

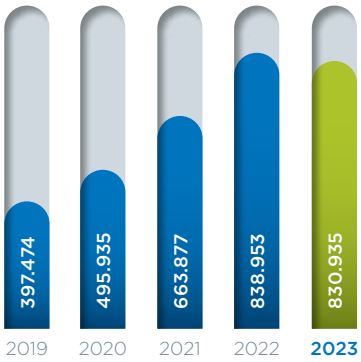

PANJANG PIPA
Pipeline Lengths
Km | Km

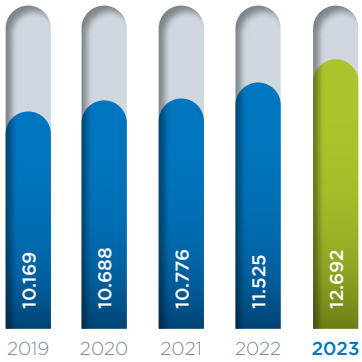

*) Termasuk volume eliminasi.
Include elimination volume.

Portofolio Infrastruktur Pipa Perseroan
Company's Infrastructure Pipeline Portfolio

Dalam Kilometer | In Kilometers

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Distribusi | Distribution						
SOR I	1.294	1.212	1.196	1.187	1.149	SOR I
Medan	676	661	655	649	644	Medan
Pekanbaru	15	15	15	15	15	Pekanbaru
Batam	185	171	166	164	162	Batam
Dumai	80	70	68	67	46	Dumai
Palembang	202	195	194	193	184	Palembang
Lampung	135	100	98	98	98	Lampung
SOR II	4.196	3.236	3.158	3.092	3.026	SOR II
Jakarta	913	782	754	759	751	Jakarta
Bogor	736	660	657	645	639	Bogor
Tangerang	1.090	512	505	482	470	Tangerang
Cilegon	135	124	124	124	117	Cilegon
Bekasi	595	495	487	459	445	Bekasi
Karawang	266	230	216	213	203	Karawang
Cirebon	461	433	414	408	402	Cirebon
SOR III	1.378	1.266	1.259	1.247	1.235	SOR III
Sidoarjo	425	422	419	413	410	Sidoarjo
Pasuruan	221	217	217	216	216	Pasuruan
Surabaya	635	604	606	600	591	Surabaya
Semarang	60	23	18	18	17	Semarang
Bojonegoro	1	0	0	0	0	Bojonegoro
Yogyakarta	37	0	0	0	0	Yogyakarta
SOR IV	3	0	0	0	0	SOR IV
Sorong	1	0	0	0	0	Sorong
Banggai	2	0	0	0	0	Banggai
Total Distribusi	**6.872**	**5.715**	**5.613**	**5.525**	**5.410**	**Total Distribution**
Transmisi | Transmission						
Medan	37	37	37	37	37	Medan
Grissik-Duri	536	536	536	536	536	Grissik-Duri
Grissik-Batam-Singapore	469	469	469	469	469	Grissik-Batam-Singapore
SSWJ	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	SSWJ
Kepodang-Tambak Lorok	201	201	201	201	201	Kepodang-Tambak Lorok
LNG Lampung*)	21	21	21	21	21	LNG Lampung*)
LNG Jakarta*)	15	15	15	15	15	LNG Jakarta*)
Total Transimisi	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**Total Transmission**
Pertagas | Pertagas						
Pipa Gas	2.930	2.896	2.615	2.615	2.212	Gas Pipe
Pipa Minyak	605	629	262	262	262	Oil Pipe
Total Pertagas	**3.535**	**3.525**	**2.877**	**2.877**	**2.474**	**Total Pertagas**
TOTAL INFRASTRUKTUR SUBHOLDING GAS	**12.692**	**11.525**	**10.776**	**10.688**	**10.169**	**TOTAL INFRASTRUCTURE OF GAS SUBHOLDING**

*) Pipa transmisi sebagai bagian fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG
Transmission pipeline as part of LNG receiving and regasification terminal facilities

KINERJA SAHAM
Stock Performance

Pada tahun 2023, pergerakan saham PGN dengan kode saham PGAS dibuka berada pada level Rp1.740. Harga saham PGAS berada pada titik terendah sebesar Rp1.060 pada 18 dan 19 Desember 2023 dan harga tertinggi tercatat sebesar Rp1.770 pada 2 Januari 2023. PGAS masuk ke dalam beberapa indeks seperti LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, BISNIS-27, Sminfra18, *Investor* 33, ISSI, JII, JII70, ESG *Sector Leaders* IDX KEHATI,IDX-MES BUMN 17, IDX BUMN 20, IDX SMC *Composite*, IDX LQ 45 *Low Carbon Leaders*. Likuiditas saham PGAS sangat tinggi dengan rata-rata volume perdagangan harian mencapai 486 ribu lot selama 2023. Sampai dengan 29 Desember 2023, PGAS ditutup pada harga sebesar Rp1.130 dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp27.393 miliar.

In 2023, the movement of PGN shares with stock code PGAS opened at the level of Rp1,740. PGAS share rate is at its lowest point of Rp1,060 on December 18 and 19, 2023 and the highest rate was recorded at Rp1,770 on January 2, 2023. PGAS is included in several indices such as LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, BISNIS-27, Sminfra18, Investor 33, ISSI, JII, JII70, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, IDX-MES BUMN 17, IDX BUMN 20, IDX SMC Composite, IDX LQ 45 Low Carbon Leaders. The liquidity of PGAS shares is very high, with an average daily trading volume of 486 thousand shares in 2023. On 31 December 2023, PGAS closed at Rp1,130 with a market capitalisation value of Rp27,393 billion.

Uraian		2023	2022	2021	2020	2019	Description
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)		24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	Number of Outstanding Shares (million shares)
Kapitalisasi Pasar (RpTriliun)	Q4	27	43	33	40	53	Market Capitalization (trillion Rp)
	Q3	33	37	29	22	51	
	Q2	32	39	24	28	51	
	Q1	33	34	32	19	57	
Volume Perdagangan Rata-rata (Lot)	Q4	391.958	562.979	1.661.361	2.100.650	489.121	Average Trading Volume (lot)
	Q3	572.466	1.143.847	1.122.143	1.179.820	415.214	
	Q2	605.447	1.305.070	1.267.694	1.984.197	448.065	
	Q1	397.913	866.224	2.409.008	766.208	657.086	
Harga Saham Tertinggi (Rp)	Q4	1.420	1.995	1.640	1.895	2.460	Highest Share Price (Rp)
	Q3	1.535	1.990	1.215	1.350	2.300	
	Q2	1.475	1.860	1.345	1.185	2.430	
	Q1	1.770	1.620	1.315	2.200	2.720	
Harga Saham Terendah (Rp)	Q4	1.060	1.720	1.205	920	1.820	Lowest Share Price (Rp)
	Q3	1.310	1.500	960	905	1.775	
	Q2	1.295	1.325	995	730	1.820	
	Q1	1.325	1.260	1.290	605	2.140	
Harga Saham Penutupan (Rp)	Q4	1.130	1.760	1.375	1.655	2.170	Closing Share Price (Rp)
	Q3	1.375	1.535	1.190	925	2.100	
	Q2	1.305	1.590	1.005	1.135	2.110	
	Q1	1380	1405	1315	775	2.350	

Rasio Saham
Stock Price Ratios

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Description
Earning per Share (USD)	0,01	0,01	0,01	(0.01)	0,00	Earning per Share (Rp)
Price to Earning (x)	6,38	8,31	7,69	(10,74)	55,99	Price to Earning (x)
Price to Book Value (x)	0,50	0,79	0,71	0,96	1,17	Price to Book Value (x)
Return on Equity (%)	7,85	9,48	9,25	(8,96)	2,09	Return on Equity (%)
Dividend Payout Ratio (%)	70,00%	67,79%	0,00%	100,00%	40,00%	Dividend Payout Ratio (%)
Dividend Yield (%)	9,73%	7,01%	0,00%	1,85%	2,95%	Dividend Yield (%)

GRAFIK HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME PERDAGANGAN RATA-RATA PERIODE 2019-2023

Graphic of Average Trading Volumes and Closing Price for Period of 2019-2023

Lot | Lot

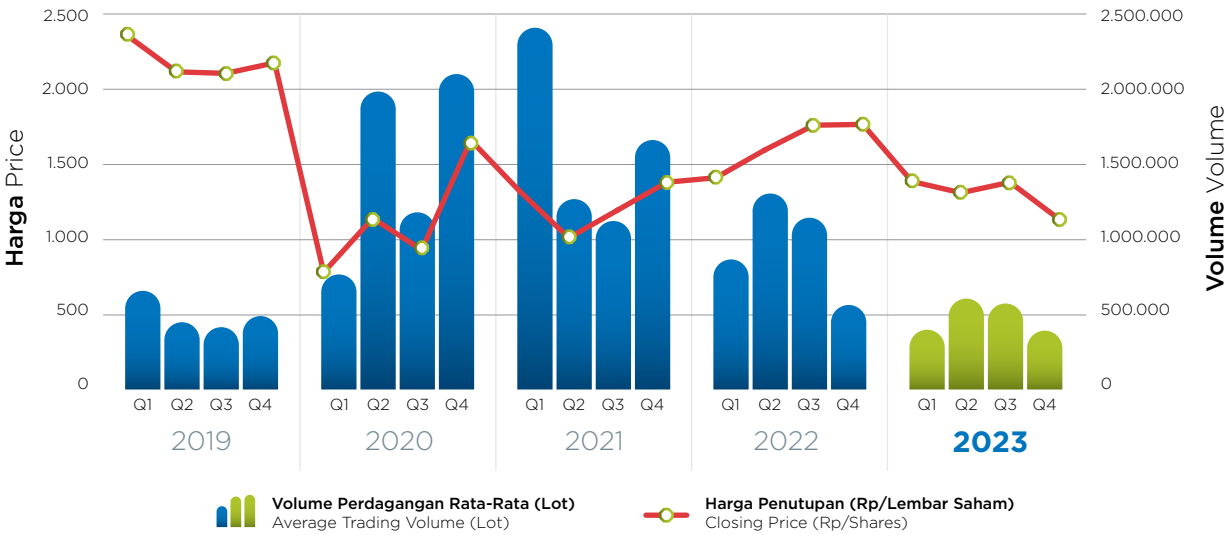

KAPITALISASI PASAR

Market Capitalization

Rp Triliun | Rp Trillion

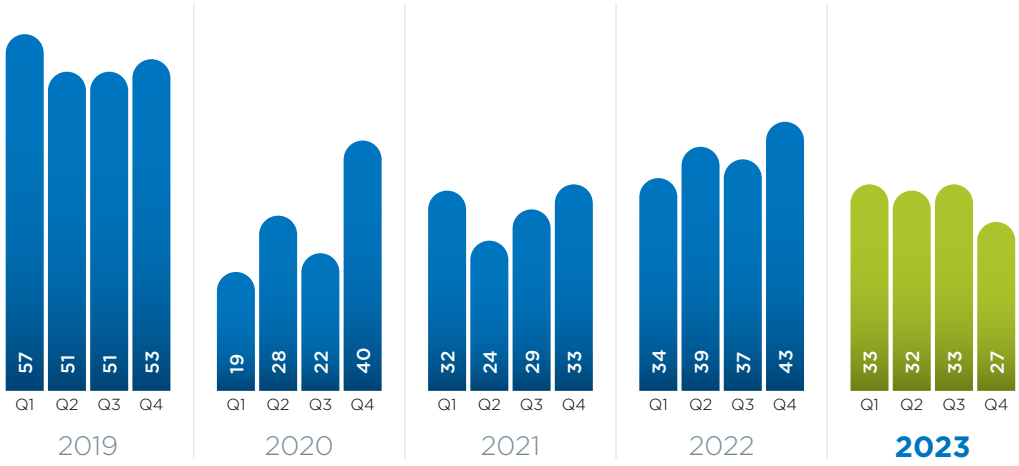

AKSI KORPORASI
Corporate Action

Selama tahun 2023, PGN tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

During 2023, PGN undertook no corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital additions and reductions.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/ PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM
Temporary Suspension of Shares Trading/Delisting of Shares

Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) saham PGAS.

As of the end of the financial year on 31 December 2023, there were no suspension and/or delisting of PGAS shares.

KINERJA OBLIGASI
Bond Performance

Peringkat Kredit Obligasi PGN 2022-2023
PGN Bond's Price Credit Rating 2022-2023

Jenis Efek Type	Nilai Amount	Tingkat Bunga Interest Rates	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Kredit 2022-2023 Credit Rating 2022-2023				
				Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	2023		2022	
					Rating	Outlook	Rating	Outlook
PGN *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*	USD396,709,000	5.125%	16 Mei 2024 May 16, 2024	Moodys	Baa2	Stable	Baa2	Stable
				Fitch	BBB-	Stable	BBB-	Stable

Pergerakan Obligasi PGN dalam 5 Tahun Terakhir
PGN Bond's Movement within the Past Five Years

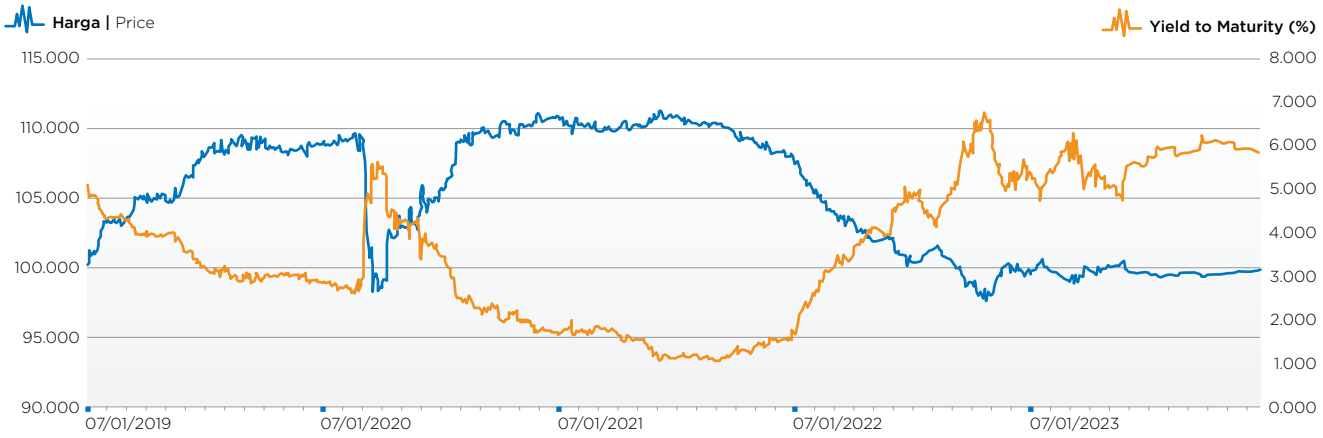

Peringkat Kredit Obligasi SEI 2022-2023
SEI Bond's Price Credit Rating 2022-2023

Jenis Efek Type	Nilai Amount	Tingkat Bunga Interest Rates	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Kredit 2022-2023 Credit Rating 2022-2023				
				Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	2023		2022	
					Rating	Outlook	Rating	Outlook
SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*	USD156,252,000	4.450%	5 Mei 2024 May 5, 2024	Moodys	B2	Stable	B2	Stable
				Fitch	B+	Stable	B+	Negative

Pergerakan Obligasi SEI dalam 5 Tahun Terakhir
SEI Bond's Movement within the Past Five Years

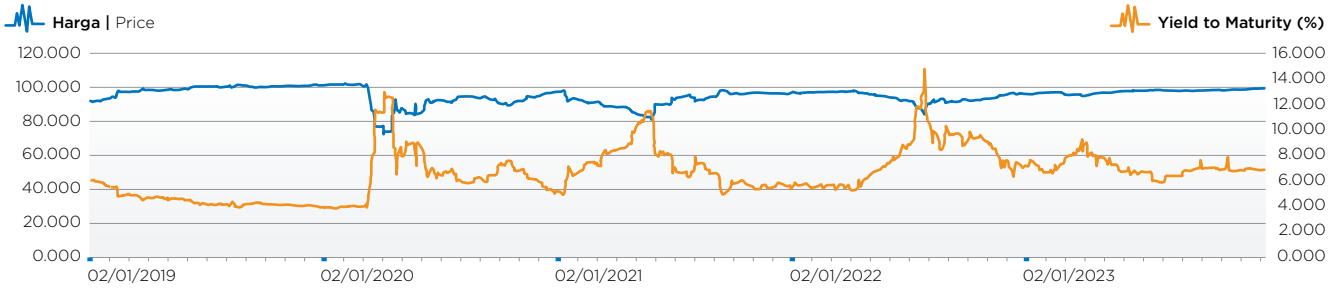

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

PENGHARGAAN
Awards

AJANG PENGHARGAAN LAPORAN TAHUNAN *ANNUAL REPORT AWARD* (ARA) 2022
Annual Report Award (ARA) 2022

Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)
By the National Committee on Governance Policy (KNKG)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk berhasil meraih Juara 2 untuk kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan. Hal ini diraih berkat konsistensi PGN dalam mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2022.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk won 2nd place in the Non-Financial State-Owned Company category. This was achieved thanks to PGN's consistency in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as disclosed in the 2022 Annual Report and Sustainability Report.



THE INTERNATIONAL ANNUAL REPORT COMPETITION AWARDS
The International Annual Report Competition Awards



Oleh 2023 International ARC Awards
By 2023 International ARC Awards

Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Gas Negara Tbk mendapatkan penghargaan dari ARC *Awards*, Kompetisi Laporan Tahunan Terbesar Dunia, New York, Amerika. Laporan Tahunan Perusahaan mendapat penghargaan:
- *Gold Winner* untuk *Chairman's Letter/Presentation*:*Sustainability Report*: Asia/*Pacific*
- *Bronze Winner* untuk *Script/Writing*: *Energy*
- *Honor Winner* untuk *Chairman's Letter/Presentation*: *Energy*.

The 2022 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk was honoured by the ARC Awards, the World's Largest Annual Report Competition, New York, USA. The Company's Annual Report was awarded:
- Gold Winner for Chairman's Letter/Presentation: Sustainability Report: Asia/Pacific
- Bronze Winner for Script/Writing: Energy
- Honor Winner for Chairman's Letter/Presentation: Energy.

TAX GATHERING
Tax Gathering



Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
By Tax Services Office (KPP)

PGN meraih dua penghargaan pada acara *Tax Gathering*, yakni:
- Wajib Pajak *Holding* atau *Subholding* Pendukung Kepatuhan Grup Usaha Tahun 2022
- Wajib Pajak dengan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa Terbaik Tahun 2022.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap Wajib Pajak yang telah berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pajak, serta penguatan sinergi dan kerjasama KPP dengan Wajib Pajak.

PGN won two awards at the Tax Gathering event, namely:
- Taxpayers of Holding or Subholding Supporting Business Group Compliance in 2022
- Taxpayers with the Best Annual and Periodic Tax Return Submission Compliance in 2022.

This award is a form of appreciation for taxpayers who have contributed in carrying out tax obligations, as well as strengthening the synergy and cooperation between the Tax Office and taxpayers.

ANUGERAH BUMN 2023
Anugerah BUMN 2023

Oleh Media BUMN Track
By SOE Media Track

PGN mendapatkan penghargaan Anugerah BUMN 2023 sebagai perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) Terbaik I, serta Pengembangan Talenta & SDM Unggul Terbaik II.

PGN received the Anugerah BUMN 2023 award as the company with the Best Corporate Governance (Good Corporate Governance/GCG) I, and the Best Talent & HR Development II.



INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2023
International Business Awards 2023

Oleh The Stevies
By The Stevies

Program Bedah Dapur GasKita PGN meraih penghargaan *Marketing Campaign of The Year – Government Category*. PGN mulai menyebarluaskan mengenai program Bedah Dapur Gaskita melalui berbagai kanal media sejak Juni 2022. Hingga akhir periode pada September program Bedah Dapur GasKita berhasil menaikkan pendaftar GasKita bulanan sebesar 370% secara *online* melalui pgas.id.

PGN's *Bedah Dapur GasKita* Program won the Marketing Campaign of the Year - Government Category award. PGN began disseminating the *Bedah Dapur GasKita* program through various media channels since June 2022. Until the end of the period in September, the *Bedah Dapur GasKita* program succeeded in increasing monthly GasKita registrations by 370% online through pgas.id.





HUMAN CAPITAL & PERFORMANCE AWARDS 2023
Human Capital & Performance Awards 2023

Oleh Business News Indonesia
By Business News Indonesia

Human Capital & Performance Award (HCPA) 2023 merupakan *Corporate rating* (*award*) tahunan di Bidang *Human Capital* yang mengidentifikasi kesuksesan Transformasi dan Strategi *Human Capital* dalam mendukung daya saing perusahaan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya:
- *The Best HC Team Of The Year*
- *The Best HC Technology Strategy*
- *The Best HC Director Of The Year* yang diraih oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Bapak Beni S. Hidayat.

The Human Capital & Performance Award (HCPA) 2023 is an annual corporate rating award in the field of Human Capital that recognizes the success of Human Capital Transformation and Strategies in supporting a company's competitiveness. PT Perusahaan Gas Negara Tbk has received several awards, including:
- The Best HC Team Of The Year
- The Best HC Technology Strategy
- The Best HC Director Of The Year, achieved by Mr. Beni S. Hidayat, the Director of HR and Business Support of PGN.



BUMN ENTREPRENEURSHIP MARKETING AWARD
BUMN Entrepreneurship Marketing Award

Oleh MarkPlus Inc
By MarkPlus Inc

Dalam ajang BUMN *Entrepreneurship Marketing Award*, PGN berhasil memenangkan dua kategori penghargaan. Penghargaan tersebut meliputi *Bronze Winner* sebagai *The Most Promising Company in Marketing* 3.0, serta *Bronze Winner* sebagai *The Most Promising Company in Strategic Marketing*.

In the BUMN Entrepreneurship Marketing Award event, PGN won two award categories. The awards include Bronze Winner as The Most Promising Company in Marketing 3.0, and Bronze Winner as The Most Promising Company in Strategic Marketing.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

INDONESIA BRANDING CAMPAIGN OF THE YEAR
Indonesia Branding Campaign of The Year



Oleh MarkPlus Inc
By MarkPlus Inc

PGN dinobatkan sebagai pemenang Indonesia *Branding Campaign of The Year*, yaitu *Bronze Champion* untuk kategori *Below The Line* dan *Silver Champion* untuk kategori *Digital Marketing*. Penghargaan ini didapatkan PGN lewat kampanye Bedah Dapur GasKita x Dekoruma.

PGN has been named the winner of Indonesia Branding Campaign of the Year, Bronze Champion for Below The Line category and Silver Champion for Digital Marketing category. PGN received this award through the Bedah Dapur GasKita x Dekoruma campaign.

PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2023
Oil and Gas Safety Award 2023



Oleh Kementerian ESDM
By Ministry of Energy and Mineral Resources

PGN *Group* memboyong 14 penghargaan pada ajang Penghargaan Keselamatan Migas 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM. Hal ini merupakan bentuk sinergi PGN *Group* dalam menjaga keamanan dan mengutamakan keselamatan kerja. Penghargaan yang diraih ialah:
- Patra Karya Raksa Tama oleh Pertagas
- Patra Karya Raksa Madya oleh TGI, PGN, dan KJG
- Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III oleh PGN
- Patra Nirbhaya Karya Adinugraha oleh TGI, Pertagas, dan KJG
- Patra Nirbhaya Karya Utama oleh PGN Saka, PGN, dan Perta Daya Gas
- Patra Nirbhaya Karya Pratama oleh PGN Saka, Perta-Samtan Gas, dan PGN LNG.

PGN Group won 14 awards at the 2023 Oil and Gas Safety Awards organized by the Ministry of Energy and Mineral Resources. This is a form of PGN Group's synergy in maintaining security and prioritizing work safety. The awards achieved are:
- Patra Karya Raksa Tama by Pertagas
- Patra Karya Raksa Madya by TGI, PGN, and KJG
- Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III by PGN
- Patra Nirbhaya Karya Adinugraha by TGI, Pertagas, and KJG
- Patra Nirbhaya Karya Utama by PGN Saka, PGN, and Perta Daya Gas
- Patra Nirbhaya Karya Pratama by PGN Saka, Perta-Samtan Gas, and PGN LNG.



CORPORATE GOVERNANCE AWARD 2023
Corporate Governance Award 2023

Oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship
By Indonesian Institute for Corporate Directorship

PGN meraih penghargaan sebagai *Best State Owned Enteprises* urutan ke 2 dan *TOP 50 Big Capitalization Public Listed Company*, yang diberikan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship*. Penghargaan ini diraih atas *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dengan baik oleh PGN.

PGN received an award as the Best State Owned Enteprises 2nd place and TOP 50 Big Capitalisation Public Listed Company, given by the Indonesian Institute for Corporate Directorship. This award was achieved for the Good Corporate Governance (GCG) implemented well by PGN.

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
Increasing the Use of Domestic Products (P3DN)



Oleh PT Pertamina (Persero)
By PT Pertamina (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) selama tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Fungsi *Local Content Utilization Management* (LCUM) PT Pertamina (Persero) untuk kategori Elaborasi Pengelolaan P3DN terbaik "Level Strategis" atas pengukuran tingkat kematangan Pengelolaan P3DN.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk in Increasing the Use of Domestic Products (P3DN) during 2023 received an award from the Local Content Utilization Management (LCUM) of PT Pertamina (Persero) for the category Elaboration of the best P3DN Management "Strategic Level" for measuring the maturity level of P3DN Management.

THE MOST COMPLIANCE PROCUREMENT PRACTICE
The Most Compliance Procurement Practice



Oleh PT Pertamina (Persero)
By PT Pertamina (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam pengelolaan fungsi *Procurement* selama tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Fungsi *Procurement* PT Pertamina (Persero) untuk kategori *The Most Compliance Procurement Practice*.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk in managing the Procurement during 2023 received an award from the Procurement of PT Pertamina (Persero) for the category The Most Compliance Procurement Practice.



PUBLIC RELATION INDONESIA AWARDS 2023
Public Relation Indonesia Awards 2023

Oleh PR Indonesia
By PR Indonesia

Sukseskan G20 untuk Capai Target *Net Zero Emission*, PGN berhasil mendapatkan *Silver Winner* untuk Kategori Program PR Sub Kategori *Corporate* PR pada *Public Relation* Indonesia *Awards* 2023.

Successful in achieving the G20 Net Zero Emission Target, PGN won the Silver Winner for the PR Program Category of the Corporate PR Sub Category at the 2023 Public Relation Indonesia Awards.

KETERBUKAAN INFORMASI DIGITAL 5.0 2023
Digital Information Transparency 5.0 2023

Oleh BUMN Track
By SOE Track

PGN meraih *The Most Interact* BUMN By Engagement dan *The Most Resilience High Activity*. Apresiasi ini diperoleh PGN atas konsistensi program pengelolaan media sosial, media *online*, dan situs web Perusahaan.

PGN won The Most Interact BUMN By Engangement and The Most Resilience High Activity. This appreciation was obtained by PGN for the consistency of its social media, online media, and Company website.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

ANNUAL REPORT COMPETITION, 2022 VISION AWARDS
Annual Report Competition, 2022 Vision Awards

Oleh League of America Communications Professionals LLC (LACP)
By League of America Communications Professionals LLC (LACP)

Selain PGN, PGASOL juga mendapatkan apresiasi berkat penjurian terhadap *Annual Report* melalui ajang *Annual Report Competition, 2022 Vision Awards*. Penghargaan yang didapatkan PGASOL ialah:
- *Gold Winner Worldwide*
- *Top 80 Reports - Asia Pasific Region*
- *Top 20 Indonesian Reports*
- *Technical Achievement Award.*

In addition to PGN, PGASOL also received appreciation thanks to the judging of the Annual Report through the Annual Report Competition, 2022 Vision Awards. The awards obtained by PGASOL are:
- Gold Winner Worldwide
- Top 80 Reports - Asia Pacific Region
- Top 20 Indonesian Reports
- Technical Achievement Award.



INDONESIA SAFETY EXCELLENCE AWARD 2023
Indonesia Safety Excellence Award 2023



Oleh First Indonesia Magazine
By First Indonesia Magazine

PGASOL membawa pulang lima penghargaan dalam ajang Indonesia *Safety Excellence Award* 2023. Sebelumnya, PGASOL melalui dua tahapan penilaian dalam penyeleksian pada bulan Agustus 2023. Penghargaan yang didapatkan ialah:
- *The Best Safety Solution*
- *The Best Safety* Program
- *The Best HSE Team* 2023
- *The Best CEO Committed in Safety Culture* (Direktur Utama PGN Solution)
- *The Best Leadership on Safety Culture* (Direktur Teknik dan Pengembangan PGN Solution).

PGASOL brought home five awards in the Indonesia Safety Excellence Award 2023. Previously, PGASOL went through two stages of assessment in the selection in August 2023. The awards obtained are:
- The Best Safety Solution
- The Best Safety Program
- The Best HSE Team 2023
- The Best CEO Committed in Safety Culture (President Director of PGN Solution)
- The Best Leadership on Safety Culture (Director of Engineering and Development of PGN Solution).

PENUTUPAN BULAN K3 NASIONAL TAHUN 2023
Closing of National OSH Month 2023



Oleh Disnaker DKI Jakarta
By Disnaker DKI Jakarta

PGASOL terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hingga berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan pada Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2023. Penghargaan ini mencakup kategori:
- Pencegahan dan Penanggulangan (P2) COVID-19 kategori *Platinum*
- Penghargaan P2 HIV/AIDS kategori *Gold*
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nihil Kecelakaan Kerja.

PGASOL continues to prioritize occupational safety and health in carrying out its operational activities, so that it managed to get a number of awards at the Closing of the National OSH Month in 2023. These awards include the following categories:
- COVID-19 Prevention and Countermeasures (P2) Platinum category
- HIV/AIDS P2 Award Gold category
- Zero Occupational Safety and Health Accidents.

PENUTUPAN BULAN K3 NASIONAL TAHUN 2023
Closing of National OSH Month 2023

Oleh Disnaker DKI Jakarta
By Disnaker DKI Jakarta

Selain PGASOL, anak usaha PGN lainnya yakni PGASCOM turut mendapatkan apresiasi pada Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2023. Penghargaan yang didapatkan PGASCOM adalah Nihil Kecelakaan Kerja dan P2 COVID-19 Tingkat Platinum.

In addition to PGASOL, another PGN subsidiary, PGASCOM, also received an appreciation at the Closing of the National OSH Month 2023. The awards obtained by PGASCOM are Zero Work Accidents and P2 COVID-19 Platinum Level.





INDONESIA SAFETY EXCELLENCE AWARD 2023
Indonesia Safety Excellence Award 2023

Oleh First Indonesia Magazine
By First Indonesia Magazine

PGASCOM meraih apresiasi dalam penghargaan Indonesia *Safety Excellence Award* 2023, untuk kategori *The Best Safety Program Award* dan *The Best CEO Committed in Safety Culture*. Penilaian dalam penghargaan ini dilaksanakan dalam bentuk wawancara yang diikuti PGASCOM pada bulan Agustus 2023.

PGASCOM was honoured with the Indonesia Safety Excellence Award 2023, in the categories of The Best Safety Programme Award and The Best CEO Committed in Safety Culture. The assessment in this award was carried out in the form of an interview that PGASCOM participated in August 2023.

WSO INDONESIAN SAFETY CULTURE AWARDS 2023
WSO Indonesian Safety Culture Awards 2023

Oleh World Safety Organization
By World Safety Organization

Program "Safety Champion" Pertagas Niaga memperoleh penghargaan WSO *Indonesian Safety Culture Awards* 2023. Program "Safety Champion" sendiri merupakan program untuk meningkatkan pemahaman perusahaan dan pengguna jargas akan manfaat, kelebihan, serta cara aman dalam penggunaan gas bumi sebagai sumber energi.

Pertagas Niaga's "Safety Champion" programme received the WSO Indonesian Safety Culture Awards 2023. The "Safety Champion" programme itself is a programme to increase the understanding of companies and jargas users of the benefits, advantages, and safe ways of using natural gas as an energy source.





INDONESIA SAFETY EXCELLENCE AWARD 2023
Indonesia Safety Excellence Award 2023

Oleh First Indonesia Magazine bersama PT Indonesia Popular Mandiri
By First Indonesia Magazine with PT Indonesia Popular Mandiri

Nusantara Regas membawa pulang penghargaan Indonesia *Safety Excellence Award* 2023. Penghargaan ini diberikan untuk menilai Perusahaan dalam meningkatkan standar keselamatan, menjaga kesehatan pekerja, melindungi lingkungan dan mempromosikan keselamatan di tempat kerja.

Nusantara Regas took home the Indonesia Safety Excellence Award 2023. This award is given to assess the Company in improving safety standards, maintaining workers' health, protecting the environment and promoting safety in the workplace.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

TOP GRC AWARDS 2023
TOP GRC Awards 2023



Oleh Top Business Indonesia
By Top Business Indonesia

TGI berhasil membawa pulang tiga penghargaan dari ajang tahunan bidang *governance, risk, and complience*, yaitu *TOP GRC Awards* 2023. Penghargaan tersebut adalah *TOP GRC Awards* 2023 *#Star* 4, *The High Performing Corporate Secretary on GRC* 2023, dan *The Most Committed GRC Leader* 2023.

TGI brought home three awards from the annual governance, risk, and compliance event, the TOP GRC Awards 2023. The awards are TOP GRC Awards 2023 #Star 4, The High Performing Corporate Secretary on GRC 2023, and The Most Committed GRC Leader 2023.



Oleh Top Business Indonesia
By Top Business Indonesia

Penghargaan dari ajang *TOP GRC Awards* 2023 juga didapatkan oleh Nusantara Regas. Dalam hal ini, Nusantara Regas mendapatkan penghargaan *TOP GRC Awards* 2023 *#Star* 5 dan *The Most Committed GRC Leader* 2023. Ini merupakan bukti bahwa Nusantara Regas telah berhasil membangun budaya perusahaan dengan berbasiskan *governance, risk, and complience.*

Nusantara Regas also received an award from the TOP GRC Awards 2023. In this case, Nusantara Regas was awarded the TOP GRC Awards 2023 #Star 5 and The Most Committed GRC Leader 2023. This is proof that Nusantara Regas has succeeded in building a corporate culture based on governance, risk, and compliance.

TOP HUMAN CAPITAL AWARDS 2023
TOP Human Capital Awards 2023

Oleh Majalah Top Business
By Top Business Magazine

PGASOL mendapatkan apresiasi atas kinerja baik serta penerapan *Human Capital Management System* (HCMS) dalam pengelolaan bisnisnya. Apresiasi diberikan dalam bentuk penghargaan yakni *TOP Human Capital Awards* 2023 *#Star* 3 dan *The High Performing Human Capital Director 2023.*

PGASOL received appreciation for its good performance and the implementation of the Human Capital Management System (HCMS) in managing its business. The appreciation was given in the form of awards, namely TOP Human Capital Awards 2023 #Star 3 and The High Performing Human Capital Director 2023.



HUMAN CAPITAL ON RESILIENCE EXCELLENCE AWARD 2023

Human Capital on Resilience Excellence Award 2023

Oleh First Indonesia Magazine bersama PT Indonesia Popular Mandiri
By First Indonesia Magazine with PT Indonesia Popular Mandiri

PGNMAS meraih empat penghargaan setelah mengikuti wawancara penjurian *Human Capital on Resilience Excellence Award* (HCREA) 2023. Penghargaan tersebut meliputi:
- *The Best* HR *in Crisis Management and Recovery*
- *The Best Excellent in women empowerment strategy*
- *The Best Company of Culture and Employee Experience*
- *The Best Leadership Development Focus on HC.*

PGNMAS won four awards after participating in the Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 judging interview. The awards include:
- The Best HR in Crisis Management and Recovery
- The Best Excellent in women empowerment strategy
- The Best Company of Culture and Employee Experience
- The Best Leadership Development Focus on HC.





HR EXCELLENCE AWARD 2023

HR Excellence Award 2023

Oleh SWA Media
By SWA Media

Nusantara Regas mendapatkan apresiasi dari SWA Media melalui ajang HR *Excellence Award* 2023. Penghargaan yang Nusantara Regas dapatkan ialah predikat *Very Good* dalam *Reward Management and Talent Retention Strategy.*

Nusantara Regas received an appreciation from SWA Media through the HR Excellence Award 2023. The award that Nusantara Regas received was the title of Very Good in Reward Management and Talent Retention Strategy.

PERINGATAN HARI PELANGGAN NASIONAL 2023

National Customer Day 2023

Oleh Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
By Directorate of Metrology, Ministry of Trade Republic of Indonesia

PGASOL memboyong sejumlah penghargaan pada Peringatan Hari Pelanggan Nasional 2023. Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen PGASOL sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan jaringan serta fasilitas gas bumi. Penghargaan tersebut mencakup:
- Pemilik/Pengguna UTTP Taat Tertib Ukur Terbaik
- Mitra Kerja Lab Uji/Kalibrasi Terbaik
- Laboratorium Klibrasi Wilayah I, Jawa Bagian Barat
- Laboratorium Kalibrasi Wilayah II, Jawa Bagian Timur
- Laboratorium Kalibrasi Wilayah III, Sumatera Bagian Utara.

PGASOL won a number of awards on National Customer Day 2023. These awards are the result of PGASOL's commitment as a provider of operation and maintenance services for natural gas networks and facilities. The awards include:
- Best UTTP Owner / User
- Best Test / Calibration Lab Partner
- Region I Calibration Laboratory, West Java
- Region II Calibration Laboratory, East Java
- Region III Calibration Laboratory, North Sumatra.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

INDONESIA GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS AWARDS 2023
Indonesia Government Public Relations Awards 2023



Oleh Humas Indonesia
By Humas Indonesia

Pertagas meraih dua penghargaan pada Indonesia *Government Public Relations Awards* 2023. Bersaing di kategori Program Kehumasan Pemerintah Terbaik, area operasi Pertagas yakni *Operation East Java Area* (OEJA) berhasil meraih penghargaan *Gold* pada sub kategori Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Selain itu *Operation West Java Area* (OWJA) juga berhasil meraih penghargaan *Silver* pada sub kategori Program Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata.

Pertagas won two awards at the Indonesia Government Public Relations Awards 2023. Competing in the Best Government Public Relations Program category, Pertagas' Operation East Java Area (OEJA) won the Gold award in the Women's Empowerment and Child Protection Program sub-category. In addition, Operation West Java Area (OWJA) also won a Silver award in the Tourism and Tourism Village Development Program sub-category.

TOP DIGITAL AWARDS 2023
TOP Digital Awards 2023



Oleh Majalah IT Works
By IT Works Magazine

PGASOL kembali meraih penghargaan dalam ajang *TOP Digital Awards* 2023. Kali ini, PGASOL mendapatkan dua penghargaan diantaranya *TOP Digital Implementation* dengan *Level Stars* 4 dan *TOP CIO on Digital Implementation* 2023.

PGASOL once again won an award in the TOP Digital Awards 2023. This time, PGASOL received two awards including TOP Digital Implementation with Level Stars 4 and TOP CIO on Digital Implementation 2023.

INDONESIA ENERGY AND ENGINEERING SERIES 2023
Indonesia Energy and Engineering Series 2023

Oleh Forum Sinergi Inovasi Industri
By Forum Sinergi Inovasi Industri

Berkat karya inovasi dari *Solutionation* Departemen Kalibrasi Instrumentasi Jawa Bagian Barat yaitu SOLBRATION, PGASOL berhasil membawa pulang penghargaan *Engineering Innovation for Energy Sector*. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Forum Sinergi Inovasi Industri kepada PGASOL atas inovasinya pada sektor energi.

Thanks to the innovative work of the Solutionation of the West Java Instrumentation Calibration Department, SOLBRATION, PGASOL managed to bring home the Engineering Innovation for Energy Sector award. This award is a form of appreciation from the Industrial Innovation Synergy Forum to PGASOL for its innovation in the energy sector.



LOSS CONTROL SUMMIT 2023
Loss Control Summit 2023



Oleh Direktorat Logistik & Infrastruktur Pertamina
By Logistic & Infrastructure Directorate, Pertamina

PGN berhasil membuktikan kehandalannya dalam pengoperasian infrastruktur gas bumi terkait pengelolaan *gas losses*. Untuk itu, PGN menerima penghargaan *loss control summit* pada Bidang Transmisi Gas Bumi, Distribusi Gas Bumi, Jaringan Gas Rumah Tangga, *Beyond Pipeline* untuk PGN LNG Indonesia, *Best Effort* Pengendalian *Gas Losses*, dan Insan Serah Terima Energi Terbaik.

PGN has proven its reliability in operating natural gas infrastructure related to gas losses management. For this reason, PGN received loss control summit awards in the fields of Natural Gas Transmission, Natural Gas Distribution, Household Gas Network, Beyond Pipeline for PGN LNG Indonesia, Best Effort to Control Gas Losses, and Best Energy Handover Person.

APRESIASI MEDIA SKK MIGAS – KKKS 2023
Appreciation of Media SKK Migas – KKKS 2023



Oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
By Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas)

PGN Saka sebagai perusahaan hulu migas dan afiliasi PGN, raih Juara 3 Kompetisi Kampanye Program 1-2 Trees Hulu Migas yang diinisiasi oleh SKK Migas untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) se-Indonesia.

PGN Saka as an upstream oil and gas company and PGN affiliate, won 3rd place in the 1-2 Trees Upstream Oil and Gas Campaign Competition initiated by SKK Migas for Cooperation Contractors (KKKS) throughout Indonesia.

RIAU INVESTMENT AWARD 2023
Riau Investment Award 2023

Oleh Pemerintah Provinsi Riau
By Riau Provincial Government

Pertagas Operation Rokan Area (ORA) dalam pelaksanaan kegiatan operasional terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian khususnya di Provinsi Riau. Kontribusi Pertagas ORA tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Riau melalui penghargaan Riau *Investment Award* 2023, kategori Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar ke-3 di Provinsi Riau.

Pertagas Operation Rokan Area (ORA) continues to contribute to the economic development of Riau Province through its operational activities. Pertagas ORA's contribution was recognised by the Riau Provincial Government through the Riau Investment Award 2023 in the category of the 3rd largest domestic investment realisation (PMDN) in Riau Province.



ANNUAL PERTAMINA QUALITY AWARD 2023
Annual Pertamina Quality Award 2023

Oleh Pertamina
By Pertamina

Pertamina Arun Gas (PAG) membawa pulang penghargaan *Gold* dalam ajang *Annual* Pertamina *Quality Award*. Hal ini dikarenakan PAG telah berhasil memodifikasi *Approaching Speed Indicator* yang *Obsolette* dan memenuhi ekspektasi *Interest Party* (*LNG Ship Cargo*).

Pertamina Arun Gas (PAG) brought home the Gold award in the Annual Pertamina Quality Award. This is because PAG has successfully modified the Obsolette Approaching Speed Indicator and met the expectations of the Interest Party (LNG Ship Cargo).



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

SERTIFIKASI
Certifications

Sertifikat Certificate	Sertifikasi Certification	Diterbitkan oleh Issued by	Masa Berlaku Valid Until
	ISO 9001: 2015 Manajemen Transmisi dan Distribusi Gas Bumi untuk Industri, Komersial, dan Rumah Tangga Gas Transmission and Distribution Management for Industrial, Commercial, and Households	Lloyd's Register	30 Januari 2024 January 30, 2024
	ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	TUV Nord	21 Desember 2023 December 21, 2023
	ISO 55001 – 2014 Sistem Manajemen Aset Asset Management System	BSI Group Indonesia	20 Oktober 2024 October 20, 2024
	ISO/IEC 27001: 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System	BSI Group Indonesia	17 Januari 2024 January 17, 2024
	ISO 14001 – 2015, ISO 45001 – 2018 Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Environmental Management System and Occupational Safety Management System	Lloyd's Register	7 Januari 2026 January 7, 2026

Sertifikat Certificate	Sertifikasi Certification	Diterbitkan oleh Issued by	Masa Berlaku Valid Until
	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Certificate for Occupational Health and Safety (K3) Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	22 April 2024 April 22, 2024
	ISO 31000:2018 Tingkat Maturitas Pengelolaan Risiko: *Managed* Levels of Risk Management: Managed Skor *Risk Maturitas Index* (RMI) 4.18 *of* 5 Score of the Risk Maturity Index (RMI) 4.18 of 5	Indonesia Risk & Business Advisory	20 Oktober 2024 October 20, 2024
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT PGN Tbk *Sales and Operation Region* I Area Batam Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region I Area Batam	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	6 Desember 2025 December 6, 2025
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT PGN Tbk *Sales and Operation Region* II Area Tangerang St Gas Bitung 2,3,4 Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region II Area Tangerang St Gas Bitung 2,3,4	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	15 Desember 2026 December 15, 2026
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT PGN Tbk *Sales and Operation Region* III ST Gas Semare Jatim Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region III ST Gas Semare Jatim	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	15 Desember 2026 December 15, 2026
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT Perusahaan Gas Negara Tbk Stasiun Gas Labuhan Maringgai Audit Certificate Security Management System - PT Perusahaan Gas Negara Tbk Stasiun Gas Labuhan Maringgai	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	30 Desember 2023 December 30, 2023

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



24 JANUARI January

UJI COBA HEAD TRUCK DDF LNG PERTAMA DI INDONESIA
First DDF LNG Head Truck Trial in Indonesia

Setelah berhasil menerapkan sistem *Diesel Dual Fuel* ("DDF") pada truk pengangkut Bahan Bakar Minyak ("BBM") milik Pertamina, PGN dan Gagas juga mulai menerapkan penggunaan *Liquified Natural Gas* ("LNG") untuk truk pengangkut bahan bakar gas.

Uji coba dilaksanakan pada 3 (tiga) unit truk yang membawa LNG Semitrailer 40 *feet*, *Mobile Refueling Unit* ("MRU") LNG dan *Gas Transport Module* ("GTM") CNG 20 *feet* yang melakukan perjalanan dari Jakarta - Surabaya - Jakarta. Uji coba ini dilakukan selama 5 (lima) hari menggunakan truk dengan kapasitas tabung bahan bakar LNG 1000 liter LNG.

After successfully implementing the Diesel Dual Fuel ("DDF") system on Pertamina's Fuel Oil ("BBM") trucks, PGN and Gagas also began implementing the use of Liquified Natural Gas ("LNG") for gas trucks.

The trial was conducted on 3 (three) trucks carrying 40 feet LNG Semitrailer, LNG Mobile Refueling Unit ("MRU") and 20 feet CNG Gas Transport Module ("GTM") travelling from Jakarta - Surabaya - Jakarta. This trial was conducted for 5 (five) days using a truck with an LNG fuel cylinder capacity of 1000 litres of LNG.



23 FEBRUARI February

BANGUN 36 RIBU JARINGAN GAS BUMI RUMAH TANGGA KOMERSIAL DI KAWASAN BINTARO
Build 36 Thousand Commercial Household Natural Gas Networks in Bintaro Area

Pembangunan Jaringan Gas Bumi di Kawasan Bintaro ditargetkan mencapai 35.749 Sambungan Rumah (SR), 203 pelanggan kecil (UMKM), dan 38 komersial. Guna memudahkan penyaluran gas, akan dibangun pipa *dedicated* ± 37 KM dari jalur pipa eksisting menuju Kawasan Bintaro secara bertahap. Pembangunan ini juga menjadi tindak lanjut dari kerja sama PGN dengan PT Jaya Real Property Tbk (JRP) untuk pengembangan jargas rumah tangga dan komersial di kawasan Bintaro.

Sejak 2021 hingga tahun 2023 ini, PGN telah melaksanakan pembangunan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon sebanyak 138.473 SRT.

The development of Natural Gas Network in Bintaro Area is targeted to reach 35,749 House Connections (SR), 203 small customers (MSMEs), and 38 commercial. To facilitate gas distribution, a dedicated pipeline of ± 37 KM will be built from the existing pipeline to the Bintaro Area in stages. This development is also a follow-up to PGN's cooperation with PT Jaya Real Property Tbk (JRP) for the development of household and commercial jargas in the Bintaro area.

From 2021 to 2023, PGN has carried out construction in Tangerang City, Tangerang Regency and Cilegon City totalling 138,473 SRT.



30 MARET March

UJI COBA EFISIENSI & REALIBILITAS MOTOR CNG

Efficiency & Reliability Trial of CNG Motor

PGN dan Gagas melaksanakan uji coba penggunaan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai Bahan Bakar Gas (BBG) pada sepeda motor. PGN melakukan uji coba pada tiga sepeda motor *matic*. Masing-masing sepeda motor menggunakan BBG sebesar 2,5 Liter setara Premium (LSP).

Dari hasil uji coba, jarak terjauh berhasil dicapai oleh salah satu motor vespa sejauh 104 Km dengan penggunaan 2,5 LSP sehingga per LSP diperhitungkan dapat menempuh jarak sekitar 41,6 Km. Kemudian pada sepeda motor *matic*, menempuh jarak 93,7 KM (2,5 LSP) atau sekitar 37,5 Km per LSP. Sedangkan satu motor vespa lainnya menempuh jarak 91 KM per 2,5 LSP atau 37 Km per LSP. Dari ketiga kendaraan ini rata-rata jarak tempuh yang dapat diraih sebesar 38,7 Km/Lsp.

PGN and Gagas conducted a trial of the use of Compressed Natural Gas (CNG) as Gas Fuel (BBG) on motorbikes. PGN conducted the trial on three motorbikes. Each motorcycle used 2.5 litres of Premium equivalent (LSP) of CNG.

From the test results, the furthest distance was achieved by one of the vespa motorbikes as far as 104 Km with the use of 2.5 LSP so that per LSP it is calculated to cover a distance of about 41.6 Km. Then on an automatic motorbike, it travelled 93.7 KM (2.5 LSP) or about 37.5 Km per LSP. While one other vespa motorbike travelled 91 KM per 2.5 LSP or 37 Km per LSP. From these three vehicles, the average mileage achieved was 38.7 Km/Lsp.



6 APRIL April

PILOT PROJECT KONVERSI BBG SEPEDA MOTOR BERSAMA MITRA OJEK ONLINE

Motorbike Fuel Conversion Pilot Project with Online Motorbike Taxi Partners

PGN melalui Gagas menyelenggarakan sosialisasi motor BBG kepada 42 mitra ojek *online*, dengan sistem *dual fuel* yakni BBM dan BBG. Motor BBG atau bisa juga disebut Motor Gas (Mogas) ini, lebih fleksibel karena tidak perlu membeli kendaraan baru dan tetap dapat menggunakan BBM. Selain itu, tidak mengurangi kapasitas BBM, karena mogas hanya menambah tabung untuk BBG sehingga bisa menambah jarak tempuh yang tentunya dibarengi dengan efisiensi biaya.

Dengan sistem *dual fuel*, mogas dilengkapi perangkat seperti *converter kit* dan *switch* pada stang motor untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan penggunaan bahan bakar gas bumi.

PGN through Gagas organised the socialisation of BBG motorbikes to 42 online motorcycle taxi partners, with a dual fuel system, namely BBM and BBG. Motorbike BBG, or Motor Gas (Mogas), is more flexible because it does not need to buy a new vehicle and can still use fuel. In addition, it does not reduce fuel capacity, because mogas only adds a tube for BBG so that it can increase mileage, which of course is accompanied by cost efficiency.

With a dual fuel system, mogas is equipped with devices such as converter kits and switches on the handlebar of the motorbike to enable or disable the use of natural gas fuel.

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



30 MEI May

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Annual General Meeting for the Financial Year 2022

PGN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai komitmen dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG).

RUPST ini mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022. RUPST menetapkan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar USD326.239.697.

PGN held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) as a commitment to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).

This AGMS ratified the Company's Annual Report for the Financial Year 2022, the Company's Annual Report on Social and Environmental Responsibility for the Financial Year 2022, the Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year 2022, as well as the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Programme for the Financial Year 2022. Determination of Net Income Utilisation, including Dividend Distribution for the Financial Year 2022. The AGMS determined the Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the Financial Year 2022 amounting to USD326,239,697.



5 JUNI June

EKSPLORASI POTENSI MIGAS DI WK SANGKAR
Exploration of Oil and Gas Potential in WK Sangkar

PGN Saka dipercaya untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di WK Sangkar melalui PT Saka Eksplorasi Timur dengan area seluas 8.122,58 kilometer persegi. Total investasi Komitmen Pasti tiga tahun pertama masa eksplorasi sebesar USD3 juta, meliputi kegiatan studi G&G, akuisisi dan *processing* 150 kilometer persegi data seismik 3D.

WK Sangkar berlokasi di lautan dan daratan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perkiraan sumber daya minyak sebesar 130 MMBO dan Gas 300 BCF pada WK Sangkar, diharapkan dapat menambah portofolio perusahaan dan juga bagi negara.

PGN Saka is entrusted with the exploration and exploitation of oil and gas in WK Sangkar through PT Saka Eksplorasi Timur with an area of 8,122.58 square kilometres. The total investment commitment for the first three years of exploration is USD3 million, covering G&G studies, acquisition and processing of 150 square kilometres of 3D seismic data.

WK Sangkar is located in the sea and land of East Java and Central Java. The estimated oil resources of 130 MMBO and 300 BCF of gas in WK Sangkar are expected to add to the Company's portfolio as well as to the country.



15 JUNI June

SUPLAI GAS 10,5 BBTUD KE LOTTE CHEMICAL INDONESIA

10.5 BBTUD Gas Supply to Lotte Chemical Indonesia

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) telah dilaksanakan antara PGN dengan LCI untuk penyerapan gas bumi sebesar 2,62 – 10,5 BBTUD. PGN akan membangun infrastruktur distribusi gas MRS dan pipa gas menuju *boiler* milik LCI untuk gas in pada Juni 2024. Hasil produksi dari LCI dapat menjadi subtitusi dari produk kimia impor yang cukup besar, sehingga dapat membantu menjaga neraca perdagangan Indonesia. Dampak yang besar juga akan bermanfaat dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) has been executed between PGN and LCI for natural gas absorption of 2.62 - 10.5 BBTUD. PGN will build MRS gas distribution infrastructure and gas pipeline to LCI's boiler for gas in by June 2024. The production from LCI can be a substitute for imported chemical products that are quite large, so that it can help maintain Indonesia's trade balance. The large impact will also be beneficial in providing added value to the Indonesian economy.



11 JULI July

WILAYAH OPERASI PGN SERAP GAS BUMI 500 – 550 BBTUD

PGN'S Operational Areas Absorb 500 – 550 BBTUD of Natural Gas

Wilayah operasi PGN, yakni Jawa Bagian Barat, yang berada di tiga provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten ini dikelola oleh PGN *Sales Operation* & *Region* II atau PGN SOR II, dengan cakupan pengelolaan penyaluran gas bumi ke 1.441 Pelanggan sektor komersial industri yang menyerap 324,23 BBTUD dan 9 pelanggan korporat sektor ketenagalistrikkan sebesar 201,25 BBTUD.

Tidak hanya itu, penyaluran gas bumi sebagai energi baik juga dilakukan ke sektor rumah tangga sejumlah 228.036 Sambungan Rumah (SR) dan 786 pelanggan kecil/UMKM.

PGN's operating area, namely West Java, which is located in three provinces namely DKI Jakarta, West Java and Banten Provinces, is managed by PGN Sales Operation & Region II or PGN SOR II, with the scope of management of natural gas distribution to 1,441 industrial commercial sector customers absorbing 324.23 BBTUD and 9 corporate customers in the electricity sector amounting to 201.25 BBTUD.

Not only that, the distribution of natural gas as good energy is also carried out to the household sector totalling 228,036 House Connections (SR) and 786 small customers / MSMEs.

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



29 AGUSTUS August

MENJADI *CENTRAL HUB* DI ASIA PADA 2030, PERTA ARUN GAS TANDATANGANI *DEVELOPMENT COOPERATION AGREEMENT* DENGAN ASLAN ENERGY CAPITAL
To Become Central Hub in Asia by 2030, Perta Arun Gas Signs Development Cooperation Agreement with Aslan Energy Capital

PAG menandatangani *Development Cooperation Agreement* (DCA) dengan *Asian Energy Capital Pte Ltd.*, Singapura (AEC) terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas pemrosesan *Blue Ammonia* yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe (KEKAL). Penandatanganan ini dilaksanakan di Perta Arun Gas *Head Office* Jakarta pada akhir Juli lalu.

Berlokasi strategis di Lhokseumawe, Provinsi Aceh serta dekat jalur Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional serta fasilitas *ex* Kilang Arun seluas 1.400 ha yang merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus (KEKAL), PAG memberikan upaya terbaiknya untuk menjadi perusahaan regasifikasi dan LNG *Hub* yang ramah lingkungan di sentral di Asia pada Tahun 2030.

PAG signed a Development Cooperation Agreement (DCA) with Aslan Energy Capital Pte Ltd, Singapore (AEC) related to the construction, development and operation of the Blue Ammonia processing facility located in the Lhokseumawe Special Economic Zone (KEKAL). The signing was held at Perta Arun Gas Head Office Jakarta at the end of last July.

Strategically located in Lhokseumawe, Aceh Province and close to the Strait of Malacca, an international shipping lane, as well as the 1,400 ha ex-Arun facility, which is part of the Special Economic Zone (SEZ), PAG is giving its best effort to become the central environmentally friendly regasification and LNG Hub company in Asia by 2030.



24 SEPTEMBER September

SERAP PASOKAN LNG IDD BANGKA DARI WK RAPAK
Absorb IDD Bangka LNG Supply from WK Rapak

Dalam rangka meningkatkan fleksibilitas layanan gas bumi, PGN bersama Anak Perusahaan dan Afiliasi yakni Pertagas dan PTGN menyerap volume *Liquified Natural Gas* (LNG) dari Wilayah Kerja Rapak. Upaya ini ditandai dengan Penandatanganan LNG *Sales Purchase Agreement* (PSA) Indonesia *Deepwater Development* (IDD) Bangka - WK Rapak oleh PGN, Chevron dan ENI.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Harry Budi Sidharta menambahkan bahwa penyerapan volume LNG dari WK yang dioperasikan oleh Chevron Rapak Ltd ini akan memberikan fleksibilitas penyaluran bagi PGN *Group*. Fleksibilitas pemanfaatan yang didapatkan seperti kilang, pembangkit listrik, pelanggan komersial, retail, industri, sektor maritim dan transportasi darat.

Dalam hal ini, PGN memberikan mandat kepada Pertagas *Group* melakukan penyerapan volume LNG dari WK Rapak. Pada tahun 2023, Pertagas menyerap LNG sebesar 0,06 standar kargo dan Pertagas Niaga menyerap sebesar 0,04 standar kargo. Kemudian pada tahun 2024, Pertagas akan menyerap LNG sebesar 0,67 standar kargo dan PTGN akan menyerap 0,33 standar kargo.

In order to increase the flexibility of natural gas services, PGN together with its subsidiaries and affiliates, Pertagas and PTGN, absorbed the volume of Liquified Natural Gas (LNG) from the Rapak Working Area. This effort was marked by the signing of the LNG Sales Purchase Agreement (PSA) Indonesia Deepwater Development (IDD) Bangka - WK Rapak by PGN, Chevron and ENI.

PGN Director of Strategy and Business Development Harry Budi Sidharta added that the absorption of LNG volume from the WK operated by Chevron Rapak Ltd will provide distribution flexibility for PGN Group. The flexibility of utilisation includes refineries, power plants, commercial customers, retail, industry, maritime sector and land transportation.

In this case, PGN mandates Pertagas Group to absorb the volume of LNG from WK Rapak. In 2023, Pertagas absorbs 0.06 standard cargoes of LNG and Pertagas Niaga absorbs 0.04 standard cargoes. Then in 2024, Pertagas will absorb 0.67 standard cargoes of LNG and PTGN will absorb 0.33 standard cargoes.



29 SEPTEMBER September

PERTA ARUN GAS REVITALISASI TANKI LNG

Perta Arun Gas Revitalises LNG Tanks

Pengembangan bisnis terus dilakukan Perta Arun Gas (PAG) sebagai afiliasi dari *Subholding* Gas menuju cita-cita perusahaan menjadi *Leader Energy Hub* Asia di 2030. Revitalisasi Tanki F-6004 merupakan salah satu *milestone* dalam mencapai cita-cita PAG tersebut.

Diketahui, saat ini PAG memiliki 5 tanki LNG berkapasitas masing-masing 128.000 m^3, dengan rincian sebagai berikut, 2 tanki untuk kebutuhan LNG dan 2 tanki lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis LNG Hub Internasional Pasar Internasional guna memenuhi kebutuhan *storage* dari Total *Energies Gas* & *Power Asia* dan Kyushu *Electric*. Adapun 1 tanki LNG lainnya inilah yang akan direvitalisasi untuk pengembangan bisnis LNG Hub PAG.

Business development continues to be carried out by Perta Arun Gas (PAG) as an affiliate of the Gas Subholding towards the Company's goal of becoming Asia's Leader Energy Hub in 2030. The revitalisation of Tank F-6004 is one of the milestones in achieving PAG's goal.

It is known that PAG currently has 5 LNG tanks with a capacity of 128,000 m^3 each, with the following details, 2 tanks for LNG needs and 2 other tanks to meet the needs of the International LNG Hub business International Market to meet the storage needs of Total Energies Gas & Power Asia and Kyushu Electric. The other 1 LNG tank will be revitalised for the development of PAG's LNG Hub business.



19 OKTOBER October

KEMBANGKAN LNG *BUNKERING SERVICES*

Develop LNG Bunkering Services

PGN menyiapkan diri dalam penyediaan LNG *Bunkering Services*, mengingat penggunaan LNG sebagai bahan bakar kapal dapat mereduksi gas rumah kaca hingga 23% jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis minyak saat ini.

LNG *Bunkering Terminals* dirancang sejak Juli 2022 dengan skema *shore-to-ship Bunkering*. Adapun terminal yang berpotensi dikembangkan untuk inisiatif ini adalah Terminal LNG Bontang dan Terminal LNG Arun. Sedangkan LNG *Bunkering Vessels* menerapkan skema *ship-to-ship Bunkering*. Inisiatif yang didesain pada Desember 2022 ini berpotensi dikembangkan di sejumlah titik pelabuhan di Batam, Tanjung Priok – Cilegon, Tanjung Perak, Bali – NTB, Makassar – Kaltim, dan Teluk Bintuni.

PGN is preparing to provide LNG Bunkering Services, considering that the use of LNG as a ship fuel can reduce greenhouse gases by 23% compared to the current oil-based fuel.

LNG Bunkering Terminals are designed since July 2022 with a shore-to-ship Bunkering scheme. The terminals that are potentially developed for this initiative are Bontang LNG Terminal and Arun LNG Terminal. Meanwhile, LNG Bunkering Vessels apply the ship-to-ship Bunkering scheme. The initiative, which was designed in December 2022, has the potential to be developed at a number of port points in Batam, Tanjung Priok - Cilegon, Tanjung Perak, Bali - NTB, Makassar - East Kalimantan, and Bintuni Bay.

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



24 OKTOBER October

KJG TEKEN MOU DENGAN AWE (SATRIA) NZ, LTD. UNTUK PENGEMBANGAN LAPANGAN LENGO
KJG Signs MoU with AWE (Satria) NZ, Ltd. for the Development of the Lengo Field

KJG menandatangani kerja sama baru dengan AWE (Satria) NZ Ltd. sebagai bentuk dukungan terhadap alternatif pengembangan Lapangan Lengo yang terletak di sekitar wilayah perairan Bulu, Jawa Timur. KJG sebagai pihak yang memiliki pipa transmisi di Laut Jawa akan menyalurkan gas tersebut ke *Onshore Receiving Facility* (ORF) atau fasilitas penerima gas bumi milik KJG di Semarang.

AWE (Satria) NZ Ltd. sebagai KKKS non operator berdasarkan upaya terbaik akan bekerja sama dengan Operator Bulu PSC untuk mengembangkan komersialisasi Lapangan Lengo. Kerja sama ini juga memberikan kesempatan kepada PGN Group untuk ikut serta dalam melakukan pengembangan lapangan gas tersebut.

KJG signed a new agreement with AWE (Satria) NZ Ltd. to support the alternative development of the Lengo Field, which is located around the waters of Bulu, East Java. KJG as the party that owns the transmission pipeline in the Java Sea will channel the gas to KJG's Onshore Receiving Facility (ORF) in Semarang.

AWE (Satria) NZ Ltd. as a non-operating PSC on a best efforts basis will work with the Bulu PSC Operator to develop the commercialisation of the Lengo Field. This cooperation also provides an opportunity for PGN Group to participate in the development of the gas field.



14 NOVEMBER November

TETAPKAN PENGURUS BARU PERSEROAN PADA RUPSLB
Determine the Company's New Board at the EGMS

Pada RUPSLB ini pemegang saham memutuskan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PGN merangkap sebagai Komisaris Independen PGN. RUPSLB juga memutuskan untuk mengangkat Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen PGN. Selain itu, memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama dan Paiman Rahardjo sebagai Komisaris Independen.

Dalam RUPSLB turut mengangkat Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi, Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, serta Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Selain itu, memberhentikan dengan hormat Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi dan Faris Aziz sebagai Direktur Sales dan Operasi.

Keputusan ini berdasarkan 81% dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir.

At the EGMS, shareholders decided to appoint Amien Sunaryadi as PGN's President Commissioner and concurrently as PGN's Independent Commissioner. The EGMS also decided to appoint Abdullah Aufa Fuad as PGN's Independent Commissioner.

The EGMS also appointed Ratih Esti Prihatini as Director of Sales and Operations, Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business Development, and Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology. In addition, it also respectfully dismissed Achmad Muchtasyar as Director of Infrastructure and Technology and Faris Aziz as Director of Sales and Operations.

This decision was based on 81% of the voting results of the shareholders present.



22 NOVEMBER November

DIGITALISASI LAYANAN MELALUI *INTEGRATED MONITORING CENTER*

Digitalisation of Services through Integrated Monitoring Centre

PGN terus berupaya meningkatkan penanganan dan respon yang cepat terhadap keluhan pelanggan. Salah satunya adalah dengan membuat *tools* yang dapat memonitor proses bisnis untuk meningkatkan tingkat layanan kepada pelanggan secara *real time* dan terintegrasi, yakni *Integrated Monitoring Center* (IMOC).

Melalui IMOC, informasi mengenai kondisi penyaluran yang meliputi seluruh pelanggan dan infrastuktur serta niaga gas PGN dapat tersedia dengan cepat dan tepat. Sehingga, sejumlah kurang lebih 935 BBTUD gas bumi yang disalurkan kepada 839.151 pelanggan PGN di 73 kota/kabupaten, dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi lebih dari 11.675 KM pun dapat terpantau secara langsung.

PGN continues to improve its handling and rapid response to customer complaints. One of them is by creating tools that can monitor business processes to improve service levels to customers in real time and integrated, namely the Integrated Monitoring Centre (IMOC).

Through IMOC, information on distribution conditions covering all customers and PGN's gas infrastructure and trading can be available quickly and precisely. Thus, a total of approximately 935 BBTUD of natural gas distributed to 839,151 PGN customers in 73 cities/regencies, with a natural gas pipeline infrastructure coverage of more than 11,675 KM can be monitored directly.



29 NOVEMBER November

PAPARKAN KINERJA DAN UPAYA STRATEGIS PADA *PUBLIC EXPOSE* 2023

Presented Performance and Strategic Efforts at Public Expose 2023

Hadir dalam *Public Expose Festival* 2023 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PGN memaparkan pencapaian dan perkembangan terkini perusahaan sampai dengan Triwulan III – 2023.

Menjelang akhir 2023, kebijakan strategis yang ditempuh adalah secara konsisten menambah portofolio pelanggan baru untuk mencapai target volume pengelolaan gas bumi. Upaya diversifikasi usaha didorong melalui peran anak perusahaan sehingga target pertumbuhan pendapatan konsolidasi dapat diperoleh melalui bisnis lain. Selanjutnya, pengelolaan biaya secara optimal dilakukan namun tanpa mengurangi aspek keamanan dan kehandalan kegiatan usaha dan PGN juga memastikan memiliki tim kerja yang handal melalui pengembangan kompetensi dan implementasi HSSE untuk kenyamanan bekerja.

Terkait pencapaian operasional, pengaliran gas bumi di bisnis transmisi sebesar 1.444 MMSCFD berhasil tumbuh sebesar 8%. Hal ini dikarenakan mengalirnya gas di Pipa Transmisi Gresik-Semarang. Volume niaga gas bumi juga bertumbuh 5% atau menjadi 935 BBTUD dimana jumlah pelanggan mencapai lebih dari 839 ribu dengan volume terbesarnya dari pembangkit listrik, industri kimia, keramik, makanan dan pupuk. Salah satu sebab peningkatan volume niaga karena rerata harga gas yang dijual PGN memang sangat kompetitif bila dibandingkan bahan bakar lain seperti HSD (setara USD41,18/MMBTU), LPG – 12 kg (setara USD26,20/MMBTU) atau MFO (setara USD33,74/MMBTU).

Attending the Public Expose Festival 2023 organised by the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), PGN presented the Company's latest achievements and developments up to the third quarter - 2023.

Towards the end of 2023, the strategic policy pursued is to consistently add new customer portfolios to achieve the target volume of natural gas management. Business diversification efforts are encouraged through the role of subsidiaries so that the consolidated revenue growth target can be obtained through other businesses. Furthermore, cost management is optimised without compromising the safety and reliability of business activities, and PGN also ensures that it has a reliable work team through competency development and HSSE implementation for work comfort.

In terms of operational achievements, natural gas flow in the transmission business of 1,444 MMSCFD grew by 8%. This was due to the flow of gas in the Gresik-Semarang Transmission Pipeline. Natural gas trading volume also grew by 5% or to 935 BBTUD where the number of customers reached more than 839 thousand with the largest volume from power plants, chemical, ceramic, food and fertiliser industries. One of the reasons for the increase in trading volume is that the average price of gas sold by PGN is very competitive compared to other fuels such as HSD (equivalent to USD41.18/MMBTU), LPG - 12 kg (equivalent to USD26.20/MMBTU) or MFO (equivalent to USD33.74/MMBTU).

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



4 DESEMBER December

SUPLAI GAS KE PT ANEKA BAJA PERKASA INDUSTRI
Gas Supply to PT Aneka Baja Perkasa Industri

PGN memenuhi kebutuhan gas bumi PT Aneka Baja Perkasa Industri (ABA) yang beroperasi di Tangerang dengan pengaliran gas bumi sebesar 350 – 1750 MMBTU. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh *Area Head* Tangerang Bambang Purwanto yang merupakan bagian wilayah PGN *Sales & Operation Region* II (PGN SOR II) dan Edy Putra Lo selaku Direktur ABA. Kontrak jual-beli gas bumi ini akan berjangka waktu 5 tahun.

Penyaluran gas bumi ke ABA menambah portofolio PGN di wilayah Jawa Bagian Barat yang dikelola oleh SOR II khususnya area Tangerang. PGN area Tangerang mengelola jaringan pipa gas sepanjang 808 Km. Jumlah pelanggan gas di Tangerang mencapai 47.102 pelanggan mulai dari rumah tangga, pelanggan kecil/usaha kecil, dan komersial industri. Sepanjang tahun 2023 ini, PGN area Tangerang mampu menyalurkan gas bumi sebesar 67,99 BBTUD.

PGN fulfils the natural gas needs of PT Aneka Baja Perkasa Industri (ABA), which operates in Tangerang, by supplying 350 - 1750 MMBTU of natural gas. The contract was signed by Tangerang Area Head Bambang Purwanto, who is part of PGN Sales & Operation Region II (PGN SOR II), and Edy Putra Lo, Director of ABA. This natural gas sales and purchase contract will have a term of 5 years.

The distribution of natural gas to ABA adds to PGN's portfolio in the Western Java region managed by SOR II, especially the Tangerang area. PGN Tangerang area manages 808 kilometres of gas pipeline network. The number of gas customers in Tangerang reaches 47,102 customers ranging from households, small customers/small businesses, and industrial commercial. Throughout 2023, PGN Tangerang area is able to distribute natural gas of 67.99 BBTUD.



6 DESEMBER December

PASOK GAS BUMI 10 BBTUD KE PLN BATAM
Supplies 10 BBTUD of Natural Gas to PLN Batam

PGN menyalurkan tambahan volume gas bumi ke pembangkit listrik PLN Batam. Volume pemakaian gas buminya kurang lebih sebesar 10 BBTUD atau setara dengan ±8 juta liter BBM per bulan.

Proses Gas In atau pengaliran gas pertama dimulai sejak bulan Oktober 2023 dan kontraknya sendiri akan berlangsung *multi years*. Pembangkit ini merupakan *plant* baru yang akan memenuhi kebutuhan listrik di daerah Kawasan Industri Kabil dan sekitarnya. Adapun kapasitas pembangkit tersebut diperkirakan mampu menghasilkan listrik ± 50 MW.

PGN distributed additional volume of natural gas to PLN Batam power plant. The volume of natural gas usage is approximately 10 BBTUD or equivalent to ±8 million litres of fuel per month.

PGN distributed additional volume of natural gas to PLN Batam power plant. The volume of natural gas usage is approximately 10 BBTUD or equivalent to ±8 million litres of fuel per month.



10 DESEMBER December

TEKEN PJBG 45 BBTUD UNTUK PUPUK ISKANDAR MUDA DAN INDUSTRI

Signed 45 BBTUD GSPA for Iskandar Muda Fertiliser and Industry

PGN, PTGN, dan PGE menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas untuk PT Pupuk Iskandar Muda, industri di Aceh, serta industri di Sumatera Utara. PGE sebagai penjual memasok gas bumi maksimal sebesar 45 BBTUD kepada PGN dan PTGN. Sumber pasokan untuk PJBG ini berasal dari Wilayah Kerja (WK) "B", dimana PGE berkedudukan sebagai Kontraktor dan Operator untuk WK "B". Penggunaan sumber gas dari WK "B" telah berdasar pada rekomendasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) penunjukkan penjual gas bumi Bagian Negara dari WK "B" kepada PGE dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan bersama sumber daya alam migas di Aceh.

PGN dan PTGN berharap bahwa alokasi gas dari WK "B" dapat diserap secara optimal ke depan. Tidak hanya memberikan *benefit* bagi badan usaha migas yang bersangkutan dan konsumen, tetapi juga dapat menjaga penerimaan negara dari sektor hulu migas.

PGN, PTGN, and PGE signed a Gas Sales and Purchase Agreement for PT Pupuk Iskandar Muda, industries in Aceh, and industries in North Sumatra. PGE as the seller supplies a maximum of 45 BBTUD of natural gas to PGN and PTGN. The source of supply for this GSPA comes from Working Area (WK) "B", where PGE is the Contractor and Operator for WK "B". The use of gas sources from WK "B" is based on the recommendation of the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA) for the appointment of the seller of the State's share of natural gas from WK "B" to PGE and in accordance with the provisions of the Government Regulation on the joint management of oil and gas natural resources in Aceh.

PGN and PTGN hope that the gas allocation from WK "B" can be optimally utilised in the future. Not only does it provide benefits for the oil and gas business entities concerned and consumers, but it can also maintain state revenues from the upstream oil and gas sector.



11 DESEMBER December

KERJA SAMA SINERGI *MARKETING* PRODUK DENGAN PPN

Product Marketing Synergy Cooperation with PPN

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Tbk selaku Subholding Gas Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berkolaborasi untuk menjaga keberlangsungan usaha melalui Sinergi *Marketing* Produk *Compressed Natural Gas* (CNG), *Liquified Natural Gas* (LNG) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta penggunaan fasilitas produk. Kerjasama ini sekaligus untuk menjajaki peningkatan pendapatan bagi kedua entitas.

Selanjutnya, *vessel-vessel* yang dimiliki oleh Pertamina Group, diharapkan juga dapat memakai LNG sebagai bahan bakar yang lebih bersih. Mengingat terdapat peraturan IMO untuk memakai bahan bakar yang lebih bersih pada kapal laut, salah satunya adalah LNG. Selain itu, PGN dan PPN berencana untuk bekerjasama dalam peningkatan pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas). Jika peralihan pemanfaatan LPG 5 Kg, 12 Kg, maupun 50 Kg dapat diganti dengan CNG, maka hal ini akan mendukung pemerintah dalam upaya mengurangi subsidi energi.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) as Pertamina's Gas Subholding and PT Pertamina Patra Niaga (PPN) collaborate to maintain business continuity through Synergy Marketing of Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Natural Gas (LNG) and Fuel Oil (BBM) products, as well as the use of product facilities. This collaboration is also to explore increasing revenue for both entities.

Furthermore, vessels owned by Pertamina Group are also expected to use LNG as a cleaner fuel. Given that there are IMO regulations to use cleaner fuels on ships, one of which is LNG. In addition, PGN and PPN plan to cooperate in increasing the development of household gas networks (jargas). If the shift in the use of 5 Kg, 12 Kg, and 50 Kg LPG can be replaced with CNG, then this will support the government in its efforts to reduce energy subsidies.

PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023



14 DESEMBER December

UJI COBA KONVERSI BBG GASKU PADA 100 MESIN KAPAL NELAYAN SEMARANG
Gasoline Fuel Conversion Trial on 100 Semarang Fishing Boat Engines

PGN dan Gagas mencoba mengkonversi kapal nelayan untuk dapat menggunakan Bahan Bakar Gas ("BBG") berbasis *Compressed Natural Gas* (CNG) dengan nama produk GasKu. Uji coba dilakukan dengan melibatkan 100 orang nelayan di daerah Tambak Lorok dan Tambak Rejo, Semarang, Jawa Tengah. Gagas melakukan sosialisasi sekaligus uji coba penggunaan bahan bakar gas pada mesin kapal nelayan bersama dengan Dinas Perikanan Kota Semarang dan Balai Besar Penangkapan Ikan ("BBPI") Kota Semarang pada 8-9 Desember 2023 lalu.

Jika pada transportasi darat seperti mobil, bis atau truk melakukan pengisian ulang secara langsung dengan mendatangi stasiun pengisian bahan bakar ("SPBG") terdekat, maka sistem pengisian bahan bakar gas untuk kapal nelayan akan menggunakan sistem tukar tabung seperti pada *Gaslink Cylinder*. Untuk setiap kapal nelayan yang sudah dikonversi akan dibekali dengan 1 unit tabung baja dengan standar keselamatan tinggi dan berkapasitas sekitar 17 ("*Liter Water Capacity*") LWC atau setara dengan 4,2 Liter Setara Premium ("LSP").

PGN and Gagas are trying to convert fishing boats to be able to use Compressed Natural Gas (CNG)-based Gas Fuel ("BBG") under the product name GasKu. The trial was conducted involving 100 fishermen in Tambak Lorok and Tambak Rejo areas, Semarang, Central Java. Gagas conducted a socialisation as well as a trial of the use of gas fuel in fishing boat engines together with the Semarang City Fisheries Agency and the Semarang City Fishing Center ("BBPI") on 8-9 December 2023.

While on land transportation such as cars, buses or trucks refill directly by visiting the nearest refuelling station ("SPBG"), the gas refuelling system for fishing boats will use a cylinder exchange system such as the Gaslink Cylinder. Each converted fishing boat will be equipped with 1 unit of steel cylinder with high safety standards and a capacity of approximately 17 ("Litre Water Capacity") LWC or equivalent to 4,.2 Litre Premium Equivalent ("LSP").



19 DESEMBER December

PGN TANDATANGANI 410 BBTUD KONTRAK GAS BUMI DARI BLOK *CORRIDOR*
PGN Signed 410 BBTUD Natural Gas Contract from Corridor Block

PGN melakukan penandatanganan Perjanjian Jual-Beli Gas ("PJBG") dengan Medco E&P Grissik Ltd ("MEPG") yang bersumber dari Blok *Corridor*, Sumatera Selatan.

Kontrak berjangka waktu 5 tahun ini merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya yang telah berlangsung selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 30 September 2023. Dengan adanya kesepakatan baru ini maka PGN akan memperoleh volume sebesar ± 410 BBTUD sejak jelang akhir Desember 2023 dan selanjutnya volume yang dialirkan akan menyesuaikan kemampuan produksi dari Blok tersebut.

Adapun volume yang dialirkan nantinya diperuntukkan berbagai konsumen yaitu sektor kelistrikan, industri, pelaku usaha menengah dan kecil, transportasi serta rumah tangga. Perjanjian ini akan sangat membantu operasi dan layanan energi pelanggan serta mendorong kinerja pelanggan agar makin kompetitif dalam berbisnis dan bersaing baik dalam skala domestik maupun internasional.

PGN signed a Gas Sales and Purchase Agreement ("GSPA") with Medco E&P Grissik Ltd ("MEPG") sourced from the Corridor Block, South Sumatra.

This 5-year contract is an extension of the previous agreement which has lasted for 20 years and ends on 30 September 2023. With this new agreement, PGN will obtain a volume of ± 410 BBTUD from the end of December 2023 and then the volume flowed will adjust to the production capability of the Block.

The volume delivered will be for various consumers, namely the electricity sector, industry, medium and small businesses, transportation and households. This agreement will greatly assist customer energy operations and services and encourage customer performance to be more competitive in doing business and competing both on a domestic and international scale.

01.



02.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report




gaslink
pgn

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

Pemegang Saham yang Terhormat,
Dear Shareholders,

Selama tahun 2023, kami, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi dan tugas pengawasan kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 dan kesesuaian dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris juga mengawasi perumusan dan implementasi strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi agar memastikan PGN tetap berada di jalur yang tepat dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Throughout 2023, we, the Board of Commissioners, attentively exercised our oversight including over the Company Work Plan and Budget (RKAP) as it was being executed by the Board of Directors along with its conformity to the Company's Long Term Plan (RJPP). We also oversaw the formulation and execution of strategies and policies conducted by the Board of Directors to ensure PGN remained on the right track and in compliance with all applicable regulatory provisions.

Tahun 2023 merupakan tahun dengan beragam tantangan, di mana kami, bersama-sama dengan Direksi dan Perwira Subholding Gas, menghadapi kompleksitas dan dinamika industri yang melibatkan berbagai aspek. Namun, melalui usaha bersama, kami dapat meraih pencapaian yang positif yang menjadi tanda ketahanan bisnis Perusahaan.

2023 was a year of numerous challenges, where we, together with the Directors and Gas Subholding Officers, had to contend with complexity and dynamics in our industry on many aspects. However, with our joint efforts, we were able to deliver positive achievements that signaled the Company's business resilience.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Perbaikan ekonomi global tahun 2023 pasca pandemi berjalan dengan lambat dan tidak merata. Kinerja perekonomian bergerak sangat dinamis disertai dengan ketidakpastian yang tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatatkan pertumbuhan ekonomi global melambat yang merefleksikan tingginya risiko dan ketidakpastian prospek perekonomian global. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2024, IMF mempubilkasikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 sebesar 3,1% yoy, dimana hal ini lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,5%.

MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

The post-pandemic global economy sent a mixed signal of recovery in 2023 and seemed to be losing impetus. Associated with the highly dynamic economic performance was a persistently high uncertainty. The International Monetary Fund (IMF) registered a slowing trend in global economic growth, reflecting the high risk and uncertainty of its global outlook. In its January 2024 World Economic Outlook (WEO) report, the IMF issued a global economic growth of 3.1% yoy in 2023, a noticeably weaker figure than 3.5% registered a year earlier.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian PGN sepanjang tahun 2023, memperlihatkan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan, dan inisiatif untuk menjaga kinerja Perusahaan tetap positif.

We consider that what PGN achieved throughout 2023 indicate effective company management ran by the Board of Directors amidst the year's challenges with proper anticipation through various strategies, policies, and initiatives to maintain the Company's positive performance.

Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

Berdasarkan Laporan Departemen Keuangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Inflasi Indonesia per Desember 2023 tercatat sebesar 2,61%, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahun 2022 sebesar 5,51%. Nilai tukar Rupiah tahun 2023 sebesar Rp15.255/USD, lebih tinggi dari rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar Rp14.850/USD, yang diakibatkan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat serta ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dari sisi industri migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) mencatat investasi minyak bumi dan gas (migas) tahun 2023 adalah sebesar USD15,6 miliar, atau naik dibandingkan tahun 2022 sebesar USD13,9 miliar. Selain itu, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2023 berada pada kisaran USD78 per barel, lebih rendah dibanding rata-rata ICP tahun 2022 sebesar USD97 per barel. Harga minyak Indonesia (ICP) cenderung mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2023 karena dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional, yang antara lain dipicu oleh kekhawatiran pasar atas ekonomi global khususnya di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat, konflik geopolitik yang masih eskalatif, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, serta keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak. Dari sisi pasokan gas, terjadi fluktuasi yang berdampak pada dinamika pengelolaan dan penyaluran gas bagi pelanggan PGN.

Pada tahun 2023, PGN sebagai Subholding Gas dibawah PT Pertamina (Persero) menghadapi tantangan dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi industri migas sebagaimana tersebut di atas namun tetap berkomitmen untuk selalu siap mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi Indonesia dengan meningkatkan jumlah pengguna dan volume gas bumi untuk sektor industri, kelistrikan (gasifikasi) dan rumah tangga.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

PGN membukukan kinerja Pendapatan sebesar USD3,65 miliar tumbuh 2% dari tahun sebelumnya, serta Laba Usaha sebesar USD542,4 juta, menurun 8% dari tahun sebelumnya. PGN juga meraih Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan ke Entitas Induk menjadi sebesar USD278,09 juta pada tahun 2023, yang menurun 15% dibandingkan tahun 2022. Belanja modal pada tahun 2023 adalah USD232 juta, meningkat 8% dibandingkan tahun 2022 sebesar USD215 juta.

Based on the report of its Department of Finance, Indonesia saw an economic growth of 5.05% in 2023, slower than of 5.31% in 2022. Indonesia's inflation as of December 2023 was recorded at 2.61%, a better figure than the inflation rate in 2022 of 5.51%. The Rupiah exchange rate in 2023 was Rp15,255/USD, higher than the average rupiah exchange rate in 2022 at Rp14,850/USD, which was due to the increase in the United States benchmark interest rate and uncertainty in global economic conditions.

From the oil and gas industry side, the Directorate General of Oil and Gas (Ditjen Migas) noted a USD 15.6 billion investment in oil and gas (oil and gas) in 2023, an increase of USD 13.9 billion from 2022. In addition, the average oil price Indonesia (ICP) in 2023 was around USD78 per barrel, lower than the average ICP of USD97 per barrel in 2022. Indonesian oil prices (ICP) tended to fluctuate throughout 2023 as they were influenced by the decline in the price of the main crude oil on the international market, which was triggered, among other matters, by market concerns towards the global economy, especially in Europe and the United States, escalating geopolitical conflicts, down-revised world economic growth projections, as well as OPEC+'s decision to reduce oil production. Seen also in the year were gas supply fluctuations which had caused dynamics in the management and distribution of gas to PGN customers.

In 2023, PGN as Subholding Gas under PT Pertamina (Persero) encountered challenges with macroeconomic and oil and gas industry landscapes as we've mentioned above, but remained committed to supporting the development of Indonesia's natural gas infrastructure as we managed to increase the number of users and volume of natural gas for the industry, electricity (gasification) and household segments.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

PGN delivered USD3.65 billion in revenue, a growth of 2% from the previous year, and USD542.4 million in income from operations, a decrease of 8% from the previous year. This translated to a Profit for the Year Attributable to the Parent Entity of USD278.09 million in 2023, which experienced a decrease of 15% compared to the 2022's figure. Capital expenditure in 2023 reached USD232 million, an increase of 8% compared to 2022 amounting to USD215 million.

Peningkatan pendapatan ditopang oleh kinerja operasional beberapa produk yang memperlihatkan tren cukup positif. Volume niaga gas termasuk TUA (*Terminal Use Agreement*) selama tahun 2023 tercatat sebesar 977 BBTUD hal ini meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung oleh peningkatan permintaan dari sektor ritel, industri, komersial, serta PLN. Volume transportasi gas dan volume transportasi minyak juga mengalami peningkatan seiring peningkatan permintaan. Namun demikian, volume *lifting* migas mengalami penurunan di tahun 2023 yang disebabkan diantaranya oleh keterlambatan penyelesaian beberapa proyek dan ketidakpastian operasional dalam pengeboran migas.

The increase in revenue was driven by the operational performance of several products which showed quite positive trends. Gas trading volume including TUA (Terminal Use Agreement) during 2023 was recorded at 977 BBTUD, representing an increase of 6% compared to the previous year largely due to an increase in demand from the retail, industrial, commercial and PLN sectors. The volume of both gas transportation and oil transportation have also increased in line with the increase in demand. However, the volume of oil and gas lifting experienced a decline in 2023 due to, among other causes, delayed completion of several projects and operational uncertainty in oil and gas drilling.

Hingga akhir tahun 2023, jumlah pelanggan gas bumi PGN Group yang memanfaatkan pipa gas dan *beyond pipeline* seperti CNG dan LNG Ritel, sebanyak 830.935 pelanggan dimana 825.856 merupakan pelanggan rumah tangga, sementara lainnya merupakan pelanggan kecil, komersial dan industri. Pelanggan gas bumi yang memanfaatkan infrastruktur lain yaitu *beyond pipeline* adalah sebesar 427 pelanggan dan menunjukan tren yang terus meningkat.

As of the end of 2023, PGN Group had a total of 830,935 natural gas customers who use piped and beyond-pipeline gas, such as CNG and Retail LNG, 825,856 of whom were household customers, while the remaining were small, commercial and industrial customers. Natural gas customers who used other infrastructure, namely beyond pipeline, are 427 customers and show an increasing trend.

Terkait infrastruktur, total panjang pipa gas transmisi dan distribusi mengalami peningkatan menjadi 12.692 km atau tumbuh 10% dibandingkan tahun 2022, yang terdiri dari pipa distribusi kepada pelanggan dan pipa jaringan transmisi.

With regards to infrastructure, the total length of transmission and distribution gas pipes has increased to 12,692 km or 10% growth compared to 2022, consisting of distribution pipes to customers and transmission network pipes.

Beberapa indikator positif yang berhasil didapatkan PGN di antaranya, Indeks Kepuasan Pelanggan PGN atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) mencapai 4,58 dari skala 5 atau masuk kategori sangat baik (2022: 4,53), indeks *employee engagement* pada aspek budaya AKHLAK dengan skor 4,45 dari skor maksimal 5,00 (2022: 4,07), hingga pengelolaan *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE) dengan *Number of Accident* nihil (2022: 2).

PGN succeeded in achieving several positive indicators, including PGN Customer Satisfaction Index (CSI) with a score of 4.58 from a scale of 5, or in the excellent category (2022: 4.53); employee engagement index related to AKHLAK culture with a score of 4.45 from a scale of 5.00 (2022: 4.07); and in the management of Health, Safety, Security and Environmental (HSSE) aspect with zero Number of Accident (2022: 2)

PGN juga terus melakukan penguatan digitalisasi dalam pengembangan produk dan layanan seperti integrasi Pertamina Call Center 135 yang membuat seluruh pelanggan Pertamina Group akan mendapatkan layanan *call center* yang sama.

PGN has also continued to strengthen digitalization in product and service development, such as the integration of Pertamina Call Center 135, which means that all Pertamina Group customers will get services from the same call center.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan Direksi menginisiasi program *liability management* oleh PGN dan PT Saka Energi Indonesia (SEI), melalui pembelian kembali sebagian obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dengan menggunakan dana internal, senilai USD553,3 juta bagi PGN dan USD220 juta bagi SEI. Inisiatif ini berhasil memperbaiki rasio likuiditas PGN dan SEI pada tahun 2023.

To improve financial performance, we have recently initiated a liability management program by PGN and PT Saka Energi Indonesia (SEI), through the buyback of a portion of the PGN's USD553.3 million bond that will mature in 2024 using internal funds, and SEI's USD220 million. This initiative proved effective in improving PGN and SEI's liquidity ratio in 2023.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

Walaupun terdapat peningkatan operasional, namun Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan ke Entitas Induk tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 disebabkan utamanya oleh penurunan laba ventura bersama dan laba selisih kurs, dan adanya provisi atas kontrak LNG.

While there was an operational increase, Profit for the Year Attributable to the Parent Entity in 2023 experienced a decrease from 2022 due mainly to a decrease in joint venture profits and foreign exchange profits, and the existence of provisions for LNG contracts.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian di atas memperlihatkan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan dan inisiatif untuk menjaga kinerja Perusahaan tetap positif.

We consider the Board of Directors has properly managed the Company amidst the year's challenges with proper anticipation through various strategies, policies and initiatives to keep up the Company's positive performance.

Dewan Komisaris menyadari bahwa pada tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa tantangan yang berada di luar kontrol Direksi seperti adanya penetapan regulasi tarif yang tetap bagi industri migas, dan fluktuasi ketersediaan pasokan gas di beberapa wilayah operasional. Di sisi lain, masih rendahnya penetrasi jaringan distribusi gas merupakan peluang besar bagi pertumbuhan Perseroan di tahun mendatang.

We are aware that in 2023, the Company encountered some challenges beyond our control, such as the establishment of fixed tariff regulations for the oil and gas industry, and fluctuations in gas supply availability in several operational areas. On the other hand, the low penetration of the gas distribution network presented the Company with enormous growth opportunities in the coming year.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga meminta perhatian dalam pengelolaan oleh Direksi antara lain rendahnya realisasi investasi, penyediaan LNG untuk memenuhi kontrak kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, penyelesaian utang obligasi yang akan jatuh tempo di tahun 2024, serta peningkatan berkelanjutan atas kompetensi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini dan masa mendatang.

However, we have asked for the attention in management of the Board of Directors including on the low investment realization, the supply of LNG to fulfill the previously agreed cooperation contracts, the settlement of bond debt which will become due in 2024, and the continuous improvement of Human Resources competency in accordance with current and future business developments.

Semua hal di atas perlu didukung oleh upaya yang kuat dan inovatif oleh jajaran Manajemen dan seluruh Perwira Subholding Gas untuk meningkatkan nilai Perseroan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan.

All of the above needs to be supported by strong and innovative efforts by the Management and all Gas Subholding Officers to increase the value of the Company according to the expectations of all stakeholders.

PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan perhatian lebih atas implementasi strategi oleh Direksi, dalam mendukung pencapaian RKAP dan RJPP.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan dukungan, saran, serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap perumusan dan penerapan strategi kebijakan Perusahaan, yaitu strategi optimasi, *customer acquisition*, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis, optimasi biaya, *liability management*, penerapan teknologi informasi, serta penerapan strategi keberlanjutan dengan terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE).

Dewan Komisaris juga menelaah rencana investasi pembangunan infrastruktur yang dijalankan Direksi dengan memperhatikan kelayakan teknis dan keekonomian, serta mendukung pemanfaatan berbagai opsi teknologi terkini dalam industri minyak dan gas, dengan tetap menjaga kepatuhan kepada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara berkala, kami melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, kinerja operasional serta *Top Risk* Perusahaan, termasuk pengelolaan operasional bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan fluktuasi harga saham.

FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, pemberian saran, dan nasihat kepada Direksi melalui komunikasi yang dilakukan secara rutin, baik melalui Rapat Gabungan dengan Direksi maupun sarana komunikasi lainnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat juga dilakukan dengan memberikan persetujuan atas hal-hal yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali Rapat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Gabungan dengan Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga melaksanakan 12 (dua belas) kali kegiatan berupa kunjungan kerja dan *management walk through*.

OVERSIGHT OF STRATEGY EXECUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS

We pay more attention to the execution of strategies by the Board of Directors as we were supporting the Board in achieving their RKAP and RJPP.

In 2023, we oversaw and provided support, suggestions and recommendations needed for the formulation and execution of Company policy strategies, which were optimization, customer acquisition, household service expansion, business diversification, cost optimization, liability management, IT application, as well as sustainability strategies with constant improvements in the quality of infrastructure and Health, Safety, Security and Environmental (HSSE).

We also reviewed the infrastructure development investment plans executed by the Board of Directors with due attention to technical and economic feasibility, as well as supporting the use of various latest technology options in the oil and gas industry, while remaining in compliance with internal bylaws and applicable laws and regulations.

Periodically, we evaluated the Company's financial performance, operational performance and Top Risk, including the management of business operations, human resources development, and monitored the implementation of risk management, internal control systems and share price fluctuations.

OVERSIGHT AND ADVISORY FUNCTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

As part of our duties and responsibilities, we exercise our oversight, give suggestions and advice to the Board of Directors through regular communication, both through Joint Meetings with the Board of Directors and other means of communication. Part of the implementation of our oversight and advisory functions involves providing approval on matters within the scope of our authorities.

During 2023, we held 33 (thirty three) Board of Commissioners meetings, including joint our meetings with the Board of Directors. We also did other oversights with 12 (twelve) work visits and a series of management walk through activities.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

Selama tahun 2023, persetujuan, nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi di antaranya, sebagai berikut:

Here is a list of our approval, advice and suggestions to the Board of Directors throughout 2023:

Perihal Matter	Persetujuan/Nasihat/Saran	Approval/Advice/Suggestions
Strategi, Pengelolaan Bisnis dan Rencana Investasi Strategy, Business Management and Investment Plans	1. Persetujuan Atas Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi Survei Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D WK Pangkah PT Saka Energi Indonesia (SEI). 2. Persetujuan Persetujuan Inisiatif Investasi Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG Tank F-6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya PT Perta Arun Gas (PAG). 3. Persetujuan atas Program *Liability Management* PGN dan SEI. 4. Penelaahan terkait kinerja Perusahaan secara berkala termasuk upaya-upaya efiensi operasional.	1. Approval for the Application for Approval of the 3D WK Pangkah Seismic Acquisition and Processing Survey Investment of PT Saka Energi Indonesia (SEI). 2. Approval for the Investment Initiative for LNG Hub Business Development through the Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities of PT Perta Arun Gas (PAG). 3. Approval for the PGN and SEI Liability Management Program. 4. Regular reviews of the Company's performance including operational efficiency efforts.
Audit Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Internal Control Audit and Risk Management	1. Penelaahan hasil audit internal dan proses audit investigasi internal. 2. Penelaahan risiko utama Perusahaan dan rencana mitigasinya.	1. Review of internal audit results and internal investigation audit process. 2. Review of the Company's main risks and mitigation plans.
Sumber Daya Manusia dan GCG Human Resources and GCG	1. Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi Dasar BOD-1 dan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan. 2. Penelaahan atas kebijakan operasional Perusahaan dan proses bisnis turunannya.	1. Approval for Changes to the Basic Organizational Structure of BOD-1 and Changes in Subsidiary Management. 2. Review of the Company's operational policies and derivative business processes.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Prospek ekonomi global tahun depan diprediksi masih dibayangi oleh sejumlah ketidakpastian yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* Januari 2024 kembali merevisi *outlook* PDB global 2024 menjadi 3,1% yoy, tumbuh lebih lambat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 3,0% yoy. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diprediksi akan dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ketat dan penarikan dukungan fiskal, serta pertumbuhan produktivitas yang rendah. Negara-negara maju diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan pertumbuhan pada tahun 2024. Sementara pada negara berkembang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil selama tahun 2024, dengan perbedaan regional.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The global economic outlook for next year is predicted to remain clouded by certain uncertainties that may cause economic growth to slow even further. The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook for January 2024 made another downward revisions on its 2024 global GDP outlook to 3.1% yoy, or growing slower at a slower rate than the 2023 economic growth projection of 3.0% yoy. Global economic growth in 2024 is projected to be influenced by tight monetary policy and the withdrawal of fiscal support, as well as low productivity growth. Developed countries are expected to experience a slight decline in growth in 2024. Meanwhile, developing countries are expected to experience stable growth during 2024, with regional differences.

Di tengah meningkatnya tekanan sektor eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia tetap stabil dan akan tumbuh pada kisaran 4,7-5,5%. Perkembangan positif tersebut mendorong kepercayaan berbagai lembaga pemeringkat untuk mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Indonesia pada satu level di atas level terendah *investment grade,* serta berhasil memperoleh peningkatan *outlook* menjadi positif dari lembaga pemeringkat *Rating & Investment.* Pengakuan positif tersebut tidak terlepas dari kinerja dan prospek ekonomi Indonesia yang kuat didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi.

Amidst the increasing external sector pressure due to global economic uncertainty, Bank Indonesia estimates that the Indonesian economy will remain stable and will grow in the range of 4.7-5.5%. This positive projection has earned Indonesia the trust of rating agencies as they maintained Indonesia's Sovereign Credit Rating at one level above the lowest level of investment grade, and succeeded in obtaining an increase in the outlook to positive from the Rating & Investment rating agency. This positive recognition was supported by Indonesia's strong economic outlook buoyed by high policy credibility.

Dewan Komisaris dan Direksi telah menyamakan pandangan yang selaras dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi makro ekonomi dan industri dengan optimis. Prospek pelanggan baru yang membutuhkan gas bumi diperkirakan akan tetap bertumbuh di sektor industri, pelanggan kecil dan rumah tangga, seiring membaiknya aktivitas ekonomi.

We have aligned our view with the Board of Directors in order to respond optimistically to developments in macroeconomic and industrial conditions. Both are expecting further growth in the number of new customers in the industrial, retail and household customers that need natural gas as economic activity recovers.

Memahami hal ini, kami mendukung rencana Direksi yang akan melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur strategis di tahun 2024. Beberapa di antaranya adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur gas berbentuk jaringan distribusi gas ke pelanggan yang membutuhkan gas untuk pengembangan bisnisnya, baik berbentuk pipa maupun non pipa; membangun infrastruktur untuk distribusi LNG; memperluas pembangunan pipa transmisi gas yang menyambungkan sumber pasokan gas ke pelanggan oleh PT Pertagas; mengembangkan pipa transmisi, minyak dan gas untuk mendukung kegiatan kilang pengolah minyak PT Pertamina (Persero); pengembangan eksplorasi sumur migas yang dikelola maupun dimiliki oleh PT Saka Energi Energi (SEI); serta memulai pengembangan bisnis baru yang mendukung pencapaian program *Net Zero Emission.*

Drawing on this likely trend, we support the Board of Directors' plan to carry out the construction of several strategic infrastructures in 2024. That will involve continuing the gas infrastructure project in the form of a gas distribution network to customers who need gas to develop their business, both piped and non-pipeline; building infrastructure for LNG distribution; expanding the construction of gas transmission pipelines that connect gas supply sources to customers by PT Pertagas; developing transmission, oil and gas pipelines to support the activities of the PT Pertamina (Persero) oil processing refinery; developing oil and gas well exploration owned by or under the management of PT Saka Energi Energi (SEI); and commencing the development of new businesses that support the achievement of the Net Zero Emission program.

Dewan Komisaris secara keseluruhan menilai bahwa peluang pertumbuhan di masa mendatang masih terbuka dan terus mendukung segala upaya yang akan dijalankan Direksi dalam rangka memperkuat bisnis PGN ke depan.

Overall, we see the enormous opportunities for future growth ahead of us and hence will continue to give our support to the Board of Directors as they are exerting all the efforts to strengthen PGN's business in the future.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KEBERLANJUTAN

Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan dan berbagai prospek bisnis yang hendak diraih dapat terwujud, jika perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dan aspek keberlanjutan secara konsisten. Direksi terus berupaya meningkatkan GCG dan aspek keberlanjutan, serta membangun budaya integritas bagi Perwira Subholding Gas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Implementasi prinsip GCG di PGN terus diperkuat dengan melakukan beberapa hal pada tahun 2023, diantaranya menyelaraskan budaya dan peraturan dengan kebijakan yang dibuat oleh Holding, dan merevisi prosedur terkait proses *review* dokumen hukum dari aspek *compliance, contract* dan litigasi untuk memitigasi risiko hukum. Kami juga melihat upaya peningkatan *awareness* GCG dan anti penyuapan berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan penyebaran konten GCG yang konsisten melalui berbagai media komunikasi Perusahaan.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, Dewan Komisaris mendukung penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dengan melakukan pengawasan secara komprehensif dan memastikan diterapkannya sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami juga menilai penerapan WBS di PGN sudah sesuai dengan adanya Pedoman WBS No. P-002/A011 yang mengatur mengenai cara penyampaian pelanggaran, proses kerja WBS, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan hingga tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran. Selama tahun 2023, terdapat 17 pengaduan yang masuk melalui saluran pengaduan WBS dengan status 12 laporan *closed* dan 5 laporan *ongoing progress*.

OUR VIEW OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY

As the Board of Commissioners, we believe that it will always take proper implementation of corporate governance and sustainability aspects to keep up the achieved performance and deliver more against our business prospects. We have seen how the Board of Directors made consistent effort to improve corporate governance and sustainability aspects while building a culture of integrity for Gas Subholding Officers with due consideration on the diverse needs and expectations of various stakeholders.

Strengthening the implementation of GCG principles at PGN in 2023 involved aligning culture and regulations with policies made by Holding, and revising procedures related to the legal document review process from the aspects of compliance, contracts and litigation to mitigate legal risks. We also saw how efforts to increase GCG and anti-bribery awareness were running well through consistent socialization and dissemination of corporate governance contents through the Company's various communication media.

As part of the implementation of GCG, we support the implementation of the Whistleblowing System (WBS) as we exercised oversight comprehensively and ensured that sanctions were given to parties/perpetrators proven to have committed violations. We also assessed that the implementation of WBS at PGN ran in accordance with WBS Guidelines No.P-002/A011 which governs how to report violations, how WBS process runs, protection for whistleblowers, handling complaints, authorized parties to manage complaints, follow-ups, to handling. During 2023, 17 complaints were submitted through the WBS channel, 12 of which have been settled while the remaining 5 are in settlement process.

Pada tahun 2023, PGN melakukan asesmen internal atas penerapan GCG dan menunjukkan potensi peningkatan skor 0,45 dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Kemudian, PGN juga melakukan evaluasi menggunakan parameter ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) dengan *adoption rate* 72,73% dari standar yang diharapkan dan melebihi standar minimum. PGN juga melakukan evaluasi tata kelola dengan kriteria yang tercantum dalam PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan kualifikasi : "Apply" untuk "Seluruh Prinsip", serta Penerapan GCG berdasarkan parameter Peraturan POJK No. 21/POJK.04/2015 yang mencapai predikat "Comply" untuk "Seluruh Aspek"

In 2023, PGN made an internal assessment of GCG implementation where the results showed the potential for a score increase of 0.45 from the previous year. PGN also made another GCG evaluation using ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) parameters with an adoption rate of 72.73% of the expected standards and exceeding the minimum standards. PGN also evaluated governance using the criteria stated in PUGKI (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance) 2021 with the qualification: "Apply" for "All Principles", as well as GCG Application based on the parameters of POJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 which achieved the title "Comply" for "All Aspects"

PGN juga terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap proses bisnis, mulai dari perumusan strategi dan kebijakan hingga pembuatan program-program keberlanjutan. Seluruhnya disesuaikan kepada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola/LST (*Environment, Social and Governance*/ESG) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

PGN has also been consistent in integrating sustainability principles into each of its business processes, from formulating strategies and policies, to creating a dedicated programs of sustainability. All of the efforts made have been adjusted to Environmental, Social and Governance/ESG (ESG) aspects and the achievement of Sustainable Development Goals/SDGs.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendukung Direksi dalam memperkuat komitmen Perusahaan untuk terus bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki tata kelola yang baik dan bertanggung jawab secara sosial.

As we go forward, we will continue to support the Board of Directors as they work to strengthen the Company's commitment to continue to be environmentally and socially responsible on a sound governance practice.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite Penunjang Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, selaras dengan rencana kerja yang dimiliki masing-masing Komite. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria di antaranya capaian kinerja selama tahun buku 2023, kompetensi yang dimiliki dan tingkat kehadiran dalam rapat.

ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF OUR SUPPORTING COMMITTEES

In discharging our duties and responsibilities, we are assisted by our 3 (three) Supporting Committees; the Audit Committee, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee and the Risk Management and Business Development Monitoring Committee. In 2023, the committees performed their duties and responsibilities well, in line with their respective work plans. We made this assessment based on several criteria, including performance achievements in 2023 financial year, competence shown and meeting attendance.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menjalankan fungsinya dalam rangka mendukung pengawasan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan proses audit Perseroan yang dilakukan dalam 46 (empat puluh enam) kali pertemuan. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melaksanakan fungsinya untuk memberikan rekomendasi dalam sistem nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pengembangan organisasi serta penerapan pengelolaan tata kelola, yang dilakukan dalam 19 pertemuan. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan fungsinya untuk mendukung pengawasan sistem manajemen risiko serta memberikan rekomendasi pengembangan usaha atau rencana investasi, yang dilakukan dalam 29 pertemuan.

Throughout 2023, the Audit Committee exercised its oversight functions to support internal control system and the Company's audit process through 46 (forty-six) meetings. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee gave recommendations on the nomination and remuneration system for the Board of Commissioners and Directors, organizational development and implementation of governance management through 19 meetings. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee exercised its function to support oversight over the risk management system and gave recommendations for business development or investment plans through 29 meetings.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, susunan anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2023.

RUPSLB 2023 memberhentikan dengan hormat Bapak Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama dan Bapak Paiman Raharjo sebagai Komisaris Independen. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa dan pengabdian beliau selama menjalankan tugas di Perusahaan. RUPSLB 2023 juga mengangkat Bapak Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, serta Bapak Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, our composition as the Board of Commissioners changed based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on November 14 2023.

The 2023 EGMS dismissed with honor Mr. Arcandra Tahar from his position as President Commissioner and Mr. Paiman Raharjo from his position as Independent Commissioner. Let us express our gratitude and high appreciation for their service and dedication while in office. The 2023 EGMS also appointed Mr. Amien Sunaryadi as President Commissioner and Independent Commissioner, and Mr. Abdullah Aufa Fuad as Independent Commissioner of the Company.

Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Amien Sunaryadi**	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Independent Commissioner

PENUTUP

Akhirnya, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, Perwira Subholding Gas dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan kepada PGN. Kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada jajaran Direksi yang telah mengelola PGN di tengah banyaknya tantangan pada tahun 2023, serta kepada manajemen entitas Anak Perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kinerja PGN.

Sebagai penutup, kami mengajak seluruh elemen Perusahaan untuk mewujudkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan meningkatkan nilai Perusahaan dengan menyediakan solusi *end-to-end* dalam pemanfaatan gas bumi sebagai salah satu sumber energi terbaik di masa transisi energi. Mari bersama-sama menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.

CLOSING

Finally, we would like to express our highest appreciation and thanks to all stakeholders, shareholders, customers, business partners, Gas Subholding Officers and other stakeholders for their trust and support for PGN. Our thanks and high appreciation also go to the Board of Directors for their sound management of PGN amidst the year's numerous challenges, as well as to the management of Subsidiary entities who have made great contribution to PGN's performance growth.

In closing, we'd like to welcome everybody's participation as we are working to realize both the Company's Work Plan and Budget and Long Term Plan, and to increase the Company's added values by offering end-to-end solutions in the utilization of natural gas as the only and best energy source in the energy transition period. Let's all turn all challenges ahead into opportunities to grow and develop.

Jakarta, 29 April 2024
Jakarta, April 29, 2024



Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners



Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Luky Alfirman
Komisaris
Commissioner

Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen
Independent Commissioner

02.



Dini Shanti Purwono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Christian H. Siboro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warih Sadono
Komisaris
Commissioner

02.

Secara umum, kami bersyukur dapat melewati tantangan sepanjang tahun 2023 dengan baik. Pencapaian kinerja keuangan dan operasional pada tahun ini merupakan wujud upaya PGN untuk senantiasa mengelola bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal serta aman namun tetap memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

In general, we are grateful for our ability to overcome the year's challenges. The achievement of financial and operational performance this year was a manifestation of PGN's efforts to always run an optimum, reliable and safe management of downstream natural gas business while generating sustainable added values for shareholders and stakeholders.

Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Director



LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Pemegang Saham yang Terhormat,
Dear Shareholders,

Tahun 2023 telah menjadi periode tahun dengan berbagai tantangan kondisi ketidakpastian dan dinamika lanskap industri, yang secara langsung mempengaruhi kinerja Perusahaan. Namun, dengan fundamental yang kuat dan berfokus pada optimalisasi pengelolaan gas bumi, peningkatan konektivitas infrastruktur serta diversifikasi bisnis, Perseroan melanjutkan komitmennya untuk terus memperkuat posisinya bagi pertumbuhan di masa depan.

The year 2023 was a challenging period marked with uncertainty and industry dynamics that directly impacted the Company's performance. However, with strong fundamentals and consistent focus on optimizing natural gas management, improving infrastructure connectivity, and diversifying the business, we continued our commitment to strengthen PGN's position for stronger growth in the future.

Melalui optimalisasi, kami menjalankan *customer acquisition* untuk mencapai penambahan pengelolaan volume gas bumi melalui penambahan pelanggan baru. Kami juga terus berupaya untuk mempercepat konektivitas dan ketersediaan infrastruktur termasuk infrastruktur gas *beyond pipeline* (LNG & CNG retail) untuk meningkatkan utilisasi gas serta perluasan jaringan gas (jargas) rumah tangga dalam rangka terus mendukung kebijakan pengurangan subsidi LPG dan penurunan impor LPG. Upaya diversifikasi usaha pun didorong melalui peran Anak Perusahaan sehingga target pertumbuhan pendapatan konsolidasi dapat diperoleh.

Through optimization, we carried out customer acquisition to achieve what we had set for ourselves to increase the volume of natural gas management. With perseverance, we worked to accelerate infrastructure connectivity and availability, including beyond-pipeline gas infrastructure (LNG & CNG retail) to increase gas utilization and expand the household gas network as part of our effort to support the LPG subsidy and LPG import reduction policies. We were pushing business diversification through the role of the Company's subsidiaries to ensure we achieved our stated targets for consolidated revenue growth.

Kami juga berkomitmen dalam menjaga Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga mampu untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi pemegang saham. Tingkat Kesehatan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada Tahun Buku 2023 tercatat Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dengan menggunakan lembaga pemeringkat. Kemudian, dalam dua tahun terakhir kami juga mencatatkan tren positif dengan realisasi *Dividend Payout Ratio* dalam kisaran di atas 60% serta *Dividend Yield* di atas 7% yang bukan saja mencerminkan komitmen kami dalam memberikan nilai kompetitif kepada pemegang saham namun juga menandai tingkat kesehatan keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan masa depan Perusahaan.

In addition, we remained committed to maintaining the Company's Health Level in order for us to provide sustainable added values for the stakeholders, especially the PGN shareholders. The soundness level of PT Perusahaan Gas Negara Tbk in the 2023 Financial Year was recorded as Very Healthy (AAA) as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 by using a rating agency. Furthermore, in the past two years, we have also been posting positive trends with a Dividend Payout Ratio in the range of exceeding 60%, as well as Divided Yield above 7%, which not only reflected our commitment to providing competitive value to shareholders, but also marked a strong financial soundness level and growth outlook in the Company's future.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Kami yakin bahwa langkah-langkah strategis yang telah diterapkan untuk menghadapi dinamika yang terjadi akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kami juga terus memastikan pengelolaan bisnis Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Implementasinya terlihat pada pencapaian *ESG Risk Rating* Perseroan di tahun 2023 dengan skor 24,7 (meningkat sebesar 3,4 poin dari skor tahun sebelumnya sebesar 28,1) dari Lembaga Rating Sustainalytics. PGN akan terus menjaga *rating* ESG selaras dengan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis Perusahaan dan secara aktif terus melakukan insiatif-inisiatif yang bertujuan memperkuat bisnis kami untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui Laporan Tahunan ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai implementasi strategi dan kebijakan PGN, pencapaian kinerja di tahun 2023, dan penerapan tata kelola, hingga prospek usaha ke depan dalam memastikan keberlanjutan Perusahaan.

We are convinced that the strategic steps we have taken all along to deal with the current dynamics will have positive impacts in the long run. We also continue to ensure that the Company's business management is always based on the principles of sustainability and good governance. You can see that holds true in the score of 24.7 (an increase of 3.4 points from the previous year's score of 28.1) we earned for ESG Risk Rating in 2023 from the Sustainalytics Rating Institute. PGN will continue to maintain its ESG rating as we are planning to hardwire sustainability principles into the Company's business strategy while remaining proactive in undertaking more initiatives in order to strengthen our business for sustainable growth.

Through this Annual Report, we will discuss in depth the implementation of PGN's strategies and policies, performance achievements in 2023, governance practice, and future business outlook in ensuring the Company's sustainability.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Tahun 2023 masih diliputi dengan berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* yang diterbitkan pada Januari 2024, mencatatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 3,1% dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 dengan kecenderungan stagnan di angka yang sama. Tercatat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mengalami penurunan dari pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,5%.

Ketegangan geopolitik juga masih menjadi ancaman utama prospek ekonomi dan perdagangan global. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara beberapa kawasan yang selama ini menjadi pusat konflik seperti Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan beberapa wilayah lain juga memiliki potensi untuk mendisrupsi perekonomian global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas. Hal ini dapat memperburuk kinerja perdagangan dan investasi global yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia.

Di tengah ketidakpastian dan tantangan makro ekonomi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,05%, kondisi ini turun dari sebelumnya pada

MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

The year 2023 was still clouded with various global economic challenges, from possible economic slowdown, heated geopolitical tensions, inflationary risk, to climate change. The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook report published in January 2024, recorded global economic growth of 3.1% in 2023 and have predicted that the global economy would only grow at the about same rate in the upcoming 2024. Global economic growth in 2023 was recorded to have decreased from 3.5% recorded in 2022.

Geopolitical tension also remained a major threat to global economic and trade outlooks. There were no signs that Ukraine war would be over anywhere near in the future. Meanwhile, other regions known for being the centers of conflict, such as Korean Peninsula and the Middle East also threatened global economy and trigger commodity prices to go even higher. Such likely occurrence could've further squeezed global trade and investment outputs and posed further negative impacts especially on developing countries like Indonesia.

Amidst global macroeconomic uncertainty and challenges, the Central Statistics Agency (BPS) recorded that Indonesia's economic growth in 2023 reached 5.05%, a noticeably slower rate compared to 5.31% in

tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri terutama didorong oleh peningkatan permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, serta tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

the previous year. Domestic economic growth was mainly driven by increased domestic demand such as household consumption and investment, in addition to the resilient positive export performance amidst slowing global economic growth.

Inflasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% dengan capaian nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp15.255 atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp15.000. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun tercatat mencapai 6,68%. Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD78,43 per barel, dengan *lifting* minyak sebesar 605,5 ribu bph dan *lifting* gas bumi mencapai 960,4 ribu bsmph .

Inflation in 2023 was recorded at 2.61% with Rupiah hovering at around Rp15,255 per US Dollar or weaker than the APBN target of Rp15,000, while the interest rate for 10-year Government Bond (SBN) was set at 6.68%. On the other hand, the price of Indonesian crude oil in 2023 was recorded at USD78.43 per barrel, with oil lifting of 605.5 thousand bpd and natural gas lifting reaching 960.4 thousand boepd .

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 68,2%. Pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya gas bumi yang digunakan sebagai energi transisi menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Meanwhile, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) noted that the use of natural gas for domestic needs in 2023 had reached 68.2%. The use of fossil fuel oil and natural gas (oil and gas) still played an important role in securing national energy supplies, especially natural gas which is used as transition energy towards Net Zero Emissions by 2060.

Memahami kondisi makro ekonomi global dan nasional yang demikian memberikan tantangan dan pengaruh tersendiri bagi PGN untuk terus menumbuhkan kinerja. Kendati demikian, sepanjang tahun 2023, volume pengelolaan gas PGN tetap tumbuh positif dengan volume niaga gas dan TUA mencapai 977 BBTUD atau naik 6% dari tahun 2022, dan pengaliran gas bumi melalui pipa transmisi mencapai 1.458 MMSCFD atau naik 8% dibandingkan tahun lalu dengan pasokan gas berasal dari kontrak pasokan gas eksisting dan baru.

The global and national macroeconomic landscapes had but only challenged PGN to deliver even better this year. As we would expect, PGN's gas management volume continued to grow positively throughout the year with gas and TUA trading volume reaching 977 BBTUD or up 6% from 2022, and natural gas flows through transmission pipes reaching 1,458 MMSCFD or up 8% compared to the previous year with supply gas coming from the Company's existing and new gas supply contracts.

Pada saat pelaksanaan penyaluran gas, terdapat beberapa gangguan pasokan gas baik yang terencana (*planned*), maupun tidak terencana (*unplanned*) yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan atau tidak tercapainya target pasokan dalam satu wilayah. Selain itu juga terdapat penurunan ketersediaan pasokan gas di beberapa wilayah karena mengalami fase *natural declining*. Menghadapi hal ini, PGN kemudian melakukan berbagai optimasi penyaluran gas untuk mengurangi dampak gangguan tersebut menggunakan tambahan pasokan gas dari pemasok lain yang memiliki kelebihan ketersediaan gas serta penambahan pasokan dari sumber baru. Peran FSRU Lampung yang terintegrasi dengan pipa SSWJ semakin penting sebagai *enabler supply point* bagi pasokan baru yang bersumber dari LNG, seiring dengan *natural decline* pasokan gas eksisting utama.

We sort of had some disruptions in gas distribution, both planned and unplanned, which led to supply shortages or failure on our part to deliver on our supply targets in some particular areas. Adding to that was a decrease in the availability of gas supply in other areas as the areas have already entered the natural declining phase. With these issues to encounter, PGN was quick to carry out various gas distribution optimizations to reduce the impact of the disruption by using additional gas supply from other suppliers who had gas excess while also adding more supply from new sources. The role of the Lampung FSRU, which is integrated with the SSWJ pipeline, became increasingly important as an enabler supply point for new supplies sourced from LNG as some of our existing sources of gas supply were experiencing natural decline.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam menghadapi perubahan dan dinamika bisnis, kami membuka lembaran 2023 dengan melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan strategis. Pada tahun 2023, PGN melanjutkan dan mengembangkan strategi serta kebijakan yang sudah diaplikasikan dan terbukti keberhasilannya pada tahun sebelumnya, yang mencakup strategi optimasi, *customer acquisition*, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis, pengoptimalan biaya dan *liability management*, penerapan teknologi informasi, serta penerapan strategi keberlanjutan. Berbagai penerapan strategi ini tentunya dengan tetap mengutamakan keandalan kualitas infrastruktur dan *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE).

Selama tahun 2023, penerapan kebijakan strategis terus difokuskan pada upaya untuk menopang kinerja positif Perusahaan. Kebijakan strategis tersebut meliputi strategi optimasi pasokan gas untuk menjaga ketersediaan pasokan gas di seluruh wilayah operasional PGN melalui gas pipa, salah satunya melalui perpanjangan kontrak pasokan gas Blok Corridor yang merupakan pemasok utama Perseroan dengan jangka waktu kontrak sampai dengan 2028 sesuai alokasi yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu, Perseroan juga memaksimalkan *make-up* gas yang harus diserap sampai akhir tahun 2023.

Kami juga menjalankan *customer acquisition* untuk mencapai target volume pengelolaan gas melalui penambahan pelanggan baru, pengembangan bisnis LNG, penyediaan infrastruktur *beyond pipeline* dan perluasan layanan jargas rumah tangga. Jumlah pelanggan PGN saat ini masih didominasi segmen pelanggan rumah tangga sebesar 825.856 pelanggan, dengan pelanggan industri - komersial dan pelanggan kecil masing-masing sebesar 3.103 pelanggan dan 1.976 pelanggan. Pertumbuhan pelanggan baru ini juga disertai dengan kepuasan pelanggan eksisting yang telah berlangganan gas PGN. Melalui survei kepuasan pelanggan yang telah dilakukan, PGN mendapatkan Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) sebesar 4,58 (dari skala 5). Capaian ini merupakan *feedback* atas upaya PGN untuk melayani pelanggan dengan penuh empati, tanggung jawab serta inovasi.

Di samping itu, PGN juga melaksanakan diversifikasi bisnis melalui pengembangan bisnis Anak Perusahaan dengan membangun LNG Hub Arun, mengembangkan bisnis *clean* dan *renewable energy* serta optimasi bisnis hulu.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

As we turned the pages of 2023, we executed various strategies and strategic policies to deal with year's challenges and business dynamics. We spent the year further developing the strategies we had for PGN in the previous years that had already proven effective, which cover optimization, customer acquisition, household service expansion, business diversification, cost optimization and liability management, IT application, and the execution of PGN's sustainability strategies. Clearly, as we were prudently executing the various strategies, we've always placed our priority on the qualities of infrastructure as well as Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) aspects.

During 2023, we laid an intense focus of our strategic policy execution on supportive efforts to the Company's positive performance. This strategic policy encompassed a gas supply optimization strategy to keep gas supply at all PGN operational areas available at all times via piped gas by e.g. extending the contract with Corridor Block gas supply as our key supplier up to 2028 pursuant to the allocation mandated to us by the Minister of Energy and Mineral Resources. We also worked to keep the absorbed amount of make-up gas at maximum level until year's end.

Some other strategies we ran this year were new customer acquisition to deliver against our targets in gas volume management, LNG business development, beyond-pipeline infrastructure, and the expansion of household gas pipeline services. PGN customer portfolio is currently dominated by the household segment with a total of 825,856 customers, followed by industrial in the commercial and retail segments with 3,103 and 1,976 customers respectively. The growth in new customers came with increased level of the satisfaction of existing subscribing customers of PGN gas. In the customer satisfaction surveys recently conducted, PGN earned a Customer Satisfaction Index of 4.58 (on a scale of 5). This achievement was a feedback on PGN's efforts to serve customers with empathy, responsibility and innovation.

Running parallel, business diversification was also carried out by subsidiary as it built the Arun LNG Hub, developed clean and renewable energy businesses and optimized upstream businesses.

Inisiatif dalam kebijakan strategis juga termasuk melakukan optimasi biaya dan pengelolaan anggaran yang efektif serta *liability management*. Di tahun 2023, Perseroan melaksanakan *liability management* pembelian kembali surat utang obligasi (*bond buyback*) PGN dan PT Saka Energi Indonesia (SAKA). Pelaksanaan *buyback* berdampak pada penurunan beban keuangan Perseroan di tahun 2023 sebesar 26% dari tahun sebelumnya.

The strategic policy initiatives involved cost optimization and effective budget management as well as liability management. In 2023, the Company ran a proper liability management with the bond buyback of PGN and PT Saka Energi Indonesia (SAKA). The buyback had eventually led to a decrease in the Company's finance cost in 2023 by 26% from the previous year's figure.

Selain melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut, kami terus berinovasi dalam pertumbuhan bisnis Perusahaan. Melalui penyediaan infrastruktur *beyond pipeline CNG retail* oleh anak usaha Perseroan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) dan PT Pertagas Niaga (PTGN), kami terus mewujudkan komitmen perluasan pemanfaatan gas bumi di seluruh sektor baik industri, komersial hingga transportasi. Di tahun 2023, kontribusi volume CNG retail pada pengelolaan niaga gas Perseroan bertumbuh sebesar 27% dari 11 BBTUD di tahun 2022 menjadi 14 BBTUD di tahun 2023. Komitmen ini terus kami lanjutkan dengan melakukan inovasi uji coba penggunaan LNG untuk truk pengangkut bahan bakar gas, serta uji coba penggunaan BBG pada mesin kapal nelayan.

Besides the above strategies and policies, we continued to innovate to grow the Company's business. By providing beyond pipeline infrastructure CNG retails by the Company's subsidiaries PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) and PT Pertagas Niaga (PTGN), we continued to manifest our commitment to expand the use of natural gas across all sectors, including industrial, commercial and transportation. In 2023, the contribution of retail CNG volume to the Company's gas trading management grew 27% from 11 BBTUD in 2022 to 14 BBTUD in 2023. We will continue this commitment with further innovations as we made trials on the use of trial of using LNG for trucks carrying gas fuel, and another trial for CNG-powered fishing boat engines.

Kami juga mengembangkan LNG Hub Arun sebagai pusat LNG Trading Asia dan destinasi LNG Hub Global melalui afiliasi, PT Perta Arun Gas, memanfaatkan posisi strategis Arun di jalur pelayaran internasional. Salah satu tahap awal yang dilakukan adalah merevitalisasi tangki F-6004 yang saat ini dalam status tidak digunakan sejak tahun 2004 untuk memenuhi kebutuhan layanan penyimpanan LNG. Kemudian, kami juga terus berinovasi pada penerapan digitalisasi untuk mendukung strategi *go to retail* melalui pengembangan dan *revamping* sistem digital berlangganan gas (PGN Mobile, Rely On PGN, PGN Partner), serta *revamp landing page pgas.id* yang ramah *Search Engine Optimization* (SEO) dalam rangka mencari serta mendapatkan calon pelanggan baru.

We are also developing the Arun LNG Hub as an Asian LNG Trading center and a Global LNG Hub destination through an affiliate, PT Perta Arun Gas, leveraging on Arun's strategic position in international shipping lanes. This involved an initial stage where we revitalized the F-6004 tank that we'd had idle since 2004 to meet the need for LNG storage services. Further, we also continued to innovate in implementing digitalization to support the go to retail strategy through developing and revamping the gas subscription digital system (PGN Mobile, Rely On PGN, PGN Partner), as well as revamping the pgas.id landing page which is Search Engine Optimization (SEO) friendly in order to find and acquire new potential customers.

Seiring perubahan revolusi industri 5.0, PGN juga senantiasa mengikuti perkembangan Teknologi Informasi, termasuk penerapannya dalam proses bisnis, operasional dan akses informasi kepada publik. Selama tahun 2023, PGN terus menjalankan fokus dan kebijakan strategis dalam penerapan Teknologi Informasi melalui 5 (lima) tema program yang meliputi *Data Driven Solution, Application as Business Enabler, ERP Solution, Infrastructure Reliability & Availability* dan *ICT Governance, Synergy & Strategic Planning*. PGN berkomitmen untuk terus memperkuat platform Teknologi Informasi guna menjaga dan meningkatkan keamanan proses bisnis dan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran. Lebih

Along with changes in the 5.0 industrial revolution, PGN stays abreast with developments in Information Technology, including its application in business processes, operations and access to information for the public. During 2023, PGN continued to implement strategic focus and policies in the application of Information Technology through 5 (five) program themes which include Data Driven Solution, Application as Business Enabler, ERP Solution, Infrastructure Reliability & Availability and ICT Governance, Synergy & Strategic Planning. PGN is committed to strengthening its Information Technology platform to maintain and improve the security of business processes and reliability to disclose information in an integrated, timely and

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

jauh lagi, PGN melakukan digitalisasi dalam seluruh rantai proses bisnis, mulai dari sisi operasional hingga *business support* untuk mendukung kinerja Perusahaan agar lebih *agile*, efektif dan efisien baik dari segi tata kelola bisnis maupun waktu.

Pada saat yang sama, kami juga menjalankan pengelolaan dan pengembangan SDM, implementasi kebijakan HSSE, serta pelaksanaan program reduksi emisi guna mendukung bisnis berkelanjutan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Serta Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memiliki kewenangan untuk mengkaji, memonitor dan mengawasi implementasi strategi Perusahaan. Implementasi strategi dan kebijakan strategis akan mengarahkan Perusahaan agar mencapai sasaran strategi yang ditetapkan.

Kami menyusun strategi dan kebijakan strategis selaras dengan amanat yang ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) Direksi. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, Direksi berperan penting dalam memastikan penerapannya dijalankan dengan baik dalam seluruh lapisan organisasi. Beberapa tugas dan peranan utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya menganalisis situasi internal dan eksternal Perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, serta menentukan tujuan strategis Perusahaan.

Proses Penerapan Strategi dan Kebijakan Strategis yang Efektif

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis Perusahaan terlaksana dengan baik, kami melakukan penjabaran yang diperlukan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Melalui upaya ini, Direksi memastikan strategi dan kebijakan yang diterapkan Perusahaan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh fungsi dalam level unit bisnis terkait.

Beberapa hal lainnya dilakukan Direksi antara lain melakukan komunikasi secara langsung kepada level manajemen senior untuk memastikan mereka memahami strategi dan kebijakan tersebut sehingga dapat mengaplikasikannya secara tepat, serta melakukan tinjauan manajemen atau rapat bersama

targeted manner. Further, PGN is digitizing the entire business process chain, from operational to business support to make the Company more agile, effective and efficient both in terms of business governance and time.

At the same time, we run human resource management and development, implement HSSE policies, and run emission reduction programs to support sustainable business.

Our Role as the Board of Directors in the Formulation and Execution of Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors has the authority to review, monitor and oversee the execution of the Company's strategy. A proper execution of strategies and strategic policies will direct the Company to achieve its strategic targets.

We develop strategic strategies and policies in line with the mandate set out in the Board of Directors Charter. In formulating strategies and strategic policies, we play a key role in ensuring proper strategy execution at all levels of the organization. Some of our key duties and roles as the Board of Directors in formulating strategy include analyzing the Company's internal and external situation to understand the business environment and all challenges encountered while determining the Company's strategic goals.

The Process of Effective Strategy and Strategic Policy Implementation

In ensuring that the Company's strategy and strategic policies are properly implemented, we carry out the necessary elaborations as stated in the Company's Work Plan & Budget and the Company's Long-Term Plan. Through these efforts, we ensure that the strategies and policies implemented by the Company are comprehensible and workable to all functions at the relevant business units.

Other matters that we do include communicating directly with senior management levels to ensure they understand the strategies and policies so they can apply them appropriately, as well as conducting management reviews or meetings with related units to check progress made in strategies and policies execution. In addition, we

unit terkait untuk memeriksa perkembangan penerapan strategi dan kebijakan. Di samping itu, Direksi juga dapat meninjau lokasi kerja secara langsung untuk memonitor penerapan strategi dan kebijakan (*management visit*), serta memeriksa laporan audit internal dan eksternal untuk meninjau efektivitas implementasi strategi dan kebijakan tersebut.

Direksi juga melakukan pemantauan dan analisa berbagai indikator dalam pelaksanaan proses evaluasi dan monitoring penerapan strategi dan kebijakan. Dalam proses penerapannya, Direksi dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan apabila diperlukan.

PENCAPAIAN KINERJA 2023

Tantangan dan dinamika bisnis yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2023, baik dari kondisi global dan industri cukup mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Hal ini tercermin pada pencapaian Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke Entitas Induk mencapai sebesar USD278 juta atau lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar USD326 juta. Namun, seiring dengan perekonomian Indonesia yang tetap bertumbuh dan berdaya tahan, secara umum Perusahaan mampu mencatatkan pertumbuhan positif dari kinerja operasional dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada segmen niaga gas, transportasi gas, TUA, regasifikasi, dan transportasi minyak.

Pada tahun 2023, volume niaga gas terealisasi secara total sebesar 923 BBTUD atau tumbuh sebesar 3% dari 896 BBTUD pada tahun 2022. Pertumbuhan volume tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi gas bumi dari sektor ritel serta penambahan pelanggan baru di sektor industri dan komersial. Kemudian, pencapaian volume transmisi gas sebesar 1.458 MMSCFD atau meningkat 8% dari volume tahun lalu sebesar 1.349 BBTUD. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan *demand* dan telah mengalirnya gas bumi dari lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) melalui pipa transmisi Gresik-Semarang.

Selain itu juga, terdapat peningkatan 86% volume TUA melalui FSRU Lampung dari 29 BBTUD ditahun 2022 menjadi 54 BBTUD di tahun 2023. Peningkatan volume TUA seiring dengan peningkatan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung. Sedangkan volume *lifting* minyak dan gas bumi ditahun 2023 tercapai sebesar 9,16 MMBOE atau lebih rendah dari pencapaian tahun lalu sebesar 10,54 MMBOE karena penurunan produksi dan *lifting* di Wilayah Kerja (WK) Pangkah dikarenakan problem *water channeling* di salah satu sumur dan tertundanya pengeboran di blok Fasken dampak dari turunnya harga *Henry Hub.*

also pay direct visits to work locations to monitor the strategies and policies executions (management visits) while examining internal and external audit reports to review the effectiveness of implementation of these strategies and policies.

We also monitor and analyze indicators in the implementation of the evaluation and monitoring process of implementing strategies and policies. In the implementation process, we normally make adjustments to strategies and policies if necessary.

2023 ACHIEVEMENTS

The challenges and business dynamics we encountered as the year unfolded, both from global and industrial conditions, had quite an impact on our finances. The financial shortfalls were noticeably reflected in the lower Profit of USD278 million for the Year Attributable to the Parent Entity than USD326 million earned in the previous year. However, as the Indonesian economy continued to grow and remained resilient, the Company was generally able to deliver growth in operational performance compared to the previous year, especially in the gas trading, gas transportation, TUA, regasification and oil transportation segments.

In 2023, we realized a total gas trading volume of 923 BBTUD or up 3% from 896 BBTUD in 2022. The volume growth was driven by increased natural gas consumption from the retail sector as well as the addition of new customers in the industrial and commercial sectors. Then, the gas transmission volume was achieved at 1,458 MMSCFD or an increase of 8% from 1,349 BBTUD in the previous year. The increase was in line with stronger demand and more flow of natural gas from the Jambaran Tiung Biru (JTB) field via the Gresik-Semarang transmission pipeline.

We also posted an 86% increase in TUA volume through FSRU Lampung from 29 BBTUD in 2022 to 54 BBTUD in 2023. The increase in TUA volume corresponded to the increasing customer needs and the optimization of FSRU Lampung. Meanwhile, the volume of oil and gas lifting in 2023 reached 9.16 MMBOE or lower than 10.54 MMBOE in the previous year due to a decrease in production and lifting in the Pangkah Working Area, resulting from water channeling issues, and postponed drilling in Fasken block due to the impact of lower Henry Hub prices.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Penjualan gas bumi kepada pelanggan selama tahun 2023 secara rinci terdiri dari 1) pelanggan rumah tangga sebesar 10 BBTUD naik 8% dari 9 BBTUD pada tahun sebelumnya; 2) pelanggan kecil sebesar 0,70 BBTUD, tumbuh 8% dari tahun 2022 yang sebesar 0,65 BBTUD; 3) pelanggan industri dan komersial tercatat sebesar 913 BBTUD, naik 3% dari 886 BBTUD dari tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2023, jumlah pelanggan PGN mencapai 830.935 pelanggan yang meliputi 1) pelanggan rumah tangga sebanyak 825.856 pelanggan turun 1% dari 834.161 pelanggan di tahun lalu; 2) pelanggan kecil sebanyak 1.976 pelanggan naik 3% dari posisi sebelumnya yang mencapai 1.923 pelanggan; 3) pelanggan industri dan komersial sebanyak 3.103 pelanggan naik 8% dari sebelumnya sebesar 2.869 pelanggan. Kami juga mencatat pertumbuhan panjang pipa jaringan gas bumi PGN menjadi 12.692 km dari sebelumnya 11.525 km, naik 10% atau bertambah 1.167 km sepanjang tahun 2023.

Di tengah ekonomi yang penuh tantangan, kami dapat merealisasikan belanja modal pada 2023 sebesar USD232 juta atau mencapai 54% dari target. Pencapaian belanja modal (*capital expenditure*/capex) terdapat pada: pembangunan pipa Senipah-Balikpapan, pengembangan lapangan Sidayu (blok Pangkah), pengembangan lapangan Bukit Tua (blok Ketapang), pembangunan pipa KIK Kendal dan KIT Batang, pemasangan pipa ke calon pelanggan industri, komersial dan pelanggan kecil, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga.

Di samping itu, terdapat beberapa kegiatan investasi yang masih di bawah target 2023, yaitu pengembangan lapangan Suisen (blok Muriah), pengembangan lapangan Ujung Pangkah dan West Pangkah (Blok Pangkah), LNG Hub Arun (Revitalisasi Tangki F-6004).

Selama tahun 2023, PGN secara aktif memberikan dukungan pada program-program strategis Pemerintah di antaranya pembangunan jaringan gas rumah tangga yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, kajian detail pembangunan pipa transmisi Cirebon – Semarang Tahap II untuk menghubungkan jaringan infrastruktur gas bumi di Jawa Timur – Tengah dengan jaringan Sumatera – Jawa Barat, serta program-program penugasan lainnya seperti pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) dan gasifikasi pembangkit listrik PLN.

In details, natural gas sales to customers during 2023 consisted of 1) household customers with 10 BBTUD, up 8% from 9 BBTUD in the previous year; 2) retail customers with 0.70 BBTUD, up 8% from 0.65 BBTUD in 2022; 3) industrial and commercial customers that combined reached 913 BBTUD, up 3% from 886 BBTUD reached in the previous year.

Throughout 2023, PGN had a total of 830,935 customers, including 1) 825,856 household customers, down 1% from 834,161 customers in the previous year; 2) 1,976 retail customers, up 3% from the previous position of 1,923 customers; 3) 3,103 industrial and commercial customers, quite a significant increase of 8% from 2,869 customers registered in the previous year. We also posted a growth in length in PGN's natural gas pipeline network to 12,692 km from previously 11,525 km, up 10% or 1,167 km throughout 2023.

In such a challenging economic landscape of 2023, we managed to realize USD232 million of capital expenditure or reached 54% from target. We had capital expenditure for the construction of Senipah-Balikpapan pipeline, the development of Sidayu field (Pangkah block), the development of Bukit Tua field (Ketapang block), the construction of KIK Kendal and KIT Batang pipelines, the installation of pipes to prospective industrial, commercial and retail customers, and the construction of household gas network.

But some of our investments fell short of their 2023 targets, namely the development of Suisen field (Muriah block), the development of Ujung Pangkah and West Pangkah fields (Pangkah Block), and the Arun LNG Hub (F-6004 Tank Revitalization).

During 2023, PGN actively lent its support to the Government's strategic programs, including the construction of a household gas network as one of the National Strategic Projects, a detailed study of the construction of the Cirebon - Semarang Phase II transmission pipeline to connect the natural gas infrastructure network in East Java - Central with the Sumatra - West Java network, in addition to other assigned programs such as the construction of natural gas network infrastructure in the Central Core Area of the National Capital Government (KIPP IKN) and the gasification of PLN power plants.

Di sisi lain, PGN sebagai Subholding Gas terus bersinergi di dalam Holding Migas Pertamina melalui penyelesaian pembangunan pipa Senipah-Balikpapan dimana gas telah mulai dialirkan ke RU V Balikpapan sejak 27 Desember 2023. PGN juga turut berperan untuk mensukseskan program transisi energi Pertamina melalui uji coba penggunaan *Diesel Dual Fuel* (DDF) untuk truk tangki PT Pertamina Patra Niaga dimana sepanjang tahun 2023, telah selesai dilakukan konversi 4 truk tangki dan uji coba.

Selain itu, beberapa portofolio usaha yang dilaksanakan Anak Perusahaan juga mencapai pertumbuhan kinerja yang baik. Transportasi minyak mencapai sebesar 56,86 MMBOE atau tumbuh signifikan 305% dari tahun lalu terutama dikontribusikan dari penyaluran minyak melalui pipa Rokan. Tren kenaikan juga terlihat pada volume regasifikasi sebesar 158 BBTUD atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya serta pemrosesan LPG mencapai 38.782 ton di tahun 2023.

Perbandingan Kinerja Keuangan *Year on Year*

Informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan yang dicapai pada tahun 2023 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

1. Total Aset 2023 sebesar USD6,60 miliar, turun 8% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD7,19 miliar;
2. Total Liabilitas 2023 sebesar USD3,05 miliar, turun 18% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD3,75 miliar;
3. Total Pendapatan 2023 sebesar USD3,65 miliar, naik 2% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD3,57 miliar;
4. Total Laba Bersih 2023 sebesar USD278 juta, turun 15% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD326 juta; dan
5. Realisasi belanja modal 2023 sebesar USD232 juta, naik 8% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD215 juta.

Kinerja keuangan Perusahaan selama tahun 2023 selain dipengaruhi oleh ekonomi global dan nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan, juga dipengaruhi terutama oleh penurunan kontribusi segmen hulu dan pemrosesan gas yang terdampak penurunan rata-rata ICP, penurunan bagian laba dari ventura bersama, serta adanya provisi terkait sengketa pajak dan tambahan provisi kontrak LNG.

On the other hand, PGN as a Gas Subholding continued synergy under Pertamina Oil and Gas Holding with the completion of the Senipah-Balikpapan pipeline as we commenced gas flow to RU V Balikpapan on December 27, 2023. PGN also played a role in making Pertamina's energy transition program a success through usage trial of Diesel Dual Fuel (DDF) for PT Pertamina Patra Niaga where 4 of their tank trucks were successfully modified and put into test.

What excited us more was that our subsidiaries delivered equally strong growth in some of their business portfolios. Oil transportation reached 56.86 MMBOE or a significant growth of 305% from last year, mainly contributed by oil distribution via the Rokan pipeline. An upward trend was also seen in regasification as its volume reached 158 BBTUD or an increase of 10% from the previous year and in LPG where as much as 38,782 tons was processed in 2023.

Year on Year Comparison in Financial Performance

Information about the financial performance achieved in 2023 compared to the realization in 2022 is given below:

1. Total Assets in 2023 stood at USD 6.60 billion, down 8% compared to 2022 which was recorded at USD 7.19 billion;
2. Total Liabilities in 2023 stood at USD3.05 billion, down 18% compared to 2022 which was recorded at USD3.75 billion;
3. Total Revenue in 2023 reached USD3.65 billion, up 2% compared to 2022 which was recorded at USD3.57 billion;
4. Total Net Profit in 2023 was USD278 million, down 15% compared to 2022 which was recorded at USD326 million; and
5. Realized capital expenditure in 2023 was USD232 million, up 8% compared to 2022 which was recorded at USD215 million.

Other factors that affected the Company's finance in 2023 than the slowdown in both global and national economies were a decrease in upstream and gas processing contribution due to lower average ICP, a decrease in the share of profits from joint ventures, and provisions related to tax disputes and LNG contract.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Secara umum, kami bersyukur dapat melewati tantangan sepanjang tahun 2023 dengan baik. Pencapaian kinerja keuangan dan operasional pada tahun ini merupakan wujud upaya PGN untuk senantiasa mengelola bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal serta aman namun tetap memberikan *value* bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang tidak mencapai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), baik dari sisi operasional maupun keuangan.

Realisasi Niaga Gas mencapai sebesar 923 BBTUD atau 98% dari target RKAP 2023 yang dipengaruhi oleh perubahan jadwal *on stream* pemasok dan penurunan pasokan gas serta kejadian gangguan *unplanned* di beberapa wilayah. Mengantisipasi hal ini, PGN menjalankan beberapa langkah optimasi penyaluran gas di antaranya mengambil gas dari pemasok lain, pemanfaatan *linepack* hingga mekanisme simpan pinjam.

Realisasi TUA mencapai 54 BBTUD atau 214% dari target RKAP 2023 terutama didorong oleh optimasi penyaluran ke PLN. Sementara, realisasi Transportasi Gas mencapai sebesar 1.458 MMMSCFD atau 105% dari target RKAP 2023. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan di ruas NSA - North Sumatera Area (PLN Belawan dan PIM), SSA-South Sumatera Area (Pusri dan PLN Keramasan) dan Kalimantan (PKT dan KMI).

Realisasi *Lifting* Minyak dan Gas mencapai sebesar 9,16 MMBOE atau 90% dari target RKAP 2023, disebabkan penurunan produksi dan *lifting* WK Pangkah, Bangkanai, dan Fasken. Sedangkan, realisasi Transportasi Minyak mencapai sebesar 56,86 MMBOE atau 134% dari target RKAP 2023 disebabkan peningkatan penyaluran minyak melalui pipa Rokan.

Di sisi lain, PGN juga mencatatkan realisasi regasifikasi sebesar 158 BBTUD atau 119% dari target RKAP 2023 karena kenaikan permintaan regasifikasi di LNG Hub Arun. Adapun, realisasi Pemrosesan Gas mencapai sebesar 39 ribu ton atau 79% dari target RKAP 2023 yang disebabkan aktivitas pemeliharaan di LPG ENP Plant dan penyesuaian produksi.

Comparison Between Achieved and Targeted Results

In general, we are grateful for our ability to overcome the year's challenges. The achievement of financial and operational performance this year was a manifestation of PGN's efforts to always run an optimum, reliable and safe management of downstream natural gas business while generating values for shareholders and other related stakeholders. However, certain matters fell short of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), both from an operational and financial perspective.

The realization of Gas Trading reached 923 BBTUD or 98% of the 2023 RKAP target due to changes in supplier on stream schedules and a decrease in gas supply as well as unplanned disruptions in several areas. In anticipation of this, PGN took some steps to optimize gas distribution, including sourcing gas from other suppliers, utilizing linepacks and saving and loan mechanisms.

TUA reached 54 BBTUD or 214% of its 2023 RKAP target, driven by the optimization of distribution to PLN. Meanwhile, Gas Transportation reached 1,458 MMMSCFD or 105% of the 2023 RKAP target. This was due to increases in the following sections: NSA - North Sumatra Area (PLN Belawan and PIM), SSA-South Sumatra Area (Pusri and PLN Keramasan) and Kalimantan (PKT and KMI).

The realization of Oil and Gas Lifting reached 9.16 MMBOE or 90% of the 2023 RKAP target, due to lower production and lifting of the Pangkah, Bangkanai and Fasken. Meanwhile, Oil Transportation reached 56.86 MMBOE or 134% of the 2023 RKAP target due to increased oil distribution through the Rokan pipeline.

On the other hand, PGN also delivered 158 BBTUD in regasification or 119% of the 2023 RKAP target as demand for regasification increased at the Arun LNG Hub. Meanwhile, the realization of Gas Processing reached 39 thousand tons or 79% of the 2023 RKAP target due to maintenance activities at the LPG ENP Plant and production adjustments.

Jika melihat capaian kinerja keuangan, terutama berkaitan dengan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke Entitas Induk atau Laba Bersih mencapai 116% dari target RKAP 2023, namun turun 15% dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja segmen hulu dan pemrosesan gas, tidak tercapainya bagian laba dari ventura bersama, provisi sengketa pajak dan tambahan provisi atas kontrak LNG.

PGN dalam perannya sebagai pengelola hilir gas bumi di Pertamina, secara berkelanjutan akan terus menjalankan kegiatan operasional dan investasi secara inovatif dan *prudent* agar dapat menciptakan pertumbuhan bisnis organik serta *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional. Selain itu, PGN juga lebih fokus dalam pengembangan utilisasi gas bumi yang ramah lingkungan di masa transisi energi menuju energi terbarukan.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Mitigasinya

Berbagai pencapaian kinerja yang kami raih pada tahun 2023 tidak terlepas dari upaya kami dalam menghadapi tantangan yang ada. Membuka lembaran tahun 2023, kami senantiasa waspada terhadap perkembangan geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah seperti perang Rusia dan Ukraina serta konflik Israel dan Palestina, yang hingga akhir tahun 2023 belum memperlihatkan titik terang. Kami juga memperhatikan isu global lainnya seperti penurunan ekonomi Tiongkok serta inflasi yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan.

Di samping mencermati kondisi makro ekonomi global, kami juga mengantisipasi potensi ketidakpastian yang terjadi yang dapat menjadi tantangan bagi Perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari perubahan profil *supply demand* energi global dan kenaikan suku bunga yang dapat yang bertahan tinggi dalam waktu yang lama (*high for longer*) sehingga meningkatkan suku bunga pinjaman. Kendati demikian, kami percaya bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya memberikan potensi kejadian yang berpengaruh negatif (*downside*), melainkan juga dapat berpengaruh positif (*upside*).

Dalam rangka melewati menjalankan langkah mitigasi terhadap tantangan yang dihadapi, kami secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal sebagai *early warning system* yang dapat menjadi *leading indicator* bagi Perusahaan guna menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Saat ini kami telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang telah berjalan baik dan *Enterprise Risk Management Systems 2.0* (ERMS 2.0) sebagai aplikasi pengelolaan risiko yang digunakan oleh Grup Pertamina.

If we look at what the Company achieved in finance, while our Profit for the Year Attributable to the Parent Entity or Net Profit reached 116% of the 2023 RKAP target, it did decrease 15% from the 2022's figure. This was mainly due to shortfalls in upstream and gas processing performance, desreasing in share of profits from joint ventures, provisions on tax and LNG contracts.

PGN, in its role as Pertamina's gas subholding to manage downstream natural gas business, will continue run operations and make investments innovatively yet prudently to pursue organic growth while creating a multiplier effect on the nation's economy. PGN is also more focused on developing green natural gas utility in the energy transition period towards renewable energy.

Challenges Faced and Mitigation Measures

We'd like to attach what we delivered in 2023 to our successful dealing with the year's challenges. As we turned the pages of 2023, we kept our eye on geopolitical situations in conflicting regions such as the Russian and Ukrainian and the more recent conflict between Israel and Palestinian, whose end still appeared unlikely at end of 2023. We also attended very closely to other global issues such as economic set back China was experiencing in addition to persistent inflation that also threatened our business.

While we monitored the global macroeconomic landscape with extra care, we also anticipated potential uncertainties that we thought could pose some more challenges to the Company. As we can see, there were noticeable changes in the profile of global energy supply demand in addition to the protracted rate increase path for longer that eventually led to higher loan interest rates. However, we believe that behind the downsides (negative impacts) of every change that have come to pass to date, lie some upsides that will bring some positives.

In order for us to be able to carry out mitigation steps for all the challenges encountered, we have continued to optimize our risk management and internal control systems as an early warning system which give us leading indicators to face all possible changes. We have recently begun to effectively run our Risk Management Information System (SIMR) and Enterprise Risk Management Systems 2.0 (ERMS 2.0) as a risk management application that has been adopted by Pertamina Group.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Dalam rangka memperkuat ketahanan organisasi Perusahaan, kami juga menerapkan *Business Continuity Management Systems* yang mengacu pada standar ISO 22301:2019 untuk satu siklus penuh (*full cycle*) di tengah berbagai kondisi ketidakpastian yang dapat memberi disrupsi kepada proses bisnis.

In order to strengthen the Company's organizational resilience, we have also implemented Business Continuity Management Systems which refer to the ISO 22301:2019 standard for a full cycle amidst various possibly disruptive uncertainties.

Kami telah mengidentifikasi ulang risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang, termasuk risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis berkelanjutan dan proyek atau investasi strategis dari Perusahaan dan Anak Perusahaan/Afiliasi. Langkah ini diambil dengan tujuan agar tercipta keselarasan kebijakan manajemen risiko antara PGN sebagai entitas Subholding dengan Anak Perusahaan/Afiliasi, serta untuk menjaga agar implementasinya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ISO 31000:2018.

We have re-identified potential risks that we may encounter as we move into the future, including operation-related risks and other risks in strategic projects or investments of the Company and its Subsidiaries/Affiliates. We have taken this step to create harmony in risk management policies between PGN as a Subholding entity and Subsidiaries/Affiliates while ensuring that the policy execution remains in adherence to the principles of ISO 31000:2018.

Arahan dan kebijakan pengelolaan risiko, yang disajikan melalui *tone from the top*, juga diperoleh melalui pelaporan berkala dan agenda rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen risiko menjadi topik rutin dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan telah ditangani dan dikelola dengan tepat, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diukur.

We also had risk management directions and policies in a tone from the top approach through periodic reporting and the agenda of our joint meeting with the Board of Commissioners. Risk management is a topic that we often discuss in such meetings, where the objective is to ensure that all of the Company's risk exposures are properly handled and managed, and that we have right steps to mitigate the risks.

Perusahaan juga terus memaksimalkan penerapan *scoping* dan analisis kebutuhan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR), sebagai bentuk kepatuhan dan penerapan tata kelola yang lebih baik terkait pengendalian internal. Pada tahun 2023, lingkup penerapan ICoFR telah dimulai secara bertahap diimplementasikan kepada Anak Perusahaan dan Afiliasi. Pelaksanaan semua proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan manajemen risiko melalui usaha mitigasi risiko dan penanganan risiko yang efektif dan terarah, dengan tujuan mengurangi dampak risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.

The Company also made further efforts to maximize the implementation of scoping and analysis of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) needs, as a form of compliance and implementation of better governance related to internal control. In 2023, the scope of implementation of ICoFR started to be implemented at Subsidiaries and Affiliates in phases. The objective of all these processes is to improve risk management through effective and targeted risk mitigation and risk management efforts that they can eventually reduce the impact of risks faced by the Company.

PT Pertamina (Persero) selaku Induk Holding Migas telah melakukan evaluasi maturitas manajemen risiko Subholding Gas yang dilakukan pada tahun sebelumnya, dan memperoleh skor *Risk Maturity Index* (RMI) sebesar 4,18. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko di Perseroan telah mencapai '*Level Managed*' yaitu level ke 4 dari 5 tingkat berdasarkan metodologi *Pertamina Risk Maturity Self Asessment* (PRISMA). Implementasi seluruh

PT Pertamina (Persero) as the Parent Oil and Gas Holding has made evaluation of the maturity of Gas Subholding risk management run in the previous year and obtained a Risk Maturity Index (RMI) score of 4.18. The score indicates that risk management in the Company has reached the 'Managed Level', or level 4 of 5 based on the Pertamina Risk Maturity Self-Assessment (PRISMA) methodology. The implementation of all these processes

proses tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan manajemen risiko melalui upaya mitigasi risiko dan penanganan risiko yang efektif dan tepat sasaran untuk menurunkan dampak risiko Perusahaan.

Pada tingkat operasional di lapangan, kami dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti penurunan ketersediaan pasokan gas karena *planned/unplanned* gangguan pasokan gas serta lapangan sumber gas yang telah memasuki *natural declining*. Tantangan ini diantisipasi dengan mengimplementasikan berbagai langkah optimasi penyaluran gas, di antaranya menambah pasokan gas dari pemasok lain yang memiliki kelebihan ketersediaan gas, memanfaatkan *linepack* yang ada di pipa transmisi, serta mencari potensi ladang gas baru.

Tantangan lain, kami menghadapi kendala di area infrastruktur seperti kendala kesepakatan komersial pada pekerjaan pembangunan terminal LNG serta proses perizinan yang terkendala pada pembangunan jaringan gas rumah tangga. Mengatasi hal ini, kami melakukan komunikasi intensif, melaksanakan *focus discussion group* dan *high level meeting* dengan pemangku kepentingan terkait secara konsisten dan berkesinambungan.

PGN juga melakukan berbagai langkah untuk menjaga margin Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Gas Bumi untuk Pengguna Tertentu (HGBT) bagi tujuh industri yang dipatok di harga USD6–6,75 per MMBTU hingga 2024. Upaya menjaga *margin* dilakukan dengan meningkatkan kegiatan Niaga Gas Bumi kepada sektor-sektor baru dan moda *beyond pipelines* melalui inisiasi proyek LNG *Retail* dan pengembangan penyaluran gas via moda *Compressed Natural Gas* (CNG).

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2024, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menyusut menjadi 2,4% dari sebelumnya yang diperkirakan sebesar 2,6% pada tahun 2023. Hal ini merupakan dampak dari pengetatan kebijakan moneter, terbatasnya ekspansi finansial, serta lemahnya investasi dan perdagangan dunia. Selain itu, terdapat risiko besar untuk pertumbuhan ke depan dari konflik di Timur Tengah, gangguan di pasar komoditas, mahalnya ongkos pinjaman, bengkaknya utang, melandainya ekonomi Tiongkok, inflasi yang masih tinggi, serta perubahan iklim yang ekstrem.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh Bank Dunia turun menjadi 4,9% pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar 5,3% pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi dikarenakan ketidakpastian

aims to improve risk management through effective and targeted risk mitigation and risk management efforts to reduce the impact of the Company's risks.

At the operational level in the field, some of the challenges we encountered were a decrease in gas supply availability due to planned/unplanned gas supply disruptions and the fact that some of our gas source fields have entered the phase of natural decline. We had anticipated this challenge by taking some steps to optimize gas distribution, including sourcing more gas from other suppliers who have excess, utilizing existing linepacks in transmission pipes, and looking for potential new gas fields.

Another challenge was how to overcome the obstacle we had in infrastructure, such as one on commercial agreements in the construction of the LNG terminal and the currently delayed permits in the construction of household gas networks. To overcome the challenges, we communicated intensively via e.g. focus group discussions, consistent and continuous series of high level meetings with relevant stakeholders.

PGN also takes further steps to maintain the Company's margins following the enforcement of the Minister of Energy and Mineral Resources' Decree on Natural Gas Prices for Certain Users (HGBT) in seven industries where the price is set at USD6–6.75 per MMBTU until 2024. Other efforts to maintain margins was to increase natural gas Commercial activities in new sectors and beyond-pipeline through the initiation of Retail LNG project and the development of gas distribution via the Compressed Natural Gas (CNG) mode.

BUSINESS PROSPECT

In 2024, the World Bank projects global economic growth to contract to 2.4% from its preliminary estimate of 2.6% announced in 2023. The revised downward projection will come as a further impact of tightening monetary policy, limited financial expansion, and the weakening trend in world investments and trades. There should also be major risks to future growth due to the Middle East conflict, a disruption in commodity markets, high debt costs, swelling debt, and possible slowdown in Chinese economy in addition to the stubbornly high inflation, and extreme climate change.

From the domestic side, as predicted by the World Bank, Indonesia will see a slower economic growth of 4.9% in 2024 5.3% in 2023. The slowdown will be caused by global economic uncertainty due largely to

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

ekonomi global akibat perlambatan ekonomi Tiongkok. Bagi Asia, Tiongkok merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, pembeli impor terbesar, hingga penyumbang devisa melalui kunjungan turis. Hal ini tentu akan berdampak bagi Indonesia mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama. Perlambatan yang terjadi di Tiongkok diperkirakan akan mempengaruhi jumlah ekspor Indonesia karena permintaan impor barang dari Tiongkok akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Selain kondisi eksternal tersebut, pada tahun 2024 terdapat tantangan lainnya seperti kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar Rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

China's economic slowdown. For Asia, China has been the engine of economic growth while also the largest buyer of imports as well as a great contributor to foreign exchange through tourist visits. Needless to say, the trend in China will have an impact on Indonesia given the former's status as the latter's key trading partner. The slowdown in China is expected to squeeze Indonesian exports as demand for imported goods from China will decrease, which will affect economic growth. The upcoming 2024 will also present other challenges to the domestic landscape than the above said such as rising interest rates, food security, weaker exchange rate of the Rupiah, and political conditions ahead of the 2024 elections.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2% dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus positif selama tujuh kuartal berturut-turut, inflasi yang terjaga di level yang rendah, serta peluang investasi yang masih terbuka lebar, terutama di sektor infrastruktur, manufaktur, dan pariwisata.

The Indonesian government has set a target of 5.2% economic growth for the country considering some underlying factors Indonesia has such as strong economic fundamentals as evidenced by continued positive economic growth for seven consecutive quarters, manageably lower inflation, and enormous investment opportunities especially in the infrastructure, manufacturing and tourism sectors.

Menghadapi tantangan ke depan, kami terus menganalis berbagai proyeksi yang ada sekaligus menjadikannya modal untuk mengelola risiko, tantangan dan peluang yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Pada tahun 2024, PGN juga akan terus berupaya untuk meningkatkan target laba melalui penjualan gas Pelanggan Non HGBT dengan tetap mendorong pemanfaatan volume HGBT sesuai dengan alokasinya.

Facing future challenges, we will carefully analyze all projections therein and use them in managing risks, challenges and opportunities predicted to occur in the future. In 2024, PGN will try to deliver against larger profit target through gas sales to Non-HGBT customers while continuing to push the utilization of HGBT volume according to its allocation.

Selanjutnya, dalam rangka mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis/produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (*low carbon business*), maka Perusahaan mengambil langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tiga pilar pengembangan bisnis, yaitu *Grow, Adapt,* dan *Step-out* (GAS). Program strategis tahun sebelumnya yang dikenal dengan Tujuh Program Gasifikasi Nasional (Sapta PGN+) akan tetap dilanjutkan dalam pilar *Grow* dan program-program baru seperti LNG *Trading* dan pengembangan bisnis Biomethane akan masuk ke dalam pilar *Adapt* dan pilar *Step-out*.

Further, to take the economic recovery momentum, the acceleration of energy transition, and the need to develop future business segments/derivative products that can help reduce carbon emissions (low carbon business), the Company take strategic steps as have been outlined in the three pillars of business development referred internally as Grow, Adapt, and Step-out (GAS). The previous year's strategic program known as the Seven National Gasification Programs (Sapta PGN+) will continue on under the Grow pillar to complement new programs such as LNG Trading and Biomethane business development under the Adapt pillar and Step-out pillars.

Program strategis GAS PGN meliputi:

1. *Grow and maintain gas business*

Program peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur gas, CNG, maupun LNG. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya penyediaan infrastruktur transmisi, distribusi, dan regasifikasi gas bumi guna memenuhi kebutuhan berbagai segmentasi pelanggan mencakup Industri, Komersial, dan Rumah Tangga; penambahan portofolio pasokan gas pipa dan LNG sesuai kebutuhan; serta penyediaan infrastruktur *beyond pipeline* (CNG & LNG); optimasi bisnis *upstream* melalui peningkatan kegiatan produksi dan eksplorasi; serta pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan penyaluran BBM melalui pipa maupun peningkatan *lifting* migas dengan bersinergi bersama Pertamina Group.

2. *Adapt business, pursue adjacent opportunities*

Program penyediaan layanan bisnis turunan yang mendukung peningkatan kinerja melalui diversifikasi produk maupun optimalisasi portofolio yang sudah dimiliki oleh PGN. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di antaranya pelaksanaan strategi pertumbuhan secara organik dan penjajakan secara anorganik dalam penyediaan fasilitas untuk LNG *Bunkering,* LNG *Trading* dan *Global Venture;* pengembangan bisnis LNG Hub; pengembangan infrastruktur mini LNG *liquefaction plant*; serta *total energy solution* dalam rangka penyediaan jasa dan layanan penunjang kepada pelanggan.

3. *Step-out and scale to new businesses*

Program penyiapan bisnis baru mendukung hilirisasi industri berbasis gas (*petrochemical*), bisnis *clean and renewable energy* (*biomethane*), dan program pendukung *Net Zero Emission* lainnya seperti H2/NH3 dan CO2 *transport* dengan terlebih dahulu mengembangkan kompetensi, akses ke pasar, dan pasokan yang saat ini belum dimiliki oleh PGN, melalui *strategic alliance* bersama badan usaha lainnya.

Untuk biaya investasi dan pengembangan bisnis, Perusahaan menyiapkan anggaran belanja modal 2024 sebesar USD361 juta. Kami berharap investasi yang dilakukan dapat mendorong pencapaian target pada tahun 2024, seperti target volume niaga gas bumi sebesar 954 BBTUD, volume transmisi gas 1.516 MMSCFD, volume *lifting* 8,4 MMBOE, serta volume transportasi minyak mencapai 55,5 MMBOE.

Segmen industri diperkirakan masih akan menjadi penopang utama permintaan gas, seiring dengan gerak industri dan perekonomian yang mulai bergeliat. Volume dari segmen rumah tangga juga akan meningkat seiring target penambahan 117 ribu sambungan rumah tangga di tahun 2024.

PGN GAS strategic programs include:

1. Grow and maintain gas business

A program to increase the use of natural gas through the development of gas, CNG and LNG infrastructure. Some of the work programs include providing natural gas transmission, distribution and regasification infrastructure to meet the needs of various customer segments including Industrial, Commercial and Household; the addition of piped gas and LNG supply portfolio as needed; as well as the provision of beyond-pipeline infrastructure (CNG & LNG); the optimization of upstream business by increasing production and exploration activities; and infrastructure development to support fuel distribution through pipelines and an increase in oil and gas lifting in synergy with Pertamina Group.

2. Adapt business, pursue adjacent opportunities

A program to provide derivative business services that support performance improvement through product diversification and the optimization of PGN's existing portfolio. Some of the work programs will involve executing g organic growth strategies and inorganic exploration to provide LNG Bunkering facility, LNG Trading and Global Venture; LNG Hub business development; development of mini LNG liquefaction plant infrastructure; as well as total energy solutions in order to deliver supporting services to customers.

3. Step-out and scale to new businesses

A program to prepare new businesses that can support the downstream gas-based industry (petrochemical), clean and renewable energy (biomethane) business, and other Net Zero Emission supporting programs such as H2/NH3 and CO2 transport by first building competence, access to markets and supply that PGN currently lacks through a strategic alliance with other business entities.

With regards to outlays in investment and business development, we have prepared a total capital expenditure budget of USD361 million for 2024. We hope that such heavy investments help us achieve our 2024 targets: 954 BBTUD in natural gas trading volume, 1,516 MMSCFD in gas transmission volume, 8.4 MMBOE in lifting volume, and 55.5 MMBOE in oil transportation volume.

The industrial segment is predicted to continue to be the main support for gas demand as both the industry and the economy reignites. Volume from the household segment will also increase in line with our target to add another 117,000 household connections in 2024.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Terdapat beberapa tantangan yang masih tetap diwaspadai pada tahun 2024, seperti penurunan ketersediaan pasokan gas dari beberapa pemasok utama karena telah memasuki masa fase *natural declining*. Mengantisipasi tantangan ini, PGN akan mengoptimalkan infrastruktur regasifikasi eksisting, di FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan saat terjadinya penurunan volume pasokan gas pipa.

Kami optimis kinerja PGN akan tetap baik pada tahun 2024, yang didorong oleh salah satunya kondisi perekonomian dalam negeri yang tetap terjaga. Kami akan tetap berpegang kepada strategi-strategi utama, pada saat yang sama mengimplementasikan sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan secara disiplin dan berhati-hati.

PENERAPAN TATA KELOLA

Kami terus melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) selaras dengan praktik terbaik dalam bisnis Perusahaan. Karena itu, penerapan GCG di lingkungan Perusahaan tidak sekedar mematuhi peraturan perundang-undangan, namun menjadi budaya yang melekat pada seluruh proses bisnis Perseroan. Kami yakin pengembangan GCG dapat senantiasa memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran diimplementasikan pada seluruh organ tata kelola secara menyeluruh, meliputi Anggaran Dasar, Board Manual, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Etika Usaha, Pedoman *Whistleblowing Systems*, pembuatan kebijakan yang sesuai dengan prinsip GCG, pengendalian internal, hingga peningkatan *awareness* GCG melalui sosialisasi dan internalisasi.

Pada tahun 2023, kami juga melakukan penyempurnaan dan penyesuaian berkaitan dengan GCG meliputi melakukan penyelarasan budaya dan peraturan dengan kebijakan yang dibuat oleh Holding dan melakukan revisi prosedur terkait proses *review* dokumen hukum dari aspek *compliance, contract* & litigasi untuk memitigasi risiko hukum atas implementasi dokumen hukum. Kami juga terus meningkatkan *GCG awareness* & anti penyuapan dengan menambahkan intensitas dalam sosialisasi dan penyebaran konten GCG melalui media komunikasi Perusahaan, serta mengembangkan ruang

Some other challenges that we will watch out for in 2024 will be a potential decrease in the availability of gas supplies from some of our existing suppliers as they are entering a natural declining phase. In anticipation of this challenge, PGN will optimize its existing regasification infrastructure, at FSRU Lampung and FSRU West Java, to meet the growing need despite a decrease in the volume of piped gas supply.

We are optimistic that PGN will continue to deliver positively in 2024, to be driven by e.g. sustained domestic economic landscape. We will stick to these core strategies while implementing a sound risk management system, exercising strict internal control, and running a disciplined and prudent financial management.

GOVERNANCE PRACTICE

We continue to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in line with best practices in the Company's business. Therefore, the implementation of corporate governance within the Company is much more than just regulatory compliance since governance practice has become a culture that is hardwired into all of the Company's business processes. We believe that as it continues to develop, governance will give adequate protection and fair treatment to Shareholders and other stakeholders.

GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, are applied across all governance tools, from the Articles of Association, Board Manual, Governance Guidelines, Business Ethics Guidelines, Whistleblowing Systems Guidelines, and the drafting of policies that adhere to GCG principles, internal control, to increasing GCG awareness through socialization and internalization.

In 2023, we also made governance-related improvements and adjustments where we aligned culture and regulations with policies made by Holding, and revisions on procedures related to the legal document review process from the aspects of compliance, contracts & litigation to mitigate legal risks exposures especially with regards to legal documents. We also continued to increase GCG awareness & anti-bribery with more intense socialization and dissemination of GCG content through corporate communication media while extending the scope of ISO 37001 Anti-Bribery Management

lingkup (*extend scope)* sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 sebagai upaya peningkatan mitigasi atas potensi risiko penyuapan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pihak eksternal. Kemudian dalam hal tata kelola pengendalian gratifikasi, guna memaksimalkan upaya pencegahan, pendeteksian dan penindakannya, kami juga melakukan perubahan tata kerja di PGN yaitu pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) semula di bawah Internal Audit menjadi di bawah Kelola LCC, dengan harapan penerapan konsep *Three Lines of Defence* dapat semakin dimaksimalkan untuk kepentingan sistem pengendalian internal. Upaya penyesuaian GCG terhadap perubahan juga dijalankan dengan mengubah menambah komposisi Komisaris independen menjadi lebih dari 50%. Kemudian, kami juga menambah keterlibatan perempuan dalam anggota Direksi di tahun 2023.

System (SMAP) certification as an effort to increase mitigation of potential risks of bribery in activities that involve external parties. Furthermore, in terms of the governance of gratification control, in order to maximize efforts to prevent, detect and sanction gratification, we also made some changes to PGN's existing work procedures as we transferred the management of Gratification Control Unit (UPG) from previously under the Internal Audit Unit to now under LCC Management where the main objective was to further optimize the implementation of the Three Lines of Defense concept while building a stronger internal control system. We also made other efforts to adapt our governance practice to changes as we increased the composition of independent commissioners to more than 50%. Then, we also increased the involvement of women as members of the Company's Board of Directors in 2023.

Tahun 2022 PGN telah melakukan *assessment* GCG menggunakan parameter BUMN SK-16 dengan hasil 99,004. Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi atau *self-assessment* atas tindak lanjut rekomendasi *assessment* tahun 2022 dengan potensi peningkatan skor sebesar 0,45.

In 2022, PGN made a GCG assessment using SOE SK-16 parameters with a score of 99.004. In 2023, we made another evaluation or self-assessment to follow up the 2022 assessment recommendations with the potential to gain a 0.45 increase in GCG score.

Pada tahun 2023, PGN juga telah melakukan pengukuran GCG menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) menggunakan versi terbaru (2023) parameter yang telah rilis dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan menjadi salah satu dasar penyusunan *Sustainability Report* tahun 2023 PGN. Hasilnya, kami berhasil memperoleh *adaption rate* sebesar 72,73% dari standar yang diharapkan untuk diterapkan dan melebihi standar minimum (terpenuhi kriteria maksimal 193).

In 2023, PGN has also measured GCG with the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) using the latest version (2023) of parameters recently issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) that served as the basis for preparing PGN's 2023 Sustainability Report. As a result, we earned an adaptation rate of 72.73% of the applicable standards and exceeded the minimum standards (fulfilling the maximum criteria set at 193).

Selain itu, kami melakukan evaluasi tata kelola berdasarkan POJK 21/2015 mencapai predikat *Comply* untuk "Seluruh Aspek", dan Kami juga melakukan evaluasi tata kelola dengan metode terbaru yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) yaitu PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan mencapai predikat: *Apply* untuk "Seluruh Prinsip".

Apart from that, we made a governance evaluation based on POJK 21/2015 where we earned the 'Comply' predicate for "All Aspects", and another evaluation using the latest method issued by the KNKG (National Committee for Governance Policy) referred to as PUGKI (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance) 2021 where we earned the title: Apply for "All Principles".

PGN juga menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Keamanan Siber yang bertujuan untuk menyelaraskan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan bisnis, memastikan keamanan informasi, dan menjamin adopsi teknologi yang mendukung keberlanjutan dan inovasi. Seiring dengan optimalisasi pemanfaatan TI, PGN juga terus meningkatkan resiliensi keamanan siber. Pada tahun 2023, PGN melakukan pengukuran Tingkat Maturitas Penanganan Insiden bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan hasil level maturitas 4,11 yang diukur dari 5 domain maturitas (tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons). Selain itu juga

PGN also implements Information Technology and Cyber Security Governance to align the use of information technology with business objectives, ensure information security, and secure the adoption of technology that supports sustainability and innovation. We pair IT utilization with increasing cyber security resilience. In 2023, PGN measured the Incident Handling Maturity Level in collaboration with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) with a maturity level of 4.11 measured by 5 maturity domains (governance, identification, protection, detection, response). In addition, PGN also conducted a Cybersecurity Maturity Assessment in

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

PGN melakukan *Cybersecurity Maturity Assessment* bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) sebagai Holding dengan hasil skor sebesar 4,34 dari skala 5.

collaboration with PT Pertamina (Persero) as a Holding earning a score of 4.34 on a scale of 5.

PENERAPAN NILAI KEBERLANJUTAN

Kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan operasi bisnis secara bertanggung jawab, memperhatikan dampaknya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi, PGN memahami betapa pentingnya integritas lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan bisnisnya.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis dan operasional PGN, kami terus berfokus untuk menerapkan strategi keberlanjutan PGN kepada aspek ESG dan mengintegrasikannya ke dalam program kerja Perseroan. Pada tahun 2023, kami memaksimalkan penerapan nilai-nilai keberlanjutan dalam 4 (empat) fokus keberlanjutan yang diturunkan ke dalam 14 inisiatif/strategi keberlanjutan.

Fokus keberlanjutan PGN selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan terus diintegrasikan kepada seluruh aspek kerja Perseroan dan dijalankan secara berkesinambungan hingga 2030. Keempat fokus tersebut meliputi mendukung pencapaian target NZE melalui peningkatan penggunaan gas bumi pada masa transisi energi, melindungi alam, membangun program masyarakat yang kohesif dan tangguh, serta menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

PGN terus mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih melalui penyaluran gas bumi nasional. Upaya ini merupakan langkah keberlanjutan utama Perusahaan yang disesuaikan dengan peran PGN dalam masa transisi energi menuju NZE pada 2060. Gas bumi dapat menjadi solusi target penurunan emisi sektor energi sebesar 377 juta ton CO2 di tahun 2035 serta menurunkan emisi sekitar 40% dibandingkan energi lain. Di tahun 2023, PGN berhasil memberikan kontribusi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) *Scope* 1 dan *Scope* 2 secara konsolidasian mencapai 598,39 Ton CO_2eq.

PGN akan terus melanjutkan pengembangan program gasifikasi di sejumlah sektor strategis yang mengkonversi energi berbasis gas bumi termasuk sektor kelistrikan

APPLYING SUSTAINABILITY VALUES

We have a steadfast commitment to run a responsible business operations with due attention to its potential impacts on economic, environmental and social aspects. As a company operating in the energy sector, PGN understands how important environmental integrity and social responsibility are in every business decision.

As an inseparable part of PGN's business and operations, we continue to focus on how to apply PGN's sustainability strategy to ESG aspects and integrate it into the Company's work program. In 2023, we maximized the application of sustainability values in 4 (four) sustainability focuses which were translated into 14 sustainability initiatives/strategies.

PGN's sustainability focus is consistent with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and will continue to be integrated into all aspects of the Company's work further until the year 2030. The four focuses involve supporting the achievement of NZE targets by increasing the use of natural gas during the energy transition period, helping to protect the nature, building a series of cohesive and resilient community programs, and implementing a responsible business practice.

PGN continues to support the Government's program to increase the use of clean energy through national natural gas distribution. This effort constitutes the Company's key sustainability step which is adapted to PGN's role in the energy transition period towards NZE in 2060. Natural gas can be a solution to the energy sector's emission reduction target of 377 million tons of CO2 in 2035 and reduces emissions of around 40% more than other energy. In 2023, PGN contributed to the reduction of Scope 1 and Scope 2 Green House Gas (GHG) emissions on a consolidated basis with 598.39 Ton CO_2eq.

PGN will continue to develop the gasification program in a number of strategic sectors that convert natural gas-based energy, including the national electricity sector.

nasional. Di samping itu, secara kontinyu dengan melaksanakan berbagai program menarik, kami akan mempromosikan pemanfaatan gas bumi di sektor ritel dan rumah tangga.

In addition, by continuously implementing various interesting programs, we will promote the use of natural gas in the retail and household sectors.

Di internal, Perusahaan mewujudkan komitmen sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab secara sosial serta mengimplementasikan manajemen lingkungan sesuai standar yang berlaku. Kami juga secara konsisten terus berupaya mengurangi emisi, limbah dan energi guna mengurangi jejak lingkungan.

Internally, the Company realizes its commitment as an ecofriendly company, by implementing sound and socially responsible corporate governance and running environmental management in accordance with applicable standards. We also consistently strive to reduce emissions, waste and energy to reduce our environmental footprint.

Setiap praktik bisnis Perusahaan yang dijalankan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, melalui penguatan budaya keberlanjutan, pengendalian internal, manajemen risiko dan penegakan antikorupsi. Dari segi sosial, Perusahaan memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah Perusahaan beroperasi.

Each of the Company's current business practices complies with applicable regulations by strengthening a culture of sustainability, internal control, risk management and anti-corruption enforcement. From a social perspective, the Company ensures welfare, safety and equal opportunities for all workers as well as empowering the community and environment around the areas where the Company operates.

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga akhir tahun 2023, PGN memiliki 6 Desa Binaan sebagai program unggulan pemberdayaan masyarakat dengan total ribuan penerima manfaat, yaitu Desa Pagardewa (Muara Enim, Sumatera Selatan), Desa Tambak Kalisogo (Sidoarjo, Jawa Timur), Desa Tembesi Tower (Pulau Lance, Batam), Desa Teluk Terate (Kramawatu, Kabupaten Serang), Desa Sriminosari (Labuhan Maringgai, Lampung) dan Balkondes Karangrejo di Magelang, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2023, investasi sosial PGN mencapai sekitar Rp66.567.107.458. PGN secara rutin melakukan evaluasi melalui Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 3,55 dari skala 4, dengan nilai mutu pelayanan kategori A dan predikat Sangat Puas. Selain itu, evaluasi atas dampak yang dihasilkan juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan *Social Return on Investment* (SROI).

As a form of corporate social and environmental responsibility, by the end of 2023, PGN had 6 assisted villages as a flagship community empowerment program for thousands of beneficiaries in Pagardewa Village (Muara Enim, South Sumatra), Tambak Kalisogo Village (Sidoarjo, East Java), Tembesi Tower Village (Lance Island, Batam), Teluk Terate Village (Kramawatu, Serang Regency), Sriminosari Village (Labuhan Maringgai, Lampung) and Balkondes Karangrejo in Magelang, Central Java. Throughout 2023, PGN spent around Rp66,567,107,458. PGN routinely evaluates through Community Satisfaction Index Assessment. In 2023, community satisfaction level reached 3.55 out of 4, with service quality values in category A and a rating of Very Satisfied. Moreover, the impacts are also evaluated using the Social Return on Investment (SROI) calculation approach.

Sementara dalam bidang lingkungan hidup, PGN telah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015, yang menunjukkan komitmen kami terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab. Pengakuan atas komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan juga tercermin dalam penghargaan yang kami terima, termasuk tiga PROPER Emas dan enam PROPER Hijau, serta penghargaan eksternal seperti penghargaan *Golden* dalam kategori Bangun Karsa Mandiri pada bidang bantuan bencana alam, penghargaan *Silver* dalam kategori Didaktika Pratama Unggul atau bidang pendidikan, dan *Gold* dalam kategori Reka Karsa Sosial atau bidang sosial pada *CSR Indonesia Award 2023*.

Meanwhile, in the environmental sector, PGN has implemented the ISO 14001:2015 environmental management system, which shows our commitment towards responsible environmental practices. The recognition of our commitment to environmental sustainability is also reflected in the awards we have garnered, including three Gold PROPERs and six Green PROPERs, in addition to some external awards such as the Golden award in the Bangun Karsa Mandiri category in the field of natural disaster relief, the Silver award in the Superior Primary Didactic category or the field of education, and Gold in the Social Design or social sector category at the 2023 CSR Indonesia Award.

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Di sisi lain, dalam melaksanakan praktik-praktik terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (HSSE) di wilayah operasional kerja Perusahaan, kami juga berhasil mencatatkan *Number of Accident* (NoA) nihil. Selain itu, PGN juga secara konsisten berhasil meningkatkan jam kerja aman bagi pekerja dimana di tahun 2023 tercapai 134.567.527 jam kerja aman.

On the other hand, in implementing practices related to Health, Safety, Security and Environment (HSSE) in the Company's operational work areas, we also succeeded in recording a nil Number of Accidents (NoA). Apart from that, PGN has also consistently succeeded in increasing safe working hours for workers, where in 2023 as many as 134,567,527 safe working hours were recorded.

Praktik terbaik dalam bidang HSSE telah membawa Perusahaan meraih beberapa penghargaan di antaranya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan masa berlaku hingga 2024; anak usaha PGASOL meraih penghargaan dalam Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2023 oleh Disnaker DKI Jakarta; serta anak usaha yakni PGASCOM turut mendapatkan apresiasi pada Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2023 dengan capaian Nihil Kecelakaan Kerja.

Best practices in the HSSE sector have led the Company to win several awards, including the Occupational Safety and Health (K3) Management System Certificate issued by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia with a validity period until 2024; A subsidiary PGASOL won an award at the Closing of the 2023 National OHS Month by the DKI Jakarta Manpower Office; and another subsidiary, PGASCOM, also received appreciation at the Closing of National OHS Month 2023 with Zero Work Accidents.

Saat ini, PGN telah memiliki Komite Keberlanjutan yang bertugas mengawasi, menetapkan serta mengarahkan kinerja Perusahaan terkait keberlanjutan. Dipimpin oleh Direktur Utama dan didukung oleh beragam Pejabat Penanggung Jawab Bidang, Komite Keberlanjutan memastikan penerapan program keberlanjutan berjalan baik di fungsi dan unit bisnis masing-masing. Didukung dengan Tim ESG, arah perubahan Perusahaan dipastikan dapat selaras dengan pertimbangan ESG yang baik, berorientasi kepada lingkungan, serta selaras dengan kaidah dan *framework* yang tepat.

Currently, PGN has a Sustainability Committee tasked with overseeing, determining and directing the Company's sustainability performance. Led by the President Director and supported by various Responsible Officials in their respective fields, the Sustainability Committee ensures a proper implementation of sustainability programs in each function and business unit. The ESG Team helps ensure that the Company's direction of change is in line with sound ESG considerations, environmentally oriented, and in adherence to appropriate rules and frameworks.

PGN terus berkomitmen untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan. Dengan melibatkan dan mendukung seluruh tim serta mitra bisnis, PGN berusaha untuk menjadikan praktik bisnis berkelanjutan sebagai bagian dari agenda bisnis sekaligus budaya Perusahaan.

PGN remains committed to achieving an optimal balance between economic growth, environmental conservation and community welfare, which will eventually create long-term sustainable value for all stakeholders. By involving and supporting all teams and business partners, PGN strives to make sustainable business practices part of the company's business agenda while also a corporate culture.

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Pada tahun 2023, PGN sebagai Subholding Gas yang merupakan bagian dari Holding Migas, dalam pengadaan barang/jasa untuk seluruh kegiatan operasional dan investasi telah mensyaratkan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri sekaligus sebagai komitmen Program Peningkatan Penggunaan

INCREASED USE OF DOMESTIC PRODUCTS (P3DN)

In 2023, PGN as a Gas Subholding while also part of the Oil and Gas Holding, in the procurement of goods/services for all operational and investment activities requires the fulfilment of the Domestic Component Level (TKDN) as a form of support for the domestic industry as well as a commitment to the Increase in Use of Domestic Products (P3DN) initiated by the Government, as well

Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan oleh Pemerintah, serta penciptaan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian Indonesia. Realisasi TKDN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PGN sebagai Subholding Gas melebihi target KPI minimal sebesar 40% yaitu sebesar 53,05% untuk Proyek Investasi Pekerjaan Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Senipah - Balikpapan dimana verifikasinya dilakukan oleh PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) sebagai Surveyor Independen. Sedangkan untuk komitmen TKDN atas seluruh pengadaan barang/jasa adalah sebesar 54,72%. Adapun ketentuan perhitungan TKDN ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Selain pencapaian TKDN tersebut, PGN juga ikut serta dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian Indonesia dengan pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa melalui *platform* Pasar Digital (PaDi) UMKM BUMN dimana selama tahun 2023 terdapat transaksi langsung kepada UMKM sebesar Rp6.719.434.486,-.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2023, susunan anggota Direksi PGN mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 30 Mei 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) pada 14 November 2023. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kinerja berdasarkan kebutuhan bisnis Perusahaan pada masa kini serta di masa yang akan datang.

RUPST 2023 memberhentikan dengan hormat Bapak M. Haryo Yunianto sebagai Direktur Utama serta Bapak Heru Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi, dedikasi dan kerja keras yang selama ini diberikan selama menjabat di Perusahaan. RUPST 2023 juga mengangkat Bapak Arief S. Handoko sebagai Direktur Utama dan Bapak Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis.

Perubahan komposisi anggota Direksi ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 51 tanggal 30 Mei 2023 di hadapan Notaris Ir. Nanette

as the creation of a business ecosystem that supports the growth and strengthening of the Indonesian economy. The realization of TKDN in the procurement of goods/services within PGN as a Gas Subholding has exceeded the minimum KPI target of 40%, or precisely 53.05% for the Work Investment Project Procurement and Construction Design Services for the Senipah - Balikpapan Pipeline where the verification was carried out by PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) as the Independent Surveyor. Meanwhile, the TKDN commitment for all procurement of goods/services was 54.72%. The provisions for calculating TKDN refer to the Regulation of the Minister of Industrial Affairs Number 16/M-IND/PER/2/2011 concerning Provisions and Procedures for Calculating the Levels of Domestic Component and the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 15 of 2023 concerning the Use of Domestic Products in the Upstream Oil and Gas Business Activities.

In addition to the TKDN achievement, PGN took part in supporting the growth and strengthening of the Indonesian economy by implementing goods/services procurement transactions through the SOE MSSR Digital Market (PaDi) platform where during 2023 the amount of direct transactions to MSMEs reached Rp6,719,434,486,-
.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

In 2023, the composition of PGN's Board of Directors changed based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on May, 30 2023 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUSPLB) on November 14, 2023. The changes in the composition of members of the Board of Directors were made to strengthen performance based on the Company's current and future business needs.

The 2023 AGMS dismissed with honor Mr. M. Haryo Yunianto as President Director and Mr. Heru Setiawan as Director of Strategy and Business Development of the Company, with thanks and high appreciation for the contribution, dedication and hard work shown during when they were in office. The 2023 AGMS also appointed Mr. Arief S. Handoko as President Director and Mr. Harry Budi Sidharta as Director of Strategy and Business Development.

This change in the composition of the Board of Directors is stated in the Deed of Decision Statement of the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 51 dated May 30, 2023 before Ir. Nanette

LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors

Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09.0126463 tanggal 12 Juni 2023. Komposisi anggota Direksi sesuai Keputusan RUPST tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta. The change has been notified to and accepted by the Minister of Law and Human Rights based on the His Letter No. AHU-AH.01.09.0126463 dated June 12, 2023. The composition of the Board of Directors in pursuant to AGMS Resolution held on May 30, 2023 is as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Harry Budi Sidharta**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales and Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

RUPSLB 2023 memberhentikan dengan hormat Bapak Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi dan Bapak Faris Aziz sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Perseroan. RUPSLB 2023 juga mengangkat Ibu Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi dan Ibu Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan serta mengalihtugaskan Bapak Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan.

The 2023 EGMS dismissed with honor Mr. Achmad Muchtasyar as Director of Infrastructure and Technology and Mr. Faris Aziz as Director of Sales and Operations of the Company accompanied and expressed thanks and the highest appreciation for their services and dedication to the Company when they were both in office. The 2023 EGMS also appointed Mrs. Ratih Esti Prihatini as Director of Sales and Operations and Mrs. Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business Development of the Company and transferred Mr. Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology of the Company.

Perubahan komposisi anggota Direksi ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 17 tanggal 14 November 2023 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09-0189008 tanggal 24 November 2023. Dengan demikian, komposisi anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

This change in the composition of the Board of Directors is stated in the Deed of Decision Statement of the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 17 dated November 14, 2023 before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta. This change has been notified to and accepted by the Minister of Law and Human Rights based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.09-0189008 dated November 14, 2023. Thus, the composition of members of the Board of Directors is as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Rosa Permata Sari**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Harry Budi Sidharta**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Ratih Esti Prihatini**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

PENUTUP

Sebagai kata penutup, kami atas nama seluruh anggota Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas segala nasihat, saran, dan masukan yang diberikan kepada Direksi. Penghargaan serta apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada para pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya atas dukungan, kepercayaan dan jalinan kerja sama terbaik, sehingga PGN dapat mencapai berbagai target peningkatan usaha dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya tak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh Perwira Subholding Gas yang telah memberikan kontribusi, dedikasi dan kerja keras selama menjalankan tugas dan tanggung jawab di Perusahaan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Target Perusahaan secara bahu membahu tak kenal lelah. Memandang ke depan, marilah kita menyongsong harapan baru dengan energi baik serta optimisme untuk Indonesia Maju.

CLOSING

As closing remarks, on behalf of all members of the Board of Directors, we would like to express our highest gratitude and appreciation to the Board of Commissioners for all the advice, suggestions and input they have provided us with. We'd also like to express our appreciation to shareholders, customers, business partners and other stakeholders for their continued support, trust and best cooperation that has allowed us to deliver against some of our business targets and sustainable growth.

Our thanks and appreciation also go to all Gas Subholding Officers for their shown contribution, dedication, and hard work in their respective duties and responsibilities to help the Company realize its stated Vision, Mission and Targets as they worked hand in hand tirelessly. As we look into the future, let us all together embrace the new hopes with passion and optimism for an advanced Indonesia.

Jakarta, 29 April 2024
Jakarta, April 29, 2024



Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Director

DIREKSI
The Board of Directors



Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Director

Fadjar Harianto Widodo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Financial and Risk Management

Rosa Permata Sari
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

02.



Beni Syarif Hidayat
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

Ratih Esti Prihatini
Direktur Sales dan Operasi
Director of Sales and Operations

Harry Budi Sidharta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Liability Statement Letter

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

We the undesigned declare that all the information included in the Annual Report 2023 of PT Perusahaan Gas Negara Tbk has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 29 April 2024
Jakarta, April 29, 2024



Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner



Luky Alfirman
Komisaris
Commissioner

Warih Sadono
Komisaris
Commissioner

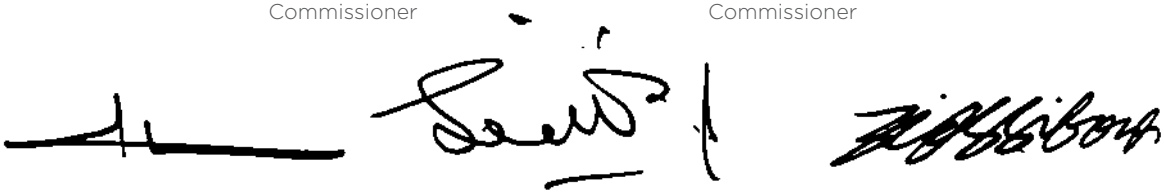

Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dini Shanti Purwono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Christian H. Siboro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

We the undesigned declare that all the information included in the Annual Report 2023 of PT Perusahaan Gas Negara Tbk has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 29 April 2024
Jakarta, April 29, 2024

Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Director

Harry Budi Sidharta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

Beni Syarif Hidayat
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

Fadjar Harianto Widodo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Financial and Risk Management

Ratih Esti Prihatini
Direktur Sales dan Operasi
Director of Sales and Operations

Rosa Permata Sari
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

03.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile





SEKILAS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

About PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Nama dan Domisili Perseroan
Company's Name and Domicile

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

berdomisili di Jakarta
domiciled in Jakarta

Alamat Perseroan
Company Address

Kantor Pusat
Head Office

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20
DKI Jakarta 11140
F : +62 21 397 00645;
+62 21 6334 838
T : +62 21 6333 080

Kantor Korespondensi
Correspondence Office

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20
DKI Jakarta 11140
F : +62 21 397 00645;
+62 21 6334 838
T : +62 21 6333 080

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for It's Establishment

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
Government Regulation No. 19 of 1965 concerning Dissolution of the Governing Body of the State Electricity Company (PLN) and the State Gas Company (PGN)

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

13 Mei 1965
May 13, 1965

Bidang Usaha
(Line of Business)

Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
(Transmission and Distribution of Natural Gas)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued Capital and Paid-Up Capital

Rp2.424.150.819.600 (dua triliun empat ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)
Rp2.424.150.819.600 (two trilion four hundred twenty-four bilion one hundred fifty milion eight hundred nineteen thousand and six hundred rupiah)

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah)
Rp7,000,000,000,000 (Seven trillion rupiah)

Pencatatan di Bursa
Listing of the Stock Exchange

Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 15 Desember 2003
The Company's shares have been listed at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently: Indonesia Stock Exchange) on December 15, 2003

Kepemilikan
Ownership

Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)	Publik Public
1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna 1 Dwiwarna Serie A share	**56,96%** 13.809.038.755 lembar saham seri B 13,809,038,755 serie B shares	**43,04%** 10.432.469.440 lembar saham seri B 10,432,469,440 serie B shares

Kode Saham
Stock Code

Bursa Efek Indonesia

PGAS

Indonesia Stock Exchange: PGAS

Media Sosial
Social Media

- 135
- pcc135@pertamina.com
- www.pgn.co.id
- @gas_negara
- Perusahaan Gas Negara
- @Gas_Negara
- @PerusahaanGasNegaraPGN

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Brief History of the Company

1859
FIRMA L.J.N. EINDHOVEN & CO GRAVENHAGE
Pertama kali Perusahaan didirikan oleh keluarga Eindhoven.
Firstly established by an Eindhoven family.

1863
NV NETHERLAND INDISCHE GAS MAATSCHAPPIJ (NIGM)
Pemerintah Belanda mengambil alih usaha keluarga Eindhoven dan mengubah nama Perusahaan menjadi NIGM. Pada 1879, NIGM mengoperasikan dua pabrik gas di Jakarta dan Surabaya.
The Dutch Government took over Eindhoven family business and changed its name to NIGM. In 1879, NIGM operated two gas plants in Jakarta and Surabaya.

1950
NV OVERZEESE GAS EN ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ (NV OGEM)
Pemerintah Belanda mengoperasikan 11 pabrik gas dari 33 pembangkit listrik, menggabungkan NIGM dengan Perusahaan listrik Pemerintah Belanda, lalu mengubah namanya jadi NV OGEM.
The Dutch Government operated 11 gas plants from 33 power plants, combining NIGM with the Dutch Government's power plants and changed its name to NV OGEM.

1958
BADAN PENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN- PERUSAHAAN LISTRIK DAN GAS (BP3LG)
Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
The Indonesian Government then nationalized foreign companies.

1961
BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (BPU-PLN)
Peleburan Perusahaan gas dan Perusahaan listrik negara.
Dissolution of the state gas and electricity companies.

1965
PERUSAHAAN GAS NEGARA
Pada 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, PGN ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.
On 13 May 1965, based on Government Regulation No. 19 Year 1965, PGN was given the status of State Enterprise.

1984
PERUSAHAAN UMUM GAS NEGARA
Perubahan bentuk usaha menjadi Perusahaan Umum (Perum).
The state changed its companies into public companies (perum)

1994
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)
Perubahan status perseroan diiringi penambahan ruang lingkup usaha. Selain di bidang distribusi gas bumi, PGN juga berfungsi sebagai transporter di bidang transmisi.
Such change of corporate status was followed with additional business scopes. In addition to distribution of natural gas, PGN also serves as a transporter in transmission business.

2003
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk
Saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan PGAS.
PGN shares were listed at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange on December 15, 2003 and its trading code is PGAS.

2018
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
Pada 11 April 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018, Pemerintah mengalihkan 56,96% saham seri B kepada PT Pertamina (Persero), sejalan inisiatif pembentukan Holding BUMN Migas dan PGN sebagai Subholding Gas.
On April 11, 2018, based on Government Regulation No. 6 of year 2018, the Government handed over 56.96% of its series B shares to PT Pertamina (Persero), in line with its initiative in establishing Holding BUMN Migas and PGN as a Subholding Gas.

PERKEMBANGAN BISNIS PERUSAHAAN
Development of the Company's Business

1998
PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi Ruas Grissik-Duri yang diikuti dengan pembentukan Entitas Anak di bidang transmisi yaitu PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) pada 2002 yang akan mengoperasikan pipa transmisi tersebut.
PGN managed to complete Grissik-Duri Transmission Pipeline and established a Subsidiary Entity for transmission business called PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) in 2002 that will operate the transmission pipeline.

2003
Penyelesaian Pipa Transmisi Grissik- Batam-Singapura yang merupakan pipa hilir gas bumi pertama yang melintasi batas negara. Pipa transmisi ini dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia.
Grissik-Batam-Singapore Transmission Pipeline, which is the first natural gas pipeline across the border, was completed. This pipeline is run by PT Transportasi Gas Indonesia.

2007
Pada 25 Oktober 2007, PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi South Sumatera West Java terdiri dari SSWJ I dengan Ruas Stasiun Penerima Gas Pagardewa-Bojonegara dan SSWJ II dengan Ruas Grissik-Muara Bekasi.
Pada tahun ini, PGN mendirikan Entitas Anak di bidang telekomunikasi, yaitu PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM), yang mengoperasikan dan memelihara jaringan kabel fiber optic yang dibangun untuk pengoperasian SCADA untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi di sepanjang jaringan pipa transmisi Grissik-Batam-Singapura.
On October 25, 2007, PGN managed to complete the installation of South Sumatera-West Java transmission pipeline, which consists of SSWJ I connecting gas receiving stations of Pagardewa-Bojonegara and SSWJ II connecting Grissik-Muara Bekasi.
In the same year, PGN established a subsidiary entity dealing with telecommunication business called PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM). PGASCOM operates and maintains fiber optic cables so as to operate SCADA in order to maintain proper supply of natural gas along transmission pipeline of Grissik-Batam-Singapore.

2009
PGN membentuk Entitas Anak bernama PT PGAS Solution yang bergerak di bidang usaha rekayasa teknik, operasi dan pemeliharaan, kontraktor EPC, serta perdagangan.
PGN established a subsidiary entity called PT PGAS Solution dealing with technical engineering, operation and maintenance, EPC contractor, and trading.

2010
PT Pertamina (Persero) dan PGN mendirikan Perusahaan patungan di bidang LNG, yaitu PT Nusantara Regas sebagai tonggak baru pemanfaatan LNG untuk domestik.
PT Pertamina (Persero) and PGN established a joint venture in the LNG sector, namely PT Nusantara Regas as a new milestone for domestic use of LNG.

2011
PGN membentuk dua Entitas Anak di bidang hulu dan hilir bisnis gas bumi. PT Saka Energi Indonesia di bidang hulu dan PT Gagas Energi Indonesia di bidang hilir.
PGN established two Subsidiary Entities in the upstream and downstream natural gas business, namely PT Saka Energi Indonesia in the upstream sector and PT Gagas Energi Indonesia in the downstream sector.

2012
Pada tahun 2012, PGN mendirikan Entitas Anak PT PGN LNG Indonesia (PLI) dengan lingkup usaha antara lain pengadaan pasokan LNG dan niaga, penyimpanan termasuk regasifikasi kepada pembeli, serta kegiatan usaha lainnya di bidang LNG.
In 2012, PGN established a Subsidiary Entity called PT PGN LNG Indonesia (PLI) with a scope of business including procurement of LNG supply and trade, storage including regasification for buyers, as well as other business activities in the LNG sector.

2014
PGN mendirikan entitas anak PT Permata Graha Nusantara dengan lingkup usaha antara lain pengelolaan properti, penyediaan jasa tenaga kerja, fasilitas manajemen, serta profitisasi sumber daya dan aset Perusahaan. Di tahun ini, dimulai pengoperasian FSRU Lampung secara komersial untuk mendukung keandalan pasokan gas bumi di Jawa Bagian Barat dengan menggunakan LNG.
PGN established a subsidiary entity called PT Permata Graha Nusantara with a scope of business including property management, provision of labor services, management facilities, and profitability of the Company's resources and assets. This year, the commercial operation of the Lampung FSRU was started to support the reliability of natural gas supply in the Western part of Java using LNG.

2015
Pada Agustus 2015, PGN melalui entitas afiliasi PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) berhasil menyelesaikan pembangunan ruas pipa Transmisi Kalija I dari lapangan gas bumi Kepodang ke PLTG Tambak Lorok Semarang sepanjang 201 km dan dilanjutkan dengan komersialisasi pipa tersebut. Di tahun yang sama, Pertagas menyelesaikan pembangunan Pipa Transmisi Ruas Arun Belawan sepanjang 350 kilometer untuk mendukung keandalan penyaluran gas bumi di wilayah Sumatera Bagian Utara.
PT Perta Arun Gas berhasil menyelesaikan revitalisasi kilang LNG Arun menjadi terminal penerima dan regasifikasi LNG. Menambah lengkap fasilitas terminal penerima dan regasifikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Teluk Jakarta dan Lampung.
In August 2015, PGN through an affiliated entity, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) managed to complete the construction of a 201 km-long Kalija I transmission pipeline connecting Kepodang natural gas field and Tambak Lorok Gas Power Plant in Semarang, subsequently commercializing it. In the same year, Pertagas completed the construction of the 350 km-long Arun Belawan Transmission Pipeline to support the reliability of natural gas distribution in the Northern part of Sumatra.
PT Perta Arun Gas managed to complete the revitalization of LNG Arun plant to become a receiving terminal and regasification of LNG. In addition, the Company also provided additional facilities for receiving terminal and regasification of existing plants in Teluk Jakarta and Lampung.

2018

Sejalan dengan inisiatif Pemerintah membentuk Holding BUMN Migas, pada 11 April 2018, PGN menjadi bagian dari PT Pertamina (Persero) dengan dialihkannya saham seri B milik negara RI yang menandai terbentuknya Holding BUMN Migas. Selanjutnya pada 28 Desember 2018, PGN resmi menjadi Subholding Gas dengan pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas.

In line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding State Owned Enterprises, on April 11, 2018, PGN became part of PT Pertamina (Persero) following the acquisition of the State's B series shares, which marked the establishment of Oil and Gas Holding SOEs. On December 28, 2018, PGN officially became a Gas Subholding by taking over 51% shares of PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas.

2019

PGN melakukan pelunasan atas akuisisi 51% saham PT Pertamina Gas pada bulan Maret 2019 sebagai bagian dari rangkaian Holding Migas.

PGN paid off the acquisition of 51% shares of PT Pertamina Gas in March 2019 as part of the Oil and Gas Holding.

2020

PGN melakukan Restrukturisasi Organisasi Subholding Gas yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis gas guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun ini juga, PGN mencanangkan program strategis korporat yaitu Tujuh Program Gasifikasi Nasional atau Sapta PGN. Sebagai bentuk peran Subholding Gas mendukung Pemerintah dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan industri nasional di masa pandemi, PGN mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM No.89 & 91 tahun 2020, di mana sektor industri dan kelistrikan mendapatkan gas harga khusus hingga diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

PGN restructured the organization of the Gas Subholding to improve its management efficiency and effectiveness in achieving sustainable development. Also this year, PGN launched a strategic corporate program, namely Seven National Gasification Programs or Sapta PGN. In its capacity as a Gas Subholding, PGN supported the Government and national industries amid the pandemic by implementing Minister of Energy and Mineral Resources Decrees (MEMR) Number 89 and 91 of 2020, enabling the industrial and electricity sectors to obtain special gas prices so that the national economy can grow faster and more sustainably.

2021

PGN sebagai Subholding Gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), meluncurkan logo Pertamina Gas Negara dengan semangat Satu Pertamina mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Program konversi penggunaan energi seperti coal & diesel ke gas bumi dalam masa transisi menjadikan peran gas bumi semakin penting. Oleh karenanya Perusahaan terus melakukan inisiasi dan penyelesaian program-program investasi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi yang semakin luas.

PGN, as a Gas Subholding of Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero), launched the Pertamina Gas Negara logo with the spirit of `One Pertamina' to promote synergy and collaboration to support the Government in providing better and more sustainable energy. Conversion programs to replace coal & diesel with natural gas in the transition period has resulted in an increasingly important role for natural gas. Therefore, the Company continued to initiate and complete various investment programs to support the wider utilization of natural gas.

2022

PGN sebagai Subholding Gas semakin memperkuat sinergi di dalam Holding Migas Pertamina melalui penyelesaian Pembangunan Pipa Minyak mentah koridor Minas-Duri Dumai & koridor Batam-Bangko-Dumai serta Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Gresik-Semarang untuk pasokan gas dari Jimbaran Tiung Biru. PGN juga terus memberi dampak positif bagi negeri di antaranya melalui Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan menggunakan investasi mandiri dan mendukung pertumbuhan industri nasional melalui implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 134 & 135 tahun 2021 (revisi atas Keputusan Menteri ESDM No. 89 dan 91 tahun 2020). Selain itu, PGN memperoleh predikat Medium Risk dari badan sertifikasi internasional dalam implementasi ESG.

PGN as a Gas Subholding further strengthened the synergy within Pertamina Oil and Gas Holding through the completion of the Construction of the Minas- Duri-Dumai Corridor Crude Oil Pipeline and that of the Batam-Bangko-Dumai as well as the construction of the Gresik-Semarang Gas Transmission Pipeline for gas supply from Jimbaran Tiung Biru. PGN also continued to positively impact the country, including through the Development of Household Gas Networks by means of independent investment, and to support the growth of the national industry through the implementation of Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) Decrees Number 134 and 135 of 2021 (amendment to MEMR Decrees Number 89 and 91 of 2020). In addition, PGN also received a Medium Risk rating from an international certification body for implementing ESG.

2023

PGN sebagai Subholding Gas terus bersinergi di dalam Holding Migas Pertamina melalui penyelesaian Pembangunan Pipa Senipah – RU V Balikpapan serta turut berperan untuk mensukseskan program transisi energi Pertamina melalui uji coba penggunaan Diesel Dual Fuel (DDF) untuk truk tangki PT Pertamina Patra Niaga. PGN juga melaksanakan Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan lebih agresif. Selain itu, PGN juga melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan bisnis anak perusahaan dengan membangun LNG Hub Arun serta mengembangkan *green energy business* melalui pemanfaatan biometana dari limbah pabrik kelapa sawit.

PGN as the Gas Subholding continues to synergize within Pertamina's Oil and Gas Holding through the completion of the Senipah - RU V Balikpapan Pipeline and contributes to the success of Pertamina's energy transition program through the trial use of Diesel Dual Fuel (DDF) for PT Pertamina Patra Niaga's tank trucks. PGN is also implementing the National Strategic Project, namely the Construction of Household Gas Networks more aggressively. In addition, PGN also diversified its business through the development of a subsidiary business by building the Arun LNG Hub and developing a green energy business through the utilization of biomethane from palm oil mill waste.

LOGO PERUSAHAAN
Company Logo



1859-1965

Logo yang digunakan saat Perusahaan bernama Firma L.J.N Eindhoven & CO Gravenhage.
Logo used when the Company's name was registered as Firma L.J.N. Eindhoven & CO Gravenhage.



1965-1994

Melambangkan sifat pelayanan utilitas gas dengan bumi sebagai sumbernya, serta misi Perusahaan dalam kegiatan produksi, instalasi, transmisi, dan distribusi.
It symbolizes the nature of gas utility services with the earth as its source, and the Company's mission in production, installation, transmission, and distribution activities.



1994-2003

Gambar lidah api dengan kesan dinamis. Semangat dan inovasi menjadi tekad Perusahaan dalam memberikan pelayanan. Lingkaran hitam melambangkan bumi dan pipa sebagai sarana penghantar gas bumi.
It is an image of a dynamic flame. The Company is determined to provide services with spirit and innovation. The black circle represents the earth and the pipe as a means to distribute natural gas.



2003-2011

Mencerminkan visi Perusahaan yang berorientasi global, menjadi Perusahaan publik terkemuka di bidang penyedia gas bumi. Tulisan "Gas Negara" menjadi bagian yang tak terpisahkan dari logo, menyiratkan sifat Perusahaan yang dinamis dan terus berkembang.
It reflects the Company's globally oriented vision to be a leading public Company in the natural gas sector. "Gas Negara" or State Gas is an integrated part of the logo, indicating its nature as a dynamic and continuously growing Company.



2011-2018

Menyimbolkan api yang terdiri dari lima elemen yang mewakili lima pemangku kepentingan utama: konsumen, investor, pekerja, negara, dan PGN.
It symbolizes five elements of flame, representing five major stakeholders, namely customers, investors, employees, the State, and PGN.



2018-2021

Penambahan tagline "A MEMBER OF PERTAMINA" menandakan kedudukan PGN sebagai bagian dari Pertamina sejalan dengan inisiatif Pemerintah membentuk Holding BUMN Migas.
The addition of "A MEMBER OF PERTAMINA" tagline indicates PGN's position as part of Pertamina in line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding SOEs.

Pada tanggal 12 Juni 2020, didirikan 6 subholding di bawah Pertamina yaitu Subholding Upstream, Subholding Gas, Subholding Power & NRE, Subholding Commercial & Trading, Subholding Refinery & Petrochemical, dan Subholding Shipping.

Logo Pertamina Gas Negara menyimbolkan transformasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina. Penyesuaian pada struktur *masterbrand* mengikuti identitas Brand Holding Pertamina dengan prinsip "One Brand" yang ditetapkan oleh Pertamina bagi anak usahanya.

Identitas baru masih memiliki arti yang sama jika dijadikan kependekan menjadi PGN. Selain itu memiliki arti kepemilikan baru, Pertamina Gas Negara.

Pertamina Gas Negara dipilih oleh mayoritas stakeholder dan pekerja internal PGN yang diwawancarai karena masih mengadopsi identitas PGN, yaitu Gas Negara. PGN dinilai sudah memiliki *brand value* yang kuat di publik, sehingga ketika berubah perlu nama yang juga mudah bagi publik untuk mengenal identitas baru PGN.

Dengan konsisten menggemakan semangat "Satu Energi, Satu Pertamina", sinergi segala upaya dan kegiatan dalam penyediaan energi menjadi kekuatan gabungan yang akan memberdayakan Perusahaan untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam rangka mencari solusi untuk tantangan energi masa depan.

Transformasi menjadi strategi dalam menyelaraskan identitas subholding gas pertamina.

PERTAMINA GAS NEGARA

Perusahaan energi nasional dengan jaringan terlengkap yang menyinergikan seluruh kekuatannya, dalam proses transformasi menuju era energi bersih untuk kehidupan yang lebih baik.

Menyinergikan kekuatan Perusahaan melalui inovasi, teknologi dan manusia di dalamnya, melalui jaringan terlengkap yaitu *downstream*, *midstream* serta pendukung lainnya secara terintegrasi.

On June 12, 2020, six subholdings were established under Pertamina, namely Upstream Subholding, Gas Subholding, Power and NRE Subholding, Commercial & Trading Subholding, Refinery & Petrochemical Subholding, and Shipping Subholding.

The Pertamina Gas Negara logo symbolizes the transformation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) as the Gas Subholding of Pertamina. Adjustments to the masterbrand structure follow Pertamina's brand-holding identity with the "One Brand" principle set by Pertamina for its subsidiaries.

The new identity still has the same meaning if it is shortened to PGN. In addition, it has a new ownership meaning of Pertamina Gas Negara.

Pertamina Gas Negara was chosen by the majority of PGN stakeholders and internal employees interviewed as it still adopts PGN's identity, namely Gas Negara. PGN is considered to already have a strong brand value in the public, so if it is changed, it needs a name that is also easy for the public to recognize the PGN's new identity.

Consistently echoing the spirit of "One Energy, One Pertamina", the synergy of all of the efforts and activities in the provision of energy becomes a combined strength that will empower the Company to have greater impacts in order to seek solutions to future energy challenges.

Transformation becomes a strategy in aligning Pertamina's Gas Subholding identity.

PERTAMINA GAS NEGARA

The national energy Company with the most complete network synergizes all the strengths in the process of transforming towards the era of clean energy for a better life.

The synergy of the Company's strength is carried out through innovation, technology, and people, with the most complete network of downstream, midstream, and other supports in an integrated manner.

VISI DAN MISI
Vision and Mission



VISI | Vision

Menjadi Perusahaan Gas Nasional Terkemuka dan Terpercaya Berstandar Kelas Dunia dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi

To be the Leading and Trusted National Gas Company with Global-Class Standards in the Provision of Natural Gas Infrastructure and Utilization.



MISI | Mission

Menjalankan bisnis gas di bidang *midstream*, *downstream*, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan:

1. Niaga gas bumi dan LNG sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.
2. Penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi.
3. Pengusahaan kegiatan jasa pendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna.
4. Pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunannya.

Conducting midstream and downstream gas business and other supporting businesses committed to increasing the value for all stakeholders through:

1. Trading of natural gas and LNG as a driver of national economic growth based on solid commercial principles.
2. Providing integrated natural gas and LNG infrastructure.
3. Organizing services to support the provision of gas infrastructure and utilization through an applicable selection of technology.
4. Developing business through natural gas utilization for gas-based industries and its derivatives

Dewan Komisaris dan Direksi PGN telah menyetujui Visi dan Misi Perseroan. Visi dan Misi Perseroan sebagai Subholding Gas juga telah diperbarui dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.039601.K/OT/PDO/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Visi dan Misi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sedangkan budaya Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.037800.K/OT.04/PDO/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penerapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK di Lingkungan Subholding Gas.

PGN's Board of Commissioners and Board of Directors have approved the Company's Vision and Mission. The Vision and Mission of the Company as a Gas Subholding have also been amended and stipulated ated through Decree of Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 039601.K/OT/PDO/2020 dated 2 November 2020 on the Vision and Mission of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Meanwhile, the corporate culture is stipulated in Decree of Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 037800.K/OT.04/PDO/2020 dated 16 October 2020 on the Implementation of AKHLAK's Core Values in the Gas Subholding.

BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture

AKHLAK

Dalam mendukung peran PGN sebagai Subholding Gas dan pengelola utama bisnis gas bumi di Indonesia, PGN menempatkan implementasi budaya Perusahaan "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai faktor penting untuk pencapaian Visi Misi Subholding Gas. AKHLAK menjadikan perilaku seluruh organisasi selaras dengan budaya perusahaan, budaya yang berlaku bagi seluruh Perwira Subholding Gas.

In supporting PGN's role as the Gas Subholding and the main manager of the natural gas business in Indonesia, PGN puts the implementation of the corporate culture of "AKHLAK" (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as an important factor for achieving the Gas Subholding's Vision and Mission. AKHLAK serves to guide the behavior of all in the organization in alignment with the corporate culture, which is binding for all Personnel of Gas Subholding.

AMANAH
TRUSTWORTHY

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Uphold the earned trust
- Fulfilling promises and commitments.
- Being responsible for tasks, decisions, and actions.
- Adhering to moral and ethical values.

KOMPETEN
COMPETENT

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Continue to learn and develop capabilities
- Improving self-competence to respond to everchanging challenges.
- Helping others learn.
- Completing tasks with the best quality.

HARMONIS
HARMONIOUS

Saling peduli dan menghargai perbedaan
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

for each other and respect differences
- Respecting everyone regardless of background.
- Willing to help others.
- Building a conducive work environment.

LOYAL
LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- Menjaga nama baik sesama Perwira Subholding Gas, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Dedicate and prioritize the interests of the Nation and the State
- Maintaining the reputation of fellow Gas Subholding Employees, leaders, SOEs, and the State.
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
- Obeying the leadership as long as it is not against the law and ethics

ADAPTIF
ADAPTIVE

Terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Continue to innovate and show enthusiasm in driving or facing changes
- Being fast in adapting to become better.
- Making continuous improvement following technological developments.
- Being proactive.

KOLABORATIF
COLLABORATIVE

Membangun kerja sama yang sinergis
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Build synergistic cooperation
- Providing opportunities for various parties to contribute.
- Being open about working together to generate added value.
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

BIDANG USAHA
Nature of Businesses

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 28 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha PGN adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
b. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (gas hidrokarbon).
c. Pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam, karbonasi dan gasifikasi batu bara atau bahan hidrokarbon lain, termasuk proses regasifikasi LNG (KBLI 35201).
d. Penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan (KBLI 35202).
e. Penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
f. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair kepada konsumen melalui saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
g. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas (KBLI 35202).
h. Pengangkutan gas dalam bentuk gas dan cair dari produsen ke tempat konsumen dengan saluran pipa maupun moda transportasi darat dan laut atas dasar *fee* atau kontrak (KBLI 49300).

BUSINESS ACTIVITES

Bussiness Activities Pursuant to Articles of Association

In accordance with Article 3 of PGN's Articles of Association as last amended by Deed Number 28 dated 11 May 2021 made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, PGN's business activities are as follows:

Main Business Activities

a. Carrying out planning, construction, management and downstream business development in the natural gas sector including processing, transportation, storage and trading activities.
b. Carrying out planning, construction, production development, supplying, and distribution of artificial gas (hydrocarbon gas).
c. Processing gas fuel that can be used directly as fuel where the production is accompanied by gas quality improvement, such as by refining, blending, and other processes produced from natural gas, carbonation and coal gasification, or other hydrocarbon materials, including LNG regasification process (ISIC 35201).
d. Distributing gas through pipeline networks with extra high pressure (more than 10 bar); high pressure (between 4 bar to 10 bar); and medium to lower pressure (below 4 bar) be it from own production or from other parties to consumers (ISIC 35202).
e. Carrying out transmission, distribution, and procurement of all types of gas fuel, in gas and liquid form through the pipeline system and land and sea transportation (ISIC 35202).
f. Trading gas in gas and liquid form to consumers through the pipeline system and land and sea transportation (ISIC 35202).
g. Trading gas in gas and liquid form through the gas distribution system operated by other parties and carrying out operations of commodity exchange and gas fuel transportation (ISIC 35202).
h. Transporting natural gas in gas and liquid form from producers to the consumers using the pipeline system and land and sea transportation on a fee or contract basis (ISIC 49300).



i. Pengoperasian gardu pompa (KBLI 49300).
j. Penyimpanan gas dalam bentuk gas dan cair sementara sebelum gas tersebut dikirim ke konsumen (KBLI 52101; KBLI 52109).
k. Perdagangan bahan bakar gas dan cair, serta produk sejenisnya dalam skala industri maupun retail (KBLI 46610).
l. Instalasi gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal (KBLI 43223).
m. Pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran gas (KBLI 43223).

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan usaha utama, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Penyertaan modal di bidang usaha hulu minyak dan gas, infrastruktur pipa minyak, LNG termasuk LNG *carrier*, NGL, LPG, CNG, jasa konstruksi, *engineering*, kelistrikan, informasi dan komunikasi, properti dan manajemen aset, kawasan pariwisata, penyediaan jasa tenaga kerja, konsultasi, dan bidang usaha lainnya.
b. Kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.
c. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki Perseroan.

i. Operating pumping substations (ISIC 49300).
j. Providing temporary storage for gas in gas and liquid form before the gas is sent to the consumers (ISIC 52101; ISIC 52109).
k. Trading gas and liquid fuels, as well as similar products on industrial and retail scales (ISIC 46610).
l. Installing gas in buildings for both residential and nonresidential purposes (ISIC 43223).
m. Maintaining and repairing gas line installations (ISIC 43223).

In addition to the main business activities, the Company is entitled to carry out other supporting business activities that are directly related and/or that support the main business activities, including but not limited to:
a. Capital participation in the oil and gas upstream businesses, oil pipes infrastructure, LNG including LNG carrier, NGL, LPG, CNG, construction services, engineering, electricity, information and communication, property and asset management, tourism area, labor services, consulting services, and other businesses.
b. Service activities related to natural gas mining carried out on a fee or contract basis.
c. Optimization of the Company's assets and resources.

BIDANG USAHA
Nature of Businesses

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, PGN telah menjalankan seluruh kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Business Activities

Until the financial year ending December 31, 2023, PGN has carried out all business activities as stated in the Articles of Association.

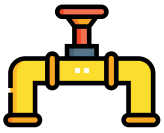

GTA (GAS TRANSPORTATION AGREEMENT)

Pada bidang bisnis transportasi gas bumi, PGN menyediakan fasilitas/infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik gas (*shipper*), sehingga gas bumi dapat dialirkan secara aman dan andal.

In the business of natural gas transportation, PGN provides facilities/infrastructure that can be utilized by gas owners (shippers) so that their natural gas can be transported safely and reliably.



GSA (GAS SALES AGREEMENT)

Pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi yang kemudian dijual ke berbagai segmen pengguna akhir gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan komersial dan industri, pelanggan pembangkit listrik hingga ke sektor transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas bumi, CNG maupun LNG.

In natural gas trading sector, PGN buys natural gas from several producers to be subsequently sold to end users in various segments, starting from household customers, commercial and industrial customers, and power plant customers, to those in the transportation sector, be it through gas distribution pipelines, CNG or LNG.



PRODUKSI GAS DAN MINYAK BUMI
Production of Oil and Natural Gas

Pada bidang usaha di hulu minyak dan gas bumi, PGN melalui PT Saka Energi Indonesia mengelola 9 (sembilan) wilayah kerja domestik dan 1 (satu) wilayah kerja internasional.

In the upstream oil and natural gas business, PGN through PT Saka Energi Indonesia manages 9 (nine) domestic work areas and 1 (one) international work area.

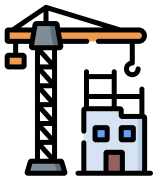

BISNIS LAINNYA
Other Businesses

Bidang bisnis lainnya meliputi *engineering, procurement, construction, property management*, layanan jaringan telekomunikasi yang andal, serta penyediaan tenaga kerja yang ahli di bidangnya dikelola oleh Entitas Anak/Afiliasi.

Other businesses include engineering, procurement, construction, property management, and reliable telecommunication network services, as well as the supply of skilled manpower managed by Subsidiary Entities/Affiliates.



Pengelolaan properti dan fasilitas pendukung
Management of property and supporting facilities



Layanan teknologi informasi dan komunikasi
Information technology and communication services



Jasa *engineering* dan konstruksi berkualitas industri minyak dan gas bumi
Quality engineering and construction services in oil and natural gas industry



Penyediaan tenaga kerja profesional, ahli, dan spesialis
Provider of professionals, experts and specialist

PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN

PGN melakukan kegiatan usaha di bidang transmisi dan niaga gas bumi. Pada bidang transmisi gas bumi, PGN dan entitas anak/afiliasi memiliki jaringan pipa transmisi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi.

Pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari produsen lalu dijual ke berbagai segmen pengguna akhir, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, pelanggan komersial dan industri, pembangkit listrik, hingga ke sektor transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas bumi, CNG, maupun LNG.

Untuk mendukung kegiatan usaha niaga gas bumi, PGN mengoperasikan berbagai infrastruktur gas bumi secara terintegrasi. PGN menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi, memenuhi kualitas produk (komposisi, tekanan, temperatur gas bumi), dan menyediakan layanan pelanggan (kontak pelanggan, penanganan gangguan) sesuai standar internasional.

Pengelolaan pelanggan dilakukan PGN berdasarkan segmentasi pelanggan yang dibagi menjadi:

1. Pelanggan Rumah Tangga (RT)
2. Pelanggan Kecil (PK)
3. Pelanggan Sektor Transportasi (SPBG)
4. Pelanggan Komersial dan Industri (KI)

PGN menawarkan produk-produk yang berbeda kepada masing-masing segmentasi pelanggan, di antaranya:

PRODUCTS OR SERVICES

PGN conducts business activities in the transmission and trading of natural gas. In the field of natural gas transmission, PGN and its subsidiary entities/affiliates own transmission pipelines in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra, Riau, Jambi, South Sumatra, Riau Islands, West Java, Central Java, East Java and East Kalimantan to connect the locations of natural gas sources with those of end users of natural gas through the transmission pipeline mode.

In the natural gas trading sector, PGN buys natural gas from producers and then sells it to various end-user segments, ranging from household customers, small-scale customers, commercial and industrial customers, power plants, to those of the transportation sector through the natural gas distribution pipeline mode, CNG, as well as LNG.

To support natural gas trading business activities, PGN operates various natural gas infrastructures in an integrated manner. PGN guarantees the distribution of natural gas to the natural gas end-users, meets product quality (composition, pressure, temperature of natural gas), and provides customer service (customer contact, troubleshooting) in accordance with international standards.

PGN carried out customer management based on customer segmentation which is divided into:

1. Household Customers (RT)
2. Small-scale Customers (PK)
3. Customers in Transportation Sectors (SPBG/Gas Refueling Station)
4. Commercial and Industrial Customers (KI)

PGN offers different products to each customer segment, among others:

gasline – Your Energy Efficiency Partner	Solusi pemanfaatan energi terintegrasi yang andal dan berfokus pada pelanggan melalui *excellent customer experience* untuk segmen pelanggan komersial dan industri. Reliable customer-focused integrated energy utilization solutions through excellent customer experience in the commercial and industrial customer segments.
gaskita – Juaranya Gas Ngalir Terus	Solusi pemanfaatan energi yang praktis, aman, dan ramah lingkungan untuk segmen pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil. Practical, safe and ecofriendly energy utilization solutions for households and retail customer segments.
gasku – Melaju Dengan Bersih	Solusi penyediaan bahan bakar gas yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien dengan moda CNG untuk segmen pelanggan transportasi. Solution for providing clean, ecofriendly and efficient gas fuel using CNG mode in the transportation customer segment.
gaslink – Bring Energy to You	Solusi penyediaan gas bumi untuk lokasi tanpa jaringan distribusi gas bumi melalui *Gas Transport Module* (GTM), yaitu kendaraan yang membawa gas bumi dengan moda CNG untuk segmen pelanggan Industri, Komersial dan UMKM. Solution for providing natural gas for locations without a natural gas distribution network through the Gas Transport Module (GTM), where natural gas in transported using CNG mode for the Industrial, Commercial and MSME customer segments.

BIDANG USAHA
Nature of Businesses

Produk gasline menawarkan pilihan solusi terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi pemanfaatan gas bumi pelanggan melalui berbagai kriteria kontrak ke beberapa kelompok berdasarkan jumlah pemakaian gas bumi, yaitu:
a. Bronze 1, pemakaian 1.001-10.000 m^3/bulan;
b. Bronze 2, pemakaian 350-1.750 mmbtu/bulan;
c. Bronze 3, pemakaian 1.750-17.500 mmbtu/bulan;
d. Silver, pemakaian 17.500-125.000 mmbtu/bulan;
e. Gold, pemakaian 125.000- 250.000 mmbtu/bulan;
f. Platinum, pemakaian lebih besar dari 350.000 mmbtu/bulan.

Pada bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas, PGN melalui Anak Perusahaan PT Saka Energi Indonesia (SEI) melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan usaha minyak dan gas bumi. Produk-produk yang dihasilkan yaitu minyak bumi, gas bumi, LPG, dan LNG.

Sementara pada bidang usaha lainnya, produk yang dihasilkan oleh PGN antara lain jasa sewa fiber optik, jasa konstruksi dan perbaikan (*operation* & *maintenance*), serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

SUBHOLDING GAS
Pemerintah melalui Kementerian BUMN menambah Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PGN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Pertamina (Persero).

Saham Seri B yang diserahkan Pemerintah (Kementerian BUMN) kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 56,96%, sedangkan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna tetap dipegang Negara sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan No. 286/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara dalam Modal Saham PT Pertamina (Persero). Pemerintah menetapkan nilai

Gasline products offer a choice of integrated solutions tailored to the operational needs of customers' natural gas utilization through various contract criteria, divided into several groups based on the amount of natural gas usage, namely:
a. Bronze 1, usage of 1,001-10,000 m^3/month;
b. Bronze 2, usage of 350-1,750 mmbtu/month;
c. Bronze 3, usage of 1,750-17,500 mmbtu/month;
d. Silver, usage of 17,500-125,000 mmbtu/month;
e. Gold, usage of 125,000- 250,000 mmbtu/month;
f. Platinum, usage of more than 350,000 mmbtu/month.

In the oil and gas exploration and production sector, PGN through its subsidiary PT Saka Energi Indonesia (SEI) conducts business activities in the exploration, exploitation, and development of the oil and gas business. They produce petroleum, natural gas, LPG, and LNG.

Meanwhile in other business sectors, the PGN provides fiber optic rental services, construction and repair services (operation & maintenance), as well as management and rental of buildings and equipment.

GAS SUBHOLDING
The Government, through Ministry of State-Owned Enterprises, increased state capital participation of the Republic of Indonesia in PT Pertamina (Persero) originating from the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia to PGN as stipulated in Government Regulation Number 6 of 2018. This is the measure taken by the Government to strengthen the capital structure and increase the business capacity of PT Pertamina (Persero).

The B Series shares handed over by the Government (the Ministry of State-Owned Enterprises)to PT Pertamina (Persero) amounted to 56.96%, while 1 A Series Dwiwarna share is still held by the State in accordance with the mandate of Government Regulation Number 72 of 2016 on Amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 on Participation and Administration of State Capital in State- Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

The Government Regulation Number 6 of 2018 was followed up with the signing of Decree of Minister of Finance Number 286/KMK.06/2018 on Determination of the Value of State Capital Participation in the Share Capital of PT Pertamina (Persero). The Government

penambahan modal negara ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) sebesar Rp38.136.346.046.696 yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara kepada PGN sebanyak 13.809.038.755 lembar. Proses ini dilengkapi dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham antara Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) yang berlaku efektif pada 11 April 2018.

Selanjutnya, sebagai bagian dari rangkaian pembentukan Holding BUMN Migas, PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada 29 Juni 2018.

Dengan ditandatanganinya Amendemen dan Pernyataan kembali Perjanjian Jual Beli Saham, pada 28 Desember 2018 dilakukan transaksi pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas oleh PGN, termasuk lima anak usaha PT Pertamina Gas yakni:

1. PT Pertagas Niaga,
2. PT Perta Arun Gas,
3. PT Perta Daya Gas,
4. PT Perta-Samtan Gas, dan
5. PT Perta Kalimantan Gas.

Dengan demikian, PT Pertamina (Persero) secara resmi menjadi Holding BUMN Migas dan PGN menjadi Subholding Gas. Sebagai Subholding Gas, PGN melaksanakan seluruh kegiatan proses bisnis hilir gas bumi, mulai dari pengadaan pasokan gas bumi dari sumber domestik maupun internasional, serta mengelola infrastruktur yang dilakukan sendiri maupun Entitas Anak/Afiliasi, sampai dengan penyaluran gas bumi kepada seluruh segmen pengguna akhir yaitu rumah tangga, pelanggan kecil, SPBG, komersial, industri dan pembangkit listrik.

Lingkup Bisnis Subholding Gas

has determined the value of additional state capital into PT Pertamina (Persero)'s share capital of Rp38,136,346,046,696 originating from the transfer of all State-owned B Series shares to PGN of 13,809,038,755 shares. The process was complemented by the signing of the Deed of Entry into the Company (Inbreng) between the Ministry of State-Owned Enterprises and PT Pertamina (Persero) which took effect as of April 11, 2018.

As part of the series of establishment of the Oil and Gas State-Owned Enterprises Holding, PGN signed an Agreement on Conditional Sales of Share to acquire PT Pertamina Gas and its subsidiaries on June 29, 2018.

With the signing of the Amendment and Restatement of the Agreement on Share Sale, on December 28, 2018 an acquisition of 51%shares owned by PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas was carried out by PGN, including five subsidiaries of PT Pertamina Gas, namely:

1. PT Pertagas Niaga,
2. PT Perta Arun Gas,
3. PT Perta Daya Gas,
4. PT Perta-Samtan Gas, and
5. PT Perta Kalimantan Gas.

Thus, PT Pertamina (Persero) officially became the Oil and Gas State-Owned Enterprises Holding and PGN became the Gas Subholding. As Gas Subholding, PGN carries out all natural gas downstream business process activities, including procuring natural gas supplies from domestic and international sources, managing infrastructure carried out by PGN and its Subsidiaries/ Affiliates, and distributing natural gas to all end-user segments, namely households, small-scale customers, gas stations, commercial entities, industry and power plants.

Gas Subholding's Scope of Businesses

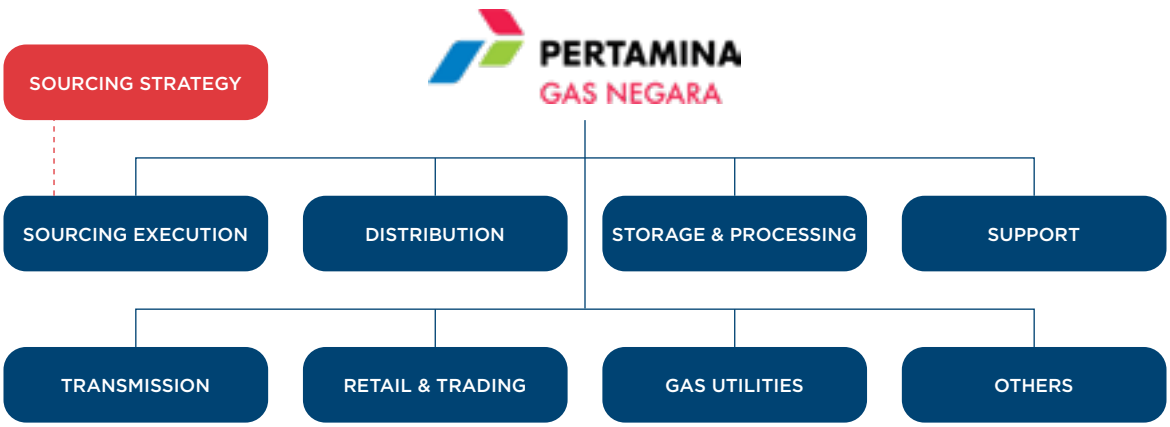

BIDANG USAHA
Nature of Businesses

Penyedia Solusi Energi Terintegrasi

PGN dan Entitas Anak serta Afiliasi sebagai bagian Subholding Gas saling mendukung dan memberikan nilai tambah dalam penyediaan gas bumi kepada pengguna akhir. Penyediaan gas bumi yang berkualitas dan andal dapat terjadi berkat dukungan dari Entitas Anak dan Afiliasi yang berperan serta pada bisnis inti penyediaan gas bumi melalui bidang usaha hulu, niaga gas bumi, penyimpanan dan gas processing, transportasi gas melalui pipa dan moda transportasi lain non-pipa, jasa teknologi informasi, jasa operasi dan pemeliharaan, dan konstruksi termasuk manajemen aset. Pengembangan bidang usaha tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Provider of Integrated Energy Solution

PGN and its Subsidiary Entities and Affiliates as part of Gas Subholding support each other and provide added value in the supply of natural gas to end users. The supply of quality and reliable natural gas is made possible thanks to the support of Subsidiaries and Affiliates participating in the core business of supplying natural gas through the upstream business sector, natural gas trading, gas storage and processing, gas transportation through pipelines and other modes of non-pipeline transportation, information technology services, operation and maintenance services, and construction including asset management. The development of this business sector takes into account the prevailing laws and regulations, and is in line with the principles of good corporate governance.

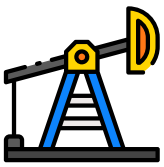

UPSTREAM

PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
Cadangan gas bumi di Indonesia lebih besar dari cadangan minyak bumi. SEI adalah Anak Perusahaan PGN yang memiliki kegiatan usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi.

OIL AND GAS PRODUCTION
Volume of natural gas reserves in Indonesia is greater than that of petroleum. SEI is a PGN's Subsidiary in the upstream oil and gas business.

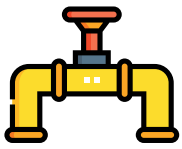

MIDSTREAM

Melalui PLI, NR, TGI, KJG, Pertagas dan PAG, PGN mengoperasikan pipa transmisi dan fasilitas regasifikasi LNG dengan keandalan dan efisiensi yang tinggi.

Melalui FSRU dan Land Based Regasification Facility, LNG diubah menjadi gas bumi yang berkualitas tinggi. PGN memiliki 2 (dua) FSRU yaitu FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat serta 1 (satu) fasilitas Regasifikasi darat di Arun.

Through PLI, NR, TGI, KJG, Pertagas dan PAG, PGN operates reliable and high-efficient LNG transmission pipeline and regasification facilities.

Through FSRU and Land-Based Regasification Facility, LNG is transformed into high quality natural gas. PGN has 2 (two) FSRUs i.e., FSRU Lampung and FSRU West Java and 1 (one) land regasification facility in Arun.

DOWNSTREAM

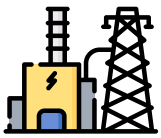

PEMBANGKIT LISTRIK
Pembangkit Listrik berbahan bakar gas bumi lebih ramah lingkungan dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara.

POWER PLANTS
Power plants consuming natural gas are more environmentally friendly than those using oil or coals.



PELANGGAN KOMERSIAL
Efisiensi dan keandalan adalah faktor yang penting dalam menyalurkan energi kepada pelanggan komersial. PGN dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

COMMERCIAL CUSTOMER
Efficiency and reliability are crucial factors in supplying energy to commercial customers. In this regard, PGN is able to meet such demands.



PELANGGAN RUMAH TANGGA
PGN merupakan Perusahaan distribusi gas bumi melalui pipa yang terbesar di Indonesia, dan telah menyalurkan gas bumi ke lebih dari 800.000 pelanggan rumah tangga di 74 Kota/Kabupaten se-Indonesia.

HOUSEHOLD CUSTOMERS
PGN is the largest natural gas distribution Company through pipelines across the country and has supplied gas to more than 800,000 household customers in 74 Cities/Regencies across Indonesia.

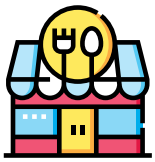

PELANGGAN SEKTOR KOMERSIAL, HOTEL, DAN RESTORAN
Gas Link adalah solusi untuk penyaluran gas bumi ke lokasi yang tidak terkoneksi dengan pipa gas. Menawarkan fleksibilitas, Gas Link juga tersedia untuk pelanggan sektor komersial, hotel dan restoran.

COMMERCIAL, HOTEL, AND RESTAURANT SECTOR CUSTOMERS
Gas Link is a solution for customers not connected to gas pipelines. Offering flexibility, Gas Link is available for commercial, hotel and restaurant sectors.

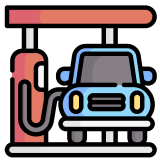

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS DAN MOBILE REFUELING UNIT (MRU)
Melalui Entitas Anak, PGN mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar gas di berbagai lokasi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau.

GAS FUEL FILLING STATIONS AND MOBILE REFUELING UNITS (MRU)
Through its Subsidiary Entity, PGN operates gas fuel filling stations in several locations in the islands of Java, Sumatra and Riau Islands.



SEKTOR INDUSTRI
Pertumbuhan Indonesia didorong oleh berkembangnya sektor industri. Solusi energi untuk industri yang berada di luar jalur pipa gas, dapat disalurkan menggunakan Gas Link.

Sektor industri berkontribusi sebesar 17,84% dari struktur ekonomi nasional. PGN terus berupaya mendukung daya saing melalui efisiensi di penggunaan bahan bakar dengan menyalurkan gas bumi ke berbagai kawasan industri.

INDUSTRIAL SECTOR
Indonesia's growth is driven by the industrial sector. Energy solutions for industries outside the gas pipeline may be supplied using Gas Link.

Industrial sector accounts for 17.84% of the national economy. PGN strives to continuously support it through efficient use of fuels by supplying natural gas to various industrial estates.

PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL

Operator of National Natural Gas Infrastructures

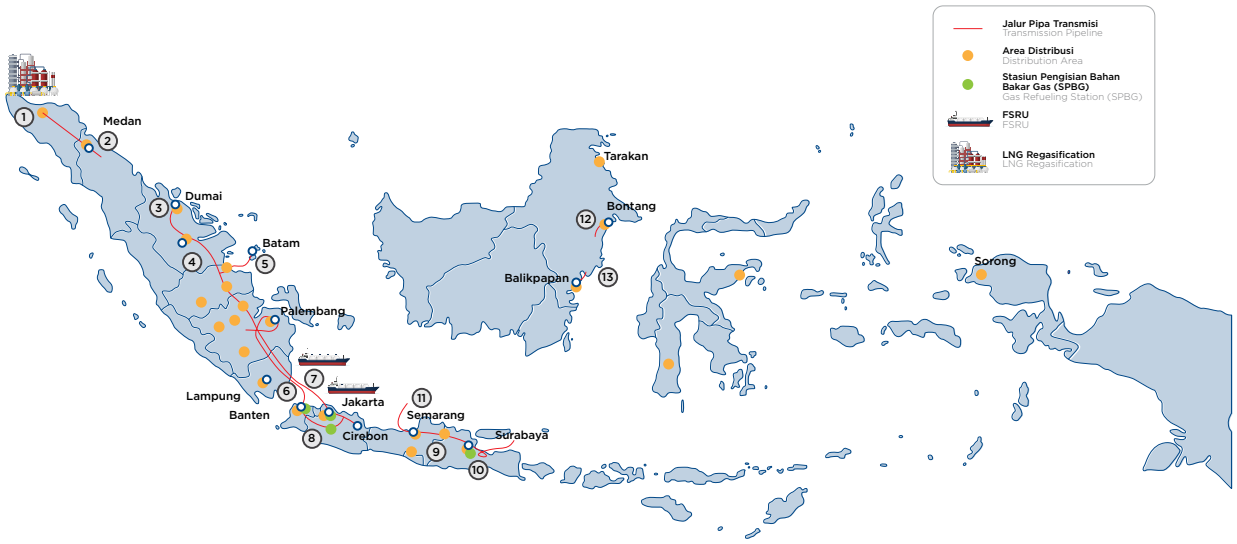

Jalur Pipa Transmisi
Transmission Pipeline

1. Arun - Belawan
2. Belawan - Sei Mengkei
3. Duri - Dumai
4. Grissik - Duri
5. Grissik - Singapore
6. Labuan Maringgai - Bojonegara
7. Labuan Maringgai - Bekasi
8. West Java
9. Gresik - Semarang
10. East Java
11. Kalimantan Jawa phase 1
12. Kalimantan Timur
13. Senipah - Balikpapan

Jaringan Infrastruktur
Infrastructure Network

- 1.079 km PGN Transmission Pipeline
- 6.872 km PGN Distribution Pipeline
- 4.742 km Subsidiaries Pipeline
- ±19.651 km Residential Pipeline Network
- 2 Floating Storage Regasification Unit
- 1 Land Based Regasification Unit
- 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
- 4 Mobile Refueling Unit

PGN sebagai Subholding Gas, mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan mengupayakan peningkatan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat baik melalui moda infrastruktur pipa maupun non-pipa. Segmen usaha niaga gas bumi adalah kegiatan penyaluran dan penjualan gas bumi ke pengguna akhir, meliputi pelanggan komersial dan industri manufaktur, pembangkit listrik, pelanggan kecil (UMKM), serta pelanggan rumah tangga. Segmen usaha ini dikelola PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, dan PT Pertamina Gas Niaga. Wilayah kegiatan usahanya tersebar di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten di Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, portofolio pengelolaan infrastruktur hilir gas bumi PGN Group mencakup 97% dari infrastruktur hilir gas bumi yang sudah terbangun dan beroperasi.

PGN, as Gas Subholding, integrates natural gas infrastructure in Indonesia and strives to increase access to energy for all levels of society through pipeline and nonpipeline infrastructure modes. The natural gas trading business segment is the distribution and sales of natural gas to end users, including commercial customers and manufacturing industries, power plants, retail customers (MSMEs), and household customers. The business segment is managed by PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas and PT Pertamina Gas Niaga. The areas of its business activities are spread across 18 provinces and 74 cities/regencies in Indonesia. The PGN Group's natural gas downstream infrastructure management portfolio, as of the end of 2023, covers 97% of the downstream natural gas infrastructure that has been built and is in operation.

WILAYAH OPERASI PGN
PGN Operation Regions

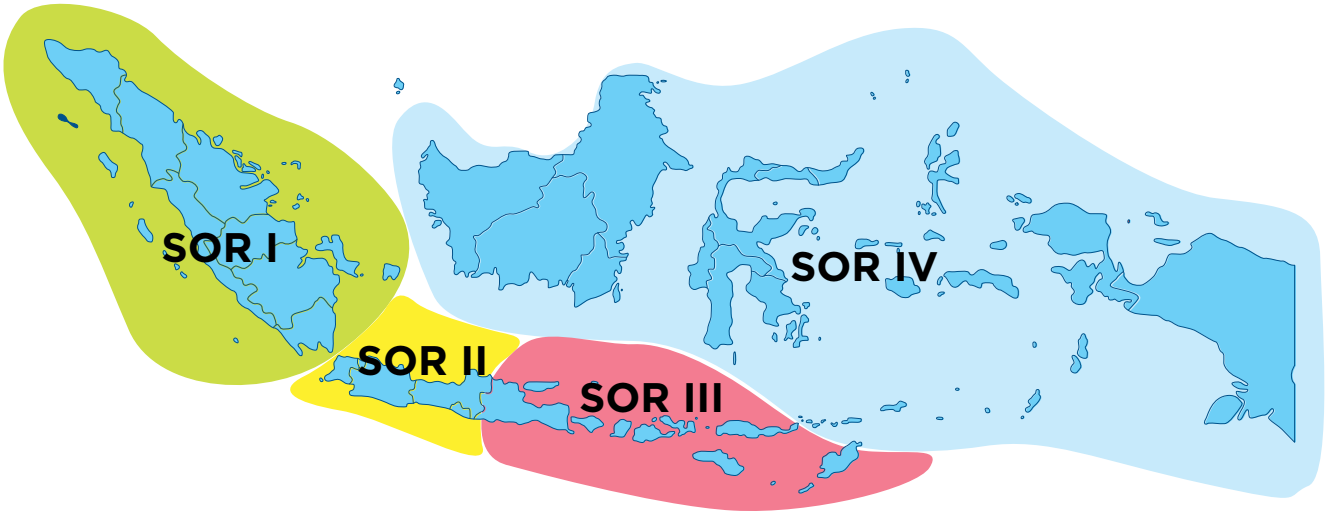

Hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, PGN telah beroperasi di 18 Provinsi yang meliputi 74 Kabupaten/Kota. Kegiatan operasional usaha niaga gas bumi PGN dikelola oleh Sales and Operation Region (SOR) yang terbagi dalam SOR I, II, III, dan IV dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

1. Wilayah SOR I meliputi pulau Sumatera & Kepulauan Riau, dengan Area terdiri dari Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam dan sekitarnya.
2. Wilayah SOR II meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dengan Area terdiri dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon dan sekitarnya.
3. Wilayah SOR III meliputi provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dengan Area terdiri dari Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang dan sekitarnya.
4. Wilayah SOR IV meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku, dengan Area terdiri dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, Sorong dan sekitarnya.

Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN memiliki wilayah operasi yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan PT Saka Energi Indonesia memiliki area operasi di luar negeri, yaitu pada Lapangan Fasken di Texas, Amerika Serikat.

As of December 31, 2023, PGN has been operating in 18 Provinces covering 74 Regencies/Cities. The operational activities of PGN's natural gas trading business are managed by Sales and Operation Regions (SOR) which are divided into SOR I, II, III, and IV with the details of each SOR area as follows:

1. The SOR I covers the islands of Sumatra & Riau Islands, with Areas consisting of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam and the surrounding areas.
2. The SOR II covers the provinces of West Java, DKI Jakarta, and Banten, with Areas consisting of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon and the surrounding areas.
3. The SOR III covers the provinces of Central Java, East Java, Bali, and Nusa Tenggara, with Areas consisting of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang and the surrounding areas.
4. The SOR IV covers the islands of Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku islands, with areas consisting of Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, Sorong and the surrounding areas.

PGN Subsidiaries and Affiliates have operation regions spread across the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the meantime, PT Saka Energi Indonesia has an overseas operation region, namely at the Fasken Field in Texas, the United States of America.

STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

Struktur organisasi PGN ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi Beserta PRL dan Formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PGN's organizational structure is determined based on Decision of BOD of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 004100.K/OT.00/HCGS/2023 dated February 24, 2023 concerning the Organizational Structure and Formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

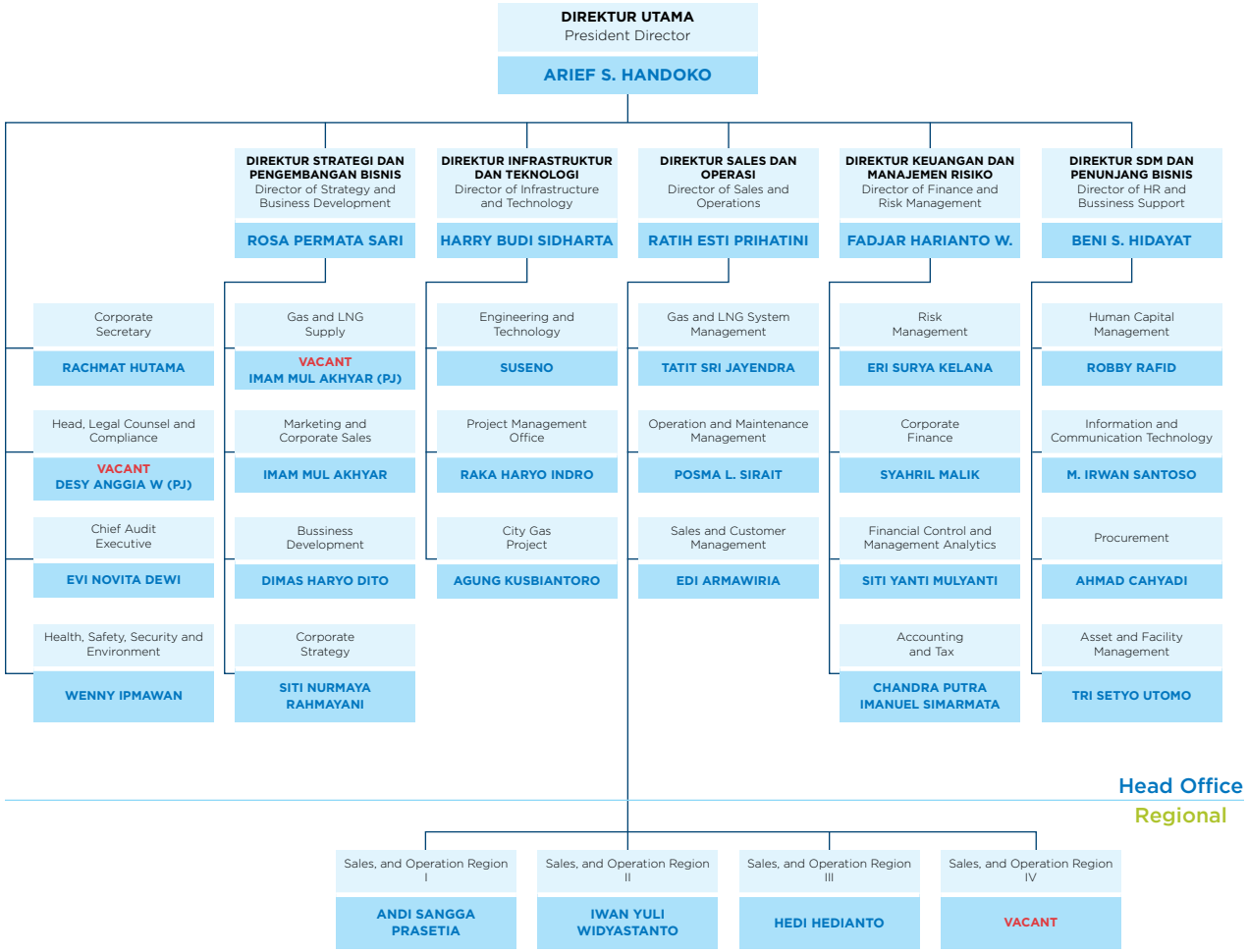

Sales and Operations Region meliputi:
1. Sales and Operation Region I (wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau).
2. Sales and Operation Region II (wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten).
3. Sales and Operation Region III (wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara).
4. Sales and Operation Region IV (wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Sales and Operations Regions cover:
1. Sales and Operation Region I (Sumatra and Riau Islands).
2. Sales and Operation Region II (West Java, DKI Jakarta, and Banten).
3. Sales and Operation Region III (Central Java, East Java, Bali, and Nusa Tenggara).
4. Sales and Operation Region IV (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua).

STRUKTUR USAHA
Bussiness Structures



PROFIL DEWAN KOMISARIS
Profile of the Board of Commissioners



Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

14 November 2023-Sekarang | November 14, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	63 tahun per 31 Desember 2023 63 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Malang, 23 Januari 1960 Malang, January 23, 1960
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. First appointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on the 2023 Decision of Extraordinary GMS held on November 14, 2023
Riwayat Jabatan Work Experience	• Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI (2023-sekarang) • Komisaris Utama PT PLN (Persero) (2019 – 2023) • Partner AHP Law Firm (2019 – 2023) • Wakil Komisaris Utama of PT Freeport Indonesia (2018 – 2019) • Kepala SKK Migas (2014 – 2018) • Partner, Fraud Investigations and Dispute Services, EY Indonesia (2012-2014) • Wakil Ketua KPK (2003 – 2007) • Chairman of the Tax Oversight Committee, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2023-present) • President Commissioner of PT PLN (Persero) (2019 – 2023) • Partner at AHP Law Firm (2019 – 2023) • Vice President Commissioner of PT Freeport Indonesia (2018 – 2019) • Head of SKK Migas (2014 – 2018) • Partner, Fraud Investigations and Dispute Services, EY Indonesia (2012-2014) • Deputy Chairman of the Corruption Eradication Committee (2003 – 2007)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988) • Master Degree College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta (1993) • State College of Accountancy (1988) • Master's Degree from College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta (1993)
Sertifikasi Certification	1. CACP (Certification on Audit Committee Practices) 2. CRGP (Certified Risk Governance Professional)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Has no affiliation with his fellow members, members of the Board of Directors, or major and/or controlling shareholders
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Chairman of TAX Supervision Committee Ministry of Finance Republic of Indonesia • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Dini Shanti Purwono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 Mei 2021 - Sekarang | May 3 2021- Present



Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	49 tahun per 31 Desember 2023 49 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 29 April 1974 Jakarta, April 29, 1974
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2021. Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 3, 2021.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) (2019 – sekarang) • Staf Khusus Presiden RI (2019-sekarang) • Partner Pendiri Firma Hukum Purwono & Widyayanti (2018-sekarang) • Anggota Komite Investasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Staf Khusus Menteri Keuangan (2013-2014) • Partner di Firma Hukum Christian Teo & Partners (2011-2018) • Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2012-2013) • Partner di Firma Hukum Roosdiono & Partners (2008-2010) • Kepala Divisi Hukum PT Danareksa (Persero) (2005-2008) • Senior Associate di Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners (Kantor Koresponden Firma Hukum Internasional Baker & McKenzie) (1997-2005) • Secretary of the Investment Acceleration Task Force (Presidential Working Team (2019 – present) • Special Staff to the President of the Republic of Indonesia (2019-present) • Founding Partner of Purwono & Widyayanti Law Firm (2018-present) • Member of the Investment Committee of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Special Staff to the Minister of Finance (2013-2014) • Partner at Christian Teo & Partners Law Firm (2011-2018) • Special Staff to the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) (2012-2013) • Partner at Roosdiono & Partners Law Firm (2008-2010) • Head of Legal Division of PT Danareksa (Persero) (2005-2008) • Senior Associate at Hadiputranto, Hadinoto & Partners Law Firm (Baker & McKenzie International Law Firm Correspondent Office) (1997-2005)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1997) • Master (LL.M) di bidang Hukum Keuangan Internasional dari Harvard Law School (2002) • Bachelor of Law from Universitas Indonesia (1997) • Master of Law in International Finance Law from Harvard Law School (2002)
Sertifikasi Certification	• Anggota Profesi Penunjang Pasar Modal • Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal • Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) • Member of Capital Market Supporting Professional • Member of Association of Capital Market Legal Consultants • Member of PERADI ((Perhimpunan Advokat Indonesia)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Perkembangan Terbaru Peer To Peer Lending (P2P Lending) Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/POJK/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi • Negotiation and Collaborative Decision Making • GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board • Latest Developments in Peer To Peer Lending (P2P Lending) in Indonesia Based on Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/POJK/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services • Negotiation and Collaborative Decision Making • GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) Secretary of the Investment Facilitator Tas Force (Presidential Work Team) • Staf Khusus Presiden RI Special Staff to the President of the Republic of Indonesia • Ketua Komite Audit PGN Chairperson of the PGN's Audit Committee • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Profile of the Board of Commissioners



Warih Sadono
Komisaris
Commissioner

15 Mei 2020-Sekarang | May 15, 2020-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	60 tahun per 31 Desember 2023 60 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Tegal, 1 Maret 1963 Tegal, March 1, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2020. Appointed for the first time as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 15, 2020.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN (2023-sekarang) • Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN (2020-2023) • Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019-2020) • Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI (2017-2019) • Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2016-2017) • Deputi Penindakan KPK (2012-2015) • Expert Staff for Litigation at the Ministry of SOE (2023-present) • Expert Staff for Strategic Policy Implementation of the Ministry of SOE (2020-2023) • Head of the Jakarta District Attorney Office (2019-2020) • Director of JAM PIDSUS Investigations at the Indonesian General Office (2017-2019) • Head of the West Kalimantan District Attorney Office (2016-2017) • Deputy for Corruption Eradication Commission (2012-2015)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1987) • Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta (2001) • Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) • Doktor dari Universitas Airlangga, Surabaya (2018) • Bachelor's of Law from Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1987) • Master Degree in Management from STIE IPWI, Jakarta (2001) • Master of Law from Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) • Doctoral degree from Universitas Airlangga, Surabaya (2018)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Pelatihan Manajemen Resiko Dengan Terlibat langsung • KBUMN Seri GRC, ESG untuk Badab • KBUMN Seri GRC, Informasi Integrasi GRC untuk Badan Pengawas • KBUMN Seri GRC, Metodologi GCG dan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Manajemen Risiko Inhouse • In-House Risk Management Training based on Permen BUMN 02 Tahun 2023 dan ISO 31000:2018. • Hands on Training Risk Management • GRC Series KBUMN, ESG for Boards • GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board • GRC Series KBUMN, GCG Methodology and Environmental and Social Management Systems Inhouse Manajemen Risiko • In-House Manajemen Risiko berdasarkan Permen BUMN 02 Tahun 2023 dan ISO 31000:2018.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali. Selain menjadi Komisaris PGN, saat ini Bapak Warih Sadono juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN. Has an affiliate relationship with the main and/or controlling shareholder. Mr Sardono's other position than PGN Commissioner is Expert in Litigation for the Ministry of SOE.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN. • Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. • Expert in Litigation for the Ministry of SOE. • Chairman of the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee • Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Luky Alfirman
Komisaris
Commissioner

26 April 2019-Sekarang | April 26, 2019-Present



Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 27 Maret 1970 Bandung, March 27, 1970
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 April 2019. Appointed for the first time as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on April 26, 2019.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (sekarang) • Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (sekarang) • Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (sekarang) • Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan (sampai dengan November 2022) • Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan Penerimaan Negara di Kementerian Keuangan (sampai dengan November 2017) • Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2015-2017) • Director General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance (present) • Commissioner at Indonesia Deposit Insurance Corporation (present) • Supervisory Board of Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Central Management (present) • Director General of Financing and Risk Management at the Ministry of Finance (until November 2022) • Expert Staff to the Minister of Finance for State Revenue Policy at the Ministry of Finance (until November 2017) • Head of Center for Policy Analysis and Harmonization at the Secretariat General of the Ministry of Finance (2015-2017)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994) • Master bidang Ekonomi dari University of Colorado, AS (2000) • Ph.D. bidang Ekonomi dari University of Colorado, AS (2004) • Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994) • Master degree in Economics from University of Colorado, USA (2000) • Ph.D in Economics University of Colorado, USA (2004)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• GRC Series KBUMN, Sosialisasi Pemeringkatan BUMN dan AP BUMN • GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board • Ministry of SOEs GRC Series, Socialization of SOE and SOE Subsidiary Rating • Ministry of SOEs GRC Series, GRC Integration Information for Supervisory Board
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali. Selain menjadi Komisaris PGN, saat ini Bapak Luky Alfirman juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Having affiliated relations with major and/or controlling shareholders. Apart from being a Commissioner of PGN, Mr. Luky Alfirman also currently serves as the Director General of Fiscal Balance and the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan • Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan • Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. • Director General of Fiscal Balance • Commissioner at Indonesia Deposit Insurance Corporation • Supervisory Board of Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Central Management • Member of PGN's Risk Management and Business Development Monitoring Comittee • Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Profile of the Board of Commissioners



Christian H. Siboro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

30 Agustus 2019-Sekarang | August 30, 2019-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2023 55 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Pontianak, 3 Desember 1968 Pontianak, December 3, 1968
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2019. Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 30, 2019.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2016 - sekarang) • Penasihat Ahli POLRI Bidang Organisasi dan SDM (2004 – 2016) • Founder & Director PT Netika Indonesia (2007-2019) • Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency (2016 - present) • Expert Advisor in Indonesian Police for Organization and Human Resources (2004 – 2016) • Founder & Director of PT Netika Indonesia (2007-2019)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Geofisika dan Meteorologi dari Institut Teknologi Bandung (1993) • Magister Manajemen bidang Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM (1995) • Doctor of Business Administration (DBA), HR Management dari Paris School of Business (2022) • Bachelor of Geophysics and Meteorology from Bandung of Institute Technology (1993) • Master of Management in International Management from (Management Education and Coaching) PPM School of Management (1995) • Doctor of Business Administration (DBA), HR Management from Paris School of Business (2022)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Business Analytics • The 13th Indonesia HR Summit • The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 - Advancing Energy Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development • GRC Series KBUMN, ESG for Boards dan GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board • 18th Indonesia HR Expo Conference & Exhibition • Business Analytics • The 13th Indonesia HR Summit • The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 - Advancing Energy Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development • GRC Series KBUMN, ESG for Boards and GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board • 18th Indonesia HR Expo Conference & Exhibition
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara • Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. • Advisor to the Head of State Intelligence Agency • Chairman of the PGN's GCG Remuneration and Nomination Committee • Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Abdullah Aufa Fuad

Komisaris Independen
Independent Commissioner

14 November 2023 – Sekarang | November 14, 2023-Present



Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	32 tahun per 31 Desember 2023 32 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Kediri, 5 April 1991 Kediri, April 5, 1991
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2023. Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on November 14, 2023.
Riwayat Jabatan Work Experience	• PT Kawal Sidang Indonesia (2022) • PA Staf Khusus Presiden (2019-2023) • PT Speaktograph Digital (2019-2021) • PT Kawal Sidang Indonesia (2022) • PA Special Staff to the President (2019-2023) • PT Speaktograph Digital (2019-2021)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S1 Fisika, Universitas Airlangga (2015) • S2 Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquée, Lyon, France (2018) • Bachelor Degree in Physics, Airlangga University (2015) • Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquée, Lyon, France (2018)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Anggota Komite Audit PGN • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. • Member of PGN's Audit Comittee • Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors



Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Directors

30 Mei 2023-Sekarang | May 30, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	56 tahun per 31 Desember 2023 56 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 9 Agustus 1967 Jakarta, August 9, 1967
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023. Appointed for the first time as President Director based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2023.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (2019 - 2022) • Sekretaris SKK Migas (2017 – 2019) • Vice President of Supply Chain Management & General Services at ConocoPhillips Indonesia (2016 - 2017) • Senior Manager Audit & Ethics at ConocoPhillips Indonesia (2009 - 2016) • Senior Business Excellence Specialist ConocoPhillips Indonesia (2008 – 2009) • Manajer Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2005 – 2008) • Kepala Unit Audit Industri Perbankan BPK RI (2002 – 2005) • Auditor Senior BUMN Kementerian Perhubungan (2001-2002) • Auditor Senior BUMN Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (1993 – 1999) • Auditor Junior APBN Kementrian Keuangan (1989 – 1993) • Deputy for Finance and Monetization of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) (2019 - 2022) • Secretary of SKK Migas (2017 – 2019) • Vice President of Supply Chain Management & General Services at ConocoPhillips Indonesia (2016 - 2017) • Senior Manager Audit & Ethics at ConocoPhillips Indonesia (2009 - 2016) • Senior Business Excellence Specialist ConocoPhillips Indonesia (2008 – 2009) • Audit Manager of the Republic of Indonesia Financial Audit Agency (BPK RI) (2005 – 2008) • Head of Banking Industry Audit Unit BPK RI (2002 – 2005) • Senior Auditor for SOR Ministry of Transportation (2001-2002) • Senior Auditor for SOE Ministry of Tourism, Post and Telecommunications (currently Ministry of Tourism and Creative Economy) (1993 – 1999) • Junior Auditor of APBN Ministry of Finance (1989 – 1993)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1986- 1989) • Master of Business Administration, CaseWestern Reserve University, Cleveland, OH, USA (1999 – 2001) • Bachelor Degree in Accounting, State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1986- 1989) • Master Degree in Business Administration, CaseWestern Reserve University, Cleveland, OH, USA (1999 – 2001)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Akuntan Publik dari Universitas Indonesia (2002 – 2003) Public Accountant Certification from the University of Indonesia (2002 – 2003)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	1. Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guarding Productivity for Economic Transformation 2. *Business Judgement Rules* Business Judgement Rules
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Has no affiliation with his fellow members s, members of the Board of Commissioners, or major and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Fadjar Harianto Widodo

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

31 Mei 2021-Sekarang | May 31, 2021-Present



Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	56 tahun per 31 Desember 2023 56 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Kudus, 20 Mei 1967 Kudus, May 20, 1967
Domisili Domicile	Bekasi Bekasi
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2021. Appointed for the first time as Director of Finance based on the Resolution of the Annual GMS on May 3, 2021.
Riwayat Jabatan Work Experience	• SVP Controller PT Pertamina (Persero) (2019) • Direktur Finance & Business Support PT Pertamina EP (2018) • Berkarier di PT Pertamina (Persero) sejak 1993 • SVP Controller PT Pertamina (Persero) (2019) • Director of Finance & Business Support, PT Pertamina EP (2018) • Pursued a career at PT Pertamina (Persero) since 1993
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1992) Bachelor of Economics from University of Diponegoro (1992)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Risk Professional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (2023 – 2026) Risk Professional Certification from the Capital Market Professional Certification Institute (2023 – 2026)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• CFO School BUMN • Training for CRP® Certification • Hands-on Training Risk Management • Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 BUMN Leadership and Management Institute (BLMI) • Inhouse Training Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/ MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 • CFO School of SOE • Training for CRP® Certification • Hands-on Risk Management Training • GRC Masterclass Training Program 2023 on SOE Leadership and Management Institute (BLMI) • Inhouse Risk Management Training Based on PER-2/ MBU/03/2023 and ISO 31000:2018
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors



Harry Budi Sidharta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

14 November 2023 – Sekarang | November 14 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	46 tahun per 31 Desember 2023 46 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Denpasar, 27 Desember 1977 Denpasar, December 27, 1977
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023. Appointed for the first time as Director of Infrastructure and Technology based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2023.
Riwayat Jabatan Work Experience	• VP Strategic Planning & Business Development PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) (2019 – 2021) • Direktur Niaga PT Pertamina International Shipping (PIS) (2021 – 2022) • Direktur Utama PT Nusantara Regas (NR) (2022 – 2023) • VP Strategic Planning & Business Development of PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) (2019 – 2021) • Commercial Director of PT Pertamina International Shipping (PIS) (2021 – 2022) • President Director of PT Nusantara Regas (NR) (2022 – 2023)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S1-Teknik Mesin, Universitas Brawijaya (1996 – 2002) • S-2 MBA Prasetiya Mulya Business School (2008) • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Brawijaya University (1996 – 2002) • Master's Degree MBA Prasetiya Mulya Business School (2008)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Enterprise Risk Management dari Indonesia Risk & Business Advisory (2023) • Sertifikasi Risk Professional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Lembaga sertifikasi Profesi Pasar Modal (2023) • Enterprise Risk Management Certification from Indonesia Risk & Business Advisory (2023) • Risk Professional Certification from the National Professional Certification Agency (BNSP), Capital Markets Professional Certification Institution (2023)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi PT Pertamina Training and Consulting (2023) Strengthening National Values for PT Pertamina Training and Consulting (2023)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Has no affiliation with his fellow members, members of the Board of Commissioners, or major and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Ratih Esti Prihatini

Direktur Sales dan Operasi
Director of Sales and Operations

14 November 2023 – Sekarang | November 14 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2023 57 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 29 Desember 1966 Jakarta, December 29, 1966
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Sales dan Operasi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. Appointed for the first time as Director of Sales and Operations based on the 2023 Extraordinary GMS on November 14, 2023.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Pengembangan Usaha Elnusa (2021-2023) • Vice President Commercial and Monetization SHU PT Pertamina Hulu Energi (2020 – 2021) • Vice president commercial PT Pertamina Hulu Energi (2019 – 2020) • Commercial project manager PT Pertamina Hulu Energi (2018 – 2019) • Oil and Gas Lifting Manager PHE (2017 – 2018) • Marketing Team Leader BP Indonesia, PHE, Offshore North West Java (2009 – 2016) • HR advisor for shared services departement and downstream: PT. Jasatama and castrol BP Indonesia (2005 – 2007) • Memegang beberapa posisi di Operation management di BP Indonesia (2000 – 2005): - Wireline Ops and Support Manager - Field Planning and Support Manager - Transportation and Support Manager - Java Operation Support Manager • Shared Technical Services Coordinator and Assistant to FST Vice Presidenct ARCO (1998 – 2000) • Business Development Director of Elnusa (2021-2023) • Vice President Commercial and Monetization SHU of PT Pertamina Hulu Energi (2020 – 2021) • Vice President Commercial of PT Pertamina Hulu Energi (2019 – 2020) • Commercial project manager at PT Pertamina Hulu Energi (2018 – 2019) • Oil and Gas Lifting Manager at PHE (2017 – 2018) • Marketing Team Leader BP Indonesia, PHE, Offshore North West Java (2009 – 2016) • HR advisor for shared services department and downstream: PT. Jasatama and castrol BP Indonesia (2005 – 2007) • Assumed several positions in Operation management at BP Indonesia (2000 – 2005): - Wireline Ops and Support Manager - Field Planning and Support Manager - Transportation and Support Manager - Java Operations Support Manager • Shared Technical Services Coordinator and Assistant to FST Vice President ARCO (1998 – 2000)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Perminyakan dari Universitas Trisakti, Jakarta (1991) • Magister Manajemen dari IPMI Business School, Jakarta (2004) • Bachelor Degree in Petroleum from Trisakti University, Jakarta (1991) • Master of Management from IPMI Business School, Jakarta (2004)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Pelatihan Upskilling Leadership Competency SLC Batch II 28-29 Agustus 2023 • AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) – Mei 2023 • SLC Batch II Upskilling Leadership Competency Training 28-29 August 2023 • AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) – May 2023
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.



PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors



Rosa Permata Sari
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

14 November 2023 – Sekarang | November 14, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	43 tahun per 31 Desember 2023 43 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Palembang, 4 Desember 1980 Palembang, December 4, 1980
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. Appointed for the first time as Director of Strategy and Business Development based on the Resolution of the 2023 Extraordinary GMS on November 14, 2023.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Teknik dan Operasi, PT Pertamina Gas (2019 – 2023) • Komisaris Utama PT Solusi Energy Nusantara (2018 – 2019) • Group Head, Program Management Office Infrastructure, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018 – 2019) • Division Head, Infrastructure Program, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2016-2017) • AVP Construction Division, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2015 – 2016) • Director of Engineering and Operations of PT Pertamina Gas (2019 – 2023) • President Commissioner of PT Solusi Energy Nusantara (2018 – 2019) • Group Head, Program Management Office Infrastructure, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018 – 2019) • Division Head, Infrastructure Program, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2016-2017) • AVP Construction Division, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2015 – 2016)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Doctoral Student of DSM ITB (2023 – Now) • Magister Global Leadership MBA dari SBM ITB & AALTO Finlalnd University, Jakarta – Singapore (2016) • Magister Industrial and System Engineering dari National University of Singapore (2009) • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2002) • Doctoral Student of DSM ITB (2023 – Now) • Master Degree in Global Leadership MBA from SBM ITB & AALTO Finland University, Jakarta – Singapore (2016) • Masters Degree in Industrial and Systems Engineering from the National University of Singapore (2009) • Bachelor Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (2002)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Public Private Parthership Professional (2021) • Program Prime Directorship 3 – Pertamina (2020) • Program Executive Development Program – PGN (2016) • Program Technical Courses "LNG Process Operation" (2014) • Program Sertifikasi The FIDIC Contracts (2013) • Public Private Partnership Professional Certification (2021) • Prime Directorship Program 3 – Pertamina (2020) • Executive Development Program – PGN (2016) • Technical Courses Program "LNG Process Operation" (2014) • The FIDIC Contracts Certification Program (2013)
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan – Lemhanas • Incident Command System (ICS) • ST Modul Plan Oil & Gas Forum 2023 • Strengthening National Values – Lemhanas • Incident Command System (ICS) • ST Module Plan Oil & Gas Forum 2023
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Has no affiliation with her fellow members, members of the Board of Commissioners, or major and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

Beni Syarif Hidayat

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

15 Mei 2020-Sekarang | May 15, 2020-Present



Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	59 tahun per 31 Desember 2023 59 years old as of December 31, 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Cimahi, 21 Juli 1964 Cimahi, July 21, 1964
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2020. Appointed for the first time as Director based on the Resolution of the Annual GMS on May 15, 2020.
Riwayat Jabatan Work Experience	• SVP Human Capital Management PT Pertamina (Persero) (2018-2020) • VP Human Capital Policy PT Pertamina (Persero) (2017-2018) • VP HR Operations PT Pertamina (Persero) (2017) • VP Human Resources PT Pertamina EP (2012-2016) • SVP Human Capital Management at PT Pertamina (Persero) (2018-2020) • VP Human Capital Policy at PT Pertamina (Persero) (2017-2018) • VP HR Operations at PT Pertamina (Persero) (2017) • VP Human Resources at PT Pertamina EP (2012-2016)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Sosial Politik dari Universitas Padjadjaran (1988) Bachelor of Political and Social Science from Padjadjaran University (1988)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Human Resource Professional • Program Sertifikasi Ahli Hubungan Industrial • Human Resource Professional Certification • Industrial Relations Expert Certification Program
Pelatihan di 2023 Trainings in 2023	• Chief Human Resource Officers (CHRO) School 2023 (KBUMN) • Industrial Employee Relation Conference (FHCI) • Hands – on Training Risk Management • Chief Human Resource Officers (CHRO) School 2023 (KBUMN) • Industrial Employee Relation Conference (FHCI) • Hands – on Training Risk Management
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PGN SELAMA TAHUN BUKU 2023 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2023

Changes in the Composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners During the 2023 Fiscal Year and After the 2023 Fiscal Year

Selama tahun buku 2023, terdapat beberapa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PGN, sebagai berikut:

During the 2023 financial year, there were several changes to the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. PGN, as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Terakhir Latest Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Pemberhentian Date of Termination
1	Arcandra Tahar	Komisaris Utama President Commissioner	21 Januari 2020 January 21, 2020	14 November 2023 November 14, 2023
2	Paiman Raharjo	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 Mei 2020 May 15, 2020	14 November 2023 November 14, 2023
3	M. Haryo Yunianto	Direktur Utama President Director	3 Mei 2021 May 3, 2021	30 Mei 2023 May 30, 2023
4	Heru Setiawan	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	3 Mei 2021 May 3, 2021	30 Mei 2023 May 30, 2023
5	Fariz Aziz	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	15 Mei 2020 May 15, 2020	14 November 2023 November 14, 2023
6	Achmad Muchtasyar	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	3 Mei 2020 May 3, 2020	14 November 2023 November 14, 2023
7	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	14 November 2023 November 14, 2023	-
8	Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	14 November 2023 November 14, 2023	-
9	Arief S. Handoko	Direktur Utama President Director	30 Mei 2023 May 30, 2023	-
10	Harry Budi Sidartha	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	14 November 2023 November 14, 2023	-
11	Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	14 November 2023 November 14, 2023	-
12	Ratih Esti Prihatini	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	14 November 2023 November 14, 2023	-

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS
Profile of Gas Subholding Employees

Dalam menunjang kesuksesan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang, Perwira Subholding Gas memiliki peran penting dalam membentuk budaya, inovasi, dan daya saing PGN. Untuk itu, PGN menempatkan Perwira Subholding Gas secara strategis guna mendorong kinerja PGN Group dalam mencapai kinerja terbaik di tahun 2023.

PGN juga memastikan keberagaman tanpa diskriminasi di tempat kerja telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Sehingga manajemen PGN Group dapat menjamin lingkungan kerja yang profesional, aman, dan nyaman bagi Perwira Subholding Gas. Hal ini menjadikan Perwira Subholding Gas dapat bekerja dengan sepenuh hati tanpa merasa khawatir tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Meski terus dihadapkan pada sejumlah tantangan, PGN senantiasa memperhatikan kesehatan pekerja sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan Pekerja. Dalam perjalanan mencapai tujuan bisnis, Perwira Subholding Gas menjadi garda terdepan yang merespons dinamika pasar, pengembangan potensi, serta menciptakan inovasi. Dengan sinergi antara pengetahuan, keterampilan, dan komitmen, Perwira Subholding Gas membuka jalan untuk keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, memahami, merawat, dan mengelola Perwira Subholding Gas dengan bijak menjadi langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan kesuksesan PGN di era yang terus berkembang.

In supporting long-term business success and growth, Subholding Gas Employees have an important role in developing PGN's culture, innovation, and competitiveness. For this reason, PGN strategically placed Subholding Gas Employees to encourage the performance of the PGN Group to achieve its best performance in 2023.

PGN also ensures that diversity, without discrimination, in the workplace is consistent with human rights. So that PGN Group management can guarantee a professional, safe, and comfortable working environment for Subholding Gas Employees. This enables Subholding Gas Employees to work wholeheartedly without having to worry about not getting the same opportunity.

Despite ongoing challenges, PGN prioritizes employee health as part of its efforts to maintain employee welfare and health. In order to achieve business objectives, Subholding Gas Employees are at the forefront of responding to market dynamics, developing potential, and innovating. Subholding Gas Employees create a competitive advantage by combining their knowledge, skills, and commitment. Therefore, understanding, caring for, and effectively managing Subholding Gas Employees is an important step in building a strong foundation for PGN's sustainability and success in an ever-changing world.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Hingga akhir tahun 2023, PGN secara Group tercatat memiliki sebanyak 3.318 Pekerja. Pekerja yang berkontribusi di Perusahaan induk PGN Group/ Subholding Gas sebanyak 1.080 dan Pekerja yang berkontribusi di entitas anak (termasuk afiliasi dan Perusahaan patungan) sebanyak 2.238 orang. Jumlah Pekerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 120 orang dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh rekrutmen pekerja di anak perusahaan dan afiliasi, serta penambahan jumlah pekerja penugasan dari *Holding*.

NUMBER OF SUBHOLDING GAS EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS

Until the end of 2023, PGN as a group was recorded as having 3,318 employees. There were 1,080 workers contributing to the parent company, PGN Group/ Subholding Gas, and 2,238 workers contributing to subsidiaries (including affiliates and joint companies). The number of workers this year increased by 120 compared to the previous year, which was partly due to the recruitment of workers in subsidiaries and affiliates as well as an increase in the number of workers on assignment from the Holding Company.

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS
Profile of Gas Subholding Employees

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Gas Subholding Employees by Employment Status

Status Kepegawaian	2023	2022	2021	Employment Status
PKWTT	3103	3.012	3.053	Tenured Employees
PKWT	215	186	186	Non-Tenured Employees
Jumlah	**3.318**	**3.198**	**3.239**	**Total**

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA

Pada tahun 2023, berdasarkan latar belakang pendidikan, Perwira Subholding Gas terbesar adalah Sarjana sebanyak 1.879 orang. Disusul kemudian adalah pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 682 orang, Magister sebanyak 526 orang, SLTA/setara ke bawah sebanyak 227 orang, dan Doktor empat orang. Berikut ini data Perwira Subholding Gas berdasarkan pendidikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

NUMBER OF GAS SUBHOLDING EMPLOYEES BY EDUCATION AND AGES

In 2023, based on educational background, the largest number of Gas Subholding Officers are Bachelor degree holders with 1,879 people. Followed by workers with a Diploma educational background as many as 682 people, Masters as many as 526 people, high school / equivalent and below as many as 227 people, and Doctoral four people. The following is data on Gas Subholding Officers based on education within 3 (three) years:

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Pendidikan
Number of Gas Subholding Employees by Education

Pendidikan Education	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Strata 3 (S3) | PhD Degree	4	0	4	3	0	3	1	0	1
Strata 2 (S2) | Master's Degree	389	136	526	378	132	510	360	126	486
Strata 1 (S1) | Bachelor's Degree	1.393	486	1.879	1.307	460	1.767	1.352	470	1.822
Diploma | Diploma	552	130	682	557	119	676	543	120	663
SLTA | Senior High	210	17	227	222	20	242	242	25	267
Jumlah | Total	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**	**2.498**	**741**	**3.239**

Komposisi Perwira Subholding Gas berdasarkan usia komposisi didominasi oleh pekerja berusia 40 tahun ke bawah sebanyak 1.835 orang yang merupakan kelompok usia pekerja produktif, yang dapat meningkatkan produktivitas Perusahaan. Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan berdasarkan usia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

The composition of Gas Subholding Employees by age was dominated by workers aged 40 and under, with a total of 1,835 people, which is the age group of productive workers, which can increase the Company's productivity. The following table presents data on the number of Subholding Gas Employees and its Subsidiaries by age within 3 (three) years:

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Usia
Number of Gas Subholding Employees by Age

Usia Age	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
≥51 tahun | years old	295	65	360	283	61	344	262	54	316
41-50 tahun | years old	908	215	1.123	851	184	1.035	766	168	934
31-40 tahun | years old	1.011	331	1.342	1.038	360	1.398	1.120	359	1.479
≤30 tahun | years old	335	158	493	295	126	421	350	160	510
Jumlah | Total	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**	**2.498**	**741**	**3.239**

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Kelompok jabatan yang ada di PGN Group terdiri dari manajemen puncak, manajemen madya, manajemen dasar, dan tingkat jabatan lainnya di bawah manajemen dasar atau Pelaksana. Pada tahun 2023, total jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan yang terbanyak yaitu pada jabatan manajemen dasar sebanyak 1.616 orang, diikuti oleh Perwira Subholding Gas terbanyak kedua yaitu jabatan pelaksana sebanyak 1.030 orang, disusul dengan jabatan Manajemen Madya sebanyak 437 orang serta manajemen puncak sebanyak 235 orang. Berikut ini tabel yang menampilkan data jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan berdasarkan kelompok jabatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

NUMBER OF GAS SUBHOLDING EMPLOYEES BY POSITION GROUP AND EMPLOYMENT STATUS

The position groups in the PGN Group consist of top management, basic/low-level management, and other positions reporting to basic management or a supervisor. In 2023, the highest number of Subholding Gas Employees and its subsidiaries were in basic management positions, with 1,616 people, followed by the supervisory positions of 1,030 people, the middle management positions of 437 people, and the top management positions of 235 people. The following table displays data on the number of Subholding Gas Employees and its subsidiaries by position group within 3 (three) years:

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Kelompok Jabatan
Number of Gas Subholding Employees by Position Group

Kelompok Jabatan Position Group	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Manajemen Puncak Top Management	195	40	235	202	34	236	185	30	215
Manajemen Madya Middle Management	341	96	437	324	93	417	353	89	442
Manajemen Dasar Low Management	1.214	402	1.616	1.034	328	1.362	846	326	1.172
Pelaksana | Staff	799	231	1.030	907	276	1.183	1.114	296	1.410
Jumlah | Total	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**	**2.498**	**741**	**3.239**

Terkait dengan status kepegawaian, karyawan PGN Group dan Anak Perusahaan dibagi menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)/Pekerja Tidak Tetap. Pada tahun 2023, jumlah pekerja tetap tercatat sebanyak 3.088 orang, sedangkan pekerja tidak tetap sebanyak 230 orang. Terlampir berikut ini data yang lebih rinci mengenai jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan status kepegawaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

With regard to employment status, PGN Group and its subsidiary employees are divided into Permanent Employees and Non-permanent Employees. In 2023, the number of permanent employees was 3,012 people, while non-permanent employees was 186. Below is more detailed data regarding the number of Subholding Gas Employees based on employment status within 3 (three) years:

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Gas Subholding Employees by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
PKWTT | Tenured Employees	2.369	719	3.088	2.315	697	3.012	2.350	703	3.053
PKWT Non-Tenured Employees	180	50	230	152	34	186	148	38	186
Jumlah | Total	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**	**2.498**	**741**	**3.239**

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS
Profile of Gas Subholding Employees

JAMINAN KESETARAAN GENDER DAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GENDER

Karakteristik bidang usaha dan operasional PGN Group didominasi oleh pekerja pria. Hingga akhir Desember 2023, jumlah pekerja laki-laki sebanyak 2.549 orang. Kemudian jumlah pekerja wanita yaitu sejumlah 769 orang, dengan perbandingan 77% dan 23%. PGN Group tidak memiliki kebijakan untuk menetapkan kuota jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan gender namun PGN Group wajib menjamin kesetaraan gender di lingkungan operasi Perusahaan. Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan gender dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

GENDER EQUALITY GUARANTEE AND THE NUMBER OF EMPLOYEES BY GENDERS

The characteristics of the PGN Group's nature of business and operations are dominated by male employees. Until the end of December 2023, there were 2,549 male employees. Meanwhile, the number of female employees was 769, with a ratio of 77% to 23%. PGN Group has no policy in place to set gender quotas for Subholding Gas Employees. However, PGN Group is required to ensure gender equality in its operating environment. The number of Subholding Gas Employees by gender within 3 (three) years is as follows:

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan Gender
Number of Gas Subholding Employees by Gender

Jenis Kelamin	2023	2022	2021	Gender
Laki-laki	2.549	2.467	2.498	Male
Perempuan	769	731	741	Female
Jumlah	**3.318**	**3.198**	**3.239**	**Total**

PGN senantiasa mengimplementasikan prinsip non diskriminasi, kesempatan yang sama dan setara tanpa membedakan gender dalam pengelompokan jabatan. Dengan komitmen ini, penentuan posisi jabatan Perwira Subholding Gas didasarkan atas hasil penilaian, kemampuan, dan kecakapan pekerja.

PGN always implements the principle of non-discrimination, equal opportunities regardless of gender in the grouping of positions. With this commitment, Subholding Gas employees' positions are determined based on the results of their assessments, abilities, and skills.

PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*

The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

Human Capital Management memiliki peran yang penting dalam memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam pengelolaan bisnis. Sebagai *strategic business partners*, Human Capital Management membawa kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan. Salah satu nilai strategis Human Capital Management adalah kemampuan dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten guna mendukung pencapaian bisnis organisasi dengan menjaga aspek finansial seoptimal mungkin. Human Capital Management juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Sebab peran Human Capital Management ini dibangun sebagai jawaban atas dinamika organisasi secara berkelanjutan.

Human Capital Management has an important role in establishing itself as a strategic partner in business management. Human Capital Management, as a strategic business partner, contributes significantly to the Company's business goals and sustainability. One of the strategic values of Human Capital Management is the ability to provide competent human resources to support the organization's business objectives while maintaining optimal financial performance. Human Capital Management is also expected to contribute to organizational performance, given that its role was established as a solution to organizational dynamics in a sustainable manner.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

SDM PGN senantiasa dikelola secara terus menerus dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tercapainya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pengelolaan SDM PGN yang tepat juga dapat meningkatkan kinerja pekerja yang unggul melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) *inhouse* maupun *public training*, sertifikasi dan *sharing knowledge*.

Pada tahun 2023, PGN melaksanakan pengukuran hasil Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2) dengan hasil capaian sebesar 124,02% untuk mengukur efektivitas dari pelatihan yang dilaksanakan sehingga dapat berkontribusi meningkatkan kinerja Perusahaan. PGN juga menyediakan fasilitas *online learning management system* untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta *sharing knowledge*.

COMPETENCY DEVELOPMENTS

PGN's human resources are always managed continuously and consistently in order to support sustainable business growth and achieve the Company's Long-Term Plan. Proper management of PGN's human resources can also improve excellent employee performance through in-house education and training programs as well as public training, certification, and knowledge sharing.

In 2023, PGN will measure the results of the Level 2 (L2) Training Evaluation with an achievement of 124.02% to measure the effectiveness of the training provided and how it can contribute to improving the Company's performance. PGN provides online learning management system facilities to improve the implementation of education and training programs, as well as knowledge sharing.

PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*

The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

TALENT DEVELOPMENT PROGRAM

PGN menerapkan program *leadership development* dalam rangka mempersiapkan talenta terbaik yang berkualitas tinggi dan *agile* untuk menjadi *top leader* PGN berikutnya. PGN mengembangkan dan mempersiapkan program ini untuk seluruh level Perwira Subholding Gas, baik level *first line management, middle management* hingga *senior management*. Dalam program ini, PGN membagi menjadi 2 (dua) jenis program *leadership development* yaitu:

- Program reguler merupakan pembekalan kepada Perwira Subholding Gas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan level kepemimpinannya.
- Program *talent development* sebagai wujud komitmen Manajemen PGN dalam rangka mempersiapkan pengembangan Perwira Subholding Gas berpotensi untuk menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan.

PGN menggunakan pendekatan 70:20:10, yaitu 70% *assignment*, 20% *coaching*, dan 10% *training*. Para peserta program ditempa dengan *experiential learning*, yaitu belajar melalui *assignment* atau penugasan yang diharapkan tidak hanya memperkuat kompetensi teknis para peserta namun juga berkontribusi terhadap Perusahaan melalui *continuous improvement*. Sedangkan kegiatan *coaching* menjadi ajang diskusi, *networking*, serta ajang menajamkan kompetensi *coaching* bagi para *leader* muda.

PGN juga melakukan penyelarasan strategi dengan Pertamina sebagai induk Perusahaan, salah satunya dengan penyelarasan program *leadership* dan kesiapan *talent mobility* melalui *succession planning* untuk posisi-posisi kunci di Perusahaan. Untuk itu, PGN terlibat dalam program-program pengembangan Pertamina di antaranya *Talent to Value Initiative Strategic*, Program Akselerasi *Trailblazer* dan *Catalyzer* Pertamina.

Program *Talent to Value* merupakan program inisiatif strategis untuk memastikan terciptanya *talent-talent* terbaik melalui *Leadership and culture change* dengan konsep 30, 300, dan 3.000, yaitu:

1. Mengidentifikasi 30 *delta position* (jabatan-jabatan kunci) yang menjadi penggerak Perusahaan dalam meningkatkan *Enterprise Market Value* (EMV) sesuai aspirasi 2024.

TALENT DEVELOPMENT PROGRAM

PGN implements a leadership development program to prepare the best, most talented, and most agile individuals to become PGN's next top leaders. PGN created and designed this program for all levels of Subholding Gas Employees, including first-line, middle, and senior management. In this program, PGN divides leadership development programs into two types, as follows:

- The regular program is provided to Subholding Gas Employees to carry out their roles and responsibilities in accordance with their leadership level.
- The talent development program is a form of PGN Management's commitment to preparing the development of Subholding Gas Employees who have the potential to become part of the leadership succession.

PGN adopts a 70:20:10 approach, corresponding to 70% assignments, 20% coaching, and 10% training. The program participants are trained using experiential learning methods, which means they learn through assignments that are designed not only to strengthen the participants' technical skills but also to contribute to the Company through continuous improvement. Meanwhile, coaching activities allow young leaders to discuss, network, and improve their coaching skills.

PGN continues to align its strategy with Pertamina as the holding Company, including aligning leadership programs and talent mobility readiness through succession planning for key positions in the Company. Therefore, PGN is involved in Pertamina's development programs, which include the Talent to Value Initiative Strategic, the Trailblazer Acceleration Program, and the Pertamina Catalyzer.

The Talent to Value Program is a strategic initiative program to ensure the creation of the best talents through leadership and culture change with the concepts of 30, 300, and 3,000, which are:

1. Identify 30 delta positions (key positions) that contribute to increasing the company's Enterprise Market Value (EMV) in line with its 2024 aspirations.

2. Mengidentifikasi dan mengembangkan 300 *rising stars* yang akan menjalankan operasional bisnis baik *existing* maupun *new business development* melalui program akselerasi pengembangan kepemimpinan (*Leadership Development Acceleration*).
3. Mengidentifikasi dan mempersiapkan 3.000 agen perubahan yang akan menjadi penggerak untuk mencapai aspirasi 2024 di seluruh organisasi Pertamina group melalui program inisiatif *alignment* budaya di Pertamina.

Kemudian program *Catalyzer* yang merupakan program *talent development* untuk mempersiapkan *talent* di posisi-posisi strategis. Program ini bertujuan untuk mengembangkan *leadership skill* bagi Perwira Subholding Gas *top talent* yang diharapkan dapat mengisi posisi *top level* di Perusahaan. Pada tahun 2023, sebanyak 15 peserta terbaik di level *top management* Subholding Gas mengikuti program *Catalyzer* Pertamina.

Pada program *Trailblazer* yaitu program yang mempersiapkan Perwira Subholding Gas *talent pool/ successor* di level *Middle Management* menjadi *Operational Leader* dalam hal *leadership skills* dan *managing business*. Program ini bertujuan agar Perwira Subholding Gas mampu mengelola operasional fungsi, berperan efektif mendukung Visi & Misi Pertamina, serta memiliki wawasan, kepekaan dan ketajaman bisnis Perusahaan (*Business Acumen*).

Selain program *talent*, PGN juga menyelenggarakan program *mandatory/regular leadership* baik untuk level *first line* sampai dengan *middle management* yaitu *Junior Management Development Program* (JMDP) dan *Senior Management Development Program* (SMDP). Tujuannya untuk membekali pekerja yang baru menduduki jabatan strategis memiliki kapabilitas dan kemampuan *leadership* yang dibutuhkan pada jabatan yang diemban.

Kemudian dalam rangka meningkatkan wawasan terkait *leadership,* PGN mengembangkan program informal yang bertajuk *Leaders' Talk*. Program ini merupakan forum interaksi dan *sharing knowledge* antara *executive management* PGN dengan *Inspirational Leader*.

2. Identify and develop 300 rising stars to carry out business operations, both existing and new business developments, through the Leadership Development Acceleration program.
3. Identify and prepare 3,000 change agents who will drive the achievement of 2024 aspirations across the Pertamina group organization through Pertamina's cultural alignment initiative program.

Further, the Catalyzer program is a talent development program to prepare talents for strategic positions. This program aims to develop leadership skills for top-talented Subholding Gas Employees who are expected to fill top-level positions in the Company. In 2023, up to 15 of the best participants at the top management level of Subholding Gas participated in the Pertamina Catalyzer program.

The Trailblazer program is designed to prepare the talent pool/successor of Subholding Gas employees in Middle Management to become Operational Leaders in terms of leadership skills and business management. This program aims to prepare Subholding Gas employees to manage operational functions, play an effective role in supporting Pertamina's Vision and Mission, and have the Company's insight, sensitivity, and business acumen.

Apart from talent programs, PGN also organizes mandatory/regular leadership programs for both first-line and middle management levels, known as the Junior Management Development Program (JMDP) and Senior Management Development Program (SMDP). The objective is to provide employees who have just occupied strategic positions with the capabilities and leadership abilities required in the positions they hold.

Subsequently, to increase leadership knowledge, PGN created an informal program called Leaders' Talk. This program provides an opportunity for PGN executive management to interact and share knowledge with Inspirational Leaders.

PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*

The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

KNOWLEDGE MANAGEMENT

PGN melakukan *knowledge management* dalam pengelolaan SDM, yang dirancang dan dikembangkan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimiliki oleh Perwira Subholding Gas sebagai individu agar dapat digunakan kembali di dalam Perusahaan. *Knowledge Management* dibagi menjadi beberapa program, yaitu *i-Know, GAS Talk, Knowledge Harvesting, KMOnline, Knowledge Credit Point, e-Library,* dan *Innovation Award.*

Program *i-Know* adalah program pembelajaran berbentuk kuis pengetahuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Perwira Subholding Gas tentang fungsi prosedur operasi dan proses kerja di lingkungan PGN. Melalui program ini, Perwira Subholding Gas dapat memiliki pengetahuan yang lengkap tentang bisnis PGN di semua lini bisnis hingga dapat memberikan *service excellence* bagi pelanggan. Program ini dilaksanakan setiap kuartal menggunakan aplikasi *online* dengan format kuis yang dapat diakses pekerja di mana saja dan kapan saja selama kurun waktu tertentu.

Program *GAS Talk* adalah *sharing knowledge* yang melibatkan Perwira Subholding Gas sebagai narasumber. Melalui program ini, pekerja dapat menambah wawasan tentang berbagai hal terkait bisnis Perusahaan sehingga memiliki pengetahuan lebih komprehensif tentang posisi Perusahaan dalam perkembangan bisnis industrinya. Program ini dilaksanakan setiap kuartal dengan format *talkshow*.

Program *Knowledge Harvesting* adalah kegiatan mendokumentasikan pengetahuan yang masih melekat pada diri setiap individu ke dalam bentuk dokumen. Kegiatan ini bertujuan menangkap, memelihara dan mengembangkan pengetahuan di PGN ke dalam *Knowledge Guide Book PGN* serta *Harvesting Talk* dalam format *talkshow*.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

PGN conducts knowledge management to manage human resources, which is designed and developed to identify, create, explain, and distribute knowledge that Subholding Gas Employees have as individuals so that it can be used in the Company. Knowledge Management is divided into several programs, including i-Know, GAS Talk, Knowledge Harvesting, KMOnline, e-Library, and the Innovation Award.

The i-Know program is a knowledge quiz-based learning program designed to improve Subholding Gas Employees' knowledge and understanding of PGN operational procedures, functions, and work processes. Through this program, Subholding Gas Employees are expected to have a thorough understanding of all PGN business lines in order to provide excellent customer service. This program is carried out quarterly using an online application with a quiz format that employees can access from anywhere at any time during the specified time frame.

The GAS Talk program is a knowledge-sharing initiative that involves Subholding Gas Employees as keynote speakers. Through this program, employees can gain insight into various aspects of the Company's business, resulting in a more comprehensive understanding of the Company's position in the industry's business development. This program is held every quarter in a talk-show format.

The Knowledge Harvesting Program is an activity that documents the knowledge that remains attached to each individual in the form of a document. This activity aims to capture, maintain, and develop knowledge in PGN for the PGN Knowledge Guide Book and Harvesting Talk in a talk show format.

Program KM *Online* (KMOn) adalah portal pengetahuan internal PGN yang berisi pengetahuan-pengetahuan penting bagi Perwira Subholding Gas. Kemudian, e-Library yaitu perpustakaan *online* yang menyediakan buku dan literatur untuk mendukung kegiatan belajar Perwira Subholding Gas. Dengan demikian, Perwira Subholding Gas dapat meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasinya. Di sisi lain, Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, penghematan waktu, dan biaya karena pengetahuan yang sudah ada dapat dioptimalisasi secara mandiri.

The KM Online (KMOn) program is PGN's internal knowledge portal with valuable information for Subholding Gas Employees. Furthermore, e-Library is an online library that offers books and literature to support Subholding Gas Employees with their learning activities. Therefore, Subholding Gas Employees can improve their competencies, creativity, and innovation. On the other hand, by using existing knowledge for context, the company can increase productivity while saving time and cost.

Innovation Award Program adalah program pengakuan bagi Perwira Subholding Gas yang telah bekerja ekstra dalam meningkatkan kemampuan Perusahaan melalui ide dan inovasi kreatif. Program ini mengadaptasi metode *Continuous Improvement* Program Pertamina yang bertujuan membangun sinergi Subholding Gas, meningkatkan kreativitas dan pemikiran inovatif, menciptakan lingkungan bagi Perwira Subholding Gas untuk mengeksplorasi peluang bisnis demi keberlanjutan Perusahaan, dan meningkatkan keterlibatan Perwira Subholding Gas melalui pengakuan terhadap inovasi mereka. Perwira Subholding Gas terbaik yang telah mengikuti program ini akan diikutsertakan ke tahap *Annual Pertamina Quality Award.*

The Innovation Award Program recognizes Subholding Gas Employees who have exceeded what is expected to improve the Company's capabilities through creative ideas and innovations. This program was adapted from the Pertamina Continuous Improvement Program, which aims to build Subholding Gas synergy, enhance creativity and innovative thinking, create an environment for Subholding Gas Employees to explore business opportunities for Company sustainability, and increase employee involvement by recognizing their innovations. The best Subholding Gas Employees who participated in this program will be included at the Annual Pertamina Quality Award stage.

INHOUSE DAN *PUBLIC TRAINING*

PGN memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang dilakasanakan melalui inhouse dan public training serta sertifikasi.

Pada tahun 2023, PGN telah menyelenggarakan 2 program pelatihan inhouse kompetensi manajerial serta 1 pelatihan publik kompetensi manajerial. Selain itu untuk pengembangan kompetensi teknis, PGN telah menyelenggarakan pelatihan inhouse sebanyak 53 Program serta pelatihan Publik sebanyak 77 program.

Perwira Subholding Gas juga telah mengikuti 5 program sertifikasi teknik yang diikuti oleh 45 orang dan 7 program sertifikasi non teknik yang diikuti oleh 34 orang. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme Perwira Subholding Gas agar makin mampu mengambil peluang-peluang bisnis yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Perusahaan.

INHOUSE AND PUBLIC TRAININGS

PGN has a technical and managerial competency development program, which is implemented through in-house and public training and certification.

In 2023, PGN has held 2 in-house managerial competency training programs and 1 public managerial competency training. In addition, to develop technical competence, PGN has held 53 in-house training programs and 77 public training programs.

Gas Subholding employees have also participated in 5 technical certification programs, which were attended by 45 people and 7 non-technical certification programs, which were attended by 34 people. The certification program aims to improve the skills and professionalism of Gas Subholding Employees, enabling them to take advantage of business opportunities that can improve the Company's quality of service and performance.

PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*

The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

PGN memiliki komitmen untuk tiada henti mengembangkan kompetensi teknis Perwira Subholding Gas. Komitemen ini diwujudkan dengan menyelenggarakan beragam program pengembangan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode komprehensif 70:20:10, di mana 70% disampaikan melalui project assignment, 20% melalui coaching, dan 10% melalui program in class training. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) program pengembangan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja dan performa Perusahaan di bidang komersial, operation, dan pengembangan bisnis, yaitu:

- *Special Development to Unleash Performance* (SUPER), merupakan program pengembangan kompetensi teknis bagi Pekerja level Staf dan Senior Staff yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program strategis Perusahaan serta memperkuat kompetensi inti bisnis gas. Pada pelaksanaan program di tahun 2023, peserta diberikan pembekalan mengenai kompetensi inti Infrastruktur dan komersialisasi gas bumi kemudian peserta diterjunkan langsung untuk melaksanakan aktivitas Pembangunan konstruksi dan penjualan gas bumi.
- *Business Accelerator Program*, merupakan program pengembangan kompetensi teknis bagi pekerja dalam skill group Finance dan skill group Legal guna memahami bisnis Perusahaan secara menyeluruh sehingga proyek-proyek investasi dapat memberikan keuntungan yang dapat mendukung keberlangsungan bisnis Perusahaan pada aspek finance serta pada aspek legal untuk memberikan pendapat hukum dan mengatasi/mengantisipasi permasalahan hukum di lingkungan Perusahaan merumuskan terkait strategi investasi proyek Perusahaan serta mengatasi permasalahan hukum di lingkungan Perusahaan.

PGN is committed to further developing the technical skills of Subholding Gas employees. This commitment is accomplished by organizing a variety of structured, staged, and sustainable development programs that use the 70:20:10 comprehensive method. The program is made up of 70% project assignments, 20% coaching, and 10% in-class training. In 2023, 2 (two) development programs were implemented to support the Company's performance in commercial, operational, and business development. The programs are as follows:

- Special Development to Unleash Performance (SUPER) is a technical competence development program for Staff and Senior Staff that aims to help the Company achieve its strategic programs while also strengthening core competencies in the gas business. During the program's implementation in 2023, participants were trained in core infrastructure and natural gas commercialization skills before being assigned directly to carry out construction development and natural gas sales activities.
- The Business Accelerator Program is a technical competency development program for employees in the Finance and Legal skill groups to understand the Company's business as a whole so that investment projects can provide benefits that can support the sustainability of the Company's business in the financial and legal aspects to provide legal opinions, overcome/anticipate legal issues within the Company, formulate related investment strategies for Company projects, and overcome legal issues within the Company.

Program Pengembangan Perwira Subholding Gas
Gas Subholding Employee Development Programs

Kategori	Jumlah Program Number of Programs		Jumlah Peserta Number of Participants		Categories
	2023	2022	2023	2022	
Pendidikan					Education
S2 Dalam Negeri (*Full Scholarship*)	2	2	-	33	Master's Degree in Indonesia (Full Scholarship)
S2 Dalam Negeri (Swakelola *Talent*)	1	1	-	16	Master's Degree in Indonesia (Talent Self-Management)
S2 Dalam Negeri (Swakelola Reguler)	1	1	2	2	Master's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)
S1 Dalam Negeri (Swakelola Reguler)	1	1	-	3	Bachelor's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)
Inhouse* dan *Public Training					Inhouse and Public Training
Kompetensi Manajerial (Publik)	3	1	128	10	Managerial Competence (Public)
Kompetensi Teknik	145	157	3.877	4.994	Technical Competence
Sertifikasi					Certification
Sertifikasi Teknik	5	30	45	249	Technical Certification
Sertifikasi Non Teknik	7	10	34	26	Non-technical Certification
Program *Talent*					Talent Program
Catalyzer	15	0	1	-	Catalyzer
Trailblazer	20	0	3	-	Trailblazer
Knowledge Management					Knowledge Management
I-Know	1	2	1.150	2.272	I-Know
GAS Talk	5	5	657	1.169	GAS Talk
Knowledge Harvesting	13	13	276	836	Knowledge Harvesting
Program Magang Kementerian					Ministry Internship Program
Magang Reguler	1	2	218	350	Regular Internship
Magang Bersertifikat dari Kementerian BUMN	1	1	18	22	Certified Internship from Ministry of State-owned Enterprises

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Sepanjang tahun 2023, biaya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan Perwira Subholding Gas sebesar Rp10,4 Miliar atau turun sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp11,4 miliar.

EXPENSES

Throughout 2023, the cost of implementing Subholding Gas Employee Development and Management programs was Rp10.4 billion, a 9% decrease from Rp11.4 billion in 2022.

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Occupational Health and Safety Policies

PGN memiliki komitmen untuk mengimplementasikan kegiatan operasinya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu, PGN menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi (SMK3P2L-E). Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi SMK3P2L-E, PGN menetapkan kebijakan dan target yang diterapkan di seluruh wilayah operasional Perusahaan. Penerapan kebijakan tersebut guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Target HSSE PGN mencakup:

- *Number of Accident* (NoA)* = 0
- *Number of Accident* (NoA) adalah Kejadian *fatality*, *major oil spill* (≥15 bbl), dan *major property damage* (*direct loss* ≥ USD 1 mio)
- TRIR ≤ 0, 19
- *Process Safety Event* Level 1 = 0
- *Illness Fatality* = 0
- *Total Emission Reduction* ≥ 460 Ton CO_2eq
- TRIS *Significant* dan/atau *Catastrophic* = 0

Penjelasan lebih lengkap terkait K3 telah diungkapkan pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

PGN is committed to implementing its operational activities by upholding the principles of Occupational Safety and Health (OHS). Therefore, PGN implements an Occupational Safety and Health, Security and Environmental and Energy Management System (SMK3P2L-E). In order to ensure a successful implementation of SMK3P2L-E, PGN has made policies and targets to achieve throughout the Company's operational areas. The policy is implemented to minimize the risk of work accidents and work-related diseases. PGN's HSSE targets include:

- Number of Accidents (NoA)* = 0
- Number of Accidents (NoA) are fatalities, major oil spills (≥15 bbl), and major property damage (direct loss ≥ USD 1 mio)
- TRIR ≤ 0.19
- Process Safety Event Level 1 = 0
- Illness Fatality = 0
- Total Emission Reduction ≥ 460 Tons CO_2eq
- TRIS Significant and/or Catastrophic = 0

A more detailed explanation on OHS is disclosed in the Company's Sustainability Report.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM
Information of Shareholders

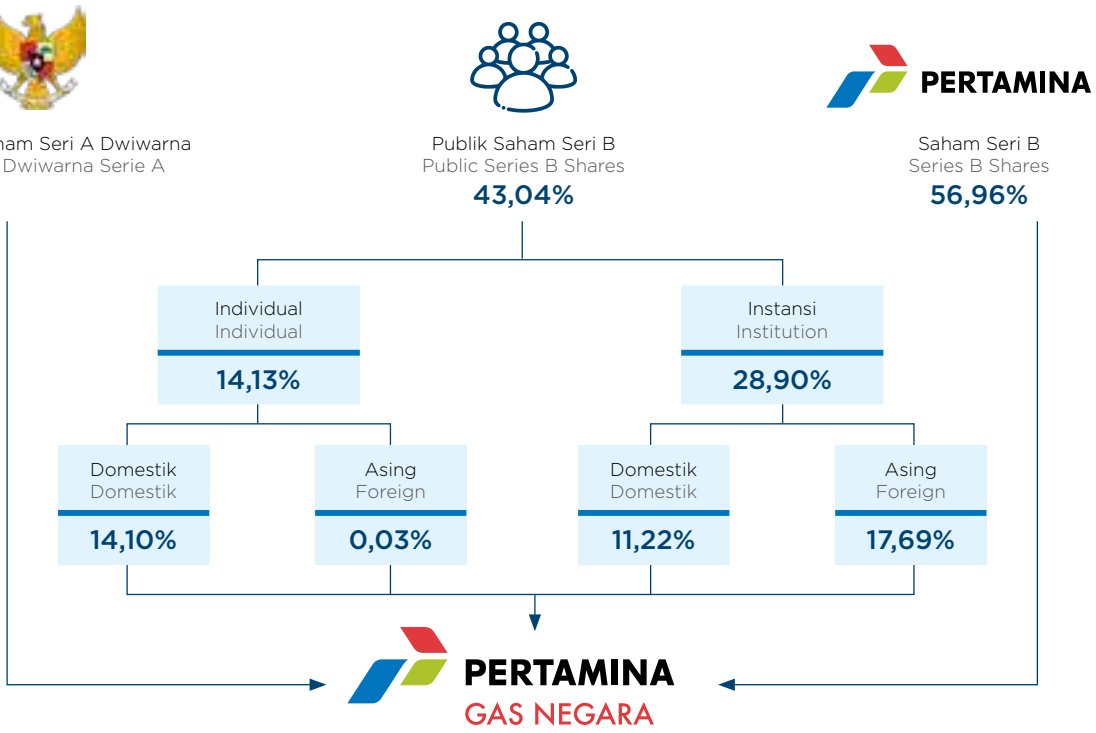

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PGN

Sampai dengan 31 Desember 2023, total jumlah saham PGN yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar saham. PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% (lima puluh enam koma sembilan enam persen) saham Seri B atas Perseroan dan Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara istimewa.

Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahtangankan, memiliki hak-hak istimewa dalam hal perubahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan likuidasi Perusahaan.

Adapun untuk pemegang saham publik berjumlah 43,04% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan rincian jumlah pemegang saham individual sebesar 14,13% dan jumlah pemegang saham institusi sebesar 28,90%.

PGN SHAREHOLDERS COMPOSITION

As of December 31, 2023, PGN had a total of 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred ninety six) authorized and fully paid up shares. PT Pertamina (Persero) is the majority shareholder which owns 56.96% (fifty six point nine six percent) of the Company's Series B shares while the Republic of Indonesia owns one Series A Dwiwarna share which has special voting rights.

Series A Dwiwarna shares are non-transferable, have special rights in terms of changes in capital, appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, Articles of Association, merger, consolidation, acquisition, dissolution and liquidation of the Company.

Meanwhile, public shareholders represent 43.04% of the total issued and fully paid shares, with individual shareholders accounting for 14.13% and total institutional shareholders representing 28.90%.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM
Information of Shareholders

Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia

Share Ownership of the Republic of Indonesia

Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia
Share Ownership of the Republic of Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1	Negara Republik Indonesia | Republic of Indonesia	1	0	1	0

Kepemilikan Saham PGN yang Mencapai 5% atau Lebih

PGN Share Ownership With 5% or More

Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih
Share Ownership of 5% or More

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1	PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96	13.809.038.755	56,96

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Hingga akhir tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN tidak memiliki saham PGN baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana yang diungkapkan pada tabel di bawah ini:

PGN Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors

Until the end of 2023, none of the PGN Board of Commissioners and Directors had shares of PGN either directly or indirectly, as revealed in the table below:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Shareholding

No.	Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
			Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1	Amien Sunaryadi[1)]	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	0	0	0	0
2	Arcandra Tahar[2)]	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0
3	Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
4	Warih Sadono	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
5	Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
6	Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
7	Abdullah Aufa Fuad[1)]	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0

No.	Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
			Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
8	Paiman Raharjo[2)]	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
9	Arief S. Handoko[3)]	Direktur Utama President Director	0	0	0	0
10	Muhamad Haryo Yunianto[4)]	Direktur Utama President Director	0	0	0	0
11	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	0	0	0	0
12	Harry Budi Sidharta[3)]	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director Infrastructure and Technology	0	0	0	0
13	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	0	0	0	0
14	Rosa Permata Sari[1)]	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	0	0	0	0
15	Heru Setiawan[4)]	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	0	0	0	0
16	Ratih Esti Prihatini[1)]	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	0	0	0	0
17	Faris Aziz[2)]	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	0	0	0	0
18	Achmad Muchtasyar[2)]	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director Infrastructure and Technology	0	0	0	0

Keterangan | Notes :
1. Diangkat tanggal 14 November 2023 | Appointed on November 14, 2023
2. Diberhentikan tanggal 14 November 2023 | Dismissed on November 14, 2023
3. Diangkat tanggal 30 Mei 2023 | Appointed on May 30, 2023
4. Diberhentikan tanggal 30 Mei 2023 | Dismissed on May 30, 2023

Klasifikasi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat (Kepemilikan Saham Masing-Masing Kurang dari 5%)

Classification of Community Shareholder Groups (Each Share Ownership Less Than 5%)

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%
Public Shareholders Less Than 5%

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2023 January 1, 2023			31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
Pemodal Domestik | Domestic Investor							
1	Perseorangan Indonesia Individual Indonesian	83.972	1.989.126.895	8,21%	109.114	3.418.391.867	14,10%
2	Koperasi Cooperative	6	971.100	0,00%	7	2.030.200	0,01%

INFORMASI PEMEGANG SAHAM
Information of Shareholders

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2023 January 1, 2023			31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
3	Yayasan Foundation	24	30.829.700	0,13%	20	30.115.400	0,12%
4	Dana Pensiun Pension Fund	136	1.266.806.400	5,23%	127	1.271.071.400	5,24%
5	Asuransi Insurance	173	828.514.652	3,42%	121	426.682.097	1,76%
6	Bank Bank	1	2.500.000	0,01%	1	2.500.000	0,01%
7	Perseroan Terbatas Limited Company	167	207.788.182	0,86%	217	498.951.378	2,06%
8	Lembaga Pemerintah Government Institution	1	500	0,00%	1	500	0,00%
9	Reksa Dana Mutual Fund	277	1.007.158.552	4,15%	137	487.909.163	2,01%
Subtotal		**84.757**	**5.333.695.981**	**22,00%**	**109.745**	**6.137.652.005**	**25,31%**
Pemodal Asing | Foreign Investors							
10	Perorangan Asing Individual Foreign	223	7.996.100	0,03%	301	7.450.900	0,03%
11	Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	515	5.090.777.359	21,00%	419	4.287.366.535	17,69%
Subtotal		**738**	**5.098.773.459**	**21,03%**	**720**	**4.294.817.435**	**17,72%**
Total		**85.495**	**10.432.469.440**	**43,04%**	**110.465**	**10.432.469.440**	**43,04%**

10 Pemegang Saham Terbesar PGAS Per 31 Desember 2023

PGAS 10 Largest Shareholders As of December 31, 2023

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Status
1	Pertamina (Persero), PT	13.809.038.755	56,96%	Pengendali | Controller
2	BPJS Ketenagakerjaan	1.126.569.100	4,65%	Publik | Public
3	Vanguard	400.812.700	1,65%	Publik | Public
4	Panin Sekuritas, PT	351.909.300	1,45%	Publik | Public
5	Petronas	307.260.500	1,27%	Publik | Public
6	Reksa Dana Sucorinvest	192.272.100	0,79%	Publik | Public
7	Black Rock	161.652.700	0,67%	Publik | Public
8	Edgbaston	135.616.100	0,56%	Publik | Public
9	State Street Bank-Wisdomtree Emerging Markets	134.331.500	0,55%	Publik | Public
10	JPMCB Na Re-New York State Common Retirement Fund	102.258.570	0,42%	Publik | Public

STRUKTUR SUBHOLDING GAS
Subholding Gas Structure

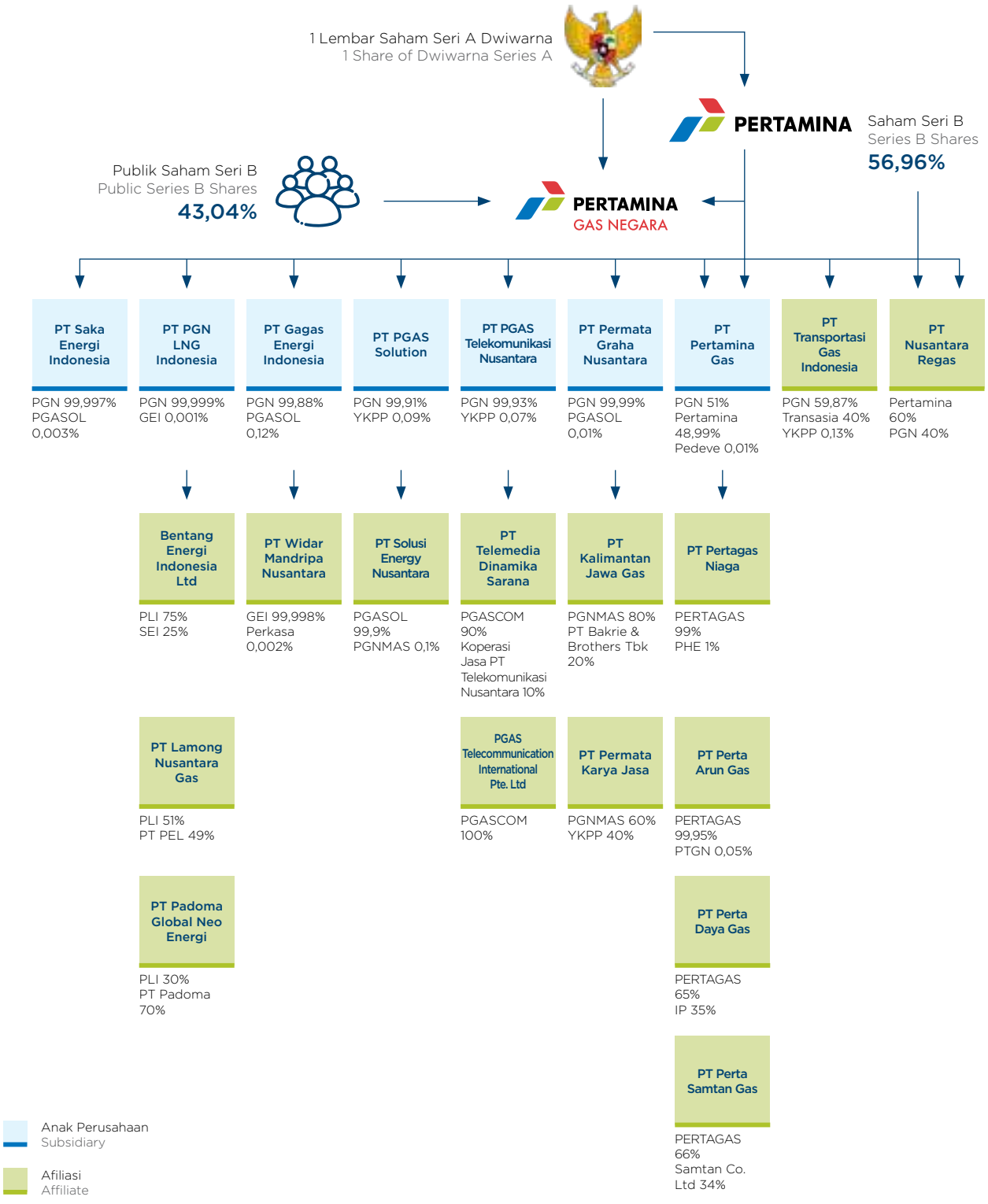

INFORMASI ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

Entitas Anak dan Afiliasi
Subsidiary Entities and Affiliates

Nama Perusahaan Company Name	Anak Perusahaan Subsidiaries/ Afiliates	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	Bidang Usaha Nature of Businesses	Jumlah Aset 2023 (juta USD) 2023 Total Assets (million USD)	Status Operasi Operational Status
PT Pertamina Gas	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 51% • PT Pertamina (Persero) – 48,99% • PT Pertamina Pedeve Indonesia – 0,01%	Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	2.393	Beroperasi Operating
PT Saka Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,997% • PT PGAS Solution – 0,003%	Hulu Minyak dan Gas Bumi	1.434	Beroperasi Operating
PT Gagas Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,88% • PT PGAS Solution - 0,12%	Pengelolaan bisnis SPBG Transportasi, CNG dan LNG Retai	73	Beroperasi Operating
PT PGN LNG Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,999% • PT Gagas Energi Indonesia - 0,001%	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG	617	Beroperasi Operating
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,93% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara - 0,07%	ICT dan Operation Technology, Konstruksi, dan Perdagangan	44	Beroperasi Operating
PT PGAS Solution	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,91% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara - 0,09%	Enjinering, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan	129	Beroperasi Operating
PT Permata Graha Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,99% • PT PGAS Solution - 0,01%	Pengelolaan Aset, Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Pengelolaan Arsip	92	Beroperasi Operating
PT Transportasi Gas Indonesia	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 59,87% • Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd - 40% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara - 0,13%	Transportasi Gas Bumi	268	Beroperasi Operating
PT Nusantara Regas	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 40% • PT Pertamina (Persero) - 60%	Bisnis Jasa Regasifikasi & Pengembangan Infrastrutur LNG untuk Kilang Cilacap	334	Beroperasi Operating
PT Kalimantan Jawa Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara- 80% • PT Bakrie & Brothers Tbk - 20%	Transportasi Gas	79	Beroperasi Operating
PT Permata Karya Jasa	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara-60% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara - 40%	Penyedia Tenaga Kerja	17	Beroperasi Operating
PT Solusi Energi Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Solution – 99,9% • PT Permata Graha Nusantara- 0,1%	Enjinering, Konsultasi, dan Jasa	13	Beroperasi Operating

Nama Perusahaan Company Name	**Anak Perusahaan** Subsidiaries/ Afiliates	**Komposisi Pemegang Saham** Composition of Shareholders	**Bidang Usaha** Nature of Businesses	**Jumlah Aset 2023 (juta USD)** 2023 Total Assets (million USD)	**Status Operasi** Operational Status
PT Widar Mandripa Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT Gagas Energi Indonesia -99,998% • PT Permata Karya Jasa - 0,002%	Bisnis Kelistrikan	7	Beroperasi Operating
PT Telemedia Dinamika Sarana	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Telekomunikasi Nusantara - 90% • Koperasi Jasa PGASCOM - 10%	Telekomunikasi	5	Beroperasi Operating
PT Pertagas Niaga	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 99% • PT Pertamina Hulu Energi - 1%	Bisnis CNG, Penyimpanan CNG dan LNG Retail	180	Beroperasi Operating
PT Perta Arun Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas – 99,95% • PT Pertagas Niaga – 0,05%	Penyediaan Infrastruktur LNG & Komersialisasi Infrastruktur LNG	270	Beroperasi Operating
PT Perta-Samtan Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 66% • Samtan Co.Ltd - 34%	Pemrosesan LPG	133	Beroperasi Operating
PT Perta Daya Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 65% • PT Indonesia Power - 35%	Penyimpanan CNG untuk PLN	26	Beroperasi Operating
PT Perta Kalimantan Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 70% • PT Medco Gas Indonesia - 30%	Pengangkutan Gas Bumi	N/A	Tidak Beroperasi Not Operating
PT Gas Energi Jambi	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 40% • PT Wahana Catur Mas - 40% • PT Jambi Indoguna Internasional - 10% • PT Bukaka Corporindo - 10%	Pengangkutan Gas Bumi	N/A	Tidak Beroperasi Not Operating
PT Baskara Asri GHAS	Afiliasi Affiliate	• Perseroan 0,044% • PT Asri Prima Baskara – 93% • PT Banten Global Synergi - 4,304% • Izma Agyano Bursman - 2,652%	Jasa Pengangkutan, Perdagangan dan Pertambangan Gas bumi	N/A	Beroperasi Operating
Bentang Energi Indonesia Ltd	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 75% • PT Saka Energi Indonesia – 25%	Perdagangan dan Transportasi Minyak dan LNG	0	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Padoma Global Neo Energi	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 30% • PT Papua Doberai Mandiri - 70%	Penyediaan LNG	N/A	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Lamong Nusantara Gas	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 51% • PT Pelindo Energi Logistik - 49%	Pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian Terminal LNG	10	Aktif (tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PGAS Telecommunication International Pte. Ltd	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Telekomunikasi Nusantara - 100%	Industri Informasi, Komunikasi & Teknologi, Penjualan leased circuit service, Transit IP, Layanan Internet	4	Beroperasi Operating

INFORMASI ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

PROFIL ENTITAS ANAK

PROFILE OF SUBSIDIARY

PT Pertamina Gas (Pertagas)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	23 Februari 2007	February 23, 2007
Kantor Pusat Head Office	Graha Pertamina, Pertamax Tower, Lantai 20-23, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat, 10110 Indonesia	Graha Pertamina, Pertamax Tower, 20th-23th Floor, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Central Jakarta, 10110 Indonesia
Kontak Contact	Telp. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com	Tel. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com
Bidang Usaha Industry	Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	Oil and Gas Transportation
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	3 Anak Perusahaan dan 2 Afiliasi	3 Subsidiaries and 2 Affiliates

Pertagas bergerak di bidang usaha transportasi gas, transportasi minyak, pemrosesan, distribusi gas, niaga gas bumi dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Pertagas juga melakukan kegiatan usaha pemrosesan gas bumi melalui dua LPG Plant yakni LPG Plant ENP yang bekerja sama dengan PT Energi Nusantara Perkasa dan LPG Plant Sumatera Selatan yang dikelola oleh Anak Perusahaan: PT Perta-Samtan Gas. Sedangkan kegiatan usaha regasifikasi LNG dijalankan Anak Perusahaan: PT Perta Arun Gas melalui pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG di Arun Lhokseumawe Aceh sejak awal 2015.

Pertagas memiliki wilayah operasional kerja di Indonesia, meliputi pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah kerja Perusahaan terbagi dalam delapan wilayah operasional, dengan enam daerah operasi menangani jaringan pipa gas bumi, dan dua daerah operasi menangani jaringan pipa minyak.

Pertagas operates in the gas transportation, oil transportation, processing, gas distribution, natural gas trading business and other businesses related to natural gas and its derivative products. Pertagas also carries out natural gas processing business activities through two LPG Plants, ENP LPG Plant in collaboration with PT Energi Nusantara Perkasa and the South Sumatra LPG Plant under the management of a Subsidiary: PT Perta-Samtan Gas. Meanwhile, LNG regasification business activities are assigned to another subsidiary: PT Perta Arun Gas through the operation of the LNG Reception and Regasification Terminal in Arun Lhokseumawe Aceh since early 2015.

Pertagas has operational work areas in Indonesia, covering the islands of Sumatra, Java and Kalimantan. The Company's operational area is divided into eight operational areas, with six operational areas handling natural gas pipeline networks, and two operational areas handling oil pipeline networks.

PT Saka Energi Indonesia (SEI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 26 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 26th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com	Tel. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com
Bidang Usaha Industry	Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	Oil and Gas (Upstream)
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	28 Anak Perusahaan dan 4 Afiliasi	28 Subsidiaries and 4 Affiliates

PT SAKA Energi Indonesia (SEI) adalah Anak Perusahaan yang melaksanakan usaha dan investasi di bidang hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan usaha di bidang minyak dan gas alam, gas metana batu bara (CBM), serta sumber energi lainnya.

SEI memiliki hak partisipasi (*Participating Interest*) atas sembilan PSC di Indonesia dan satu blok shale gas Amerika Serikat, empat di antaranya dioperasikan penuh oleh SEI dengan kepemilikan participating interest 100%. Keempat PSC tersebut adalah Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC dan Wokam II PSC.

PT SAKA Energi Indonesia (SEI) is a Subsidiary that runs business and investment in the upstream Oil and Gas (Migas) sector, including exploration, exploitation, business development activities in the fields of oil and natural gas, coalbed methane gas (CBM), as well as other energy sources.

SEI has participation interests in nine PSCs in Indonesia and one shale gas block in the United States, four of which are fully operated by SEI with 100% participating interest ownership. The four PSCs are Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC and Wokam II PSC.

PT Gagas Energi Indonesia (GEI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 9-10 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 9th-10th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 2907 1415/ 2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 E-mail: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id	Tel. +62 21 2907 1415/ 2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 E-mail: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id
Bidang Usaha Industry	Pengelolaan bisnis SPBG Transportasi, CNG dan LNG Retai	Household & Small-scale Customer Business Management, Gas Station, SPV Sub WNT Management
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	1 Anak Perusahaan	1 Subsidiaries

PT Gagas Energi Indonesia (GEI) adalah Anak Perusahaan PGN yang bergerak dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi untuk serta energi lainnya. GEI menyediakan gas bumi sektor transportasi, industri dan sektor kegiatan usaha komersial melalui CNG dan mini LNG, SPBG dan Mobile Refueling Unit (MRU). Dalam rangka mendukung program Pemerintah dan memperluas distribusi dan utilisasi gas bumi untuk sektor transportasi (Gasku), GEI telah mengelola 11 SPBG dan 4 MRU serta mengelola 3 SPBG Pertamina lokasinya tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Batam. GEI terus melakukan inovasi dan memperluas pasar dengan menghadirkan produk CNG Cylinder dengan target pasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau industri kecil.

PT Gagas Energi Indonesia (GEI) is a subsidiary of PGN engaged in processing, transporting, storing and trading oil and natural gas business and other energy business. GEI supplies natural gas for the transportation, industrial and commercial business activity sectors through CNG and mini LNG, SPBG and Mobile Refueling Unit (MRU). To support Government programs and expand the distribution and utilization of natural gas for the transportation sector (Gasku), GEI now manages 11 SPBGs and 4 MRUs and manages 3 Pertamina SPBGs in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Lampung and Batam. GEI looks to innovate and expand the market by presenting CNG Cylinder products with Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs") or small industries as the markets.

INFORMASI ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	10 Januari 2007	January 10, 2007
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 3 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 3rd Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 633 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id	Tel. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 633 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id
Bidang Usaha Industry	*Information & Communication Technology*	Information & Communication Technology
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	2 Anak Perusahaan	2 Subsidiaries

PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) merupakan Anak Perusahaan PGN yang bergerak dalam bisnis jaringan telekomunikasi yang didirikan pada 2007. Sebagai penyedia layanan ICT, PGASCOM memiliki layanan *connectivity, managed service*, dan *business solution* yang dapat digunakan oleh semua Perusahaan dari kelas *large corporation* sampai ke *Small Medium Enterprise* (SME).

Produk dan layanan PGASCOM terdiri dari *connectivity* seperti IPLC dan DPLC, Global internet dan internet akses yang disediakan melalui anak usahanya PT Telemedia Dinamika Sarana, layanan *business solution* seperti pengembangan aplikasi, video, *video conference*, infrastruktur IT maupun OT (SCADA), dan *managed service* baik untuk IT, SCADA, maupun *seat management*. PGASCOM juga mengembangkan usahanya untuk IoT seperti *smart office* maupun *smart home/building*. Dengan tenaga profesional dan berkompeten, PGASCOM membantu pelanggan untuk mencapai tujuan bisnisnya.

PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) is a subsidiary of PGN engaged in the telecommunications network business that was founded in 2007. As an ICT service provider, PGASCOM offers connectivity services, managed services and business solutions to businesses of all sizes, from large corporations to small Medium Enterprise (SME).

PGASCOM products and services consist of connectivity such as IPLC and DPLC, Global internet and internet access offered through its subsidiary PT Telemedia Dinamika Sarana, business solution services such as application development, video, video conferencing, IT and OT infrastructure (SCADA), and managed services for IT, SCADA, and seat management. PGASCOM is also developing its business for IoT such as smart offices and smart homes/buildings. With professional and competent personnel, PGASCOM helps customers with their business aspirations.

PT PGAS Solution (PGASOL)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	6 Agustus 2009	August 6, 2009
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +62 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id	Tel. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +62 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id
Bidang Usaha Industry	*Engineering, Construction, Operation & Maintenance*	Engineering, Construction, Operation & Maintenance
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	1 Anak Perusahaan	1 Subsidiaries

PT PGAS Solution (PGASOL) merupakan Anak Perusahaan PGN dengan 4 (empat) fokus bidang utama, yaitu: *Engineering Procurement Construction* (EPC), *Operation and Maintenance* (O&M), *Supply Chain*, dan *Engineering*. PGASOL memegang peranan penting dalam bisnis PGN. Kegiatan Operasi & Pemeliharaan jaringan pipa dan infrastruktur PGN di seluruh area operasi Indonesia dipercayakan kepada PGAS Solution. Keandalan jaringan merupakan hal prioritas agar penyaluran gas bumi dari hulu sampai ke pelanggan terakhir PGN berjalan secara aman. Dengan dukungan sumber daya manusia berpengalaman dan teknologi modern, PGASOL mampu melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pipa gas PGN.

PT PGAS Solution (PGASOL) is a subsidiary of PGN with 4 (four) main focus areas: Engineering Procurement Construction (EPC), Operation and Maintenance (O&M), Supply Chain, and Engineering. PGASOL plays an important role in PGN's business. Operation & Maintenance activities of PGN's pipeline networks and infrastructure throughout Indonesia's operational areas are assigned to PGAS Solution. Network reliability is a priority to ensure natural gas from upstream is safely distributed to PGN's final customers. With the support of experienced human resources and edge-cutting technology, PGASOL is able to run operations and carry out maintenance activities for PGN's gas pipeline infrastructure.

PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	24 April 2014	April 24, 2014
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 6-8 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 6th-8th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id	Tel. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id
Bidang Usaha Industry	Pengelolaan Aset, *Facility Management*, *Enterpreneur Real Estate* dan *Design & Build*	Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Archive Management
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	2 Anak Perusahaan	2 Subsidiaries

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) merupakan Anak Perusahaan PGN yang mempunyai kegiatan usaha di bidang *Facility Management, Asset Management,* ERE/Developer, dan Design & Build. PGN MAS konsisten menjalankan kegiatan usaha utamanya dengan terus berupaya mengembangkan potensi yang ada. Dalam pelaksanaan hal tersebut, PGN MAS bersinergi dengan Anak Perusahaan Pertamina melaksanakan jasa di bidang *Facility Management.* PGN MAS mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan di bidang *Facility Management,* Manajemen Kearsipan, dan Penyediaan Jasa Transportasi. Selain itu PGN MAS juga melaksanakan kegiatan di Gedung Sinergi 8 dalam bentuk penyediaan *private office, coworking space* dan penyediaan tempat untuk *tenant.*

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) is a subsidiary of PGN sengaged in the Facility Management, Asset Management, ERE/Developer, and Design & Build business. PGN MAS consistently carries out its main business activities by continuing to strive to develop existing potential. In implementing this, PGN MAS synergizes with the subsidiaries of Pertamina to provide services in the field of Facility Management. PGN MAS has been trusted to carry out work in the fields of Facility Management, Archives Management and Providing Transportation Services. Other than the above, PGN MAS also carries out activities at the Sinergi 8 Building where it provides private offices, co-working spaces and provides space for tenants.

INFORMASI ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

PT PGN LNG Indonesia (PLI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	26 Juni 2012	June 26, 2012
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 29 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 29th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, South Jakarta 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id	Tel. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/ 2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id
Bidang Usaha Industry	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastucture	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastucture
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	3 Anak Perusahaan	3 Subsidiaries

PT PGN LNG Indonesia (PLI) merupakan Anak Perusahaan PGN bergerak di bidang *Liquefied Natural Gas*, namun tidak terbatas pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Didirikan pada tahun 2012. Sejak tahun 2014, PLI telah mengoperasikan FSRU Lampung yang berlokasi di Labuhan Maringgai, dengan kapasitas 1,5–1,7 MTPA dan volume penyaluran mencapai 240 MMscfd. FSRU Lampung terintegrasi dengan fasilitas pipa transmisi SSWJ yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi di Sumatera dengan pelanggan potensial terbesar di Jawa Barat.

PT PGN LNG Indonesia (PLI) is a subsidiary of PGN engaged in the Liquefied Natural Gas sector and runs the processing, transportation, storage and trading business among many. Founded in 2012. Since 2014, PLI has operated the Lampung FSRU located in Labuhan Maringgai with a capacity of S1.5–1.7 MTPA and a distribution volume of 240 MMscfd. FSRU Lampung is integrated to the SSWJ transmission pipeline facility which connects natural gas sources in Sumatra with the largest potential customers in West Java.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Share Listing

Pada 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) saham yang terdiri dari 475.309.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu) saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia dan 820.987.000 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham baru, dengan total lembar saham sebanyak 4.320.987.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham. Harga penawaran umum saham senilai Rp1.500 per lembar saham. Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan "PGAS".

On December 5, 2003, the Company received an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to conduct an Initial Public Offering of Shares to the public for its 1,296,296,000 (one billion two hundred ninety six million two hundred ninety six thousand) shares consisting of 475,309,000 (four hundred seventy five million three hundred nine thousand) shares from the divestment of shares of the Government of the Republic of Indonesia and 820,987,000 (eight hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) new shares, with a total share of 4,320,987,000 (four billion three hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) shares. The public offering price of shares was Rp1,500 per share. The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange) on December 15 2003 under "PGAS" tick code.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Sampai akhir 2007 jumlah saham Perseroan meningkat sebanyak 218.898.805 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima) saham menjadi 4.539.885.805 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima) saham sebagai akibat pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan dan *Management Stock Option Plan* (MSOP).

Pada 15 Januari sampai 14 Februari 2008, *Exercise Window Employee Stock Option Plan* (ESOP) tercatat 54.012.338 (lima puluh empat juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hak opsi saham yang dibagikan. Dari jumlah tersebut, tercatat 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) opsi saham dieksekusi dan menghasilkan saham Seri B baru sebanyak 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham. Sehingga, total jumlah saham Perseroan bertambah menjadi 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Until the end of 2007 the Company's shares had increased in number by 218,898,805 (two hundred eighteen million eight hundred ninety eight thousand eight hundred five) shares to 4,539,885,805 (four billion five hundred thirty nine million eight hundred eighty five thousand eight hundred five) shares as a result of the conversion of Government debt to the Company and the Management Stock Option Plan (MSOP).

From January 15 to February 14 2008, the Employee Stock Option Plan (ESOP) Window Exercise 54,012,338 (fifty four million twelve thousand three hundred thirty eight) share option rights were distributed. Of this figure, 53,551,388 (fifty three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) stock options were exercised that resulted in 53,551,388 (fifty three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) new Series B shares. The above actions left the Company with a larger number of shares of 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety-three million four hundred thirty-seven thousand one hundred ninety-three) shares.

PEMECAHAN SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada 13 Juni 2008, dilaksanakan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) PGAS dengan rasio 1 (satu) saham dengan

STOCK SPLIT

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk on June 13 2008, a nominal share value split (stock split) of PGAS was exercise with a ratio of 1 (one) share

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Shares Listing

nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per saham ditukar dengan 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, sehingga jumlah saham yang semula 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham menjadi 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham. Pecahan saham baru berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia pada 4 Agustus 2008. Pada tahun 2023, tidak dilakukan pemecahan saham.

with a nominal value of Rp500 (five hundred rupiah) per share to 5 (five) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah) per share, so the number of shares multiplied from previously 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety-three million four hundred thirty-seven thousand one hundred ninety-three) shares to 22,967,185,965 (two twenty-two billion nine hundred sixty-seven million one hundred eighty-five thousand nine hundred and sixty-five) shares. The new share split came into effect on the Indonesia Stock Exchange on August 4, 2008. In 2023, no share split took place.

PEMBELIAN SAHAM KEMBALI
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, pada 22 Desember 2008, Perseroan melakukan pembelian kembali atas saham yang beredar sebesar 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham pada 24 Oktober 2008. Dengan pembelian saham kembali, maka pada akhir 2008 Perseroan memiliki 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham sebagai Saham Treasuri dan total jumlah saham beredar sebesar 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham.

SHARE BUYBACK
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, on 22 December 2008, the Company repurchased 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) outstanding shares on October 24, 2008. With the buyback, the Company had 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) shares as Treasury Shares at the end of 2008 where the total number of outstanding shares was 22,967,185,965 (twenty two billion nine hundred sixty seven million one hundred eighty five thousand nine hundred and sixty five) shares.

Sampai akhir 2009, jumlah saham Perseroan meningkat sebanyak 1.274.322.231 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) saham, sebagai akibat dari pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan pada April dan Oktober 2009 hingga total jumlah saham Perseroan menjadi 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham.

Until the end of 2009, the Company's total shares had increased by 1,274,322,231 (one billion two hundred seventy four million three hundred twenty two thousand two hundred thirty one) shares, as a result of the conversion of Government debt to the Company in April and October 2009 leaving the Company with a total of 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred ninety six) shares.

Jumlah saham akhir tahun buku 2010 sampai akhir tahun 2015 adalah 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 13.809.038.756 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham (56,96%) dan publik sebesar 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham (43,04%) yang terdiri dari 10.430.619.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh) saham *free float* dan 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham treasuri. Saham treasuri sejumlah 1.850.000 (satu

Total shares at the end of the 2010 financial year to the end of 2015 was 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred and ninety six) shares with the ownership of the Government of the Republic of Indonesia amounting to 13,809,038,756 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred fifty six) shares (56.96%) with the public holding 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty two million four hundred sixty nine thousand four hundred and forty) shares (43.04 %) consisting of 10,430,619,440 (ten billion four hundred thirty million six hundred nineteen thousand four hundred and forty) free float shares and 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) treasury shares. 1,850,000 (one million eight hundred and fifty

juta delapan ratus lima puluh ribu) saham Seri B, telah dijual kembali seluruhnya pada Maret 2016.

Pada 2018 terjadi pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia di Perseroan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka pembentukan Holding BUMN Migas, di mana Negara tetap mempertahankan kepemilikan 1 saham Seri A dwiwarna sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Setelah pengalihan seluruh saham Seri B Negara kepada PT Pertamina (Persero), maka PT Pertamina (Persero) menggantikan kedudukan Negara sebagai pemegang saham pada Perseroan dengan kepemilikan sebesar 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham, dan kepemilikan publik 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham.

thousand) of Treasury shares Series B shares, were completely resold in March 2016.

In 2018, there was a transfer of all the Series B shares of the Republic of Indonesia in the Company to PT Pertamina (Persero) in the context of the formation of the Oil and Gas BUMN Holding, where the State retained ownership of 1 Series A dwiwarna share as mandated by Government Regulation No 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulations No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

After the transfer of all of the State's Series B shares to PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) took the position of the State as shareholder in the Company with ownership of 13,809,038,755 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred and fifty five) shares, and public ownership of 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty-two million four hundred sixty-nine thousand four hundred and forty) shares.

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Shares Listing

No.	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Negara Republik Indonesia (lembar) The State (shares)	Pertamina (lembar) (shares)	Publik (lembar) Public (shares)	Treasury (lembar) Treasury (shares)	Total (lembar) (shares)	Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia Percentage of Ownership by the State (%)	Persentase Kepemilikan Pertamina Percentage of Ownership by Pertamina (%)
1	Sebelum IPO Before IPO		3.500.000.000				3.500.000.000	100,00	
2	IPO (15 Desember 2003) dicatatkan di BEJ dan BES IPO (December 15, 2003) listed on the JSE and SSE								
3	Divestasi Divestment		-864.198.000		864.198.000				
	Penerbitan Saham Baru tanpa HMETD Issuance of New Shares without HMETD	Rp500			820.987.000				
		Rp500	**2.635.802.000**		**1.685.185.000**		**4.320.987.000**	**61,00**	
4	Konversi DPP 1 (2004) Conversion of DPP 1 (2004)	Rp500	56.943.305						
	MSOP 1 (2005-2006)	Rp500			108.024.675				
	MSOP 2 (2006-2007)	Rp500			53.930.825				
		Rp500	**2.692.745.305**		**1.847.140.500**		**4.539.885.805**	**59,31**	
5	Divestasi Desember 2006 Divestment December 2006	Rp500	-185.802.000		185.802.000				
		Rp500	**2.506.943.305**		**2.032.942.500**		**4.539.885.805**	**55,22**	

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Shares Listing

No.	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Negara Republik Indonesia (lembar) The State (shares)	Pertamina (lembar) (shares)	Publik (lembar) Public (shares)	Treasury (lembar) Treasury (shares)	Total (lembar) (shares)	Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia Percentage of Ownership by the State (%)	Persentase Kepemilikan Pertamina Percentage of Ownership by Pertamina (%)
6	MSOP 3 (2007-2008)	Rp500			53.551.388				
		Rp500	**2.506.943.305**		**2.086.493.888**		**4.593.437.193**	**54,58**	
7	*Stock Split* 5:1 (Agustus 2008) Stock Split 5:1 (August 2008)	Rp100	12.534.716.525		10.432.469.440		22.967.185.965	54,58	
8	*Buy Back* (Oktober 2008) Buy Back (October 2008)	Rp100			-1.850.000	1.850.000			
		Rp100	**12.534.716.525**		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**22.967.185.965**	**54,58**	
9	Konversi DPP 2 tahap 1 (April 2009) Conversion of DPP 2 stages 1 (April 2009)	Rp100	992.724.172						
			13.527.440.697		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**23.959.910.137**	**56,46**	
10	Konversi DPP 2 tahap 2 (Oktober 2009) Conversion of DPP 2 stages 2 (October 2009)	Rp100	281.598.059						
			13.809.038.756		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**24.241.508.196**	**56,96**	
11	Penjualan Kembali saham *Treasury* Maret 2016 Resale of Treasury shares March 2016	Rp100	13.809.038.756		10.432.469.440		24.241.508.196	56,96	
12	Pengalihan Saham Seri B Negara RI ke Pertamina 2018 Transfer of RI State Series B Shares to Pertamina 2018	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96
13	Jumlah Saham Akhir Tahun Number of Share End Year	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI
Chronology of Bond Listing

UTANG OBLIGASI PGN

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan USD1.350.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,037%. Wali amanat atas obligasi ini adalah The Bank of New York Mellon. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,125% per tahun yang terutang setengah tahunan setiap tanggal 16 Mei dan 16 November, dimulai pada tanggal 16 November 2014. Obligasi ini dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited. Dana dari obligasi diterima pada tanggal 16 Mei 2014 dan dipergunakan untuk penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya. Berdasarkan Moody's Investors Services, dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa2 dan BBB- pada tanggal 31 Desember 2023. Sehubungan dengan obligasi ini, Perusahaan dibatasi dalam melakukan konsolidasi, penggabungan usaha, mengalihkan, menyewakan, atau menjual semua atau sebagian besar asetnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah menyelesaikan pembelian kembali sebagian obligasi sebesar USD953.291.000 melalui metode *tender offer* dan *open market purchase*. Nilai Surat Utang yang masih beredar setelah pembelian kembali adalah sebesar USD396.709.000 dan akan jatuh tempo pada bulan Mei 2024.

PGN BONDS PAYABLE

On May 12, 2014, the Company issued USD1,350,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will mature on May 16, 2024, with an issuance price of 99.037%. The trustee for these bonds is The Bank of New York Mellon. These bonds bear interest of 5.125% per annum which is payable semi-annually every May 16 and November 16 , starting on November 16, 2014. These bonds are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The proceeds from these bonds were received on May 16, 2014 and had been allocated as additional working capital and other general purposes. Based on Moody's Investors Services, and Fitch Rating, the ratings of these bonds were Baa2 and BBB- respectively as of December 31, 2023. Under the terms of these bonds, the Company is not allowed to consolidate, merge, transfer, lease or sell all or parts of its large assets until they are settled.

As of December 31, 2023, the Company has completed the repurchase of part of the bonds amounting to USD953,291,000 through tender offer and open market purchase methods. The outstanding value of the Notes after the buyback is USD396,709,000 and will mature in May 2024.

Perbandingan Peringkat Kredit Utang Obligasi PGN 2022-2023
Comparation of PGN's Bond Credit Rating 2022-2023

Rating Agencies	2023		2022		Rating Agencies
	Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
Moodys	Baa2	*Stable*	Baa2	*Stable*	Moodys
Fitch Ratings	BBB-	*Stable*	BBB-	*Stable*	Fitch Ratings

UTANG OBLIGASI SEI

Pada tanggal 26 April 2017, SEI menerbitkan USD625.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 100%. Wali amanat atas obligasi ini adalah Citicorp International Limited. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 4,45% per tahun yang terutang setengah tahunan setiap tanggal 5 Mei dan 5 November, dimulai pada tanggal 5 November 2017. Obligasi ini dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited.

SEI BONDS PAYABLE

On April 26 2017, SEI issued USD 625,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will mature on May 5, 2024, with an issuance price of 100%. The trustee for these bonds is Citicorp International Limited. These bonds bear interest of 4.45% per annum which is payable semi-annually every May 5, and November 5, starting on November 5, 2017. These bonds are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI
Chronology of Bond Listing

Dana dari obligasi diterima pada tanggal 5 Mei 2017 dan dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi, mendanai aktivitas investasi, aktivitas akuisisi, penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya. Berdasarkan Moody's Investors Services dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah B2 dan B+ pada tanggal 31 Desember 2023.

SEI tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang obligasi ini. Sampai dengan 31 Desember 2023, SEI telah melakukan pembelian kembali sebagian obligasi sebesar USD468.748.000 dengan metode *open market purchase* dan *tender offer.* Nilai Surat Utang yang masih beredar setelah pembelian kembali adalah sebesar USD156.252.000 dan akan jatuh tempo pada bulan Mei 2024.

The proceeds from the bonds were received on May 5, 2017 and used to pay off syndicated loans, fund investment activities, make acquisitions, as additional working capital and for other general purposes. Based on Moody's Investors Services and Fitch Rating, the ratings of these bonds were B2 and B+ respectively as of December 31, 2023.

SEI is not required to set aside a sinking fund to settle repay this bond. As of December 31 2023, SEI had repurchased part of the bonds to the amount of USD468,748,000 using the open market purchase and tender offer method. The outstanding value of the Notes after the buyback is USD156,252,000 and will become due in May 2024.

Perbandingan Peringkat Utang Obligasi SEI 2022-2023
Comparation of SEI's Bond Credit Rating 2022-2023

Rating Agencies	2023		2022		Rating Agencies
	Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
Moodys	B2	*Stable*	B2	*Stable*	Moodys
Fitch Ratings	B+	*Stable*	B+	*Negative*	Fitch Ratings

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Name and Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK — PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Purwantono, Sungkoro & Surja a member firm of Ernst & Young Global Limited

Nama Akuntan Publik Type	Irwan Haswir	
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Buliding, Tower 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia	Indonesia Stock Exchange Buliding, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Jasa yang Diberikan Services Provided	• Jasa Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023. • Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil Terkait Program Tanggung Jawab Sosial Tahun Buku 2023. • Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA62) tahun buku 2023. • Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Direksi.	• General audit services of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year. • General audit of the financial statements of the Partnership and Community Development Program of PGN for the 2023 Fiscal Year. • Compliance audit on laws and regulations and internal control (PSA62) for the 2023 Fiscal Year. • Implementation of Agreed Procedures on Performance Evaluation Reports of Corporate KPIs and Board of Directors KPIs.
Biaya Fee	Rp11.900.000.000,00	Rp11,900,000,000.00
Periode Penugasan Assignment Period	2024	2024

BIRO ADMINISTRASI EFEK — SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

PT Datindo Entrycom

Alamat Address	Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Pusat 10220 Telp. +62 21 570 9009, Fax. +62 21 570 9020	Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Pusat 10220 Telp. +62 21 570 9009, Fax. +62 21 570 9020
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Administrasi Saham Pasar Sekunder, berupa pencatatan daftar Pemegang Saham dan pencatatan atas perubahan-perubahan pada daftar Pemegang Saham atas nama perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.	Administration Services of Secondary Market Share i.e., preparing a list of shareholders and noting down any revision made on the list on behalf of companies listed at the Indonesian Stock Exchange.
Biaya Fee	Rp44.400.000 termasuk PPN	Rp44,400,000 including VAT
Periode Penugasan Assignment Period	Desember 2022–November 2023	December 2022–November 2023

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Name and Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions

BURSA EFEK INDONESIA

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Bursa Efek Indonesia

Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp. 0800-100-9000 Web: callcenter@idx.co.id	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, South Jakarta 12190, Indonesia Tel. 0800-100-9000 Web: callcenter@idx.co.id
Jasa yang Diberikan Services Provided	Menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual permintaan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek.	Menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual permintaan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek.
Biaya Fee	Rp277.500.000 termasuk PPN	Rp277,500,000 including VAT
Periode Penugasan Assignment Period	2023	2023

Kustodian Sentral Efek Indonesia

Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 2190, Indonesia Telp. +62 21 515 2855, Fax +62 21 5299 1199	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 2190, Indonesia Telp. +62 21 515 2855, Fax +62 21 5299 1199
Jasa yang Diberikan Services Provided	Mengadministrasikan efek yang telah dikeluarkan perseroan, antara lain untuk memperoleh data pihak-pihak yang menjadi pemegang efeknya dan sebagian dari proses distribusi aksi korporasi.	Mengadministrasikan efek yang telah dikeluarkan perseroan, antara lain untuk memperoleh data pihak-pihak yang menjadi pemegang efeknya dan sebagian dari proses distribusi aksi korporasi.
Biaya Fee	Rp11.100.000 termasuk PPN	Rp11,100,000 including VAT
Periode Penugasan Assignment Period	2023	2023

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK

SECURITIES RATING AGENCY

Moody's Investors Services Singapore Pte. Ltd.

Alamat Address	71 Robinson Road Singapore, 05-01 Singapore 068895 Telp. +91 (865) 792 0807	71 Robinson Road Singapore, 05-01 Singapore 068895 Tel. +91 (865) 792 0807
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melakukan penerbitan pemantauan *credit rating* Perusahaan.	Conduct a rating of the Company on the ESG Risk Rating issued.
Periode Penugasan Assignment Period	1 Juli 2022–30 Juni 2023	July 1, 2022–June 30, 2023

Fitch Ratings Ltd

Alamat Address	30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN Telp. +44 20 3530 1000, Fax +44 20 3530 1000	30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN Tel. +44 20 3530 1000, Fax +44 20 3530 1000
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melakukan pemeringkatan Perusahaan atas publik maupun *private securities* yang diterbitkan.	Conduct corporate ratings on public and private securities issued.
Periode Penugasan Assignment Period	1 Oktober 2022–30 Oktober 2023	October 1, 2022–October 30, 2023

LEMBAGA PEMERINGKAT ESG RISK RATING
ESG RISK RATING AGENCY

Morningstar-Sustainalytics

Alamat Address	Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Netherlands inquiries.EMEA@sustainalytics.com (+44)20 4526 5640	Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Netherlands inquiries.EMEA@sustainalytics.com (+44)20 4526 5640
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melakukan pemeringkatan Perusahaan atas *ESG Risk Rating* yang diterbitkan.	Melakukan pemeringkatan Perusahaan atas ESG Risk Rating yang diterbitkan.
Periode Penugasan Assignment Period	1 Juni 2023–31 Mei 2024	Juni 1, 2023–May 31, 2024

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
List of Association Memberships

KEANGGOTAAN ASOSIASI
Association Membership

Nama Asosiasi Name of Association	Status Keanggotaan Membership Status
Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprises (SOEs) Legal Forum	Anggota Aktif Active Member
Indonesian Gas Society Indonesian Gas Society	Anggota Aktif Active Member
Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Issuers Association	Anggota Aktif Active Member
National Investor Relations Institute National Investor Relations Institute	Anggota Aktif Active Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	Anggota Aktif Active Member
The Institute of Internal Auditors Indonesia The Institute of Internal Auditors Indonesia	Anggota Aktif Active Member
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Internal Oversight Unit Communication Forum (FKSPI)	Anggota Aktif Active Member
Ikatan Perusahaan Gasbumi Indonesia (PGI) Indonesian Gas Association (PGI)	Anggota Aktif Active Member

INFORMASI PADA *WEBSITE* PERUSAHAAN
Information on Company's Website



PGN memiliki situs web utama yaitu www.pgn.co.id, yang dibuat mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang website emiten atau Perusahaan publik. Situs PGN dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web Perusahaan juga ditujukan untuk memenuhi komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, Pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Situs *website* Perusahaan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan peraturan OJK, di mana Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara rinci, informasi yang ada di dalam *website* PGN, memuat beragam data seperti:

1. Informasi pemegang saham. Terdapat pada menu "investor";
2. Kode Etik. Terdapat pada menu "tata kelola";
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meliputi bahan mata acara yang dibahas, ringkasan risalah, tanggal pengumuman, tanggal pemanggilan, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah diumumkan. Terdapat pada menu "investor";
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Terdapat pada menu "investor";
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat pada menu "Tentang kami"; dan
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Terdapat pada menu "tata kelola".

In line with the FSA Regulation Number 8/POJK.04/2015 on the Websites of Issuers or Public Companies, PGN has a main website, namely www.pgn.co.id. Our site can be accessed in Indonesian and English. In addition, our website is also intended to fulfill the Company's commitment to implement Law Number 8 of 1995 on the Capital Market and improve the implementation of Good Corporate Governance, especially for shareholders, customers, the public, the Government, and other stakeholders.

The Company's website has contained the information that must be published in accordance with the FSA Regulations, where Issuers or Public Companies are required to submit information in accordance with applicable provisions. In detail, the information on the PGN website contains various data such as:

1. Shareholder information. It's in the "investor" menu.
2. Code of Ethics. It's in the "management" menu.
3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) includes agenda items discussed, summary of minutes, date of announcement, date of invitation, date of GMS, date of summary of minutes announced. It's in the "investor" menu.
4. Separate annual financial statements (the last 5 years). It's in the "investor" menu.
5. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors. It's in the "About us" menu.
6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit. It's in the "management" menu.

03.



04.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis





TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI
Macroeconomic and Industrial Overview

Tahun 2023 menjadi tahun dengan berbagai tantangan serta ketidakpastian yang memberikan pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* yang terbit pada Januari 2024 mencatatkan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sekitar 3,1%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,5%. Tekanan inflasi global diperkirakan masih tinggi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan akan tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*).

The year 2023 turned out to be a year that posed numerous challenges and uncertainties that affected the Company's performance. IMF in the World Economic Outlook, which was published in January 2024, recorded global economic growth in 2023 of around 3.1%. Thus, global economic growth in 2023 was recorded to have decreased compared to 3.5% registered in 2022. Inflation pressure is forecasted to remain high, prompted by the increase in energy and food prices due to the escalation in geopolitical conflicts, economic fragmentation, as well as the El Nino phenomenon. In order to control inflation, monetary interest rates in developed countries, including the Federal Funds Rate (FFR), are forecasted to remain at high levels for a longer period of time (higher for longer).

Ketegangan geopolitik juga memberikan pengaruh terhadap prospek ekonomi dan perdagangan global. Perang di Ukraina belum berakhir, diikuti dengan beberapa kawasan yang selama ini menjadi pusat konflik seperti Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan beberapa wilayah lain, juga memberikan pengaruh untuk mendisrupsi perekonomian global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap kinerja perdagangan dan investasi global yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia.

Geopolitical tensions also had an impact on global economic and trade outlooks. While the war in Ukraine was not over, some other parts of world known for being centers of conflict, such as the Korean Peninsula, the Middle East had also an impact that might have disrupted the global economy and caused the prices of commodity to go even higher. Such likely occurrence could have further squeezed the global trade and investment outputs and further posed negative impacts especially on developing countries like Indonesia.

Di tengah tantangan makro ekonomi global, perekonomian Indonesia juga berhasil tumbuh baik dan berdaya tahan. Badan Pusat Statisitk (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 sebesar 5,05% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 5,31%. Kontribusi utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tumbuh 4,82 persen di tahun 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Faktor yang lain adalah pertumbuhan Investasi yang mencapai 4,4% di tahun 2023, yang dikontribusikan dari realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Amidst global macroeconomic challenges, the Indonesian economy has also managed to grow well and shown resilience. The Central Statistics Agency (BPS) recorded a growth of 5.05% in the national economy, while it stood at 5.31% in 2022. The main contributor for this growth is an increase in household consumption, which is the largest component of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), which grew by 4.82 percent in 2023. The increase in the minimum wage and government social assistance are driving the increase in household consumption. Another factor is growth in investment, which reached 4.4% in 2023, which was contributed by the realization of infrastructure development in Indonesia.



Sejalan dengan tren ekonomi dalam negeri yang kuat, Perseroan terus mengupayakan tren kinerja yang positif. Volume penjualan niaga gas di tahun 2023 mencapai 923 BBTUD, sedangkan untuk volume transmisi gas bumi sebesar 1.458 MMSCFD. Segmen hulu minyak dan gas bumi masih menunjukkan kinerja positif, dengan volume *lifting* sebesar 9,2 MMBOE. Volume regasifikasi gas bumi meningkat jadi sebesar 158 BBTUD dari 144 BBTUD di periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian signifikan terdapat pada transportasi minyak bumi yang mencapai 155.775 BOEPD dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 38.471 BOEPD.

PGN dalam perannya sebagai Subholding Gas Pertamina secara konsisten mengedepankan performa kualitas layanan kepada pelanggan melalui penyediaan pasok gas bumi, infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan. Diversifikasi pasokan gas dalam bentuk CNG dan LNG untuk membantu kehandalan ketersediaan pasokan gas ke depannya diupayakan untuk memperkaya portofolio kehandalan gas bumi domestik.

Subholding Gas akan terus memastikan kinerja yang bertumbuh dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif di antaranya strategi optimasi melalui penambahan pelanggan dan penetrasi pasar, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis untuk menopang keberlanjutan bisnis Perusahaan melalui pengembangan bisnis turunan hilir gas, pengelolaan biaya yang efektif serta program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan.

In line with the strong economic trend, the Company continues to seek positive trends in performance. The commercial gas sales volume in 2023 reached 923 BBTUD, while the natural gas transmission amounted to 1,458 MMSCFD. The upstream oil and gas segment continues to exhibit positive performance, with a lifting volume of 9.2 MMBOE. The volume of natural gas regasification increased to 158 BBTUD from 144 BBTUD in the same period in the previous year. A significant achievement occurred in the oil transportation, which reached 155,775 BOEPD, compared to the same period in the previous year, which only reached 38,471 BOEPD. Furthermore, regarding the number of customers,

In its role as Pertamina Gas Subholding, PGN consistently emphasizes the quality of services to customers through the provision of natural gas supply, infrastructure, and sustainable innovations. Diversification of gas supplies in the form of CNG and LNG to assist the reliability of natural gas supplies in the future is being sought to enhance the reliability of domestic natural gas.

The Gas Subholding will continue to ensure growing performance by implementing various initiatives, including optimization strategies through addition of customers and market penetration, expansion of household services, business diversification to support the Company's business sustainability through the development of downstream gas derivative businesses, effective cost management, as well as sustainable Human Resources (HR) development.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

PGN memiliki 3 (tiga) segmen usaha pokok, yaitu Segmen Usaha Niaga & Transmisi Gas Bumi, Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Segmen Usaha Operasi Lainnya berupa telekomunikasi, pemrosesan gas, transportasi minyak, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa, serta layanan pengelolaan fasilitas dan manajemen aset.

PGN has 3 (three) main business segments, namely Natural Gas Transmission & Trading Business Segment, Oil and Gas Exploration and Production Business Segment, Other Operation Business Segment, which includes telecommunication, gas processing, oil transportation, pipeline network construction and maintenance, as well as facility and asset management services.

Profitabilitas Per Segmen Usaha
Profitability per Business Segment

Juta USD | Million USD

Segmen Usaha Business Segment	Niaga & Transmisi Gas Bumi Trading and Transmission		Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Exploration and Production of Oil and Gas		Operasi Lainnya Other Operation		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidation	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Pendapatan Netto Net Revenue	3.089,5	2.896,0	453,0	611,5	491,6	412,5	(387,8)	(351,4)	3.646,3	3.568,6
Beban Segmen Segment Expenses	(2.788,5)	(2.567,8)	(382,3)	(453,1)	(247,8)	(232,7)	392,4	334,0	(3.026,1)	(2.919,6)
Laba Segmen Segment Profit	301,0	328,2	70,7	158,4	243,8	179,8	4,7	(17,4)	620,2	649,0

SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI

Segmen Usaha Niaga

Segmen usaha niaga gas bumi merupakan kegiatan penyaluran dan penjualan gas bumi ke pengguna akhir, meliputi pelanggan komersial dan industri manufaktur, pembangkit listrik, pelanggan kecil (UMKM), serta pelanggan rumah tangga dengan menggunakan moda penjualan gas bumi melalui pipa maupun non-pipa. Segmen usaha ini dikelola PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, dan PT Pertagas Niaga. Wilayah kegiatan usahanya tersebar di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten di Indonesia.

PGN melalui Sales and Operation Region (SOR) melaksanakan kegiatan operasional usaha niaga gas bumi yang terbagi dalam SOR I, II, III, dan IV dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

- Wilayah SOR I meliputi pulau Sumatera & Kepulauan Riau, dengan Area terdiri dari Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, dan Batam.

TRADING AND TRANSMISSION BUSINESS SEGMENT

Trading Business Segment

Natura gas trading business segment is an activity of distributing and selling natural gas to end users, comprising customers of commerce and manufacturing industry, power plants, small-scale businesses (MSMEs), as well as households through pipeline and non-pipeline natural gas trading mode. This business segment is managed by PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, and PT Pertagas Niaga. The business activity areas are spread in 18 provinces and 74 cities/regencies in Indonesia.

Through its Sales and Operation Regions (SORs), PGN carries out natural gas trading business operational activities, which are divided into SOR I, II, III and IV with the following details for each SOR area:

- SOR I covers Sumatra island and Riau Islands, with Areas consisting of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, and Batam.

- Wilayah SOR II meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dengan Area terdiri dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, dan Cirebon.
- Wilayah SOR III meliputi provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dengan Area terdiri dari Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang.
- Wilayah SOR IV meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku, dengan Area terdiri dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, dan Sorong.

Segmentasi Pelanggan Gas Bumi PGN

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan loyalitas pelanggan, PGN melakukan segmentasi pasar yang berfokus kepada pengelompokan pelanggan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang spesifik, fleksibilitas klausul komersial dan operasi, serta simplifikasi dan akurasi layanan dengan menghadirkan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pelanggan gas bumi PGN dibagi 4 (empat) segmen, yaitu:

a. Pelanggan Rumah Tangga
Mencakup perumahan, rumah susun yang dikelola Pemerintah maupun swasta, rumah dinas pemerintahan (termasuk TNI dan Polri), kondominium, apartemen, serta pengembang kawasan hunian dan *real estate*.

b. Pelanggan Kecil
Mencakup rumah sakit, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan Pemerintahan dan swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, kantor Pemerintah dan swasta, hotel, restoran, pertokoan/mall/swalayan. Segmentasi Pelanggan Kecil mengacu kepada Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, sehingga dalam penyajian jumlah pelanggan dan volume niaga gas bumi tetap ditampilkan. Adapun untuk penyajian dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, pendapatan segmen Pelanggan Kecil dimasukkan ke dalam segmen Komersial dan Industri.

c. Pelanggan BBG Transportasi
Mencakup pelanggan yang menggunakan gas pada kegiatan pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor. Dalam penyajian volume niaga, segmen pelanggan BBG Transportasi dimasukkan ke dalam segmen pelanggan Komersial dan Industri.

- SOR II covers the provinces of West Java, Jakarta Special Capital Region, and Banten, with Areas consisting of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, and Cirebon.
- SOR III covers the provinces of Central Java, East Java, Bali, and Nusa Tenggara, with Areas consisting of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang.
- SOR IV covers the islands of Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku islands, with Areas consisting of Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, and Sorong.

PGN Natural Gas Customer Segmentation

In order to maintain as well as improve customer loyalty, PGN segmented the market, with the aim of categorizing customers based on identification of their specific needs, flexibility of commercial and operational clauses, as well as service simplification and accuracy by providing products and services that provide added value to customers. PGN natural gas customers are divided into 4 (four) segments, namely:

a. Household Customers
This includes housing complexes, low-cost apartments run by the Government and private sectors, Government official residence (including residence of the Indonesian National Defense Forces/ TNI and Indonesian National Police/ Polri), condominiums, apartments and developers of residential areas and real estates.

b. Small-scale Customers
This includes hospitals, community health centers, orphanages, places of worship, educational institutions run by the Government and private sectors, religious institutions, social institutions, Government and private company offices, hotels, restaurants, and stores/ malls/ supermarkets. The segmentation of Small-scale Customers refers to Regulation of the Governing Body Committee on Downstream Oil and Gas (BPH Migas) No. 4 of 2021 on the Second Amendment to the Regulation of BPH Migas No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 on the Stipulation of Natural Gas Prices for Households and Small-scale Customers. Therefore, in the presentation, the number of customers and volume of natural gas trading remain on display. As for the presentation in the Consolidated Financial Statements, revenue from the Small-scale Customer segment is included in the Commerce and Industry segment.

c. Fuel Gas (BBG) Transportation Customers
This includes customers who use gas for gas refueling activities for motorized vehicles. In the presentation of trading volume, the Fuel Gas Transportation customers are included in the Commerce and Industry customer segment.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

d. Pelanggan Komersial dan Industri
Mencakup pelanggan komersial dan industri serta pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar dan/atau bahan baku dalam kegiatan usaha di bidang jasa, komersial, manufaktur sektor industri kimia, keramik, logam dasar, logam fabrikasi, pupuk, kertas, kaca, kayu, semen, makanan, tekstil, *lifting oil*, *refinery*, pembangkit listrik dan industri manufaktur lainnya.

Hingga 31 Desember 2023, jumlah pelanggan PGN mencapai 830.935, dengan rincian 825.856 pelanggan rumah tangga, 1.976 pelanggan kecil, dan 3.103 pelanggan komersial dan industri.

Segmen Usaha Transmisi/Transportasi

Segmen usaha transmisi gas bumi/minyak bumi adalah kegiatan pengangkutan gas bumi/minyak bumi milik *shipper* dari titik terima di lapangan gas bumi/minyak bumi atau sumber lain ke titik serah *offtaker* melalui ruas pipa transmisi bertekanan tinggi/pipa minyak bumi. Pada segmen usaha ini, PGN mengoperasikan ruas pipa transmisi untuk menyalurkan gas bumi/minyak bumi milik *shipper* dan mendapatkan imbalan berupa *toll fee* yang besarannya ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Selain PGN, terdapat PT Transportasi Gas Indonesia, PT Kalimantan Jawa Gas, dan PT Pertamina Gas yang bertindak sebagai operator atas ruas pipa transmisi yang dimilikinya.

Selain itu, pipa transmisi yang dimiliki PGN juga digunakan untuk mengangkut gas bumi milik sendiri guna menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi PGN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi kemudian terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009. Kegiatan pengangkutan gas bumi milik sendiri ini tidak untuk mencari keuntungan, sehingga PGN tidak mendapatkan imbalan berupa *toll fee*.

Dalam penyajian informasi kinerja di segmen transmisi, kinerja PT Transportasi Gas Indonesia disajikan pada akun Bagian Laba dari Ventura Bersama.

d. Commerce and Industry Customers
This includes commerce and industry customers, as well as power plants that use natural gas as fuel and/or raw material in business activities in the service sector, commercial sector, and manufacturing sector, covering chemical, ceramic, base metal, metal fabrication, fertilizer, paper, glass, timber, cement, food, textile, lifting oil, refinery, power plants, and other manufacturing industries.

As of December 31, 2023, the number of PGN customers reached 830,935, consisting of 825,856 household customers, 1,976 small-scale customers, and 3,103 commercial and industrial customers.

Transmission/Transportation Business Segment

The business segment of natural gas/oil transmission is the transportation of natural gas/oil owned by shippers from the receiving point in the natural gas/oil field or other sources to the offtaker handover point via a high-pressure transmission pipeline/oil pipeline. In this business segment, PGN operates transmission pipelines to distribute natural gas/oil owned by shippers and receives compensation in the form of a toll fee, in which the amount is set by the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). Apart from PGN, there are PT Transportasi Gas Indonesia, PT Kalimantan Jawa Gas, and PT Pertamina Gas, which act as operators for their transmission pipelines.

In addition, PGN's transmission pipeline is used to transport its own natural gas in order to support PGN's natural gas trading business activities, as regulated in Government Regulation No. 36 of 2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities, as most recently amended by Government Regulation No. 30 of 2009. This self-owned natural gas transportation activity is not intended to seek profit. Hence, PGN does not receive compensation in the form of a toll fee.

In presenting performance information in the transmission segment, the performance of PT Transportasi Gas Indonesia is presented in the Profit Section of Joint Ventures account.

Portofolio Infrastruktur Perusahaan

Sebagai Perusahaan gas nasional yang terdepan dalam pemanfaatan gas bumi, infrastruktur penyaluran gas bumi menjadi asset terpenting bagi Perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi bagi pelanggan. Di samping itu, sejak melakukan akuisisi PT Pertamina Gas, portfolio infrastruktur perusahaan bertambah dengan adanya kegiatan usaha transportasi minyak melalui pipa.

Sampai dengan 31 Desember 2023, total panjang pipa Perusahaan secara keseluruhan mencapai 12.692 km atau tumbuh 10,1% atau 1.167 km dibandingkan tahun 2022. Dalam lima tahun terakhir, Panjang pipa PGN (2019-2023) adalah sebagai berikut:

Corporate Infrastructure Portfolio

As a state-owned gas company that leads in the natural gas utilization, we see natural gas distribution infrastructure as our most important asset that can ensure energy availability for customers. Further, since our acquisition of PT Pertamina Gas, our infrastructure portfolio has expanded since we are now operating the acquired oil transportation business via pipelines.

As of December 31, 2023, the Company operated a total length of pipe of 12,692 km or an increase of 10.1% or 1,167 km compared to 2022. The following is a graph of the length of PGN's pipe (2019-2023) over the last five year:

PANJANG PIPA
Pipeline Lengths
Km | Km

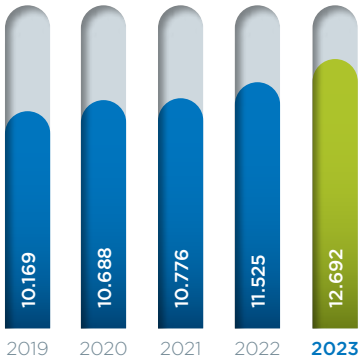

Kinerja Segmen Usaha Niaga/Transmisi Terkait Operasi/Produksi

Performance of Commercial/Transmission Business Segment Related to Operations/ Production

Kinerja Segmen Usaha Niaga

Performance of Commercial Business Segment

Uraian Segmen Usaha Niaga Description of Commercial Business Segment	2023	2022	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
Volume Niaga (BBTUD) Trading Volume (BBTUD)	923	896	27	3,1
Volume Terminal Usage Agreement (BBTUD) Volume Terminal Usage Agreement (BBTUD)	54	29	25	86,3
Jumlah Pelanggan (Pelanggan) Total Subscribers (Customers)	830.935	838.953	(13.049)	(1,5)

Pada tahun 2023, PGN berhasil melaksanakan niaga gas kepada seluruh pelanggan hingga 923 BBTUD, meningkat sebesar 27. BBTUD atau 3,1% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat mencapai 896 BBTUD. Di samping itu, PGN tetap dapat mempertahankan penyaluran gas bumi kepada PLN melalui Kontrak Terminal *Usage Agreement* (Kontrak TUA) FSRU Lampung sebesar 54 BBTUD pada tahun 2023.

In 2023, PGN succeeded in trading up to 923 BBTUD to all customers, an increase of 27 BBTUD or 3.1% compared to 2022, which was posted to reach 896 BBTUD. In addition, PGN managed to continue to distribute natural gas to PLN through the FSRU Lampung Terminal Usage Agreement Contract (TUA Contract) with a total of 54 BBTUD in 2023.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Niaga

Peningkatan volume niaga didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang telah berakhir pada pertengahan tahun 2023. Hal ini tercermin pada peningkatan volume pemakaian gas oleh sektor Industri, Komersial dan Rumah Tangga. Subholding Gas juga mendapatkan tambahan portofolio pasokan dengan dimulainya pengaliran gas dari Lapangan Jambaran Tiung Biru sejak kuartal 4-2022.

Peningkatan kinerja niaga juga menunjukkan komitmen Subholding Gas untuk terus mendukung dan melaksanakan penugasan Kepmen ESDM No.91.K/2023 dan No.135.K/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri dan Pembangkit Listrik. Disamping itu terkait Proyek Jargas/Gas Untuk Rumah Tangga, Kementerian ESDM telah menugaskan Pertamina dan PGN untuk mengembangkan Jargas untuk kebutuhan bagi rumah tangga. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya impor LPG dan memiliki potensi volume +/- 10 BBTUD dengan target 4 juta Sambungan Rumah (SR) sampai dengan 2025.

Explanation on Increase/Decrease of Trading Performance

The increase in commercial volume was driven by economic recovery after the COVID-19 pandemic, which ended in mid-2023. This is reflected in the increase in gas usage volume by the Industrial, Commercial, and Household sectors. Gas Subholding also received an additional supply portfolio with the start of gas distribution from the Jambaran Tiung Biru Block in the 4th quarter of 2022.

The rising trading performance also demonstrates the commitment of Gas Subholding to continue to support and carry out the assignment of Decrees of the Minister of MEMR No. 91.K/2023 and No. 135.K/2021 on Specific Natural Gas Prices for Industry and Power Generation. In addition, for the Gas Network Project/ Gas for Households, the Ministry of MEMR has assigned Pertamina and PGN to develop gas networks for household needs. This project is expected to reduce LPG imports and has potential volume of +/-10 BBTUD, targeting 4 million household connections in 2025.

Kinerja Segmen Usaha Transmisi

Performance of Transmission Business Segment

Uraian Segmen Usaha Transmisi Description of Transmission Business Segment	2023	2022	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
Volume (MMSCFD)	1.458	1.349	108	8,0

Pada tahun 2023, volume gas bumi yang ditransportasikan melalui infrastruktur pipa transmisi gas bumi PGN adalah sebesar 1.458 MMSCFD (tidak termasuk TGI) sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1.349 MMSCFD. Realisasi volume pada tahun ini meningkat 8,0% dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan volume dari *Shipper*.

In 2023, the volume of natural gas transported through PGN's natural gas transmission pipeline infrastructure was 1,458 MMSCFD (excluding TGI), compared to 1,349 MMSCFD in 2022. Realized volume this year increased by 8.0% compared to the previous year, in line with the increase in volume from Shippers.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Transmisi

Volume penyaluran transmisi pada 2023 meningkat 8,0%. Kinerja transmisi gas bumi dikontribusikan dari PGN, PT Pertamina Gas dan PT Kalimantan Jawa Gas. Peningkatan volume transmisi dikontribusikan dari kelanjutan kontrak pengaliran gas bumi *existing* dan peningkatan volume gas bumi dari lapangan Jambaran Tiung Biru melalui pipa transmisi Gresik-Semarang.

Explanation on Increase/Decrease of Transmission Performance

Transmission distribution volume in 2023 increased by 8.0%. Natural gas transmission performance was contributed by PGN, PT Pertamina Gas, and PT Kalimantan Jawa Gas. The increase in transmission volume was contributed by the continuation of the existing natural gas distribution contract and the increase in natural gas volume from the Jambaran Tiung Biru field via the Gresik-Semarang transmission pipeline.

Volume Transmisi berdasarkan Operator
Transmission Volume Based on Operator

MMSCFD | MMSCFD

Uraian Description	2023	2022	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
PGN	2	3	(1)	(26,8)
KJG	13	15	2	(14,8)
Pertagas	1.442	1.331	111	8,4
Jumlah | Total	**1.458**	**1.349**	**108**	**8,0**

Kinerja Segmen Usaha Distribusi dan Transmisi Terkait Pendapatan/ Profitabilitas

Performance of Distribution and Transmission Business Segment in terms of Revenue/Profitability

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Pendapatan Niaga Gas	2.573,1	2.496,0	77,1	3,1	Gas Commercial Revenue
Pendapatan Transmisi Gas	215,1	206,9	8,2	4,0	Gas Transmission Revenue
Total Pendapatan Segmen	2.788,2	2.702,9	85,3	3,2	Total Revenue Segment
Laba Segmen Niaga/Transmisi	301,0	328,2	(27,2)	(8,3)	Commercial and Transmission Segment Profitability

Segmen usaha Niaga Gas Bumi adalah kontributor utama pendapatan Perusahaan. Sebanyak 70,6% pendapatan Perseroan dikontribusikan dari segmen ini. Pada tahun 2023, pendapatan Niaga dan Transmisi Gas Bumi mencapai USD2.573,1 juta, naik 3,1% atau setara USD77,1 juta dibandingkan 2022 yang sebesar USD2.496,0 juta. Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan volume penjualan gas bumi.

Kegiatan transmisi gas mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan total volume transmisi gas sebesar 1.458 MMSCFD, naik 8,0% atau 108 MMSCFD dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1.349 MMSCFD. Pertumbuhan volume ini terefleksi pada peningkatan pendapatan transmisi gas bumi sebesar USD215,1 juta atau naik sebesar 4,0% atau sebesar USD8,2 juta dibandingkan 2022 yang sebesar USD206,9 juta.

Kontribusi pendapatan transmisi dari Afiliasi yaitu KJG dan TGI, penyajian pada Laporan Keuangan Konsolidasian dicatatkan dalam bentuk Pendapatan Niaga Gas untuk KJG, sementara untuk TGI dicatat sebagai bagian laba dari ventura bersama. Kegiatan Transmisi Gas Bumi yang dilakukan KJG merupakan transportasi gas dari SAKA ke PGN sehingga pendapatan transmisi gas KJG tersebut pada akhirnya menyatu dengan pendapatan Niaga Gas di PGN. Kontribusi Pendapatan Transmisi Gas dari TGI yang dicatatkan sebagai bagian laba dari ventura bersama pada tahun 2023 sebesar USD32,5 juta.

Profitabilitas segmen usaha Niaga/Transmisi Gas Bumi di 2023 adalah sebesar USD301,0 juta atau mengalami penurunan USD27,2 juta atau 8,3% dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD328,2 juta.

The Natural Gas Trading business segment is the main contributor or representing 70.6% of the Company's revenue. In 2023, Natural Gas Trading and Transmission revenues reached USD2,573.1 million, an increase of 3.1% or an equivalent of USD77.1 million compared to USD2,496.0 million delivered in 2022. The increase in revenue was mainly due to an increase in volume of natural gas sales.

Gas transmission activities increased in 2023 with a total gas transmission volume reaching 1,458 MMSCFD, an increase of 8.0% or 108 MMSCFD compared to 1,349 MMSCFD in 2022. This growth in volume was reflected in the natural gas transmission revenue that reached USD215.1 million or an increase of 4.0% or USD8.2 million compared to USD206.9 million delivered in 2022.

The transmission revenue contribution from Affiliates, namely KJG and TGI, presented in the Consolidated Financial Statements is posted as Gas Trading Income for KJG, while for TGI is posted as part of profit from joint ventures. The Natural Gas Transmission activity carried out by KJG is gas transportation from SAKA to PGN, meaning that KJG's gas transmission income is ultimately integrated with PGN's Niaga Gas income. The contribution to Gas Transmission Revenue from TGI posted as part of profit from joint ventures in 2023 was USD32.5 million.

The profitability of the Natural Gas Trading/Transmission business segment in 2023 was USD301.0 million or a decrease of USD27.2 million or 8.3% compared to USD328.2 million posted in 2022.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

SEGMEN USAHA EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS

Segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah kegiatan usaha dan investasi PGN di bidang hulu minyak dan gas bumi. Segmen usaha ini meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha ini menjadi wujud upaya PGN untuk memperluas portofolio pada rantai bisnis energi melalui PT Saka Energi Indonesia (SEI).

SEI memperoleh pendapatan yang berasal dari *lifting* minyak bumi, gas bumi, LPG dan LNG. Sementara beban pokok yang diperlukan dalam kegiatan usaha ini antara lain biaya produksi dan *lifting*, biaya penyusutan aset minyak dan gas, serta alokasi biaya terkait eksplorasi dan eksploitasi.

Pada tahun 2023, SEI mengelola portofolio blok minyak dan gas bumi sebanyak 11 blok dengan status 6 blok telah berproduksi dan 5 blok dalam tahap eksplorasi, 10 blok berlokasi di Indonesia dan 1 blok di Amerika Serikat.

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION BUSINESS SEGMENT

The oil and gas exploration and production business segment is PGN's business and investment activities in the upstream oil and gas sector. This business segment includes exploration, exploitation, and business development activities in the oil and gas sector. This business activity is a manifestation of PGN's efforts to expand its portfolio in the energy business chain through PT Saka Energi Indonesia (SEI).

SEI generates income from lifting of oil, natural gas, LPG, and LNG. Meanwhile, the main expenses required in this business activity include costs of production and lifting, depreciation of oil and gas assets, and cost allocation related to exploration and exploitation.

In 2023, SEI managed the portfolio of 11 oil and natural gas blocks with the status of 6 blocks in production and 5 blocks in the exploration stage, with 10 blocks located in Indonesia and 1 block in the United States of America.

Portofolio Blok Minyak dan Gas SEI
SEI Oil and Gas Block Portfolio

No.	Blok Block	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Operator Operator	Status Status
1	Pangkah PSC	100	SEI	Produksi Production
2	Fasken	36	Silverbow	Produksi Production
3	Ketapang PSC	19,4	Petronas	Produksi Production
4	Bangkanai PSC	30	Medco	Produksi Production
5	Muriah PSC	100	SEI	Produksi Production
6	Muara Bakau PSC	11,7	ENI	Produksi Production
7	West Bangkanai PSC	30	Medco	Eksplorasi Exploration
8	South Sesulu PSC	100	SEI	Eksplorasi Exploration
9	Pekawai PSC	100	SEI	Eksplorasi Exploration
10	West Yamdena PSC	100	SEI	Eksplorasi Exploration
11	Sangkar PSC	100	SEI	Eksplorasi Exploration

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas terkait Operasi dan Produksi

Pada tahun 2023, SEI secara berkelanjutan melakukan aktivitas produksi dan eksplorasi atas portofolio blok minyak dan gas bumi yang dimiliki. Dari aktivitas ini, SEI menghasilkan beberapa komoditas yaitu minyak bumi, gas bumi, LPG, dan LNG. Volume *lifting* dari masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment regarding Operations and Production

In 2023, SEI continuously carried out production and exploration activities for its portfolio of oil and natural gas blocks. From this activity, SEI generated several commodities, namely petroleum, natural gas, LPG, and LNG. The following is the lifting volume of each product:

Kinerja *Lifting* SEI
SEI Lifting Performance

Uraian Description	2023	2022	Δ	
			Nilai Value	%
Minyak Bumi (MMBBL) Oil (MMBBL)	2.7	2.8	(0,1)	(2,5)
Gas Bumi (TBTU) Natural Gas (TBTU)	27.6	33.6	(6,0)	(17,8)
LPG ('000 Ton) LPG ('000 Ton)	41.5	53.1	(9,7)	(21,7)
LNG (BSCF) LNG (BSCF)	6.8	7.8	(1,0)	(12.4)
Total *Lifting* (MMBOE) **Total Lifting (MMBOE)**	**9,2**	**10,5**	**(1,4)**	**(13,0)**

Pada tahun 2023, kinerja *lifting* SEI mencapai 9,2 MMBOE, mengalami penurunan sebesar 1,3 MMBOE atau 13,1% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 10,5 MMBOE.

In 2023, SEI's lifting performance reached 9.2 MMBOE, a decrease of 1.3 MMBOE or 13.1% compared to 2022, which was recorded at 10.5 MMBOE.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Penurunan kinerja operasi SEI terutama dipengaruhi penurunan produksi dari blok Pangkah karena adanya problem *water channeling* di salah satu sumur dan tertundanya pengeboran di Fasken karena turunnya harga *henry hub*.

Explanation on Increase/Decrease of Oil and Gas Exploration and Production Business Performance

The decline in SEI's operational performance was mainly due to a decrease in production from the Pangkah block due to water channeling issues in one of the wells and delays in drilling at Fasken due to the decline in henry hub prices.

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas terkait Pendapatan/Profitabilitas

Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment in terms of Revenue/Profitability

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Crude Oil	216,1	278,1	(62,0)	(22,3)	Crude Oil
Gas Bumi	140,2	207,7	(67,5)	(32,5)	Natural Gas
LPG	71,5	86,1	(14,6)	(17,0)	LPG
LNG	25,3	39,6	(14,3)	(36,1)	LNG
Total Pendapatan Segmen	**453,1**	**611,5**	**(158,4)**	**(25,9)**	**Total Revenue Segment**
Total Laba Segmen	**70,7**	**158,4**	**(87,7)**	**(55,4)**	**Total Profit Segment**

Pada tahun 2023, pendapatan dari segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas tercatat sebesar USD453,1 juta, mengalami penurunan 25,9% atau setara dengan USD158,4 juta dibandingkan tahun 2022 yang

In 2023, revenue from the oil and gas exploration and production business segment was recorded at USD453.1 million, a decrease of 25.9% or equivalent to USD158.4 million compared to USD611.5 million recorded in 2022.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

tercatat sebesar USD611,5 juta. Penurunan ini disebabkan volume *lifting* minyak dan gas bumi yang mencapai 9,2 MMBOE atau turun 13,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,5 MMBOE. Selain itu juga terdapat penurunan harga rata-rata ICP sepanjang tahun 2023 di level USD78/BBL, dibandingkan tahun 2022 yang sebesar USD97/BBL.

Penurunan pendapatan mempengaruhi profitabilitas segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Profitabilitas segmen ini mencapai USD70,7 juta, turun hingga 55,3% atau setara USD87,6 juta dibandingkan profitabilitas tahun sebelumnya yang mengalami keuntungan sebesar USD158,4 juta. Penurunan profitabilitas disebabkan dari penurunan volume lifting dan penurunan rata-rata harga minyak.

SEGMEN USAHA LAINNYA
Segmen usaha lainnya merupakan kegiatan usaha lain yang langsung berkaitan dengan dan/atau mendukung usaha utama PGN sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui Entitas Anak dan Afiliasi. Kegiatan usaha lainnya antara lain:

1. **Telekomunikasi**
   PT PGAS Telekomunikasi Nusantara atau PGNCOM adalah Entitas Anak PGN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan layanan Informasi dan Teknologi Komunikasi. Sebagai penyedia jaringan *fiber optic* (FO), PGNCOM telah memiliki pengalaman dan telah mengoperasikan jaringannya mulai dari Singapura dan Jakarta sampai kota-kota besar lainnya di bagian barat Indonesia dan menyediakan layanan *connectivity*, *managed service* dan *business solution*.

2. **Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Pipa**
   PT PGAS Solution atau PGAS Solution adalah Entitas Anak yang bergerak di bidang *supporting service* dengan konsentrasi pada 4 (empat) bidang usaha meliputi pengelolaan EPC (konstruksi pipa dan stasiun gas bumi), pengelolaan operasi dan pemeliharaan (O&M), *supply chain*, dan *engineering*.

3. ***Facility & Asset Management***
   PT Permata Graha Nusantara atau PERMATA adalah Entitas Anak yang bergerak di 4 (empat) bidang usaha yaitu *facility management*, manajemen aset, *entrepreneurial real estate*, serta *design & build*. Produk layanannya meliputi properti dan jasa

The decrease was due to a decrease of 13.1% in oil and natural gas lifting volume to 9.2 MMBOE from 10.5 MMBOE in the previous year. Besides, there was also a decrease in the average price of ICP throughout 2023 to the level of USD78/BBL, compared to USD97/BBL in 2022.

The decline in revenue affected profitability in the oil and gas exploration and production business segment. The profitability in this segment reached USD70.7 million, down 55.3% or equivalent to USD87.6 million compared to the previous year with USD158.4 million. The decrease in profitability was due largely to a decrease in both lifting volume and average oil price.

OTHER BUSINESS SEGMENTS
Other business segments consist of other business activities that are directly related to and/or support PGN's main business in accordance with the prevailing laws and regulations. These activities are carried out by Subsidiaries and Affiliates. Other business activities include:

1. **Telecommunication**
   PT PGAS Telekomunikasi Nusantara or PGNCOM is a Subsidiary Entity of PGN engaged in the telecommunication services and Information and Communication Technology services. As a provider of fiber optic (FO) networks, PGNCOM has experience and has operated its networks, ranging from Singapore, Jakarta, to other big cities in western Indonesia. It also provides connectivity services, managed service, and business solutions.

2. **Construction, Operation, and Maintenance of Pipeline**
   PT PGAS Solution or PGAS Solution is a Subsidiary engaging in the supporting services with a concentration on 4 (four) business fields, including EPC management (natural gas pipeline and station construction), operation management and maintenance (O&M), supply chain, and engineering.

3. **Facility & Asset Management**
   PT Permata Graha Nusantara or PERMATA is a Subsidiary engaging in 4 (four) business fields, namely facility management, asset management, entrepreneurial real estate, and design & build. Its service products include properties and services

antara lain penyediaan fasilitas untuk mendukung operasional bisnis pelanggan seperti pengelolaan gedung, layanan perkantoran, layanan transportasi, penunjang migas, pendayagunaan dan optimalisasi aset, penyediaan produk properti komersial dan residensial, serta jasa lainnya.

4. **Transportasi Minyak, Pemrosesan Gas, dan Jasa Regasifikasi**
   Sejak bergabungnya PT Pertamina Gas dalam lini bisnis PGN, terdapat penambahan segmen bisnis baru yakni transportasi minyak dan pemrosesan gas. Dalam bisnis transportasi minyak, PT Pertamina Gas menerima *toll fee* atas penyaluran minyak bumi melalui infrastruktur pipa yang dimilikinya. Sedangkan untuk pemrosesan gas, PT Pertamina Gas memproduksi LPG yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan LPG di pasar domestik. PT Pertamina Gas juga melakukan bisnis Jasa Regasifikasi yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan jasa regasifikasi LNG utamanya kepada PLN.

to provide facilities to support customers' business operations, such as building management, office services, transportation services, oil and gas support, asset utilization and optimization, provision of commercial and residential property products, and other services.

4. **Oil Transportation, Gas Processing, and Regasification Services**
   Since the incorporation of PT Pertamina Gas into PGN's line of business, new business segments have been added, namely oil transportation and gas processing. In the oil transportation business, PT Pertamina Gas receives a toll fee for distributing oil via its pipeline infrastructure. As for gas processing, PT Pertamina Gas produces LPG used to meet the domestic LPG demand. PT Pertamina Gas also carries out the Regasification Services business by providing LNG regasification services primarily to PLN.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Produksi/Operasi

Segmen usaha lainnya terdiri dari sektor telekomunikasi, transportasi minyak, sewa pembiyaan, pemrosesan gas, jasa regasifikasi, *facility & asset management*, serta konstruksi dan O&M. Untuk segmen konstruksi dan O&M serta *facility & asset management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

Pada tahun 2023, kinerja segmen usaha lainnya turut memberikan kontribusi bagi bisnis Perusahaan yang dapat ditunjukan dalam tabel berikut:

Performance of Other Business Segment Related to Production/Operations

Other business segments consist of telecommunications, oil transportation, leasing, gas processing, regasification service, facility & asset management, construction, and O&M. As for the construction and O&M as well as facility & asset management segments, most of the performance was eliminated by the Holding Entity since most of its businesses were to support PGN's performance.

In 2023, the performance of other business segments also contributed to the Company's business, which can be shown in the following table:

Segmen Usaha Lainnya
Other Business Segments

Uraian Description	2023	2022	Δ	
			Nilai Value	%
Telekomunikasi (MBPS) Telecommunication (MBPS)	20.167.945	16.070.339	4.097.606	25,5
Pemrosesan Gas (TPD)*) Gas Processing (TPD)*)	106	134	28	20,9
Transportasi Minyak (Barel) Oil Transportation (Barrel)	56.857.837	14.041.793	42.816.043	304,9
Jasa Regasifikasi (BBTUD) Regasification Services (BBTUD)	158	144	14	9,8

*) Tanpa PT Perta Samtan Gas
Except PT Perta Samtan Gas

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2023, kinerja sektor telekomunikasi mengalami peningkatan sebesar 25,5% dibandingkan 2022. Peningkatan ini didukung adanya *upgrade* kapasitas yang berdampak pada peningkatan kapasitas penjualan *bandwith* kepada pelanggan eksternal.

Pada sektor pemrosesan gas di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20,9% dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan dari penurunan pasokan *feed* gas di LPG ENP Plant.

Sektor transportasi minyak pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 304,9% dibandingkan tahun 2022, sejalan dengan mulai beroperasinya secara penuh pipa minyak Rokan di tahun 2023, sedangkan pada tahun sebelumnya masih beroperasi secara partial.

Untuk sektor jasa regasifikasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan 9,8% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan permintaan regasifikasi di Perta Arun Gas.

Untuk segmen Konstruksi dan O&M serta *Facility & Asset Management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

Explanation on Increase/Decrease of Other Business Segment Performance

In 2023, the performance of the telecommunications sector increased by 25.5% compared to 2022. This increase is supported by capacity upgrades, which have an impact on increasing bandwidth sales capacity to external customers.

In the gas processing sector, there was a decrease of 20.9% in 2023 compared to 2022, due to a decrease in feed gas supply at the LPG ENP Plant.

In 2023, the oil transportation sector experienced a very significant increase of 304.9% compared to 2022, in line with the full operation of the Rokan oil pipeline in 2023, whereas it was still partially operational in the previous year.

In 2023, the regasification services sector experienced an increase of 9.8% compared to 2022. This increase was mainly due to an increase in demand for regasification at Perta Arun Gas.

As for the Construction, O&M, and Facility & Asset Management sectors, most of their performance was eliminated by the Holding Entity since most of its businesses were to support PGN's performance.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Pendapatan/ Profitabilitas

Performance of Other Business Segments in terms of Revenue/Profitability

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Pemrosesan Gas	66,2	72,4	(6,2)	(8,6)	Gas Processing
Transportasi Minyak	161,0	57,0	104,0	182,6	Oil Transportation
Jasa Regasifikasi	127,6	102,6	25,0	24,4	Regasification Services
Sewa Fiber Optic	22,4	22,6	(0,2)	(0,7)	Fiber Optic Rental
Lain-lain	49,2	25,9	23,3	90,4	Others
Total Pendapatan Segmen	**426,5**	**280,4**	**146,1**	**52,1**	**Total Revenue Segment**
Total Laba Segmen	**243,8**	**179,8**	**64,0**	**35,6**	**Total Profit Segment**

Pada tahun 2023, pendapatan dari segmen usaha lainnya mencapai USD426,5 juta atau meningkat 52,1%, dari USD280,4 juta pada tahun 2022. Kenaikan pendapatan dikontribusikan dari peningkatan kinerja di hampir seluruh kegiatan bisnis di segmen bisnis lainnya seperti kenaikan volume transportasi minyak, regasifikasi, dan bisnis lainnya. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan perseroan dalam mengembangkan bisnis diluar bisnis utama niaga dan transmisi gas bumi.

Adapun profitabilitas segmen usaha lainnya mengalami peningkatan 35,6% atau USD64,0 juta dibandingkan tahun sebelumnya selaras dengan peningkatan pendapatan.

In 2023, revenue from other business segments reached USD426.5 million or up 52.1%, from USD280.4 million in 2022. The increase in revenue was contributed by stronger performance in almost all business activities in other business segments, e.g. an increase in oil transportation volume, regasification, and other lines. The increase shows the Company's success in developing other businesses than its core of natural gas trading and transmission.

The profitability of other business segments increased by 35.6% or USD64.0 million compared to the previous year in line with the increase in revenue.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Analisis kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disusun oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, serta telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited, dengan opini audit menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Secara umum, kinerja keuangan konsolidasian pada tahun 2023 mencatatkan kinerja yang tetap positif. Hal ini terlihat dari capaian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD278,1 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai sebesar USD326,2 juta. Dari sisi capaian posisi keuangan, Perusahaan berhasil mencatatkan total aset sebesar USD6.599,2 juta turun 8,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar USD7.194,9 juta. Perolehan kinerja keuangan tersebut dicapai seiring upaya-upaya perusahaan dalam meningkatan volume penjualan niaga gas, transmisi gas bumi, transportasi minyak, dan peningkatan pada segmen bisnis lainnya. Peningkatan volume dari beberapa segmen usaha tersebut berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan yang juga diikuti dengan alokasi biaya yang optimal berhasil menjaga profitabilitas Perusahaan tetap positif.

The following financial performance analysis has been prepared based on the Consolidated Financial Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and Subsidiaries ended on December 31, 2023 and December 31, 2022. The Consolidated Financial Report was prepared by management in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, and had been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of the Ernst & Young Global Limited network, with an audit opinion presents fairly in all material respects.

In general, consolidated financial performance in 2023 remained positive. This can be seen from the current year's profit of USD278.1 million attributable to the owners of the parent entity compared to USD326.2 million reached in the previous year. In terms of financial position achievements, the Company managed to record total assets of USD 6,599.2 million, down 8.3% compared to the previous year's USD 7,194.9 million. This financial performance was achieved in line with the company's efforts to increase the volume of gas trading sales, natural gas transmission, oil transportation and improvements in other business segments. The increase in volume from several business segments led to an increase in the Company's revenue, which was also associated with optimal cost allocation, which eventually translated into the a positive bottom line.

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan berasal dari tiga segmen usaha yaitu niaga/transmisi gas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dan usaha lainnya yang mencakup (1) pemrosesan gas, (2) transportasi minyak, (3) Jasa Jaringan dan (4) lainnya berupa: konstruksi dan operasi dan pemeliharaan. Pada tahun 2023, kontribusi masing-masing usaha terhadap pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

INCOME STATEMENT

Income

The Company's revenue comes from three business segments, namely gas trading/transmission, oil and gas exploration and production, and other businesses which cover (1) gas processing, (2) oil transportation, (3) Network Services and (4) others in the form of: construction and operations and maintenance. In 2023, the contribution of each business to business income was as given below:

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Niaga Gas	2.573,1	2.496,0	77,1	3,1	Gas Commercial
Transmisi Gas	215,1	206,9	8,2	4,0	Gas Transmission
Minyak dan Gas	431,6	585,3	(153,7)	(26,3)	Oil and Gas
Lainnya :					Others:
Pemrosesan Gas	66,2	72,4	(6,2)	(8,6)	Processing Gas
Transportasi Minyak	161,0	57,0	104,0	182,5	Oil Transportation
Pendapatan jasa regasifikasi	127,6	102,6	25,0	24,4	Regasification
Jasa Jaringan	22,4	22,6	(0,2)	(0,9)	Fiber Optic Rental
Lainnya :	49,2	25,9	23,3	90,0	Others
Total Pendapatan Usaha	**3.646,3**	**3.568,6**	**77,7**	**2,2**	**Total Revenue**
Total Beban Pokok Pendapatan	**(2.912,7)**	**(2.788,1)**	**(124,6)**	**4,5**	**Total Cost of Revenue**
Total Laba Kotor	**733,6**	**780,5**	**(46,9)**	**(6,0)**	**Total Gross Profit**

Sepanjang tahun 2023, PGN membukukan pendapatan sebesar US3,64 miliar, naik 2,2% dibanding 2022, yang tercatat sebesar USD3,57 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan segmen usaha niaga gas, Transmisi gas, Transportasi Minyak, Jasa Regasifikasi dan Pendapatan Usaha Lainnya. Tercatat kenaikan pendapatan segmen usaha Niaga Gas pada 2023 sebesar USD77,1 juta atau naik 3,1% dibanding 2022. Pendapatan segmen usaha niaga gas memberikan kontribusi sebesar 70,6% terhadap pendapatan konsolidasi. Meskipun terdapat penurunan pendapatan segmen minyak & gas yang disebabkan penurunan volume lifting dan penurunan rata-rata ICP, namun manajemen dapat mengantisipasi penurunan tersebut dengan meningkatkan pendapatan segmen transportasi minyak dengan signifikan. Hal tersebut merupakan keberhasilan manajemen dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Throughout 2023, PGN delivered US3.64 billion in revenue, up 2.2% compared to US 3.57 billion in 2022. The increase in revenue was due to an increase in the revenues of the gas trading, gas transmission, oil transportation, regasification services and other business segments. The increase in revenue of the Gas Trading business segment in 2023 was recorded at USD77.1 million or an increase of 3.1% compared to 2022. Revenue of the gas trading business segment contributed 70.6% to consolidated revenue. While there was a decline in oil & gas segment revenue due to a decrease in lifting volume and a decrease in average ICP, management was able to anticipate the decline by significantly increasing revenue from the oil transportation segment. That points to the management's success in implementing strategies to increase revenue generations.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Beban Pokok Pendapatan

Realisasi Beban pokok pendapatan tahun 2023 mencapai USD2,91 miliar, mengalami peningkatan 4,5% atau USD124,6 juta, dari tahun 2022 yang tercatat sebesar USD2,79 miliar. Peningkatan Beban pokok pendapatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Cost of Revenue

The realization of cost of revenue in 2023 reached USD2.91 billion, an increase of 4.5% or USD124.6 million, from USD2.79 billion reached in 2022. The increase in cost of revenue was consistent with the increase in revenue.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Pembelian Gas Bumi	1.914,8	1.797,3	117,5	6,5	Purchase of Natural Gas
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi	366,7	436,5	(69,8)	(16,0)	Oil and Gas Operations
LNG	63,6	63,4	0,2	0,3	LNG
Pemrosesan Gas	27,7	40,4	(12,7)	(31,4)	Gas Processing
Sewa dan Jasa Lainnya	28,1	17,0	11,1	65,3	Rent & Other Services
Beban Niaga & Infrastruktur	511,8	433,4	78,4	18,1	Direct Cost
Total	**2.912,7**	**2.788,1**	**124,6**	**4,5**	**Total**

Kenaikan beban pokok yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan terutama disebabkan penurunan beban pokok minyak & gas yang tidak sebanding dengan penurunan pendapatannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya komponen depresiasi, deplesi, dan amortisasi aset minyak & gas yang tidak serta dapat turun nilainya saat terdapat penurunan volume *lifting* maupun penurunan ICP.

The higher increase (by percentage) in cost of goods than the increase in revenue was mainly because the decrease in cost of oil & gas was not commensurate with the decrease in revenue. This was due to the depreciation, depletion and amortization components of oil & gas assets which do not necessarily decrease in value regardless of a decrease in lifting volume or a decrease in ICP.

Laba Bruto

Laba bruto PGN tahun 2023 turun 6% menjadi USD733,6 juta, dibandingkan dengan tahun 2022 yang teratat sebesar USD780,5 juta. Penurunan ini terutama disebabkan Kenaikan beban pokok yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan terutama disebabkan penurunan beban pokok minyak & gas yang tidak sebanding dengan penurunan pendapatannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya komponen depresiasi, deplesi, dan amortisasi aset minyak & gas yang tidak serta dapat turun nilainya saat terdapat penurunan volume *lifting* maupun penurunan ICP.

Gross Profit

PGN's gross profit in 2023 fell 6% to USD733.6 million, compared to USD780.5 million in 2022. The decrease was mainly due to the increase in cost of goods that was proportionally higher than the increase in revenue, especially due to the decrease in cost of oil & gas which was not commensurate with the decrease in revenue. This was due to the depreciation, depletion and amortization components of oil & gas assets which do not necessarily decease in value regardless of a decrease in lifting volume or a decrease in ICP.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik USD3 juta atau 1,5% menjadi USD201,7 juta di tahun 2023, dari USD198,7 juta di 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban Jasa Umum, dan Beban Perbaikan dan Pemeliharaan.

General and Administrative Expenses

General and administrative expenses increased by USD3 million or 1.5% to USD201.7 million in 2023, from USD198.7 million in 2022. This increase was mainly due to an increase in General services expenses, and Repairs and maintenance expenses.

Pendapatan/(Beban) Lain-Lain - *net*

Secara umum, Pendapatan/(Beban) Lain-lain – *net* relatif stabil di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dimana hanya mengalami peningkatan sebesar USD0,3 juta.

Laba Operasi

Pada tahun 2023, PGN mengalami penurunan laba operasi sebesar 8,4% menjadi USD542,4 juta dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD592,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan laba kotor.

Pendapatan Keuangan

Pada tahun 2023, pendapatan keuangan mengalami kenaikan sebesar 83,7% menjadi sebesar USD48,5 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD26,4 juta. Kenaikan pendapatan keuangan disebabkan keberhasilan manajemen dalam memanfaatan kas & setara kas yang dikelola melalui giro dan deposito untuk mengoptimalkan pendapatan keuangan.

Beban Keuangan

Beban Keuangan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,3% menjadi sebesar USD97,6 juta dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD132,4 juta. Penurunan beban keuangan terutama disebabkan *Liability Management* yang dilaksanakan dengan melakukan *buyback* obligasi PGN dan SAKA.

Laba/(Rugi) Selisih Kurs

Pada tahun 2023, terdapat laba kurs-neto sebesar USD7,4 juta, naik 207,3% atau sebesar USD14,3 juta jika dibandingkan tahun 2022 yang mengalami rugi kurs-neto sebesar USD6,9 juta. Kenaikan laba kurs neto ini terutama disebabkan adanya pelemahan mata uang JPY terhadap USD, sehingga menimbulkan laba kurs translasi atas pinjaman jangka panjang PGN dalam mata uang JPY. Selain itu terdapat penguatan kurs IDR terhadap USD sehingga menimbulkan laba kurs translasi atas net aset IDR.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba dari ventura bersama terdiri dari bagian laba TGI, NR, PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas. Pada tahun 2023, terdapat penurunan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD16,2 juta menjadi sebesar USD64,8 juta dari tahun 2022 sebesar USD81,0 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan laba, Nusantara Regas, dan PT Perta Samtan.

Other Income/(Expenses) - net

In general, Other Income/(Expenses) - net was relatively stable in 2023 compared to 2022 with an increase of only USD0.3 million.

Operating Profit

In 2023, PGN experienced a decrease of 8.4% in operating profit to USD542.4 million compared to USD592.2 million in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in gross profit.

Financial Income

In 2023, financial income increased 83.7% to USD48.5 million compared to USD26.4 million generated in 2022. The increase in financial income was due to management's success in utilizing cash & cash equivalents managed under current accounts and deposits to optimize financial income.

Financial Expenses

Financial expenses in 2023 decreased by 26.3% to USD97.6 million compared to USD132.4 million recorded in 2022. The decrease in financial expense was mainly due to Liability Management which was implemented by buying back PGN and SAKA bonds.

Profit/(Loss) Exchange Difference

In 2023, there was a net foreign exchange gain of USD7.4 million, an increase of 207.3% or USD14.3 million compared to a net foreign exchange loss of USD6.9 million incurred in 2022. The increase in net exchange rate profit was mainly due to weaker JPY against the USD, giving rise to translation exchange gain on PGN's long-term loans denominated in JPY. Apart from that, there was a strengthening of the IDR exchange rate against the USD, giving rise to a translation exchange rate gain on IDR net assets.

Joint Venture Profit Share

Profit share from the joint venture consists of the profit share of TGI, NR, PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, and PT Perta Daya Gas. In 2023, there was a decrease of USD 16.2 million in the share of profits from associated entities and joint ventures to USD64.8 million from USD81.0 million in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in profits of Nusantara Regas, and PT Perta Samtan.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Pembalikan/(Provisi) atas Sengketa Pajak

Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan 18 Surat Tagihan Pajak PPN sebesar IDR414 miliar atau USD27,6 juta karena Perusahaan dianggap belum menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan gas bumi periode 2012-2013. Selain itu anak usaha PGN yaitu Pertagas sedang dalam proses PK atas sengketa PPN tahun 2017 sehingga Persero membukukan provisi sebesar USD2,3 juta. Dengan demikian, provisi sengketa pajak yang dibukukan di tahun 2023 adalah sebesar USD 29,9 juta.

Reversal/(Provision) for Tax Disputes

Directorate General of Taxes ("DJP") issued to the Company 18 Value Added Tax Invoices of Rp414 billion in total or USD27.6 million for failure to issue on time the Tax Invoices for natural gas sales for the 2012-2013 period. Apart from that, PGN's subsidiary, Pertagas, was still in the judicial review process regarding the 2017 VAT dispute that triggered the Company to allocate a provision of USD 2.3 million. Thus, the tax dispute provision posted in 2023 was USD 29.9 million.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2023, PGN mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar USD523,9 juta turun 3,5% atau sebesar USD18,8 juta dibandingkan 2022 yang tercatat laba sebesar USD 542,7 juta Penurunan ini disebabkan penurunan Laba Operasi, provisi atas sengketa pajak, dan penurunan kontribusi laba dari *joint venture*.

Profit/(Loss) Before Income Tax

In 2023, PGN posted a profit before income tax of USD 523.9 million, a decrease of 3.5% or USD 18.8 million compared to USD 542.7 million recorded in 2022. The decrease was due to a decrease in Operating Profit, provisions for tax disputes, and a decrease in profit contribution from joint ventures.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2023, beban pajak-neto naik 4,2% menjadi USD147,3 juta dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD141,4 juta. Pajak kini yang diperhitungkan pada 2023 mengalami penurunan sebesar USD31,8 juta menjadi USD89,5 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD121,3 juta. Penurunan tersebut searah dengan penurunan laba sebelum pajak. Beban pajak tangguhan sendiri mengalami kenaikan menjadi USD57,7 juta di mana tahun sebelumnya sebesar USD20,0 juta. Kenaikan ini disebabkan karena provisi atas kontrak LNG tahun 2023 lebih kecil dari 2022, dan adanya pembayaran Unutilized Gas Volume di 2023.

Income Tax Expense

In 2023, net tax expenses increased by 4.2% to USD147.3 million compared to USD141.4 million in 2022. Current taxes calculated in 2023 decreased by USD31.8 million to USD89.5 million compared to USD121.3 million in 2022. This decrease was in line with the decrease in profit before tax. The deferred tax expense increased to USD57.7 million, compared to USD20.0 million in the previous year. This increase is due to the provisions for LNG contracts in 2023 being smaller than 2022, and the payment of Unutilized Gas Volume in 2023.

Adapun rincian beban pajak penghasilan berdasarkan wilayah operasional di berbagai negara adalah sebagai berikut:

The following are details of income tax expenses based on operational areas in various countries:

dalam juta USD kecuali dinyatakan lain | in million USD unless otherwise stated

Negara Country	**Bidang Usaha** Line of Business	**Laba Sebelum Pajak** Earning Before Tax	**Tarif Pajak Negara** Country Tax Rate	**Pajak Kini** Current Tax	**Pajak Tangguhan** Deferred Tax
Indonesia	Transportasi dan Distribusi Gas Gas Transportation and Distribution	519,9	22%	88,3	60,9
United States	Eksplorasi Minyak dan Gas Oil and Gas Exploration	3,8	29%	1,1	(3,2)
Singapore	Layanan Telekomunikasi Telecommunication Services	0,2	17%	0,05	-

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

1. Pada tahun 2023, dari perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak, PGN mengalami kerugian sebesar USD0,09 juta setelah sebelumnya pada 2022 juga mencatat kerugian sebesar USD0,6 juta.
2. Pada tahun 2023, laba selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar USD17,5 juta, dimana tahun 2022 mengalami rugi kurs sebesar USD15,4 juta. Pergerakan rugi selisih kurs menjadi laba selisih kurs penjabaran laporan keuangan ini menjadi kontributor tertinggi peningkatan penghasilan komprehensif lain.
3. Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan beban atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja setelah pajak aktuaria neto adalah sebesar USD2,5juta turun USD7,1 juta dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan pendatan sebesar USD4,6 juta. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja setelah pajak merupakan hasil perhitungan aktuaris atas imbalan kerja Perusahaan di mana setiap akhir periode terdapat penyesuaian variabel/asumsi sesuai dengan kondisi pada saat tersebut.

Other Comprehensive Income/(Loss)

1. In 2023, due to the adjustments made in the fair value of financial assets to fair value through other comprehensive income, after tax, PGN incurred a loss of USD 0.09 million, following a loss of USD 0.6 million incurred in 2022.

2. In 2023, foreign exchange gain due to the translation of financial statements reached USD 17.5 million, compared to a foreign exchange loss of USD 15.4 million in 2022. As foreign exchange loss turned into profit became the largest contributor to the increase in other comprehensive income.

3. In 2023, the Company incurred expenses for the re-measurement of post-employment benefit liabilities after net actuarial tax of USD2.5 million, a decrease of USD7.1 million compared to 2022 where the revenue generated was USD4.6 million. The re-measurement of post-employment benefit liabilities after tax was the result of actuarial calculations of the Company's employee benefits where adjustments are made at each period to variables/ assumptions in accordance with conditions at that time.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2023, PGN mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD278,1 juta atau turun 14,7% dibandingkan 2022 sebesar USD326,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penuruan laba sebelum pajak dan peningkatan beban pajak tangguhan.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2023, PGN recorded a profit for the year attributable to owners of the parent entity of USD278.1 million or a decrease of 14.7% compared to USD326.2 million in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in profit before tax that combined with an increase in deferred tax expense.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Pada tahun 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD98,5 juta sedangkan di 2022 laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD75,1 juta.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

In 2023, profit for the year attributable to non-controlling interests reached USD98.5 million, while in 2022 profit for the year attributable to non-controlling interests was USD75.1 million.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2023, PGN menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD293,0 juta, turun 6,9% dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD314,8 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2023, PGN generated total comprehensive income for the year attributable to owners of the parent entity of USD293.0 million, down 6.9% compared to USD314.8 million posted in 2022.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di 2023 adalah sebesar USD98,5 juta dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD75,1 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2023 reached USD98.5 million compared to USD75.1 million posted in 2022.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ%	Description
Marjin Laba Bersih	7,6	9,1	16,6	Net Profit Margin
Imbal Hasil atas Aset	4,2	4,5	7,1	Return on Asset
Imbal Hasil atas Ekuitas	7,9	9,5	17,1	Return on Equity

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Total Aset

Pada tahun 2023, total aset PGN tercatat sebesar USD6,6 miliar. Nilai total aset ini turun 8,3% dibandingkan 2022 yang sebesar USD7,20 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, penurunan piutang usaha, depresiasi aset tetap, amortiasi aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortiasi properti minyak dan gas.

Aset Lancar

Aset Lancar PGN pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,5% menjadi USD1,89 miliar jika dibandingkan 2022 yang sebesar USD2,21 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan kas & setara kas, dan piutang usaha. Penurunan kas & setara kas tahun 2023 terutama disebabkan oleh *Liability Management* yang dilaksanakan dengan melakukan *buyback* Obligasi PGN dan Obligasi SAKA. Sedangkan penurunan piutang usaha adalah merupakan usaha manajemen untuk meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan sehingga kas dan setara kas dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, investasi, maupun kegiatan pendanaan.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Assets

In 2023, PGN's total assets stood at USD 6.6 billion. The figure was down 8.3% compared to USD7.20 billion in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents, a decrease in trade receivables, depreciation of fixed assets, amortization of right-of-use assets, and depreciation, depletion and amortization in oil and gas properties.

Current Assets

PGN's Current Assets in 2023 decreased 14.5% to USD1.89 billion compared to USD2.21 billion in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in cash & cash equivalents, and trade receivables. The decrease in cash & cash equivalents in 2023 was mainly due to Liability Management with the buyback of PGN Bonds and SAKA Bonds. Meanwhile, the decrease in trade receivables represented the management's effort to increase cash received from customers and immediately use it for operational activities, investment and financing activities.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Kas dan setara kas	1.244,7	1.447,7	(203,0)	(14,0)	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	14,4	0,2	14,2	7100	Restricted cash
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	23,2	27,7	(4,5)	(16,2)	Financial assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Piutang usaha	448,2	568,3	(120,1)	(21,1)	Trade receivables
Piutang lain-lain	37,7	45,9	(8,2)	(17,9)	Other receivables
Persediaan	71,0	59,6	11,4	19,1	Inventories
Taksiran nilai pajak	16,0	22,7	(6,7)	(29,5)	Estimated claim tax for refund
Uang muka	11,0	17,4	(6,4)	(36,8)	Current maturities of advance
Beban dibayar di muka	26,3	22,9	3,4	14,8	Prepaid expenses
Total	**1.892,4**	**2.212,4**	**(320,0)**	**(14,5)**	**Total**

Aset Tidak Lancar

Pada tahun 2023, Aset Tidak Lancar turun sebesar 5,5% menjadi USD4,7 miliar jika dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD4,9 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap, aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortiasi properti minyak dan gas.

Non-Current Assets

In 2023, Non-Current Assets decreased 5.5% to USD4.7 billion compared to USD4.9 billion recorded in 2022. The decrease was mainly caused by depreciation of fixed assets, right-of-use assets, and depreciation, depletion and amortization in oil and gas properties.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	128,8	115,0	13,8	12,0	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	45,8	47,1	(1,3)	(2,8)	Trade receivables
Piutang lain-lain pihak ketiga	63,9	65,4	(1,5)	(2,3)	Other long-term receivables
Uang Muka, Bagian Tidak Lancar	35,0	48,9	(13,9)	(28,4)	Advances - net of current maturities
Beban Dibayar di Muka, Bagian Tidak Lancar	37,4	40,1	(2,7)	(6,7)	Prepaid expenses, non-current portion
Penyertaan Saham	307,2	302,8	4,4	1,5	Investment in shares of stock
Aset Tetap	2.621,2	2.633,4	(12,2)	(0,5)	Fixed assets
Aset Hak Guna	413,2	462,4	(49,2)	(10,6)	Right-of-use asset
Aset Eksplorasi dan Evaluasi	11,1	108,5	(97,4)	(89,8)	Exploration and evaluation assets
Properti Minyak dan Gas	870,1	946,7	(76,6)	(8,1)	Oil and gas properties
Aset takberwujud - neto	2,5	2,4	0,1	4,1	Goodwill and other intangible assets
Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak	51,5	53,9	(2,4)	(4,5)	Estimated claim tax for refund
Aset Pajak Tangguhan	111,4	147,8	(36,4)	(24,6)	Deferred tax assets
Lain-Lain	7,7	8,1	(0,4)	(5,0)	Others
Total	**4.706,8**	**4.982,5**	**(275,7)**	**(5,5)**	**Total**

Liabilitas

Pada tahun 2023, PGN membukukan Total Liabilitas sebesar USD3,0 miliar. Nilai Total Liabilitas ini turun 18,5% jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD3,75 miliar. Penurunan Total Liabilitas sebesar USD694,2 juta terutama disebabkan penurunan utang bank jangka pendek, bagian jangka pendek dari pinjaman dari pemegang saham, bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka pendek, liabilitas sewa jangka panjang, dan pinjaman dari pemegang saham.

Liabilities

In 2023, PGN had a Total Liabilities of USD3.0 billion. The amount of Total Liabilities decreased 18.5% compared to USD3.75 billion recorded in 2022. The decrease in Total Liabilities of USD694.2 million was mainly due to a decrease in short-term bank loan, short-term portion of loans from shareholders, short-term portion of short-term bank loans, long-term lease liabilities, and loans from shareholders.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2023, Liabilitas Jangka Pendek naik 47,3% menjadi USD469,8 juta jika dibandingkan tahun 2022 sebesar USD992,6 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan utang obligasi yang semula dicatat di liabilitas jangka Panjang dipindahkan ke liabilitas jangka pendek di tahun 2023 karena jatuh tempo di tahun 2024.

Short-term Liabilities

In 2023, Short-Term Liabilities increased 47.3% to USD469.8 million compared to USD992.6 million in 2022. The increase was mainly due to the reposting of bonds payable from originally in long-term liabilities to short-term liabilities in 2023 due to their now imminent maturity date in 2024.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Utang Usaha	245,2	236,2	9,0	3,8	Trade payables
Utang Lain-Lain	117,3	174,5	(57,2)	(32,8)	Other payables
Utang bank jangka pendek	2,6	0,0	2,6	-	Accrued liabilities
Utang obligasi	552,6	0,0	552,6	-	Short-term bank loans
Liabilitas yang masih harus dibayar jangka pendek	352,7	395,6	(42,9)	(10,8)	Short-term portion of long-term bank loans
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	39,7	16,7	23,0	137,7	Short-term portion of shareholder loan
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	34,8	31,4	3,4	10,8	Short-term portion of lease liabilities
Utang pajak jangka pendek	33,6	51,5	(17,9)	(34,8)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	75,9	66,3	9,6	14,5	Short-term employee benefits liabilities
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	8,0	20,3	(12,3)	(60,6)	Short-term portion of deferred revenues
Total	**1.462,4**	**992,6**	**469,8**	**47,3**	**Total**

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang turun di tahun 2023 sebesar 42,2% menjadi USD1,59 miliar dibandingkan 2022 sebesar USD2,76 miliar. Penurunan USD1,16 juta tersebut terutama disebabkan adanya *buyback* obligasi dan saldo obligasi dipindahkan ke liabilitas jangka pendek karena akan segera jatuh tempo.

Long Term Liabilities

Long-Term Liabilities decreased in 2023 by 42.2% to USD1.59 billion compared to USD2.76 billion in 2022. The decrease of USD1.16 million was mainly due to bond buybacks and bond balances being transferred to short-term liabilities as they would become mature soon.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Pinjaman bank jangka panjang	520,0	335,3	184,7	55,1	Non-current bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	395,9	443,0	(47,1)	(10,6)	Non-current lease liabilities
Utang pajak jangka panjang	57,3	130,2	(72,9)	(56,0)	Non-current taxes payable
Utang obligasi jangka panjang	0,0	1.323,1	(1.323,1)	(100,0)	Non-current bonds payable
Liabilitas pajak tangguhan	116,4	93,7	22,7	24,2	Deferred tax liabilities
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka Panjang	68,5	56,9	11,6	20,4	Accrued liabilities-Non-current
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	146,7	108,3	38,4	35,4	Asset abandonment and site restoration obligations
Liabilitas imbalan pascakerja	136,1	123,0	13,1	10,7	Post-employment benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	155,5	147,1	8,4	5,7	Deferred revenues
Total	**1.596,4**	**2.760,5**	**(1.164,1)**	**(42,2)**	**Total**

Ekuitas

Pada tahun 2023, ekuitas Perusahaan mengalami kenaikan 2,9% menjadi USD3,54 miliar jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar USD3,44 miliar. Hal ini disebabkan pada 2023 Perusahaan berhasil kembali mencatatkan perolehan laba bersih.

Equity

In 2023, the Company's equity increased 2.9% to USD3.54 billion compared to USD3.44 billion recorded in 2022. The increase was due to the Company's success in posting net profit again this year.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	344,0	344,0	0,0	0,0	Equity attributable to owner of the Parent Entity
Tambahan modal disetor	(467,6)	(467,6)	0,0	0,0	Other paid-in capital
Saldo Laba					Retained earnings
Dicadangkan	2.592,2	2.494,3	97,9	3,9	Appropriated
Tidak dicadangkan	278,1	326,2	(48,1)	(14,7)	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	(47,9)	(62,8)	14,9	(23,7)	Other components of equity
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.698,9	2.634,2	64,7	2,5	Total Equity attributable to owner of the Parent Entity
Kepentingan nonpengendali	841,5	807,6	33,9	4,2	Non-controlling interests
Total	**3.540,4**	**3.441,8**	**98,6**	**2,9**	**Total**

LAPORAN ARUS KAS

Pada tahun 2023, posisi kas dan setara kas turun sebesar 14% menjadi USD1,24 miliar jika dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD1,45 miliar. Kenaikan saldo kas dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi, dan adanya penerimaan pinjaman jangka panjang di tahun 2023.

CASH FLOW STATEMENT

In 2023, the position of cash and cash equivalents decreased 14% to USD1.24 billion compared to USD1.45 billion in 2022. The increase in cash balance was due to an increase in cash received from customers, a decrease in the use of cash flow for investment activities, and long-term loans taken in 2023.

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Arus kas dari aktivitas Operasi	723,7	969,7	(246,0)	(25,4)	Cash Flow from Operating Activities
Arus kas dari aktivitas Investasi	(57,7)	30,4	(88,1)	(289,8)	Cash Flows from Investing Activities
Arus kas dari aktivitas Pendanaan	(878,2)	(995,7)	117,5	(11,8)	Cash Flows from Financing Activities
Pengaruh perubahan Kurs Neto dari Kas dan Setara Kas	9,3	(60,0)	69,3	(115,5)	Net Effects of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents
Kenaikan/(Penurunan) - neto Kas dan Setara Kas	(202,9)	(55,6)	(147,3)	264,9	Net Increase/(Decrease) Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.447,7	1.503,3	(55,6)	(3,7)	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	**1.244,7**	**1.447,7**	**(203,0)**	**(14,0)**	**Cash and Cash Equivalents at End of Year**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2023, arus Kas dari Aktivitas Operasi turun sebesar 25,4% menjadi USD723,7 juta jika dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD969,7 juta. Penurunan ini terutama disebabkan kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya.

Cash Flow from Operating Activities

In 2023, cash flow from operating activities decreased 25.4% to USD723.7 million compared to USD969.7 million in 2022. The decrease was mainly due to an increase in payments to suppliers and payments for operating expenses and other operating activities.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pada tahun 2023, arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan arus kas keluar sebesar USD57,7 juta, sedangkan pada tahun 2022 arus Kas dari Aktivitas Investasi masuk sebesar USD30,4 juta. Pergerakan arus kas masuk di tahun 2022 menjadi arus kas keluar di tahun 2023 terutama disebabkan penurunan signifikan penerimaan dividen dari ventura bersama.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 tercatat USD878,2 juta, atau turun USD117,5 juta dari tahun 2022 yang sebesar USD995,7 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penerimaan pinjaman bank.

Cash Flows from Investing Activities
In 2023, cash flow from investing activities was a cash outflow of USD 57.7 million, while in 2022 cash inflow was cash inflow of USD 30.4 million. The movement of cash inflows in 2022 to cash outflows in 2023 was mainly due to a significant decrease in dividends received from joint ventures.

Cash Flow from Financing Activities
Cash outflow used for financing activities in 2023 was recorded at USD878.2 million, or a decrease of USD117.5 million from USD995.7 million recorded in 2022. The decrease was s mainly due to bank loans taken during the year.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
Ability to Pay Debt

Kemampuan membayar utang Perusahaan diukur melalui *debt to equity ratio* dan *debt service coverage ratio*. Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, debt to equity ratio mengalami penurunan menjadi 43,6% dari 62,5% pada 31 Desember 2022, dan *debt service coverage ratio* mengalami penurunan menjadi 1,1% dari 1,3% di tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perseroan memiliki tingkat kemampuan membayar utang yang baik.

The Company's debt repayment ability is measured through the debt to equity ratio and debt service coverage ratio. As of the financial year ended December 31, 2023, the debt to equity ratio had decreased to 43.6% from 62.5% on December 31, 2022, and the debt service coverage ratio decreased to 1.1% from 1.3% in the previous year. This demonstrates the Company's ability to settle its financial obligations.

Uraian	2023	2022	Δ%	Description
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	43,6	62,5	(30,2)	Debt to Equity Ratio (%)
Utang Bersih/EBITDA (x)	0,3	0,6	(52,0)	Net Debt/EBITDA (X)
EBITDA/Beban Bunga (x)	11,1	9,2	21,0	EBITDA/Interest Expense (X)
EBITDA/Beban Bunga + Pokok Pinjaman (x)	1,1	1,3	(16,7)	EBITDA/Interest Expense+Principle (X)

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Receivables Collectibility Level

Perusahaan mengukur tingkat kolektibilitas piutang dengan menggunakan *cash convertion cycle*. Hingga akhir 2023, PGN memerlukan 28 hari untuk menghasilkan kas dari kegiatan usahanya, sedangkan pada tahun sebelumnya memerlukan 40 hari.

The Company measures the level of collectibility of receivables using the cash conversion cycle. Until the end of 2023, the days PGN needed to generate cash from its business activities was 28 days compared to 40 days in the previous year.

Uraian	2023	2022	Unit	Description
Pendapatan	3.646,3	3.568,6	juta | million USD	Revenue
Piutang Usaha	494,0	615,4	juta | million USD	Trade Receivable
Collection Period dalam hari	49,5	62,9	hari | days	Collection Period in days
HPP	2.912,7	2.788,1	juta | million USD	COGS
Inventory	71,0	59,6	juta | million USD	Inventory
Inventory Turnover dalam hari	8,9	7,8	hari | days	Inventory Turnover in days
HPP	2.912,7	2.788,1	juta | million USD	COGS
Utang Usaha	245,2	236,2	juta | million USD	Trade Payable
Payment Period dalam hari	30,7	30,9	hari | days	Payment Period in days
Jumlah hari	365,0	365,0	juta | million USD	number days
Jumlah Hari Konversi Kas	27,6	39,8	hari | days	Cash Conversion Cycle

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perusahaan memperhitungkan perimbangan antara komposisi pinjaman yang dikenakan bunga serta ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2023 struktur modal PGN adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Company's capital structure takes into account the balance between the composition of loans bearing interest and equity. Based on the 2023 Financial Statements, PGN's capital structure is as follows:

Juta USD | Million USD

Uraian	2023	2022	Δ	Δ%	Description
Total Pinjaman	**1.545,6**	**2.149,6**	**(604,0)**	**(28,1)**	**Interest Bearing Debt**
Utang bank jangka pendek	2,6	-	2,6	100	Current bank loans
Utang obligasi	552,6	-	552,6	100	Bonds payable
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	39,7	16,7	23,0	137,6	Current portion of non-current bank loans
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	34,8	31,4	3,4	10,8	Current portion of lease liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	520,0	335,3	184,7	55,1	Non-current bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	395,9	443,0	(47,1)	(10,6)	Non-current lease liabilities
Utang obligasi jangka panjang	-	1.323,1	(1.323,1)	(100,0)	Non-current bonds payable
Ekuitas	**3.540,4**	**3.441,8**	**98,6**	**2,9**	**Equity**
Komposisi Struktur Modal	**30:70**	**38:62**			**Capital Structure Composition**

Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang kepada entitas yang berelasi dengan Pemerintah, serta utang obligasi. Total Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan tahun 2023 adalah sebesar USD 1,55 miliar menurun sebesar 28,1% dibandingkan dengan komposisi utang berbunga tahun 2022 disebabkan karena adanya pelaksanaan *Liability Management* yang dilakukan oleh Perusahaan.

The composition of the Company's interest bearing debt consists of short-term loans, long-term loans to entities related to the Government, and bonds payable. The Company's total interest bearing debt composition in 2023 was USD 1.55 billion, a decrease of 28.1% compared to the interest bearing debt composition in 2022 due to the Company's sound implementation of Liability Management.

Komposisi ekuitas Perusahaan sebesar USD3,54 miliar, terdiri dari modal saham disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Pada Desember 2003, saham Perusahaan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas Negara Republik Indonesia, dan sejak 2018 telah di-inbreng kepada PT Pertamina (Persero) sejalan dengan inisiatif pembentukan holding migas.

The Company's equity composition was USD3.54 billion, consisting of paid-in share capital, retained earnings and other equity components. In December 2003, the Company's shares was first listed on the Indonesian Stock Exchange with majority shares owned by the Republic of Indonesia, and has since 2018 been affiliated to PT Pertamina (Persero) in line with the initiative to establish an oil and gas holding.

Pada tahun 2023, tidak terdapat aksi korporasi yang mengubah struktur ekuitas PGN.

In 2023, there were no corporate actions that would've changed PGN's equity structure.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. PGN telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar. Manajemen juga senantiasa memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas dan *debt service ratio*. Lebih lanjut, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan peninjauan kesesuaian struktur modal dan utang Perseroan dengan tujuan strategis dan selera risiko Perusahaan (*risk appetite*).

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PGN strives to maintain an optimal capital structure in order to achieve business objectives, including by maintaining a healthy capital ratio and maximizing shareholder value. Certain debt instruments of the Group have financial ratios that require a maximum leverage ratio. PGN has complied with all capital requirements set by creditors. Similarly, the management constantly monitors capital using a variety of financial leverage ratios, most notably the debt-to-equity and debt service ratios. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors also review the conformity of the Company's capital and debt structure with the Company's strategic objectives and risk appetite.

DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN menetapkan kebijakan struktur modal dengan mempertahankan rasio utang sesuai (tidak lebih) dari *financial covenant* dalam perjanjian pinjaman PGN kepada pihak kreditur sebesar 67%:33%. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung berdasarkan pembagian antara porsi utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE

PGN sets a capital structure policy by maintaining a debt ratio in accordance with (not exceeding) the financial covenant in the PGN loan agreement with creditors at 67%:33%. The debt-to-equity ratio is calculated based on the division of the interest-bearing debt portion to the Company's equity.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitment for Capital Expenditure

Pada akhir 2023, tidak terdapat adanya ikatan yang material terkait dengan investasi barang modal di PGN.

At the end of 2023, there were no material commitments related to capital expenditure at PGN.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
Realization of Capital Expenditure

Setiap tahun PGN mengalokasikan investasi barang modal (*capex*) yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan pertumbuhan. Penjelasan atas realisasi investasi barang modal pada 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pengeluaran Barang Modal

Pada 2023, PGN melakukan investasi barang modal di beberapa sektor yaitu sektor *Upstream, Midstream, Downstream*, dan *Supporting/Related*.

2. Tujuan Pengeluaran Barang Modal

Investasi pada sektor *Upstream* merupakan pengembangan lapangan hulu minyak dan gas bumi, yang bertujuan meningkatkan produksi pada lapangan yang sudah beroperasi. Investasi juga dilakukan pada lapangan yang berada pada tahap pengembangan dan eksplorasi sebagai komitmen Perusahaan kepada Pemerintah dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi. Investasi pada sektor *Midstream* dan *Downstream* terdiri dari pembangunan jaringan pipa dan fasilitas penunjang distribusi gas bumi serta pembangunan LNG dan Mini LNG, yang bertujuan untuk *customer attachment*, meningkatkan keandalan integritas jaringan, dan meningkatkan kapasitas fasilitas penunjang. Hal ini merupakan upaya PGN memberikan layanan prima kepada pelanggan. Investasi pada sektor *Supporting/Related* bertujuan mendukung bisnis utama PGN yaitu niaga dan transportasi gas bumi seperti telekomunikasi, *property & services*, serta *construction & operation maintenance*.

Each year, PGN allocates capital expenditure (capex) to develop its business and spur growth. The realization of capital expenditure in 2023 is explained as follows:

1. Types of Capital Expenditure

In 2023, PGN invested in capital goods in several sectors, namely Upstream, Midstream, Downstream, and Supporting/Related.

2. Capital Expenditure Objectives

Investment in the Upstream sector is a development of the upstream oil and natural gas field, which is aimed at scaling up production in fields that are already operational. Investment is also made in fields that are in the development and exploration stages to show the Company's commitment to the Government in developing oil and natural gas fields. Investment in the Midstream and Downstream sectors consisted of the construction of pipeline networks, supporting facilities for natural gas distribution, and the construction of LNG and Mini LNG. The purpose is to achieve customer attachment, improve the reliability of network integrity, and increase the capacity of supporting facilities. These are PGN's efforts to provide excellent service to customers. Investment in the Supporting/Related sector aims to support the main business of PGN, namely natural gas trading and transportation such as telecommunications, property & services, and construction & operation maintenance.

3. Jumlah Pengeluaran Barang Modal

3. Capital Expenditure Amount

Nilai Belanja Modal Capital Expenditure Value	**Target 2023 (USD Juta)** (USD Million)	**Realisasi** Realization	
		USD Juta USD Million	**(%) *Full Year***
Downstream, Midstream & Others	268,6	146,8	54,6%
Upstream (SAKA Energi Indonesia)	162,3	85,1	52,4%
Total	**430,9**	**231,9**	**53,8%**

4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk biaya investasi tersebut diatas menggunakan dana internal perusahaan yang dikombinasikan dengan pinjaman eksternal.

Fasilitas Pendanaan yang Dimiliki Perusahaan

Pada tahun 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas club deal berjangka dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk dengan total fasilitas USD800 Juta terdiri dari fasilitas A USD600 Juta (*Committed*) serta Fasilitas B USD200 Juta (*Uncommitted*), dan telah dilakukan penarikan pada Fasilitas A sebesar USD300 Juta yang digunakan untuk sebagian pendanaan pelaksanaan pembelian obligasi Perusahaan.

5. Mata Uang yang Menjadi Denominasi

Masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS. Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada aset dan liabilitas, moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan yakni dalam bentuk Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain

1. Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga
   PGN terus melakukan pembangunan jaringan gas rumah tangga, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memperluas penggunaan gas bumi sekaligus mengurangi pemakaian LPG yang pada akhirnya akan menurunkan angka Impor LPG dan meningkatkan cadangan devisa negara. Sampe dengan tahun 2023, jumlah pelanggan rumah tangga yang dikelola oleh PGN sebanyak 825 ribu Pelanggan.
2. Implementasi Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Sektor Industri dan Kelistrikan (HGBT)
   Sejak bulan April tahun 2020, PGN Group telah menjalankan penugasan penyaluran volume gas bumi dengan harga tertentu kepada 7 sektor industri dan pembangkit tenaga listrik dengan volume rata-rata pada tahun 2023 penyaluran HGBT mencapai 538 BBTUD.

4. Source of Funding

The fund for the investment outlay mentioned above was sourced from the Company's internal fund plus with external loans.

Funding Facilities Owned by the Company

In 2023, the Company signed a term club deal facility agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk with a total facility of USD800 Million consisting of Facility A USD600 Million (Committed) and Facility B USD200 Million (Uncommitted), after which a withdrawal of USD300 Million had been made on Facility A and used partly to fund the purchase of the Company's bond.

5. Currency Denomination

Each entity in the Group considers key indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company has decided to use the United States dollar ("USD" or "US dollar") as its functional currency and use the same currency in the presentation of its consolidated financial statements. Monetary balances in non-US Dollar denominations are posted in assets and liabilities, monetary in foreign currencies owned by the Company, namely in the form of Indonesian Rupiah, Japanese Yen and Singapore Dollars.

Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

1. Household Gas Network Development Program

   PGN continues to build household gas networks, as a form of support to the government in expanding the use of natural gas while reducing the use of LPG which will ultimately reduce the number of LPG imports while increasing the country's foreign exchange reserves. Until 2023, the PGN had a total of 825,000 household customers under its management.

2. Implementation of Certain Natural Gas Prices for 7 Industrial and Electricity Sectors (HGBT)
   Since April 2020, PGN Group has carried out assignments to distribute volumes of natural gas at certain prices to 7 industrial sectors and power plants with an average volume in 2023 of HGBT distribution reaching 538 BBTUD.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
Realization of Capital Expenditure

3. Implementasi Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik.
   PGN bersama entitas di Pertamina Group telah mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan gasifikasi pembangkit dengan melakukan berbagai kegiatan pra proyek sejak awal penugasan Kepmen 13/2020, sebagai upaya percepatan penyelesaian program yang meliputi kegiatan perizinan, koordinasi Pemda/ *stakeholder* lokal, studi skema logistik, survei lokasi, survey data primer *onshore & offshore*, penyusunan dokumen teknis & pelelangan, serta pembahasan lahan untuk lokasi fasilitas regasifikasi bersama PLN. Namun di tengah perjalanan program ini mengalami perubahan karena adanya kebijakan dari Menteri BUMN dengan menunjuk PLN sebagai penanggung jawab program dan penugasan kepada Pertamina telah dicabut oleh Menteri ESDM pada 22 Desember 2023.

3. Implementation of the provision of LNG supply and infrastructure development, as well as the conversion of oil fuel use to LNG in the supply of electricity.
   PGN has worked with other entities in the Pertamina Group to implement and support the implementation of generator gasification with pre-project activities since the beginning of the assignment of Ministerial Decree 13/2020, as an effort to accelerate the completion of programs that involved licensing activities, regional government/local stakeholder coordination, logistics scheme studies, site surveys, onshore & offshore primary data survey, preparation of technical documents & tenders, as well as discussion of land for the location of regasification facilities with PLN. However, along the way, this program underwent changes due to a change in policy of the Minister of BUMN where it appointed PLN as the authorize party to run the program and assignments to Pertamina was revoked by the Minister of Energy and Mineral Resources on December 22 2023.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Report Date

Setelah tanggal periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2023 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, tidak terdapat informasi material yang terjadi di PGN dan Entitas Anak maupun Afiliasi.

After the reporting period ended on December 31, 2023 until this Annual Report was published, there was material information that neither PLN nor its Subsidiaries and Affiliates need to disclose.

PROSPEK USAHA
Business Outlook

KONDISI MAKRO EKONOMI 2024

Ekonomi global diprediksi masih akan menghadapi tantangan yang signifikan pada tahun 2024. Risiko yang memperlemah ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mulai dari konflik dan tensi geopolitik, serta inflasi dunia yang masih akan bertahan tinggi, tingkat suku bunga yang ditahan dilevel yang tinggi, pelemahan ekonomi Tiongkok yang berpengaruh pada pelemahan perdagangan global, dan *shock* akibat perubahan iklim. IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) per Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan mencapai sebesar 3,1%. Dibandingkan dengan perkiraan WEO pada bulan Oktober 2023, perkiraan untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,2 poin persentase lebih tinggi, yang mencerminkan peningkatan di Tiongkok, Amerika Serikat, serta negara-negara *emerging market* dan negara berkembang. Sementara, World Bank memperkirakan tahun 2024 hanya tumbuh 2,4%, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2023 yang sebesar 2,6%.

Berdasarkan RAPBN 2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%.

Dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia, PGN sebagai Subholding Gas terus meningkatkan integrasi infrastruktur gas bumi dan berupaya untuk dapat meraih peningkatan pengelolaan niaga gas bumi sekitar 954 BBTUD pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 3,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi pendorong pertumbuhan *demand*, sektor industri masih menjadi pengguna terbesar dilanjutkan oleh sektor kelistrikan. Adapun pertumbuhan penggunaan gas di sektor Industri didorong oleh segmen Industri *smelter* dan kilang yang sejalan dengan program Pemerintah dalam mendorong pembangunan *smelter* dan pengembangan kilang untuk meningkatkan nilai produk komoditas gas bumi. Selain itu dalam menjalankan peranya sebagai agen pembangunan pada tahun 2024, PGN juga melanjutkan inisiatif yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk membangun jaringan gas rumah tangga sekaligus merambah pelanggan kecil yang berada di sekitarnya.

MACROECONOMIC CONDITIONS IN 2024

The global economy is predicted still face significant challenges in 2024. Risks that will weaken the global economy in 2024 are predicted to start from geopolitical conflicts and tensions, as well as global inflation that will remain high, interest rates that are held at high levels, and the ongoing weakening of the Chinese economy, which affects the weakening of global trade, as well as shocks due to climate change. In its January 2024 World Economic Outlook (WEO), the IMF estimates that economic growth in 2024 will reach 3.1%. Compared with the October 2023 WEO forecast, the forecast for 2024 is approximately 0.2 percentage points higher, reflecting improvements in China, the United States, as well as emerging markets and developing countries. Moreover, the World Bank estimates that it will only grow by 2.4% in 2024, lower than growth in 2023, which stood at 2.6%.

Based on the 2024 RAPBN, the Indonesian Government has set a target of 5.2% for Indonesia's economic growth in 2024, higher than projected global economic growth. Several institutions have projected Indonesia's economic growth in 2024 include the World Bank, which projected 4.9%, the ADB and IMF, which projected 5.0%, and the OECD, which projected 5.2%.

In supporting Indonesia's economic growth targets, PGN as a Gas Subholding continues to improve the integration of natural gas infrastructure and strive to achieve increased natural gas trade management of around 954 BBTUD in 2024, or an increase of 3.4% compared to the realization in the previous year. In terms of driving demand growth, the industrial sector is still the largest user, followed by the electricity sector. The growth in gas use in the Industrial sector is driven by the smelter and refinery Industrial segment, which is in line with the Government's program to encourage the construction of smelters and refinery development to increase the value of natural gas. In addition, in carrying out its role as an agent of development in 2024, PGN will also continue the initiative to build household gas networks while reaching small-scale customers in their surrounding areas, which is an assignment from the Government.

PROSPEK USAHA
Business Outlook

Pencapaian target-target pertumbuhan tersebut memerlukan kehandalan atas ketersediaan pasokan, dimana saat ini pasokan gas eksisting yang berasal dari cadangan konvensional yang cenderung mengalami penurunan karena *natural decline*. Namun ke depanya dengan adanya temuan-temuan cadangan gas baru dan juga perluasan atas kapasitas produksi LNG domestik eksisting, pemenuhan kebutuhan *demand* domestik yang diproyeksikan semakin meningkat akan dipenuhi dengan *supply* LNG.

The achievement of these growth targets requires the availability of reliable supply, in which the existing gas supplies originating from conventional reserves currently tend to decrease due to natural decline. However, in the future, with the discovery of new gas reserves and the expansion of existing domestic LNG production capacity, the fulfillment of domestic demand, which is projected to increase, will be met by LNG supply.

Dengan dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2023, masih terdapat gap antara pencapaian Perusahaan di tahun 2023 dengan target dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2026, diantaranya gap dalam volume pengelolaan niaga gas bumi, gap laba bersih yang disebabkan tidak tercapainya target volume niaga dan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang menggerus agregat laba bersih Perusahaan, dan terdapat beberapa proyek strategis yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana.

With the recently dynamic business landscape in which the Company operated in 2023, there happened to be a gap between the Company's achievements in 2023 and the long term target as stated under its 2021-2026 Long Term Plan (RJPP), including a gap in the volume of natural gas trade management, a gap in net profit caused by shortfalls in commercial volume targets and the implementation of Certain Natural Gas Prices (HGBT) which eroded the Company's aggregate net profit, and delayed strategic projects than planned.

Menghadapi kondisi yang demikian, PGN telah menyiapkan program strategis pengembangan usaha dengan tujuan untuk tetap menumbuhkan bisnis di tengah situasi yang menantang, mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis/ produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (*low carbon business*) yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar pengembangan bisnis, yaitu *Grow, Adapt*, dan *Step-out* (GAS).

In addressing such conditions, PGN has prepared a strategic business development program with the aim of continuing to grow the business in the midst of a challenging situation, taking the momentum of economic improvement, acceleration in the energy transition, as well as the need to develop derivative business/ product segments in the future that support the reduction in carbon emissions (low carbon business), which is outlined in 3 (three) pillars of business development, namely Grow, Adapt, and Step-out (GAS).

Adapun program strategis GAS tersebut meliputi:

1. G*row and maintain gas business.*
   Program peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur gas, CNG, maupun LNG. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya: penyediaan infrastruktur transmisi, distribusi, dan regasifikasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmentasi pelanggan (Industri, Komersial, dan Rumah Tangga), penambahan portofolio pasokan gas pipa (dan LNG sesuai kebutuhan), penyediaan infrastruktur *beyond pipeline* (CNG & LNG), optimasi bisnis upstream melalui peningkatan kegiatan produksi dan eksplorasi, serta pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan penyaluran BBM melalui pipa maupun peningkatan lifting migas dengan bersinergi bersama Pertamina Group.

The GAS strategic program includes:

1. Grow and maintain gas business.
   Program to increase the use of natural gas through the development of gas, CNG, and LNG infrastructure. Some of the work programs that will be implemented include the provision of natural gas transmission, distribution, and regasification infrastructure to meet the needs of various customer segments (Industrial, Commercial, and Household), increasing the gas supply pipeline portfolio (and LNG as needed), and the provision of beyond pipeline (CNG & LNG) infrastructure, the optimization of upstream business by increasing production and exploration activities; and infrastructure development to support fuel distribution through pipelines and an increase in oil and gas lifting in synergy with Pertamina Group.

2. A*dapt business, pursue adjacent opportunities.*
   Program penyediaan layanan bisnis turunan yang mendukung peningkatan kinerja melalui diversifikasi produk maupun optimalisasi portofolio yang sudah dimiliki oleh PGN. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di antaranya: pelaksanaan strategi pertumbuhan secara organik dan penjajakan secara anorganik dalam penyediaan fasilitas untuk LNG Bunkering, LNG Trading dan Global Venture, pengembangan bisnis LNG Hub, pengembangan infrastruktur mini LNG liquefaction plant; serta total energy solution dalam rangka penyediaan jasa dan layanan penunjang kepada pelanggan.
3. S*tep-out and scale to new businesses.*
   Program penyiapan bisnis baru mendukung hilirisasi industri berbasis gas (petrochemical), bisnis *clean and renewable energy* (biomethane), dan program pendukung *Net Zero Emission* lainnya (seperti Hidrogen/Amonia dan CO2 *transport*) dengan terlebih dahulu mengembangkan kompetensi, akses ke pasar, dan pasokan yang saat ini belum dimiliki oleh PGN melalui kemitraan strategis bersama badan usaha lainnya.

PENGEMBANGAN USAHA

Beberapa langkah strategis telah disiapkan PGN dalam menghadapi tantangan mendatang dan upaya pengembangan bisnis yang menyebar ke seluruh potensi energi di bidang gas khususnya di Indonesia. Harapannya adalah PGN tidak hanya dominan di bidang midstream yaitu infrastruktur dan distribusi gas bumi tetapi juga menguasai ke seluruh rantai bisnis gas bumi dari hulu ke hilir.

LNG *Hub* Arun

Terminal LNG Arun terletak di jalur perdagangan yang strategis di antara negara tujuan pemasok dan pembeli LNG serta dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Oleh sebab itu, Terminal LNG Arun memiliki aspirasi untuk menjadi LNG Hub leader di Asia pada tahun 2030.

2. Adapt business, pursue adjacent opportunities.
   Program to provide derivative business services that support performance improvement through product diversification and optimization of PGN's existing portfolio. Some of the work programs that will be implemented include: implementation of organic growth strategies and inorganic exploration in the provision of facilities for LNG Bunkering, LNG Trading, and Global Venture, development of the LNG Hub business, development of mini LNG liquefaction plant infrastructure; as well as total energy solutions in order to provide services and supporting services to customers.
3. Step-out and scale to new businesses.
   Program to prepare new businesses to support the downstream gas-based industry (petrochemical), clean and renewable energy (biomethane) business, and other Net Zero Emission supporting programs (such as Hydrogen/Ammonia and CO2 transport) by first developing competence, access to markets, and supply which is not currently owned by PGN through strategic partnerships with other business entities.

BUSINESS DEVELOPMENTS

PGN has prepared several strategic steps to address future challenges and business development efforts that span all energy potential in the gas sector, particularly in Indonesia. The goal is for PGN to dominate not only the midstream sector, including natural gas infrastructure and distribution, but also the entire value chain, from upstream to downstream.

Arun LNG Hub

The Arun LNG Terminal is located on a strategic trade route between LNG supplier and buyer destination countries and is close to developing LNG markets in Southeast Asia and South Asia. Therefore, the Arun LNG Terminal aspires to become the LNG Hub leader in Asia in 2030.

PROSPEK USAHA
Business Outlook



Saat ini sudah beroperasi sebanyak 5 tangki LNG yang diperuntukan untuk kebutuhan regasifikasi nasional kebutuhan wilayah Sumatera dan LNG Hub. Salah satu tahap awal untuk mencapai target sebagai LNG Hub leader di Asia adalah dengan menambah jumlah tangki LNG melalui revitalisasi tangki F-6004 yang saat ini dalam status tidak digunakan sejak tahun 2004. Proses revitalisasi akan dimulai pada tahun 2024 dan diperkirakan selesai pada kuartal I tahun 2025.

Currently, there are 5 LNG tanks in operation, which are intended for national regasification needs for the Sumatra region and the LNG Hub. One of the initial stages to achieve the target as LNG Hub leader in Asia is to increase the number of LNG tanks by revitalizing the F-6004 tank, which has currently been in disuse status since 2004. The revitalization process will commence in 2024 and is estimated to be completed in the first quarter of 2025.

LNG *Bunkering* Pertama di Indonesia

PGN sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi dan sebagai Subholding Gas terus berupaya untuk memperkuat perannya dalam menyalurkan energi baik sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan membangun LNG *Bunkering* pertama di Indonesia. Salah satu faktor pendorongnya adalah wilayah perairan Indonesia yang merupakan lokasi yang sangat strategis bagi rute pelayaran internasional, di mana dalam satu tahun jumlah kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia mencapai ratusan ribu kapal.

Selat Malaka dan Selat Makassar merupakan salah satu rute pelayaran internasional yang terpadat di Indonesia. Mengingat saat ini sudah ada *bunkering station* eksisting milik Singapura dan Malaysia di sekitar Selat Malaka yang telah beroperasi sejak lama, maka potensi pengembangan *bunkering station* di area Selat Makassar lebih menjanjikan.

Indonesia's First LNG Bunkering

PGN, as a Company engaged in the transmission and distribution of natural gas and as a Gas Subholding, continues to strive to strengthen its role in distributing good energy as a driver of economic growth in Indonesia by building Indonesia's first LNG Bunkering. One of the driving factors is that Indonesia's territorial waters are a very strategic location for international shipping routes where the number of ships sailing through Indonesian waters reaches hundreds of thousands of ships in one year.

The Malacca Strait and Makassar Strait are one of Indonesia's busiest international shipping routes. With the existing bunkering stations owned by Singapore and Malaysia, located around the Malacca Strait, which have long been operating, the potential for developing bunkering stations in the Makassar Strait area is more promising.



International Maritime Organization (IMO) di tahun 2020 telah menerapkan aturan IMO Sulphur Cap 2020 di mana untuk kapal – kapal rute pelayaran internasional yang melaui wilayah ECA (*Emission Control Area*) harus menghasilkan sulphur maksimal 0,1% dari hasil pembakaran, dan yang melalui wilayah Global Cap harus menghasilkan sulphur maksimal sebesar 0,5% dari hasil pembakaran. Untuk mendapatkan nilai sulphur di bawah 0,5% dapat menggunakan beberapa alternatif bahan bakar salah satunya adalah LNG. Di beberapa negara telah menjalankan proyek LNG *bunkering* untuk memenuhi kebutuhan LNG bagi kapal yang menggunakan bahan bakar LNG, di antaranya Singapura, Malaysia, Belanda, Norwegia, China, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Perancis.

Dengan adanya peraturan IMO Sulphur Cap 2020 dan lokasi perairan Indonesia yang sangat strategis bagi rute pelayaran internasional, potensi pengembangan LNG *bunkering* di Indonesia sangat menjanjikan. Manfaat yang didapatkan oleh PGN dengan menjalankan program LNG *bunkering* adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan gas (LNG), meningkatkan utilisasi infrastruktur yang dimiliki oleh Pertamina Group (PT Badak NGL dan PT Perta Arun Gas) serta sebagai pionir untuk membentuk pasar LNG bagi dunia pelayaran domestik.

Since 2020, the International Maritime Organization (IMO) has adopted the IMO 2020 Sulphur Cap regulation whereby ships on international shipping routes passing through the ECA (Emission Control Area) zones must not exceed the 0.1% sulfur content limit generated from the combustion; and ships entering the Global Cap zones must not exceed the sulfur content limit of 0.5% generated from the combustion. Several alternative fuels can be used to obtain a sulfur content below 0.5%; for example, Liquefied Natural Gas (LNG). Several countries have operated LNG bunkering projects to meet LNG needs for ships using LNG fuel, including Singapore, Malaysia, the Netherlands, Norway, China, the United States, Belgium, Canada, South Korea, Japan, and France.

Considering the adoption of IMO 2020 Sulphur Cap regulation and the strategic location of Indonesian waters for international shipping routes, the potential for developing LNG bunkering in Indonesia is very promising. Through the implementation of the LNG bunkering program, PNG gained benefits, namely the increase in revenue from gas (LNG) sales, improvement in the utilization of infrastructure owned by Pertamina Group (PT Badak NGL and PT Perta Arun Gas), as well as being a pioneer in creating the LNG market for domestic shipping sector.

Pemanfaatan *Biomethane* dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Sebagai Upaya dalam Reduksi Emisi Karbon di Indonesia

Dalam upaya menurunkan impor Bahan Bakar Minyak pada tahun 2030 dan untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Pemerintah telah merumuskan beberapa langkah strategis seperti yang dituangkan dalam dokumen Grand Energi Strategi Nasional ("GSEN"). Adapun salah satu langkah percepatan dalam implementasi program tersebut adalah mengoptimalkan biofuel dengan mengekstensifkan penggunaan serta

Utilization of Biomethane from Palm Oil Mill Effluent (POME) as an Effort to Reduce Carbon Emissions in Indonesia

In an effort to reduce imports of fuel oil by 2030 and to support carbon emission reduction, the Government has formulated several strategic steps outlined in the National Energy Grand Strategy (GSEN) document. One of the accelerated steps in implementing the program is optimizing biofuels by intensifying the use and production of biofuels (biodiesel or bio-hydrocarbons including bioethanol). The said biofuels cover optimization of the

PROSPEK USAHA
Business Outlook

produksi Bahan Bakar Nabati ("BBN") seperti *biodiesel* atau *biohidrokarbon* termasuk *bioetanol*. BBN yang dimaksud meliputi optimalisasi hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") beserta produk turunan yang masih memiliki manfaat bagi lingkungan.

Industri kelapa sawit merupakan bagian penting dari perekonomian nasional dengan nilai transaksi mencapai USD28,52 miliar di tahun 2021 atau setara dengan 4,5% dari Pendapatan per Kapita (GDP). Potensi pencemaran lingkungan terkait dengan besarnya jumlah limbah dan emisi yang dihasilkan dari aktifitas produksi kelapa sawit dimana produk-produk utama (CPO dan PKO) hanya mewakili 26,3% dari keseluruhan tandan buah segar (*Fresh Fruit Bunch*/FFB) yang masuk sebagai bahan baku produksi. Sejumlah 44,5 % bagian FFB menjadi produk samping *biomassa* seperti tandan buah kosong, cangkang sawit, serat mesocarp dan bungkil sawit. Sedangkan untuk produk samping dengan produktivitas tertinggi, yaitu limbah cair (*Palm Oil Mill Effluent*/POME mencapai 58% setara FFB), sebagian besar POME diolah dengan metode fermentasi anaerobik di kolam terbuka untuk pada akhirnya sebagian digunakan sebagai pupuk dan sisanya tidak dimanfaatkan/dibuang.

Sebagai upaya pengembangan bisnis Perusahaan termasuk dalam upaya optimalisasi jaringan pipa PGN dan sebagai dukungan proses implementasi GENS dan Program *Net Zero Emissions* (NZE), PGN melihat potensi penyediaan energi bersih seperti *biomethane* sebagai energi alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perluasan Pasar Gas Bumi
Guna meningkatkan nilai pemanfaatan gas bumi, PGN akan mengembangkan usaha ke sektor utilisasi gas bumi. Peluang yang akan dicoba adalah pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar di *smelter*.

Kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi hasil tambang mineral telah membantu pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral. Dengan adanya regulasi lain yang mengatur tingkat emisi dalam proses produksi hilirisasi mineral, maka pemanfaatan gas untuk kebutuhan sektor pertambangan dapat meningkat secara gradual pada masa mendatang. Pertumbuhan permintaan baterai *electrice vehicle* juga menciptakan ceruk kebutuhan gas khususnya pada rantai pasok di industri *electric vehicle,* selain itu juga dapat menciptakan potensi pemanfaatan gas untuk pengolahan dan pemurnian nikel sebagai salah satu rantai.

products from Palm Oil Mills (POM) and their derivative products that still have benefits for the environment.

The Palm oil industry is an important part of the national economy with a transaction value of USD28.52 billion in 2021 or equivalent to 4.5% of Income Per Capita (GDP). The potential for environmental pollution is related to the amount of waste and emissions generated from palm oil production activities, in which main products (Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel Oil (PKO)) only represent 26.3% of the total fresh fruit bunches (FFB) used as production raw materials. A total of 44.5% of the FFB becomes biomass by-products, including Empty Fruit Bunches (EFB), palm shells, mesocarp fiber, and palm kernel expeller. Meanwhile, the highest productivity of byproducts is liquid waste (Palm Oil Mill Effluent/ POME reaches 58% or equivalent to the amount of FFB), in which most of the POME is processed by the anaerobic fermentation method in open ponds that part of the products is to be used as fertilizer and the remaining product is not utilized/discarded.

As an effort to develop the Company's business, including optimizing PGN's pipeline network and supporting the implementation process of GENS and the Net Zero Emissions (NZE) Program, PGN recognizes the potential for providing clean energy such as Biomethane as alternative energy to drive economic growth in Indonesia.

Natural Gas Market Expansion
In order to increase the value of natural gas utilization, PGN will expand its business into the natural gas utilization sector. The opportunity being embarked on is the use of natural gas as a fuel source in smelters.

The Government's policy to downstream mineral mining products has aided the growth and development of the mineral processing and refining industry. With other laws regulating emission levels in the downstream production process of minerals, the use of gas for the mining sector needs can increase gradually in the future. The growth in demand for electric vehicle batteries also creates a niche for gas needs, particularly in the supply chain of the electric vehicle industry. It can also create the potential for utilizing gas for processing and refining nickel as one of the chains.

Rencana pemerintah untuk melanjutkan melanjutkan Pembangunan pipa transismi gas bumi Cirebon–Semarang Tahap II menghadirkan peluang dalam hal peningkatan akses pasar, penguatan kehandalan pasokan serta membuka potensi bisnis baru dalam bidang operasi dan pemeliharaan pipa.

Dengan keahlian dan pengalaman dalam mengoperasikan infrastruktur gas bumi, PGN siap memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan bauran energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PGN juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek.

Selain itu, PGN juga bersinergi di internal Pertamina Grup dalam pembangunan infrastruktur pipa Senipah-Balikpapan untuk mengalirkan gas ke RU V Balikpapan. Pada tahun 2023 telah sampai dengan *commissioning* dan pada tahun 2024 mulai dioperasikan secara penuh untuk mengalirkan gas ke RU V Balikpapan.

Pengembangan Jargas

Untuk mendukung program Pemerintah dalam menurunkan impor LPG, PGN akan memperluas pemanfaatan gas bumi kepada segmen rumah tangga ddengan target penambahan 117 ribu sambungan rumah baru pada tahun 2024. Kegiatan ini diwujudkan dalam program Gaskita Pintar. Nantinya selain pembangunan Jargas secara mandiri, PGN juga berencana bermitra dengan badan usaha untuk mengembangkan Jargas ini.

Transportasi Minyak Mentah & BBM

Sehubungan dengan pengalaman dan kapabilitas dalam bisnis pengangkutan melalui moda pipa dan sinergi Pertamina Group, PGN mendukung Pertamina dengan melakukan pembangunan pipa minyak mentah Rokan dengan total panjang sampai dengan 360 km dan telah beroperasi sejak bulan Februari 2022 (*first oil in*). Pada tahun 2024, PGN berencana untuk melakukan pembangunan pipa BBM Cikampek – Plumpang dan diperkirakan selesai pada tahun 2026.

The government's plan to continue the construction of Phase II of the Cirebon-Semarang natural gas transmission pipeline presents opportunities in terms of increasing market access, strengthening supply reliability, and opening new business potential in the field of pipeline operations and maintenance.

With its expertise and experience in operating natural gas infrastructure, PGN is ready to provide high-quality services to customers and support the government's programs in improving the national energy mix and encouraging economic growth in Central and East Java. PGN is also committed to contributing to creating jobs and improving the welfare of communities in the vicinity of the project area.

In addition, PGN also synergizes internally with Pertamina Group in constructing infrastructure for the Senipah-Balikpapan pipeline to flow gas to the RU V Balikpapan refinery. It has been in the commission stage in 2023, and in 2024 it will begin full operation to supply gas to RU V Balikpapan.

Gas Network Development

To support the Government's program to reduce LPG imports, PGN will expand the use of natural gas to the household segment with a target of adding 117 thousand new household connections in 2024. This activity is part of the Gas Kita Pintar program. In the future, apart from the development of gas networks independently, PGN plans to partner with business entities to develop this gas network.

Transportation of Crude Oil and Fuel

Taking into account PGN's experience and capability in the transportation business using the pipeline mode and the synergy of Pertamina Group, PGN supports Pertamina through the construction of the Rokan oil pipeline, with a total length of 360 km, which has been operating since November 2022 (first oil in). In 2024, PGN is planning to build the Cikampek – Plumpang fuel pipeline, which is estimated to be completed in 2026.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2023
Comparison of Target and Realization 2023

Pada tahun 2023 PGN mampu memenuhi target tahun berjalan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang didorong oleh berbagai upaya efisiensi beban pokok pendapatan serta optimalisasi provisi kontrak LNG. Berikut ringkasan pencapaian target kinerja PGN di 2023.

In 2023, PGN able to meet the current year's targets as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) driven by various efficiency measures on the cost of revenue and the optimization of LNG contract provisions. The following is a summary of PGN's performance target achievement in 2023.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
Comparison of Target and Realization 2023
dalam juta USD | in million USD

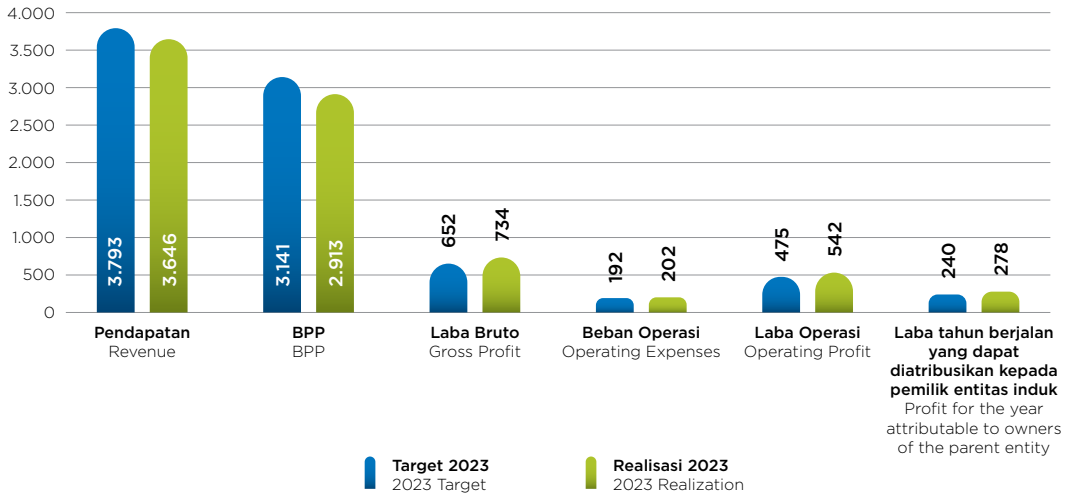

Juta USD | Million USD

Keterangan	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 Realization 2023	Description
Pendapatan	3.793,2	3.646,3	Revenue
BPP	3.141,0	2.912,7	BPP
Laba Bruto	652,2	733,6	Gross Profit
Beban Operasi	191,6	201,7	Operating Expenses
Laba Operasi	474,7	542,4	Operating Profit
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	240,0	278,1	Profit for the year attributable to owners of the parent entity
Struktur Modal Rasio utang terhadap ekuitas	67:33	30:70	Capital Structure Debt to equity ratio

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/PRODUKSI DAN PEMASARAN

Realisasi pengelolaan gas bumi pada 2023 terdiri dari niaga gas bumi (termasuk volume TUA) sebesar 977,4 BBTUD atau 101,3% dari target dan realisasi transportasi gas bumi sebesar 1.457,8 MMSCFD atau 104,8% dari target. Pencapaian kinerja operasional pada segmen niaga gas bumi dan transportasi gas bumi didukung dari optimalisasi kontrak *Terminal Used Agreement* (TUA) dengan PLN, serta peningkatan penyaluran gas di ruas NSA - North Sumatera Area, SSA - South Sumatera Area dan Kalimantan.

Kinerja segmen transportasi minyak dan gas tercapai di atas target karena peningkatan transportasi minyak Rokan dan non Rokan (peningkatan produksi Central Ramba dan PEP Asset 1 Field Jambi).

ANALYSIS OF OPERATIONS/ PRODUCTION AND MARKETING REALIZATION ACHIEVEMENT

Realization of natural gas management in 2023 consisted of natural gas trading (including TUA volume) of 977.4 BBTUD or 101.3% of the target and realization of natural gas transportation of 1,457.8 MMSCFD or 104.8% of the target. The achievement of operational performance in the natural gas trading and transportation segments due to optimization of the Terminal Used Agreement (TUA) contract with PLN, as well as improvements in the gas transportation in NSA - North Sumatera Area, SSA - South Sumatera Area and Kalimantan.

The performance of the oil and gas transportation segment exceeded the target due to increased transportation of Rokan and non-Rokan oil (increased production of Central Ramba and PEP Asset 1 Field Jambi).

Perbandingan Target dan Realisasi Operasi
Comparison of Operational Target and Realization

Uraian	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Δ	Description
Volume Niaga Gas (BBTUD) (termasuk volume TUA)	964,4	977,4	1,3%	Gas Trading Volume (BBTUD) (including TUA volume)
Volume Transportasi Gas (MMSCFD)	1.391,1	1.457,8	4,8%	Gas Transportation Volume (MMSCFD)
Lifting Minyak & Gas (MMBOE)	10,2	9,2	(9,8%)	Oil & Gas Lifting (MMBOE)
Pemrosesan LPG (TPD)	135,0	106,3	(21,3%)	LPG Processing (TPD)
Transportasi Minyak (MMBOE)	42,5	56,9	33,9%	Oil Transportation (MMBOE)
Regasification (BBTUD)	132,5	158,0	19,3%	Regasification (BBTUD)

Volume penyaluran niaga gas bumi sebesar 977,4 BBTUD yang terdiri dari 923,4 BBTUD volume niaga dan 53,9 BBTUD volume TUA. Volume penyaluran niaga gas bumi termasuk TUA mencapai 101,3% dari target. Guna memenuhi kebutuhan gas PLN pada saat terjadinya keterbatasan pasokan gas, PGN bersama PLN mengoptimalkan perjanjian pemanfaatan fasilitas FSRU (Terminal Use Agreement atau TUA) dengan menggunakan LNG PLN. Optimalisasi kontrak TUA membuat target volume penyaluran niaga gas dapat tercapai.

The commercial distribution volume of natural gas amounted to 977.4 BBTUD, consisting of 923.4 BBTUD in commercial volume and 53.9 BBTUD in TUA volume. The volume of natural gas distribution including TUA reached 101.3% of the target. In order to meet PLN's gas needs at a time of limited gas supply, PGN and PLN are optimizing the FSRU facility utilization agreement (Terminal Use Agreement or TUA) using PLN's LNG. Optimizing the TUA contract means that the target gas distribution volume can be achieved.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2023
Comparison of Target and Realization 2023

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/RUGI

Pendapatan Bersih 2023 terealisasi USD3.646,3 juta atau 96,1% dari target yang dipengaruhi volume operasional pemrosesan LPG serta *lifting* minyak dan gas yang masih di bawah target. Namun untuk bisnis transportasi gas dan transportasi minyak, PGN meraih pendapatan yang optimal seiring dengan peningkatan penyaluran minyak dari PHR dan optimalisasi penyaluran gas di Arun Belawan dan Pusri (MEPI) & MEB.

Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk terealisasi USD278,1 juta atau 115,9% karena optimalisasi provisi atas kontrak LNG dan PGN telah melakukan efisiensi Biaya Pokok Pendapatan dan Biaya Operasi melalui program *cost saving* serta optmalisasi dana internal dalam meningkatkan pendapatan keuangan untuk menjaga pencapaian target laba tahun berjalan Perusahaan. Realiasi Biaya Pokok Pendapatan sebesar USD2.912,7 juta atau 92,7% dari target. Realisasi pendapatan keuangan sebesar USD48,5 juta atau 182,5% dari target.

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan mendukung peran PGN sebagai Subholding Gas, PGN terus meningkatkan program pengembangan pekerja yang komprehensif dan konsisten dengan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) *inhouse* maupun *public training*, sertifikasi, dan *sharing knowledge*. Program-program tersebut dirancang dengan sistematis agar sesuai perkembangan bisnis Perusahaan sehingga setiap pekerja PGN memiliki kompetensi dan dapat bekerja secara profesional sesuai bidang dan posisi jabatannya.

PGN berkomitmen melakukan pengembangan pekerja untuk membekali dan memenuhi gap kompetensi pekerja PGN, sehingga mampu menjalankan perannya dengan baik. PGN memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial melalui *inhouse* dan *public training* serta sertifikasi. Pada tahun 2023, PGN menetapkan target pelaksanaan program pelatihan *inhouse* kompetensi teknis sebanyak 53 program, dengan realisasi sebanyak 56 program. Tingkat partisipasi pekerja dalam program pengembangan mencapai 107% dari target sebesar 85%.

ANALYSIS OF PROFIT/LOSS REALIZATION ACHIEVEMENT

Net Income for 2023 was realized at USD3,646.3 million or 96.1% of the target due to the lower-than target operational volume of LPG processing and oil and gas lifting. However, in its gas transportation and oil transportation business, PGN delivered optimum amount of revenue in line with increasing oil distribution from PHR and optimizing gas distribution in Arun Belawan and Pusri (MEPI) & MEB.

Profit for the Year attributable to owners of the parent entity was realized at USD278.1 million or 115.9% due to optimization of provisions for LNG contracts and PGN has streamlined Cost of Revenue and Operating Costs through cost saving programs as well as optimizing internal funds to increase financial income to maintain its profit target for the current year. Cost of Revenue reached USD2,912.7 million or 92.7% of the target. Realized financial income reached USD48.5 million or 182.5% of the target.

ANALYSIS OF HR DEVELOPMENT ACHIEVEMENTS

In order to accomplish the vision and missions of PGN and to support the role of PGN as Gas Subholding, PGN continues to improve employee development programs that are comprehensive and consistent with in-house education and training, public training, certification, and knowledge sharing programs. These programs were systematically devised to be in accordance with the Company's business development, to ensure that each PGN employee has the competence and ability to work professionally in their field and position.

PGN is committed to employee capacity building to equip them and narrow down the competency gap among PGN employees, to ensure that they can perform their roles effectively. PGN has technical and managerial competence development programs through in-house and public training as well as certifications. In 2023, PGN set a target to carry out 53 programs of in-house technical competency training with a realization of 56 programs. The employee participation rate for the development program reached 107% out of the target of 85%.

Program *Learning Development*
Learning Development Program

No.	Uraian Description	2023		2022	
		Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
1	Program Pelatihan *Inhouse* Kompetensi Teknis Technical Competency Inhouse Training Program	53	56	44	69
2	Program Pelatihan *Inhouse* Kompetensi Manajerial Managerial Competency Inhouse Training Program	2	2	2	2
3	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis Technical Competency Public Training Program	77	89	77	88
4	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial Managerial Competency Public Training Program	1	1	1	1
5	Tingkat Partisipasi Pekerja Employee Participation Rate	85%	107,95%	82,5%	98,0%

RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG

Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year

Program strategis Perusahaan pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Optimasi pasokan gas untuk memenuhi permintaan pasar melalui perpanjangan kontrak, novasi kontrak dan kontrak baru dengan sumber gas pipa dan LNG.
2. Advokasi kepada *stakeholder* dan regulator untuk mendapatkan dukungan jaminan kepastian investasi infrastruktur gas bumi dengan menetapkan harga jual, harga beli dan tarif pengangkutan yang merefleksikan tingkat pengembalian investasi dengan margin yang wajar.
3. Inisiasi pengembangan bisnis hilir gas untuk meningkatkan konektivitas dan kehandalan pengelolaan gas bumi di wilayah eksisting, serta perluasan layanan penyaluran gas di wilayah baru melalui program *policy advocacy* dengan KESDM, KBUMN dan *stakeholder* terkait.
4. Akuisisi pelanggan melalui:
   a. Penetrasi pasar (38 BBTUD);
   b. Pembangunan Jargas SOR 1, 2, 3, dan 4 (117 ribu SR);
   c. *Product development* (migrasi sub-produk dari standar menjadi khusus yang tarifnya lebih tinggi).
5. Diversifikasi melalui pengembangan bisnis:
   a. Optimasi kontrak TUA (*Terminal Usage Agreement*) FSRU Lampung (50 BBTUD);
   b. LNG *Trading* yang sudah terkontrak (CNTIC dan Gunvor);
   c. Mencari pelanggan baru sepanjang pipa rokan;

The Company's strategic programs in 2024 consist of:

1. Optimizing gas supply to meet market demand through contract extensions, contract novations, and new contracts with piped gas and LNG sources.
2. Advocacy to stakeholders and regulators to obtain support for guarantees of investment certainty in natural gas infrastructure by establishing selling prices, purchasing prices, and transportation rates that reflect a rate of return on investment with reasonable margins.
3. Initiation of downstream gas business development to improve connectivity and reliability of natural gas management in existing areas, as well as expansion of gas distribution services in new areas through a policy advocacy program with the MEMR, MSOEs, and related stakeholders.
4. Customer acquisition through:
   a. Market penetration (38 BBTUD);
   b. SOR 1, 2, 4, and 4 Gas Network Development (117 thousand SR);
   c. Product development (migration of sub-products from standard to special with higher rates).
5. Diversification through business development:
   a. FSRU Lampung (50 BBTUD) TUA (Terminal Usage Agreement) contract optimization;
   b. Contracted LNG Trading (CNTIC and Gunvor);
   c. Acquiring new customers along the Rokan pipeline;

RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG
Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year

d. Optimasi bisnis *upstream*: meningkatkan produksi dan *reserve*, serta perpanjangan kontrak kerja sama WK Ketapang;
e. *Asset utilization* (*Port Charges*);
f. Optimasi bisnis EPC dan O&M pada infrastruktur Migas di Pertamina Group.

6. Tercapainya target *availability* infrastruktur gas ≥ 98%.
7. Program strategis lainnya:
   a. *HSSE Excellence* dengan target *Zero* NoA (*Number of Accident*) yang terdiri dari *Fatality*, *Oil Spill* ≥ 15 barel, dan *Property Damage* ≥ USD1.000.000, serta target jangka panjang peningkatan budaya HSSE menuju level budaya generatif pada seluruh pimpinan, pekerja, dan mitra kerja di setiap Satuan Kerja, Anak Perusahaan dan Afiliasi.
   b. *Alignment* pemenuhan *manpower* sesuai kebutuhan bisnis Perusahaan mengacu pada hasil *workload analysis*, penguatan talent *readiness*, serta melakukan pengelolaan *industrial relation* sebagai dukungan terhadap inisiatif strategis Perusahaan.
   c. Pengelolaan keamanan data dan informasi dengan menerapkan teknologi keamanan siber (*cyber security*) termasuk tata kelola dan kebijakan terkait *cyber security*.
   d. Pelunasan Obligasi PGN Group dengan pendanaan internal dan eksternal.
   e. Optimalisasi Kontrak Payung Pengadaan Barang/Jasa yang diinisiasi oleh Holding.
   f. Prioritisasi rencana kerja dan biaya untuk mendapatkan *cost* yang lebih kompetitif.
   g. Melakukan kajian restrukturisasi SAKA.

d. Upstream business optimization: increasing production and reserves, as well as extending the Ketapang Working Area cooperation contract;
e. Asset utilization (Port Charges);
f. Optimizing the EPC and O&M business on oil and gas infrastructure at Pertamina Group.

6. Achievement of gas infrastructure availability target of ≥ 98%.
7. Other strategic programs:
   a. HSSE Excellence with a target of Zero NoA (Number of Accident), consisting of Fatality, Oil Spill of ≥ 15 barrels, and Property Damage of ≥ USD 1,000,000, as well as a long-term target of HSSE culture improvement towards a generative culture level for all leaders, employees, and work partners in each Work Unit, Subsidiary, and Affiliate.
   b. Alignment for the fulfillment of manpower according to the Company's business needs refers to the results of workload analysis, strengthening of talent readiness, as well as managing industrial relations as support for the Company's strategic initiatives.
   c. Data and information security management by implementing cyber security technology, including governance and policies related to cyber security.
   d. Repayment of PGN Group Bonds with internal and external funding.
   e. Optimization of Umbrella Contracts for the Procurement of Goods/Services initiated by Holding.
   f. Prioritizing work plans and costs to acquire more competitive costs.
   g. Conducting SAKA restructuring studies.

PROYEKSI PEMASARAN DAN OPERASIONAL

PGN optimis dapat terus meningkatkan kinerja dengan target peningkatan volume operasi setahun ke depan sebagai berikut:

MARKETING AND OPERATIONAL OUTLOOK

PGN remains optimistic that it will be able to continue to improve its performance with a target of increasing operating volume for the next one year as follows:

Juta USD | Million USD

Uraian	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024 2024 Target	Description
Volume Niaga Gas (BBTUD) (termasuk volume TUA)	977,4	1.129,4	Gas Trading Volume (BBTUD) (including TUA volume)
Volume Transportasi Gas (MMSCFD)	1.457,8	1.515,9	Gas Transportation Volume (MMSCFD)
Lifting Minyak & Gas (MMBOE)	9,2	8,4	Oil & Gas Lifting (MMBOE)
Pemrosesan LPG (TPD)	106,3	120,0	LPG Processing (TPD)
Transportasi Minyak (MMBOE)	56,9	55,5	Oil Transportation (MMBOE)
Regasification (BBTUD)	158,0	191,7	Regasification (BBTUD)

PROYEKSI PENDAPATAN DAN LABA

Target Pendapatan dan Laba pada 2024 diproyeksikan dapat selaras dengan peningkatan kinerja operasi. Untuk menjaga kinerja keuangan, PGN tetap fokus dalam mengelola bisnis niaga gas bumi dan berkomitmen mendukung pelaksanaan Harga Gas Bumi Tertentu untuk sektor kelistrikan dan industri melalui Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/HK.02/02/MEM.M/2021 dan No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023. PGN juga memperkuat perannya sebagai Subholding Gas melalui sinergi dan kolaborasi di lingkungan Pertamina Grup untuk mengoptimalkan bisnisnya, dan disisi lain tetap berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan segmen bisnis lainnya yang telah berhasil meningkat di tahun sebelumnya.

REVENUE AND PROFIT OUTLOOK

The Revenue and Net Profit targets in 2024 are projected to be in line with improving operational performance. To maintain financial performance, PGN remains focused on managing the natural gas trading business and committed to continue support the implementation of Certain Natural Gas Prices for the electricity and industrial sectors through MEMR Decree No. 135.K/HK.02/02/MEM.M/2021 and No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023. PGN also strengthens its role as a Gas Subholding through synergy and collaboration within the Pertamina Group to optimize its business, and on the other hand continues to strive the growth of other business segments which have succeeded in increasing in the previous year.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Pada tahun 2024, PGN terus berkomitmen untuk mengembangkan pekerja melalui program pelatihan *inhouse* kompetensi teknis sebanyak 55 program, dan *inhouse* kompetensi manajerial sebanyak 2 program. Selaras dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2024 PGN akan mengembangkan modul *online learning* yang diharapkan membantu proses transformasi digital di PGN, memudahkan jangkauan proses pengembangan pekerja di seluruh wilayah operasi PGN, serta meningkatkan efisiensi kinerja dan biaya PGN.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OUTLOOK

In 2024, PGN will remain committed to investing in employee development through 55 in-house technical competency training programs and 2 in-house managerial competency training programs. In line with technological advancements, in 2024, PGN will develop online learning modules that are expected to assist in PGN's digital transformation process, facilitate the reach of the employee development process in all of PGN's operational areas, as well as enhance PGN's cost and performance efficiency.

Program *Learning Development* 2024
2024 Learning Development Programs

No.	Uraian	Target	Description
1	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Teknis	55	Technical Competency Inhouse Training Program
2	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Manajerial	2	Managerial Competency Inhouse Training Program
3	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis	77	Technical Competency Public Training Program
4	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial	1	Managerial Competency Public Training Program
5	Tingkat Partisipasi Pekerja	85%	Employee Participation Rate

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

PANGSA PASAR

Sepanjang tahun 2023, realisasi penyaluran gas bumi untuk domestik mencapai 3.745 *Billion British Thermal Unit per Day* (BBTUD), sedangkan pemanfaatan gas untuk ekspor, jumlahnya mencapai 1.749 BBTUD.

Dari total pemanfaatan gas bumi domestik, penyaluran paling besar adalah untuk sektor Industri yang mencapai 1.515,8 BBTUD atau sekitar 40,5%. Kemudian diikuti oleh pemanfaatan gas bumi untuk Pupuk sebesar 692,43 BBTUD atau sekitar 18,4%. Sementara pemanfaatan gas bumi untuk Kelistrikan sebesar 683,49 BBTUD, LNG Domestik sebesar 524,62 BBTUD, LPG Domestik 77,69 BBTUD, City Gas 16,14 dan BBG sebesar 5,86 BBTUD.

Pemanfaatan gas bumi untuk domestik tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun tersebut pemanfaatan gas bumi sebesar 3.683 BBTUD dan ekspor sebesar 1.791 BBTUD. Sementara pada tahun 2021, porsi gas bumi untuk domestik sebesar 3.688 BBTUD dan ekspornya gas bumi mencapai 2.047 BBTUD.

MARKET SHARE

During 2023, realization of domestic natural gas distribution reached 3,745 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD), while the amount used for export reached 1,749 BBTUD.

Of the total domestic natural gas utilization, the largest distribution was to the industrial sector, which reached 1,515.8 BBTUD or around 40.5%. Followed by the use of natural gas for fertilizer, amounting to 692.43 BBTUD or around 18.4%. Meanwhile, the use of natural gas for electricity amounted to 683.49 BBTUD, Domestic LNG amounted to 524.62 BBTUD, Domestic LPG amounted to 77.69 BBTUD, City Gas amounted to 16.14, and Gas Fuel amounted to 5.86 BBTUD.

The domestic use of natural gas has increased from the 2022's figure as natural gas use reached 3,683 BBTUD while exports reached 1,791 BBTUD. Meanwhile in 2021, the domestic portion of natural gas was 3,688 BBTUD and natural gas exports reached 2,047 BBTUD.

Realisasi Pemanfaatan Produksi Gas Bumi Indonesia
Realization of Indonesia's Natural Gas Utilization

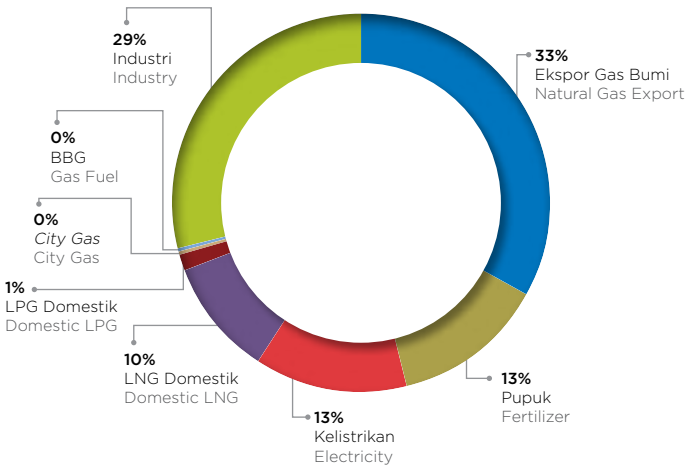

Kemudian, untuk perhitungan *market share* Niaga hilir gas bumi yang dilakukan berdasarkan *nature* bisnis kegiatan hilir niaga gas bumi berfasilitas melalui pipa distribusi, selama tahun 2023 PGN Grup menguasai sekitar 92% pangsa pasar niaga hilir gas bumi melalui pipa distribusi di Indonesia, dengan volume niaga gas mencapai 977,4 BBTUD (termasuk volume LNG dari pemanfaatan TUA).

Furthermore, to calculate the market share for downstream natural gas trading, which is carried out based on the business nature of downstream natural gas trading activities with facilities through distribution pipes, during 2023 the PGN Group controls around 92% of the downstream natural gas trading market share through distribution pipes in Indonesia, with gas trading volume reaching 977.4 BBTUD (including LNG volume from TUA utilization).

Selama tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki pangsa pasar ekspor untuk produk niaga gas bumi.

During 2023, the Company did not have an export market share for natural gas commercial products.

Pangsa Pasar Niaga PGN Keseluruhan
Overall Commercial Market Share of PGN

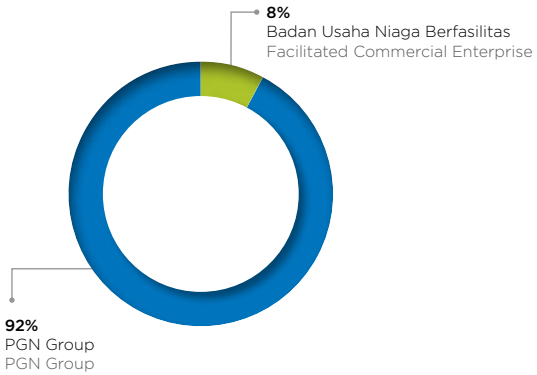

PROFIL PELANGGAN

Sepanjang tahun 2023, PGN menyalurkan gas bumi ke Pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Stasiun Pengisian BBG, maupun Pelanggan Komersial dan Industri sebanyak 830.935 pelanggan, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 838.953 pelanggan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah Pelanggan sektor Rumah Tangga yang dibiayai oleh APBN sebanyak 8.305 pelanggan, sementara jumlah pelanggan segmen pelanggan kecil meningkat 3% dan pelanggan industri/komersial meningkat 8%.

Jumlah pelanggan PGN saat ini masih didominasi oleh segmen pelanggan Rumah Tangga yaitu lebih dari 99% dari total pelanggan gas bumi PGN. Berkaca dari *market share* dan jumlah pelanggan, PGN senantiasa menunjukkan dominansinya dalam bisnis gas bumi seiring bertumbuhnya infrastruktur jaringan gas.

CUSTOMER PROFILE

During 2023, PGN distributed natural gas to Household Customers, Small-scale Customers, Gas Fuel Filling Stations, as well as Commercial and Industrial customers, serving a total of 830,935 customers, this number has decreased compared to 2022, which stood at 838,953 customers. This was due to a decrease of 8,305 customers in the number of Household customers financed by the State Budget, while the number of customers in the small-scale customer segment increased by 3% and industrial/commercial customers increased by 8%.

Currently, the number of PGN customers dominated by the Household customer segment, with more than 99% of the total PGN natural gas customers. Based on the market share and number of customers, PGN continues to demonstrate its dominance in the natural gas business, in line with the growth of gas network infrastructure.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

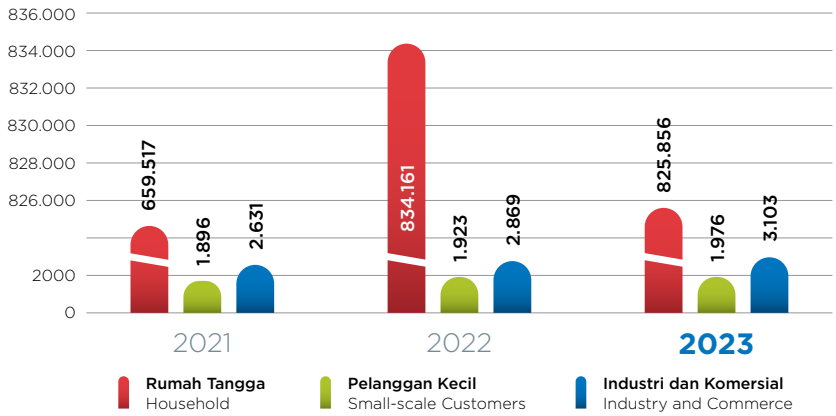

Sedangkan, berdasarkan portofolio volume penyaluran niaga gas bumi ke pelanggan, porsi volume penyaluran terbesar adalah segmen pelanggan komersial dan industri yaitu sebesar 98,9% dari total penyaluran niaga gas bumi PGN.

Moreover, the portfolio based on the volume of distribution of natural gas to customers, the commercial and industrial customer segment has the largest portion of distribution volume, accounting for 98.9% of PGN's total natural gas distribution.

Kontribusi Volume Niaga Gas
Contribution of Gas Trading Volume

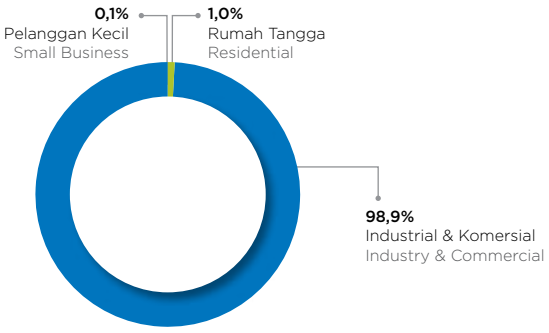

PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi Pelanggan eksisting serta memperluas cakupan wilayah usaha PGN untuk segmen komersial dan industri, PGN telah mengimplementasikan berbagai kebijakan harga jual gas bumi bagi beberapa wilayah distribusi maupun harga jual atas diferensiasi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Harga Gas untuk Pelanggan Komersial dan Industri Selain Pelanggan Korporat
2. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan selain Pelanggan Korporat.

ADJUSTMENT OF PGN NATURAL GAS SELLING PRICE

In order to increase the use of natural gas for existing Customers as well as expanding the coverage of PGN's business area for the commercial and industrial segments, PGN has implemented various natural gas selling price policies for several distribution areas, as well as selling prices for product and service differentiation as follows:

1. Gas Prices for Commercial and Industrial Customers other than Corporate Customers
2. Gas Prices for Certain Industries for Customers other than Corporate Customers.

3. Harga Gas untuk Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Pelanggan *Captive Power* atau Pelanggan dengan Kontrak Bersyarat lainnya.
4. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan Korporat.
5. Harga Gas untuk Pelanggan Baru di Sektor Kilang (Refinery Unit VI Balongan) dan *Oil Lifting* (PEP Lirik dan PHE OSES) dalam lingkup Pertamina Group.
6. Harga Gas untuk Pelanggan *Smelter* (Freeport Manyar) dan Pupuk (PKG dan PKC).
7. Harga Gas untuk Pelanggan Kelistrikan.

Sementara untuk sektor Rumah Tangga, Pemerintah melalui BPH Migas telah menetapkan peraturan mengenai harga jual gas bumi per kota/kabupaten untuk segmen pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Pada 2023, PGN melakukan penetapan harga jual gas bumi sesuai dengan Peraturan dari BPH Migas untuk Produk GasKita Pintar dengan harga jual gas sebesar Rp10.000/m^3 di wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Kota Tangerang Selatan
2. Kabupaten Sleman
3. Kota Cilegon
4. Kabupaten Karawang
5. Kabupaten Cirebon
6. Kab. Bogor

3. Gas Prices to Optimize Natural Gas Utilization for Captive Power Customers or Customers with other Conditional Contracts.
4. Gas Prices for Certain Industrial Gas Prices for Corporate Customers.
5. Gas Prices for New Customers in the Refinery (Refinery Unit VI Balongan) and Oil Lifting (PEP Lirik and PHE OSES) Sectors within the Pertamina Group.
6. Gas Prices for Smelter (Freeport Manyar) and Fertilizer (PKG and PKC) Customers.
7. Gas Prices for Electricity Customers.

As for the household sector, the Government, through the BPH Migas has set regulations regarding the selling price of natural gas per city or regency for the Households and Small-scale customer segments. In 2023, PGN has determined Rp10,000/m^3 as the selling price of natural gas in accordance with the Regulation from BPH Migas for GasKita Pintar products in the following areas:

1. South Tangerang City
2. Sleman Regency
3. Cilegon City
4. Karawang Regency
5. Cirebon Regency
6. Bogor Regency

PERBANDINGAN DAYA SAING HARGA JUAL GAS BUMI PGN DENGAN BAHAN BAKAR LAIN

COMPARISON OF COMPETITIVENESS OF PGN NATURAL GAS SELLING PRICES WITH OTHER FUELS



Selama tiga tahun terakhir, harga rata-rata gas bumi PGN lebih kompetitif dibanding harga produk bahan bakar lain. Harga gas PGN cenderung stabil karena tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dan selain itu pemerintah juga menjamin harga pasokan/harga hulu tetap.Berbeda dengan harga HSD dan MFO, bahan bakar tersebut sangat terpengaruh oleh kondisi harga mintak global sehingga cenderung berfluktuasi. Harga sebagaimana grafik di atas merupakan harga energi di titik serah Pelanggan.

The average price of PGN's natural gas has been more competitive than the prices of other fuel products over the past three years. PGN gas prices tend to be stable as they are not influenced by external factors. In addition, the government also guarantees fixed supply/ upstream prices. In contrast to HSD and MFO prices, these fuels are highly influenced by global demand price conditions, making them easily fluctuate. The prices shown in the above chart are energy prices at the Customers' delivery point.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

STRATEGI PEMASARAN

PGN terus melakukan berbagai upaya pemulihan dan peningkatan bisnis di era pasca pandemi pada tahun 2023, yang membutuhkan penyesuaian strategi bisnis, perubahan pola operasi dan struktur biaya yang lebih efisien. Selama tahun 2023, PGN berfokus pada kinerja komersial dengan senantiasa meningkatkan digitalisasi proses bisnis dan menjaga keberlangsungan kerja sama jangka panjang melalui program layanan kepelangganan serta strategi *customer acquisition* yang dilakukan secara tepat.

PGN telah berhasil melakukan penetrasi pasar dan pengembangan pasar eksisting untuk mendukung pemanfaatan gas bumi dan efisiensi penggunaan bahan bakar, di mana selama 2023 PGN telah menyalurkan gas bumi ke berbagai sektor industri dalam segmen Pelanggan Komersial dan Industri di seluruh wilayah operasi niaga PGN. Perluasan pemanfaatan gas bumi itu, di antaranya:

a. Penyaluran gas lebih dari 370.000 MMBTU kepada Pelanggan Baru PHR Rokan.
b. Penambahan penyaluran gas sebesar 10 BBTUD kepada Pelanggan Eksisting Pupuk Kujang Cikampek.
c. Penambahan penyaluran gas sebesar 22 BBTUD kepada Pelanggan Eksisting PLN Batam.
d. Penambahan penyaluran gas sebesar 8 BBTUD kepada Pelanggan Eksisting Cikarang Listrindo.
e. Penambahan volume gas sebesar 4,5 BBTUD kepada Pelanggan Eksisting Krakatau Daya Listrik.
f. Penyaluran gas sebesar 1,02 BBTUD kepada PHE OSES yang merupakan Pelanggan Baru PGN.

Semangat kolaborasi dan sinergi dengan badan usaha lain menjadi dorongan PGN untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pengelola Kawasan Industri, dan pihak swasta lainnya) dengan prinsip saling menguntungkan. Beberapa kerja sama yang telah PGN jalin pada 2023 di antaranya:

a. MoU antara PGN dengan PT Nusatama Properta Panbil tentang Rencana Penyediaan Pasokan dan Infrastruktir Gas Bumi di Kawasan Industri Panbil
b. MoU antara PGN dengan PT Prima Propertindo Utama tentang Penyediaan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Kawasan Industri Tunas Prima
c. MoU antara PGN dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Grup Usaha Pupuk Indonesia (Persero)

MARKETING STRATEGY

PGN continues to carry out various efforts to recover and improve its business in the post-pandemic era in 2023, which requires adjustments to its business strategy, changes in operating patterns, and a more efficient cost structure. During 2023, PGN focused on commercial performance by continuously increasing the digitization of business processes and maintaining the continuity of long-term cooperation through the appropriate customer service programs and customer acquisition strategies.

PGN has succeeded in conducting market penetration and new market development to support natural gas utilization and fuel efficiency, in which PGN distributed natural gas to various industrial sectors in the Commercial and Industrial customer segments across PGN's commercial operations in 2023. Expansion of natural gas utilization, includes:

a. Gas distribution of more than 370,000 MMBTU to New Customers of PHR Rokan.
b. Additional gas distribution of 10 BBTUD to Existing Customers of Pupuk Kujang Cikampek.
c. Additional gas distribution of 22 BBTUD to Existing Customers of PLN Batam.
d. Additional gas distribution of 8 BBTUD to Existing Customers of Cikarang Listrindo.
e. Additional gas volume of 4.5 BBTUD to Existing Customers of Krakatau Daya Listrik.
f. Gas distribution of 1.02 BBTUD to PHE OSES, which is a New Customer of PGN.

The spirit of collaboration and synergy with other business entities encourages PGN to collaborate with third parties (State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Industrial Estate Management, and other private parties) under the principle of mutual benefit. A number of cooperation that PGN established in 2023 include:

a. MoU between PGN and PT Nusatama Properta Panbil regarding the Plans for Providing Natural Gas Supply and Infrastructure in the Panbil Industrial Area
b. MoU between PGN and PT Prima Propertindo Utama regarding the Provision of Natural Gas Supply and Infrastructure in the Tunas Prima Industrial Area
c. MoU between PGN and PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding the Use of Natural Gas for the Needs of the Pupuk Indonesia Business Group (Persero)

d. MoU antara PGN dengan PT Kawasan Industri Makassar tentang Kerja Sama Pemanfaatan Layanan
e. HoA antara PGN dengan PT Freeport Indonesia tentang Jual Beli Gas untuk Smelter Manyar PT Freeport Indonesia

Kemudian dalam upaya untuk meningkatkan performa bisnis, Perusahaan juga terus memperkuat digitalisasi seperti:

1. Integrasi layanan *contact center* ke Pertamina *Call Center* 135, sehingga kini pelanggan Pertamina Group akan mendapatkan layanan *call center* yang sama.
2. Pembuatan *landing page* www.pgas.id untuk *product knowledge* dan *form* berlangganan Gaskita.
3. Pengembangan *landing page* www.pgas.id/business untuk *product knowledge Gasline* dan form permintaan *online meeting* dengan Tim Sales PGN.
4. Komunikasi dan edukasi via media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube.
5. Penambahan fitur Catat Meter Mandiri pada aplikasi PGN Mobile.
6. Peningkatan fitur pada *Operation Support System* sehingga sistem informasi untuk keperluan administratif dalam proses berlangganan gas dan program layanan lainnya dapat terintegrasi serta menghasilkan *output* yang lebih optimal.
7. *Enhancement* PGN Mobile
   PGN memiliki aplikasi resmi PGN Mobile yang dapat diunduh melalui Apps Store dan Google Play Store. Aplikasi ini memuat beragam informasi mengenai pemakaian dan tagihan gas bumi, produk & layanan, lokasi SPBG, catat meter mandiri dan fitur lainnya. Pengembangan fitur dilakukan secara berkelanjutan yaitu fitur untuk monitor progres Berlangganan gas, pengajuan layanan baik komersial & teknis serta Gas Poin. Penambahan fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan dan *engagement* ke Pelanggan.
8. PGN Partner, aplikasi resmi PGN untuk pelaporan aktivitas lapangan.
   PGN Partner telah digunakan untuk pelaporan pelaksanaan proses Gas In pelanggan Rumah Tangga yang sudah menggunakan sistem penugasan dan pelaporan *online*. PGN Partner telah ditambahkan fitur *tagging* koordinat untuk mengetahui lokasi pelanggan yang telah dilakukan *Gas In* oleh petugas lapangan sehingga data tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang memperbaharui jaringan pipa gas. PGN Partner sedang dilakukan pengembangan untuk pelaporan pekerjaan pemasangan pipa servis, pipa instalasi dan meter Gas. Sehingga memberikan kemudahan monitoring progres pekerjaan konstruksi di Pelanggan serta mendukung digitalisasi dan otomatisasi.

d. MoU between PGN and PT Kawasan Industri Makassar regarding Cooperation in Service Utilization
e. HoA between PGN and PT Freeport Indonesia regarding the Sale and Purchase of Gas for PT Freeport Indonesia's Manyar Smelter

Furthermore, in an effort to improve business performance, the Company also continues to strengthen digitalization, such as:

1. Integrating Contact Center services into Pertamina Call Center 135, allowing Pertamina Group customers to have the same call center services.
2. Creation of landing page www.pgas.id for Gaskita product knowledge and subscription form.
3. Development of landing page www.pgas.id/business for Gasline product knowledge and online meeting request form with the PGN Sales Team.
4. Communication and education via social media platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.
5. Adding a Self-Recording Meter feature to the PGN Mobile application.
6. Improving Operation Support System features to integrate information systems for administrative purposes during the gas subscription process and other service programs to generate more optimal output.
7. Enhancements to PGN Mobile
   PGN has an official application, namely PGN Mobile, which can be downloaded via the Apps Store and Google Play Store. This application contains various information regarding natural gas usage and bills, products & services, Gas Fuel Station locations, Self-Recording Meter, and other features. The development of these features is carried out continuously, namely features to monitor the progress of gas Subscriptions, application for both commercial & technical services, as well as Gas Points. The addition of these features is expected to improve service and engagement with Customers.
8. PGN Partner, PGN's Official Application for Field Activity Reporting.
   PGN Partner has been used to report the Gas-In implementation activities for Household customers who already use an online assignment and reporting system. PGN Partners has added a coordinate tagging feature to pinpoint customer locations, which had Gas In installed by field officers, allowing the data to be integrated with applications that monitor gas pipeline network updates. PGN Partner is currently developing reports on service pipe, installation pipe, and gas meter installation works. This will facilitate the monitoring of the progress of construction work for Customers as well as supporting digitalization and automation.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

9. Registrasi dan Layanan *Online* PGN (Rely On PGN)
   Dalam rangka penyederhanaan proses administrasi berlangganan gas rumah tangga, PGN sejak tahun 2017 telah melakukan digitalisasi proses administrasi berlangganan gas untuk rumah tangga menggunakan sistem Registrasi dan Layanan *Online* (Rely On) PGN. Manfaat dari digitalisasi ini adalah proses administrasi yang lebih cepat, akurat data dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Sampai dengan Desember 2023, tercatat lebih dari 600 ribu data registrasi telah terproses melalui sistem Rely On PGN.

   Pengembangan fitur pada Rely On juga dilakukan terus-menerus untuk menyesuaikan kebutuhan proses bisnis dan memberikan kemudahan bagi user komersial, yaitu penambahan media notifikasi dengan WhatsApp, aplikasi PGN Mobile, integrasi peta dan progress berlangganan dengan DIGIO, notifikasi jaminan pembayaran dan berbagai fitur lain. Penguatan fitur ini selain bermanfaat mempercepat proses bisnis, juga menurunkan potensi biaya-biaya administrasi dan risiko kesalahan pendataan.

10. *Landing page* pgas.id
    Sebelumnya, PGN memiliki *landing page* beralamat www.pgas.id yang hanya memuat konten mengenai Gaskita. Pada 2023, PGN mengembangkan landing page tersebut menjadi www.pgas.id/business yang dibuat khusus untuk memperkenalkan produk Gasline kepada pelaku bisnis.

    Pengunjung *landing page* www.pgas.id dapat menghubungi PGN melalui saluran Whatsapp untuk mengetahui informasi mengenai produk Gaskita untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Pengunjung juga dapat langsung melakukan registrasi berlangganan Gaskita melalui menu yang tersedia.

    Pengunjung *landing page* www.pgas.id/business dapat mengetahui informasi produk Gasline untuk Pelanggan Industri & Komersial. Pengunjung juga dapat melakukan simulasi efisiensi biaya energi dan juga penjadwalan untuk melakukan *online meeting* dengan tim Sales PGN.

    Landing page ini merupakan tujuan dari berbagai tautan aktivitas digital *marketing* yang dilakukan melalui berbagai *digital channel* seperti *Google Search* dan *Google Display,* dan berbagai platform

9. PGN Online Registration and Services (Rely On PGN)
   To simplify the administration process for household gas subscriptions, PGN has digitized the process for administering household gas subscriptions since 2017 using the PGN Online Registration and Service (Rely On) system. The benefits of this digitization are faster administration processes and the collected data being accurate and integrated with other applications. As of December 2023, it was recorded that more than 600 thousand registration data had been processed through the PGN Rely On system.

   Rely On is also continuously developed to adapt with business process needs and provide convenience for commercial users, namely through the addition of notification media with WhatsApp, the PGN Mobile application, map integration and subscription progress with DIGIO, payment guarantee notifications, and various other features. The strengthening of this feature is not only useful to accelerate business processes, it also reduces potential administrative costs and the risk of data collection errors.

10. pgas.id landing page
    Previously, PGN had a landing page at www.pgas.id, which only contained content about Gaskita. In 2023, PGN developed the landing page to www.pgas.id/business, which was created specifically to introduce Gasline products to businesses.

    Visitors to the landing page www.pgas.id can contact PGN through the Whatsapp channel to find out information about Gaskita products for Households and Small Customers. Visitors can also directly register for a Gaskita subscription through the available menu.

    Visitors of the www.pgas.id/business landing page can find information about Gasline products for Industrial & Commercial Customers. Visitors can also carry out energy cost efficiency simulations, as well as schedule online meetings with the PGN Sales team.

    This landing page is the destination for various links to digital marketing activities carried out through various digital channels, such as Google Search and Google Display, as well as various social

media sosial. Pada semester II tahun 2023, jumlah pendaftar online memiliki porsi 24% dari total pendaftar produk GasKita (segmen Rumah Tangga), dan terdapat calon pelanggan segmen Komersial yang sudah melakukan perikatan setelah melakukan *follow up* dari digital channel ini.

11. Saluran Pembayaran
    PGN terus menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan maupun penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Tujuannya mempermudah mekanisme pembayaran pelanggan terutama pelanggan rumah tangga. PGN telah menyediakan berbagai macam saluran pembayaran, di antaranya:
    i. ATM Bank (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, dan CIMB Niaga);
    ii. *Payment Point Online Banking* (PPOB);
    iii. Teller Bank (Mandiri, BRI, dan BTN);
    iv. *Merchant Retail* melalui Pegadaian, Dan-Dan, Alfamidi, Alfamart, Indomaret, dan PT Pos Indonesia;
    v. *E-Commerce* melalui Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, dan Shopee;
    vi. *E-wallet* melalui LinkAja, Dana dan Gopay.

    Hal ini merupakan bentuk peningkatan layanan prima dan untuk mempermudah pelanggan melaksanakan kewajiban pembayaran.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi interaksi digital antara Pelanggan dan Perusahaan, sehingga pada tahun 2023, selain pemasaran *offline*, PGN mulai melakukan langkah-langkah kreatif secara digital yang berkesinambungan guna mencapai target pemasaran.

1. Implementasi *Digital Marketing* di Dalam dan Luar Negeri
   PGN menerapkan strategi digital marketing untuk meningkatkan *awareness* akan produk PGN baik di dalam maupun luar negeri. Pengembangan *landing page* www.pgas.id bertujuan untuk memudahkan implementasi *digital marketing*. Untuk implementasi di dalam negeri, PGN memanfaatkan *display ads* menyebarkan informasi terkait produk dan layanan PGN di Wilayah Semarang.

   Untuk komunikasi pemasaran di luar negeri, PGN memperluas jangkauan digital dengan *Search Engine Marketing* yang ditargetkan di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.. Selain itu PGN melakukan PGN secara aktif berinteraksi dengan audiens melalui konten yang informatif dan menarik mengenai gas bumi.

media platforms. In the second semester of 2023, the number of online registrants accounted for 24% of the total registrants for GasKita products (Household segment), and there were potential Commercial segment customers who have already engaged after following up on this digital channel.

11. Payment Channels
    PGN remains committed to collaborating with financial institutions and financial service providers to enhance customer services and satisfaction. The purpose is to make it easier for customers, particularly household customers, to make payments. PGN has a diverse range of payment channels, including:

    i. Bank ATMs (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, and CIMB Niaga);
    ii. Payment Point Online Banking (PPOB);
    iii. Bank Teller (Mandiri, BRI, and BTN);
    iv. Merchant Retail through Pegadaian, Dan-Dan, Alfamidi, Alfamart, Indomaret, and PT Pos Indonesia;
    v. E-Commerce through Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, and Shopee;
    vi. E-wallet through LinkAja, Dana, and Gopay.

    PGN takes this action as a way to improve excellent services and make it easier for customers to pay their bills.

MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES

The COVID-19 pandemic has accelerated digital interactions between Customers and Companies, therefore in 2023, in addition to offline marketing, PGN started sustainable digital creative measures to achieve marketing targets.

1. Implementation of Digital Marketing at Home and Overseas
   PGN implements a digital marketing strategy to increase awareness of PGN products, both at home and overseas. The development of www.pgas.id landing page aims to facilitate the implementation of digital marketing. For domestic implementation, PGN utilizes display ads to disseminate information related to PGN products and services in the Semarang Area.

   PGN expands its digital reach with Search Engine Marketing targeting Japan, South Korea, and Singapore for marketing communications overseas. Furthermore, PGN actively interacts with its audience through informative and engaging content on natural gas.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

2. Transformasi *Hybrid Prospecting*
   Perubahan kebiasaan calon pelanggan dimana mereka lebih memilih untuk berinteraksi melalui multi-channel (*online-offline*) dan *self-service* diakomodir PGN dengan pembuatan laman www.pgas.id/business dengan adanya fitur *Calculate Saving* dan *Book an Online Meeting*.

   Fitur *Calculate Saving* memberikan ilustrasi estimasi penghematan biaya energi yang didapatkan bila beralih menggunakan gas bumi. Fitur ini telah digunakan sebanyak 243 orang sejak laman tersebut rilis.

   Fitur *Book an Online Meeting* memberikan kemudahan kepada calon pelanggan untuk memilih jadwal meeting dengan Tim Sales PGN. Fitur ini akan men-*generate link online meeting* menggunakan MS Teams antara calon Pelanggan dengan Tim Sales PGN.
3. *International Promotion and Advocacy*
   PGN memulai strategi komunikasi baru di tahun 2023 dengan melakukan advokasi kepada Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berada di luar negeri. PGN menjelaskan mengenai *benefit* gas bumi, ketersediaan infrastruktur gas bumi PGN di Indonesia khususnya di Kawasan-kawasan Industri serta menjelaskan mengenai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan cara mendapatkannya.
4. Temu Pelanggan
   Melalui Temu Pelanggan, PGN bisa mendapatkan informasi mengenai rencana pertumbuhan permintaan gas bumi dari pelanggan. Kegiatan yang dilakukan baik kepada pelanggan Rumah Tangga maupun Komersial dan Industri ini juga menjadi momentum bagi PGN untuk menyapa pelanggan secara langsung, menjalin interaksi yang lebih erat, menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan melalui saluran komunikasi dalam format kegiatan temu bisnis, sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh kategori pelanggan, baik itu *Bronze, Silver, Gold,* maupun *Platinum*.

   PGN sebagai Subholding Gas berkomitmen untuk melakukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi dengan *stakeholder* untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan utilisasi gas bumi serta memberikan nilai tambah terhadap layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tujuannya untuk tumbuh bersama-sama secara berkelanjutan.

2. Hybrid Prospecting Transformation
   Changes in potential customers' habits where they prefer to interact via multi-channel (online and offline) and self-service are accommodated by PGN by creating the www.pgas.id/business page with the Calculate Saving and Book an Online Meeting features.

   The Calculate Saving feature provides an illustration of the estimated energy cost savings obtained for converting to natural gas. This feature has been used by 243 people since the page was released.

   The Book an Online Meeting feature facilitates potential customers to select a meeting schedule with the PGN Sales Team. This feature will generate an online meeting link using MS Teams between potential customers and the PGN Sales Team.
3. International Promotion and Advocacy
   PGN started a new communication strategy in 2023 by advocating with the Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), which is the Investment Coordinating Board (BKPM) located abroad. PGN explains the benefits of natural gas, the availability of PGN natural gas infrastructure in Indonesia, especially in Industrial Areas, and explains the policy of Certain Natural Gas Prices (HGBT) and how to get it.
4. Meeting Customers
   Customer meeting activities enable PGN to obtain information from customers regarding plans for growth in natural gas demand. The activity, which aims at both Households and Commercial and Industrial customers, has become a momentum for PGN to greet customers directly, to establish closer interactions, to create new experiences for customers through communication channels in business meeting activities setting while showing appreciation to all categories of customers, both Bronze, Silver, Gold, or Platinum.

   As a Gas Subholding, PGN is committed to enabling synergy, collaborations, and integration with stakeholders to promote infrastructure development and natural gas utilization while adding value to services provided to communities across the country. The objective is to grow together in a sustainable manner.

5. Layanan *Official* Whatsapp dengan teknologi *chatbot*
   PGN meluncurkan fitur chatbot pada saluran komunikasi *Whatsapp Business* milik PGN *Contact Center* sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat penyaluran informasi yang dibutuhkan Pelanggan PGN seperti informasi tagihan, ID Pelanggan, ketentuan Berlangganan, dan lain lain.

   Whatsapp Business Chatbot milik PGN *Contact Center* dapat diakses pada nomor 081511500645, yang hanya bisa menerima pesan sesuai fitur yang disediakan Meta Platforms Inc. untuk segmen korporasi.

   Media *WhatsApp Chatbot* ini dikembangkan karena memiliki persentase terbesar yang dipilih oleh Pelanggan sebagai media yang ingin mereka gunakan untuk menghubungi PGN dibanding dengan media lain, sehingga PGN akan terus memperkaya dengan fitur layanan yang selama ini ditanyakan oleh Pelanggan.
6. *City Gas Tour*
   Tahun ini merupakan tahun kedua diadakannya *City Gas Tour,* yaitu kegiatan *food truck* keliling kota sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan beragam produk di PGN di antaranya: Gaskita, Gasku, Gaslink dan Gasline dengan titik singgah di kota Jakarta, Palembang, Lampung, Bogor, Semarang. Program *City Gas Tour* dilaksanakan pada 5 - 22 Mei 2023.

PENGEMBANGAN PRODUK

Pada tahun 2023, PGN telah melakukan beberapa pengembangan produk untuk meningkatkan performa penjualan di tiap segmen pelanggan.

1. Pengembangan Produk untuk Memfasilitasi Fleksibilitas Kontrak
   Bertepatan dengan dilakukannya perpanjangan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas untuk 1.794 Pelanggan atau 78% dari total jumlah Pelanggan Segmen Komersial dan Industri, pengembangan produk dari segi fleksibilitas basis kontrak diterapkan.

   Pemberlakuan basis kontrak kepada Pelanggan yang semula hanya tersedia basis kontrak bulanan menjadi tersedia beberapa pilihan basis kontrak antara lain bulanan, tahunan dan harian. Pengembangan produk berbasis kontrak tersebut memberikan *value* bagi Pelanggan melalui fleksibilitas dalam menggunakan gas sesuai dengan rencana dan kebutuhan Pelanggan. Pengembangan produk tersebut merupakan suatu langkah *continuous*

5. Official WhatsApp Service with Chatbot Technology

   PGN launched the chatbot feature on Whatsapp Business of PGN Contact Center communication channel in an effort to facilitate and accelerate the distribution of information needed by PGN Customers, such as billing information, Customer ID, Subscription policies, and others.

   Whatsapp Business Chatbot of PGN Contact Center can be accessed at 081511500645, which can only receive messages according to the features provided by Meta Platforms Inc. for the corporate segment.

   The WhatsApp Chatbot media was developed because it has the largest percentage selected by Customers as their preferred media to contact PGN compared to other media, accordingly, PGN will continuously enhance it with features often solicited by Customers.

6. City Gas Tour
   This is the second year that the City Gas Tour has been organized through food truck travelling between cities as a means to educate and disseminate the various products at PGN, including: Gaskita, Gasku, Gaslink, and Gasline, with stop over points in Jakarta, Palembang, Lampung, Bogor, and Semarang. The City Gas Tour program was held from May 5 to 22, 2023.

PRODUCT DEVELOPMENT

In 2023, PGN has carried out several product developments to improve sales performance in each customer segment.

1. Product Development to Facilitate Contract Flexibility
   Coinciding with the term extension of the Gas Sales and Purchase Agreement for 1,794 Customers or 78% of the total number of Commercial and Industrial Segment Customers, product development in terms of contract basis flexibility was implemented.

   The application of a contract basis to customers, which was previously only available on a monthly contract basis, now provides several contract basis options, including daily, monthly, and annually. The contract-based product development provides value for customers through flexibility in using gas according to customer plans and needs. The product development is a continuous improvement measure carried out by PGN and as a concrete

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

improvement yang dilakukan PGN dan sebagai aksi nyata tindak lanjut PGN atas *customer voice* yang disampaikan Pelanggan dalam survei kepuasan Pelanggan.

Selain produk berbasis kontrak tersebut di atas, PGN juga memberikan pilihan-pilihan produk tambahan kepada Pelanggan seperti "*Spot Gas*" untuk Pelanggan yang membutuhkan gas lebih dari Pemakaian Maksimum per Bulan Kontrak Pelanggan, "Gas Substitusi" untuk memenuhi kebutuhan energi Pelanggan dalam kondisi terjadi gangguan penyaluran gas pipa dan "Multi Destinasi" untuk memberikan fleksibilitas Pelanggan Group dalam menggunakan gas.

2. *Positioning* Produk di Pelanggan dan Pasar
   Pada tahun 2023, PGN memberlakukan berbagai promosi-promosi kepada Pelanggan Komersial dan Industri melalui pemberian harga gas yang kompetitif (program promosi *Overage*, *Slice* dan *Early Flare*, *Starter Pack*) dan fleksibilitas atas ketentuan komersial (program promosi Breakout) sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

   Adapun tujuan PGN memberlakukan promosi tersebut adalah untuk memberikan manfaat secara optimal dan peningkatan efisiensi biaya dalam penggunaan gas kepada Pelanggan sebagaimana *positioning* produk Gasline.

   Dalam menjaga *positioning* produk kepada Pelanggan serta untuk memberikan dan menciptakan *customer experience* serta kemudahaan dalam pelaksanaan komersialisasi Gas kepada Pelanggan dan *improvement* proses bisnis, PGN mengembangkan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Pertiwi. Aplikasi Pertiwi ini merupakan bentuk transformasi digital dimana seluruh proses *acquisition, evaluation, retetention* dan *attrition* dilakukan dalam suatu platform yang akan memberikan kemudahan bagi PGN dan Pelangan dalam melakukan interaksi.
3. Pengembangan Penggunaan Meter Gas Secara Bersama untuk Pelanggan Komersial dan Industri
   PGN berhasil mengimplementasikan penggunaan satu meter untuk dua pelanggan yang adalah PLN Cilegon (Kelistrikan) dan PHE OSES (Hulu Migas) dengan melakukan modifikasi dan kalibrasi sehingga meter dapat digunakan kedua pelanggan, pengembangan penggunaan ini meningkatkan kecepatan akuisisi pelanggan dan efisiensi biaya dalam proses akuisisi pelanggan tersebut.

follow-up action by PGN for the customers' voice in the Customer satisfaction survey.

In addition to the abovementioned contract-based products, PGN also provides additional product options to Customers such as "Spot Gas" for Customers requiring more Gas than the Customer Contract's Maximum Gas Usage, "Gas Substitusi" to meet Customer energy needs in the event of disruptions in the pipeline Gas distribution, and "Multi Destinasi" to provide Gas usage flexibility for Group Customers.

2. Product Positioning in Customers and Markets
   In 2023, PGN implemented a variety of promotions for Commercial and Industrial Customers by providing competitive gas prices (Overage, Slice and Early Flare, and Starter Pack promotional programs) and flexibility over commercial terms (Breakout promotional program) in accordance with applicable terms and conditions.

   PGN's aim in implementing this promotion is to provide optimal benefits and increase cost efficiency in gas usage to Customers as per the positioning of the Gasline product.

   In terms of maintaining product positioning for Customers and to provide and create customer experience as well as convenience in implementing Gas commercialization for Customers and improving business processes, PGN developed a web-based application, namely the Pertiwi application. The Pertiwi application is a form of digital transformation in which the entire acquisition, evaluation, retention, and attrition processes are carried out on a platform that facilitates PGN and Customers to interact.

3. Development of Shared Use of Gas Meters for Commercial and Industrial Customers
   PGN succeeded in implementing the use of one meter for two customers, namely for PLN Cilegon (Electricity) and PHE OSES (Upstream Oil and Gas) through modifications and calibrations, allowing the meter to be used by both customers, this development of use increases the speed of customer acquisition and cost efficiency in the customer acquisition process.

Pada tahun 2023, PGN terus memperluas wilayah pemasaran untuk produk GasLink kepada pelanggan sektor Komersial dan Industri. Produk ini merupakan solusi penyaluran gas bumi *beyond pipeline*, baik itu berupa CNG maupun LNG untuk calon pelanggan sektor Komersial dan Industri. GasLink LNG, mulai dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga upaya penurunan karbon dari pelaku industri hotel dan restoran. Sampai dengan akhir tahun 2023, tercatat terdapat 427 pelanggan yang sudah menjadi pengguna GasLink.

In 2023, PGN expanded its marketing areas for GasLink products to customers in the Commercial and Industrial sector. This product is a solution for distributing natural gas in CNG and LNG, using beyond pipeline modes, for prospective customers in the Commercial and Industrial sector. GasLink LNG began to be marketed to meet energy needs and serve as efforts to reduce carbon from industrial actors in the hotel-restaurant sector. Until the end of 2023, there were 427 customers recorded as GasLink users.

POSITIONING PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN

Positioning dari produk gas bumi PGN secara umum adalah untuk pemenuhan bahan bakar gas bumi yang selalu tersedia, praktis tanpa ruang penyimpanan, ekonomis dan paling ramah lingkungan. Pembagian produk gas bumi disesuaikan dengan kategori segmen konsumen yakni Pelanggan Residensial & Usaha Kecil (produk GasKita) diposisikan sebagai "Juaranya Gas Ngalir Terus" karena nilai jualnya sebagai bahan bakar yang selalu tersedia. Pelanggan Industri & Komersial (produk GasLine dan GasLink) dan Pelanggan Kendaraan Berbahan Bakar Gas (produk GasKu).

PRODUCT POSITIONING IN THE MARKET AND CONSUMERS

In general, the positioning of PGN's natural gas products is to fulfill natural gas needs as a fuel that is always available, practical with no need for storage, economical, and the most environmentally friendly. The distribution of natural gas products is customized to the category of consumer segments, namely Residential & Small-scale customers with GasKita products, which is crowned as "the Champion/ Leader of Gas Provider" due to its selling value as a fuel that is always available, Industrial & Commercial customers with GasLine and GasLink products, and Gas-Fueled Vehicle Customers with GasKu products.

ALOKASI DANA/BIAYA PEMASARAN/ BIAYA PENGELOLAAN PELANGGAN DAN EFISIENSI

Pada tahun 2023, PGN melakukan komunikasi pemasaran melalui *online channel* yang kembali terbukti berhasil meningkatkan efisiensi untuk mengenalkan produk gas bumi milik PGN dan mendapatkan data registrasi calon pelanggan. Aktivitas ini dilakukan di antaranya dengan menjalankan aktivitas *digital marketing* melalui pengiklanan/promosi pada *platform* Google Ads dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga bekerja sama dengan *influencer social media*.

Secara konsisten, PGN juga berupaya untuk meningkatkan standar layanan guna menciptakan pelayanan prima bagi pelanggan. Hal ini merupakan cara PGN untuk membuktikan kesungguhan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan bisnis maupun kompetitor di masa yang akan datang. Untuk itu, PGN melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index* – CSI) tahun 2023 dengan menggunakan acuan 5 aspek kualitas layanan yang diperkenalkan oleh Zeithaml, Bitner dan Parasuraman, yaitu *Reliability, Responsive, Assurance, Empathy* dan *Tangible* (RRAET).

ALLOCATION OF FUNDS/ MARKETING COSTS/ CUSTOMER MANAGEMENT FEES AND EFFICIENCY

In 2023, PGN carried out marketing communications through online channels, which have again proven successful in increasing efficiency in introducing PGN's natural gas products and obtaining registration data for potential customers. These activities include carrying out digital marketing activities through advertising/ promotions on the Google Ads platform and social media, such as Facebook, Instagram, Twitter and collaborating with social media influencers.

PGN also consistently improves service standards to provide excellent services for customers. Through this measure, PGN demonstrates its commitment to increasing customer satisfaction and loyalty while also preparing to face various future business challenges and competitors. To that end, PGN conducted the 2023 Customer Satisfaction Index (CSI) using the five service quality aspects introduced by Zeithaml, Bitner, and Parasuraman, namely Reliability, Responsive, Assurance, Empathy, and Tangible (RRAET).

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

Pada tahun 2023, PGN berhasil mendapatkan nilai CSI sebesar 4,58 dari skala 5 (SANGAT BAIK). Sementara itu, untuk Indeks Loyalitas Pelanggan (*Customer Loyalty Index* - CLI) tahun 2023 mendapatkan nilai 4,59 dari skala 5 (SANGAT BAIK). Lebih jauh lagi, PGN juga melakukan pengukuran *Net Promoter Score* atau tingkat keinginan pelanggan memberikan rekomendasi untuk menggunakan produk dan layanan PGN sebesar 58,18. Sepanjang tahun 2023, PGN telah mengeluarkan biaya sebesar USD1.630.934,63 untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan kepada pelanggan.

In 2023, PGN managed to get a CSI score of 4.58 on a 5 (VERY GOOD) scale. Meanwhile, the Customer Loyalty Index (CLI) for 2023, with a score of 4.59 on a 5 (VERY GOOD) scale. Furthermore, PGN also measured the Net Promoter Score, or the willingness of customers to recommend PGN's products and services, at 58.18. during 2023, PGN spent USD1,630,934.63 to promote improved service quality and customer satisfaction.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Seiring perubahan revolusi industri 5.0, PGN juga senantiasa mengikuti perkembangan Teknologi Informasi, termasuk penerapannya dalam proses bisnis, operasional dan akses informasi kepada publik. Pengembangan Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing Perusahaan.

Along with changes in the industrial revolution 5.0, PGN also continues to follow developments in Information Technology, including its application in business processes, operations, and access to information to the public. Information Technology Development has a very vital role in increasing the Company's efficiency, productivity, and competitiveness.

FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Selama tahun 2023, PGN terus menjalankan fokus dan kebijakan strategis dalam penerapan Teknologi Informasi yang dapat mendukung program strategis Perusahaan yakni Sapta PGN+. Untuk itu, PGN melalui *Information and Communication Technology* (ICT) memiliki dan menjalankan 5 tema program yang meliputi *Data Driven Solution, Application as Business Enabler, ERP Solution, Infrastructure Reliability & Availability* dan *ICT Governance, Synergy & Strategic Planning.*

STRATEGIC FOCUS AND POLICY

During 2023, PGN continued to implement strategic focus and policies in implementing Information Technology that will support the Company's strategic program, namely Sapta PGN+. For this reason, PGN through Information and Communication Technology (ICT) has developed and run 5 thematic programs, including Data Driven Solution, Application as Business Enabler, ERP Solution, Infrastructure Reliability & Availability, as well as ICT Governance, Synergy & Strategic Planning.

PROGRAM KERJA UTAMA

Tujuan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi selain untuk mendukung proses bisnis Perusahaan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis, serta mengakomodir perubahan yang terjadi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui peningkatan keandalan, keamanan, dan kapabilitas internal Teknologi Informasi. PGN mengembangkan Teknologi Informasi yang terarah dan efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan serta mampu memberikan nilai lebih terhadap percepatan pertumbuhan bisnis.

PRIMARY PROGRAM

The purpose of optimizing the use of information technology is not only to support the Company's business processes but also to accelerate business growth and adapt to both short-term and long-term changes by improving information technology's reliability, security, and internal capabilities. PGN develops targeted and effective information technology tailored to the needs and capable of adding value to accelerating business growth.

Selama tahun 2023, PGN telah menjalankan berbagai program kerja utama dalam bidang Teknologi Informasi agar dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk pengembangan bisnis Perusahaan. Beberapa program kerja utama tersebut merupakan rangkaian *Digital Transformation Program*, meliputi:

Throughout 2022, PGN has implemented a number of significant work programs in the field of information technology with the goal of becoming one of the driving factors in the Company's business development. Some of the primary programs are part of the Digital Transformation Program series, including:

1. *Digital Information for Gas Infrastructure Operation* (Digio)
   Digio adalah platform geospasial yang dirancang untuk pengelolaan infrastruktur Subholding Gas. Platform ini menyediakan perspektif spasial yang komprehensif untuk meningkatkan akurasi perencanaan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur serta niaga gas bumi. Dengan fokus pada pemantauan pipa transmisi dan distribusi,

1. Digital Information for Gas Infrastructure Operation (Digio)
   Digio is a geospatial platform designed for managing Gas Subholding infrastructure. This platform provides a comprehensive spatial perspective to improve the accuracy of planning, operations, and maintenance of natural gas infrastructure and trade. By focusing on monitoring transmission and distribution pipelines, Digio allows users to manage

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Digio memungkinkan pengguna untuk mengelola infrastruktur jaringan gas mulai dari tahap *offtake station* hingga *customer gas meter* secara lebih efisien dan terarah.

2. Sistem Informasi Penyaluran Gas
   Penggunaan teknologi *Gas Management System* (SIPGas) merupakan terobosan Transformasi Digital dalam pengelolaan gas nasional, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan gas untuk menjamin ketersediaan gas dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia.
3. Teknologi *Digital Twin*
   Sistem berbasis *real time monitoring*, *detection* dan *3D visualization* untuk aset *upstream*. Ketersediaan data Geospasial (*as-built-drawings & 3D models*) dan data Operasional (*real-time sensors*) yang masih dapat dimaksimalkan untuk berbagai keperluan seperti:
   - *Descriptive Analytics* (*Asset Documentation, Defect Detection, Remote Monitoring, Anomaly Detection*)
   - *Predictive Analytics* (*Asset Maintenance, Asset Life Span, Repair/Replacement Plan* menggunakan AI/ML)
4. *Online Payment*
   POPAY adalah aplikasi yang mengelola sistem proses pembayaran di PGN Aplikasi ini menyederhanakan proses pengajuan hingga persetujuan pembayaran, baik untuk transaksi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan fokus pada efisiensi dan otomatisasi, POPAY memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran secara digital dan mengelola transaksi keuangan secara lebih terstruktur.
5. *Mobile Application for Customer*
   PGN Mobile adalah aplikasi mobile resmi dari PGN yang menyediakan informasi singkat tentang layanan, produk, dan manfaat gas bumi. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi tagihan, melihat riwayat transaksi, dan mengawasi *history* pemakaian gas dengan mudah. Dengan PGN Mobile, pelanggan dapat memantau dan mengelola pemakaian gas mereka secara lebih terarah, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan kontrol atas konsumsi gas bumi.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

PGN berkomitmen untuk terus memperkuat *platform* Teknologi Informasi guna menjaga dan meningkatkan keamanan proses bisnis dan keandalan dalam penyediaan

gas network infrastructure from the offtake station to customer gas meter stage in a more efficient and focused manner.

2. Gas Distribution Information System
   The use of Gas Management System (SIPGas) technology is a breakthrough in Digital Transformation in national gas management, increasing the optimization of gas utilization to ensure gas availability to support energy security in Indonesia.
3. Digital Twin Technology
   A system that is based on real-time monitoring, detection, and 3D visualization for upstream assets. Availability of Geospatial data (as-built-drawings & 3D models) and Operational data (real-time sensors), which can still be maximized for various purposes, such as:
   - Descriptive Analytics (Asset Documentation, Defect Detection, Remote Monitoring, Anomaly Detection)
   - Predictive Analytics (Asset Maintenance, Asset Life Span, Repair/Replacement Plan using AI/ML)
4. Online Payment
   POPAY is an application that manages the payment process system at PGN. This application simplifies the application process to payment approval, both for the company's internal and external transactions. With a focus on efficiency and automation, POPAY allows the company to conduct digital payments and manage financial transactions in a more structured manner.
5. Mobile Application for Customer
   PGN Mobile is the official mobile application from PGN, which provides brief information about the services, products, and benefits of natural gas. This application facilitates customers to access billing information, view transaction history, and monitor gas usage history easily. With PGN Mobile, customers can monitor and manage their gas usage in a more targeted manner, thereby helping to increase efficiency and control over natural gas consumption.

UTILIZATION OF TECHNOLOGY TO ACCESS COMPANY INFORMATION

PGN is committed to continuously strengthening the Information Technology platform to maintain and improve the security and reliability of its business

informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu, PGN memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi secara lebih luas selain dengan menggunakan situs Perusahaan www.pgn.co.id sebagai media keterbukaan informasi, PGN juga mengoptimalkan *platform* lainnya seperti media sosial Instagram (gas_negara), Twitter (@ Gas_Negara), Facebook (Perusahaan Gas Negara), Youtube (Perusahaan Gas Negara) serta portal Kementerian BUMN.

Lebih jauh lagi, PGN melakukan digitalisasi dalam seluruh rantai proses bisnis, mulai dari sisi operasional hingga *business support* untuk mendukung kinerja Perusahaan agar lebih *agile*, efektif dan efisien baik dari segi tata kelola bisnis maupun waktu.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER

Tata kelola Teknologi Informasi (*IT governance*) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan dengan efektif, efisien, serta selaras dengan tujuan strategis Perusahaan. Tujuan dari tata kelola TI adalah untuk menyelaraskan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan bisnis, memastikan keamanan informasi, dan menjamin adopsi teknologi yang mendukung keberlanjutan dan inovasi.

Tata kelola Teknologi Informasi juga menjadi pedoman yang mengarah pada pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam mencapai rencana bisnis Perusahaan. Penerapan tata kelola Teknologi Informasi terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala dengan mengadopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Peraturan Pemerintah serta *International Best Practice* yang dapat memitigasi risiko berdasarkan perkembangan teknologi.

Dengan semakin tingginya risiko serangan siber yang dihadapi Perusahaan, PGN juga berfokus pada peningkatan ketahanan keamanan siber, salah satunya melalui audit standardisasi tata kelola Teknologi Informasi, ICT berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 pada 2023. Standar sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) menentukan persyaratan untuk penetapan, penerapan, operasi pemantauan, peninjauan pemeliharaan dan peningkatan SMKI. Dengan menerapkan standar internasional ini berarti PGN memiliki tata kelola untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi dan berkomitmen melindungi serta memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Selain itu PGN juga terbukti dapat mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi di lingkungan Perusahaan.

processes in providing integrated, timely, and targeted information. For this reason, PGN makes wider use of Information Technology. In addition to using the Company's website www.pgn.co.id as a medium for information disclosure, PGN also optimizes other platforms, such as social media Instagram (gas_negara), Twitter (@Gas_negara), Facebook (Perusahaan Gas Negara), YouTube (Perusahaan Gas Negara), and the Ministry of SOEs portal.

Furthermore, PGN digitizes the entire business process chain, from operational to business support to support the Company's performance to be more agile, effective, and efficient both in terms of business governance and time.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND CYBER SECURITY

Information Technology governance (IT governance) is a framework designed to ensure that Information Technology management is carried out effectively, efficiently and in line with the Company's strategic objectives. The goal of IT governance is to align the use of information technology with business objectives, ensure information security, and guarantee the adoption of technology that supports sustainability and innovation.

IT governance also serves as a guideline that leads to compliance with applicable rules and regulations, while still taking into account the needs in achieving the Company's business plan. The implementation of IT governance continues to be improved and evaluated periodically by adopting the Regulations of the Financial Services Authority, Ministry of SOEs, Government Regulations, as well International Best Practices that can mitigate risks based on technological developments.

With the increasingly large risk exposure to cyber-attacks, PGN has also laid a focus on how to improve cyber security resilience through e.g. audit standardization to IT governance, ICT succeeded in obtaining ISO 27001:2022 certification in 2023. The information security management system (ISMS) standard determines the requirements for establishing, implementing, monitoring operations, maintenance monitoring, and improving ISMS. By implementing this international standard, PGN has the governance to manage risks to information security and is committed to protecting and maintaining the confidentiality, integrity, and availability of information. Moreover, PGN has also been proven to be able to manage and control information security risks within the Company.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Dalam rangka meningkatkan resiliensi keamanan siber, pada tahun 2023, PGN melakukan asesmen Cyber Security Maturity (CSM) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu PGN telah membentuk Cyber Incident Response Team (CIRT) Sub Holding Gas melalui SK Direksi No. 039700.L/TI/HCGS/2023, hal ini sebagai upaya penanganan insiden siber di lingkup Sub Holding Gas Pertamina. Secara berkala, juga dilakukan vulnerability assessment dan penetration test, terhadap sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan PGN seperti kegiatan simulasi phising kepada pekerja PGN, selain itu juga dilakukan webinar di lingkup Sub Holding Gas Pertamina.

In order to increase the resilience of cyber security, in 2023, PGN conducted a Cyber Security Maturity (CSM) assessment in collaboration with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). In addition, PGN has established a Gas Sub Holding Cyber Incident Response Team (CIRT) through Decree of the Board of Directors No. 039700.L/TI/HCGS/2023, this is an effort to address cyber incidents within Pertamina's Gas Sub-Holding. Periodically, vulnerability assessments and penetration tests on application systems used within PGN are also carried out, such as phishing simulation activities for PGN workers, in addition, webinars are also held within the scope of the Pertamina's Gas Sub Holding.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI

PGN terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi agar mampu berperan dalam menentukan keberhasilan dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis di Perusahaan, termasuk memberikan ide-ide inovasi yang sesuai dengan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi.

DEVELOPMENT OF HR COMPETENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY

PGN continues to develop the competencies of Human Resources (HR) in the field of information technology, enabling them to contribute to the Company's success in business planning and management, including generating innovative ideas related to the provision of infrastructure and utilization of natural gas.

Sesuai dengan 30 kompetensi teknis berdasarkan profil kebutuhan kompetensi jabatan yang dimiliki, ICT saat ini memiliki SDM sebanyak 26 Pekerja yang telah mengikuti *training* dengan atau tanpa tersertifikasi dan mengikuti sebanyak 27 program *public training* yang terkait dengan Teknologi Infomasi maupun umum.

ICT currently has 26 employees who have completed certified and/or uncertified training in accordance with 30 technical competencies based on the competency requirements profile of the occupied position and took part in 27 public training programs related to Information Technology and general matters.

Selain itu 100% pekerja dilingkungan PGN, seluruhnya diwajibkan untuk mengikuti program e-learning mandatory secara online terkait Information Security Easy Course (i-SEC) setiap tahunnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap risiko Siber.

Apart from that, 100% of PGN employees are all required to take part in the mandatory online e-learning program related to the Information Security Easy Course (i-SEC) every year, this aims to increase workers' awareness and understanding of Cyber risks.

RENCANA DAN STRATEGI 2024

Pada tahun 2024, PGN melalui ICT akan menjalankan program strategis yang menitikberatkan pada *key strategic initiatives* dengan fokus utama yaitu Digitalisasi Berlangganan Gas. Program strategis ini sesuai dengan peran dan kontribusi ICT dalam *core* strategi bisnis Subholding Gas untuk mendorong inovasi ICT dalam hal produktivitas, optimalisasi proses bisnis dan aset strategis.

PLANS AND STRATEGIES FOR 2024

In 2024, PGN through ICT will carry out a strategic program that focuses on key strategic initiatives with the focus being Digitalization of Gas Subscriptions. This strategic program is in accordance with the role and contribution of ICT in the core business strategy of Gas Subholding to encourage ICT innovation in terms of productivity, optimization of business processes and strategic assets.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Dividend Payment Policy

Perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang terukur seperti target rasio pembayaran dividen atau target dividen per lembar sahamnya dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan arus kas Perusahaan. Mengacu pada Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) tahun 2003, Perusahaan menetapkan kebijakan dividen *payout ratio* 50% setiap tahun, namun penentuan jumlah dividen ini bergantung pada kemampuan perusahaan dan persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

The Company implements a measurable dividend policy such as a dividend payment ratio target or dividend per share targte by taking into account the Company's performance and cash flow capabilities. Referring to the 2003 Initial Public Offering (IPO) Prospectus, the Company has targeted a dividend payout ratio policy of 50% every year, however, determining the amount of this dividend depends on the company's capabilities and approval from Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Pada tahun 2023, Perusahaan melalui RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023 memutuskan membagikan dividen tunai sebesar USD228.367.788 (setara Rp3.419.350.889.793), atau 70% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2022 yang dibagikan Rp141,05 per lembar saham.

Pada tahun 2022, Perusahaan melalui RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022 memutuskan membagikan dividen tunai sebesar USD205.955.966 (setara Rp3.016.128.449.746), atau 68% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2021 yang dibagikan Rp124,42 per lembar saham.

Informasi detail mengenai pembagian jumlah dividen yang dibagikan Perusahaan sebagai berikut:

ANNOUNCEMENT AND PAYMENT OF DIVIDENDS

In 2023, the Company, through the Annual GMS on May 30, 2023, decided to distribute cash dividends in the amount of USD 228,367,788 (equivalent to Rp3,419,350,889,793), or 70% of net profit (as reported in the statement of changes in equity) with Rp141.05 per share of cash dividends for the 2022 Financial Year.

In 2022, the Company, through the Annual GMS on May 27, 2022, decided to distribute cash dividends in the amount of USD 205,955,966 (equivalent to Rp3,016,128,449,746), or 68% of net profit (as reported in the statement of changes in equity) with Rp124.42 per share of cash dividends for the 2021 Financial Year.

The following is detailed information regarding the distribution of dividends distributed by the Company:

Uraian Description	2022	2021	2020	2019	2018
Laba Bersih (USD) Net Profit (USD)	326.239.697	303.823.865	(264.773.584)	67.584.090	304.991.574
Dividen (Rp) Dividend (Rp)	3.419.350.889.793	3.016.128.449.746		1.007.477.080.626	1.381.523.552.090
Dividen per saham (Rp) Dividend per share (Rp)	141,05	124,42		41,56	56,99
Jumlah Lembar Saham Number of Shares	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196
Dividen *Pay Out Ration* (%) Dividend Pay Out Ratio (%)	70	68	0	100	32
Tanggal Pengumuman Announcement Date	05/30/2023	05/27/2022	05/03/2021	5/15/2020	04/30/2019
Tanggal Pembayaran Payment Date	6/28/2023	6/29/2022		6/18/2020	05/28/2019
Dividen setara USD Dividend equivalent in USD	228.367.788	205.955.966		67.584.090	97.372.678
Kurs | Currency Rates	14.973	14.645		14.907	14.188

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Hingga akhir tahun 2023, PGN tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

Up to the end of 2023, PGN has no obligation to report the use of funds from the public offering.

miliar Rupiah | billion Rupiah

Periode Period	**Jumlah Hasil Penawaran Umum** Total Proceeds of Public Offering	**Biaya Penawaran Umum** Public Offering Fee	**Hasil Bersih** Net Proceeds	**Setoran ke Kas Negara** Deposit to the State Treasury	**Pendanaan Proyek SSWJ** SSWJ Project Funding	**Progres Pendanaan Proyek SSWJ** Progress of SSWJ Project Funding	**Saldo Akhir** Ending Balance
31 Des 2003 Dec 31, 2003	2.527,78	147,239	2.380,54	1.217,21	1.163,33	–	1.163,33
31 Mar 2003 Mar 31, 2003	–	–	–	–	–	–	1.163,33
30 Jun 2004 Jun 30, 2004	–	–	–	–	–	–	1.163,33
30 Sep 2004 Sep 30, 2004	–	–	–	–	–	6.984	1.156,35
31 Des 2004 Dec 31, 2004	–	–	–	–	–	6.748	1.149,60
31 Mar 2005 Mar 31, 2005	–	–	–	–	–	1.19	1.148,41
30 Jun 2005 Jun 30, 2005	–	–	–	–	–	24.766	1.123,64
30 Sep 2005 Sep 30, 2005	–	–	–	–	–	61.249	1.062,39
31 Des 2005 Dec 31, 2005	–	–	–	–	–	516.877	545,517
31 Mar 2006 Mar 31, 2006	–	–	–	–	–	463.361	82,155
30 Jun 2006 Jun 30, 2006	–	–	–	–	–	82.155	–

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Informationi Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

Selama tahun 2023, PGN mencatatkan adanya transaksi material terkait restrukturisasi utang/modal yaitu:

During 2023, PGN recorded material transactions related to debt/capital restructuring, namely:

1. Pembelian Kembali Surat Utang PGN

PGN Bond Buyback

Tanggal Kejadian Date of Event	22 September 2023	September 22, 2023
Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts	Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	Buyback or payment of Debt Securities and/or Sukuk.
Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information or Facts	Perseroan telah menerbitkan surat utang senior dengan nilai USD1.350.000.000 pada tanggal 16 Mei 2014 untuk jangka waktu selama 10 tahun yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura ("Surat Utang"). Berdasarkan surat Perseroan No. 110600.S/KU.06.01/COS/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material / Report on Material Information or Facts dan Surat No. 057300.S/KU.06.01/COS/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material/ *Report on Material Information or Facts*, Perseroan telah melakukan penawaran atas pembelian kembali Surat Utang dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan pembatalan sebagian Surat Utang sebagai konsekuensi pembelian kembali sebesar USD400.000.000 pada tanggal 14 Desember 2022 dan USD499.851.000 pada tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2023, Perseroan telah melakukan pembatalan sebagian Surat Utang sebagai konsekuensi pembelian kembali Surat Utang dengan skema *Open Market Purchase* sebesar USD53.440.000.	The Company has issued USD1,350,000,000 senior notes on May 16, 2014, which will mature after a period of 10 years which are listed on the Singapore Stock Exchange ("Notes"). Based on our previous letter No. 110600.S/KU.06.01/COS/2022 dated December 15, 2022, regarding Report on Material Information or Facts and No. 057300.S/KU.06.01/COS/2023 dated June 5, 2023, regarding Report on Material Information or Facts, the Company has conducted the offer to buyback the Notes and the Company has made payments and cancelled some of the Notes as the consequence of the buyback in the aggregate amount of USD400.000.000 on December 14, 2022, and USD499.851.000 on May 31, 2023. Furthermore, on September 22, 2023, The Company has cancelled some of the Notes as the consequence of the buyback with Open Market Purchase scheme in the aggregate total amount of USD53.440.000.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity	Dampak yang teridentifikasi dari pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang adalah sebagai berikut: 1. Nilai Surat Utang yang masih beredar setelah pelaksanaan pembelian kembali adalah sebesar USD396.709.000 (*at par*) dan akan jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2024; 2. Penggunaan kas internal untuk pembayaran kembali Surat Utang tidak berdampak terhadap likuiditas Perseroan.	The impacts identified from the implementation of the buyback of the Notes are as follows: 1. The value of the outstanding Notes after the implementation of the buyback is USD396.709.000 (at par) and will mature in May 2024; 2. The utilization of internal cash for the repayment of the Notes has no impact on the Company's liquidity.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Informationi Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/ Capital Restructuring

2. Pembelian Kembali Surat Utang SEI

SEI Bond Buyback

Tanggal Kejadian Date of Event	21 Juli 2023	July 21, 2023
Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts	Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	Buyback or payment of Debt Securities and/or Sukuk.
Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information or Facts	1. PT Saka Energi Indonesia ("SAKA") sebagai anak perusahaan Perseroan menerbitkan surat utang senior dengan nilai USD625.000.000,00 pada tanggal 26 April 2017 untuk jangka waktu selama 7 tahun yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura ("Surat Utang"). SAKA telah melakukan pembelian kembali surat utang sepanjang tahun 2022 dengan nilai USD248,748,000 sehingga sisa surat utang yang masih beredar USD 376,252,000. 2. Berdasarkan surat kami sebelumnya No. 063900.S/KU.06.01/COS/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, SAKA berencana melakukan pembelian kembali Surat Utang senilai USD 200,000,000 dengan masa penawaran di pasar yang telah dimulai sejak tanggal 06 Juli 2023 dan akan berakhir tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan suatu memorandum penawaran tender (*Tender Offer Memorandum*) yang tersedia di *https://deals.is.kroll.com/saka*. 3. Terkait hal tersebut diatas, SAKA mengumumkan hasil dari masa penawaran awal dan menaikkan nilai pembelian kembali Surat Utang menjadi sebesar USD220.000.000 yang dilanjutkan dengan pembayaran dan pembatalan sebagian Surat Utang sebagai hasil pembelian kembali pada masa penawaran awal senilai total USD220.000.000 di tanggal 21 Juli 2023. 4. Masa penawaran tetap berlanjut sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023, namun SAKA tidak akan menerima penawaran lebih lanjut setelah berakhirnya masa penawaran awal.	1. PT Saka Energi Indonesia ("SAKA") as subsidiary of the Company has issued USD625,000,000.00 senior notes on April 26, 2017, which will mature after a period of 7 years, which are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("Notes"). SAKA has conducted a buy back of the Notes during 2022 in the amount of USD248,748,000 so that the remaining outstanding notes are USD376,252,000. 2. Based on our previous letter No. 063900.S/KU.06.01/COS/2023 dated July 10, 2023, subject Report on Material Information or Facts, SAKA plans to buy back USD 200,000,000 of Notes with the offering period on the market starts from July 06, 2023, and is scheduled to end on August 02, 2023, pursuant to a Tender Offer Memorandum, which is available at https://deals.is.kroll.com/saka. 3. Based on the above, SAKA announced result of early tender period and increased the amount of the buyback of the Notes to USD220,000,000 followed by making payments and cancelled some of the Notes as the result of the buyback during early tender time in the aggregate amount of USD220,000,000 on July 21, 2023. 4. The bidding time is continued until August 02, 2023, but no further bidding will be accepted by SAKA after the early tender time.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity	Dampak yang teridentifikasi dari pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang adalah sebagai berikut: 1. Nilai Surat Utang yang masih beredar setelah pelaksanaan pembelian kembali adalah sebesar USD156.252.000 (*at par*) dan akan jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2024; 2. Pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang telah mengikuti kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dan New York; dan 3. Penggunaan kas internal untuk pembayaran kembali Surat Utang tidak berdampak terhadap likuiditas SAKA dan Perseroan.	The impacts identified from the implementation of the buyback of the Notes are as follows: 1. The value of the outstanding Notes after the implementation of the buyback is USD156,252,000 (at par) and will mature in May 2024; 2. The implementation of the Notes buyback has followed the prevailing laws in Indonesia and New York; and 3. The internal cash used for the repayment of the Notes has no impact on SAKA and the Company's liquidity.

3. Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang Mendapat Pengecualian
Disclosure of Information regarding Material Transaction with Exemptions

Tanggal Kejadian Date of Event	9 Mei 2023	May 9, 2023
Obyek Transaksi Transaction Object	Perseroan menerima pinjaman fasilitas berjangka tanpa jaminan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari bank berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tertanggal 9 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit") (untuk selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas").	The Company received an unsecured term facility loan in United States Dollars from banks based on Deed of Loan Agreement No. 03 dated May 9, 2023, made before Emi Susilowati, S.H., Notary in Jakarta ("Loan Agreement") (hereinafter referred to as the "Facility").
Nilai Nilai Transaksi Transaction Value	Nilai total dari Fasilitas adalah tidak lebih dari USD800.000.000,(delapan ratus juta dolar Amerika Serikat) ("Nilai Total Fasilitas"), yang terdiri dari: a. Fasilitas A sebesar USD600.000.000,-(enam ratus juta dolar Amerika Serikat); dan b. Fasilitas B sebesar USD200.000.000,-(dua ratus Juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas perseroan adalah sebesar USD3.441.770.638,- (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar Amerika Serikat). Nilai Total Fasilitas tersebut di atas mencapai sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dari total ekuitas Perseroan, sehingga Fasilitas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Meskipun demikian, mengingat Fasilitas merupakan transaksi pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan dari Para Kreditur yang merupakan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17 /2020, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.	The total value of the Facility is not more than USD800,000,000.(eight hundred million United States Dollars) ("Total Value of the Facility"), which consists of: a. Facility A in the amount of USD600,000,000.- (six hundred million United States Dollars); and b. Facility B in the amount of USD200,000,000.- (two hundred million United States Dollars). Based on the Company's Consolidated Financial Statements dated December 31, 2022, the Company's total equity amounted to USD3,441,770,638,- (three billion four hundred forty-one million seven hundred seventy thousand six hundred thirty-eight United States dollars). The total value of the abovementioned facility reaches approximately 23% (twenty three percent) of the Company's total equity, so the Facility is a Material Transaction pursuant to in POJK 17/2020. However, considering that the Facility is a loan transaction received directly by the Company from Creditors, which are banks as regulated in Article 11 letter (b) POJK 17/2020, the Company is not required to use an appraiser and obtain approval from the general meeting of shareholders.
Pihak-Pihak yang melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan Parties carrying out transactions and relationships with the Company	1. Perseroan sebagai debitur; dan 2. PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Kreditur").	1. The Company as debtor; and 2. PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as creditors (hereinafter collectively referred to as "Creditors").
Rincian Transaksi Material Details of Material Transaction	a. Waktu jatuh tempo terakhir sehubungan dengan Fasilitas adalah: i) Fasilitas A pada tahun ke-5 (lima); dan ii) Fasilitas B pada tahun ke-3 (tiga), sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. b. Tingkat bunga dari Fasilitas adalah sebagai berikut: i) Fasilitas A: Marjin + Term SOFR 3 (tiga) bulan; dan ii) Fasilitas B: Marjin + Term SOFR 3 (tiga) bulan. c. Tidak terdapat pemberian jaminan oleh Perseroan kepada Para Kreditur (*clean basis*). d. Perjanjian Kredit memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum diatur dalam perjanjian serupa.	a. The final maturity date in connection with the Facility is: i) Facility A in the fifth (5th) year; and ii) Facility B in the third (3rd) year, from the signing date of the Loan Agreement. b. The following is the interest rates for the Facility: i) Facility A: Margin + SOFR Term 3 (three) months; and ii) Facility B: Margin + SOFR Term 3 (three) months. c. There is no guarantee by the Company to Creditors (clean basis). d. The Loan Agreement contains provisions that are generally regulated in similar agreements.
Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan Explanation, considerations, and reasons for carrying out Material Transaction as well as impacts of the transaction to the Company's financial conditions	Perseroan memerlukan Fasilitas dari bank dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang dapat digunakan untuk keperluan umum (*general purpose*). Dengan menerima Fasilitas, Perseroan diantaranya dapat memenuhi: a. pembayaran kembali (*refinancing*) utang yang dimiliki Perseroan; b. pembayaran belanja modal (*capital expenditure*); c. pembayaran modal kerja; dan/atau d. tujuan umum perusahaan lainnya. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas penerimaan Fasilitas ini.	The Company requires the Facility from banks in order to develop the Company's business, which can be used for general purposes. By receiving this Facility, the Company will be able to fulfil, amoing others: a. repayment (refinancing) of the Company's debts; b. capital expenditure; c. working capital payments; and/or d. other general objectives of the company. Based on the review conducted by the Company, there are no material impacts on the Company's financial conditions due to the receipt of the Facility.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Informationi Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/ Capital Restructuring

Pernyataan Direksi Statement of the Board of Directors	Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.	The Company's Board of Directors stated that this Material Transaction is not an affiliated transaction as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020
Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa: a. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan b. semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.	The Company's Board of Commissioners and Board of Directors stated that: a. This Material Transaction does not contain conflicts of interest as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Transactions; and b. all material information has been disclosed and the information is not misleading.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions

Selama tahun 2023, PGN mencatatkan adanya transaksi transaksi afiliasi yaitu:

During 2023, PGN recorded affiliated transactions, namely:

1. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling ("Transaksi") antara PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), Anak Perusahaan dan Afiliasi dari Pertamina dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI").

Notional Pooling Services Cooperation Agreement ("Transaction") between PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), Subsidiaries and Affiliates of Pertamina and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI").

Tanggal Kejadian Date of Event	27 Desember 2023	27 December 2023
Obyek Transaksi Transaction Object	Penandatanganan Surat Aksesi sebagai keikutsertaan PGN dalam layanan jasa notional pooling sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling ("Transaksi") antara PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), Anak Perusahaan dan Afiliasi dari Pertamina dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI").	Signing of the Accession Letter as PGN's participation in notional pooling services as regulated in the Notional Pooling Services Cooperation Agreement ("Transaction") between PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), Subsidiaries and Affiliates of Pertamina and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI").
Nilai Nilai Transaksi Transaction Value	Rp50.000.000.000 dan USD5,000,000	Rp50.000.000.000 and USD5,000,000
Pihak-Pihak yang melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan Parties carrying out transactions and relationships with the Company	1. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi: a. Pertamina sebagai Koordinator; b. BRI sebagai penyedia layanan Notional Pooling; c. Perseroan sebagai Anggota Notional Pooling; d. Anak Perusahaan dan Afiliasi dari Pertamina sebagai Anggota Notional Pooling. 2. Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi: Hubungan antara Pertamina sebagai pemegang saham utama dan Perseroan sebagai Anak Perusahaan Pertamina.	1. Parties carrying out the Transaction: a. Pertamina as Coordinator; b. BRI as Notional Pooling service provider; c. Perseroan as Notional Pooling Member; d. Subsidiaries and Affiliates of Pertamina as Notional Pooling Members. 2. Relationship between the parties carrying out the Transaction: Relationship between Pertamina as ultimate shareholder and the Company as Subsidiary of Pertamina.
Alasan Dilakukannya Transaksi Reason for Carrying out the Transaction	Alasan dilakukannya Transaksi adalah dalam rangka optimalisasi dana Pertamina Group.	The reason for carrying out the transaction is in order to optimalization funds of Pertamina Group.

2. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor PT PGN LNG Indonesia ("PLI")
Reduction of Issued and Paid-up Capital of PT PGN LNG Indonesia ("PLI")

Tanggal Kejadian Date of Event	10 Desember 2023	December 10, 2023
Obyek Transaksi Transaction Object	Pengurangan modal ditempatkan dan disetor PT PGN LNG Indonesia ("PLI").	Reduction of Issued and Paid-up Capital of PT PGN LNG Indonesia ("PLI").
Nilai Nilai Transaksi Transaction Value	Rp1.924.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar Rupiah)	Rp1.924.000.000.000,- (one trillion nine hundred and twenty four billion Rupiah)
Pihak-Pihak yang melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan Parties carrying out transactions and relationships with the Company	1. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi: a. Perseroan sebagai Pemegang Saham PLI sebesar 99,999%. b. PT Gagas Energi Indonesia ("GEI") sebagai Pemegang Saham PLI sebesar 0,001%. c. PLI sebagai perusahaan yang melaksanakan pengurangan modal ditempatkan dan disetor. 2. Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi: • Perseroan merupakan Pemegang Saham Utama PLI dan GEI. • PLI dan GEI merupakan Perusahaan Terkendali yang 99,999% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.	1. Parties carrying out the Transaction: a. The Company as Shareholder of PLI owns 99,999% of shares. b. PT Gagas Energi Indonesia ("GEI") as Shareholder of PLI owns 0,001% of shares. c. PLI as a company that carries out issued and paid-up capital reduction. 2. Relationship between the parties carrying out the Transaction: • The Company is the Majority Shareholder of PLI and GEI. • PLI and GEI are Controlled Companies whose 99.999% shares owned by the Company.
Alasan Dilakukannya Transaksi Reasons for Carrying out the Transaction	Alasan dilakukannya Transaksi adalah dalam rangka optimalisasi dana Group Perseroan.	The reason for carrying out the transaction is in order to optimize Company's Group funds.

3. Akusisi WK Sangkar
Acquisition of WK Sangkar

Tanggal Kejadian Date of Event	5 Juli 2023	July 5, 2023
Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts	Perolehan Kontrak Penting	Acquisition of Important Contract
Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information or Facts	PT Saka Energi Indonesia ("SEI") (anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,997%), melalui anak perusahaannya PT Saka Eksplorasi Timur ("SET") telah melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama ("KKS") Wilayah Kerja Sangkar ("WK Sangkar") dengan SKK MIGAS pada tanggal 30 Mei 2023. Berdasarkan KKS WK Sangkar ditetapkan bahwa tanggal efektif berlakunya KKS WK Sangkar dimulai sejak adanya persetujuan oleh Pemerintah cq Menteri ESDM atas KKS WK Sangkar tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2023 SEI telah menerima dokumen KKS WK Sangkar dari Direktorat Jenderal Migas (DJM) dengan status dokumen telah dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan Menteri ESDM. Dengan demikian maka KKS WK Sangkar berlaku efektif.	PT Saka Energi Indonesia ("SEI") (a subsidiary of the Company with 99.997% ownership of the Company's shares), through its subsidiary PT Saka Eksplorasi Timur ("SET") has signed a PSC Contract ("PSC") for the Sangkar Block ("WK Sangkar") with SKK MIGAS on May 30,, 2023. Based on the PSC WK Sangkar, it is determined that the effective date of the PSC WK Sangkar starts from the date of the approval by the Government cq Minister of Energy and Mineral Resources for the PSC WK Sangkar. On July 5, 2023, SEI received the PSC WK Sangkar document from the Directorate General of Oil and Gas (DJM) with the document status completed and signed by the Minister of Energy and Mineral Resources. Thus, the KKS WK Sangkar has become effective.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity	Atas persetujuan Pemerintah tersebut, maka SET memiliki 100% participating interest dan menjadi operator WK Sangkar termasuk hak dan kewajiban sebagai Kontraktor pada KKS WK Sangkar.	With the Government's approval, SET has a 100% participating interest and becomes the operator of the WK Sangkar including the rights and obligatios as a contractor for the PSC WK Sangkar.
Keterangan lain-lain Other Information	-	-

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions

PGN berkomitmen menetapkan setiap transaksi material dilaksanakan melalui prosedur yang memadai. PGN juga memastikan bahwa transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak berelasi (*Related Party Transactions*/RPT) juga dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta menjalankan kebijakan yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT yang material. Dewan Komisaris dan Komite Audit juga berperan untuk memastikan transaksi dilakukan melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

PGN is committed to ensuring that every material transaction is carried out through adequate procedures. PGN also ensures that affiliated transactions and related party transactions (RPT) are carried out in accordance with generally accepted business practices as well as implement policies that include the review and approval of the material RPT. The Board of Commissioners and Audit Committee also play a role to ensure that the transaction is carried out through adequate procedures and implemented in accordance with generally accepted business practices, including by complying with the armslength principle.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amendments to Laws and Regulations

Selama tahun 2023, terdapat beberapa peraturan yang terkait langsung dan berdampak signifikan terhadap bisnis operasional yang selama ini dijalankan PGN. PGN sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengangkutan dan niaga gas bumi serta LNG sesuai perannya sebagai Subholding Gas diwajibkan untuk tunduk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut. Ringkasan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

   Merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme partisipasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja berserta pengaturannya telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemerintah perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan

During 2023, there were several regulations that are directly related to and have a significant impact on the operational business carried out by PGN. As a business entity engaged in the transportation and trading business of natural gas as well as LNG in accordance with its role as Gas Subholding, PGN is required to comply with the provisions of this law. Summary of changes to statutory provisions that have a significant impact on the Company and their impact on financial statements are, among others:

1. **Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law**

   This is a regulation that was established to improve the Job Creation Law through a public participation mechanism. To support the implementation of strategic job creation policies and their regulations, Law No. 22 of 2020 on Job Creation has been stipulated, however, the Law has undergone formal reviews at the Constitutional Court through Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. As a follow-up to the Constitutional Court's decision, the Government needs to prepare and enact a Government Regulation in Lieu of the Law on Job Creation to make improvements and replacements to Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Furthermore, Government

dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, meningkatkan perekonomian nasional serta pertumbuhan investasi.

Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 needs to be enacted into Law. This regulation aims to create jobs by increasing business convenience and certainty, improving the national economy, as well as growth in investment.

2. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**
   Merupakan peraturan yang mengatur berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. **Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises**
   This is a regulation that regulates the mechanisms for implementing special assignment and social and environmental responsibility programs of State-Owned Enterprises.

3. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara**
   Merupakan peraturan yang memiliki ruang lingkup pengaturan berkaitan dengan prinsip tata Kelola Badan Usaha Milik Negara, penerapan manajemen risiko pada Badan Usaha Milik Negara, penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara, perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara, pedoman kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara, penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaporan Badan Usaha Milik Negara.

3. **Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises**
   This is a regulation that has a regulatory scope relating to the governance principles of State-Owned Enterprises, implementation of risk management in State-Owned Enterprises, assessment on the soundness level of State-Owned Enterprises, strategic planning of State-Owned Enterprises, guidelines for significant corporate activities of State-Owned Enterprises, implementation of information technology for State-Owned Enterprises, and reporting of State-Owned Enterprises.

4. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**
   Merupakan peraturan yang memiliki ruang lingkup pengaturan berkaitan dengan syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan, Manajemen Talenta Direksi Badan Usaha Milik Negara, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan, Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

4. **Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises**
   This is a regulation that has a regulatory scope relating to the requirements for members of the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Subsidiaries, Talent Management of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, procedures for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises, procedures for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, procedures for dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Subsidiaries, Income for members of the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises, and Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amendments to Laws and Regulations

5. **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Tahun 2023 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri**
   Merupakan peraturan yang mengatur mengenai penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu terdiri atas Volume Gas Bumi, Harga Penyesuaian, dan tarif penyaluran Gas Bumi yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya midstream. Kemudian, Volume Gas Bumi mempertimbangkan ketersediaan pasokan Gas Bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.

6. **Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**
   Merupakan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, jenis dan tata cara penghitungan tarif, pelaporan dan pengawasan yang mana peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi gas bumi dan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur pengangkutan gas bumi melalui pipa dan distribusi gas bumi melalui pipa.

7. **Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/Tarif/BPH Migas/KOM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**
   Merupakan peraturan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tata cara penghitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penghitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

5. **Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 of 2023 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Industrial Sector**
   This is a regulation that regulates the determination of Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Industrial Sector. Determination of Certain Natural Gas Prices consists of Natural Gas Volume, Adjustment Prices, and Natural Gas distribution fees that consist of transportation costs midstream costs. Furthermore, Natural Gas Volume considers the availability of Natural Gas supply and/or the adequacy of the state's portion of revenues.

6. **Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 1 of 2023 on Procedures for Calculating and Determining Tariffs for Transporting Natural Gas by Pipeline**
   This is a regulation that regulates the procedures for proposing and determining tariffs for transporting natural gas by pipeline, types and procedures for calculating tariffs, reporting and supervision. This regulation aims to increase the utilization of domestic natural gas, optimize the utilization of natural gas transmission pipe and distribution pipe network infrastructure, and increase investment in infrastructure for transporting and distributing natural gas through pipelines.

7. **Decree of the Head of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 38/Tariff/BPH Migas/KOM/2023 on Guidelines for Implementing Procedures for Calculating and Determining Tariffs for Transporting Natural Gas Through Pipeline**
   This is a regulation that regulates guidelines for implementing procedures for calculating and determining tariffs for transporting natural gas using pipelines, which are used as a reference in calculating and determining tariffs for transporting natural gas through pipelines.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Changes in Accounting Policies

Perusahaan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Company prepares Consolidated Financial Statements according to Financial Accounting Standards in Indonesia, which include Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Accounting Standards and Regulations as well as Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Reports issued by the Financial Services Authority (OJK).

Perusahaan untuk pertama kali menerapkan seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

The Company first applied all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after 1 January 2023, including the following revised standards that affect the Group's consolidated financial statements:

- **Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

  Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

  Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Grup.

- **Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan**
  Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

  Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat

- **Amendment to PSAK 1: Presentation of financial statements regarding Disclosure of Accounting Policies**
  This amendment offers guidance and examples to help entities apply materiality considerations in accounting policy disclosures. The objective is to help entities provide more useful accounting policy disclosures by replacing the requirement to disclose an entity's 'significant' accounting policies with a requirement to disclose an entity's 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

  The amendment impacts the disclosure of the Group's accounting policies, but does not impact the measurement, recognition or presentation of any item in the Group's financial statements.

- **Amendment to PSAK 16: Fixed Assets - Results before Intended Use**
  This amendment does not allow an entity to deduct any proceeds from the sale of items produced when bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to operate in accordance with management's intentions from the acquisition cost of a fixed asset. Instead, entities shall recognize the proceeds from the sale of those items, and the costs of producing those items, in profit or loss.

  The Group applies the amendments retrospectively only to fixed assets that are made ready for use at or

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Changes in Accounting Policies

supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

- **Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi**
  Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

- **Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal**
  Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning. Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

- **Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan – Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua**
  Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation* and Development (OECD), dan mencakup:
  - Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
  - Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur

after the beginning of the earliest period presented in which the entity first applies the amendments.

This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements as there are no sales of resulting items of property, plant and equipment that become available for use at or after the beginning of the earliest period presented.

- **Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates**
  Amendment to PSAK 25 clarifies the differences between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and error corrections. The amendment also clarifies how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates. This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements.

- **Amendment to PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Taxes Related to Assets and Liabilities Arising from Single Transactions**
  Amendment to PSAK 46 Income Tax narrow the scope of the initial recognition exception that makes it no longer applicable to transactions that give rise to deductible temporary differences in the same amount and taxable temporary differences such as leases and decommissioning liabilities. This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements.

- **Amendment to PSAK 46: Income Tax – International Tax Reform - Pillar Two Model Provisions**

  This amendment to PSAK 46 was introduced in response to the Pillar Two Model regulations issued by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and includes:

  - Exceptions to the recognition and disclosure of information regarding deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income tax; and
  - Disclosure requirements for affected entities to help users of financial statements better understand the entity's exposure to Pillar Two

entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

income taxes arising from the law, particularly prior to the effective date of the law.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

These exceptions - the use of which must be disclosed - are effective immediately upon publication of these amendments. Other disclosure requirements apply to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not to interim periods ending on or before December 31, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

As of December 31, 2023, the legislation relating to Pillar Two income tax had not yet been implemented or had not been substantively implemented in the Indonesian territory where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential income tax exposure of Pillar Two. Potential Pillar Two income tax exposure, if any, is not currently known or can be reasonably estimated.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
Contribution to the Country

PGN yang bergerak dan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendistribusian manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada negara. PGN yakin bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang baik selaras dengan kontribusi Perusahaan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

PGN, which operates and runs a business as a natural resource management company, embraces a steadfast commitment to the distribution of economic benefits both directly and indirectly to all stakeholders, including the state. PGN believes that achieving good operational and financial performance is consistent with the Company's better contribution to the nation and state.

Pada tahun 2023, total kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut :

- Pajak
  Pada tahun 2023 PGN memberikan kontribusi kepada Negara berupa Pajak sebesar Rp4.980 miliar.
- Dividen
  Pada tahun 2023, PGN membagikan dividen kepada negara selaku pemilik 1 lembar saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp.141,05, dan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp 1.948 Milyar atas kinerja Keuangan tahun buku 2022.
- PNBP Lainnya
  Sedangkan kontribusi berupa PNBP lainnya adalah sebesar Rp282 miliar.

In 2023, the total contribution to the state through fulfilling Tax and Non-Tax State Revenue (PNBP) obligations will be as follows:

- Tax
  In 2023, PGN contributed to the State in the form of taxes to the amount of Rp4,980 billion.
- Dividends
  In 2023, PGN distributed dividends to the state as the owner of 1 Series A Dwiwarna share amounting to IDR 141.05, and to PT Pertamina (Persero) as the Proxy for the Series A Dwiwarna share amounting to IDR 1,948 billion for the 2022 financial year performance.
- Other PNBP
  Meanwhile, contributions in the form of other PNBP to the amount of Rp282 billion.

PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
Achievement of KPIs and Company Health Level

Skor KPI PGN yang disajikan masih merupakan hasil evaluasi internal PGN mengacu pada Laporan Keuangan PGN Tahun 2023 Audited, dengan skor tercapai 95,67 dan jika memperhitungkan Boundary KPI menjadi sebesar 93,55. Pencapaian ini sejalan dengan kinerja Perusahaan yang mengalami penurunan terutama dampak dari penurunan kinerja segmen upstream dan penurunan rata-rata harga minyak, selain itu penyerapan investasi juga masih di bawah target CAPEX yang dianggarkan terutama dari program pengembangan jaringan gas rumah tangga.

PGN's KPI score presented still represents of PGN's internal evaluation referring to the PGN's Consolidated Financial Statement as of December 31 December 2023 and for the year then ended with the score of 95.67 and 93.55 if Boundary KPI is included in the calculation This figure corresponds to the decline the Company was experiencing due especially to the decline in the performance of the upstream segment and the recent drop in the average oil price. Adding to the decline was the still below-budget capital expenditure absorption, especially from the household gas network development program.

Skor KPI PGN Audited saat ini masih dalam proses Agreed Upon Procedure yang dilakukan oleh Auditor EY. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial Direksi Subholding Gas Tahun 2023 baru akan tersedia pada tanggal 14 Mei 2024 mengacu pada Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Jasa Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial dan Individual Tahun Buku 2023 No. 017800.S/LG.01/CST/2024 tanggal 16 April 2024.

The PGN's Audited KPI score is currently in the process of Agreed Upon Procedure by the Auditor. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial Direksi Subholding Gas Tahun 2023 will be available on May 14, 2024, referring to Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Jasa Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial dan Individual Tahun Buku 2023 No. 017800.S/LG.01/CST/2024 dated April 16, 2024.

Dalam penilaian tingkat kesehatan Perusahaan, PGN mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-2/MBU/03/2023 dengan menggunakan lembaga pemeringkat.

In assessing the Company's health level, PGN complies with the provisions of the Minister of SOE Regulation No.PER-2/MBU/03/2023 to use a rating agency.

Peringkat (rating) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): aa(idn) - stable
b. Peringkat Akhir (Final Rating): AA+(idn) - stable

The rating submitted in the context of assessing the company health level is a rating carried out by PT Fitch Ratings Indonesia which was signed on March 22 2024 with the following results:

a. Stand Alone Rating: aa(idn) - stable

b. Final Rating: AA+(idn) - stable

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada Tahun Buku 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 termasuk dalam klasifikasi Sangat Sehat (AAA).

Therefore, the Health Level of PT Perusahaan Gas Negara Tbk in Fiscal 2023 in accordance with Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 is classified as Very Healthy (AAA).

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan dihadapkan beberapa risiko yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian Laba Perusahaan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak antara lain:

1. *Top risk* terkait arbitrase.
2. Peningkatan beban keuangan dampak sengketa pajak PGN Group terkait PPh, PPN untuk transaksi perusahaan dalam rentang waktu 2013 – 2020.
3. Penurunan *gross margin* niaga gas sektor industri dan kelistrikan HGBT.
4. Potensi penghapusan aset (*asset write-off*) pada blok South Sesulu.
5. *Top Risk* terkait *review tariff* pada pipa transmisi PGN.
6. Penurunan *gross margin* niaga gas.
7. Tidak optimalnya pemanfaatan pembayaran uang muka pembelian gas.
8. Kehilangan/kerusakan/kebocoran data pada sistem komputer *database* perusahaan
9. Transaksi jual beli LNG yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan kontrak.
10. Terjadinya pelanggaran pedoman HSSE.

ASESMEN MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Secara berkala dan konsisten, Perusahaan mengimplementasikan praktik terbaik manajemen risiko dalam melakukan evaluasi atas penyusunan rencana strategis dan melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk mencapai target dalam rangka menjamin kelangsungan usaha.

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan risiko korporat untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi Perusahaan, mengevaluasi risiko dan mengelola penanganan terhadap risiko sehingga dapat diterima pada tingkat yang sesuai dengan *Risk Appetite*.

FACTORS WITH SIGNIFICANT IMPACT POTENTIALS ON BUSINESS CONTINUITY

Throughout 2023, the Company was faced with several risks that have the potentials to have a significant impact on the achievement of the Company's Profits and performance targets that have been set by top management, among others:

1. Top risk relating to arbitration.
2. Increased financial expenses due to PGN Group's tax disputes related to Income Tax, VAT for company transactions in the 2013 – 2020 period.
3. Decrease in the gross margin of gas trading for the industrial and electricity sector with Certain Natural Gas Prices (HGBT).
4. Potentials for asset write-off in the South Sesulu block.
5. Top Risk related to tariff review on PGN transmission pipes.
6. Decrease in the gross margin of gas trading.
7. Suboptimal utilization of advance payments for gas purchases.
8. Data loss/ damage/ leak in the database computer system of the company
9. LNG sale and purchase transactions that cannot be carried out in accordance with the contract.
10. Violations to the HSSE guidelines.

MANAGEMENT ASSESSMENT TO MANAGE POTENTIALS WITH SIGNIFICANT INFLUENCE ON BUSINESS CONTINUITY

The Company implements the best risk management practices in evaluating the preparation of strategic plans and assessing the Company's ability to achieve targets in a regular and consistent manner to ensure business continuity.

The Company always carries out corporate risk management to identify all risks faced by the Company, evaluate risks, and manage the handling of risks so that they can be accepted at a level in accordance with the Risk Appetite.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Information on Business Continuity

Perusahaan secara rutin menelaah dan memperbarui kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di industri migas serta pemenuhan aspek kepatuhan pengelolaan korporasi.

Secara spesifik, pengelolaan risiko terkait aspek keuangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko yang dihadapi Perusahaan dengan tingkat pengembalian serta meminimalkan potensi dampak negatif terjadap kinerja keuangan PGN.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN
Manajemen puncak melakukan asesmen risiko atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha PGN. Asesmen didasarkan pada asumsi yang dituangkan dalam RKAP PGN yang merujuk pada APBN. Asumsi yang digunakan Perusahaan mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga ICP. Selain itu juga menggunakan asumsi internal yakni terkait ketersediaan pasokan gas dan LNG dengan harga yang kompetitif.

The company regularly reviews and updates its risk management policies and systems to adapt to the changes and dynamics occurring in the oil and gas industry as well as fulfilling the compliance aspects of corporate management.

Specifically, risk management related to financial aspects aims to achieve an appropriate balance between the risks faced by the Company and the rate of return, as well as minimizing the potential negative impact on PGN's financial performance.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENTS
Top management carries out risk assessments on matters that have the potential to have a significant negative impact on PGN's business continuity. The assessment is based on the assumptions outlined in PGN's Work Plan and Budget (RKAP), which refers to the State Budget (APBN). The assumptions used by the Company include economic growth rates, inflation rates, interest rates, exchange rates, and ICP prices. In addition, it also uses internal assumptions, namely regarding the availability of gas and LNG supplies at competitive prices.

ASESMEN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN TERHADAP PENGARUH TERSEBUT

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, Perusahaan telah melakukan langkah-langkah praktik manajemen risiko terbaik untuk menjaga kelangsungan usaha, di antaranya:

- Fokus dalam menjalankan program kerja sehingga kinerja Perusahaan tercapai sesuai target yang sudah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP.
- Melaksanakan kegiatan operasi dan investasi secara *prudent* dengan mengutamakan skala prioritas, efektivitas dan efisiensi serta peningkatan produktivitas kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan penanganan risiko (mitigasi) secara efektif atas hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan.
- Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mendorong nilai tambah (*upside risk/opportunity*) Perusahaan.
- Mengupayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (*zero accident*)
- Mengupayakan pelaksanaan program sinergi antara PGN dengan Pertamina selaku Holding Migas dengan mengutamakan optimalisasi kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan RKAP Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan Dokumen Acuan Kerja yang berlaku sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- Mengimplementasikan proteksi keamanan siber terhadap *database* dan sistem informasi yang dimiliki/dikelola Perusahaan.

MANAGEMENT ASSESSMENTS AND DECISIONS REGARDING THESE INFLUENCES

Based on the results of assessments that have been carried out, the Company has taken steps to best risk management practices to maintain business continuity, including:

- Focus on executing work programs to ensure the Company's performance is in line with the targets set in the RJPP and RKAP.
- Carry out operational and investment activities in a prudent manner by emphasizing the priority scale, effectiveness, and efficiency, as well as improving the productivity of the Company's performance.
- Carry out effective risk management (mitigation) on matters that can affect the Company's performance achievement.
- Improve employee competence in order to create added value (upside risk/ opportunity) for the Company.
- Striving for occupational health and safety (zero accident)
- Strive to implement synergy programs between PGN Group and Pertamina as Oil and Gas Holding by prioritizing the optimization of the Company's performance.
- Implement the 2023 Work Plan and Budget while still taking into account the applicable Working Reference in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).
- Implement cyber security protection on database and information systems owned/ managed by the Company.

05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance





TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu elemen penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, terlebih di era pasca pandemi COVID-19.

PGN senantiasa memenuhi ketentuan dari regulator (kepatuhan), agar terus mengembangkan bisnis serta berupaya mencapai target yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, PGN akan terus melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG yang mengacu pada pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional maupun internasional, dan pada akhirnya meyakinkan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan bahwa PGN telah dikelola dengan baik dan tepat.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") always implements GCG principles, which are important elements to the Company's success in conducting business activities, particularly in the post-COVID-19 pandemic era.

PGN always complies with the regulator's provisions, allowing it to continue developing its business and striving to meet both short and long-term targets. As a result, PGN will continue to improve and implement GCG, which refers to GCG guidelines and standards that apply both nationally and internationally, with the ultimate goal of convincing shareholders and stakeholders that PGN has been managed well and appropriately.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance

PGN memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Implementasi GCG di lingkungan PGN memberikan energi baik bagi Perusahaan untuk menghadapi tantangan besar hingga dapat bertahan sampai saat ini. PGN berkomitmen untuk menjalankan *best practices* prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikannya sebagai budaya kerja bagi seluruh Perwira Subholding Gas, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pejabat, serta Pekerja PGN.

PGN is strongly committed to applying GCG principles as a foundation for carrying out its business activities and creating sustainable values for Shareholders and other Stakeholders. GCG implementation within PGN brings good energy for the Company to face major challenges, allowing it to survive to this day. PGN is committed to implement best practices of GC principles in a consistent and continuous manner, as well as making it a work culture for all Gas Subholding Employees, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and High-Ranking Officials, as well as Employees.

DASAR HUKUM

Implementasi tata kelola di lingkungan PGN didasarkan pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, meliputi:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris

LEGAL BASIS

Governance implementation within PGN is based on applicable provisions and guidelines, including :

- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
- Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023, on Revocation of the



Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

KILAS BALIK GCG

PGN senantiasa berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik dari tahun ke tahun, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kinerja finansial dan operasional serta menjaga kepercayaan para Pemangku Kepentingan.

Decree of the Secretary to Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012, on Assessment and Evaluation Indicators/ Parameters for Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on Implementation of Governance Implementation for Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies.
- Circular of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16 /SEOJK.04/2021 Forms and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies.
- Circular of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Governance Guidelines for Public Companies.
- Articles of Association of the Company and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Company's Regulations and Policies.

GCG MILESTONES

PGN is consistently committed to implementing good corporate governance practices from year to year with the aim of improving financial and operational performance as well as maintaining Stakeholders' confidence. Since 2003, PGN has continued to imprint

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance

Sejak tahun 2003, PGN terus menorehkan jejak langkah nyata dalam meningkatkan penerapan *best practice* GCG, sebagai berikut:

concrete measures in improving the best practices of GCG implementation, as follows:

2003
- *Initial Public Offering* (IPO) PGN
- Penetapan Keputusan Direksi tentang GCG
- Pengangkatan Komisaris Independen
- Pembentukan Komite Dewan Komisaris (Audit, Nominasi, Remunerasi, dan GCG)
- Penetapan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit
- Pembentukan Satuan Kerja Fungsional bidang GCG & Budaya Perusahaan (GCG & BP) dan Analisis Bisnis & Manajemen Risiko (ABMR)
- Penetapan Manual Manajemen Risiko
- Initial Public Offering (IPO) by PGN
- Stipulation of Decision of BOD on GCG
- Appointment of Independent Commissioners
- Establishment of BOC Committee (for Audit, Nomination, Remuneration, and GCG)
- Installation of Independent Commissioner as the Head of Audit Committee
- Establishment of a Functional Work Unit for GCG and Corporate Culture (GCG & BP and Business Analysis & Risk Management
- Stipulation of Risk Management Manual

2004
- Pemetaan GCG
- Penyusunan Panduan GCG
- Penyusunan *Board Manual*
- Pembentukan Komite Asuransi dan Risiko Usaha
- Penetapan Charter Komite Audit
- GCG Mapping
- Preparation of GCG Guideline
- Preparation of Board Manual
- Establishment of Insurance and Business Risk Committee
- Determination on Audit Committee Charter

2005
- Penyusunan Kebijakan GCG
- Pelaksanaan Kerangka Kerja Implementasi GCG
- Penandatanganan Komitmen GCG oleh Direktur Utama, Komisaris Utama serta Ketua Serikat Pekerja
- Preparation of Policy on GCG
- implementation of GCG Frameworks
- Signing of Commitment on GCG by President Director, President Commissioner, and Head of Labor Union

2006
- Pengesahan *soft structure GCG*: Pedoman GCG & Board Manual
- Penghargaan Emiten Terbaik 2006 dalam "*Capital Market Award*" oleh BEJ
- Penetapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
- Sosialisasi GCG
- Endorsement for GCG soft structure: GCG Guideline & Board Manual
- The Best Issuer Award 2006 in "the Capital Market Award" by Jakarta Stock Exchange
- Stipulation on Code of Conducts
- Dissemination on GCG

2010-2011
- Pembentukan Divisi Organisasi dan Proses Bisnis yang bertugas mengelola GCG dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT Nusantara Regas
- GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Business Process and Organization Division assigned to manage GCG within the Directorate of General Affairs
- Establishment of PT Nusantara Regas
- GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2009
- Pembaruan Charter Komite Audit
- Penetapan Pedoman Audit Internal
- Penetapan Pedoman Manajemen Risiko berbasis COSO-ERM
- Pendirian PT PGAS Solution
- Pengakuan dari *Governance Metrics International* (GMI) menaikkan peringkat PGN dari 1,5 (Maret 2008) menjadi 4,5 (September 2009)
- Sosialisasi GCG
- Stipulation on "ProCISE" Corporate Culture
- Unification of Nomination and Remuneration Committees
- Transfer of Risk Management Unit under the Directorate of Finance
- GCG Assessment applied for the first time Company Corporate Governance Scorecard developed by the Ministry of State-Owned Enterprises
- Dissemination on GCG

2008
- Penetapan Budaya Perusahaan "ProCISE"
- Penggabungan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Pemindahan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Keuangan
- GCG *Assessment* pertama kali menggunakan *Company Corporate Governance Scorecard* yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation on "ProCISE" Corporate Culture
- Unification of Nomination and Remuneration Committees
- Transfer of Risk Management Unit under the Directorate of Finance
- GCG Assessment applied for the first time Company Corporate Governance Scorecard developed by the Ministry of State-Owned Enterprises
- Dissemination on GCG

2007
- Pembentukan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT PGAS Telekomunikasi
- Persiapan GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Risk Management Unit under the Directorate for General Affairs
- Establishment of PT PGAS Telekomunikasi
- Preparation of GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2012
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pelaksanaan Semiloka GCG
- Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (PMRPU)
- Penyusunan Charter Komite PMRPU
- Pendirian PT PGN LNG Indonesia
- Pelaksanaan LHKPN pertama kali
- Sosialisasi GCG
- Updates on GCG Guideline
- Implementation of GCG Seminar & Workshop
- Establishment of Monitoring Committee for Risk Management and Business Development
- Preparation of PMRPU Committee Charter
- Establishment of PT PGN LNG Indonesia
- Application of the first State Officials Wealth Report
- Dissemination on GCG

2013
- Penetapan *Whistleblowing System*
- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Piagam Komite Audit
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Whistleblowing System Guideline
- Updates on Board Manual
- Updates on Audit Committee Charter
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2014
- Penetapan SK benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
- Pendirian PT Permata Graha Nusantara
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Decree on Conflict of Interests and Gratification Control
- Establishment of PT Permata Graha Nusantara
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2015
- Pembentukan Komite Remunerasi, Nominasi, dan GCG
- Pembentukan Divisi Risk Management & GCG di bawah Direktorat Utama
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Remuneration, Nomination and GCG Committee
- Transfer of Risk Management & GCG Division under the Principal Directorate
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2019
- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Pelaksanaan Branding GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Affiliasi
- Pengukuran Tingkat Maturitas GCG
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Update on GCG Guidelines
- Update on the Code of Conduct
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Document for Subsidiaries/Affiliates
- Measuring GCG Maturity Rate
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2018
- Pembentukan PGN sebagai Subholding Gas ke dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero)
- Akuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Asistensi *Soft Structure* GCG di 6 Anak Perusahaan/Afiliasi
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Establishment of PGN as Gas Sub-Holding Company under PT Pertamina's Oil and Gas Holding
- Acquisition of PT Pertamina Gas and its subsidiaries
- Updates on GCG Guidelines
- Updates on Code of Conduct
- Assistance for GCG Soft Structure in 6 Subsidiaries/ Affiliates
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2017
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* ParameterASEAN *Corporate Governance Scorecard*-ACGS
- Sosialisasi GCG
- e-LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ASEAN Corporate Governance Scorecard - ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2016
- Pembaruan *Board Manual*
- Penetapan Pedoman Tata Kelola Hubungan PGN sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan/Afiliasi
- Penetapan Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penetapan Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Afiliasi
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Stipulation of Guidelines for PGN's Relations Governance as a Subsidiary/Affiliate Shareholder
- Stipulation of Guidelines for Appointment, Dismissal, and Determination of Income for Members of the BOD and Members of the BOC of Subsidiaries and Affiliates
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance

2020
- Penerapan dan Sertifikasi SMAP ISO 37001
- Penetapan Proses Subholding Gas
- Penetapan Budaya "AKHLAK"
- Penetapan Visi Misi
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Afiliasi
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Paremeter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG
- Penetapan penggunaan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Implementation and Certification of SMAP ISO 37001
- Determination of Gas Subholding Process
- Determination of "AKHLAK" Culture
- Determination of Vision and Mission
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Documents for Subsidiaries/Affiliates
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Paremeter)
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination on GCG
- Determination of GCG Online System (GOLS) Application

2021
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Antikorupsi Kolaborasi KPK dan PGN
- Penyempurnaan Pedoman Proses Bisnis Subholding Gas
- Pembaruan *Board Manual* dan Pedoman GCG, Etika, WBS, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi
- Pembaruan Charter Komite-Komite
- Pembaruan Anggaran Dasar
- Pelaksanaan Branding GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Pelaksanaan GCG *Self Assessment* Anak Perusahaan/ Afiliasi
- Penerapan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyusunan Modul GCG *Self Assessment* untuk Anak Perusahaan/Afiliasi
- Implementation of Anti-Corruption Technical Guidance in collaboration with the Corruption Eradication Commission/KPK and PGN
- Improvement of Gas Subholding Business Process Guidelines
- Updates on Board Manual and Guidelines for GCG, Ethics, WBS, Conflicts of Interest and Gratification
- Updates on Charter of the Committees
- Updates on Articles of Association
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Self-Assessment by Subsidiaries/ Affliates
- Implementation of GCG Online System Application
- Preparation of GCG Self-Assessment Module for Subsidiaries/Affiliates

2022
- Penggabungan fungsi GCG kedalam Group *Legal Counsel and Compliance* di bawah koordinasi Direktorat Utama
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* menggunakan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Pelaporan Gratifikasi secara berkala melalui Aplikasi GOLS
- Capaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko "*MANAGED*"
- Pembaruan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
- *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dari IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*)
- Merging of GCG functions into Legal Counsel and Compliance Group under the coordination of President Director Office
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- GCG Assessment used the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI) developed by the KNKG
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Online System (GOLS) Application
- Commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)
- Implementation of Gratification Reporting periodically through the GOLS Application
- Achievement of Risk Management Maturity Level "MANAGED"
- Updates on Guidelines for Good Corporate Governance and Code of Conduct
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship)

2023

- GCG self *Assessment* (*review*) hasil tahun 2022 dengan Parameter BUMN (SK-16)
- GCG *Self Assessment* ACGS *new version* 2023
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh KNKG

- Pelaksanaan *awareness* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan dan pengembangan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Surat Pernyataan *Conflict of Interest* dan terkait Gratifikasi secara berkala
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja
- Pembuatan Komitmen BOD dan BOC : Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi
- Sertifikasi SMAP di Anak Perusahaan
- Perluasan ruang lingkup penerapan anti penyuapan (*Extend scope*)
- ISO Integrasi: HSSE, QM dan SMAP
- Pengelolaan UPG semula dari Internal Audit dipindahkan ke *Legal Counsel and Compliance*
- Mendapat penghargaan tata kelola yang baik: *the Best State Owned Enteprises* dari IICD dan perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) Terbaik I dan Pengembangan Talenta & SDM Unggul Terbaik II dalam Anugerah BUMN 2023 yang diselenggarakan oleh BUMN *Track*.

- GCG self Assessment (review) of 2022 results with SOE Parameters (SK-16)
- GCG Self Assessment ACGS new version 2023
- GCG Assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG Assessment based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by KNKG
- Implementation of GCG awareness
- Implementation of e- LHKPN
- Socialization of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation and development of GCG Online System Application (GOLS)
- Implementation of World Anti-Corruption Day Commemoration (HAKORDIA)
- Implementation of Conflict of Interest Statement Letter and related Gratification periodically
- Work Reference Document Update
- Making BOD and BOC Commitment: Commitment Statement on the implementation of good corporate governance and business/work ethics as well as gratification control
- SMAP certification in subsidiaries
- Expansion of the scope of anti-bribery implementation (Extend scope)
- ISO Integration: HSSE, QM and SMAP
- UPG management has been transferred from Internal Audit to Legal Counsel and Compliance
- Received good governance awards: the Best State Owned Enteprises from IICD and the company with the Best Good Corporate Governance (GCG) I and the Best Talent & HR Development II in the BUMN Award 2023 organized by BUMN Track.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di lingkungan PGN, sebagaimana sejalan dengan Pedoman GCG PGN, bertujuan untuk:

a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
c. Mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya Perusahaan yang lebih baik;

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation within PGN, which is in line with PGN GCG Guidleine, has the following objectives:

a. Optimizing the Company's value in order to have a strong competitiveness at the national and international levels, enabling it to maintain its presence and sustainable life to achieve the Company's purposes and objectives;
b. Encouraging professional, efficient, and effective management of the Company, as well as empowering functions and improving the independency of the Company's Organs;
c. Encouraging the Company's Organs to make decision and take actions based on high moral values and comply with laws and regulations, and be aware of the Company's social responsibility to its Stakeholders as well as environmental sustainability around the Company;
d. Improving the Company's contribution to the national economy and creating a favorable environment for the development of national investment;
e. Developing attitudes and behaviors in line with the demands of the Company's development and business changes toward better corporate culture;

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance

f. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, karakter dan motivasi Perwira Subholding Gas untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan Perusahaan serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
g. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PGN menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya yang terimplementasi dalam setiap proses kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut kinerja dan pencapaian sasaran Perusahaan sesuai visi dan misi PGN. Penjelasan mengenai seluruh prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan di lingkungan Perusahaan sebagaimana yang tertuang sebagai berikut:

1. Transparansi
   Merupakan hak Pemegang Saham atas informasi Perusahaan yang benar dan tepat, ikut dalam pengambilan putusan mengenai perubahan mendasar Perusahaan, dan hak atas keuntungan Perusahaan. Juga diartikan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan putusan maupun pengungkapan informasi tentang Perusahaan.
2. Akuntabilitas
   Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan hingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban
   Merupakan kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian
   Merupakan keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran
   Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

f. Creating a conducive climate, encouraging the formation of identity, characteristics and motivating Subholding Gas Employee to behave and act in line with the Company's guidelines based on sound moral and ethical values; and
g. Improving the Company's reputation.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

PGN utilizes GCG principles as a culture that is implemented in every business activity process. This also includes the process of making important decisions regarding the performance and achievement of the Company's targets, in accordance with PGN's vision and mission. Description of all GCG principles that have been implemented within the Company as set out as follows:

1. Transparency
   Shareholders are entitled to obtain correct and appropriate information regarding the Company and participate in the decision-making process concerning basic changes to the Company, and its profits. It is also interpreted as information transparency in the decision-making process and disclosure of information regarding the Company.
2. Accountability
   Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs to ensure an effective management of the Company.
3. Responsibility
   Conformity of the Company's management to laws and regulations as well as sound corporate principles.
4. Independence
   Condition where the Company is professionally managed with no conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations as well as sound corporate principles.
5. Fairness
   Fairness and equality in meeting Stakeholders' rights that arise based on agreements and the laws and regulations.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

PGN memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara garis besar tergambar pada Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing Organ Tata Kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan GCG dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

PGN has established a Corporate Governance structure that is based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which is generally illustrated in the Main Organs of the Company, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each Corporate Governance Organ has a crucial role in the successful implementation of GCG, and the implementation of its duties, functions, and responsibilities in the interests of the Company, as outlined in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

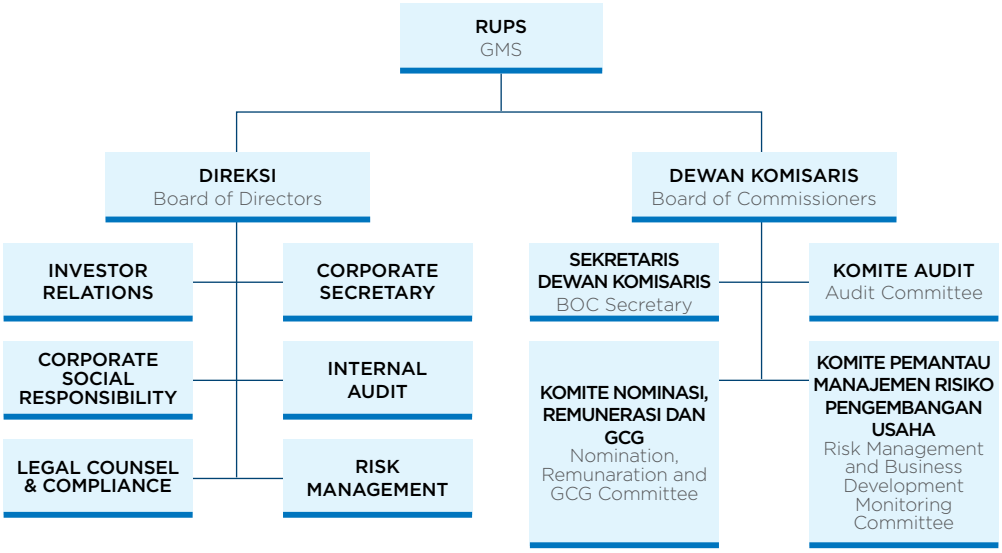

KEBIJAKAN GCG DI PGN

Perusahaan memiliki dan mengimplementasikan berbagai kebijakan maupun pedoman pendukung lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga agar penerapan GCG di PGN berjalan baik, antara lain:

1. *Board Manual*
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
3. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
4. Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
5. Pedoman *Whistleblowing System* (WBS)
6. Pedoman Pengelolaan Risiko
7. Pedoman Piagam Audit Internal
8. Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB)
9. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, Serta Anti Penyuapan
10. Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja (DAK)

GCG POLICY AT PGN

The Company has established and implemented various policies and other supporting guidelines in accordance with applicable laws and regulations to ensure proper GCG implementation at PGN, including:

1. Board Manual
2. Good Corporate Governance Guidelines
3. Code of Conduct
4. Conflicts of Interest and Gratification Control Guidelines
5. Whistleblowing System (WBS) Guidelines
6. Risk Management Guidelines
7. Internal Audit Charter Guidelines
8. Business Sustainability Management System (BCMS) Guidelines
9. Guidelines for Quality Management System, Occupational Health and Safety, Security, as well as Anti-Bribery
10. Guidelines for Work Reference Document Management

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance

11. Pedoman *Community Involvement Development* (CID)
12. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
13. Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan
14. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
15. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
16. Pedoman *Community Involvement and Development*
17. Pedoman SMK3P2LE (Sistem Manajemen K3)
18. Perjanjian Kerja Bersama
19. Pedoman Perencanaan dan Pengembangan KPI Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul
20. Pedoman Akuntansi
21. Pedoman Pengukuran Kepuasan Pelanggan
22. Pedoman Berlangganan Gas
23. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan dan Pedoman ini secara garis besar memuat panduan bagi Perusahaan dan seluruh Perwira Subholding Gas dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan pemangku kepentingan dalam koridor GCG.

11. Community Involvement Development (CID) Guidelines
12. Information and Communication Technology Governance Guidelines
13. Corporate Information Management Guidelines
14. Guidelines for Procurement of Goods/Services
15. Guidelines for the Formulation of the Company's Work Plan and Budget
16. Community Involvement and Development Guidelines
17. SMK3P2LE (OHS Management System) Guidelines
18. Collective Work Agreement
19. Guidelines for the Planning and Development Superior Performance Assessment Criteria-based KPI
20. Accounting Guidelines
21. Guidelines for Measuring Customer Satisfaction
22. Gas Subscription Guidelines
23. Guidelines for Preparation of Financial Statements

These Policies and Guidelines outline guidance for the Company and all Gas Subholding Employees on how to conduct business and communicate with stakeholders within the GCG's corridor.

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG PGN

Dalam rangka memperkuat penerapan GCG, PGN menjalankan berbagai program sosialisasi dan internalisasi baik secara *offline* maupun *online*. PGN melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Etika Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Anti Penyuapan/Gratifikasi kepada seluruh Perwira Subholding Gas sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan. Selama tahun 2023, kegiatan sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

STRENGTHENING GCG IMPLEMENTATION AT PGN

In order to strengthen the implementation of GCG, PGN carries out various socialization and internalization programs, both offline and online. PGN socializes and internalizes the values of Corporate Ethics, Good Corporate Governance, Anti-Bribery/Gratification to all Gas Subholding Employees as a form of implementation of GCG principles in the Company's activities. During 2023, the following are socialization and internalization activities carried out by the Company:

Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi GCG Tahun 2023
GCG Socialization and Internalization Activities in 2023

No.	Waktu Time	Kegiatan	Activity
1.	6 April 2023 April 6, 2023	*Overview GCG Assessment* Parameter BUMN dengan AP PT TGI	GCG Assessment Overview using SOE Parameters with Subsidiary, PT TGI
2.	11 April 2023 April 11, 2023	*Sharing Assessment* GCG dengan Pertamina, Pertagas Niaga, & CST	Sharing Assessment on GCG with Pertamina, Pertagas Niaga, & CST
3.	31 Mei 2023 May 31, 2023	*Awareness* GCG & Pembelajaran Hasil GCG *Assessment* Tahun 2022	GCG Awareness & Learning from the 2022 GCG Assessment Results
4.	6 Juni 2023 June 6, 2023	*Sharing Session* SMAP ISO 37001 PGN dengan AP PT PGASOL	Sharing Session on SMAP ISO 37001 between PGN with Subsidiary, PT PGASOL
5.	16 Juni 2023 June 16, 2023	*Sharing Session* SMAP ISO 37001 PGN dengan AP PT PGASCOM	Sharing Session on SMAP ISO 37001 between PGN with Subsidiary, PT PGASCOM
6.	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023	Sosialisasi GCG / SMAP di Rapat Koordinasi Fungsi Legal Subholding Gas Tahun 2023	GCG/ SMAP Socialization at the 2023 Gas Subholding Legal Function Coordication Meeting
7.	21 Juni 2023 June 21, 2023	*Sharing Session* GCG & SMAP ISO 37001 PGN dengan SOR 1 Area Medan	Sharing Session on GCG & SMAP ISO 37001 between PGN with SOR 1 Medan Area
8.	22 Juni 2023 June 22, 2023	*Sharing Session* POJK 42/2020 dengan Holding PT Pertamina (Persero)	Sharing Session on POJK 42/2020 with the Holding PT Pertamina (Persero)
9.	26 Juni 2023 June 26, 2023	*Sharing Session* SMAP ISO 37001 PGN dengan AP PT LNG Indonesia (PLI)	Sharing Session on SMAP ISO 37001 between PGN with Subsidiary, PT LNG Indonesia (PLI)
10.	15 Agustus 2023 August 15, 2023	Sosialisasi Penilaiaan Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan Kebijakan Mutu Anti Penyuapan	Socialization of Performance Evaluation of Goods/ Service Providers and Anti-Bribery Quality Policy
11.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	Sosialisasi Aplikasi GCG *Online Systems* (GOLS) di lingkungan SH Gas (*monitoring* GCG)	Socialization of the GCG Online Systems (GOLS) application within the Gas Subholding (GCG monitoring)
12.	13-15 November 2023 November 13-15, 2023	Peningkatan Pemahaman Anti Gratifikasi *e-Learning* KPK	Increasing the Understanding of Anti-Gratification e-Learning by the KPK
13.	20 Desember 2023 December 20, 2023	Induksi Direksi dan Dewan Komisaris Baru	Induction of New Directors and Board of Commissioners
14.	Setiap bulan Monthly	Sosialisasi terkait *whistlebowing system* melalui *broadcast email*	Socialization of the whistlebowing system via email broadcast

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tata kelola tertinggi Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Kekuasaan dalam RUPS lebih tinggi dibandingkan Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui penyelenggaraan RUPS, para Pemegang Saham dapat menerima informasi penting mengenai kinerja Perusahaan dan menggunakan haknya sehubungan dengan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's highest governance organ with the authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits determined by the Limited Liability Company Law and/or Articles of Association of the Company. Authority in the GMS is higher than the Board of Directors and Board of Commissioners. Through GMS implementation, Shareholders can receive important information regarding the Company's performance and exercise their rights in connection with the Company's strategic decision making.

PEMEGANG SAHAM

Komposisi pemegang saham PGN yaitu Negara Republik Indonesia memiliki satu saham seri A Dwiwarna, PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% saham, dan 43,04% saham dimiliki oleh pemegang saham publik. Secara detail, uraian mengenai informasi dan struktur pemegang saham telah dibahas pada Bab Profil Perusahaan bagian Informasi Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

SHAREHOLDERS

The composition of PGN's shareholders consists of the Republic of Indonesia with one A series Dwiwarna share, PT Pertamina (Persero) which is the majority shareholder with 56.96% of shares, and 43.04% of shares owned by public shareholders. In detail, description of shareholders information and structure have been discussed in the Company Profile Chapter in the Shareholders Information section of this Annual Report.

Hak Pemegang Saham

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
c. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
d. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shareholders' Rights

Shareholders are entitled to:

a. Attend and cast their votes at the GMS;
b. Obtain material information about the Company, in a timely, measurable and regular manner;
c. Receive payment of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares owned; and
d. Exercise other rights based on the Articles of Association and laws and regulations.

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

The Company's shares are shares on behalf of and issued on behalf of their owners, which are listed in the Shareholder Register, which consist of:

- A Series Dwiwarna shares, which can only be owned by the Republic of Indonesia; and
- B Series shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama sepanjang Anggaran Dasar Perseroan tidak menetapkan lain.

A Series Dwiwarna Shareholders and B Series Shareholders have equal rights, providing that the Company's Articles of Association do not stipulate otherwise.

Selaras dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
   b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
   c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran; serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan; dan
5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, dengan mekanisme penggunaan hak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan terhadap Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, kecuali pelaksanaan Hak Istimewa pada angka 1.c dan 1.d.

Kemudian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-10/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan kuasa khusus kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tercantum di atas, termasuk hak untuk menyetujui usulan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pursuant to the Company's Articles of Association, A Series Dwiwarna share is a share that is specially owned by the Republic of Indonesia, which grants the holder Prerogative Rights as a A Series Dwiwarna shareholder, namely:

1. The rights to agree at the GMS related to the following matters:
   a. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
   b. Approval of amendments to the Articles of Association;
   c. Approval of amendments to the shareholding structure;
   d. Approval regarding the merger, consolidation, separation and dissolution; as well as the takeover of the Company by another company.
2. The right to nominate Candidates for Members of the Board of Directors and Candidates for Members of the Board of Commissioners;
3. The right to propose GMS agenda items;
4. The right to request and access Company data and documents; and
5. The right to establish strategic policies to always aligned and in accordance with the policies and regulations that apply to B Series Shareholders with ownership of most of the Company's shares, with a mechanism for exercising rights in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and laws and regulations.

The exercise of the A Series Dwiwarna Shareholder's Prerogative Rights may be authorized to the B Series Shareholders with a majority ownership of the Company's shares, except for the exercise of the Prerogative Rights in points 1.c and 1.d.

Furthermore, pursuant to Special Power of Attorney No. SKK-10/MBU/05/2018 dated May 9, 2018, the A Series Dwiwarna shareholders grant special power of attorney to PT Pertamina (Persero) as the B Series shareholders with a majority ownership of the Company's shares to take actions, which is the authority and/or rights of the A Series Dwiwarna Shareholders as stated above, including the right to approve the proposal of the Company's Board of Commissioners on the actions of the Board of Directors as referred to in the Company's Articles of Association.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak, Pemegang Saham sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) UUPT, Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUPT, yaitu:

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Tanggung jawab Pemegang Saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan Pemegang Saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Shareholders' Responsibilities

In addition to having rights, Shareholders as owners of the Company also have responsibilities that must be carried out.

Substantially, according to Article 3 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT), Shareholders are not personally responsible for the engagement made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned. This principle is made clear in the Elucidation section of Article 3 paragraph (1) of UUPT that Shareholders are solely responsible for the amount paid for all the shares they own and do not cover their personal assets.

In certain cases, this does not rule out the possibility of the elimination of the said limited liability if it is proven that the matters as referred to in Article 3 paragraph (2) UUPT occur, namely:

a. The requirements of the Company as a legal entity have not been or are not met.
b. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, in bad faith exploits the Company for personal gain.
c. The relevant Shareholder is involved in an unlawful act committed by the Company.
d. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, unlawfully uses the Company's assets, which results in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts.

The Shareholders' responsibility in the amount of the deposit for all the shares they own may be nullified if it is proven, among other things, that there has been a mixing of personal assets of the Shareholders and the assets of the Company so that the Company was established solely as a tool used by the Shareholders to fulfill their personal goals.

As a form of accountability, Shareholders carry out GCG in accordance with their authorities and responsibilities.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2022

RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Jumat, 27 Mei 2022
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 17.319.792.960 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 71,4468457% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Tahunan.
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Komisaris Utama
   RUPS dihadiri secara luring oleh 4 (empat) anggota Komisaris, yaitu:

Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

dan dihadiri secara daring oleh:

Komisaris Utama	**Arcandra Tahar**	President Commissioner
Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama.

   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

Direktur Utama	**M. Haryo Yunianto**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Heru Setiawan**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

IMPLEMENTATION OF THE 2022 GMS

Annual GMS on May 27, 2022

1. Time and Place
   a. Day/date: Friday, May 27, 2022
   b. Place: Graha PGAS Auditorium, 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Annual GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of 17,319,792,960 shareholders, including A Series Dwiwarna shares representing 71.4468457% of the total issued shares, totaling 24,241,508,196 shares. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been fulfilled and therefore the Annual GMS is valid and has the rights to make valid and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Annual GMS.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the President Commissioner
   The GMS was attended in-person by 4 (four) Commissioners, namely:

and attended online by:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director.
   The GMS was attended in-person by all members of the Board of Directors, namely:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
   Dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi, Perseroan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari AdiWarsito, S.H.

6. Agenda RUPST
   a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.

   b. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

   c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.

   d. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2022.

   e. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil (PUMK) Terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2022 dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2022.

   f. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

7. Keputusan RUPST
   a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2021, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.

5. Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals.
   In carrying out the vote counting process and/or conducting validation, the Company was assisted by the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

6. AGMS Agenda
   a. Approval of the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year and the Partnership and Community Development Program Report for the 2021 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2021 Fiscal Year.
   b. Ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2021 Fiscal Year, and to grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their action and supervision during 2021 Fiscal Year.
   c. Approval of the distribution of the Company's net profit, including the Dividend Distribution for 2021 Fiscal Year.
   d. Determination of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Fiscal Year, as well as Salary/Honorarium, along with Facilities and Allowances for the 2022 Fiscal Year.
   e. Appointment of a Public Accounting Firm to carry out an Audit of Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Small Medium Enterprise Funding Financial Statements Related to the Partnership and Community Development Program for the 2022 Fiscal Year 2and Application of Agreed Procedures for Report on Corporate KPI Performance Evaluation Results for the 2022 Fiscal Year.
   f. Changes to the Composition of the Company's Management.

7. AGMS Resolutions
   a. Approves the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year and Annual Report on Social and Environmental Responsibility (formerly the Partnership and Community Development Program) for the 2021 Fiscal Year, as well as the Board of Commissioners Supervisory Report.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of* Pricewaterhouse Coopers).

c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Perseroan Tahun Buku 2021, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2021 sebesar USD303.823.865 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

    1. Sebesar USD205.955.966 (dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen secara tunai dalam mata uang Rupiah kepada para Pemegang Saham sebesar IDR3.016.128.449.746,32 (tiga triliun enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah koma tiga puluh dua sen) atau IDR124,42 (seratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh dua sen) lembar dengan ketentuan sebagai berikut:
        - Bagian saham Seri A Dwiwarna sebesar IDR124,42 (seratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh dua sen).

b. Ratifies the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, Financial Statements of Funding Program for Micro and Small Enterprises (formerly the Company's Partnership and Community Development Program Unit for the 2021 Fiscal Year, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member of Pricewaterhouse Coopers).

c. Grants full release and discharge (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company and the Social and Environmental Responsibility Program (formerly the Partnership and Community Development Program), as long as the actions are reflected in the Annual Report for the 2021 Fiscal Year and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, as well as the Annual Report and Financial Report on Micro and Small Business Funding (formerly the Partnership and Community Development Program Unit) of the Company for the 2021 Fiscal Year, and is not a crime or a breach of provisions of applicable laws and regulations.

d. Approves the determination of the Company's Net Profit attributable to owners of the parent entity for the 2021 Fiscal Year in the amount of USD303,823,865 (three hundred three million eight hundred twenty-three thousand eight hundred sixty-five United States Dollars) as follows:

    1. A total of USD205,955,966 (two hundred five million nine hundred fifty five thousand nine hundred and sixty six United States Dollars) was distributed as dividends in cash in Rupiah to the Shareholders in the amount of IDR3,016,128,449,746.32 (three trillion and sixteen billion one hundred twenty eight million four hundred forty nine thousand seven hundred and forty six point thirty two Rupiah) or IDR124.42 (one hundred twenty four Rupiah point forty two cents)/share under the following conditions:

        - The portion of A Series Dwiwarna shares amounting to IDR124.42 (one hundred twenty-four Rupiah point forty-two cents).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

- Bagian saham Seri B Terbanyak sebesar IDR1.718.120.601.897,10 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah sepuluh sen).
- Bagian saham Seri B milik masyarakat sebesar IDR1.298.007.847.724,80 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah delapan puluh sen).

2. Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
3. Nilai dividen menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 27 Mei 2022.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022.
f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022.
g. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a *member firm of* Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2022.

- Maximum portion of B Series shares amounting to IDR1,718,120,601,897.10 (one trillion seven hundred eighteen billion one hundred twenty million six hundred one thousand eight hundred ninety-seven Rupiah and ten cents).
- B Series shares owned by the public is IDR1,298,007,847,724.80 (one trillion two hundred ninety-eight billion seven million eight hundred forty-seven thousand seven hundred twenty-four Rupiah eighty cents).

2. The remaining will be recorded as retained earnings to support the Company's operational and development activities.
3. The dividend value uses the Bank Indonesia middle exchange rate according to the date of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on May 27, 2022.
4. Grants authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for paying dividends for the 2021 financial year in accordance with the applicable regulations.

e. Grants authority and power to A Series Dwiwarna Shareholders to determine for members of the Board of Directors and Board of Commissioners the amount of tantiem for the 2021 fiscal year and salary/honorarium, benefits, facilities and other incentives for the 2022 fiscal year.
f. Grants authority and power to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from A Series Dwiwarna Shareholders to determine for members of the Board of Directors and Board of Commissioners the amount of tantiem for the 2021 fiscal year and salary/honorarium, benefits, facilities and other incentives for the 2022 fiscal year.
g. Approves the appointment of Purwantono, Sungkoro and Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Micro and Small Business Funding Financial Statements related to the Social and Environmental Responsibility Program and Implementation of Agreed Procedures on Reports on the Performance Evaluation Results of Corporate KPIs and Individual KPIs for the 2022 Fiscal Year.

h. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

i. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
   1. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
   2. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

j. Menyetujui pembatalan mata acara ke-enam.

8. Realisasi Keputusan RUPST

a. Tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 tercantum pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan melalui situs Perusahaan, Situs Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2022. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 telah dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022.

b. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan dan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor: SR-19/Wk.1.MBU.A/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2022, Dewan Komisaris menindaklanjuti penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Nomor: 44P/SKEL.00/D-KOM/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PGN Tahun Buku 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021.

c. Penetapan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro dan Surja (*a member firm of* Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PGN Nomor: Kep-04/D-KOM/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sebagai Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah

h. Delegates authority to the Board of Commissioners to determine the amount of fees for the audit services of the approved Public Accounting Firm and add the necessary scope of work and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.

i. Delegates authority to the Board of Commissioners by first obtaining approval from the Most Series B Shareholders to:
   1. Appoint a Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason based on capital market rules and regulations.
   2. Determine the conditions, terms of appointment, and honorarium of the Substitute Public Accountant Firm.

j. Approved the cancellation of the sixth agenda.

8. Realization of AGMS Resolutions

a. The procedure for paying Cash Dividends for the 2021 Fiscal Year is listed in the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which was published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange, and the Financial Services Authority websites on May 30, 2022. Payment of cash dividends for the 2021 Fiscal Year was made on June 29, 2022.

b. Based on the Annual GMS Resolution and the Letter of the Minister of SOEs as the A Series Dwiwarna Shareholder No. SR-19/Wk.1.MBU.A/07/2022 dated July 26, 2022 on Determination of the 2022 Income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, the Board of Commissioners following up on the determination of the income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through Letter No. 44P/SKEL.00/D-KOM/2022 dated July 27, 2022 on the Determination of Income for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PGN for the 2022 Fiscal Year and Tantiem for the 2021 Fiscal Year.

c. Appointment of a Public Accountant from Purwantoro, Sungkoro and Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) based on Decree of the Board of Commissioners of PGN No. Kep-04/D-KOM/2022 dated June 3, 2022, on Appointment of Public Accountant Firm as Consolidated Financial Statement Audit Executor, PSA 62 Compliance Audit, Small

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Kecil (PUMK) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2022.

Medium Enterprise Funding Financial Report Audit related to Social and Environmental Responsibility and Implementation of Agreed Procedures on Reports on Results of Corporate KPI Performance Evaluation for the 2022 Fiscal Year.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Pada tahun 2023, PGN telah melaksanakan dua kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 30 Mei 2023 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 November 2023. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2023
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.316.232.689 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 75,5573149% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Tahunan.
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Komisaris Utama
   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh anggota Komisaris, yaitu:

GMS IMPLEMENTATION IN 2023

In 2023, PGN held two GMS, namely the Annual GMS on May 30, 2023, and the Extraordinary GMS on November 14, 2023. The implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS was carried out in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and POJK No. 15/POJK.04/2020 Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Annual GMS on May 30, 2023

1. Time and Place
   a. Day/date: Tuesday, May 30, 2023
   b. Place: Graha PGAS Auditorium, 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Annual GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of 18.316.232.689 shareholders including A Series Dwiwarna shares representing 75.5573149% of the total issued shares, totalling 24,241,508,196 shares. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been fulfilled and therefore the Annual GMS is valid and has the rights to make valid and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Annual GMS.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the President Commissioner
   The GMS was attended in-person by all members of the Board of Commissioners, namely:

Komisaris Utama	**Arcandra Tahar**	President Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama

   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director
   The GMS was attended in-person by all members of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama	**M. Haryo Yunianto**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Heru Setiawan**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

6. Agenda RUPS
   a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.

   b. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

   c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.

   d. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023.

   e. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

5. The attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals in carrying out the vote counting process and/or conducting validation, namely the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

6. GMS Agenda
   a. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year and the Corporate Social and Environmental Responsibility Program Report for the 2022 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2022 Fiscal Year.
   b. Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2022 Fiscal Year, and to grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year.
   c. Approval of the distribution of the Company's net profit, including the Dividend Distribution for 2022 Fiscal Year.
   d. Determination of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year, as well as Salary/Honorarium, along with Facilities and Allowances for the 2023 Fiscal Year.
   e. Appointment of a Public Accounting Firm to carry out an Audit of Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Small Medium Enterprise Funding Financial Statements Related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Application of Agreed Procedures for Report on Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Results for the 2023 Fiscal Year.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

f. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:

1. No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

g. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

7. Keputusan RUPS
   a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
   b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernest & Young) sesuai Laporan Nomor 00746/2.1032/AU.1/02/1726-I/I/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernest & Young) sesuai Laporan Nomor 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan

f. Ratification of the Regulation of the Minister of SOEs:

1. No. PER-01/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
2. No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises.
3. No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

g. Changes to the Composition of the Company's Management.

7. GMS Resolutions
   a. Approves the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2022 Fiscal Year and Implementation of Social and Environmental Responsibility Report for the 2022 Fiscal Year, which ended on December 31, 2022, as well as granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been implemented during the fiscal year ending on December 31, 2022, as long as the actions do not constitute criminal acts and have been reflected in the reporting books of the Company .
   b. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements, which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernest & Young) in accordance with Report No. 00746/2.1032/AU.1/02/1726-I/I/IV /2023 dated April 13, 2023 with a "fair, in all material respects" opinion, as well as ratifying the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year ending December 31, 2022, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report, which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernest & Young) in accordance with Report No. 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 dated March 31, 2023, with an opinion of "fair, in all material respects", (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company

Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Uaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.

c. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar USD326.239.697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
   1. Sebesar USD228.367.788 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan ini.
   2. Sebesar USD97.871.909 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai Cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian Dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/ insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
f. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernst & Young) untuk melaksanakan Audit Laporan

and the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company in the Micro and Small Business Funding Program, which has been carried out in the 2022 Fiscal Year, as long as these actions do not constitute criminal acts and have been reflected in the reporting books of the Company.

c. Determine the use of Net Profit attributable to the Owner of the Parent Entity for the 2022 Fiscal Year of USD326,239,697 (three hundred twenty-six million, two hundred thirty-nine thousand, six hundred and ninety-seven United States Dollars) as follows:
   1. Dividends of USD 228,367,788 (two hundred twenty-eight million, three hundred sixty-seven thousand, seven hundred eighty-eight United States Dollars) were distributed to Shareholders in accordance with their portion of share ownership in the Company and paid in cash in Rupiah currency using the Bank Indonesia middle exchange rate as of the date of the 2022 Annual GMS, no later than 30 (thirty) days after being determined at the Company's Annual GMS.
   2. Amounting to USD97,871,909 (ninety-seven million, eight hundred seventy-one thousand, nine hundred and nine United States Dollar) as Reserves, including to support the Company's operational and development activities.
d. Granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures for distributing and announcing dividends in accordance with the applicable regulations of the stock exchange where the Company's shares are listed.
e. Grant the authority and power to the largest Series B Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentives/special incentives for performance in 2022, as well as salaries/honorariums, allowances, and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 fiscal year, after consulting with the Ministry of SOE as the Dwiwarna Series A shareholder institution.
f. Appoint the Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young) to carry out the Audit of the

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

g. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
h. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
   1. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
   2. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.
i. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

   1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
   2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari;
j. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Consolidated Financial Report for the 2023 Fiscal Year, the PSA 62 Compliance Audit, the Audit of the Financial Report on Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Programme, and the Implementation of Agreed Procedures for the Report on the Performance Evaluation Results of Corporate KPIs and Individual KPIs for the 2023 Fiscal Year.

g. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of payment for the Public Accounting Firm's audit services as approved in decision number 1 above, as well as extend the scope of work and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.
h. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners after obtaining approval from the majority of Series B shareholders to:

   1. Determine a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason under capital market rules and regulations; and
   2. Determine the conditions, requirements for appointment, and honorarium for the replacement Public Accounting Firm.
i. Confirming the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, as follows:
   1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
   2. Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
   3. Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

and any future amendments;
j. Respectfully dismiss the names below as members of the Company's Board of Directors:

Direktur Utama	**M. Haryo Yunianto**	President Director
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Heru Setiawan**	Director of Strategy and Business Development

k. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

k. Appoint the names below as members of the Company's Board of Directors:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Harry Budi Sidharta**	Director of Strategy and Business Development

l. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Hasil penetapan RUPS atas pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data Portal HC BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

8. Realisasi Keputusan RUPST

a. Tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 tercantum pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan melalui situs Perusahaan, situs Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2023. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023.

b. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan dan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-47/Wk1.MBU.A/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023, Dewan Komisaris menindaklanjuti penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat No. 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023 dan Tantiem 2022.

c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan akuntan publik (*signing partner*) Irwan Haswir, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31

l. The dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors must be determined at the Company's GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations.

m. The GMS resolutions on the dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors must be submitted to the Ministry of SOE by updating the SOE HC Portal data, as required by Article 54 paragraph (4) of the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

8. Realization of AGMS Resolutions

a. The procedure for paying cash dividends for the fiscal year 2022 is available in the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which was published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority on May 30, 2023. Cash dividends for the fiscal year 2022 were paid out on June 28, 2023.

b. Based on the Annual GMS Resolution and the Letter of the Minister of SOEs as the A Series Dwiwarna Shareholder No. SR-47/Wk1.MBU.A/07/2023 dated July 5, 2023 on 2023 Income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, the Board of Commissioners is following up on the determination of the income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through Letter No. 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 dated July 27, 2023 on the Determination of Income for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for 2023 and Tantiem for 2022.

c. Appointment of the Public Accounting Firm ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, with public accountant (signing partner) Irwan Haswir, to conduct an audit of the company's financial statements ending on December 31,

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Desember 2023 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 074000.S/PW.05.01/COS/2023 tanggal 5 September 2023.

d. Perubahan Pengurus Perseroan ini ditindaklanjuti oleh Direksi dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 14 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0126463 tanggal 12 Juni 2023.

RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2023

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Selasa, 14 November 2023
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.307.561.479 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 75,5215448% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Luar Biasa adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Luar Biasa.
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Plt Komisaris Utama.

   RUPS dihadiri secara luring oleh anggota Komisaris, yaitu:

2023, has been reported to the OJK through Letter No. 074000.S/PW.05.01/COS/2023 dated September 5, 2023.

d. Following the change in management, the Board of Directors issued a Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 14 dated June 9, 2023, before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. This change in the Company's Management has also been submitted and accepted by the Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights, based on Letter No. AHU-AH.01.09-0126463 dated June 12, 2023.

Extraordinary GMS on November 14, 2023

1. Time and Place
   a. Day/date: Tuesday, November 14, 2023
   b. Place: Graha PGAS Auditorium 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Extraordinary GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of shareholders of 18,307,561,479 shares, including Series A Dwiwarna shares, or 75.5215448% of the total issued shares of 24,241,508,196 shares. Therefore, the quorum required by the Company's Articles of Association has been met, and the Extraordinary GMS is valid, with the authority to make legal and binding decisions on matters discussed in accordance with the agenda of the Extraordinary GMS.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the Acting President Commissioner.
   The GMS was attended in person by the following Commissioners:

Plt Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Acting President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama.

   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director.
   The GMS was attended in person by all Directors, as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Harry Budi Sidharta**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

5. The presence of Capital Market Supporting Institutions and Professionals in the vote counting and/or validation process, especially the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

6. Agenda RUPS
   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

6. GMS Agenda
   Changes in the Composition of the Company's Management.

7. Keputusan RUPS Luar Biasa
   a. Memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan.
   b. Memberhentikan dengan hormat saudara Paiman Raharjo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
   c. Mengangkat saudara Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

7. Extraordinary GMS Resolutions
   a. Respectfully dismiss Arcandra Tahar from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and express high gratitude for his contributions to the Company during his tenure as President Commissioner.
   b. Respectfully dismiss Paiman Raharjo from his position as Independent Commissioner of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and express high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as Independent Commissioner.
   c. Appoint Amien Sunaryadi as the Company's President Commissioner and concurrently Independent Commissioner, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office as specified in the Company's Articles of Association.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

d. Mengangkat saudara Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
e. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

d. Appointed Abdullah Aufa Fuad as the Company's Independent Commissioner, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office as specified in the Company's Articles of Association.
e. As a result, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Amien Sunaryadi**	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

f. Memberhentikan dengan hormat saudara Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan.
g. Memberhentikan dengan hormat saudara Faris Aziz dari jabatannya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan.
h. Mengangkat saudari Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efekif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
i. Mengangkat saudari Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

f. Respectfully dismiss Achmad Muchtasyar from his position as Director of Infrastructure and Technology of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and express high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as Director of Infrastructure and Technology of the Company.
g. Respectfully dismiss Fariz Aziz from his position as Director of Sales and Operations of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and express high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as Director of Sales and Operations of the Company.
h. Appoint Ratih Esti Prihatini as Director of Sales and Operations of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office, as specified in the Company's Articles of Association.
i. Appoint Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business Development of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office, as specified in the Company's Articles of Association.

j. Mengalihtugaskan saudara Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

k. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

j. Assign Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, with the term of office continuing for the remainder of his term, as specified in the Company's Articles of Association.

k. As a result, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Harry Budi Sidharta**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Rosa Permata Sari**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Sales dan Operasi	**Ratih Esti Prihatini**	Director of Sales dan Operations

l. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/ otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

m. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

l. If appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors still hold positions that are prohibited by statutory regulations, agency/authority provisions, or internal regulations (including the Company's Articles of Association), they must resign or be dismissed from their position.

m. Grant authority with the substitution right to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the resolutions on this Agenda in accordance with applicable laws and regulations, including notifying the Ministry of Law and Human Rights of the composition of the Board Directors and Board of Commissioners in a separate Notarial Deed.

8. Realisasi Keputusan RUPS Luar Biasa

Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 093800.S/OT.02.00/COS/2023 tanggal 15 November 2023 perihal informasi perubahan pengurus Perseroan.

PGN telah mencatatkan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Akta Notaris Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.09-0189008 tanggal 24 November 2023.

8. Realization of Extraordinary GMS Resolutions

The dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners were reported to the OJK in Letter No. 093800.S/OT.02.00/COS/2023, dated November 15, 2023, regarding changes in the Company's management.

PGN recorded the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners through Notarial Deed No. 32 of 2023 dated November 22, 2023, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia received notification of changes to company data through Letter No. AHU-AH.01.09-0189008 dated November 24, 2023.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan GCG secara berkelanjutan. Dewan Komisaris juga melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Perusahaan untuk memastikan perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, memberikan saran, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi terkait isu maupun permasalahan tertentu.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan GCG, serta memberikan saran perbaikan sistem dan implementasi GCG.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk:
a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
d. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bila terjadi gejala turunnya kinerja Perseroan;
e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan;
h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

The Board of Commissioners is the Company's governance organ with the responsibility to supervise the management of the Company by the Board of Directors, as well as ensuring that the Company has implemented GCG in a sustainable manner. The Board of Commissioners also carries out a supervisory function over the Company's management activities to ensure that the company carries out its business in accordance with its stated objectives, providing advice, counsel, and recommendations to the Board of Directors regarding certain issues and problems.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners has the duty to supervise policies and the course of management carried out by the Board of Directors in the interests of the Company according to the aims and objectives of the Company. The Board of Commissioners is also responsible for monitoring the effective implementation of GCG, as well as providing suggestions for improving the GCG system and implementation.

In performing its duties, the Board of Commissioners is required to:
a. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
b. Provide opinion and approval of the Annual Work Plan and Budget of the Company and other work plans prepared by the Board of Directors;
c. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions at the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
d. Report to the A Series (Dwiwarna) Shareholders if there are trends of a decline in the Company's performance;
e. Propose to the GMS the appointment of a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's books;
f. Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports;
g. Provide explanations, opinions and suggestions at the GMS regarding the annual report;
h. Make minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep the original copy;

i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
k. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang pasar modal; dan
l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Report to the Company regarding their and/or their family's share ownership in the Company and other companies;
j. Provide a report on supervisory duties that have been carried out during the recent fiscal year to the GMS;
k. Provide an explanation of all matters that are asked or requested by A Series Dwiwarna Shareholders with due observance of laws and regulations, especially those applicable in the capital market sector; and
l. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties if they do not conflict with the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris mengacu pada acuan tugas Dewan Komisaris, yaitu:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan BUMN No PER-1/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan BUMN No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan; dan
- *Board Manual* Perseroan.

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties on policies and the course of management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the references to the duties of the Board of Commissioners, namely:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- Regulation of SOE No. PER-1/MBU/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises;
- Regulation of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises;
- Regulation of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee;
- Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/20120 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies
- Articles of Association of the Company; and
- Board Manual of the Company.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

BOARD MANUAL KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Secara berkala, *Board Manual* dievaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. *Board Manual* menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual* Perseroan diatur secara khusus dalam Bab III yang mencakup:

a. Tugas-tugas Dewan Komisaris;
b. Batasan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
d. Lowong Jabatan Dewan Komisaris;
e. Rangkap Jabatan;
f. Independensi dan Etika Jabatan Dewan Komisaris;
g. Wewenang Dewan Komisaris;
h. Rapat Dewan Komisaris;
i. Rapat Gabungan;
j. Komite-Komite Dewan Komisaris;
k. Sekretaris Dewan Komisaris;
l. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris;
m. Kebijakan Suksesi Direksi;
n. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
o. Waktu Kerja Dewan Komisaris.

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Selaras dengan ketentuan Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan;

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has established a Board Manual, which is a guideline for performing the duties and responsibilities of the Board of Commissioner. Periodically, the Board Manual is evaluated and updates with reference to the prevailing laws and regulations in Indonesia. The Board Manual serves as a binding guideline and work procedure for each member of the Board of Commissioners, to enable the Board of Commissioners to perform their duties in an efficient, effective, transparent, independent, and accountable manner.

The Board of Commissioners Guideline and Work Procedure in the Company's Board Manual are specifically regulated in Chapter III, which includes:

a. Duties of the Board of Commissioners;
b. Limitation of Respnsibilities of the Board of Commissioners;
c. Preparation of the Annual Work Plan and Budget;
d. Vacant Positions of the Board of Commissioners;
e. Concurrent Positions;
f. Independence and Work Ethics of the Board of Commissioners;
g. Authorities of the Board of Commissioners;
h. Board of Commissioners Meeting;
i. Joint Meetings;
j. Committees of the Board of Commissioners;
k. Secretary to the Board of Commissioners;
l. Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners;
m. Succession Policy of the Board of Directors;
n. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
o. Work Hour of the Board of Commissioners.

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST

In line with the provisions in Article 14 paragraph (29) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding the following concurrent positions:

1. Member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, Region-Owned Enterprise, or private company, except member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise that is the Corporation's B Series Majority Shareholder;

2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

A. Penyampaian Persetujuan atas:
   1. Perubahan Pengurus Anak Perusahaan
   2. Persetujuan Atas Permohonan Inisiatif Strategis Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga, Pelanggan Kecil dan Komersial Industri Wilayah Bintaro ("Jargas Bintaro")
   3. Persetujuan Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Pinjaman Komersial untuk Mendukung Pendanaan Program *Liability Management* PT PGN Tbk Tahap 2
   4. Persetujuan Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PGN Tahun Buku 2022
   5. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan *Draft* Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material terkait Pendanaan Program *Liability Management* PGN Tahap 2
   6. Persetujuan KPI Korporat PT PGN Tbk (PGN) 2023 dan Catatan Tindak Lanjut
   7. Persetujuan Penataan Ulang Pengurus PT TGI
   8. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi Survei Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D WK Pangkah serta Inisiatif *Drilling* Tahun 2023 dan Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG Tank F.6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya
   9. Persetujuan *Liability Management* – Rencana Pembelian Kembali Obligasi PT Saka Energi Indonesia (SAKA) Melalui Mekanisme *Cash Tender Offer* (CTO) 2023
   10. Persetujuan *Liability Management* – Rencana Pembelian Kembali Obligasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Melalui Mekanisme *Open Market Purchase* (OPM)
   11. Persetujuan Atas Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi Survei Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D WK Pangkah
   12. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PGN Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2023

2. Political party officials and/or candidate/member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, Regional Legislative Council Level I and Level II, and/or Regional Head/Deputy Regional Head;
3. Other positions based on the provisions of applicable laws and regulations; and/or
4. Other positions that may cause a conflict of interest.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, the Board of Commissioners has performed the following duties and activities:

A. Submission of Approval of:
   1. Changes in the Management of Subsidiaries
   2. Approval of the Application for Strategic Initiatives for the Development of Gas Networks for Households, Small and Commercial Industrial Customers in the Bintaro Region ("Jargas Bintaro")
   3. Approval of Series A Dwiwarna Shareholders' Power of Attorney for Commercial Loans to Support the Funding for Phase 2 of the Liability Management Program of PT PGN Tbk
   4. Approval for the Additional Agenda Proposal at the 2022 Fiscal Year GMS of PGN
   5. Response to the Request for Approval of the Disclosure of Information Draft for Material Transactions related to the Funding for Phase 2 of the Liability Management Program of PT PGN
   6. Approval of the 2023 Corporate KPI of PT PGN Tbk (PGN) and Follow-up Notes
   7. Approval of the Reorganization of the Management of PT TGI
   8. Response to the Application for Approval of the 2023 Pangkah WK 3D Seismic Acquisition and Processing Survey Investment Initiative as well as the 2023 Drilling Initiative and Application for the Approval of the Investment Initiative for LNG Hub Business Development Through the Revitalization of LNG Tank F.6004 and Other Supporting Facilities
   9. Liability Management Approval – Plan for PT Saka Energi Indonesia (SAKA) Bond Buyback Through the Cash Tender Offer (CTO) Mechanism in 2023
   10. Liability Management Approval – Plan for PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Bond Buyback Through the Open Market Purchase (OPM) Mechanism
   11. Approval for the Application for Approval of the Pangkah WK 3D Seismic Acquisition and Processing Survey Investment Initiative
   12. Determination of the 2023 Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PGN and Tantiem for the 2023 Fiscal Year

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

13. Penetapan Honorarium Bulanan Anggota Komite Non Komisaris dan Remunerasi Sekretariat Dekom
14. Tanggapan Atas Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT Saka Energi Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia dan PT Transportasi Gas Indonesia (Update)
15. Persetujuan Inisiatif Investasi Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG Tank F-6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya
16. Persetujuan KPI Direktorat PT PGN Tbk Tahun 2023
17. Penetapan Plt Komisaris Utama PT PGN Tbk
18. Persetujuan Pengurangan Modal Disetor dan Ditempatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di PT PGN LNG Indonesia (PLI) berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Usulan Pengurangan Modal Disetor dan Ditempatkan PGN di PLI
19. Persetujuan Struktur Organisasi *Strategic Management*
20. Persetujuan RKAP 2023 Revisi
21. Persetujuan Hasil *Review Annual Audit Plan* Triwulan III Tahun 2023
22. Persetujuan Revisi dan Tambahan *Top Risk* 2023
23. Persetujuan Publikasi Kinerja PT PGN Tbk Periode 30 September 2023
24. Persetujuan Perpanjangan *Availability Period* dan Penurunan *Commitment Fee* Pinjaman *Club Deal* untuk Pelunasan Obligasi PGN SA
25. Persetujuan Amandemen *Facility Agreement* (Pinjaman/SHL) PT Kalimatan Jawa Gas (KJG)
26. Persetujuan RKAP 2024
27. Persetujuan KPI Kolegial 2024

B. Penyampaian Penelaahan dan Saran/Tanggapan atas topik :
1. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Harga Saham
2. Pengelolaan Anak Perusahaan
3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
4. Laporan Hasil Audit
5. Kebijakan Perusahaan
6. Realisasi dan Percepatan Investasi
7. Kontrak Kerjasama
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

13. Determination of Monthly Honorarium for Non-Commissioner Committee Members and Remuneration of Secretariat of the Board of Commissioners
14. Response to Proposed Changes in Management of Subsidiaries, PT Saka Energi Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, and PT Transportasi Gas Indonesia (Update)
15. Approval of Investment Initiatives for LNG Hub Business Development Through Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities
16. Approval for the 2023 KPI Directorate of PT PGN Tbk
17. Appointment of Acting President Commissioners of PT PGN Tbk
18. Approval of Reducing the Paid Up and Issued Capital of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) in PT PGN LNG Indonesia (PLI) based on the Approval of Series A Dwiwarna Shareholders for the Proposed Reduction of PGN's Paid Up and Issued Capital in PLI
19. Approval for the Strategic Management Organizational Structure
20. Approval for the Revised 2023 Work Plan and Budget
21. Approval for the Annual Audit Plan Review Results for Quarter III of 2023
22. Approval for the 2023 Top Risk Revision and Addition
23. Approval for the Performance Publication of PT PGN Tbk for the September 30, 2023 Period
24. Approval for the Extension of Availability Period and Reduction of Club Deal Loan Commitment Fee for Repayment of PGN SA Bonds
25. Approval of Amendment to PT Kalimatan Jawa Gas (KJG) Facility Agreement
26. Approval of the 2024 Work Plan and Budget
27. Approval of the 2024 Collegial KPI

B. Submission of Review and Suggestions/Responses on:
1. Evaluation of Company Performance and Share Prices
2. Management of Subsidiaries
3. Risk Management and Internal Control
4. Audit Results
5. Company Policy
6. Investment Realization and Acceleration
7. Cooperation Contracts
8. Development of Human Resources

9. Legal dan *Good Corporate Governance*

C. Penyampaian Usulan dan Rekomendasi Kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak :
   1. *Update* Usulan Persetujuan Rencana Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor PT PGN Tbk (PGN) di PT PGN LNG Indonesia (PLI)
   2. Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris serta Usulan Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2022, Realisasi KPI Dekom tahun 2022 dan KPI Dekom tahun 2023 (*Update*)
   3. *Update* Usulan Persetujuan Pinjaman Komersial Untuk Mendukung Pendanaan Program LM PGN Tahap 2
   4. Penyampaian *Update* Usulan Persetujuan Kerja Sama Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BGS/BOT) PT PGN Tbk dengan PT Permata Graha Nusantara atas Aset di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 2, 4, 6 dan 8
   5. Tanggapan atas Ringkasan Eksekutif Hasil Audit terkait Kontrak Penjualan LNG Jangka Panjang dengan Gunvor Singapore Pte Ltd
   6. Tindak Lanjut Hasil Audit atas Kontrak Penjualan LNG Jangka Panjang dengan Gunvor Singapore Pte Ltd
   7. Usulan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 PT PGN Tbk
   8. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PGN Tbk (PGN) Tahun Buku 2022
   9. Usulan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/ Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN)
   10. Usulan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik PT PGN Tbk (PGN) Tahun Buku 2023
   11. Tanggapan Penyampaian Berita Acara Hasil Konsultasi Kementerian BUMN dan Proses Penetapan Direksi pada Cucu Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi di Subholding Gas

9. Legal and Good Corporate Governance

C. Submission of Proposals and Recommendations to the Series B Majority Shareholders:
   1. Update on the Proposed Approval of the Plan to Reduce the Issued and Paid-up Capital of PT PGN Tbk (PGN) at PT PGN LNG Indonesia (PLI)
   2. Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners as well as Proposed Performance Assessment of the Board of Directors in 2022, Realization of the Board of Commissioners' KPI in 2022, and the Board of Commissioners' KPI in 2023 (Update)
   3. Update on Proposed Commercial Loan Approval to Support Funding for Phase 2 of the PGN LM Program
   4. Submission of Update on the Proposed Agreement for Build Operate Transfer (BGS/ BOT) Cooperation between PT PGN Tbk and PT Permata Graha Nusantara for Assets on Jalan M.I. Ridwan Rais Numbers 2, 4, 6, and 8
   5. Response to Executive Summary of Audit Results related to Long-Term LNG Sales Contract with Gunvor Singapore Pte Ltd
   6. Audit Follow-up on Long-Term LNG Sales Contract with Gunvor Singapore Pte Ltd
   7. Proposed Use of PT PGN Tbk Profits for the 2022 Fiscal Year
   8. Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PGN Tbk (PGN) for the 2022 Fiscal Year
   9. Proposed Tantiem for the 2022 Fiscal Year and Salary/Honorarium. The following are the Facilities and Allowances for the 2023 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN
   10. Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm of PT PGN Tbk (PGN) for the 2023 Fiscal Year
   11. Response to Submission of Minutes of Consultation Results of the Ministry of State-Owned Enterprises and the Process of Appointing the Board of Directors of Indirect Subsidiaries/ Affiliated Companies in Gas Subholding

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

12. Tanggapan Penyampaian Berita Acara Hasil Konsultasi Kementerian BUMN dan Proses Penetapan Direksi pada Cucu Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi di Subholding Gas PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
13. Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan I, II, dan III Tahun 2023
14. Rekomendasi Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT PGN Tbk

12. Response to Submission of Minutes of Consultation Results of the Ministry of State-Owned Enterprises and the Process of Determining the Board of Directors of Indirect Subsidiaries/ Affiliated Companies in Gas Subholding, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
13. KPI Realization of the Board of Commissioners for Quarters I, II and III of 2023
14. Recommendations for Changes in the Management of Subsidiaries of PT PGN Tbk

PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi Direksi memiliki prosedur penetapan sebagai berikut:

a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian remunerasi bagi Dewan Komisaris.
b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyusun rekomendasi remunerasi bagi Dewan Komisaris.
c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi, GCG.
e. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
f. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atas remunerasi bagi Dewan Komisaris.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2023 memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem tahun buku 2022, dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya untuk tahun buku 2023. RUPS juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari

DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Procedure to Determine the Remuneration of the Board of Commissioners

The following is the procedures to determine the remuneration for the Board of Commissioners:

a. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee reviews the remuneration for the Board of Commissioners.
b. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee drafts the remuneration recommendation for the Board of Commissioners.
c. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners.
d. The Board of Commissioners discusses the proposal of the GCG Nomination and Remuneration Committee.
e. The Board of Commissioners proposes the remuneration for the Board of Commissioners to the Minister of SOEs as A Series Dwiwarna Shareholder.
f. The Minister of SOEs as A Series Dwiwarna Shareholder evaluates and grants written approval of the remuneration for the Board of Commissioners.

The Annual GMS for the 2022 Fiscal Year that was held on May 30, 2023, granted the authority and proxy to the A Series Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem for the 2022 fiscal year and salary/ honorarium, allowances, facilities, and other incentives for the 2023 fiscal year. The GMS also granted the authority and proxy to the Board of Commissioners of the Company by receiving a prior written approval from

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2022, dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya untuk tahun buku 2023.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 30 Mei 2023 dan persetujuan tertulis Kementerian BUMN No. SR-47/Wk-1.MBU.A/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PGN Tbk Tahun 2023, serta Surat Dewan Komisaris Nomor: 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022.

Informasi mengenai struktur remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

the A Series Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem for the 2022 fiscal year and salary/honorarium, allowances, facilities, and other incentives for the 2023 fiscal year.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Every member of the Board of Commissioners received remuneration for the 2023 fiscal year based on the Annual GMS Resolution of the 2022 Fiscal Year dated May 30, 2023 and a written approval of the Ministry of SOEs No. SR-47/Wk-1.MBU.A/07/2023 dated July 5, 2023 on Determination of Remuneration for the Board of Director and Board of Commissioners of PT PGN Tbk for 2023, and Letter of the Board of Commissioners No. 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 dated July 27, 2023 on Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the 2023 Fiscal Year and Tantiem for the 2022 Fiscal Year.

The following is information regarding the remuneration structure of the Board of Commissioners in 2023:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023
Remuneration Structure of the Board of Commissioners in 2023

Komponen Component	**Ketetapan** Decisions	
	Komisaris Utama President Commissioner	**Komisaris** Commissioners
Honorarium Honorarium	45% dari gaji Direktur Utama 45% of President Director's salary	90% dari honorarium Komisaris Utama 90% of President Commissioner's honorarium
Tunjangan | Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 x Honorarium 1 x Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris per bulan 20% of honorarium of each member of the Board of Commissioners per month	
Fasilitas | Facilities		
Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). In the form of health insurance or compensation for medical costs (at cost).	
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian At cost	
Tantiem Tantiem	45% dari tantiem Direktur Utama 45% of President Director's tantiem	90% dari tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's tantiem

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023

Untuk tahun 2023, total honorarium dan tunjangan lain yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp44,7 miliar untuk 8 (delapan) pejabat dengan rincian 4 (empat) pejabat bertugas satu tahun penuh, 1 (satu) pejabat berhenti sejak 20 September 2023 dan digantikan oleh 1 (satu) pejabat baru sejak 14 November 2023, 1 (satu) pejabat berhenti dan digantikan oleh 1 (satu) pejabat baru sejak 14 November 2023.

Remuneration of the Board of Commissioners in 2023

In 2023, total honorarium and other allowances received by the Board of Commissioners amounted to Rp44.7 billion for 8 (eight) Commissioners with details of 4 (four) commissioners serving for a full year, 1 (one) official resigned since September 20, 2023, and being replaced by 1 (one) new Commissioner since November 14, 2023, 1 (one) Commissioner has resigned and been replaced by 1 (one) new Commissioner since November 14, 2023.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali termasuk Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on Article 31 paragraphs (1) and (3) of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as the provisions of Article 16 of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months and meet periodically with the Board of Directors no later than less than 1 (one) time in 4 (four) months. Throughout 2023, the Board of Commissioners has held 35 (thirty five) meetings, consisting of Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS, with the following details:

Rapat Dewan Komisaris

Meeting of the Board of Commissioners

Periode 1 Januari – 20 September 2023
Period of January 1 - September 20, 2023

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Arcandra Tahar	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Paiman Raharjo
6 Februari 2023 February 6, 2023	1. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT PGN Tbk; 2. Tanggapan Komite atas Usulan Revisi *Board* Manual; 3. Pergantian Anggota Komite PMRPU; 4. Tanggapan Atas Surat Direksi Perihal Hasil Evaluasi Kembali Laporan Audit Investigasi Pengadaan di PT SAKA Energi Indonesia 5. Lain–lain. 1. Proposal for Changes in the Management of Subsidiaries of PT PGN Tbk; 2. Response of Committee to Proposed Revision of the Board Manual; 3. Changes of PMRPU Committee Members; 4. Response to the Board of Directors' Letter Regarding the Results of the Re-Evaluation of the Procurement Investigation Audit Report at PT SAKA Energi Indonesia 5. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Arcandra Tahar	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Paiman Raharjo
7 Maret 2023 March 7, 2023	1. Tanggapan Komite NRGCG atas Penilaian Kinerja Direksi Anak Perusahaan dan Afiliasi SH Gas 2. Transaksi Bisnis LNG PGN 3. Wacana Kebutuhan Tenaga Ahli Dekom 4. Lain-lain 1. Response of the NRGCG Committee on the Performance Assessment of the Board of Directors of Gas Subholding Subsidiaries and Affiliates 2. PGN's LNG Business Transaction 3. Discourse on the Needs of Experts for Board of Commissioners 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 Maret 2023 March 29, 2023	Hasil Audit Investigasi Kontrak Gunvor Investigative Audit Results of the Gunvor Contract	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 April 2023 April 17, 2023	1. Tupoksi Komite Penunjang Dewan Komisaris 2. Tindak lanjut perihal Rekomendasi CAE PTM atas LHA Kontrak Gunvor 1. Main duties and functions of Supporting Committees of the Board of Commissioners 2. Follow-up on CAE PTM Recommendations regarding the Gunvor Contract LHA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Mei 2023 May 12, 2023	1. Tindak Lanjut Kontrak Gunvor; 2. Usulan Penggunaan Laba Tahun 2022; 3. Lain-lain : a. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022; b. Revisi KPI Dewan Komisaris 2023 dan Laporan Pencapaian KPI Dewan Komisaris Triwulan I 2023. 1. Follow-up of the Gunvor Contract; 2. Proposal for the Use of the 2022 Profit; 3. Others: a. Supervisory Report of the Board of Commissioners in the 2022 Fiscal Year; b. Revision of the 2023 KPI of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' KPI Achievement Report for Quarter I of 2023.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Juni 2023 June 12, 2023	1. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan 2. Lain-lain 1. Proposal of Changes in Management of Subsidiaries 2. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Arcandra Tahar	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Paiman Raharjo
7 Agustus 2023 August 7, 2023	1. Usulan Honorarium Anggota Komite Non Komisaris dan Remunerasi Sekretariat Dewan Komisaris; 2. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT PGN Tbk. 1. Proposal for Honorarium for Non-Commissioner Committee Members and Remuneration of the Secretariate to the Board of Commissioners; 2. Proposal to the Changes in the Management of Subsidiaries of PT PGN Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Pembahasan Permohonan Izin Direksi ke LN (China) dalam rangka "*Discussion and Signing Ceremony on Amended & Restated LNG SPA with CNTIC as Buyer*" Discussion on the Proposal of Permit of the Board of Directors to go Overseas (China) for the event "Discussion and Signing Ceremony on Amended & Restated LNG SPA with CNTIC as Buyer"	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Periode 21 September – 14 November 2023
Period of September 21 – November 14, 2023

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Paiman Raharjo	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono
22 September 2023 September 22, 2023	Pembahasan Penetapan Plt Komisaris Utama PT PGN Tbk Discussion of the Appointment of Acting President Commissioner of PT PGN Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
2 Oktober 2023 October 2, 2023	1. Tindak lanjut pengunduran diri Anggota Komite PMRPU 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi 3. Perubahan Struktur Organisasi *Strategic Management* 4. Isu *Draft Corporate Charter* Pertamina – PGN 5. RKAP 2023 Revisi 6. RKAP 2024 1. Follow-up to the resignation of PMRPU Committee Members 2. Official Trip Overseas of the Board of Directors 3. Changes to the Strategic Management Organizational Structure 4. Pertamina – PGN Corporate Charter Draft Issue 5. Revised 2023 RKAP 6. 2024 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓
17 Oktober 2023 October 17, 2023	1. *Strategic Issue, BOC & Audit Committee Concern* Untuk Penyusunan *Annual Audit Plan* 2024. 2. Lain-lain. 1. Strategic Issue, Board of Commissioners & Audit Committee Concern for the Preparation of the 2024 Annual Audit Plan. 2. Others.	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Paiman Raharjo	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono
23 Oktober 2023 October 23, 2023	1. Tanggapan Komite Atas Usulan RKAP 2024 ; 2. Tanggapan Komite Atas *Draft Corporate Charter* Pertamina – PGN ; 3. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Manajemen Risiko sesuai Permen BUMN No 2 Tahun 2023; 4. Lain-lain 1. Committee Response to the 2024 RKAP Proposal; 2. Committee Response to the Draft of Pertamina – PGN Corporate Charter; 3. Implementation of Integrated Risk Management Governance in accordance with Minister of SOEs Regulation No. 2 of 2023; 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓
3 November 2023 November 3, 2023	1. Tanggapan Perkembangan Implementasi LNG MSPA dan CN PGN-Gunvor 2. Tanggapan Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan 3. Realisasi KPI Dewan Komisaris sampai dengan 31 Oktober 2023 4. KPI Dewan Komisaris Tahun 2024 5. Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024 dan Rencana Kerja Komite Penunjang Tahun 2024 6. Lain-lain : a. Tanggapan atas Hasil *Review Annual Audit Plan* Triwulan III 2023 b. Tanggapan Usulan Perubahan Skema *Managed-Services* menjadi Skema Pendanaan Investasi Proyek Jargas *Threshold* BOC c. Pembentukan Komite NRGCG di Anak Perusahaan 1. Response to the Development of LNG MSPA and CN PGN-Gunvor Implementation 2. Response to Proposed Changes in Management of Subsidiaries 3. KPI Realization of the Board of Commissioners as of October 31, 2023 4. 2024 KPI of the Board of Commissioners 5. 2024 Work Plan of the Board of Commissioners and 2024 Work Plan of Supporting Committees 6. Others: a. Response to the Results of the Annual Audit Plan Review for Quarter III of 2023 b. Response to the Proposal to Change the Managed-Services Scheme to a Threshold Gas Network Project Investment Funding Scheme of the Board of Commissioners c. Establishment of NRGCG in Subsidiaries	✓	✓	✓	✓	✓

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Periode 15 November – 31 Desember 2023
Period of November 15 – December 31, 2023

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad
21 November 2023 November 21, 2023	I. Rapat Dewan Komisaris : 1. Perkenalan; 2. *Update* dari masing-masing Komisaris; 3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris; 4. Lain-lain. II. Rapat Dewan Komisaris dihadiri AKNK : 1. Perkenalan; 2. *Pending Matters* : a. Evaluasi Piagam Komite; b. KPI Dewan Komisaris 2023: 1) Realisasi Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris 2023; 2) Proses Asesmen GCG 2023; 3) Penetapan Pemeringkatan Tingkat Kesehatan Perusahaan 2023; 4) Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite 2024; c. Tanggapan RKAP 2024; d. Tanggapan Investasi Sidayu; e. Tanggapan KPI Kolegial Direksi 2024. III. Penggunaan Sarana Elektronik (ESMS/SIBOS/EMAIL) untuk Mendukung Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad
	I. Meeting of the Board of Commissioners: 1. Introduction; 2. Update from each Commissioner; 3. Delegation of Duties of the Board of Commissioners; 4. Others. II. Meeting of the Board of Commissioners attended by AKNK: 1. Introduction; 2. Pending Matters : a. Evaluation of Committee Charters; b. 2023 KPI of the Board of Commissioners: 1) Realization of the Work Plan and KPI of the Board of Commissioners in 2023; 2) 2023 GCG Assessment Process; 3) Determination of the 2023 Corporate Soundness Level Rating; 4) 2024 Work Plans of the Board of Commissioners and Committees; c. Response to the 2024 RKAP; d. Response to the Sidayu Investment; e. Response to the 2024 Board Of Directors Collegial KPI. III. Utilization of Electronic Means (ESMS/SIBOS/ EMAIL) to Support the Activities of the Board of Commissioners and Committees.						

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad
7 Desember 2023 December 7, 2023	1. Alur Surat Dewan Komisaris 2. Tanggapan Usulan Perpanjangan *Availability Period* dan Penurunan *Commitment Fee* LM PGN SA 3. Tanggapan Usulan Investasi Sidayu SID-02 dan SIC-03 Saka 4. Tanggapan Usulan Persetujuan *Amandement Facility Agreement* KJG 5. Tanggapan Usulan Investasi UPB 12 *Workover* Saka 6. Tanggapan atas Surat Direksi perihal *Draft* RJPP 2024 - 2029 dan arahan Direktur Utama Pertamina (Persero) pada *Dinner Meeting* tanggal 4 Desember 2023 7. Surat-surat Yang Akan Dikeluarkan Dewan Komisaris: a. Persetujuan atas Laporan Manajemen PT PGN Tbk Periode September 2023; b. Persetujuan atas Usulan KSO JPEN; c. Penyampaian Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024; d. Dukungan Proses Pengadaan Perusahaan Pemeringkat Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2023 8. *Reminder*: a. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Pedoman Kerja Sama Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk (KPMRPU) b. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Penyampaian Penjelasan Atas Kinerja Agustus 2023 (KA) c. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Permohonan Arahan KPI Kolegial (Draft 2) (KNRGCG) d. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Isu Kritikal *Corporate Charter* (KNRGCG) e. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Draft 6 RKAP 2024 (KPMRPU) f. Tanggapan atas Surat Direksi perihal *Top Risk* Oktober 2023 (KMPRPU) g. Tanggapan atas Surat Direksi perihal Laporan Manajemen Oktober 2023 (Semua Komite) h. Surat Dekom perihal Kebutuhan Revisi Pedoman ABI (KPMRPU) i. Revisi Piagam Komite (Semua Komite) 9. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad
	1. Flow of Letters of the Board of Commissioners 2. Response to the Proposal for Availability Period Extension and PGN SA LM Commitment Fee Reduction 3. Response to the Proposal for SID-02 Sidayu and SIC-03 SAKA Investments 4. Response to the Proposed Approval of Amendments to the KJG Facility Agreement 5. Response to UPB 12 Workover Saka Investment Proposal 6. Response to the Board of Directors' Letter regarding the 2024 – 2029 RJPP Draft and the directives of the President Director of Pertamina (Persero) at the Dinner Meeting on December 4, 2023 7. Letters to be issued by the Board of Commissioners: a. Approval of PT PGN Tbk Management Report for the September 2023 Period; b. Approval of the JPEN KSO Proposal; c. Submission of the 2024 Board of Commissioners Work Plan; d. Support for the Procurement Process of Rating Aggency for the 2023 Corporate Soundness Level Assessment 8. Reminder: a. Response to the Board of Directors' Letter regarding PT PGN Tbk Business Development Cooperation Guidelines (KPMRPU) b. Response to the Board of Director's Letter regarding Submission of Explanation of Performance in August 2023 (KA) c. Response to Board of Director's Letter regarding Request for Collegial KPI Directives (Draft 2) (KNRGCG) d. Response to the Board of Directors' Letter regarding Critical Corporate Charter Issues (KNRGCG) e. Response to the Board of Directors' Letter regarding Draft 6 of the 2024 RKAP (KPMRPU) f. Response to the Board of Directors' Letter regarding October 2023 Top Risk (KMPRPU) g. Response to the Board of Directors' Letter regarding the October 2023 Management Report (All Committees) h. Letter from the Board of Commissioners regarding the Need for Revision of ABI Guidelines (KPMRPU) i. Revision of Committee Charters (All Committees) 9. Others						

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad
14 Desember 2023 December 14, 2023	1. Mewujudkan Arahan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait RJP; 2. *Update* dari masing-masing Komisaris; 3. Lain-lain. 1. Implementing the Directives of the President Director of PT Pertamina (Persero) in connection with the RJP; 2. Update from each Commissioner; 3. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 Desember 2023 December 28, 2023	1. Finalisasi RKAP 2024 2. Finalisasi KPI Kolegial 2024 1. Finalization of the 2024 RKAP 2. Finalization of the 2024 Collegial KPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda
1	3 Februari 2023 February 3, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Update Monitoring Hasil Rapat Gabungan Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Desember 2022 3. Laporan IAD Triwulan IV Tahun 2022 4. Laporan Audit Internal Tahun 2022 5. Lain-lain 1. Monitoring Update on Results of Previous Joint Meeting 2. December 2022 Performance Report 3. Quarter 4of 2022 IAD Report 4. Internal Audit Report of 2022 5. Others
2	13 Februari 2023 February 13, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Hasil Evaluasi kembali atas LCGCG PT SAKA 2. Lain-lain 1. Results of Re-evaluation of the PT SAKA LCGCG 2. Others
3	28 Februari 2023 February 28, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja Januari 2023, Prognosa Desember 2023 dan *Top Risk* & Mitigasi Risiko 2023*) 2. *Draft* Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited*; 3. Lain-lain 1. January 2023 Performance Report, December 2023 Prognosis, and 2023 Top Risk & Risk Mitigation*) 2. Draft of 2022 Audited Financial Report 3. Others

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda
4	27 Maret 2023 March 27, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Update Laporan Keuangan 2022 (Progres Audit) 2. Lain-lain 1. 2022 Financial Report Update (Audit Progress) 2. Others
5	27 April 2023 April 27, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja Februari dan TW 1 Tahun 2023, *Update Top Risk* & Mitigasi Triwulan 1 Tahun 2023, Prognosa Desember 2023; 2. Laporan IAD Triwulan 1 Tahun 2023; 3. Lain – lain : a. Tanggapan Komite Audit perihal Surat Pengaduan Perwakilan Pengurus PGASOL b. *Update* GMU Industri Dumai dan RU Dumai 1. Performance Report for February and Q1 of 2023, Top Risk & Mitigation Update for Quarter 1 of 2023, Prognosis of December 2023; 2. IAD Report for Quarter 1 of 2023 3. Others: a. Audit Committee Response regarding the Complaint Letter from PGASOL Management Representatives b. Update on Dumai Industrial GMU and Dumai RU
6	24 Mei 2023 May 24, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja April 2023 2. Laporan Kinerja April 2023 3. *Update* Tindak Lanjut Kontrak LNG Gunvor 4. Usulan Keputusan RUPS 2023 5. Usulan Inisiatif Investasi Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG Tank F-6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya 6. Lain-lain 1. April 2023 Performance Report 2. April 2023 Performance Report 3. Update on Gunvor LNG Contract Follow-up 4. Proposed 2023 GMS Resolutions 5. Proposed Investment Initiative for LNG Hub Business Development Through Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities 6. Others
7	30 Mei 2023 May 30, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• M. Haryo Yunianto • Heru Setiawan • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	RUPST 2023 2023 AGMS
8	22 dan 27 Juni 2023 June 22 and 27, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. *Update* Monitoring BOD 2. Laporan Kinerja Mei 2023 dan Prognosa 2023 3. Update & Usulan *Liability Management* PGN dan Usulan *Liability Management* SAKA 4. Update Arbitrase FSRU Lampung 5. Usulan Investasi Seismik 3D WK Pangkah oleh SAKA dan Investasi Revitalisasi Tanki LNG oleh PAG 6. Lain-lain 1. Monitoring of the Board of Directors Update 2. May 2023 Performance Report and 2023 Prognosis 3. Update & Proposal for PGN's Liability Management and SAKA's Liability Management Proposal 4. Update on the Lampung FSRU Arbitration 5. Proposed 3D Seismic Investment in Pangkah WK by SAKA and Investment in LNG Tank Revitalization by PAG 6. Others

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda
9	25 Juli 2023 July 25, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja Juni 2023, *Top Risk* dan Prognosa Desember 2023; 2. *Update* Tindak Lanjut Perjanjian LNG dengan Gunvor, Petronas dan CNTIC; 3. Usulan Inisiatif Investasi *Drilling* Sidayu dan Suisen 1; 4. *Update* Tindak Lanjut Arbitrase KJG. 1. June 2023 Performance Report, December 2023 Top Risk and Prognosis; 2. Update on Follow-up on the LNG Agreement with Gunvor, Petronas, and CNTIC; 3. Proposed Drilling Investment Initiative of Sidayu and Suisen 1; 4. KJG Arbitration Follow-up Update.
10	9 Agustus 2023 August 9, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Usulan Inisiatif Investasi *Drilling* Sidayu (SID-02 dan SIC-03) dan Suissen-1 oleh SAKA 2. Usulan Inisiatif Investasi Revitalisasi Tangki LNG oleh PAG 1. Proposed Sidayu Drilling Investment Initiative (SID-02 and SIC-03) and Suissen-1 by SAKA 2. Proposal for LNG Tank Revitalization Investment Initiative by PAG
11	23 Agustus 2023 August 23, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja Juli 2023 dan Prognosa Desember 2023 2. *Review* Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2023 3. Usulan Inisiatif Investasi Revitalisasi Tangki LNG Arun oleh PAG 4. Lain-lain 1. July 2923 Performance Report and December 2023 Prognosis 2. Review of the June 30, 2023, Consolidated Financial Statements 3. Proposal for Investment Initiative for the Revitalization of the Arun LNG Tank by PAG 4. Others
12	6 September 2023 September 6, 2023	• Arcandra Tahar • Dini Shanti Purwono • Paiman Raharjo • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	Kontrak LNG PGN dengan Petronas dan CNTIC PGN LNG contracts with Petronas and CNTIC

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda
13	6 Oktober 2023 October 6, 2023	• Paiman Raharjo • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Amandemen *Facility Management* PT Kalimantan Jawa Gas; 2. Laporan Kinerja Agustus 2023, *Top Risk* dan Prognosa Desember 2023; 3. RKAP 2023 Revisi; 4. RKAP 2024; 5. *Update* RUPSLB; 6. *Update* KSO PGN – JPEN. 1. Amendment to PT Kalimantan Jawa Gas Facility Management; 2. August 2023 Performance Report, December 2023 Top Risk and Prognosis 3. Revised 2023 RKAP; 4. 2024 RKAP; 5. EGMS Update; 6. PGN – JPEN Joint Operation Update
14	25 Oktober 2023 October 25, 2023	• Paiman Raharjo • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Laporan Kinerja September 2023, *Top Risk* dan Prognosa Desember 2023; 2. Laporan Keuangan Interim per 30 September 2023 (Tidak Diaudit); 3. *Update* Pasokan vs *Demand* Gas 2023 dan 2024; 4. *Update* Kontrak LNG Gunvor; 1. September 2023 Performance Report, December 2023 Top Risk and Prognosis; 2. Interim Financial Report as of September 30, 2023 (Unaudited); 3. Update on Gas Supply vs Demand in 2023 and 2024; 4. Gunvor LNG Contract Update;
15	8 November 2023 November 8, 2023	• Paiman Raharjo • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. *Update Annual Audit Plan* Triwulan III 2023 2. Rencana Pencabutan Kasus Arbitrase FSRU Lampung 3. *Top Risk* LNG Gunvor 4. Kontrak LNG Gunvor 1. Annual Audit Plan Q3 2023 Update 2. Plan to Withdraw the FSRU Lampung Arbitration Case 3. Gunvor LNG Top Risk 4. Gunvor LNG Contract
16	14 November 2023 November 14, 2023	• Paiman Raharjo • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	RUPSLB 2023 2023 EGMS
17	30 November 2023 November 30, 2023	• Amien Sunaryadi • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	1. Perkenalan 2. Laporan Statistik HSSE PGN Group 3. Laporan Kinerja YTD Oktober 2023 dan *Top Risk* Oktober 4. *Update* RKAP 2024 5. *Update* Isu terkini 1. Introduction 2. PGN Group HSSE Statistics Report 3. October 2023 YTD Performance Report and October Top Risk 4. RKAP 2024 Update 5. Update on current issues

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda
18	28 Desember 2023 December 28, 2023	• Amien Sunaryadi • Dini Shanti Purwono • Christian H. Siboro • Warih Sadono • Luky Alfirman • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Harry Budi Sidharta • Fadjar Harianto Widodo • Beni Syarif Hidayat • Faris Aziz • Achmad Muchtasyar	A. Capaian Tahun 2023 1. Laporan Statistik HSSE PGN Group YTD November 2023; 2. Laporan Kinerja YTD November 2023 dan Prognosa Desember 2023; 3. Laporan *Top Risk* YTD November 2023 dan Profil Pengorganisasian Manajemen Risiko di PGN Group; 4. Progres Isu-isu Signifikan PGN Group. B. Lebih Fokus kepada *Core Business* di Tahun 2024 1. Rencana Pemasaran Jargas Eksisting dan Pengembangan Jargas Baru; 2. Rencana Penambahan Pelanggan Industri; 3. Rencana Pembelian/Pembangunan Mini LNG Plant; 4. Rencana Penetrasi Gas ke Pengguna BBM Non Transportasi; 5. Rencana Divestasi Bisnis Hulu Migas. C. Rencana Korporasi di Tahun 2024 1. Finalisasi RKAP 2024; 2. Finalisasi KPI Kolegial 2024. D. Kalender Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2024 E. Lain-lain A. 2023 Achievements 1. PGN Group HSSE Statistical Report YTD November 2023; 2. YTD November 2023 Performance Report and December 2023 Prognosis; 3. November 2023 YTD Top Risk Report and Risk Management Organization Profile in PGN Group; 4. Progress of Significant Issues of PGN Group B. More Focus on Core Business in 2024 1. Marketing Plan for Existing Gas Networks and Development of New Gas Networks; 2. Plans for Additional Industrial Customers; 3. Plan to Purchase/Construct Mini LNG Plants; 4. Gas Penetration Plan for Non-Transportation Fuel Users; 5. Upstream Oil and Gas Business Divestment Plan. C. Corporate Plan in 2023 1. Finalization of the 2024 RKAP; 2. Finalization of the 2024 Collegial KPI. D. 2024 Activity Calendar of the Board of Commissioners E. Others

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-9/MBU/09/2021 perihal Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa Laporan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dilaporkan triwulanan kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS

Based on Circular Letter of Minister of State Owned Enterprise No. SE-9/MBU/09/2021 on Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, Key Performance Indicator (KPI) Achievement Reports are reported quarterly to the Minister of SOEs as Series A Dwiwarna Shareholder. At the end of 2022, PT Pertamina (Persero) as the Majority of B Series Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder, established Guidelines for Performance Assessment of the Directors, Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners in Pertamina Subholdings and Subsidiaries based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

Sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) tersebut, KPI Dewan Komisaris terdiri dari aspek perencanaan, aspek pengawasan dan nasehat, aspek pelaporan dan aspek dinamis, dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pengurusan jalannya Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Adapun proses penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Pada awal 2024, PT Pertamina melalui surat 008/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan KPI Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan *self assessment* realisasi KPI Dewan Komisaris dan hasil *Akhlak Behaviour Survey* (ABS) 360°;
3. Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Realisasi KPI Dewan Komisaris:
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behavior Survey* (ABS) 360° yang dilakukan oleh sesama Anggota Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment* melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, kemudian dilaporkan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

In line with the guidelines set by PT Pertamina (Persero), KPI of the Board of Commissioners consists of the planning aspects, supervision and advice aspects, reporting aspects, and dynamic aspects, in carrying out the supervisory function of the Company's management policies and provision of advice to the Board of Directors in the interests and objectives of the Company. The process for the performance assessment of the Board of Commissioners in 2023 was carried out by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

In early 2024, PT Pertamina through the letter No. 008/K00000/2024-S8 on Policy for the Implementation of the Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of Supporting Committees of the Board of Commissioners in Subholdings and Subsidiaries of Pertamina in 2023, stated that the above guidelines still apply.

Procedures for the Implementation of Performance Assessment of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners prepares and submits the Board of Commissioners' KPI to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder;
2. The Board of Commissioners carries out a performance assessment based on the self-assessment of the realization of the Board of Commissioners' KPI and the results of the 360° AKHLAK Behavior Survey (ABS);
3. The Board of Commissioners reports the results of the performance assessment of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

Criteria for the Board of Commissioners' Performance Assessment

1. Realization of the Board of Commissioners' KPI:
2. Implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Commissioners as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the 360° AKHLAK Behavior Survey (ABS) conducted by fellow members of the Board of Commissioners.

Party Conducting the Board of Commissioners' Performance Assessment

The assessment of the BOC' performance is carried out by the Board of Commissioners through self-assessment through the Nomination, Remuneration, and GCG Committee and is reported to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA DIREKSI PERSEROAN

Penetapan KPI Direksi diantaranya mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mengatur perihal Kontrak Manajemen Tahunan dan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). KPI Direksi terdiri dari KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual.

KPI Direksi Kolegial disetujui dan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Kementerian BUMN cq. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), terdiri atas :

- KPI Bersama (bobot 40%),merupakan KPI yang disepakati menjadi tanggung jawab seluruh Sub Holding dibawah PT Pertamina (Persero) sebagai Holding.
- KPI Sub Holding (bobot 60%), merupakan KPI Perseroan sebagai Sub Holding Gas.

Adapun KPI Direksi Individual disusun menggunakan kerangka sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Pada awal 2024, PT Pertamina melalui surat 008/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2023, menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

Proses penilaian Direksi tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

The determination of the Directors' KPI refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which regulates the Annual Management Contract and Key Performance Indicators. The Board of Directors' KPI consists of the Collegial Board of Directors' KPI and Individual Board of Directors' KPI.

The Collegial Board of Directors' KPI is approved and signed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Ministry of SOEs cq. President Director of PT Pertamina (Persero), consisting of:

- Joint KPI (40% weight), which is a KPI agreed to be the responsibility of all Sub Holdings under PT Pertamina (Persero) as Holding.
- Sub Holding KPI (60% weight), which is the Company's KPI as Gas Sub Holding.

The Individual Board of Directors' KPI is prepared using the framework as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and approved by the Board of Commissioners.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholders, established Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners in Pertamina's Subholdings and Subsidiaries based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

At the beginning of 2024, PT Pertamina through letter No. 008/K00000/2024-S8 on Policy for the Implementation of the Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of Supporting Committees of the Board of Commissioners in Subholdings and Subsidiaries of Pertamina in 2023, stated that the above guidelines still apply.

The 2023 Board of Directors' assessment process was carried out by the Board of Commissioners together with the Nomination, Remunaration and GCG Committee.

Aspek Penilaian Kinerja Direksi dan Perseroan

1. Direksi menyusun dan menyampaikan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual kepada Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual hasil *Akhlak Behaviour Survey* (ABS) 360°;
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penilaian kinerja Direksi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Perseroan

1. Realisasi KPI Kolegial Direksi dan KPI Individual Direksi;
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Direksi sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behavior Survey* (ABS).

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian diselenggarakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya mengusulkan hasil penilaian kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina yaitu berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Aspects of the Performance Assessment of the Board of Directors and the Company

1. The Board of Directors prepares and submits the realization of the Board of Directors' KPI Individually and Collegially to the Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the realization of the Collegial Board of Directors' KPI and the Individual Board of Directors' KPI as a result of the 360° Moral Behavior Survey (ABS);
3. The Board of Commissioners submits the proposal for the performance assessment of the Board of Directors to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

Criteria for the Board of Commissioners' Performance Assessment

1. Realization of the Board of Directors' Collegial KPI and Board of Directors' Individual KPI;
2. Implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Directors as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the AKHLAK Behavior Survey (ABS).

Party Conducting the Board of Commissioners' Performance Assessment

The assessment is carried out by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee to be submitted to the Board of Commissioners and then proposes the assessment results to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder that Receives Special Proxy from Dwiwarna Series A Shareholders.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by Committees, namely the Audit Committee, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, as well as the Risk Management and Business Development Monitoring Committee.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero) as the Majority of B Series Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder, established Guidelines for Performance Assessment of the Directors, Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners in Pertamina's Subholdings and Subsidiaries based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Pada awal 2024, PT Pertamina melalui surat 008/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2023, menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

At the beginning of 2024, PT Pertamina through letter No. 008/K00000/2024-S8 on Policy for the Implementation of the Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of Supporting Committees of the Board of Commissioners in Subholdings and Subsidiaries of Pertamina in 2023, stated that the above guidelines still apply.

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. Komite Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris yang merupakan penjabaran dari fungsi Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris berdasarkan *self assessment* realisasi Rencana Kerja Tahunan termasuk Tugas Khusus dan hasil *Akhlak Behaviour Survei* (ABS) 360°;
3. Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Procedures for Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

1. Committees of the Board of Commissioners prepares and submits an Annual Work Plan to the Board of Commissioners which is an elaboration of the functions of the Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners evaluates the performance of Committees of the Board of based on the self-assessment of the realization of the Annual Work Plan, including Special Assignments and the results of the 360° AKHLAK Behavior Survey (ABS);
3. The Board of Commissioners reports the results of the performance assessment of Committees of the Board of Commissioners PT Pertamina (Persero) as the Majority of B Series Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. Realisasi Rencana Kerja dan Tugas Khusus Komite Dewan Komisaris.
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Komite Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behaviour Survei* (ABS).

Criteria for Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

1. Realization of the Work Plan and Special Assignment of Committees of the Board of Commissioners.
2. Implementation of AKHLAK cultural values by Committees of the Board of Commissioners as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the AKHLAK Behavior Survey (ABS).

Hasil Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Hasil penilaian atas kinerja Komite Dewan Komisaris menyatakan bawah komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu pengawasan Dewan Komisaris.

Results of the Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

The results of the performance assessment of Committees of the Board of Commissioners indicate that the committees have properly carried out their duties and responsibilities to assist the supervision of the Board of Commissioners.

KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioners

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Selaras dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada bagian ketiga, pasal 15 ayat (4), menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

a. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir;
b. Tidak mempunyai saham pada Perseroan;
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

CRITERIA FOR THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In line with what is stated in Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises in the third part, article 15 paragraph (4), states that Independent members of the Board of Commissioners are members of the Board of Commissioners aith no financial, management, or financial relations. share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the relevant SOE that may affect their ability to act independently.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners from outside the Company and meet the requirements as Independent Commissioners according to Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies, namely:

a. Not someone who is working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last 6 months;
b. Has no shares in the Company;
c. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholders of the Company; and
d. Has no business relationship related to the Company's business activities.

KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioners

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Pada tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang. Periode 1 Januari – 14 November ada 3 Komisaris Independen dan Periode 15 November – 31 Desember 2023 ada 4 Komisaris Independen.

Jumlah Komisaris Independen ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyebutkan setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Jumlah Komisaris Independen PGN juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In 2023, there were 6 (six) members of the Company's Board of Commissioners. For the period of January 1 – November 14 there were 3 Independent Commissioners and for the period of November 15 – December 31, 2023, there were 4 Independent Commissioners.

The number of Independent Commissioners complied with the provisions in Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies, which states that every public company must have Independent Commissioners that make up at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.

The number of PGN Independent Commissioners also complies with the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which states that in the composition of the Board of Commissioners, at least 20% (twenty percent) is Independent Members of the Board Commissioners as determined in their appointment decision.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

All Independent Commissioners have met all criteria in accordance with the applicable laws and regulations.

No.	Uraian Description	Paiman Raharjo	Dini Shanti Purwono	Christian H. Siboro	Amien Sunaryadi	Abdullah Aufa Fuad
Pernyataan Independensi | Independence Statement						
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Corporation's activities for the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/ pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliations with the Company or the principal/ controlling shareholder or one of the members of Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect work/ professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Pernyataan Kepatuhan | Compliance Statement						
	Memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai Piagam Dewan Komisaris dan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Meet the requirements to become a member of the Board of Commissioners in accordance with Charter of the Board of Commissioners and provisions in OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi melakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Perseroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial. Masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil putusan sesuai pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direktur. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang Direksi dapat diatur oleh RUPS, namun dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. Direksi melakukan penetapan sendiri atas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi secara lebih rinci melalui Keputusan Direksi No. 003900.K/OT.00/PDO/2022 tanggal 9 Februari 2022.

The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for managing the Company in the interests of the Company based on the goals and objectives of the Company. The Board of Directors also represents the Company in and outside the court of law in accordance with the provisions in the Articles of Association. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.

The Board of Directors performs its main duties in goodwill and with full responsibility. Every member of the Board of Directors is fully responsible individually and collectively for the loss of the Company when guilty or negligent of their duties based on the provisions of the applicable laws and regulations.

The Board of Directors is collegially assigned and responsible. Each Director can act and decide based on the division of duties and authorities. However, all Directors are jointly responsible for the performance of such duties. Each member of the Board of Directors, including the President Director, has an equal position. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Directors.

SCOPE OF WORKS AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The delegation of duties and authorities of the Board of Directors are determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine so, the delegation of duties and authorities of members of the Board of Directors are decided by the Decree of the Board of Directors. The Board of Directors determined the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in more detail based on the Decree of the Board of Directors No. 003900.K/OT.00/PDO/2022 dated February 9, 2022.

Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi
Scope of Works and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
1	Direktur Utama President Director	1. Pengelolaan komunikasi korporat, *investor relations*, pengelolaan *stakeholder* strategis, layanan dukungan Direksi dan Dewan Komisaris, dan penyusunan strategi komunikasi dan penyampaian materi strategis, serta kegiatan CSR sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2. Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak, penanganan kasus litigasi dan non litigasi di lingkungan Perusahaan, kegiatan advokasi regulasi tata kelola gas bumi, serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG); 3. Pengelolaan kegiatan audit Perusahaan berikut tindak lanjutnya, serta memberikan konsultasi fungsi pengawasan dan pendampingan audit eksternal; 4. Pengelolaan penyusunan dan implementasi kebijakan, pedoman dan program HSSE, berikut *monitoring*-nya.	1. Management of corporate communications, investor relations, strategic stakeholder management, support for BOD and BOC, communication strategy and strategic material delivery, and CSR activities in accordance with the applicable laws and regulations; 2. Compliance with laws and regulations, drafting of contracts, handling of litigation and non-litigation cases in the Company, advocacy of natural gas governance regulations, and assurance of good corporate governance implementation; 3. Management of Company audit activities and the follow-up actions as well as to provide consultation related to supervisory function and external audit assistance; 4. Management and monitoring of policy drafting and implementation as well as HSSE guidelines and programs.
2	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	1. Pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *Engineering* dan *Technology*, serta standar dan prosedur pelaksanaan proyek infrastruktur; 2. Pengelolaan eksekusi proyek pengembangan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan non pipa), serta memonitor progresnya; 3. Pengelolaan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga, *dashboarding end to end* proyek Jargas serta strategi optimasi aset jaringan gas rumah tangga.	1. Management of Engineering and Technology policies and activities, as well as standards and procedures of infrastructure project implementation; 2. Execution management and progrress monitoring of natural gas infrastructure (pipeline and non-pipeline network) development projects; 3. Management of household natural gas network development acceleration, end-to-end dashboarding of gas network project, and household gas network asset optimization strategies.
3	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	1. Pengelolaan gas *supply and demand balance* Perusahaan, sasaran kinerja, standar dan kebijakan kegiatan niaga gas bumi (pipa dan non pipa), serta manajemen sistem pengangkutan gas bumi (pipa dan non pipa); 2. Pengelolaan sasaran kinerja, standar, kebijakan kegiatan manajemen aset jaringan gas bumi (pipa dan non pipa) dan kegiatan *operation and maintenance* jaringan gas bumi (pipa dan non pipa); 3. Menyusun strategi, kebijakan dan program niaga (*sales and customer management*) gas bumi (pipa dan non pipa) pada seluruh *Sales* dan *Operation Region* (SOR), mengelola agregasi pengelolaan bisnis niaga gas bumi di Subholding Gas Group, serta mengonsolidasikan realisasi pencapaian (kinerja) niaga gas bumi pada seluruh SOR; 4. Pengelolaan kegiatan niaga dan operasi pengangkutan gas bumi (pipa dan non pipa) sesuai target, standar, dan kebijakan yang telah ditetapkan, melakukan pengembangan bisnis gas bumi di wilayah eksisting. melakukan pengelolaan penyusunan anggaran biaya, relasi dengan *stakeholder*, dan layanan umum di wilayah SOR.	1. Management of the Company's gas supply and demand balance, performance target, standards, policies on natural gas trading activities (pipeline and non-pipeline), and natural gas transportation system (pipeline and non-pipeline); 2. Management of performance target, standards, policies on natural gas asset management activities (pipeline and non-pipeline), and natural gas operations and maintenance activities (pipeline and non-pipeline); 3. Devising of natural gas trading (pipeline and non-pipeline) strategies, policies, and programs (sales and customer management) for all Sales and Operation Regions (SOR), management of natural gas trading business aggregation in Gas Subholding Group, and consolidation of natural gas trading achievement (performance) realization in all SORs; 4. Management of natural gas (pipeline and non-pipeline) trading activities and transportation operations based on targets, standards, and policies that have been stipulated, development of natural gas business in existing regions, and management of budget drafting, stakeholder relations, and general services in SORs.

DIREKSI
Board of Directors

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
4	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	1. Pengelolaan program risiko korporat dalam pengembangan investasi serta risiko kegiatan operasional Perusahaan, dan me-*review* analisa keekonomian rencana investasi dalam memperkuat pendekatan risiko dalam pengambilan keputusan investasi; 2. Pengelolaan RKAP PGN *Stand Alone* dan RKAP Subholding Gas, melakukan analisa pendapatan dan biaya Subholding Gas, melakukan *investment tracking* sampai dengan *financial projection;* 3. Pengelolaan pendanaan Subholding Gas, analisis keuangan atas investasi strategis Perusahaan, mengelola *hedging* dan asuransi aset, pengendalian *cashflow* perusahaan, serta *improvement* proses bisnis terkait *revenue stream* PGN dan mengelola piutang pelanggan; 4. Pengelolaan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan penyelenggaraan akuntansi Perusahaan serta perpajakan di Subholding Gas.	1. Management of corporate risk programs in investment development and risks of the Company's operational activities, and review of economic analysis of investment plans for strengthening risk approach in investment decision-making; 2. Management of PGN Stand Alone and Gas Subholding Work Plan and Budget, analysis of Gas Subholding revenue and costs, investment tracking, and financial projection; 3. Management of Gas Subholding funding, financial analysis of the Company's strategic investments, management of hedging and asset insurance, control of company cash flow, improvement of business processes related to PGN's revenue stream, and management of customers' receivables; 4. Management of policies, implementation, control, and implementation of the Company's accounting and taxation in Gas Subholding.
5	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of Human Resources and Business Support	1. Pengelolaan *Human Capital* melalui perencanaan organisasi, sistem karier, tenaga kerja, kompetensi, hubungan industrial dan pengembangan pekerja, *compensation and benefit*, dan program pemberian penghargaan yang adil dan kompetitif, serta pengelolaan manajemen mutu Perusahaan; 2. Pengelolaan pengembangan dan implementasi layanan ICT Perusahaan terkait dengan teknologi informasi. infrastruktur ICT dan penyelarasan strategi bisnis dalam lingkup ICT dengan Holding Migas; 3. Pengelolaan kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa Perusahaan proyek infrastruktur gas bumi dan non keproyekan, serta pengelolaan penggunaan komponen dalam negeri; 4. Pengelolaan aset non jaringan, pengelolaan penggunaan lahan, pengelolaan fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan layanan umum Subholding Gas.	1. Management of Human Capital through organization planning, career system, manpower, competency, industrial relations and employee development, compensation and benefit, fair and competitive reward program, and Company quality; 2. Management of the Company's ICT service development and provision, ICT infrastructure, and harmonization of business strategy in the ICT scope with Oil and Gas Holding; 3. Management of the Company's goods/service provision policies and strategies for natural gas infrastructure projects and non-projects, and management of domestic component use; 4. Management of non-network assets, land use, supporting facilities for operational activities, and Gas Subholding general services.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
6	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	1. Penyediaan pasokan gas bumi (pipa dan non pipa), serta portofolio pasokan gas dan LNG; 2. Pengelolaan strategi pemasaran gas bumi (pipa dan non pipa), identifikasi peluang bisnis niaga gas bumi (pipa dan non pipa) di wilayah baru, serta kegiatan niaga gas bumi (pipa dan non pipa) pelanggan korporat; 3. Pengelolaan pengembangan bisnis baru dan portofolio hilir pemanfaatan gas bumi, pengelolaan maturitas investasi untuk bisnis eksisting (*non*-retail), serta optimasi infrastruktur eksisting melalui integrasi dan fleksibilitas pasokan- infrastruktur pasar; 4. Pengelolaan perencanaan strategis Perusahaan, proses maturitas investasi, agenda transformasi Perusahaan, pengelolaan Program dan Kinerja Korporat, serta melakukan pengelolaan peran PGN sebagai pemegang saham dan strategi portofolio di Anak Perusahaan dan Afiliasi.	1. Provision of natural gas (pipeline and non-pipeline) supply as well as management gas and LNG portfolio; 2. Management of natural gas (pipeline and non-pipeline) marketing strategies, identification of natural gas (pipeline and non-pipeline) trading business opportunities in new regions, and management of corporate customers' natural gas (pipeline and non-pipeline) trading activities; 3. Management of new business development and downstream natural gas utilization portfolio, management of investment maturity for existing (non-retail) business, and optimization of existing infrastructure through integration and flexibility of market infrastructure supply; 4. Management of the Company's strategic planning, investment maturity process, the Company's transformation agenda, Corporate Programs and Performance, and PGN's roles as the shareholder and strategic manager of Subsidiaries and Affiliates' portfolio.

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Manual* PGN pertama kali disusun 2006 dan diperbarui mengikuti perkembangan Perusahaan dengan perubahan terakhir pada 2021. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* PGN diatur secara khusus dalam Bab II yang mencakup:

1. Tugas Pokok Direksi;
2. Batasan Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas-tugas Direksi;
4. Hak dan Wewenang Direksi;
5. Pendelegasian Wewenang;
6. Independensi dan Etika Jabatan Direksi;
7. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan;
8. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
9. Lowong Jabatan Direksi;
10. Rangkap Jabatan;
11. Rapat Direksi;
12. Corporate Secretary;
13. Auditor Internal;
14. Manajemen Risiko;
15. *Whistleblowing System* dan gratifikasi;
16. Kinerja Perseroan; dan
17. Masa Jabatan Direksi.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Work Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) is a series of procedures on relations between the Board of Commissioners and Board of Directors. PGN's Board Manual was initially prepared in 2006 and is updated in line with the Company's development. The most recent update was made in 2021. The Board of Directors Work Guideline and Code of Conduct in PGN's Board Manual are specifically governed in Chapter II, which covers:

1. Main Duties of the Board of Directors;
2. Limitations of Responsibilities of the Board of Directors;
3. Duties of the Board of Directors;
4. Rights and Authority of the Board of Directors;
5. Delegation of Authority;
6. Independency and Code of Ethics of the Board of Directors;
7. Determination of Policies on Company Management;
8. Delegation of Duties and Authority of Members of the Board of Directors;
9. Vacant Positions of the Board of Directors;
10. Concurrent Positions;
11. Meeting of the Board of Directors;
12. Corporate Secretary;
13. Internal Auditor;
14. Risk Management;
15. Whistleblowing System and gratification;
16. Corporate Performance; and
17. Term of Office of the Board of Directors.

DIREKSI
Board of Directors

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Berdasarkan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar PGN yang dimuat dalam Akta No. 28 tanggal 11 Mei 2021, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;
b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN;
c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2023, tidak terdapat anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar PGN.

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on Article 11 paragraph (28) of the Article of Association of PGN stipulated in Deed No. 28 dated May 11, 2021, members of the Board of Directors are prohibited from having the following concurrent positions:

a. member of the Board of Directors of State-Owned Enterprise (SOEs), Region-Owned Enterprises (ROE), and privately owned enterprises;
b. member of the Board of Commissioners and/or Supervisory Boards in SOEs;
c. other structural and functional positions at a central and/or regional government institution/ agency;
d. member of political party, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, Regional Legislative Council Level I and Level II, and/or regional head/ deputy regional head;
e. candidate/member of the DPR, DPD, DPRD Level I and Level II, or regional head/ deputy regional head;
f. other positions that may cause a conflict of interest; and/or
g. other positions based on the provisions of the applicable laws and regulations.

During 2023, no members of the Board of Directors held concurrent positions, as stated in PGN's Articles of Association.

PROSEDUR DAN DASAR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi memiliki prosedur penetapan sebagai berikut:

a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian remunerasi bagi Direksi.
b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi.
c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi anggota Direksi.
d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

PROCEDURES AND BASIS FOR THE DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Procedures for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

Determination of remuneration for the Board of Directors has the following determination procedure:

a. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee reviews the remuneration of the Board of Directors.
b. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee prepares remuneration recommendations for members of the Board of Directors.
c. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee submits to the Board of Commissioners the proposed remuneration for members of the Board of Directors.
d. The Board of Commissioners discusses the recommendations of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

e. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
f. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atas remunerasi bagi Direksi.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2023 memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem tahun buku 2022, dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya untuk tahun buku 2023. RUPS juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2022, dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya untuk tahun buku 2023.

Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada BAB VII tentang Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi di atas. Informasi mengenai struktur remunerasi Direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

e. The Board of Commissioners proposes remuneration for the Board of Directors to the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna shareholder.
f. The Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna shareholder evaluates, and grants written approval of the remuneration for the Board of Directors.

The Annual GMS for the 2022 Fiscal Year, which was held on May 30, 2023, granted the authority and power to Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2022 fiscal year, and salary/ honorarium, allowances, facilities and other incentives for the 2023 fiscal year. The GMS also granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2022 fiscal year, and salary/ honorarium, allowances, facilities and other incentives for the 2023 fiscal year.

Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

Determination of remuneration for the Board of Directors refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 20 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises in CHAPTER VII, on Income of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs.

Remuneration Structure of Members of the Board of Directors

Provision of remuneration to each member of the Board of Directors has been carried out based on the Procedure and Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors above. The following is information regarding the remuneration structure for the Board of Directors in 2023:

Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/ Facility	**Direktur Utama** President Director	**Direktur Lainnya** Other Directors
Gaji Salary	100%	85% dari gaji Direktur Utama 85% of President Director's salary
Tunjangan | Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1x gaji 1x salary	
Asuransi Purna Jabatan Retirement Allowance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun. Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 Year 2023 on Organs and Human Resources of SOEs.	
Fasilitas | Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the Company's financial condition	
Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical costs (at cost)	

DIREKSI
Board of Directors

Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/ Facility	Direktur Utama President Director	Direktur Lainnya Other Directors
Bantuan Hukum Legal Assistance	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	
Tantiem Tantiem	100%	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Tantiem

Komponen Remunerasi Direksi Tahun 2023

Untuk tahun 2023, total remunerasi yang diterima oleh Direksi adalah sebesar Rp94,01 miliar untuk 10 (sepuluh) pejabat dengan rincian 2 (dua) pejabat bertugas satu tahun penuh, 2 (dua) pejabat berhenti dan digantikan oleh 2 (dua) pejabat baru sejak 30 Mei 2023, 2 (dua) pejabat berhenti dan digantikan oleh 2 (dua) pejabat baru sejak 14 November 2023.

Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direksi

Dalam perumusan indikator remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian terkait kesesuaian jenis dan tingkat remunerasi berdasarkan pencapaian kinerja, analisis perbandingan dengan jenis dan tingkat remunerasi perusahaan sejenis, serta aturan terkait remunerasi yang berlaku bagi BUMN.

RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan mewajibkan diadakannya rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan.

Selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) kali Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Components of Remuneration of the Board of Directors in 2023

For 2023, total remuneration received by the Board of Directors amounted to Rp94.01 billion for 10 (ten) officers with details of 2 (two) officials serving a full year, 2 (two) officials leaving and being replaced by 2 (two) new officials since May 30, 2023, 2 (two) officials resigned and were replaced by 2 (two) new officials starting November 14, 2023.

Indicators for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

In the formulation of remuneration indicators for the Board of Directors, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee conducted studies related to the suitability of the type and level of remuneration based on performance achievements, comparative analysis with the type and level of remuneration of similar companies and the rules related to remuneration that apply to SOEs.

MEETINGS AND DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, it is required to hold regular Board of Directors meetings at least 1 (one) time every month and regular Board of Directors meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 months.

During 2023, the Board of Directors has held 75 (Seventy-five) Board of Directors Meetings, with details as follows:

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
4 Januari 2023 January 4, 2023	1. *Dry Run* Rapat PGN dengan Wamen BUMN - *Update* Jargas 2. Persetujuan Rencana *Pilot Project* BBG Transportasi (Sepeda Motor dan Kapal Nelayan) 1. Dry Run of PGN Meeting with Deputy Minister of SOEs – Gas Networks Update 2. Approval of the Gas Fuel Transport Pilot Project Plan (Motorbikes and Fishing Boats)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Januari 2023 January 5, 2023	1. Pengadaan dan Strategi Kontrak *Jack Up Drilling Rig Services*; 2. Penyaluran Gas Lapangan Kepodang; 3. *Update* Gas Kepodang Tambak Lorok; 4. *Update* Kerja Sama PGN-JPEN; 5. *Update Hoegh*; 6. *Supply Demand Gas Balance* Jawa Barat dan Lampung 2023-2024; 7. Persetujuan Penandatanganan LNG SPA WK Rapak. 1. Procurement and Contract Strategy of Jack Up Drilling Rig Services; 2. Kepodang Field Gas Distribution; 3. Kepodang Tambak Lorok Gas Update; 4. PGN-JPEN Cooperation Update; 5. Hoegh Update; 6. 2023-2024 Supply Demand Gas Balance for West Java and Lampung; 7. Approval of the Signing of LNG Rapak SPA WK.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 Januari 2023 January 11, 2023	*Update* Audit Independen Independent Audit Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Januari 2023 January 17, 2023	1. Permohonan Persetujuan awal Atas Skema Bisnis dan Komersial LNG *Bunkering*; 2. Laporan Pencapaian RKAP sampai dengan Desember 2022; 3. *Update Progress* Pengadaan *Smart Meter*; 4. *Update Progress* Jargas; 5. Optimalisasi Jaringan Fiber Optik PGNCOM; 6. *Unlock Value* PGN, PGNCOM dan WK Pangkah (SAKA). 1. Proposal for Initial Approval of the LNG Bunkering Business and Commercial Scheme; 2. Report on RKAP Acchievement up to December 2022; 3. Procurement of Smart Meter Progress Update; 4. Gas Networks Progress Update; 5. PGNCOM Fiber Optic Network Optimization; 6. Unlock Value of PGN, PGNCOM and WK Pangkah (SAKA).	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
25 Januari 2023 January 25, 2023	1. *Update Performance* HSSE SH Gas; 2. Hasil Konfirmasi Mitra *Managed Service Data* Pengukuran Gas Rumah Tangga 1. Gas SubHolding HSSE Performance Update; 2. Managed Service Partner Confirmation Results for Gas Measurement Data of Households	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Januari 2023 January 27, 2023	*DRY RUN* RDP KOMISI VII DPR RI: a. Rencana Kerja PGN dan AP 2023; b. *Update* Jargas; c. HGBT. Hearing Session DRY RUN with COMMISSION VII of DPR RI: a. 2023 Work Plans of PGN and Subsidiaries; b. Gas Networks Update; c. HGBT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 Januari 2023 January 31, 2023	a. KSO Non Administratif antara PGN-JPEN: Pipa Distribusi ±8km Cisem-KIK; b. *Dry Run* Materi RDP Komisi VII DPR RI; a. Non-Administrative Joint Operation between PGN-JPEN: ±8km Cisem-KIK Distribution Pipeline; b. Hearing Session Materials Dry Run with Commission VII of DPR RI;	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 Februari 2023 February 13, 2023	1. *Update* Status Pengalihan Bisnis Jambaran Tiung Biru (JTB}; 2. *Update Toll Fee* KJG; 3. *Update* SAKA dan *Dry Run* Rapat BOD-BOC Agenda SAKA; 4. Lain-lain. 1. Jambaran Tiung Biru (JTB) Business Transfer Status Update; 2. KJG Toll Fee Update; 3. SAKA Update and Dry Run Board of Commissioners-Board of Directors Meeting; 4. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
20 Februari 2023 February 20, 2023	1. Usulan Persetujuan Perpanjangan *Gas Transportation Agreement* (GTA) Singapore; 2. *Update* Audit Laporan Keuangan 2022; 3. *Update* Laporan Hasil *Assessment* GCG; 4. Skema Kerja Sama *Marketing* PGN-INPEX & Penawaran Harga ke *Potential Customer*; 5. Lain-lain. 1. Proposed Approval for the Extension of the Singapore Gas Transportation Agreement; 2. 2022 Financial Report Audit Update; 3. Update of the GCG Assessment Results Report; 4. PGN-INPEX Marketing Cooperation Scheme & Price Offers to Potential Customers; 5. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Februari 2023 February 27, 2023	1. *Safety Stand Down: Insiden Fatality* di Fasilitas Pengolahan Lumpur Bor Milik Kontraktor; 2. *Update* penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (ARSR) Tahun Buku 2022; 3. Update Bisnis LNG Hub - Revitalisasi Tanki 4 Arun; 4. *Update* Keikutsertaan Tender Pipa Minyak Cikampek - Plumpang; 5. Laporan Pencapaian Kinerja Januari 2023; 6. *Update* Audit Laporan Keuangan Tahunan 2022. 1. Safety Stand Down: Fatality Incident at Contractor's Drilling Mud Processing Facilities; 2. Update on the preparation of the Annual Report and Sustainability Report (ARSR) for the 2022 Fiscal Year; 3. LNG Hub Business Update - Revitalization of Arun's Tank 4; 4. Update on Cikampek - Plumpang Oil Pipeline Bidding Participation; 5. January 2023 Performance Achievement Report; 6. 2022 Annual Financial Report Audit Update.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
1 Maret 2023 March 1, 2023	1. Permohonan Persetujuan Amandemen *Gas Transportation Agreement* (GTA) PH Rokan dan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI); 2. Permohonan Persetujuan FID Seismic 3D SAKA. 1. Application for Approval of Amendment to the Gas Transportation Agreement (GTA) of PH Rokan and PT Transportation Gas Indonesia (TGI); 2. Permohonan Persetujuan FID Seismic 3D SAKA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Maret 2023 March 2, 2023	1. Permohonan Persetujuan Sidayu *Development Campaign*: SID-02 dan SIC-03; 2. Permohonan Persetujuan Pendalaman Sumur UPB-12 (*workover*); 3. Permohonan Persetujuan Pengeboran Sumur Eksplorasi dan Percepatan Produksi Sumur Suisen -1; 4. Opsi Dampak Perubahan *Toll Fee* PT Kalimantan Jawa Gas (KJG). 1. Application for Sidayu Development Campaign Approval: SID-02 and SIC-03; 2. Application for UPB-12 Well Deepening (workover) Approval; 3. Application for Exploration Well Drilling and Suisen Well Production Acceleration -1 Approval; 4. Options of Changing PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) Toll Fees Impacts.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Maret 2023 March 6, 2023	1. *Update* HSSE: *Accident* Depo Plumpang; 2. Permohonan Persetujuan Tender Amamapare; 3. Update WNTS-Pemping; 4. Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi Pembangunan Gedung Kantor MIRRA; 5. *Update* Penawaran Gedung Kantor PGN Manhattan. 1. Update HSSE: Plumpang Depo Accident; 2. Application for Amamapare Bidding Approval; 3. WNTS-Pemping Update; 4. Application for the MIRRA Office Building Investment Initiative Approval; 5. PGN Manhattan Office Building Offer Update.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
10 Maret 2023 March 10, 2023	1. *Update* Proses Divestasi PT Saka Energi Indonesia "SAKA" (*Project* Kristal - 2); 2. *Update* Penjelasan NK PGN dan PT RBBE; 3. *Update* Gunvor. 1. Update on the Divestment Process of PT Saka Energi Indonesia "SAKA" (Project Kristal - 2); 2. Updated explanation of NK PGN and PT RBBE; 3. Gunvor Update.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 Maret 2023 March 13, 2023	1. *Dry Run* RDP Komisi VI DPR RI; 2. *Update* Gunvor; 3. *Update* Penyaluran PLN Sambera; 4. *Update* Dampak Perubahan Tarif Toi/*fee* SSWJ. 1. Hearing Session Dry Run with Commission VI of DPR RI; 2. Gunvor Update; 3. PLN Sambera Distribution Update; 4. Update on the Impact of Changes in SSWJ Toi/fee Tariffs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 Maret 2023 March 14, 2023	*Update* Gunvor Gunvor Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Maret 2023 March 20, 2023	1. *Update* Laporan Kinerja Februari 2023; 2. Rencana Perjanjian Penggunaan Fasilitas LNG; 3. *Update* Gunvor. 1. February 2023 Performance Report Update; 2. LNG Facility Utilization Agreement Plan; 3. Gunvor Update.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Maret 2023 March 24, 2023	1. FID Revitalisasi LNG Tank F-6004 & Fasilitas Pendukung Lainnya 2. Persetujuan FID Pipanisasi BBM Cikampek Plumpang 1. FID Revitalization of LNG Tank F-6004 & Other Supporting Facilities 2. Approval of Cikampek Plumpang BBM Pipeline FID	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Maret 2023 March 27, 2023	*Update* Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 2022 Audited Financial Report Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 Maret 2023 March 31, 2023	1. *Update Draft* Laporan Keuangan Tahun 2022 2. Monitoring Progres Perpanjangan PJBG 2023 dan Penyediaan Jaminan Pembayaran 1. Draft of the 2022 Financial Statements Update 2. Monitoring the Progress of the 2023 PJBG Extension and Provision of Payment Guarantees	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
3 April 2023 April 3, 2023	1. Persetujuan Jasa Konsultasi LNG *Global Market Insight and Price Projection* 2. Usulan Dividen Tahun Buku 2022 1. Approval of Global LNG Market Insight and Price Projection Consulting Services 2. Proposal for the 2022 Fiscal Year Dividend	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 April 2023 April 8, 2023	*Update* Gunvor Guvnor Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 April 2023 April 10, 2023	1. Persetujuan Kerja Sama BGS/BOT Gedung MIRRA 2. Perpanjangan Kontrak dan Potensi Pasokan Gas Baru 3. Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Bangka dari WK Rapak 1. BGS/BOT Cooperation Agreement for MIRRA Building 2. Contract Extension and Potential for New Gas Supply 3. Purchase of Bontang IDD Bangka LNG Supply from Rapak WK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 April 2023 April 12, 2023	1. Pelaksanaan Audit HSSE 2. Permohonan Persetujuan Pembelian Kembali Obligasi PT Saka Energi Indonesia Tahun 2023 Melalui Mekanisme *Cash Tender Offer* 3. Persetujuan Penandatanganan Pinjaman Komersial dari PT Pertamina (PERSERO) 1. HSSE Audit Implementation 2. Application for the Approval of the Bonds Buy Back of the 2023 PT Saka Energi Indonesia Through the Cash Tender Offer Mechanism 3. Commercial Loan Signing Approval from PT Pertamina (PERSERO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 April 2023 April 14, 2023	Pembahasan *Action Plan Audit* Action Plan Audit Discussion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26 April 2023 April 26, 2023	1. Laporan Kinerja Maret 2023 2. Update Realisasi dan Rencana Pengambilan GMU Dumai Industri dan RU Dumai 3. *Update* Pajak PPN 1. March 2023 Performance Report 2. Update on Realization and Plans for Taking Over of GMU Dumai Industry and RU Dumai 3. VAT Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
2 Mei 2023 May 2, 2023	1. Pembelian Kembali Obligasi PT Saka Energi Indonesia Tahun 2023 2. RUPST AP dan Afiliasi Tahun Buku 2022 3. Permohonan Persetujuan Pengambilan WK Sangkar oleh PT Saka Energi Indonesia 1. PT Saka Energi Indonesia Bond Buyback in 2023 2. 20233 Fiscal Year GMS of Subsidiaries and Affiliates 3. Application for Approval to Take Over the Sangkar WK by PT Saka Energi Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Mei 2023 May 5, 2023	1. Permohonan Persetujuan Pemegang Saham PGNMAS atas Usulan Realokasi Anggaran Investasi RKAP 2023 2. Permohonan Persetujuan Penamaan Produk (*Product Rebranding*) 3. Persetujuan Pemilihan *Dealer* Manajer *Liability Management* 4. Persiapan Pra Kualifikasi dan *Update* Skema Bisnis EPC LNG dan Sulphur *Product Handling* 5. KTS penyediaan LNG Gunvor 1. Request for Approval from PGNMAS Shareholders for the Proposed Reallocation of the 2023 RKAP Investment Budget 2. Proposal for Product Rebranding Approval 3. Approval of Liability Management Manager Dealer Selection 4. Pre-Qualification Preparation and Update on EPC LNG and Sulfur Product Handling Business Schemes 5. KTS for the provision of Gunvor LNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Mei 2023 May 10, 2023	1. Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Bangka dari WK Rapak 2. Pemanfaatan Pasokan Gas Jabung Petrochina 1. Purchase of Bontang IDD Bangka LNG Supply from WK Rapak 2. Utilization of Petrochina's Jabung Gas Supply	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	M. Haryo Yunianto	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Heru Setiawan
15 Mei 2023 May 15, 2023	1. *Update* Gunvor 2. *Update* dan Arahan Progres Kerja Sama Antara PGN dengan Petronas LNG dan CNTIC 3. Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Bangka dari WK Rapak 1. Gunvor Update 2. Updates and Directives for Cooperation Progress between PGN with Petronas LNG and CNTIC 3. Purchase of Bontang IDD Bangka LNG Supply from Rapak WK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 Mei 2023 May 23, 2023	1. Laporan Kinerja April 2023 2. *Update* Gunvor 3. *Update* Novasi JTB 1. April 2023 Performance Report 2. Gunvor Update 3. JTB Novation Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 Mei 2023 May 29, 2023	*Guideline* RKAP 2024 SH Gas Gas SubHolding 2024 RKAP Guideline	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
6 Juni 2023 June 6, 2023	1. *Update* Gunvor 2023 2. *Update* dan Arahan Progres Kerja Sama Antara PGN dengan Petronas LNG dan CNTIC 3. *Update Top Risk* 1. 2023 Gunvor Update 2. Updates and Directives for Cooperation Progress between PGN with Petronas LNG and CNTIC 3. Top Risk Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Juni 2023 June 12, 2023	1. Permohonan Persetujuan Penetapan *Guideline* RKAP 2023 Subholding Gas 2. *Update* Kajian PGN *Unlock Value* 2023 - 2024 3. Permohonan Persetujuan LNG *Bunkering* 1. Application for Approval of Determination of the 2023 RKAP Guideline for Gas Subholding 2. 2023 – 2024 PGN Unlock Value Study Update 3. Application for LNG Bunkering Approval	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
16 Juni 2023 June 16, 2023	1. *Update* FSRU Lampung 2. Solusi Penyediaan LNG ke Amamapare *Project* PT FI - Papua 3. Permohonan Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Gagas, PGASOL dan PGNCOM 1. Lampung FSRU Update 2. Solution for the Provision of LNG to Amamapare Project PT FI - Papua 3. Request for Approval to Determine the Use of Net Profits of Gagas, PGASOL and PGNCOM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 Juni 2023 June 19, 2023	*Update* Gunvor SS Gunvor SS update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Juni 2023 June 20, 2023	1. Persetujuan RKAP 2023 Revisi 2. Persetujuan *Guideline* RKAP 2024 SH Gas 3. *Liability Management* Obligasi PGN SA dan SAKA 4. *Dry Run* Rapat BOD BOC: Laporan Pencapaian RKAP Mei 2023 dan Laporan *Top Risk* Mei 2023 5. *Dry Run* Rapat BOD BOC: *Update* Seismic WK Pangkah SAKA 6. *Dry Run* Rapat BOD BOC: *Update* Revitalisasi Tangki Arun 1. Approval of the Revised 2023 RKAP 2. Approval of the 2024 Gas SubHolding RKAP Guideline 3. Liability Management of PGN SA and SAKA Bonds 4. Dry Run Meeting of the Board of Commissioners and Directors: May 2023 RKAP Achievement Report and May 2023 Top Risk Report 5. Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting: Seismic Update of Pangkah SAKA WK 6. Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting: Update on Arun Tank Revitalization	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 Juni 2023 June 21, 2023	1. *Update* HSSE 2. *Dry Run* Rapat BOD BOC: *Update* FSRU Lampung 1. HSSE Update 2. Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting: Lampung FSRU Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
3 Juli 2023 July 3, 2023	1. *Update* Kelanjutan KSO Non Administratif PGN - JPEN 2. Rencana Volume dan HPP Pasokan Gas 2024 3. *Update* HCM. 1. Update on the Continuation of PGN - JPEN Non-Administrative Joint Operation 2. 2024 Gas Supply Volume and HPP Plan 3. HCM Update.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Juli 2023 July 6, 2023	1. *Update* Pengalihan Perjanjian Jual Beli Gas dan Lapangan JTB (Novasi JTB) 2. *Update* Negosiasi Gunvor 1. Update on the Transfer of JTB Gas and Field Sales and Purchase Agreements (JTB Novation) 2. Gunvor Negotiation Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Juli 2023 July 10, 2023	1. *Update* HCM (terbatas) 2. *Update* Arbitrase PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") 3. *Update* LNG *Bunkering* 4. *Project* Biomethane dengan konsorsium Jepang 1. HCM Update (limited) 2. PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") Arbitration Update 3. LNG Bunkering Update 4. Biomethane Project with a Japanese consortium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Juli 2023 July 17, 2023	*Overview* Pembangunan dan Rencana Pengelolaan Pipa Cisem Tahap-1 (Semarang-Batang). Overview of the Construction and Management Plan for the Cisem Pipeline Phase-1 (Semarang-Batang).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Juli 2023 July 24, 2023	1. *Update* HSSE 2. *Dry Run* BOD BOC: a. Laporan Kinerja Juni 2023 dan Laporan Keuangan Semester I b. *Update* LNG c. *Update* SAKA d. *Update* KJG 1. HSSE Update 2. Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. June 2023 Performance Report and First Half Financia lReport b. LNG Update c. SAKA Update d. KJG Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
26 Juli 2023 July 26, 2023	1. *Update* Gunvor 2. Proyeksi Volume dan HPP Pasokan Gas TW IV 2023 dan Tahun 2024 3. *Update* LNG Bungkering 4. Pembentukan UMS 1. Gunvor Update 2. Gas Supply Volume and HPP Projections for Quarter IV of 2023 and 2024 3. LNG Bungkering Update 4. Establishment of UMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 Juli 2023 July 28, 2023	*Update* HCM HCM Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 Juli 2023 July 31, 2023	1. *Update* UPB 12 *Workover* (*Deepening* CD Ngimbang) SAKA; 2. *Draft* Usulan RKAP 2024 PGN Grup; 3. Rencana Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi di KIPP IKN Nusantara 1. UPB 12 Workover (Deepening CD Ngimbang) SAKA Update; 2. Proposal Draft of PGN Group's 2024 RKAP; 3. Natural Gas Infrastructure Development Plan at KIPP IKN Nusantara	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Agustus 2023 August 8, 2023	1. TOP Muara Bakau Tahun 2020 2. KSO Non Administrasi PGN - JPEN; 3. Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Bangka dari WK Rapak. 1. 2020 Muara Bakau TOP 2. PGN – JPEN Non-Administrative Joint Operation; 3. Purchase of Bontang IDD Bangka LNG Supply from Rapak WK.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Agustus 2023 August 9, 2023	*Dry Run* Rapat Gabungan BOD-BOC: 1. Usulan Pemboran Sumur Sidayu SID-02 & SIC-03 (RKAP 2023) dan Pengeboran Sumur Eksplorasi Suisen-1 WK Muriah 2. Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG Tank F-6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya. Dry Run of the Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners: 1. Proposed Drilling of the Sidayu SID-02 & SIC-03 Well (RKAP 2023) and Drilling of the Suisen-1 Exploration Well of the Muriah WK 2. LNG Hub Business Development Through Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
10 Agustus 2023 August 10, 2023	Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Bangka dari WK Rapak Purchase of Bontang IDD Bangka LNG Supply from Rapak WK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 Agustus 2023 August 16, 2023	1. *Update* Gunvor 2. *Update* Teluk Lamong 1. Gunvor Update 2. Teluk Lamong Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 Agustus 2023 August 21, 2023	*Dry Run* BOD BOC: Laporan Pencapaian Kinerja RKAP Juli 2023 dan Laporan Keuangan Semester I 2023 Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners: July 2023 RKAP Performance Achievement Report and 2023 Semester I Financial Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 Agustus 2023 August 28, 2023	1. *Dry Run* Rapat Wamen BUMN: Jargas Jabodetabek 2. Tindak Lanjut UV 3. Usulan Relaksasi Penyerahan JP 4. *Update* KSO JPEN 5. *Update* Kerja Sama dengan Petronas - CNTIC 1. Dry Run of Meeting with the Deputy Minister of SOEs: Jabodetabek Gas Network 2. Follow-up of UV 3. Proposal for JP Handover Relaxation 4. JPEN Joint Operation Update 5. Cooperation with Petronas – CNTIC Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 Agustus 2023 August 31, 2023	1. Pinjam Pakai Lahan PGN-PLN 2. Pembelian Pasokan LNG Bontang IDD Rapak dari WK Rapak 3. *Update* Pipanisasi BBM Cikampek-Plumpang 4. *Amandment Facility Agreement* (Pinjaman) PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") 5. RKAP 2023 Revisi *Draft* 2 PGN Group 6. Usulan RKAP 2024 PGN *Group* 1. Borrow to Use of PGN-PLN Land 2. Purchase of Bontang IDD Rapak LNG supplies from Rapak WK 3. Cikampek-Plumpang Fuel Pipeline Update 4. Amendment to Facility Agreement (Loan) of PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") 5. Draft 2 of the Revised 2023 RKAP of PGN Group 6. Proposal for PGN Group's 2024 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
4 September 2023 September 4, 2023	1. Tindaklanjut UV 2. Transfer Aset Tanah Jalur Grissik-Singapura dan Grissik-Duri kepada TGI 1. Follow-up of UV 2. Transfer of Land Assets on the Grissik-Singapore and Grissik-Duri Routes to TGI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 September 2023 September 11, 2023	1. *Dry Run* Rapat Gub DKI dan WAMEN - Program Jargas 2. *Update* GTA CISEM 1. Dry Run Meeting of the Governor of DKI and Deputy Minister - Gas Network Program 2. Update on CISEM GTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 September 2023 September 12, 2023	1. Tindaklanjut UV 2. *Update* Arbitrase FSRU Lampung 3. *Update* Usulan RKAP 2024 PGN Grup 1. Follow-up of UV 2. Lampung FSRU Arbitration Update 3. PGN Group's 2024 RKAP Proposal Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 September 2023 September 14, 2023	1. *Update* KSO PGN JPEN 2. *Update* Rencana Penandatanganan PJBG dalam IOG 3. *Update* Surat Tanggapan Pre ADP Gunvor 1. PGN JPEN Joint Operation Update 2. Update on PJBG Signing Plan in IOG 3. Update on Gunvor's Pre-ADP Response Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 September 2023 September 25, 2023	1. Rencana Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2023 2. *Dry Run* RDP Komisi 6 3. Laporan Kinerja RKAP sampai dengan Agustus 2023 4. Penyaluran Gas ke PLN pada Kontrak Perikatan PGN - PLN (KGT PLN) 1. 2023 EGMS Implementation Plan 2. Dry Run of Commission 6 Hearing Session 3. RKAP Performance Report up to August 2023 4. Gas Distribution to PLN in the PGN - PLN Engagement Contract (KGT PLN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 September 2023 September 29, 2023	Tindaklanjut Mekanisme Penyesuaian Harga Gas Follow-up to the Gas Price Adjustment Mechanism	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
2 Oktober 2023 October 2, 2023	1. *Update Smart Meter* Jargas 2. *Update* Arbitrase KJG 3. Penyediaan Pasokan dan Infrastruktur LNG untuk Amman Mineral 4. Permohonan Persetujuan atas Perjanjian Pengangkutan Gas BKMS - PGN 5. Permohonan Persetujuan Volume dan Harga Gas Pasokan Gas Conrad WNEL 1. Gas Network Smart Meter Update 2. KJG Arbitration Update 3. Provision of LNG Supply and Infrastructure for Amman Mineral 4. Request for Approval of the BKMS - PGN Gas Transportation Agreement 5. Request for Approval of Conrad WNEL Gas Supply Volume and Price	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Oktober 2023 October 6, 2023	1. *Update* SAKA: a. Perpanjangan WK Muriah dan *Update* Suisen-1 b. Perpanjangan WK Ketapang dan Komitmen Kerja Pasti (KKP) pengeboran dua sumur Eksplorasi c. Evaluasi atas *indicative offer* TIS atas WK Ketapang 2. FID Pembangunan Jargas IKN 1. SAKA Update: a. Muriah WK Extension and Suisen-1 Update b. Extension of the Ketapang WK and Definite Work Commitment (KKP) for the drilling of two Exploration wells c. Evaluation of TIS's indicative offer for the Ketapang WK 2. FID for IKN Gas Network Development	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Oktober 2023 October 9, 2023	1. *Dry Run* Kunjungan Dirut Pertamina 2. Tindaklanjut Pengembalian Pembayaran Dimuka IAE 3. *Update* UV 4. *Update* HCM 1. Dry Run Visit from the President Director of Pertamina 2. IAE Advanced Payment Refund Follow-up 3. UV Update 4. HCM Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
16 Oktober 2023 October 16, 2023	1. *Update* FID Nias 2. Laporan Kinerja RKAP dan Laporan Keuangan September 2023 3. *Update* Penyesuaian Harga Gas 4. FID Rencana Pemasangan Infrastruktur Gas PT Cikarang Listrindo MM2100 5. *Update* HCM 1. Nias FID Update 2. RKAP Performance Report and September 2023 Financial Report 3. Gas Price Adjustment Update 4. FID Plans for Installation of PT Cikarang Listrindo MM2100 Gas Infrastructure 5. HCM Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 Oktober 2023 October 23, 2023	1. *Update* PJB LNG Kayan 2. *Update* Jargas untuk Audiensi dengan Kemenko Perekonomian 3. *Update* Arbitrase KJG 4. *Update* Arbitrase PLI 5. *Dry Run* Rapat BOD BOC: a. *Gas Balance* 2023 – 2024 b. *Update* Gunvor 1. Kayan LNG PJB Update 2. Gas Network Update for Hearing with the Coordinating Ministry for the Economy 3. KJG Arbitration Update 4. PLI Arbitration Update 5. Dry Run of the Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. 2023 – 2024 Gas Balance b. Gunvor Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
30 Oktober 2023 October 30, 2023	1. *Update* Strategi Komersial Suissen 1 dan TOP Muara Bakau 2020 2. RKAP Revisi 2023 PGNMAS dan Usulan *Draft* 5 RKAP 2024 3. *Update* RJPP 4. *Update* Komersial: a. Implementasi HGBT atas Kontrak Pasokan Gas Baru antara MEPG-PGN b. Pembahasan terkait Kelanjutan Kontrak Konfirmasi Gas Tahunan antara PGN dan PLN untuk periode mulai 1 November 2023 c. Pembahasan terkait Penyelesaian Penagihan Volume Pengangkutan Gas (GTA) PGN untuk Pembangkit PLN Paya Pasir periode Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022. 5. Persetujuan Strategi Hukum dalam Penanganan Permasalahan Hukum Gunvor dan Keterbukaan Informasi kepada OJK. 1. Suissen 1 and TOP Muara Bakau Commercial Strategy 2020 Update 2. PGNMAS 2023 Revised RKAP and Proposed Draft 5 of 2024 RKAP 3. RJPP Update 4. Commercial Update: a. HGBT implementation of the New Gas Supply Contract between MPEG-PGN b. Discussion regarding the Continuation of the Annual Gas Confirmation Contract between PGN and PLN for the period starting November 1 2023 c. Discussion regarding the Completion of PGN's Gas Transport Volume (GTA) Billing of PLN Paya Pasir Power Plant for the February 2022 to August 2022 period. 5. Approval of Legal Strategy in Handling Gunvor Legal Issues and Disclosure of Information to OJK.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Achmad Muchtasyar	Faris Aziz	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
6 November 2023 November 6, 2023	1. Update SAKA: a. Permohonan Persetujuan Inisiatif Investasi UPB12 *Workover well* b. Permohonan Inisiatif Investasi Pengeboran Sumur *West* Pangkah WPA 05 & WPA 06 2. Usulan Kerjasama dan Nilai Sewa Pemanfaatan Infrastruktur Kendal 3. *Update* HCM 4. Transfer Aset Tanah Jalur Grissik - Singapuran dan Grissik - Duri kepada PT TGI 1. SAKA Update: a. Application for Approval of the UPB12 Workover Well Investment Initiative b. Application for West Pangkah WPA 05 & WPA 06 Well Drilling Investment Initiative 2. Proposed Collaboration and Rental Value for Utilization of Kendal Infrastructure 3. HCM Update 4. Transfer of Land Assets on the Grissik - Singapuran and Grissik - Duri Routes to PT TGI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 November 2023 November 13, 2023	1. *Safety Stand Down*: Pekerja Terkena Kunci Pipa Saat Pekerjaan Perawatan Sumur Migas (*Online* seluruh PERWIRA) 2. *Update* Gunvor Pasca Notifikasi FM 3. Persetujuan Perpanjangan *Availability Period* dan Penurunan *Commitment Fee* Pinjaman Club Deal PGN SA 4. *Update* Kerja Sama JPEN 5. *Update* atas Amandemen Ketiga PJB LNG KAYAN 6. *Update* Pengalihan PJBG Jambaran Tiung Biru (JTB) 7. *Update* Arbitrase KJG 1. Safety Stand Down: Worker Affected by Pipe Wrench During Oil and Gas Well Maintenance Work (Online all EMPLOYEES) 2. Gunvor Update After the FM Notification 3. Approval of the Extension of the Availability Period and the Reduction of the PGN SA Club Deal Loan Commitment Fee 4. JPEN Cooperation Update 5. Update on the Third Amendment to PJB of KAYAN LNG 6. Update on the Transfer of Jambaran Tiung Biru (JTB) PJBG 7. KJG Arbitration Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
16 November 2023 November 16, 2023	1. RJPP 2025 - 2029 dengan Suplemen 2034 2. *Update* Gunvor Pasca Notifikasi FM 1. 2025 - 2029 RJPP with Supplement 2034 2. Gunvor Update After the FM Notification	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 November 2023 November 21, 2023	1. Permohonan Perpanjangan WK Ketapang 2. Inisiatif Investasi Gas Terproses LPG Jambl Merang 3. Usulan Pandangan PGN dalam *Corporate Charter* 4. Permohonan Persetujuan Terna dan Desain AR SR 1. Application for Extension of Ketapang Working Area 2. Jambl Merang LPG Processed Gas Investment Initiative 3. PGN's Proposed View in the Corporate Charter 4. Application for AR & SR Theme and Design Approval	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
27 November 2023 November 27, 2023	1. *Dry Run* BOD BOC: a. Laporan Kinerja RKAP Oktober 2023 dan RKAP 2024 D5 b. KPI c. *Top Risk* d. *Update* HSSE 2. *Update* Pasokan: a. Permohonan Persetujuan Volume dan Harga Gas untuk Perpanjangan dan Pasokan Gas Baru di 2024 b. Update Kelanjutan Penyaluran Gas untuk Kilang RU VI Balongan c. Permohonan Persetujuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PT Freeport Indonesia (Smelter Manyar, Gresik) 3. *Update* KSO TSI - PGASOL dan usulan perubahan *threshold* 1. Dry Run of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. October 2023 RKAP Performance Report and 2024 RKAP D5 b. KPI c. Top Risk d. HSSE Update 2. Supply Update: a. Request for Approval of Gas Volumes and Prices for New Gas Extension and Supply in 2024 b. Update on the Continuation of Gas Distribution for the RU VI Balongan Refinery c. Application for Approval of PT Freeport Indonesia Payment Due Date (Manyar Smelter, Gresik) 3. TSI-PGASOL Joint Operation and proposed threshold changes update	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Desember 2023 December 4, 2023	PreFID Keikutsertaan Pertagas dalam tender kemitraan pengembangan dan pengoperasian infrastruktur LNG Kluster Papua Utara PreFID Pertagas' participation in the bidding for partnership for the development and operation of the North Papua Cluster LNG infrastructure	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Desember 2023 December 6, 2023	*Update* PreFID Keikutsertaan Pertagas dalam tender kemitraan pengembangan dan pengoperasian infrastruktur LNG Kluster Papua Utara Update on PreFID Pertagas' participation in the bidding for partnership for the development and operation of the North Papua Cluster LNG infrastructure	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
12 Desember 2023 December 12, 2023	1. Permohonan Persetujuan Anggaran dan Inisiatif Investasi UPB 12 *Workover Well Deepening Testing CD Ngimbang & Ngimbang Clastic Reservoir* ("UPB12"); 2. *Update* RKAP 2024 (Anggaran Biaya Investasi); 3. *Update* Progres LNG Gunvor; 4. Pengembalian Biaya Operasional GASKU PGN-GAGAS 5. *Update* Tindaklanjut KSO PGN – JPEN 6. Penyelesaian *Force Majeure* MEPG melalui *Expert* 7. *Update* Dokumen Bridging PJBG Jambaran Tiung Biru (JTB) 8. *Update* HCM 1. Request for Budget Approval and Investment Initiatives of UPB 12 Workover Well Deepening Testing CD Ngimbang & Ngimbang Clastic Reservoir ("UPB12"); 2. 2024 RKAP Update (Budget for Investment Cost); 3. Gunvor LNG Progress Update; 4. Reimbursement of GASKU PGN-GAGAS Operational Costs 5. PGN – JPEN Joint Operation Follow-up Update 6. MEPG Force Majeure Settlement by Experts 7. Jambaran Tiung Biru (JTB) PJBG Bridging Document Update 8. HCM Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief S.Handoko	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Fadjar Harianto Widodo	Beni Syarif Hidayat	Harry Budi Sidharta
18 Desember 2023 December 18, 2023	1. *Dry Run* Rapat Gabungan BOD BOC: a. Laporan RKAP November 2023 b. Usulan RKAP 2024 06 c. KPI 2024 Subholding Gas 2. Rencana Pemasangan Infrastruktur Gas PT Cikarang Listrindo Tbk MM2100 3. Potensi Penyaluran LNG dan Pembangunan Infrastruktur Antam FeNi Haltim 4. PreFID Rencana Keikutsertaan Pertagas dalam Tender Kemitraan PLN Power Plant Kluster Nusra dan Sulawesi Utara 1. Dry Run of the Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. November 2023 RKAP Report b. proposal for 2024 RKAP 06 c. Gas Subholding 2024 KPI 2. PT Cikarang Listrindo Tbk MM2100 Gas Infrastructure Installation Plan 3. Potential for LNG Distribution and Infrastructure Development for Antam FeNi Haltim 4. PreFID Plans for Pertagas Participation in the Nusra and North Sulawesi Cluster PLN Power Plant Partnership Bidding	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Desember 2023 December 27, 2023	1. *Dry Run* Rapat BOD BOC: a. *Update* HSSE b. *Update Top Risk* c. *Update* Jargas d. *Update* Mini LNG Plant e. *Update* Divestasi SAKA 2. Persetujuan Perpanjangan Penyaluran Gas PGN ke PLN Tambak Lorok sumber pasok SAKA Kepodang mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 3. Perpanjangan Perjanjian PHE WMO dan Amandemen PJBG PEPC JTB 1. Dry Run of Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. HSSE Update b. Top Risk Update c. Gas Network Update d. Mini LNG Plant Update e. SAKA Divestment Update 2. Approval of the Extension of PGN Gas Distribution to PLN Tambak Lorok as supply source of SAKA Kepodang from January 1, 2024, to December 31, 2024 3. Extension of the PHE WMO Agreement and Amendment to the JTN PEPC PJBG	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI
Board of Directors

Adapun informasi mengenai keputusan-keputusan Direksi yang dilakukan secara sirkuler pada tahun 2023, di antaranya adalah sebagai berikut:

Information regarding the Board of Directors' decisions carried out circularly in 2023, included the following:

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	22 Februari 2023 February 23, 2023	Persetujuan *Gas Transportation Agreement* Singapore ("GTA Singapore")	Approval of the Gas Transportation Agreement Singapore ("GTA Singapore")
2	5 Mei 2023 May 5, 2023	Variabel Keekonomian FID Jargas Tahun 2023	2023 Gas Network FID Economic Variables

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Direksi PGN memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 tentang Pembentukan *Chief Risk Officer* (CRO) dan Komite Manajemen Risiko tanggal 16 Juli 2021. Direksi secara berkala melakukan penilaian terkait kinerja Komite di bawah Direksi melalui *self-assessment* yang didasarkan pada program kerja dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan agenda yang meliputi namun tidak terbatas pada penetapan strategi dalam penerapan pengelolaan risiko, *update* status level risiko perusahaan, pembangunan budaya sadar risiko dan evaluasi atas aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi.

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan program kerja dan kehadiran rapat dengan baik.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

PGN's Board of Directors has established a Risk Management Committee, which is based on the Decree of PGN's Board of Directors No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 on the Establishment of Chief Risk Officer (CRO) and Risk Management Committee dated July 16, 2021. The Board of Directors periodically evaluates the performance of Committees under the Board of Directors through self-assessment, which is based on the work plan and attendance rate of members in committee meetings.

The Risk Management Committee meetings are held at least once every 3 (three) months with an agenda that includes but is not limited to determining strategies for implementing risk management, updating the status of the company's risk level, promoting a risk-awareness culture, and evaluating activities that require approval from the Board of Directors.

Throughout 2023, the Risk Management Committee has properly carried out its duties and responsibilities with regard to the work program and meeting attendance.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengajukan usulan program pengembangan kompetensi untuk mengikuti *Forum Group Discussion*, seminar, dan *workshop* sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dan Direksi;

b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

c. Setiap Komisaris dan Direktur yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi atau Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); dan

d. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan disampaikan ke Dewan Komisaris atau Direksi.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program pelatihan, seminar, dan *workshop* antara lain:

POLICY ON TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In order to support the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners and Board of Directors related to the tasks of the Supervision and Management of the Company, the Board of Commissioners and Directors may submit a program proposal to take part in the Group Discussion Forum, Seminar and Workshop as needed. Provisions regarding the capability improvement program for the Board of Commissioners and Directors are as follows:

a. The competency improvement program is implemented in order to improve the work effectiveness of the Board of Commissioners and Board of Directors;
b. Plans to implement a competency improvement program must be included in the Company's Work Plan and Budget;
c. Each Commissioner and Director taking part in competency improvement programs, such as seminars and/or training are requested to provide presentation for other members of the Board of Directors or Board of Commissioners in order to share information and knowledge (sharing knowledge); and
d. The members of the Board of Commissioners or Board of Directors must prepare a report on the implementation of the Competency Improvement Program and submit the report to the Board of Commissioners or Board of Directors.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2023

During 2023, the Board of Commissioners and Board of Directors took part in the training programs, seminars, and workshops, including:

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors

Pelatihan Dewan Komisaris

Training of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Arcandra Tahar	Komisaris Utama (masa tugas hingga 20 September 2023) President Commissioner (term of office up to September 20, 2023)	23 - 24 Agustus 2023 August 23 – 24, 2023	University of Texas, Austin, USA	*Leading High-Performance Teams*
		30 - 31 Agustus 2023 August 30 – 31, 2023	University of Texas, Austin, USA	*Negotiation and Collaborative Decision Making*
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 Februari 2023 February 15, 2023	Jakarta	Perkembangan Terbaru *Peer To Peer Lending* (P2P *Lending*) Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/POJK/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Latest Developments in Peer To Peer Lending (P2P Lending) in Indonesia Based on Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/POJK/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services
		30 - 31 Agustus 2023 August 30 – 31, 2023	University of Texas, Austin, USA	*Negotiation and Collaborative Decision Making*
		5 Oktober 2023 October 5, 2023	Jakarta	GRC Series KBUMN, GRC *Integration Information for Supervisory Board* Ministry of SOEs GRC Series, GRC Integration Information for Supervisory Board
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	31 Maret – 5 April 2023 March 31 – April 5, 2023	Boston	*Business Analytics*
		19-20 Juni 2023 June 19 – 20, 2023	Bali	*The 13th Indonesia HR Summit*
		20-22 September 2023 September 20 – 22, 2023	Bali	*The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 - Advancing Energy Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development*
		27 September 2023 September 27, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, ESG for Boards* Ministry of SOEs GRC Series, ESG for Boards
		5 Oktober 2023 October 5, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board* Ministry of SOEs GRC Series, GRC Integration Information for Supervisory Board
		13-14 Desember 2023 December 13 – 14, 2023	Jakarta	*18th Indonesia HR Expo Conference & Exhibition*
Paiman Raharjo	Komisaris Independen (masa tugas hingga 14 November 2023) Independent Commissioner (term of office up to November 14, 2023)	27 Juni 2023 June 27, 2023	Jakarta	Pelatihan *GRC Series,* Audit Teknologi Informasi GRC Series Training, Information Technology Audit
		12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
		10 Agustus 2023 August 10, 2023	Jakarta	Pelatihan *GRC Series, Pre IPO & Post IPO* GRC Series Training, Pre IPO & Post IPO
		10 Agustus 2023 August 10, 2023	Jakarta	Pelatihan *GRC Series,* Pemeringkatan Efek Bersifat Utang GRC Series Training, Rating of Debt Securities

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	14 September 2023 September 14, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN*, Sosialisasi Pemeringkatan BUMN dan AP BUMN Ministry of SOEs GRC Series, Socialization of SOE and SOE Subsidiaries' Rating
		5 Oktober 2023 October 5, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board* Ministry of SOEs GRC Series, GRC Integration Information for Supervisory Board
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
		27 September 2023 September 27, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, ESG for Boards* Ministry of SOEs GRC Series, ESG for Boards
		5 Oktober 2023 October 5, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, GRC Integration Information for Supervisory Board* Ministry of SOEs GRC Series, GRC Integration Information for Supervisory Board
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	*GRC Series KBUMN, GCG Methodology and Environmental and Social Management Systems* Ministry of SOEs GRC Series, GCG Methodology and Environmental and Social Management Systems
		19-22 Desember 2023 December 19 – 22, 2023	Bali	*Inhouse* Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 Inhouse Risk Management based on PER-2/MBU/03/2023 and ISO 31000:2018

Pelatihan Dewan Direksi
Training of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Arief S. Handoko	Direktur Utama President Director	14 Juni 2023 June 14, 2023	Online	Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guard Productivity for Economic Transformation
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	*Business Judgement Rules* Business Judgement Rules
Beni S. Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	13 – 14 Okt 2023 17 – 18 Nov 2023 8 Des 2023 October 13 – 14, 2023 November 17 – 18, 2023 December 8, 2023	Denpasar dan Jakarta	*Chief Human Resource Officers* (CHRO) *School* Tahun 2023 (KBUMN) Chief Human Resource Officers (CHRO) School of 2023 (Ministry of SOEs)
		24 – 25 Agust 2023 August 24 – 25, 2023	Denpasar	*Industrial & Employee Relation Conference* (FHCI) Industrial & Employee Relation Conference (FHCI)
		12 Juli 2023 July 12, 2023	Wisma PGN Megamendung	*Hands-on Training Risk Management* (PGN) Hands-on Training Risk Management (PGN)
Fadjar Harianto Wodoko	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	2 Maret 2023 March 2, 2023	Jakarta	*Training for CRP® Certification* Training for CRP® Certification
		12 Juli 2023 July 12, 2023	Mega Mendung	*Hands-on Training Risk Management* Hands-on Training Risk Management
		27 Juni – 25 Oktober 2023 June 27 - October 25, 2023	*Online* Online	Pelatihan *GRC Masterclass* Program 2023 BUMN *Leadership and Management Institute* (BLMI) 2023 GRC Masterclass Training Program, BUMN Leadership and Management Institute (BLMI)
		19 Desember 2023 December 19, 2023	Denpasar	*Inhouse Training* Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 Inhouse Training on Risk Management based on PER-2/MBU/03/2023 and ISO 31000:2018

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Harry Budhi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	6 – 12 November 2023 November 6 – 12, 2023	Jakarta	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi PT Pertamina *Training and Consulting* Tahun 2023 Strengthening of National Values for PT Pertamina Training and Consulting in 2023
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	15 Maret 2023 March 15, 2023	Jakarta	ST *Modul Plan_Oil & Gas Forum* 2023 2023 ST Modul Plan_Oil & Gas Forum
		8-21 Maret 2023 March 8-21, 2023	Palembang	*Incident Command System* (ICS) Incident Command System (ICS)
		6-12 November 2023 November 6-12, 2023	Jakarta	Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan – Lemhanas Strengthening of National Values – Lemhanas
Ratih Esti Prihatini	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	28 – 29 Agustus 2023 August 28 – 29, 2023	Jakarta – Ms Teams	Pelatihan *Upskilling Leadership Competency SLC Batch II* Batch II of Upskilling Leadership Competency SLC Training

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU

Policy on Introduction Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

PGN memiliki dan melaksanakan program pengenalan Perusahaan ditujukan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat agar dapat segera mengenal proses bisnis Perusahaan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perusahaan. Diharapkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru diangkat dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing secara efektif. Tanggung jawab mengadakan program pengenalan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi berada pada *Corporate Secretary*.

PGN has established and implements a Company introduction program aimed at members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have been appointed for the first time to enable them to immediately become familiar with the Company's business processes, including all the issues that have been, are being, and will be faced, allowing them to work optimally in the interests of the Company. The newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors are expected to understand all aspects related to their roles and responsibilities, to ensure that they can effectively carry out their respective duties. The Corporate Secretary is responsible for holding an introductory program for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2023

Pada tahun 2023, program pengenalan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, yakni Amien Sunaryadi, Abdullah Aufa Fuad, Arief S. Handoko, Harry Budi Sidharta, Rosa Permata Sari dan Ratih Esti Prihatini. Dalam pelaksanaan program tersebut, PGN melalui *Corporate Secretary* mempresentasikan berbagai hal terkait kinerja Perusahaan yang mencakup: Bisnis & Posisi Bisnis Subholding Gas, Struktur & Proses Bisnis Subholding Gas, *Key Performance Indicator* Tahun 2023, *Overview* RJPP Subholding Gas, Program Strategis Subholding Gas, Profil Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta *Update* Aturan Internal PT PGN Tbk (Anggaran Dasar dan *Board Manual*).

INTRODUCTORY PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2023

In 2023, an introductory program was provided to new members of the Board of Commissioners and Board of Directors, namely Amien Sunaryadi, Abdullah Aufa Fuad, Arief S. Handoko, Harry Budi Sidharta, Rosa Permata Sari, and Ratih Esti Prihantini. In implementing this program, PGN through the Corporate Secretary presented various matters related to the Company's performance, which included: Gas Subholding Business & Position, Gas Subholding Business Structure & Process, 2023 Key Performance Indicators, Gas Subholding RJPP Overview, Gas Subholding Strategic Program, Profile of Subsidiaries and Affiliates, as well as Updates to Internal Rules of PT PGN Tbk (Articles of Association and Board Manual).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk RUPS memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. PGN memiliki dan menerapkan kebijakan dan target yang diperhitungkan dalam menerapkan kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan dengan senantiasa patuh dan menjalankan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menekankan pada keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

The composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed by the GMS has diversity in terms of age, gender, educational background, and the experience needed to support the implementation of their duties and responsibilities. PGN has and implements policies and targets that are taken into account in implementing the diversity policy for the Board of Directors and Board of Commissioners. This is carried out by always complying with and carrying out requirements for the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by paying attention to the following regulations:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which emphasizes expertise, integrity, leadership, experience, good behavior, ability to carry out legal actions, and high dedication to advancing and developing the Company.

Nama Name	**Gender** Gender	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background			**Keterangan** Descriptions					
			S1	**S2**	**S3**	**Oil, & Gas** Oil & Gas	**Ekonomi** Economy	**Infrastruktur** Infrastructure	**Hukum** Law	**SDM** HR	**Sosial Politik** Politics and Social
Dewan Komisaris | Board of Commissioners											
Amien Sunaryadi[1)]	Pria Male	63	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Arcandra Tahar[2)]	Pria Male	54	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
Luky Alfirman	Pria Male	53	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Warih Sadono	Pria Male	60	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
Christian H. Siboro	Pria Male	55	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
Dini Shanti Purwono	Wanita Female	49	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
Abdullah Aufa Fuad[1)]	Pria Male	32	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Paiman Raharjo[2)]	Pria Male	57	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Direksi | Board of Directors											
Arief S. Handoko[3)]	Pria Male	56	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
M. Haryo Yunianto[4)]	Pria Male	53	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
Beni Syarif Hidayat	Pria Male	59	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-
Harry Budi Sidharta[3)]	Pria Male	46	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Pria Male	56	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Rosa Permata Sari[1)]	Wanita Female	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Heru Setiawan[4)]	Pria Male	59	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Ratih Esti Prihantini[1)]	Wanita Female	57	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Achmad Muchtasyar[2)]	Pria Male	50	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Faris Aziz[2)]	Pria Male	58	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-

Keterangan | Information:
1. Diangkat tanggal 14 November 2023 | Appointed on November 14, 2023
2. Diberhentikan tanggal 14 November 2023 | Dismissed on November 14, 2023
3. Diangkat tanggal 30 Mei 2023 | Appointed on May 30, 2023
4. Diberhentikan tanggal 30 Mei 2023 | Dismissed on May 30, 2023

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Affiliated Relationship Among Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Familiy Relationship			Hubungan Keuangan Financial Relationship			Kepemilikan Saham di PGN[5] Share Ownership in PGN
		Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
Dewan Komisaris | Board of Commissioners								
Amien Sunaryadi[1]	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Arcandra Tahar[2]	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Abdullah Aufa Fuad[1]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Paiman Raharjo[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Direksi | Board of Directors								
Arief S. Handoko[3]	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-
M. Haryo Yunianto[4]	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-
Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	-	-	-	-	-	-	-
Harry Budi Sidharta[3]	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	-	-	-	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	-	-	-	-	-	-	-
Rosa Permata Sari[1]	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	-	-	-	-	-
Heru Setiawan[4]	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	-	-	-	-	-
Ratih Esti Prihantini[1]	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	-	-	-	-	-	-	-
Achmad Muchtasyar[2]	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	-	-	-	-	-
Faris Aziz[2]	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales and Operations	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan | Information:
1. Diangkat tanggal 14 November 2023 | Appointed on November 14, 2023
2. Diberhentikan tanggal 14 November 2023 | Dismissed on November 14, 2023
3. Diangkat tanggal 30 Mei 2023 | Appointed on May 30, 2023
4. Diberhentikan tanggal 30 Mei 2023 | Dismissed on May 30, 2023
5. Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Keluarga | Share ownership by Board of Directors, Board of Commissioners, and Family Member

KOMITE-KOMITE
Committees

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Perseroan dalam mengawasi jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, dibantu oleh 3 (tiga) Komite. Hal ini selaras dengan Pasal 121 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 2 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi:
a. Komite Audit.
b. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.
c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Implementation of the duties of the Company's Board of Commissioners in supervising the management of the Company by the Board of Directors, is assisted by 3 (three) Committees. This is in line with Article 121 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, and Article 2 of OJK Regulation no. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee.

Committees under the Board of Commissioners include:

a. Audit Committee.
b. Risk Management and Business Development Monitoring Committee.
c. Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Periode 1 Januari – 14 November 2023

Period of January 1 - November 14, 2023

Ketua/Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Chairman/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Rini Yulius**	Member
Anggota	**Luki Karunia**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member

Periode 14 November – 29 November 2023

Period of November 14 - November 29, 2023

Anggota/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Member/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Rini Yulius**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Luki Karunia**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member

KOMITE-KOMITE
Committees

Periode 30 November 2023 – 31 Desember 2023		Period of November 30 - December 31, 2023
Ketua/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Chairperson/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Rini Yulius**	Member
Anggota	**Luki Karunia**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member

Profil Anggota Komite Audit / Profile of Audit Committee Members

Dini Shanti Purwono

Ketua Komite Audit | Chairperson of the Audit Committee
(30 November 2023 hingga saat ini) | (November 30, 2023, to present)
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(10 Mei 2021 hingga 30 November 2023) | (May 10, 2021, to November 30, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada 29 April 1974. Usia 49 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta	• Indonesian Citizen, born in Jakarta, on April 29, 1974. She is 49 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Master (LL.M) bidang Hukum Keuangan Internasional dari Harvard *Law School*.	• Education: Bachelor of Law from Universitas Indonesia and Master (LL.M) in International Finance Law from Harvard Law School
• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 3 Mei 2021, serta bergabung dengan Komite Audit sejak 10 Mei 2021.	• Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the 2021 Fiscal Year Annual GMS dated May 3, 2021, and joined the Audit Committee on May 10, 2021.
• Riwayat pekerjaan: sebagai Staf Khusus Presiden RI tahun 2019 sampai saat ini, Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) tahun 2019 sampai saat ini Partner Pendiri firma hukum Purwono & Widyayanti tahun 2018 sampai sekarang, Anggota Komite Investasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019-2021, Staf Khusus Menteri Keuangan 2013-1014, Partner di firma hukum Christian Teo & Partners tahun 2011-2018, Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2012-2013, Partner di firma hukum Roosdiono & Partners tahun 2008-2010, Kepala Divisi Hukum PT Danareksa (Persero) tahun 2005-2008 dan sebagai Senior Associate di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & *Partners* (kantor koresponden firma hukum internasional Baker & McKenzie) tahun 1997-2005.	• Work experiences: as Special Staff to the President of the Republic of Indonesia from 2019 to the present, Secretary of the Investment Acceleration Task Force (Presidential Working Team) from 2019 to the present, Founding Partner of the Purwono & Widyayanti Law Firm from 2018 to the present, Member of the Investment Committee of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) in 2019-2021, Special Staff to the Minister of Finance 2013-1014, Partner at the Law Firm Christian Teo & Partners in 2011-2018, Special Staff to the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) in 2012-2013, Partner at the Law Firm Roosdiono & Partners in 2008- 2010, Head of the Legal Division at PT Danareksa (Persero) in 2005-2008 and as Senior Associate at the Law Firm Hadiputranto, Hadinoto & Partners (correspondent office of the international law firm Baker & McKenzie) in 1997-2005.
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/DKOM/ 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kemudian diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/DKOM/ 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis of appointment as member of the Audit Committee Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/DKOM/ 2021 dated May 10, 2021, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Updated with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/DKOM/ 2023 dated November 30, 2023, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
• Sertifikasi yang dimiliki: Anggota Profesi Penunjang Pasar Modal, Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).	• Current certifications: Member of Capital Market Supporting Profession, Member of Association of Capital Market Legal Consultants, Member of PERADI (Indonesian Advocates Association).

Abdullah Aufa Fuad

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(November 30, 2023 - December 31, 2023) | (November 30, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, pada 5 April 1991. Usia 32 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta	• Indonesian Citizen, born in Kediri, on April 5, 1991. He is 32 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Fisika dari Universitas Airlangga; *Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquee*, France	• Education: Bachelor of Physics from Airlangga University; Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquee, France

• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 14 November 2023, serta menjadi Anggota Komite Audit sejak 30 November 2023.	• Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the 2023 Fiscal Book Annual GMS dated November 14, 2023, and has been a Member of the Audit Committee since November 30, 2023.
• Riwayat pekerjaan: Staf Khusus Presiden - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2019-2023; *President Director* - PT Kawal Sidang Indonesia tahun 2022; *Founder & Director* - *Speaktograph* Digital tahun 2019-2021; *Researcher* - *Commisariat de Lenergie Atomique* tahun 2018	• Work experiences: Special Staff to the President - Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia in 2019-2023; President Director - PT Kawal Sidang Indonesia in 2022; Founder & Director - Speaktograph Digital in 2019-2021; Researcher - Commissariat de Lenergie Atomique in 2018
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/DKOM/ 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis of appointment as member of the Audit Committee, Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/DKOM/ 2023 dated November 30, 2023, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Rini Yulius

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 5 Mei 1978. Usia 45 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian citizen, born in Jakarta on May 5, 1978. She is 45 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Akuntansi Universitas Indonesia dengan konsentrasi Sistem Informasi.	• Pendidikan: Bachelor's degree in accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia and Master's degree in Accounting from the University of Indonesia, majoring in Information System.
• Riwayat pekerjaan: pernah menjabat sebagai Komite Audit PT Pertamina Geothermal Energy dan Komite Investasi PT Pertamina Geothermal Energy. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada program Reguler, International Class dan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Senior Consultant pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.	• Work experience: served as the Audit Committee of PT Pertamina Geothermal Energy and the Investment Committee of PT Pertamina Geothermal Energy. Currently as a Permanent Lecturer in the Regular Program, International Class and Master of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia and Senior Consultant at the Management Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia.
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep- 09/D-KOM/2020 berlaku efektif tanggal 15 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-20/D-KOM/2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Rini Yulius Sebagai Anggota Komite Audit.	• Legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-09/D-KOM/2020 effective September 15, 2020, on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and Decree of the Board of Commissioners No. Kep-20/D-KOM/2023 on Extension of the Term of Service of Ms. Rini Yulius as Member of the Audit Committee.
• Sertifikasi yang dimiliki *Certification in Audit Committee Practices* (CACP), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP), *Chartered Accountant* (CA) dan *Certified Wealth Manager* (CWM).	• Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), Chartered Accountant (CA) dan Certified Wealth Manager (CWM).

Luki Karunia

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Demak pada 1 Juni 1971. Usia 52 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta	• Indonesian Citizen, born in Demak on June 1, 1071. He is 52 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia, *Master of Art in Finance*, University of Hiroshima, Jepang, dan Doktor *Development Planning*, IPB	• Education: Bachelor of Accounting Economics, University of Indonesia, Master of Art in Finance, University of Hiroshima, Japan, and Doctor of Development Planning, IPB
• Riwayat pekerjaan: pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PGN Tbk tahun 2018- 2020 dan sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara-STAN dan Dosen Program Pendidikan Vokasi UI. Saat ini sebagai Dosen Magister Administrasi *Public at* Poltek STIA – LAN.	• Work experience: served as a Member of the Audit Committee of PGN in 2018-2020 and as a Lecturer at the State Finance Polytechnic-STAN and a Lecturer at the UI Vocational Education Program. Currently as a Lecturer in the Masters of Public Administration at the STIA – LAN Polytechnic
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-02/D-KOM/2022 efektif berlaku tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• The legal basis of appointment as a member of the Audit Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2022 effective March 1, 2022, on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
• Sertifikasi yang dimiliki *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dan *Chartered Accountant* (CA), *Associate Wealth Planner* (AWP), *Register* Negara Akuntan (RNA) : RNA 12101	• Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP) dan Chartered Accountant (CA), Associate Wealth Planner (AWP), Register Negara Akuntan (RNA) : RNA 12101

KOMITE-KOMITE
Committees

Fajar Ariwinadi
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 16 Juli 1976. Usia 47 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta	• Indonesian Citizen, born in Jakarta, July 16, 1976. He is 47 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Universitas Indonesia	• Education: Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia and Master of Management, University of Indonesia
• Riwayat pekerjaan: Saat ini bekerja sebagai General Corporate Finance di Bomba Group. Pernah bekerja sebagai GM Finance PT Urban Jakarta Properindo Tbk, Asisten VP PT Semen Indonesia dan AVP Finance PT Pemalang Batang Toll Road	• Work experience: Currently serving as General Corporate Finance at Bomba Group. Previously worked as General Manager of Finance at PT Urban Jakarta Properindo Tbk, Assistant VP at PT Semen Indonesia, and AVP of Finance at PT Pemalang Batang Toll Road
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-06/D-KOM/2022 efektif berlaku tanggal 1 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis for his appointment as a member of the Audit Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2022 effective October 1, 2022, on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Paiman Raharjo
Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee
(1 Januari 2023 – 14 November 2023) | (January 1, 2023 - November 14, 2023)

• Warga Negara Indonesia. Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 15 Juni 1967. Usia 56 tahun tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta.	• Indonesian Citizen, born in Klaten, Central Java, June 15, 1967. He is 56 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Administrasi Publik tahun 1994, Magister Manajemen Keuangan tahun 1999 dan Magister Administrasi Publik tahun 2003, Doktor Administrasi Publik tahun 2012 Universitas Padjajaran dan dikukuhkan sebagai guru besar dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tahun 2016.	• Education: Bachelor's Degree in Public Administration in 1994, Master's Degree in Financial Management in 1999 and Master's Degree in Public Administration in 2003, Doctor of Public Administration from Padjajaran University in 2012 and inaugurated as a professor from Prof. Dr. Moestopo University (Religious) in 2016.
• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 April 2015 sebagai Komisaris Independen, sekaligus menjadi Ketua Komite Audit.	• Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS dated April 6, 2015, as Independent Commissioner, as well as the Chairman of the Audit Committee.
• Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Direktur Program Pascasarjana di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2015-2019, Komisaris BUMD DKI PT Food Station 2012-2015, Komisaris Utama di PT Prima Sejati Tahun 2008-2012.	• Work history: Currently serves as the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Year 2023, has served as Rector of Prof. Dr. Moestopo University (Religious). Director of Postgraduate Program at Prof. Dr. Moestopo University (Religious) 2015-2019, Commissioner of DKI ROE of PT Food Station 2012-2015, President Commissioner at PT Prima Sejati 2008-2012.
• Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-04/D-KOM/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Pengangkatan Komisaris Independen Saudara Paiman Raharjo sebagai Ketua Komite Audit dan Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris, diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/D-KOM/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-01/D-KOM/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris yang terakhir diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep- 05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• The legal basis of assignment as Chairman of the Audit Committee is the Decision of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-04/D-KOM/2015 dated April 17, 2015, concerning the Appointment of Independent Commissioner, Mr. Paiman Raharjo as Chairman of the Audit Committee and Decision of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 dated February 19, 2020, concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners, updated with Decision of the Board of Commissioners No. Kep-06/D-KOM/2020 dated July 20, 2020, concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners, updated with Decision of the Board of Commissioners No. Kep-01/D-KOM/2021 dated March 15, 2021, concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners, last updated with Decision of the Board of Commissioners No. Kep- 05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021, concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
• Sertifikasi yang dimiliki: Manajemen Sumber Daya Manusia (BNSP), ISO 9001 : 2015	• Certifications Human Resources Management (BNSP), ISO 9001: 2015

Independensi Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit terdiri dari satu orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan tiga orang anggota yang profesional dari luar Perseroan.

Susunan keanggotaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit telah menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan independen.

Independency of the Audit Committee

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. The Audit Committee consists of one member who is a member of the Board of Commissioners and three professional members from outside the Company.

The membership composition complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee, and in carrying out its duties, the Audit Committee has implemented the principles of professionalism and independence.

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Rini Yulius	Luki Karunia	Fajar Ariwinadi	Paiman Raharjo
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/controlling shareholders or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect business/professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Maret 2004 dan telah diperbarui pada 22 Desember 2022.

Audit Committee Charter

In caarying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter, which was stipulated for the first time on March 30, 2004 and has been updated on December 22, 2022.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris serta dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Hal ini selaras dengan POJK No. 55/POJK.04/2015. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Period and Term of Office

The term of office of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners, and reelection is allowed only for the following 1 (one) period. This is in line with POJK No. 55/POJK.04/2015. The term of office of Committee members who are appointed within the Board of Commissioners' term will end simultaneously with the completion of the respective Board of Commissioners' term.

KOMITE-KOMITE
Committees

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit PGN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 002/11/KOM-1/2004 tanggal 30 Maret 2004 yang dimutakhirkan pada 22 Desember 2022 adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan antara lain pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
   a. Mengkaji hasil pemeriksaan oleh auditor eksternal.
   b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
   c. Memastikan dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
7. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
8. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Duties and Responsibilities of the Audit Committee as stated in the PGN Audit Committee Charter stipulated in the Decree of the President Commissioner of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 002/11/KOM-1/2004 dated March 30, 2004 which was updated on December 22, 2022 is to provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, including:

1. Reviewing the financial information to be issued by the company such as financial statements, projections, and the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, management reports and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing the company's compliance with laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's activities.
3. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant for the services provided.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based on independence, scope of assignment, and compensation for services.
5. Conducting a review of the results of the implementation of the audit by the external auditor.
   a. Reviewing the audit results by external auditors.
   b. Evaluating the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by Public Accounting Firms;
   c. Ensuring and reviewing the effectiveness of the follow-up implementation of audit results.
6. Reviewing the implementation of audits by the internal auditors and overseeing the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.
7. Providing recommendations for improving the management control system and its implementation.
8. Coordinating with the Risk Management and Business Development Monitoring Committee if there are indications/potential risks faced by the Company.

9. Berkoordinasi dengan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG terkait dengan Tata Kelola Perusahaan.
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
11. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan.
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
14. Menyusun Program Kerja Tahunan.
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Komite Audit Perseroan juga memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap transaksi afiliasi yang material dan menyatakan bahwa transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dalam hal Auditor Eksternal, Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal, serta memberikan rekomendasi atas pemberhentian auditor eksternal.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki kewenangan tertentu dalam mendukung fungsi dan tugas yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan Perwira Subholding Gas, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

9. Coordinating with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee related to Corporate Governance.
10. Examining complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
11. Ensuring a satisfactory review procedure for the financial information issued by the Company.
12. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.
13. Maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.
14. Developing an Annual Work Program.
15. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Furthermore, the Company's Audit Committee is responsible for reviewing material affiliate transactions and certifying that they are in the best interests of the company and its shareholders. The Audit Committee is also responsible for overseeing the activities of external auditors, monitoring and evaluating the implementation of providing audit services for annual historical financial information, and providing recommendations for the dismissal of the external auditor.

Authority of the Audit Committee

The Audit Committee has certain authority to support the functions and duties determined by the Board of Commissioners, namely:

1. Full, free, and unlimited access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets and other company resources related to their duties.
2. Communicate directly with Gas Subholding Employees, including the Directors and parties carrying out the internal audit function, risk management, and accountants, related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involve independent parties outside the Audit Committee as needed to assist in carrying out its duties (if required).
4. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

KOMITE-KOMITE
Committees

Program Pelatihan Anggota Komite Audit Non Komisaris

Training Programs for Non-Commissioner Audit Committee Members

Pelatihan Komite Audit
Audit Committee Training

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Rini Yulius	27 Juni 2023 June 27, 2023	Webinar	Pelatihan GRC *Series*, GRC Series Training
	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management* Hands on Training Risk Management
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pre IPO & *Post* IPO GRC Series, Pre IPO & Post IPO
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pemeringkatan Efek Bersifat Utang GRC Series, Debt Securities Rating
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	Seminar Ikatan Akuntan Indonesia Nasional 2023 2023 Institute of Indonesia Chartered Accountants National Seminar
	19 – 22 Desember December 19 – 22	Bali	Inhouse Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 Inhouse Risk Management Based on PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018
Luki Karunia	27 Juni 2023 June 27, 2023	Webinar	Pelatihan GRC *Series* GRC Series Training
	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management* Hands on Training Risk Management
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pre IPO & *Post* IPO GRC Series, Pre IPO & Post IPO
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pemeringkatan Efek Bersifat Utang GRC Series, Debt Securities Rating
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	Seminar Ikatan Akuntan Indonesia Nasional 2023 2023 Institute of Indonesia Chartered Accountants National Seminar
Fajar Ariwinadi	27 Juni 2023 June 27, 2023	Webinar	Pelatihan GRC *Series* GRC Series Training
	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management* Hands on Training Risk Management
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pre IPO & *Post* IPO GRC Series, Pre IPO & Post IPO
	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Webinar	GRC *Series*, Pemeringkatan Efek Bersifat Utang GRC Series, Debt Securities Rating
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	Seminar Ikatan Akuntan Indonesia Nasional 2023 2023 Institute of Indonesia Chartered Accountants National Seminar

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi dalam proses Pengadaan Jasa Audit Independen/Eksternal (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penetapan Prosedur Yang Keuangan Pendanaan UMK terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penetapan Prosedur

Implementation of Audit Committee Activities

Throughout 2023, the Audit Committee has carried out various activities as follows:

1. Conducting discussions and providing recommendations in the Procurement of Independent/ External Audit Services to audit the Consolidated Financial Statements, Compliance with the PSA 62, Social and Environmental Responsibility Report and Determination of Funding Procedures for Micro and Small Businesses related to Social and Environmental Responsibility Programs, and

Yang Disepakati Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun 2023.

2. Melakukan pembahasan dengan Internal Audit Division dan menelaah hasil audit internal dan implementasi pengendalian internal yang disajikan antara lain dalam Laporan Triwulanan Internal Audit Division dan Laporan Hasil Audit Khusus.
3. Menelaah Piagam Internal Audit dan memberikan masukan dalam bentuk *Management Concern* terkait Program Kerja Audit (PKAT) Tahun 2024.
4. Melakukan pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik serta menelaah progress dan hasil audit Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2022 dan Laporan PSA 62 serta menelaah Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK PT PGN Tbk (*Audited*).
5. Melakukan pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik serta menelaah progress dan hasil review Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023.
6. Menelaah Laporan Keuangan Tidak Diaudit Triwulan I dan Triwulan 3.
7. Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi dalam proses Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2023
8. Menelaah rencana Perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023 Revisi, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024 dan *Prelimenary* RJPP Periode 2022-2027.
9. Menelaah pencapaian *Key Performance Indicator* Korporat Subholding Gas Tahun 2023.
10. Menelaah Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022.
11. Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris antara lain terkait Surat Pengaduan Perwakilan Pengurus Perseroan Tahun 2018 – 2019, Usulan Rencana Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi PT Saka Energi Indonesia ("SAKA") Tahun 2023 Melalui Mekanisme *Cash Tender Offer*, Kepuasan Pelanggan, Kebijakan Mutu dan Sistem Pengadaan dan Rapat Koordinasi Komite Audit Holding-Subholding.
12. Melakukan Kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Operasional Jawa Tengah, Cibinong, Lhokseumawe dan Medan.

Application of Agreed Upon Procedures for Report on the Performance Evaluation Results of Corporate KPI for 2023.

2. Conducting discussions with the Internal Audit Division as well as reviewing the results of internal audits and implementation of internal control which are presented, among others, in the Internal Audit Division Quarterly Report and Special Audit Results Report.
3. Reviewing the Internal Audit Charter and providing input in the form of Management Concern regarding the 2024 Audit Work Program (PKAT).
4. Discussed with the Public Accounting Firm and reviewed the progress and results of the audit of the Financial Statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Year 2022 and PSA 62 Report and reviewed the Financial Statements of the MSE Funding Program of PT PGN Tbk (Audited).
5. Discussed with the Public Accounting Firm and reviewed the progress and results of the review of the Financial Statements for Semester I of 2023.
6. Reviewed the Unaudited Financial Statements for Quarter 1 and Quarter 3.
7. Conducting discussions and providing recommendations in the process of Procurement of Rating Company Services for the Assessment of Corporate Soundness Levels for the 2023 Fiscal Year
8. Reviewing the Company's plans in the Revised 2023 Company Work Plan and Budget, 2024 Company Work Plan and Budget and Preliminary RJPP for the 2022-2027 Period.
9. Reviewing the achievements of the Corporate Gas Subholding Key Performance Indicator in 2023.
10. Reviewing the Monitoring Results of Follow-up Recommendations for BPK Audit Results for Semester I of 2022.
11. Carrying out special assignments from the Board of Commissioners, including related to the 2018 - 2019 Company Management Representative Complaint Letter, Proposed Implementation Plan for the Buyback of PT Saka Energi Indonesia ("SAKA") Bonds in 2023 through the Cash Tender Offer Mechanism, Customer Satisfaction, Quality Policy, and Procurement System and Holding-Subholding Audit Committee Coordination Meeting.
12. Conducting work visits to the Central Java, Cibinong, Lhokseumawe and Medan Operational Work Areas.

KOMITE-KOMITE
Committees

Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit dinyatakan bahwa Komite Audit wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan sebanyak 46 (empat puluh enam) kali pertemuan dalam rangka menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris dan menjalankan tugas-tugas Komite dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Audit Committee Meetings

Based on the Audit Committee Charter, it is stated that the Audit Committee is required to hold meetings at least once every 1 (one) month. During 2023, the Audit Committee held 46 (forty-six) meetings in order to follow up on the disposition of the Board of Commissioners and carry out the Committee's duties with the following attendance levels:

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Dini S Purwono	Ketua Chairperson	46	46	100%
Abdullah Aufa Fuad	Anggota Member	2	2	100%
Rini Yulius	Anggota Member	46	46	100%
Luki Karunia	Anggota Member	46	46	100%
Fajar Ariwinadi	Anggota Member	46	46	100%
Paiman Raharjo	Ketua Chairman	41	41	100%

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG

NOMINATION, REMUNERATION, AND GCG COMMITTEE

Komposisi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Membership Composition of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Periode 1 Januari – 20 September 2023 | **Period of January 1 - September 20, 2023**

Ketua/Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Chairman/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Utama	**Arcandra Tahar**	Member/President Commissioner
Anggota	**Vera Adjas**	Member
Anggota	**Pradono Wicaksono**	Member
Anggota	**Simon L. Himawan**	Member

Periode 20 September – 31 Desember 2023 | **Period of September 20 - December 31, 2023**

Ketua/Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Chairman/Independent Commissioner
Anggota	**Vera Adjas**	Member
Anggota	**Pradono Wicaksono**	Member
Anggota	**Simon L. Himawan**	Member

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Profile of Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Christian H. Siboro

Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Chairman of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, 3 Desember 1968. Usia 55 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Pontianak, on December 3, 1968. He is 55 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jabodetabek.
• Pendidikan: Sarjana bidang Geofisika & Meteorologi Institut Teknologi Bandung tahun 1993, Magister Manajemen bidang Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM tahun 1995 dan Doctor of Business Administration (DBA), HR *Management*, dari Paris School of Business tahun 2022.	• Education: Bachelor of Geophysics and Meteorology from Bandung of Institute Technology in 1993, Master of Management in International Management from PPM School of Management in 1995, and Doctor of Business Administration (DBA), HR Management, from Paris School of Business in 2022.
• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2019	• Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 30, 2019
• Riwayat pekerjaan: sebagai Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara sampai sekarang.	• Work experience: as Special Staff to the Head of the National Intelligence Agency until now.
• Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-11/DKOM/ 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris yang sudah diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan diperbarui kembali dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/D-KOM/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021. Kemudian terakhir diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.23/D-KOM/2023 tanggal 30 November 2023.	• The legal basis for assignment as Chairman of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-11/DKOM/ 2019 dated September 16, 2019, on the Division of Duties of the Board of Commissioners, which has been updated through the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 dated February 19, 2020, on the Division of Duties of the Board of Commissioners and updated with Decree of the Board of Commissioners No. Kep-06/D-KOM/2020 dated July 20, 2020, on the Division of Duties of the Board of Commissioners and updated by the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021. Then, the latest updated through the Decree of the Board of Commissioners No.23/D-KOM/2023 dated November 30, 2023.

Arcandra Tahar

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee
(1 Januari 2023 – 20 September 2023) | (January 1, 2023 - September 20, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, 10 Oktober 1970. Usia 53 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta.	• Indonesian Citizen, born in Padang, October 10, 1970. He is 53 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, Master of Science dari Texas A&M University dan Ph.D. dari Texas A&M University.	• Education: Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1994, Master of Science from Texas A&M University in 1998, and Ph.D. from Texas A&M University in 2001
• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020.	• Appointed for the first time as President Commissioner based on the Resolution of the 2020 Extraordinary GMS on January 21, 2020.
• Riwayat pekerjaan: sebagai Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia tahun 2016 – 2019.pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2016-2019), Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) (2016-2019), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Juli 2016-Agustus 2016) dan President Petroneering LLC, Houston – Texas (2013-2016)	• Work experience: Vice Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia in 2016 – 2019, Vice President Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2016-2019), Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (July 2016 – August 2016), and President of Petroneering LLC, Houston – Texas (2013-2016)
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan diperbaharui No. Kep-06/D-KOM/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021.	• The legal basis of appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 dated February 19, 2020, on Division of Duties of the Board of Commissioners and updated by No. Kep-06/D-KOM/2020 dated July 20, 2020, on the Division of Duties of the Board of Commissioners and most recently updated by Board of Commissioners Decree No. Kep-05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021.

KOMITE-KOMITE
Committees

Vera Adjas
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 24 Mei 1963. Usia 60 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta.	• Indonesian Citizen, born in Bandung, May 24, 1963. She is 60 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta.
• Pendidikan: Diploma Psikologi Organisasi di Western Australia Institute of Technology dan Sarjana Ilmu Psikologi di Western Australia Institute of Technology.	• Education: Diploma in Organizational Psychology at the Western Australia Institute of Technology and Bachelor of Psychological Science at the Western Australia Institute of Technology.
• Riwayat pekerjaan: Independent HR Advisor 2019 – 2022, PT REA Kaltim Plantations – HR Director 2022 sampai dengan sekarang.	• Work experience: Independent HR Advisor (2019-2022), PT REA Kaltim Plantations – HR Director (2022 until now).
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 tanggal 15 April 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023.	• Legal basis of appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 dated April 15, 2020, on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 dated April 15, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023.
• Sertifikasi yang dimiliki Certified Governance Professional (CGP) 30 September 2021 – 29 September 2024.	• Certification: Certified Governance Professional (CGP) September 30, 2021 – September 29, 2024.

Pradono Wicaksono
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Februari 1983. Usia 40 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jakarta.	• Indonesian Citizen, born in Jakarta, February 12, 1983. He is 40 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Psikologi di Persada Indonesia University, dan Master of Management di PPM School of Management, Jakarta.	• Education: Bachelor of Psychology at Persada Indonesia University, and Master of Management at PPM School of Management, Jakarta.
• Riwayat Pekerjaan: Sr. Partner pada Qunie Corporation Japan sampai dengan sekarang.	• Work Experience: Sr. Partner at Qunie Corporation Japan until now.
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 tanggal 15 April 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023.	• Legal basis for appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 dated April 15, 2020, on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 dated April 15, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023.
• Sertifikasi yang dimiliki Certified Governance Professional (CGP) 30 September 2021 – 29 September 2024.	• Certification: Certified Governance Professional (CGP) September 30, 2021 – September 29, 2024.

Simon L. Himawan
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 - December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, 14 Oktober 1956. Usia 67 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Jombang, October 14, 1965. He is 67 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta.
• Pendidikan: Sarjana Teknik di Universitas Gajah Mada dan Master International Relation (Economics) di International University Of Japan, Japan.	• Education: Bachelor's degree in Engineering at Gajah Mada University and Master's degree in International Relation (Economics) at International University of Japan, Japan
• Riwayat Pekerjaan: Kepala Unit Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) Kementerian ESDM sampai dengan sekarang.	• Work Experience: Head of the Infrastructure Development Control and Acceleration Unit (UP3I) of the Ministry of Energy and Mineral Resources until now.
• Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2021 tanggal 1 Mei 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023.	• Legal basis for the appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2020 dated April 30, 2020 on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2021 dated May 1, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023.
• Sertifikasi yang dimiliki Certified Governance Professional (CGP) 30 September 2021 – 29 September 2024	• Certification: Certified Governance Professional (CGP_ September 30, 2021 – September 29, 2024

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diketuai Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan 3 (tiga) orang profesional/independen dari luar Perseroan. Dengan demikian, PGN memastikan bahwa keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagian besar (lebih dari 50%) adalah memiliki independensi, yang disertai dengan adanya anggota eksternal yang memenuhi kriteria independen.

Susunan keanggotaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pernyataan mengenai independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat terlihat melalui tabel berikut:

Independency of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee is chaired by an Independent Commissioner, 1 (one) member who is a member of the Board of Commissioners and 3 (three) professional/ independent people from outside the Company. For this reason, PGN ensures that the majority of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee membership (more than 50%) is independent, accompanied by external members who meet independent criteria.

The composition of themembership has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party whatsoever that is not in accordance with the Laws and Regulations. The statement regarding the independence of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee can be viewed in the following table:

No	Pernyataan Independensi Independency Statement	Christian H. Siboro	Arcandra Tahar	Vera Adjas	Pradono Wicaksono	Simon L. Himawan
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓

KOMITE-KOMITE
Committees

No	Pernyataan Independensi Independency Statement	Christian H. Siboro	Arcandra Tahar	Vera Adjas	Pradono Wicaksono	Simon L. Himawan
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/ pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/controlling shareholders, or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect working/ professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berpedoman pada Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN yang ditetapkan pertama kali pada 1 Juni 2018. Kemudian, Piagam ini diperbarui serta ditetapkan kembali pada tanggal 22 Desember 2022 tentang tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Masa Jabatan

Selaras dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris serta dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka,Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan

Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refers to the PGN Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, which was first stipulated on June 1, 2018. Moreover, this Charter was updated and re-stipulated on December 22, 2022, on the duties and responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Term of Office

In line with POJK No. 34/POJK.04/2014, the term of office of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee cannot be longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be re-elected. The term of office of Committee members appointed during the term of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the term of office of the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The implementation of the duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines, OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public Company Governance, OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies, and referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03 /2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance

Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memiliki tugas untuk memberikan tanggapan, rekomendasi, dan saran kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. Fungsi Nominasi
   - Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
   - Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
   - Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
   - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan;
   - Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
   - Khusus untuk usulan persetujuan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Anak Perusahaan, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan surat dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
   - Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi terkait;
   - Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Based on the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee has the task of providing responses, recommendations and suggestions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, including:

a. Nomination Function
   - Conduct regular reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation;
   - Evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;
   - Validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talents), to generate a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (Nominated Talents);
   - Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS according to the request of the Series A Dwiwarna Shareholder of the Company;
   - Evaluate and recommend candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries to be submitted to the Board of Commissioners;
   - Specifically for the proposed approval of the appointment of the President Director and President Commissioner of Subsidiaries, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee provides recommendations to the Board of Commissioners as material for a letter from the Board of Commissioners to the Series A Dwiwarna Shareholders;
   - Evaluate the proposed Individual Key Performance Indicators for relevant members of the Board of Directors;
   - Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

KOMITE-KOMITE
Committees

- Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan atas usulan pengangkatan Kepala Internal Audit Division dan Sekretaris Perusahaan;
- Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk masukan atas usulan pengangkatan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perseroan;
- Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi dan masukan Kebijakan serta Program Pengembangan SDM sebagai penyiapan *Talent Pool* di Perseroan; dan
- Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
- Melakukan proses identifikasi atas kualitas kandidat calon anggota Direksi yang sesuai dengan arahan strategis Perusahaan.

b. Fungsi Remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Remunerasi Pengurus Perseroan yang terdiri dari:
  a. Struktur Remunerasi;
  b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  c. Besaran atas Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan *self-assessment* dan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan tentang sistem Remunerasi untuk Pekerja Perseroan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, Pekerja Sekretariat Dewan Komisaris, dan Anggota Komite Dewan Komisaris dari luar Perusahaan; dan
- Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pekerja yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.

- Provide recommendations to the Board of Commissioners for approval of the proposed appointment of the Internal Audit Division Head and the Corporate Secretary;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners for input on the proposed appointment of Officials one level below the Board of Directors of the Company;
- Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the evaluation and input of policies as well as HR Development Programs as preparation for the Talent Pool in the Company; and
- Evaluate the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
- Carry out the identification process of the quality of prospective candidates for members of the Board of Directors who are in accordance with the Company's strategic direction.

b. Remuneration Function
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the Company's Management Remuneration, which consists of:
  a. Remuneration Structure;
  b. Policy on Remuneration; and
  c. Amount of Remuneration.
- Assist the Board of Commissioners in conducting self-assessment and performance assessment according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input on the Remuneration system for the Company's Employees;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the proposed salary for the Secretary to the Board of Commissioners, Secretariat Employees of the Board of Commissioners, and Committee Members of the Board of Commissioners from outside the Company; and
- Evaluate remuneration policies for employees that require approval/response from the Board of Commissioners.

c. Fungsi *GCG*
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memantau dan memastikan bahwa *GCG* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan terhadap:
     a. Kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan;
     b. Perilaku etika (*Code of Conduct*);
     c. *Whistleblowing System*;
     d. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
     e. Keterbukaan Informasi ;
     f. Kerahasiaan Informasi; dan
     g. Hal lain yang terkait dengan penerapan GCG.
   - Membantu Dewan Komisaris dalam mengkoordinasikan proses pemilihan asesor GCG oleh Direksi dan proses penilaian penerapan GCG dengan Pihak Penilai (Asesor) agar hasil penilaian sesuai dengan kondisi penerapan GCG di Dewan Komisaris;
   - Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan perbaikan penerapan GCG berdasarkan hasil pengawasan dan *Assessment*.

d. Fungsi HSSE
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan Human Capital.

e. Fungsi Teknologi Informasi
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan Teknologi Informasi dari sisi pengelolaan tata kelola dan *Human Capital*.

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG selaras dengan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN, adalah:

a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
b. Berkomunikasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan SDM, GCG, HSSE dan Teknologi Informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite NRGCG, sesuai tata kelola.

c. GCG Function
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners in order to monitor and ensure that GCG has been implemented effectively and sustainably towards:
     a. Policies and management of the Company;
     b. Code of Conduct;
     c. Whistleblowing System;
     d. Conflict of Interest;
     e. Transparency of Information;
     f. Confidentiality of Information; and
     g. Other matters related to GCG implementation.
   - Assist the Board of Commissioners in coordinating the process of selecting GCG assessors by the Board of Directors and the process of evaluating the implementation of GCG with the Assessors to ensure that the assessment results are in accordance with the conditions of GCG implementation by the Board of Commissioners;
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input for improving GCG implementation based on the supervision and Assessment results.

d. HSSE Function
   Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice related to HSSE Operations and Implementation from the perspective of governance and Human Capital management.

e. Information Technology Function
   Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice regarding the Operations and Application of Information Technology from the perspective of governance and Human Capital management.

Authority of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The authority of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is in line with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, namely:

a. Have full, free, and unrestricted access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other company resources related to their duties.
b. Communicate directly with each party that carries out the HR, GCG, HSSE, and Information Technology management functions related to the duties and responsibilities of the GCG Nomination and Remuneration Committee, in accordance with governance

KOMITE-KOMITE
Committees

c. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. If deemed necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Committee may use independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in the implementation of its duties by using the company's budget.
d. Perform other authority given by the BOC.

Program Pelatihan Anggota Komite Non Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengikuti program pelatihan, *workshop*, konferensi ataupun seminar terkait dengan bidang Nominasi, Remunerasi dan GCG antara lain sebagai berikut.

Training Program for Non-Commissioner Committee Members

Throughout 2023, Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee took part in training programs, workshops, conferences or seminars related to the field of Nomination, Remuneration, and GCG including the following.

Pelatihan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Training for the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Vera Adjas	19 – 20 Juni 2023 June 19 – 20, 2023	Bali	*Indonesia HR Summit ke – 13 (IHRS)* 13th Indonesian HR Summit (IHRS)
	13 – 14 Desember 2023 December 13 – 14, 2023	Jakarta	*The 18th Indonesian HR Expo Conference & Exhibition*
Simon L. Himawan	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
	19 – 20 Juni 2023 June 19 – 20, 2023	Bali	*Indonesia HR Summit ke – 13 (IHRS)* 13th Indonesian HR Summit (IHRS)
	14 September 2023 September 14, 2023	Jakarta	*HR Green Forum*
	13 – 14 Desember 2023 December 13 – 14, 2023	Jakarta	*The 18th Indonesian HR Expo Conference & Exhibition*
Pradono Wicaksono	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
	19 – 20 Juni 2023 June 19 – 20, 2023	Bali	*Indonesia HR Summit ke – 13 (IHRS)* 13th Indonesian HR Summit (IHRS)
	14 September 2023 September 14, 2023	Jakarta	*HR Green Forum*
	13 – 14 Desember 2023 December 13 – 14, 2023	Jakarta	*The 18th Indonesian HR Expo Conference & Exhibition*

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Selama tahun 2023, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Implementation of Duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

During 2023, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee has carried out the following duties and responsibilities:

1. Melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara internal dan merekomendasikan usulan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan kepada Pemegang Saham Dwi Warna Seri A;
2. Melakukan evaluasi terhadap Usulan Direksi mengenai pengangkatan Pengurus Anak Perusahaan dan memberikan rekomendasi atas calon-calon tersebut kepada Dewan Komisaris, dan khusus bagi Direktur Utama/Komisaris Utama selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
3. Memberikan masukan terhadap revisi *Board Manual* sesuai dengan rekomendasi dari Assessor GCG serta kesepakatan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan lain yang perlu diatur dalam Board Manual.
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Direktorat dan Penunjang Bisnis untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Pelaksanaan Program Kerja Triwulanan terkait pengelolaan sumber daya manusia, desain & budaya organisasi termasuk pengembangan digitalisasi dan sistem informasi.
5. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi LCGCG dan Internal Audit untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Implementasi Program GCG & ESG Perusahaan, termasuk melakukan evaluasi Sistem *Whistle Blowing System* (WBS), Keterbukaan Informasi dan penerapannya di Perusahaan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi HSSE untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan Human Capital.
7. Melakukan koordinasi dan memberikan masukan dalam proses Self-Assessment GCG Tahun 2023.
8. Melakukan evaluasi atas calon anggota Komite Penunjang dan evaluasi atas remunerasi anggota Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris, sebagai masukan bagi Dewan Komisaris
9. Menelaah dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
    a. Program kerja Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis serta Program Kerja Terkait GCG di tahun 2023 dan rencana 2024 dalam mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan Periode 2021-2026 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2024.

1. Conduct a remuneration study for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, recommending remuneration proposals for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners, which will then be used as a basis for submitting proposals to DwiWarna Series A shareholders.
2. Evaluating the Board of Directors' proposals regarding the appointment of Subsidiary Management and providing recommendations on these candidates to the Board of Commissioners, and specifically for the President Director/ President Commissioner, to be used as a basis for submitting proposals from the Board of Commissioners to the President Director of PT Pertamina (Persero).
3. Providing input on revisions to the Board Manual in accordance with recommendations from the GCG Assessor as well as agreements between the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding other activities that need to be regulated in the Board Manual.
4. Conducting regular meetings with the Directorate and Business Support to review and provide feedback regarding the Quarterly Work Program Report and Implementation related to human resource management, organizational design & culture, including the development of digitalization and information systems.
5. Conducting regular meetings with the LCGCG and Internal Audit Divisions to review and provide feedback regarding the Report and Implementation of the Company's GCG & ESG Program, including evaluating the Whistle Blowing System (WBS), Information Disclosure and its application in the Company.
6. Conducting regular meetings with the HSSE Division to review and provide feedback regarding HSSE Operations and Implementation in terms of governance and Human Capital management.
7. Coordinating and providing input in the 2023 GCG Self-Assessment process.
8. Evaluating prospective members of Supporting Committees and evaluating the remuneration of members of the Board of Commissioners Committees and the Secretary of the Board of Commissioners, as input for the Board of Commissioners
9. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners in connection with:
    a. Work Program of the Directorate of Human Resources and Corporate Service and Work Program related to GCG in 2023 and 2024 Plans in supporting the Company's Long-Term Plan for the 2021-2026 Period and the Company's Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2024.

KOMITE-KOMITE
Committees

b. Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan, khususnya terkait Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
c. Restrukturisasi Organisasi Perusahaan.
d. Pelaksanaan *self-assessment* GCG tahun 2023.
e. Perubahan Piagam Komite Dewan Komisaris.

f. Rencana pengalihan LNG portofolio.
g. Rencana Investasi.
h. Keterlambatan Keterbukaan Informasi ke OJK.
i. Proyek Strategis dan *Unlock Value*.
j. Dampak Implementasi *Legal End State* Holding-Subholding.
k. Penilaian kinerja Dekom, Direksi dan Komite Dekom tahun 2022.

l. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.
m. Persetujuan Pinjaman Komersial untuk Mendukung Pendanaan Program LM PGN Tahap 2.
n. Kontrak Manajemen, KPI Korporat & Individual Direksi Tahun 2023.
o. *Corporate Charter* Pertamina Group.
p. Perubahan Kebijakan sesuai cakupan kerja Komite NRGCG.
q. Kontrak LNG
r. Penyampaian Laporan Transaksi Afiliasi (yang dikecualikan).
s. Penyusunan RKAP Tahun 2024.

t. Komposisi & Kualifikasi Organ Pengelola Risiko.

u. Persetujuan AFA (Pinjaman SHL).
v. *Prelimenary Draft* RJPP.

11. Kunjungan Kerja ke wilayah operasional di Jawa Timur, Medan, Semarang, Surabaya.

b. Monthly and Quarterly Management Reports, especially related to Human Resources and Organizations.
c. Restructuring of the Company's Organization.
d. Implementation of GCG self-assessment in 2023.
e. Changes to the Charter of Committees of the Board of Commissioners.
f. LNG Portfolio transfer plan.
g. Investment Plan.
h. Delay in Information Disclosure to OJK.
i. Strategic Projects and Unlock Value.
j. Impact of Implementing Legal End State Holding-Subholding.
k. Performance assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees of the Board of Directors in 2022.
l. Implementation of the Company's 2022 Annual GMS.
m. Approval of Commercial Loans to Support the Funding for Phase 2 of the PGN LM Program.

n. Management Contract, Corporate & Individual KPI of the Board of Directors in 2023.
o. Corporate Charter of the Pertamina Group.
p. Policy changes according to the scope of work of the NRGCG Committee.
q. LNG Contract
r. Submission of Affiliate Transaction Reports (excluded).
s. Preparation of 2024 Company Work Plan and Budget.
t. Composition & Qualification of Risk Management Organs.
u. AFA Approval (SHL Loan).
v. Preliminary Draft of the RJPP.

11. Working Visits to operational areas in East Java, Medan, Semarang, Surabaya.

Frekuensi Pertemuan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Berdasarkan Piagam yang dimiliki, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2023, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengadakan 19 (sembilan belas) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Based on its Charter, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is required to hold meetings at least once every 1 (one) month. During 2023, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee held 19 (nineteen) meetings with the following attendance rate:

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination, Remuneration, and GCG Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Christian H. Siboro	Ketua Chairman	19	19	100%
Arcandra Tahar	Anggota Member	15	15	100%
Vera Adjas	Anggota Member	19	19	100%
Pradono Wicaksono	Anggota Member	19	19	100%
Simon L. Himawan	Anggota Member	19	19	100%

Kebijakan Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

Selaras dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana RUPS tersebut harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Pengangkatan anggota Direksi Perseroan oleh RUPS diambil dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

PGN menerapkan kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan Good Corporate Governance serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, yaitu antara lain jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau sebab lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian termaksud diambil

Board of Directors and Board of Commissioners Succession Policy

In line with what is stated in the Articles of Association, members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS), where the GMS must be attended and the decisions must be approved by the Series A Dwiwarna shareholders.

The appointment of members of the Company's Board of Directors by the GMS is taken from candidates submitted by Series A Dwiwarna shareholders.

PGN implements a Board of Directors succession policy referring to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. One of the duties of the Remuneration and Nomination Committee is to develop a nomination system for members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors, which will become part of the Good Corporate Governance Policy and serve as a guideline for the Board of Commissioners and the GMS in determining the remuneration and nomination of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

The GMS can dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners who no longer meet the requirements as members of the Board of Directors, namely if the person concerned commits an act that is detrimental to the Company or other grounds deemed appropriate by the GMS. The said dismissal decision is

KOMITE-KOMITE
Committees

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, yang ditindaklanjuti penyelenggaraan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya pengunduran diri tersebut.

taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself/herself, unless the person concerned has no objection to the dismissal.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners have the right to resign from their positions by notifying the Company, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors in writing, which is followed up by holding a GMS within 60 (sixty) days upon receipt of the letter of resignation. Members of the Board of Directors who resign are still held accountable since their appointment until the resignation is approved.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko serta rencana dan pengembangan usahanya.

RISK MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT MONITORING COMMITTEE

In line with Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises,

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee was established with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out regular monitoring and providing recommendations on Risk Management policies and implementation as well as the business plans and development.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Membership Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Periode 1 Januari – 31 Januari 2023 / **Period of January 1 – January 31, 2023**

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Bayu Satria Pratama**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member

Periode 1 Februari – 28 Februari 2023 / **Period of February 1 – February 28, 2023**

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member

Periode 1 Maret – 30 September 2023		Period of March 1 – September 30, 2023
Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Oktofriawan Hargiardana**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member

Periode 1 Oktober – 31 Desember 2023		Period of October 1 – December 31, 2023
Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member

Profil Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Profile of Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Warih Sadono

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 – December 31, 2023)

- Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, 1 Maret 1963. Usia 60 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.
- Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1987), Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung (2005), serta Doktor di Universitas Airlangga Surabaya (2018).
- Riwayat pekerjaan: saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN, Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN (2020-sekarang), pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019), Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI (2017-2019), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2016-2017), Deputi Penindakan KPK (2012-2015).
- Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris.

- Indonesian Citizen, born in Tegal, March 1, 1963. He is 60 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta.
- Education: Bachelor of Laws from Atma Jaya University Yogyakarta (1987), Master of Laws at Padjajaran University Bandung (2005), and Doctorate at Airlangga University Surabaya (2018).
- Work experience: currently serving as Expert in the Litigation Division of the Ministry of SOEs, Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOE (2020-present), he served as the Head of DKI Jakarta's Provincial Attorney Services (2019), Director of Investigation at the Attorney General Office (2017-2019), Head of West Kalimantan's Provincial Attorney Services (2016-2017), Deputy for Enforcement at the Corruption Eradication Commission (KPK) (2012-2015).
- Legal basis of appointment as Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021, on Division of Duties of the Board of Commissioners.

Luky Alfirman

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 – December 31, 2023)

- Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 27 Maret 1970. Usia 53 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.
- Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1994), Master Ekonomi di University of Colorado, USA (2000), dan PhD Ekonomi di University of Colorado, USA (2004).
- Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan RI dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan RI hingga November 2022 dan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan hingga November 2017.
- Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-01/D-KOM/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

- Indonesian Citizen, born in Bandung on March 27, 1970. He is 53 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta.
- Education: Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994), Master degree in Economics from University of Colorado, USA (2000), Ph.D in Economics University of Colorado, USA (2004).
- Work experience: currently serving as Director General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance and Commissioner at Indonesia Deposit Insurance Corporation. He previously served as Director General of Financing and Risk Management at the Ministry of Finance until November 2022 and as Expert Staff to the Minister of Finance for State Revenue Policy at the Ministry of Finance until November 2017.
- Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-01/D-KOM/2021 dated March 15, 2021, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

KOMITE-KOMITE
Committees

Yovita L. Handini
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 – December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 31 Mei 1972. Usia 51 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Jakarta on May 31, 1972. She is 51 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta
• Pendidikan: *Bachelor Construction Management* dari *Colorado State University* pada tahun 1996 dan *Master Construction Management* dari *University of Washington* pada tahun 1999.	• Education: Bachelor Construction Management from Colorado State University in 1996 and Master Construction Management from University of Washington in 1999.
• Riwayat pekerjaan: saat ini bekerja sebagai Dosen di STIE Bhakti Pembangunan, pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT PGN Tbk pada tahun 2015-2018 , konsultan di CDR Consultant pada tahun 2001-2003 dan *Engineer* di *Sherman Homes* pada tahun 1999-2001.	• Work experience: currently serving as Lecturer at STIE Bhakti Pembangunan, previously served as member of the Audit Committee of PGN in 2015-2018, consultant at CDR Consultant in 2001-2003, Engineer at Sherman Homes in 1999-2001.
• Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-15/D-KOM/2020 efektif berlaku tanggal 1 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Decree of the Board of Commissioners No. Kep-15/D-KOM/2020 effective January 1, 2021, on the Appointment of Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
• Sertifikasi yang dimiliki : 1. *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) 2. *Project Management Certification*	• Certifications: 1. Qualified Risk Management Officer (QRMO) 2. Project Management Certification

Mugiono
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) | (January 1, 2023 – December 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Purwodadi pada 17 Februari 1963. Usia 60 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Purwodadi on February 17, 1963. He is 60 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro tahun 1988 dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara tahun 2005.	• Education: Bachelor's Degree in Chemical Engineering from the University of Diponegoro in 1988 and Master of Management from the University of Sumatra Utara in 2005
• Riwayat pekerjaan: Bekerja sebagai Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia pada 2015-2018, Komisaris PT Nusantara Regas pada 2015-2017, Koordinator Divisi Komersial dan Infrastruktur di PGN pada 2011-2014.	• Work experience: Previously served as President Director of PT PGN LNG Indonesia in 2015 – 2018, Commissioner at PT Nusantara Regas in 2015 – 2017, Coordinator of Commercial and Infrastructure Division at PGN in 2011 – 2014.
• Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/D-KOM/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk, serta pada tahun 2021 mendapatkan perpanjangan masa tugas dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-07/D-KOM/2021 berlaku efektif 1 Agustus 2021.	• Legal basis for appointment as Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Decree of the Board of Commissioners No. Kep-06/D-KOM/2019 dated July 23, 2019, on the Appointment of Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, and received an extension of term of office in 2021 with the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-07/D-KOM/2021, effective August 1, 2021.
• Sertifikasi yang dimiliki: *Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	• Certifications: Qualified Risk Management Officer (QRMO)

Bayu Satria Pratama

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2023 – 31 Januari 2023) | (January 1, 2023 – January 31, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 1 Desember 1983. Usia 40 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Jakarta on December 1, 1983. He is 40 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta
• Pendidikan: Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan *Master of Engineering Management* dari *University Technology of Sydney* pada tahun 2012.	• Education: Bachelor's degree in Chemical Engineering from the University of Indonesia in 2005 and Master of Engineering Management from the University Technology of Sydney in 2012
• Riwayat pekerjaan: Pernah menjabat sebagai Koordinator Niaga Migas, Koordinator Harga dan Subsidi Bahan Bakar sampai dengan September 2021 , dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 2006.	• Work experience: Served as Oil and Gas Trading Coordinator, coordinator of Fuel Prices and Subsidies until September 2021, and a Civil Servant at the Ministry of Energy and Mineral Resources since 2006. Currently serving as Oil and Gas Trading Coordinator.
• Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-04/D-KOM/2020 tanggal 30 April 2020 dan diperbaharui dengan Kep-04/D-KOM/2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Board of Commissioners Decree No. Kep-04/D-KOM/2020 dated April 30, 2020, and updated with Kep-04/D-KOM/2021 dated May 1, 2021, on the Appointment of members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Oktofriawan Hargiardana

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Maret 2023 – 30 September 2023) | (March 1, 2023 – September 30, 2023)

• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 10 Oktober 1986. Usia 37 tahun per 31 Desember 2023. Domisili Jabodetabek.	• Indonesian Citizen, born in Jakarta, October 10, 1986. He is 37 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Greater Jakarta.
• Pendidikan: Sarjana Statistik dari Universitas Gadjah Mada tahun 2008 dan Master Statistik dari *University of Manchester, United Kingdom* tahun 2016.	• Education: Bachelor of Statistics from Gadjah Mada University in 2008 and Master of Statistics from the University of Manchester, United Kingdom in 2016.
• Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai *Senior Expert of Downstream Oil and Gas* di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebelumnya *Senior Expert Business Trend* di PT Pertamina sampai tahun 2022, dan sebagai Asisten Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada 2017-2019	• Work experience: Currently serving as Senior Expert of Downstream Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, previously served as Senior Expert of Business Trend at PT Pertamina until 2022, and as Assistant to the Deputy of Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia in 2017 – 2019.
• Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/D-KOM/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pengangkatan Saudara Oktofriawan Hargiardana Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	• Legal basis for appointment as Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Decree of the Board of Commissioners No. Kep-06/D-KOM/2023 dated March 1, 2023, on the Appointment of Mr. Oktofriawan Hargiardana as Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
• Sertifikasi yang dimiliki *Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	• Certification: Qualified Risk Management Officer (QRMO)

KOMITE-KOMITE
Committees

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Independency of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee always carries out its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without interference from any party.

No	Pernyataan Independensi Independency Statement	Warih Sadono	Luky Alfirman	Mugiono	Bayu Satria Pratama	Yovita L. Handini	Oktofriawan Hargiardana
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/ pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/ controlling shareholders, or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/ profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect working/ professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berpedoman pada Piagam Komite yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2012, dan perubahan terakhir kali pada tanggal 22 Desember 2022.

Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refers to the Committee Charter, which was stipulated by the Decree of the Board of Commissioners on August 15, 2012, and most recently amended on December 22, 2022.

Masa jabatan

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, serta dapat dipilih kembali. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 22 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan serta memberikan rekomendasi terkait:
   a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
   c. Kebijakan Investasi (pengembangan/ekspansi) dan Divestasi, termasuk fungsi konsultansi untuk investasi di atas nilai tertentu;
   d. Laporan *Monitoring* realisasi rencana bisnis perusahaan dan/atau investasi;
   e. Pembentukan Anak Perusahaan;
   f. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Penurunan Kinerja Perusahaan;
   g. Manajemen Risiko Korporasi dan implementasi mitigasinya, utamanya melakukan pemantauan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko mencakup Sistem Manajemen Risiko, Potensi Risiko Strategis dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan yang dilakukan oleh fungsi kerja terkait;
   h. Optimalisasi aset; dan
   i. Menumbuhkan budaya sadar risiko dalam perusahaan.
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Komite Audit apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Menyusun Program Kerja Tahunan; serta
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Term of Office

The applicable provisions explain that the term of office of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and may be re-elected. The term of office of members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee as stated in the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter, which was stipulated by Decree of the Board of Commissioners on December 22, 2022, are as follows:

1. Conducting evaluation and/or monitoring and providing relevant recommendations regarding:
   a. Long-Term Plan of the Company;
   b. Company's Work Plan and Budget;
   c. Investment (development/expansion) and Divestment Policies, including consulting functions for investments exceeding certain values;
   d. Monitoring Report on the realization of the company's business and/or investment plan;
   e. Establishment of Subsidiaries;
   f. Impact of Business Environment on the Decline of Company Performance;
   g. Corporate Risk Management and its mitigation implementation, mainly by monitoring the policies and implementation of risk management, including the Risk Management System, Potential Strategic Risks, and Corporate Risk Management Policies carried out by the relevant work functions;
   h. Asset optimization; and
   i. Fostering a risk-awareness culture within the company.
2. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee collaborates with the Audit Committee if there are indications/potential risks faced by the Company;
3. Drafting the Annual Work Program; as well as
4. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.

KOMITE-KOMITE
Committees

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
b. Berkoordinasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi *Risk Management* serta *Business Investment* terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite PMRPU, dan sesuai tata kelola.
c. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Authority of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The following is the authority of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee:

a. Have full, free, and unrestricted access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other company resources related to the performance of its duties.
b. Directly coordinate with any party performing Risk Management and Business Investment functions related to the duties and responsibilities of the Committee and in accordance with governance.
c. If deemed necessary, upon written approval of the Board of Commissioners, the Committee may utilize independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, the costs of which shall be borne by the Company.
d. Perform other duties as assigned by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Sepanjang tahun 2023, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah mengikuti pelatihan antara lain:

Training Programs for Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Throughout 2023, members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee have participated in several trainings, among others:

Pelatihan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Training of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Mugiono	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
	7 September 2023 September 7, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 :* *Risk Management Effectiveness Evaluation*
	25, 26, 27, 29 September 2023 September 25, 26, 27, 29, 2023	Jakarta	*ERM Fundamentals (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications)*
	27 September 2023 September 27, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 :* *ESG for Board – Governance of ESG*
	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 :* *CG Methodology and Environmental and Social Management Systems*
	19 – 22 Desember 2023 December 19 – 22, 2023	Bali	*Inhouse* Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 Inhouse Risk Management Based on PER-2/MBU/03/2023 and ISO 31000:2018

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Yovita Lasti Handini	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bogor	*Hands on Training Risk Management*
	7 September 2023 September 7, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 : Risk Management Effectiveness Evaluation*
	25, 26, 27, 29 September 2023 September 25, 26, 27, 29, 2023	Jakarta	*ERM Fundamentals (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications)*
	27 September 2023 September 27, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 : ESG for Board – Governance of ESG*
	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 : CG Methodology and Environmental and Social Management Systems*
	19 – 22 Desember 2023 December 19 – 22, 2023	Bali	*Inhouse* Manajemen Risiko Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 dan ISO 31000:2018 Inhouse Risk Management Based on PER-2/MBU/03/2023 and ISO 31000:2018
Oktofriawan Hargiardana	7 September 2023 September 7, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 : Risk Management Effectiveness Evaluation*
	25, 26, 27, 29 September 2023 September 25, 26, 27, 29, 2023	Jakarta	*ERM Fundamentals (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications)*
	27 September 2023 September 27, 2023	Jakarta	*GRC Masterclass Program 2023 : ESG for Board – Governance of ESG*

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite sebagai berikut:

1. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Laporan *Monitoring Top Risk* 2022 Periode Desember, Revisi dan Usulan Tambahan *Top Risk* 2023, serta *Monitoring Top Risk* 2023 beserta mitigasi risiko setiap bulan;
2. Menelaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan rencana investasi yaitu:
   a) Investasi Survei Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D WK Pangkah serta Inisiatif *Drilling* Tahun 2023;
   b) Kerja sama Bangun Guna Serah/BOT dengan PT Permata Graha Nusantara atas aset di Jl MI Ridwan Rais;
   c) Inisiatif Investasi Pengembangan Bisnis LNG Hub Melalui Revitalisasi LNG *Tank* F-6004 dan Fasilitas Pendukung Lainnya;
   d) Perubahan Skema *Managed Service* menjadi Skema Pengadaan Investasi atas FID Pembangunan Jargas *Threshold* BOC;
   e) Inisiatif Investasi UPB-12 *Workover Well Deepening Testing* CD Ngimbang dan Ngimbang *Clastic Reservoir*;

Implementation of Duties and Activities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

During 2023, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee has carried out activities in order to carry out the Committee's duties as follows:

1. Provide monthly review and input to the Board of Commissioners on the 2022 Top Risk Monitoring Report for the December Period, as well as revisions and proposals for the 2023 Top Risk Monitoring and Risk Mitigation;
2. Provide review and recommendations to the Board of Commissioners on the proposed investment plan, as follows:
   a) Investment in the Acquisition Survey and 3D Pangkah Block Seismic process, as well as the Drilling Initiative in 2023;
   b) Build Operate Transfer/BOT with PT Permata Graha Nusantara for assets on Jl MI Ridwan Rais;
   c) Investment Initiative for LNG Hub Business Development Through Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities;
   d) Change of Managed Service Scheme to Investment Procurement Scheme for BOC Threshold Gas Network Construction FID;
   e) Investment Initiative UPB-12 Workover Well Deepening Testing CD Ngimbang and Ngimbang Clastic Reservoir;

KOMITE-KOMITE
Committees

3. Menelaah dan melakukan analisis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023 Revisi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024;
4. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
   a) Update Pengalihan Bisnis Gas Jambaran Tiung Biru (JTB);
   b) Penyampaian Isu Terkait Draft Corporate Charter Pertamina - PGN;
   c) Penyampaian Laporan Informasi atau Fakta Material Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi PGN Melalui Mekanisme *Open Market Purchase*;
   d) *Persetujuan Amendemen Facility Agreement (Pinjaman/SHL) PT Kalimantan Jawa Gas;*
   e) Perpanjangan *Availability Period* dan Penurunan *Commitment Fee* untuk Pelunasan Obligasi PGN SA;
   f) Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Perjanjian KSO PGN – JPEN;
   g) *Preliminary Draft* RJPP PT PGN;
   h) Pedoman Kerja Sama Pengembangan Bisnis PT PGN;
   i) Laporan Manajemen bulanan.
5. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah operasional Cibinong, Lampung, Palembang, Kendal, Batang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali, Aceh dan Medan.

3. Review and conduct analysis related to the Revised 2023 Company Work Plan and Budget and 2024 Company Work Plan and Budget;
4. Review and provide input to the Board of Commissioners regarding:
   a) Update on the Transfer of the Jambaran Tiung Biru (JTB) Gas Business;
   b) Submission of Issues Related to the Draft Corporate Charter of Pertamina - PGN;
   c) Submission of Information Reports or Material Facts on the Implementation of the PGN Bond Buyback Through the Open Market Purchase Mechanism;
   d) Approval of Amendments to the Facility Agreement (Loan/SHL) of PT Kalimantan Jawa Gas;
   e) Extension of the Availability Period and Reduction of Commitment Fees for Repayment of PGN SA Bonds;
   f) Application for Approval for the Implementation of the PGN-JPEN KSO Agreement;
   g) Preliminary Draft RJPP PT PGN;
   h) PT PGN Business Development Cooperation Guidelines;
   i) Monthly Management Report.
5. Conducted work visits to the operational areas of Cibinong, Lampung, Palembang, Kendal, Batang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali, Aceh, and Medan.

Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah minimal 12 kali. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengadakan pertemuan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, dengan rincian kehadiran per masing-masing anggota sebagai berikut

Meeting Frequency of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The policy for implementing Risk Management and Business Development Monitoring Committee meetings based on the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter is a minimum of 12 times. During 2023, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee held 29 (twenty-nine) meetings, with the following details of attendance per each member

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Risk Management and Business Development Montoring Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Warih Sadono	Ketua Chairman	29	29	100%
Luky Alfirman	Anggota Member	29	29	100%
Mugiono	Anggota Member	29	29	100%
Bayu Satria Pratama	Anggota Member	1	1	100%
Oktofriawan Hargiardana	Anggota Member	15	15	100%
Yovita L. Handini	Anggota Member	29	29	100%

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Board Of Commissioners Secretary

Strasfiatri Auliana



PROFIL	PROFILE
• Warga Negara Indonesia, lahir di Sydney, Australia, pada 28 November 1961. Usia 62 tahun. Berdomisili di Jakarta.	• Indonesian citizen, born in Sydney, Australia, on November 28, 1961. Age: 62 years. Domiciled in Jakarta.
• Riwayat pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1986.	• Educational background in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1986.
• Riwayat pekerjaan: Direktur Corporate Services dan Regional Koperasi Karyawan Indosat sejak tahun 2014–2018;Group Head Corporate Secretary PT Indosat Tbk sejak 2006–2014 dan *Group Head Risk Management* PT Indosat Tbk sejak 2009–2012.	• Work experience: Director of Corporate Services and Regional Employee Cooperatives of Indosat since 2014–2018; Group Head Corporate Secretary of PT Indosat Tbk since 2006–2014; and Group Head Risk Management of PT Indosat Tbk since 2009–2012.
• Perusahaan mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-14/D-KOM/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengangkatan Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sesuai Keputusan Dewan Komisaris tersebut, masa tugas Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Masa tugas Saudari Strasfiatri Auliana diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep- 25/D-KOM/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.	• The company appointed the Board of Commissioners Secretary based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep- 14/D-KOM/2020 dated December 23, 2020 on the appointment of Ms. Strasfiatri Auliana as Board of Commissioners Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. In accordance with the Board of Commissioners' decision, Strasfiatri Auliana's term of office as Secretary to the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years, starting from January 1, 2021, to December 31, 2023. Strasfiatri Auliana's term of office was extended through the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-25/D-KOM/2023 dated December 28, 2023 concerning the extension of the term of office of Strasfiatri Auliana as Secretary of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk from January 1, 2024, to December 31, 2025.
• Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN, memiliki integritas yang baik, memahami fungsi kesekretariatan, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.	• According to the Minister of SOEs (MSOEs) Regulation No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Board of Supervisors for State-Owned Enterprises, the Secretary to the Board of Commissioners must understand the SOEs management, supervision, and development system, have good integrity, understand secretarial functions, and have the ability to communicate and coordinate well.
• Sertifikasi yang dimiliki CGP *Certified Governance Professional* 30 September 2021 – 29 September 2024 dan *Certified Audit Committee Practices* (CACP).	• Certification: CGP Certified Governance Professional, September 30, 2021 - September 29, 2024 and Certified Audit Committee Practices (CACP).

PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan selaras dengan kebutuhan Perusahaan, antara lain:

TRAINING PROGRAMS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

Throughout 2023, the Secretary to the Board of Commissioners has participated in various education and training programs in order to increase competence and knowledge in line with the Company's needs, including:

Pelatihan Sekretaris Dewan Komisaris
Training of the Board Of Commissioners Secretary

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Strasfiatri Auliana	12 Juli 2023 July 12, 2023	Jakarta	*Hands on Training Risk Management*
	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Jakarta	*Upskilling Effective Business Writing and Communication*
	19-22 September 2023 September 19-22, 2023	Jakarta	Pelatihan Certified Audit Committee Practices Certified Audit Committee Practices Training
	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Jakarta	Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia National Conference of the Indonesian Audit Committee Association

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beragam kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
f. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan huruf a sampai dengan e di atas tersimpan dengan baik; dan
g. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY 2023

Throughout 2023, the Board of Commissioners Secretary has carried out various activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:

a. Preparing meetings, including a briefing sheet for the Board of Commissioners;
b. Preparing minutes of meetings of the Board of Commissioners;
c. Administering the documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
d. Preparing a draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
e. Preparing draft reports for the Board of Commissioners;
f. Ensuring that the documents for the implementation of activities stated in points a to e above are filed properly.
g. Performing other duties of the Board of Commissioners.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Rachmat Hutama



PROFIL	PROFILE
• Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 13 Juli 1973. Usia 50 tahun. Domisili Depok, Jawa Barat.	• Indonesian Citizen, born in Jakarta on July 13, 1973. 50 years old. Domiciled in Depok, East Java.
• Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1996 dan Magister Hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2021.	• Completed his Bachelor's Degree in Law at the University of Diponegoro in 1996 and his Master's Degree in Law at the University of Al- Azhar in 2021.
• Riwayat pekerjaan: Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 3 Juli 2017. Mengawali karier di Perseroan sebagai Staff Divisi Hukum dan Humas dan sebagai Division Head Legal mulai 2014 sampai dengan diangkat menjadi Corporate Secretary.	• Work experience: Serves as Corporate Secretary since July 3, 2017. Started his career in the Company as a staff in the Division of Legal and Public Relations and as a Legal Division Head in 2014 until appointed as Corporate Secretary.
• Penunjukan *Corporate Secretary* dilakukan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.	• The appointment of Corporate Secretary is carried out to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies and the State-Owned Enterprises (SOE) Minister Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance within the SOE which was last amended through the SOE Minister Regulation Number PER-09/ MBU/2012 concerning the Amendments to the SOE Minister Regulation Number PER-01/ MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance within the SOE.
• Penunjukan *Corporate Secretary* yang kini menjabat dilaksanakan melalui Surat Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. 013400.SKep/ KP.02.06/HCGS/2017 tanggal 21 Juni 2017. Penunjukan Corporate Secretary itu telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 005600.S/ KP/ PDO/2017 tanggal 3 Juli 2017.	• The appointment of the current Corporate Secretary is carried through the Appointment Letter of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Number 013400.SKep/KP.02.06/ HCGS/2017 dated June 21, 2017. The Corporate Secretary appointment has been submitted to the Financial Services Authority through Letter Number 005600.S/KP/ PDO/2017 dated July 3, 2017.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY

Sejalan dengan Keputusan Direksi No. 013000.K/OT/ PDO/2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama tanggal 31 Maret 2022, *Corporate Secretary* menjalankan fungsi untuk mengelola kegiatan *stakeholder management*, komunikasi korporat, hubungan investor, layanan dukungan korporat, *corporate social responsibility* untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional *Subholding* Gas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

In line with the Decree of the Board of Directors No. 013000.K/OT/PDO/2022 on Work Procedures of Main Directorates, dated March 31, 2022, the Corporate Secretary carries out the function of managing stakeholder management, corporate communications, investor relations, corporate support services, and corporate social responsibility activities to support the smooth operational activities of the Gas Subholding in accordance with applicable statutory regulations.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CORPORATE SECRETARY*

Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan fungsinya, *Corporate Secretary* dibantu oleh Divisi:

1. *Investor Relations*;
2. *Corporate Communication*;
3. *Government and Community Relations*;
4. *Corporate Support and Services*; dan
5. *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Secretary juga bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut struktur organisasi *Corporate Secretary* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 004100.K/OT.00/HCGS/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang struktur organisasi berserta PRL dan formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors upon the approval of the Board of Commissioners.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In carrying out its functions, Corporate Secretary is assisted by the following Divisions:

1. Investor Relations;
2. Corporate Communication;
3. Government and Community Relations;
4. Corporate Support and Services; and
5. Corporate Social Responsibility.

Corporate Secretary is also directly responsible to the President Director. The following is te Corporate Secretary organizational structure, which was stipulated pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023, dated March 24, 2023, on organizational structure and formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

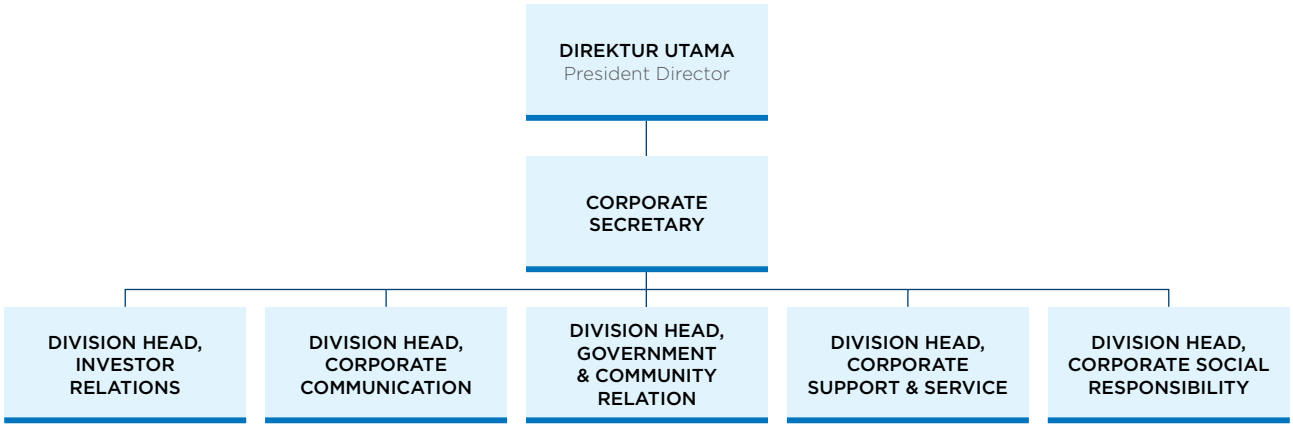

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

PELAKSANAAN TUGAS *CORPORATE SECRETARY* TAHUN 2023

Selama tahun 2023, *Corporate Secretary* telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan;
b. Melaksanakan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru diangkat;
c. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan;
d. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sekretariat Negara, BPH Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Indonesian Capital Market Electronic Library* (ICaMEL), Biro Administrasi Efek (BAE), dan lembaga-lembaga terkait lainnya; serta menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan investor;
e. Mengkoordinasikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi DPR terkait dan kunjungan kerja dengan *stakeholders*;
f. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi serta melakukan kegiatan administrasi notulen hasil rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi;
g. Mengelola keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta ketersediaan informasi dalam situs web Perusahaan;
h. Memastikan tersusun dan tersampaikannya Laporan Tahunan 2023 kepada publik dan otoritas regulator terkait;
i. Memastikan terselesaikannya seluruh arahan Dewan Komisaris dan Direksi PGN; dan
j. Mengelola kebijakan CSR PGN dan *corporate event* yang melibatkan pihak internal maupun eksternal dan berskala nasional atau internasional.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2023

During 2023, the Corporate Secretary has carried out the following duties:

a. Organizing the Annual GMS;
b. Conducting orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
c. Organizing the Annual Public Expose;
d. Establish communication with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), Ministry of Energy and Mineral Resources, State Secretariat, BPH Migas, Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Stock Exchange, the Indonesian Central Securiites Depository, the Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL), the Stock Administration Bureau, and other related agencies; as well as act as liaison between the Company and its shareholders and investors;
e. Coordinating Hearing Session with a Commission of the House of Representatives concerning official visits with stakeholders;
f. Attending every Board of Commissioners and Board of Directors meetings and administering minutes of Board of Commissioners and Board of Directors meetings;
g. Managing information disclosure to the public, including information disclosure to the Financial Service Authority and the Indonesian Stock Exchange, as well as posting such information in the Company's website;
h. Ensuring the preparation and submission of the 2023 Annual Report to general public and related regulators;
i. Ensuring completion of all directives of the Board of Commissioners and Board of Directors of PGN; and
j. Manage PGN's CSR policies and corporate events involving internal and external stakeholders on the national or international scale.

KETERBUKAAN INFORMASI

Corporate Secretary bersama *Legal Counsel and Compliance Group* dan *Investor Relation* senantiasa melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

DISCLOSURE OF INFORMATION

The Corporate Secretary together with the Legal Counsel and Compliance Group as well as Investor Relations always report to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange as the capital market authority in order to comply with the obligation to disclose information to the public.

PROGRAM PELATIHAN *CORPORATE SECRETARY*

TRAINING PROGRAM FOR CORPORATE SECRETARY

Tanggal Date	**Agenda**	Agenda
13 Oktober 2023 October 13, 2023	*Directorship Program – PRIME III 2023*	Directorship Program – PRIME III 2023
8 - 9 November 2023 November 8 – 9, 2023	*Upskilling Leadership Competency* SLC Tahun 2023	Upskilling Leadership Competency SLC in 2023
7 - 8 Desember 2023 December 7 – 8, 2023	*Workshop Strategic Leader Competencies*	Workshop Strategic Leader Competencies
20 Desember 2023 December 20, 2023	*Executive Sustainability Masterclass & Lead with Empathy*	Executive Sustainability Masterclass & Lead with Empathy

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

PROFIL *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

PROFILE OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Evi Novita Dewi



PROFIL	PROFILE
• Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo pada 30 November 1977. Per tanggal 31 Desember 2023, telah berusia 46 tahun. Domisili di Bogor.	• Indonesian Citizen, born in Purworejo on November 30, 1977. She is 46 years old as of December 31, 2023. Domiciled in Bogor.
• Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi pada tahun 2002 di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama pada tahun 2016.	• Completed her Bachelor of Economics in Accounting in 2002 at Gadjah Mada University and completed her Masters in Management at the same university in 2016.
• Riwayat pekerjaan: - 1 Desember 2003 bergabung di Satuan Kerja Audit Internal PT Pertamina (Persero) sebagai Auditor Ahli Madya - 17 Maret 2014 – 31 Mei 2015 menjabat sebagai *Head of Internal Audit* PT Perta Daya Gas - 1 Juni 2015 – 31 Agustus 2015 menjabat sebagai *Head of Internal Audit* PT Pertagas Niaga - 1 September 2015 – 30 Juni 2018 menjabat sebagai *Chief Internal Audit* PT Pertamina Patra Niaga - 1 Juli 2018 – 28 Februari 2019 menjabat sebagai *Internal Audit* Manager Pertamina Region Jawa Barat - 1 Maret 2019 – 15 Agustus 2020 menjabat sebagai *Manager Audit Planning & Quality Assurance* Pertamina - 15 Agustus 2020 – 31 Desember 2022 menjabat sebagai *Vice President Internal Audit Policy Setting, Planning & Monitoring* Pertamina - 1 Januari 2023 – sekarang menjabat sebagai *Chief Audit Executive* PT Perusahaan Gas Negara Tbk	• Work Experiece: - Joined the Internal Audit Unit of PT Pertamina (Persero) as Junior Expert Auditor on December 1, 2023 - March 17, 2014 – May 31, 2015, served as Head of Internal Audit at PT Perta Daya Gas - June 1, 2015 – August 31, 2015, served as Head of Internal Audit at PT Pertagas Niaga - September 1, 2015 – June 30, 2018, served as Chief Internal Audit at PT Pertamina Patra Niaga - July 1, 2018 – February 28, 2019, served as Internal Audit Manager of Pertamina, West Java Region - March 1, 2019 – August 15, 2020, served as Audit Planning & Quality Assurance Manager at Pertamina - August 15, 2020 – December 31, 2022, served as Vice President of Internal Audit Policy Setting, Planning & Monitoring at Pertamina - January 1, 2023 – present, serving as Chief Audit Executive at PT Perusahaan Gas Negara Tbk
• Beliau juga bergabung dalam kegiatan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) di lingkungan ESDM dan *The Institute of Internal Auditors* Indonesia.	• She is also involved in the activities of the Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI) within ESDM and The Institute of Internal Auditors Indonesia.
• Sertifikasi yang dimiliki: - *Certified Internal Auditors* (CIA) - *Qualified Internal Auditors* (QIA) - *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) - *Certified Risk Professional* (CRP) - *Chartered Accountant* (CA)	• Certifications held: - Certified Internal Auditors (CIA) - Qualified Internal Auditors (QIA) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) - Certified Risk Professional (CRP) - Chartered Accountant (CA)

DASAR PENGANGKATAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

Chief Audit Executive saat ini dijabat oleh Evi Novita Dewi yang ditetapkan sejak 1 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan *Senior Vice President Human Capital Management* PT Pertamina (Persero) Nomor SKMJ-00193/K20000/2022-S8 tanggal 14 Desember 2022.

BASIS OF APPOINTMENT OF THE CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The Chief Audit Executive position is currently held by Evi Novita Dewi, who was appointed on January 1, 2023, based on the Decree of the Senior Vice President of Human Capital Management of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00193/K20000/2022-S8 dated December 14. 2022.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

Pengangkatan dan pemberhentian *Chief Audit Executive* dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Pasal 5 poin (1), Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk, *Board Manual* Perseroan dan Pasal 2.1.3 Pedoman Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) P-001/0.12 tanggal 27 Desember 2018. Pengangkatan dan pemberhentian *Chief Audit Executive* dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The appointment and dismissal of Chief Audit Executive is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on Establishment and Preparation Guidelines of the Internal Audit Unit Charter Article 5 point (1), Articles of Association of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Company Board Manual, and Article 2.1.3 Guidelines for the Internal Audit Charter P-001 /0.12 dated December 27, 2018. The appointment and dismissal of Chief Audit Executive is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Chief Audit Executive, Internal Audit berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

POSITION OF INTERNAL AUDIT IN THE COMPANY'S STRUCTURE

Chief Audit Executive, Internal Audit are directly responsible to the President Director.

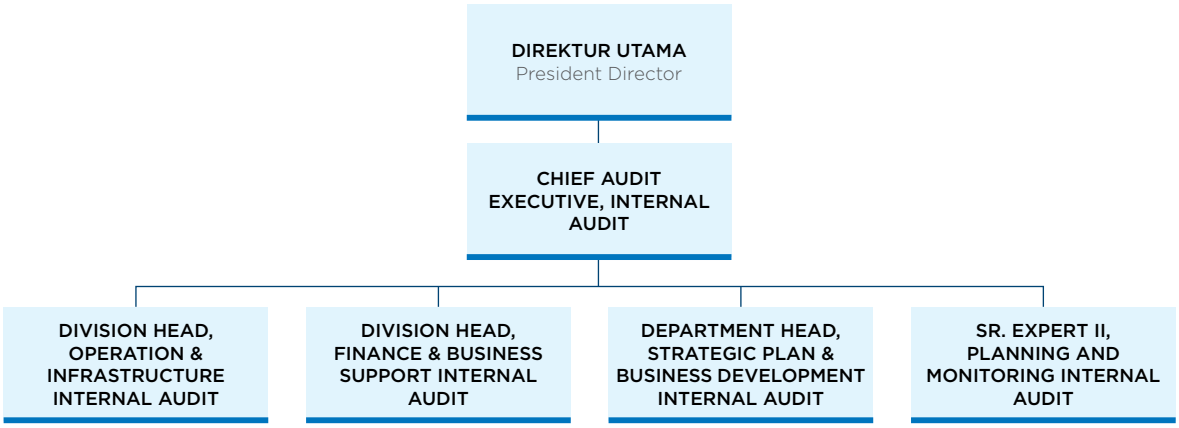

PIAGAM AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) revisi ketiga No. P-001/0.12 yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 034900.K/PW.00/PDO/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pedoman Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) Satuan Kerja Audit Internal PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Piagam Audit Internal secara garis besar memuat Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Struktur Organisasi, Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Internal Audit, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Utama serta Kode Etik Auditor Internal.

AUDIT CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit refers to the third revision of the Audit Charter No. P-001/0.12, which was determined through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 034900.K/PW.00/PDO/2018 dated December 27, 2018, on Guidelines for the Audit Charter of the Internal Audit Unit of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. The Audit Charter in general contains the Vision, Mission, Aims and Objectives, Scope, Organizational Structure, Authority, Duties and Responsibilities of Internal Audit, Responsibilities and Authorities of the President Director, as well as the Code of Ethics of Internal Auditors.

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Internal Audit (IA) mengacu pada Pedoman Piagam Audit Internal (*Audit Charter*). Sedangkan dalam pelaksanaan audit mengacu pada Pedoman Audit Internal No. P-003/0.11 yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 035000.K/PW.00/PDO/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pedoman Audit Internal Satuan Kerja Audit Internal PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Secara garis besar mengatur tahapan proses pelaksanaan audit yang meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Tugas

Tugas Satuan Kerja Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Direksi, Komisaris dan Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Memberikan jasa asurans kepada pihak internal organisasi;
11. Memberikan jasa konsultansi kepada Direksi, satuan kerja lain dan anak perusahaan; dan
12. Pendampingan audit eksternal.

Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku, mengalokasikan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In performing its tasks and responsibilities, the Internal Audit refers to the Internal Audit Charter (Audit Charter). While, in audit implementation refers to Internal Audit Guidelines Number P-003/0.11 stipulated through Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 035000.K/PW.00/PDO/2018 dated December 27, 2018, on Internal Audit Guidelines for Internal Audit Unit of PGN. Overall, it governs the stages of audit process, covering audit planning, audit, audit result reporting, and monitoring of recommendation follow-ups.

Duties

Duties of the Internal Audit Unit cover the following matters:

1. To develop and implement a risk-based Annual Audit Work Program;
2. To test and evaluate the implementation of internal control in accordance with Company policies;
3. To conduct audits and assessments on efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. To provide suggestions for improvements and objective information regarding activities audited at all levels of management;
5. To make a report on audit results and submit the report to the President Director, Board of Directors, Board of Commissioners, and Auditees;
6. To monitor, analyze, and report the implementation of follow-up improvements that have been recommended;
7. To cooperate with the Audit Committee;
8. To develop a program to evaluate the quality of internal audit activities that it performs;
9. To conduct special audits if necessary;
10. To provide insurance services to internal parties of the organization;
11. To provide consulting services to the Board of Directors, other work units, and subsidiaries; and
12. To provide external audit assistance.

Responsibilities

Responsibilities of the Internal Audit Unit cover the following matters:

a. To process audit based on applicable audit standard and code of ethics, to allocate audit resources effectively and efficiently, to develop auditor

sumber daya audit secara efektif dan efisien, mengembangkan profesionalisme auditor dan melaksanakan program *quality assurance* dalam tugas dan pengelolaan Satuan Kerja Audit Internal;

b. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit dan pelaporan hasil audit sesuai dengan kebijakan kerahasiaan informasi Perusahaan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan Kode Etik auditor;
c. Satuan Kerja Audit Internal wajib mendapat persetujuan Direktur Utama atas program kerja dan rencana pengembangan audit yang telah disusun (PKAT);
d. Satuan Kerja Audit Internal wajib melaporkan kepada Direktur Utama mengenai informasi terkait dengan pelaksanaan audit yang sedang berjalan;
e. Auditor Satuan Kerja Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas termasuk pelaksana kegiatan operasional Perusahaan maupun anak perusahaannya.

Wewenang

Satuan Kerja Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
d. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
e. Dalam pelaksanaan tugasnya Internal Audit tidak memihak untuk dapat bersikap objektif;
f. Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus menolak penugasan konsultansi jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan seluruh atau sebagian penugasan tersebut;
g. Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus menolak penugasan kegiatan operasional perusahaan karena menimbulkan distorsi terhadap independensi organisasi *Internal Audit*;
h. Satuan Kerja Audit Internal dapat memberikan jasa *assurance* melalui audit dan konsultansi kepada perusahaan-perusahaan di lingkungan PGN *Group*;
i. Mengalokasikan sumber daya pengawasan, menetapkan frekuensi, menentukan objek dan lingkup pengawasan serta menerapkan teknik-teknik pengawasan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
j. Memperoleh bantuan yang diperlukan dari fungsi/ proses bisnis lain di lingkungan perusahaan serta jasa-jasa spesialis pihak luar PGN dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Satuan Kerja Audit Internal.

professionalism, and to conduct quality assurance program in performing its tasks and managing the Internal Audit Unit;

b. To maintain the confidentiality of data, documents, and information related with its audit tasks, and to report the result of its audit based on information confidentiality policy stipulated by the Company and auditors' Code of Ethics;
c. To obtain approval from the President Director for its work programs and audit development plan that has been prepared;
d. To report to the President Director on information related with its current audit;
e. To not have concurrent positions, including executor of the Company and its subsidiaries' operational activities.

Authority

In performing its duties, the Internal Audit Unit has the following authorities:

a. To access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
b. To communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
c. To hold periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commisisoners, and Audit Committee;
d. To coordinate with external auditors;
e. To be impartial in carrying out its duties in order to be objective;
f. The Chief Audit Executive must refuse a consulting assignment if the internal auditor does not have all or part of the knowledge and skills required for the assignment;
g. The Chief Audit Executive must refuse the assignment of the company's operational activities because it creates distortions to the independence of the Internal Audit organization;
h. The Internal Audit Unit can provide assurance services through audits and consulting to companies within the PGN Group;
i. To allocate supervisory resources, to determine the frequency, object, and scope of supervision, and to apply the necessary supervisory techniques in the context of carrying out the functions and duties of the Internal Audit Unit;
j. To obtain the necessary assistance from other business functions/ processes within the company as well as specialist services from outside PGN in carrying out the functions and duties of the Internal Audit Unit.

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DENGAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Satuan Kerja Audit Internal secara berkala melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Rapat juga dapat diselenggarakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti rapat dengan Direksi sebanyak 70 (tujuh puluh) kali rapat, dan 10 (sepuluh) kali rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF MEETING FREQUENCY WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND/OR AUDIT COMMITTEE

The Internal Audit Unit regularly holds meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee. Meetings can also be held incidentally as needed. During 2023, the Internal Audit Unit attended 70 (seventy) meetings with the Board of Directors, and 10 (ten) meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee.

JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2023, jumlah personel *Internal Audit* terdiri dari 17 (tujuh belas) personel, yang terdiri dari:

NUMBER OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL

In 2023, the number of Internal Audit personnel is 17 (seventeen) personnel, consisting of:

No	Jabatan Position	Jumlah Total
1.	Chief Audit Executive	1
2.	Division Head, Operation and Infrastructure Internal Audit	1
3.	Division Head, Finance and Business Support Internal Audit	1
4.	Department Head, Strategic Plan and Business Development Internal Audit	1
5.	Sr. Executive Officer, Audit	1
6.	Sr. Expert II, Planning and Monitoring Internal Audit	1
7.	Lead Auditor	3
8.	Sr. Auditor II	5
9.	Sr. Auditor I	1
10.	Auditor II	1
11.	Assistant, Planning and Monitoring Internal Audit	1
Jumlah | Total		**17**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personel Internal Audit, selain standarisasi kompetensi melalui sertifikasi profesi, mengikuti pelatihan non sertifikasi yang dapat menunjang pengembangan manajerial maupun kompetensi audit secara langsung, Internal Audit juga berperan aktif mengikuti forum Seminar seperti Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA), *The IIA Indonesia National Conference*, seminar Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) ESDM dan BUMN.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

To improve the competence and professionalism of Internal Audit personnel, they are facilitated to participate in non-certification training that can directly support managerial development as well as audit competence in addition to standardizing competence through professional certification. Internal Audit also plays an active role in participating in Seminar forums, such as the National Seminar on Internal Auditors, IIA Indonesia National Conference, Seminar on the Communication Forum for the Internal Control Unit of EMR and SOEs.

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

Sebagai bentuk komitmen PGN dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan standar profesi *Internal Audit*, personel *Internal Audit* wajib mengembangkan pengetahuan dan kompetensi melalui sertifikasi profesi. Saat ini Auditor *Internal Audit* telah memperoleh sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional dengan rincian sebagai berikut:

- *Qualified Internal Auditors* (QIA) sebanyak 15 orang
- *Certified Internal Auditors* (CIA) sebanyak 2 orang
- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) sebanyak 2 orang
- *Certified Risk Professional* (CRP) sebanyak 6 orang
- *Certified Fraud Examiners* (CFE) sebanyak 4 orang
- *Certified Risk Management Professional* (CRMP) sebanyak 1 orang
- *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA) sebanyak 1 orang
- *Chartered Accountant* (CA) sebanyak 2 orang
- *Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP) sebanyak 1 orang
- *Certified Forensic Auditor* (CFrA) sebanyak 1 orang
- *Oxygen Forensic® Cloud Extraction* (OFCE) sebanyak 1 orang
- *Certified Governance Accounting Expert* (CGAE) sebanyak 1 orang

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

As a form of PGN's commitment to Human Resource development, Internal Auditor personnel are required to develop knowledge and competence through professional certifications in accordance with Internal Audit professional standards. Currently, Internal Audit Auditors have obtained national and international certification with the following details:

- Qualified Internal Auditors (QIA) owned by 15 people
- Certified Internal Auditors (CIA) owned by 2 people
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) owned by 2 people
- Certified Risk Professional (CRP) owned by 6 people
- Certified Fraud Examiners (CFE) owned by 4 people
- Certified Risk Management Professional (CRMP) owned by 1 person
- Certification in Risk Management Assurance (CRMA) owned by 1 person
- Chartered Accountant (CA) owned by 2 people
- Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) owned by 1 person
- Certified Forensic Auditor (CFrA) owned by 1 person
- Oxygen Forensic® Cloud Extraction (OFCE) owned by 1 person
- Certified Governance Accounting Expert (CGAE) owned by 1 person

PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2023

Insight

Internal Audit meningkatkan perannya sebagai *Insight Generator* dan *Trusted Advisor*. Internal Audit lebih proaktif memberikan *insights* dan *strategic advises* kepada Manajemen terutama pada aspek *Governance, Risk* dan *Compliance*. Sepanjang tahun 2023, Internal Audit telah menyampaikan 7 (tujuh) *insight* kepada Manajemen melalui *Management Letter*.

Pelaksanaan Audit dan Konsultasi

a. Berdasarkan *Annual Audit Plan* (AAP) 2023 yang terakhir kali dilaksanakan *review* pada Triwulan III tahun 2023 dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama serta Komisaris Utama, *Internal Audit* telah melaksanakan 15 penugasan audit/konsultasi.
b. Selain melaksanakan penugasan berdasarkan AAP 2023 *Internal Audit* juga telah melaksanakan 1 (satu) penugasan *Non* AAP 2023, 1 (satu) penugasan *Carry Over* AAP 2022 dan 1 (satu) penugasan *Carry Over Non* AAP 2022.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES DURING 2023

Insight

Internal Audit increases its role as an Insight Generator and Trusted Advisor. Internal Audit is more proactive in providing insights and strategic advice to Management, particularly on aspects of Governance, Risk, and Compliance. Throughout 2023, Internal Audit has conveyed 7 (seven) insights to Management via Management Letters.

Implementation of Audits and Consultations

a. Based on the 2023 Annual Audit Plan (AAP), which was last reviewed in the third quarter of 2023 and has received approval from the President Director and President Commissioner, Internal Audit has carried out 15 audit/consultation assignments.
b. Apart from carrying out assignments based on AAP 2023, Internal Audit has also carried out Internal Audit has also carried out 1 (one) non-AAP assignment in 2023, 1 (one) 2022 AAP Carry Over assignment, and 1 (one) 2022 non-AAP Carry Over assignment.

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

c. *Internal Audit* PGN secara aktif berkoordinasi dengan *Internal Audit* Pertamina dalam Holding Migas.
d. *Internal Audit* PGN juga secara aktif berkoordinasi dengan Internal Audit Entitas Anggota Subholding Gas.

Rotasi pekerja di lingkungan *Internal Audit* dilaksanakan mengacu pada kebijakan Fungsi Human Capital PGN dan melalui koordinasi dengan Internal Audit Holding selaku Pembina.

Pelaksanaan Audit Khusus
Pada tahun 2023, *Internal Audit* telah melaksanakan 1 (satu) audit khusus yang merupakan *Carry Over Non* AAP 2022 dan 6 (enam) penelaahan atas laporan pengaduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS).

TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT
Pelaksanaan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut:
a. Realisasi monitoring tindak lanjut hasil audit internal yang dilakukan oleh *Internal Audit* PGN pada periode tahun 2023 sebagai berikut:

c. PGN Internal Audit actively coordinates with Pertamina Internal Audit in the Oil and Gas Holding.
d. PGN Internal Audit also actively coordinates with the Internal Audit of Gas Subholding Member Entities.

Rotation of employees within the Internal Audit environment is carried out in reference to the PGN Human Capital Function policy and through coordination with the Internal Audit Holding as the Supervisor.

Implementation of Special Audit
In 2023, Internal Audit has carried out 1 (one) special audit, which is Carry Over non-AAP 2022 and 6 (six) reviews of complaint reports through the Whistle Blowing System (WBS).

FOLLOW-UP TO AUDIT RECOMMENDATIONS
Monitoring completion of follow-ups:
a. The realization of follow-up monitoring of internal audit results conducted by PGN Internal Audit in the 2023 period is as follows:

Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023
Table of Follow-up Internal Audit Results January 1, 2023 to December 31, 2023

No.	Uraian	Total Total	Description
A	*Outstanding* rekomendasi per 1 Januari 2023	99	Outstanding recommendations as of January 1, 2023
B	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2023	239	Additional recommendations until December 31, 2023
C	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2023	338	Total recommendations up to December 31, 2023
D	Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2023	161	Follow-up until December 31, 2023
E	*Outstanding* rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2023	177	Outstanding recommendations until December 31, 2023
E1	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2023 yang telah melebihi *end date*	0	Outstanding recommendations as of December 31, 2023, which have passed the due date
E2	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2023 yang belum melebihi *end date*	177	Outstanding recommendations as of December 31, 2023, which did not exceed the due date
Persentase Pencapaian (F) =D/(D+E1) x 100%		**100%**	**Percentage of Achievement (F) =D/(D+E1) x 100%**

Sesuai dengan pelaksanaan monitoring tindak lanjut, *Internal Audit* akan menyampaikan kembali *reminder* penyelesaian tindak lanjut kepada *Auditee* pada Triwulan I 2024.
b. Rekomendasi hasil audit eksternal (BPK RI dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit PSA 62).

In accordance with the implementation of follow-up monitoring, Internal Audit will send a reminder to the Auditee to complete the follow-up by the first quarter of 2024.
b. Recommendations of external audit results (BPK RI and Public Accounting Firm for PSA 62 Audit).

1. BPK RI
   Telah dilaksanakan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester I 2023 untuk 7 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersama dengan BPK RI pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2023. Realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI mencapai 53% (33 rekomendasi) dari keseluruhan outstanding rekomendasi yang berjumlah 62, sehingga tersisa sebanyak 29 rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai.

1. BPK RI
   Updated Follow-up Recommendations for BPK RI Audit Results for Semester I 2023 Period for 7 Audit Result Reports (LHP) with BPK RI from July 24 to July 28, 2023. The completion of follow-up on BPK RI audit results reached 53% (33 recommendations) of the total outstanding recommendations of 62 recommendations, with the remaining 29 recommendations being declared Not Appropriate.

Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023
Table of Follow-up Internal Audit Results January 1, 2023 to December 31, 2023

No.	Keterangan Description		Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Dokumen Tindak Lanjut Follow-up Documents
A	*Outstanding* rekomendasi per 1 Januari 2023 Outstanding recommendations as of January 1, 2023		22	
B	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2023 Additional recommendations until December 31, 2023		40	
C	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2023 Total recommendations up to December 31, 2023		62	62
D	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2023 Follow-up to December 31, 2023	Sesuai Appropriate	33	
		Belum Sesuai Not Appropriate	29	
		Belum Ditindaklanjuti Not Followed up yet	0	
		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Not Followed Up	0	
E	Outstanding rekomendasi per 31 Desember 2023 Outstanding recommendations as of December 31, 2023		29	

Selanjutnya Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester II 2023 akan dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan I 2024.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja
   Audit PSA 62 Periode Tahun Buku 2022 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah selesai dilaksanakan dengan diterbitkannya Laporan Auditor Independen Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal No. 00154/2.1032/JL.0/02/1726-1/1/IV/2023 tanggal 13 April 2023. Terdapat 2 rekomendasi yang perlu dimonitor tindaklanjutnya oleh *Internal Audit* sesuai laporan audit dimaksud. *Internal Audit* PGN telah melaksanakan monitoring tindak lanjut dan bukti tindak lanjut telah disampaikan kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja pada tanggal 20 Juni dan 13 November 2023. Per 31 Desember 2023, proses *review* bukti tindak lanjut tersebut masih dilaksanakan oleh KAP PSS dan hasil pemutakhirannya akan disampaikan melalui penerbitan Laporan Audit PSA 62 Periode Tahun Buku 2023.

Furthermore, an update on the follow-up to recommendations from the BPK RI audit results for the second semester of 2023 is planned for implementation in the first quarter of 2024.

2. Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja
   Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja have completed the PSA 62 Audit for the 2022 Financial Year Period and published the Independent Auditor's Report on Compliance with Internal Control No. 00154/2.1032/JL.0/02/1726-1/1/IV/2023 on April 13, 2023. According to the audit report, Internal Audit must monitor the follow-up on two recommendations. PGN Internal Audit has conducted follow-up monitoring, and evidence of the follow-up was submitted to KAP PSS on June 20 and November 13, 2023. As of December 31, 2023 Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja is still reviewing the follow-up evidence, and the updated results will be submitted through the publication of the PSA Audit Report 62 Period of Financial Year 2023.

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

PENDAMPINGAN AUDITOR EKSTERNAL
Internal Audit aktif melakukan pendampingan terhadap audit yang dilakukan Auditor Eksternal, sebagai berikut:
i. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dalam melaksanakan Audit PSA 62 tahun buku 2022 dan 2023.
ii. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan pemeriksaan di PGN Group.

ASSISTANCE FOR EXTERNAL AUDITORS
Internal Audit actively facilitates audits conducted by the following External Auditors:
i. Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) in conducting the PSA 62 Audit form the 2022 and 2023 fiscal years.
ii. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in carrying out audits in the PGN Group.

LAIN-LAIN
Internal Audit selain melakukan kegiatan audit dan pendampingan di atas, juga melakukan kegiatan:
i. Ikut serta dalam kegiatan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN dan ESDM.
ii. Mengikuti pelatihan, konferensi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
iii. Melaksanakan sosialisasi Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi.
iv. Mengimplementasikan *Audit Management System* (AMS) dalam menjalankan penugasan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

OTHERS
In addition to audit and facilitation above, Internal Audit also performs the following activities:
i. Participating in activities organized by a Communication Forum for Internal Audit Unit of SOEs and EMR.
ii. Participating in training, certification, and competency improvement programs.
iii. Disseminating Guidelines for the Whistle Blowing System and Gratification Control.
iv. Implementing the Audit Management System (AMS) in carrying out assignments and monitoring the follow-up to recommendations from audit results.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER 2-MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PGN terus mengupayakan pengembangan sistem pengendalian internal dengan mengacu kepada ISO 31000:2018 *framework*. Sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan dijalankan dengan mekanisme dan proses yang melibatkan Direksi, anggota manajemen, seluruh personel di Perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan atas pencapaian operasional Perusahaan, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan berlaku.

CONFORMITY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
In line with the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, PGN continues to strive to develop an internal control system by referring to the ISO 31000:2018 framework. The internal control system implemented by the Company is carried out using mechanisms and processes that involve the Board of Directors, members of management, and all personnel in the Company. This is conducted to provide confidence in the Company's operational achievements, reliable financial reporting, and compliance with applicable procedures and regulations.

PGN yakin dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi dasar yang kuat bagi kegiatan operasional Perusahaan yang sehat dan aman, mencegah kegagalan pencapaian tujuan, menghasilkan laporan keuangan terpercaya, serta memastikan kegiatan Perusahaan patuh pada aturan dan hukum. Upaya ini juga dapat memberikan informasi yang relevan dalam menilai kinerja Perusahaan.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Perusahaan mengimplementasikan sistem pengendalian internal dalam dua aspek, yaitu pengendalian operasional dan keuangan. Pengendalian operasional dilakukan melalui kaji ulang oleh Direksi terhadap kinerja operasional dan realisasi Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau penyimpangan lainnya.

Dalam melakukan pengendalian keuangan, Perusahaan menjalankan pemisahan fungsi agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, secara rutin Perusahaan melakukan pembaruan kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi untuk menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018

Komponen Sistem Pengendalian Internal di PGN mengacu pada *Framework* Manajemen Risiko ISO 31000:2018. *Framework* ini mencakup integrasi, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan Manajemen Risiko di semua bisnis unit Perusahaan. Siklus prosesnya dimulai dari perencanaan awal hingga integrasi faktor internal dan eksternal Perusahaan.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal diberlakukan kepada Direksi, anggota manajemen, dan personel Perusahaan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan atas efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan, laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan.

Evaluasi atas efektivitas, efisiensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan audit oleh *Internal Audit*. Sedangkan efektivitas sebagian sistem pengendalian internal diuji melalui Audit PSA 62 setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik.

PGN believes that the implementation of an effective internal control system provides a strong basis for sound and safe operational activities of the Company, preventing failure to the achievement of goals, producing reliable financial reports, as well as ensuring that Company activities comply with laws and regulations. This effort can also provide relevant information in assessing the Company's performance.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL, AS WELL AS COMPLIANCE WITH LEGISLATIONS

The company implements an internal control system in two aspects, namely operational and financial control. Operational control is carried out through reviews by the Board of Directors on operational performance and realization of the Company's Work Plan and Budget. This is conducted with the aim of detecting control weaknesses, financial reporting errors, or other irregularities.

In carrying out financial control, the Company carries out separation of functions to avoid errors or deviations in the implementation of its duties. In addition, the Company routinely updates policies, procedures, operational systems, and accounting standards to reflect actual operational activities.

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH ISO 31000:2018

Components of the Internal Control System in PGN refer to the ISO 31000:2018 Risk Management Framework. This framework covers integrating, planning, implementing, evaluating, and improving Risk Management in all business units in the Company. The process cycle starts from initial planning to integrate the Company's internal and external factors.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control applies to the Board of Directors, members of the management, and Company personnel. The aim is to provide confidence in the effectiveness and efficiency of the Company's operations, reliable financial reports, and compliance with procedures and regulations.

Evaluation on the effectiveness, efficiency, and compliance in the implementation of the internal control system is carried out through the implementation of audit by the Internal Audit. Meanwhile, the effectiveness of some of the internal control systems is tested through the PSA 62 Audit every year by the Public Accounting Firm.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Nomor 00029/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Nomor 00030/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa PGN telah mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan serta tidak terdapat masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya yang memiliki kelemahan material.

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengendalian internal, Perusahaan selalu menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan audit internal dan Audit PSA 62 agar kegiatan pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan secara efektif. Secara umum sepanjang tahun 2023, Sistem Pengendalian Internal telah berjalan efektif dan efisien.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Sistem pengendalian internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan tepat. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan yang dijalankan sepanjang tahun 2023 telah memadai dan digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:

1. Operasi dijalankan secara efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku; dan
4. Pengamanan aset Perusahaan.

Based on the Report of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja on Compliance with Legislative Regulations ending on 31 December 2023 Number 00029/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 dated 8 March 2024, and the Report of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja on Internal Control ending on 31 December 2023 Number 00030/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 dated 8 March 2024, It can be concluded that PGN has complied in all material aspects with certain articles of legislation, rules, contracts, and assistance obligations, and that there are no significant weaknesses in internal control and operations.

In an effort to improve the internal control system, the Company always follows up on recommendations resulting from the implementation of internal audits and the PSA 62 Audit, which enables the Company's operational activities to run effectively. In general, throughout 2023, the Internal Control System has been running effectively and efficiently.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for implementing the internal control system as well as possible to achieve the Company's objectives. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for carrying out supervision to ensure the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that determine internal control. The internal control system is designed to manage and control risks properly and appropriately. The Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's internal control system implemented throughout 2023 was adequate and used to achieve the Company's internal control objectives, which include:

1. Operations are carried out effectively and efficiently;
2. Accurate and reliable financial statements;
3. Compliance with applicable laws and regulations; and
4. Security of Company assets.

FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Function

Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan usaha, senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company bases its decisions and business actions on high moral values and compliance with applicable laws and regulations.

Dalam memastikan kegiatan perusahaan patuh pada aturan dan hukum, Perusahaan memiliki fungsi yang mengelola kepatuhan yang merupakan bagian dari Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

The Company has a function that manages compliance in place to ensure that company activities comply with rules and laws, as part of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan di Perusahaan dijalankan oleh beberapa satuan kerja di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 013000.K/OT/PDO/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama yaitu:

1. Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan yang melekat kepada satuan kerja:
   a. *Corporate Secretary*
   b. *Internal Audit*
   c. *Legal Counsel and Compliance*
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko membawahi fungsi kepatuhan yang melekat kepada satuan kerja *Risk Management*.

COMPLIANCE FUNCTION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Company's compliance function is carried out by several work units under the Board of Directors in accordance with President Director Decree No. 013000.K/OT/PDO/2022 dated March 31, 2022 concerning Principal Directorate Work Procedures, as follows:

1. The President Director manages the compliance function within the work unit:
   a. Corporate Secretary
   b. Internal Audit
   c. Legal Counsel and Compliance
2. The Director of Finance and Risk Management manages the compliance function within the Risk Management work unit.

PENERAPAN KEPATUHAN DI PGN

Dalam hal keuangan, Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan. Selain audit laporan keuangan, Kantor Akuntan Publik juga telah melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal dan Peraturan Perundang-undangan (Audit PSA 62) di PGN yang merekomendasikan tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian internal yang berlaku dan interpretasi Perseroan atas implementasi peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE AT PGN

In financial matters, the Company's Financial Reports are audited by the Public Accounting Firm (KAP) appointed in accordance with the Annual GMS Resolution. In addition to auditing financial reports, the Public Accounting Firm conducted a Compliance Audit with Internal Control and Legislative Regulations (PSA 62 Audit) at PGN, recommending corrective action for existing internal control weaknesses as well as the Company's interpretation of statutory regulation implementation.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Kegiatan ini juga menjadi pintu masuk utama bagi penyedia barang/jasa dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional Perseroan, proses pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja Perseroan.

Memahami hal ini, Perseroan mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik dengan prinsip yang efektif dan efisien serta didasarkan pada perencanaan dan strategi pengadaan barang/jasa yang matang dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional Perseroan.

Perseroan telah memiliki kebijakan dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang disusun pada tahun 2023 yang meliputi kriteria dalam pemilihan penyedia barang/jasa, mekanisme pengadaan barang/jasa yang transparan, pemenuhan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyedia barang/jasa, dan upaya peningkatan kemampuan penyedia barang/jasa, yang terdiri dari:

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa;
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa;
3. Proses pengadaan barang/jasa;
4. Kontrak dan amandemen pengadaan barang/jasa; dan
5. Evaluasi kinerja penyedia barang/jasa.

Upaya peningkatan penyediaan barang/jasa juga disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip dan praktik yang berlaku umum (*best practice*).

Adapun mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan tidak terbatas pada:

1. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.
2. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.

Procurement of goods/services becomes a crucial aspect in maintaining the Company's business sustainability. This activity is also the main gateway for goods/services providers in supporting the Company's investment and operating activities, the procurement of goods/services process has a strategic role in determining the Company's performance.

Acknowledging the importance of this matter, the Company has implemented the process of procurement of goods/services to obtain competitive prices and good quality of goods or services needed effectively and efficiently based on well-thought planning and strategy to support Company's investment and operating activities.

The Company has established a policy and provisions regarding the procurement of goods/services stipulated in the Guidelines for Procurement of Goods/Services which was prepared in 2023 includes the procedures of provider selection and procurement mechanism of goods/services, provider rights and obligations as well as efforts to improve goods/services, which consist of:

1. Registration of goods/services providers;
2. Planning for procurement of goods/services;
3. Process of procurement of goods/services;
4. Contracts and amendments to procurement of goods/services; and
5. Evaluation of the performance of goods/services providers.

Efforts to increase the supply of goods/services are also adjusted to the needs of the Company with due consideration on the principles and best practices.

The mechanism for procurement of goods/services is not limited to:

1. Open Tender, which is publicly announced through the mass media to give opportunities for goods/services suppliers that meet the qualifications to participate in the tender of procurement of goods/services.
2. Selective Tender/Selective Selection, where suppliers of goods/services can make at least 2 (two) offers.

3. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*.
4. Pengadaan Langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *e-purchasing*.

Perseroan selalu melakukan pemutakhiran atas kebijakan dan ketentuan tersebut, terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Pedoman Pengadaan Barang/jasa No P-001/31.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023, seiring dengan adanya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta untuk menyelaraskan/menindaklanjuti penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-10/C00000/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberlakukan Pertamina Standar Pengadaan Barang/Jasa No. PS-S-022-390-2022 Edisi Ke – 2 tahun 2022.

Selain Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam rangka mendukung peningkatan penggunan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa, Perseroan juga telah memiliki kebijakan dan ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri yang tertuang dalam Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri No. P-001/A050 tanggal 23 Desember 2022, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan lingkungan dan sosial untuk rantai pasok PGN yang tercantum dalam kebijakan Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan, serta Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No.P-001/21.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Melalui kebijakan ini, PGN menggunakan kriteria lingkungan dan sosial untuk mengintegrasikan komitmen keberlanjutan perusahaan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Perseroan senantiasa melakukan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dengan mengadakan sosialisasi atau *refreshment* terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan, disesuai dengan porsi dan peruntukannya, antara lain:
1. Visi dan misi Perseroan;
2. Kebijakan pengadaan barang/jasa terkait pendaftaran penyedia barang/jasa;
3. Kebijakan *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) terkait *Contractor Safety Management System* (CSMS); dan
4. GCG, etika usaha, dan anti penyuapan.

3. Direct Appointment, namely the procurement of goods/services carried out directly by pointing to 1 (one) supplier r of goods/services or appointment through beauty contest.
4. Direct Purchase, where goods are purchased in the market with prevailing market prices, including e-Purchasing.

The Company always updates the policies and regulations, on the development of applicable laws and regulations. This is evidenced by the establishment of Guidelines for Procurement of Goods/Services No. P-001/31.00/2023 dated 30 October 2023, in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated 3 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities Significant State-Owned Enterprises and to align/follow up on adjustments to the Decree of the President Director of PT Pertamina (Persero) No. KPTS-10/C00000/2023 dated July 17, 2023 concerning the Implementation of Pertamina Standards for Procurement of Goods/Services No. PS-S-022-390-2022 second edition of 2022.

In addition to guidelines for procurement of goods/ services, in order to support the increase in domestic products in the process of procurement of goods/ services, the Company also has established policies and provisions regarding the use of domestic products contained in the Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products No. P-001/A050 dated 23 December 2022, which is effective since 1 January 2023.

The Company has also established environmental and social policies for the PGN supply chain, which are stated in the Quality, HSSE and Anti-Bribery policy, as well as Goods/ Services Procurement Guidelines No. P-001/21.00/2023 dated October 30, 2023. Through In this policy, PGN uses environmental and social criteria to integrate the company's sustainability commitments in the goods/services procurement process.

The Company always provides guidance to the provider of goods/services through dissemination or refreshment of the Company's provisions, according to the portion and purpose, including:

1. The Company's vision and mission;
2. Goods/services procurement policy related to the registration of goods/services providers;
3. Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) policy related to the Contractor Safety Management System (CSMS); And
4. GCG, business ethics, and anti-bribery.

KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI
Anti-Bribery and Corruption Policy

PROGRAM DAN PROSEDUR

PGN berkomitmen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan serta menerapkan Kebijakan Antikorupsi, dengan menerapkan Sistem Manajeman Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan prinsip 4 NO's:

- *No Bribery,* tidak boleh ada suap-menyuap dan pemerasan;
- *No Kickback,* tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya;
- *No Gift,* tidak boleh ada hadiah/gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- *No Luxurious Hospitality*, tidak boleh ada penyambutan dan jamuan mewah yang berlebihan.

Pada tahun 2023, PGN telah mengembangkan ruang lingkup (*extend scope*) penerapan SMAP ISO 37001: 2016 untuk memastikan proses bisnis Perusahaan dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang bersih.

Selain itu beberapa anak perusahaan PGN telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di antaranya adalah PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution dan PT Permata Graha Nusantara.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab *Legal Counsel and Compliance*.

Program atau Prosedur dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Selama tahun 2023, PGN melaksanakan beragam program atau prosedur yang dapat mendorong dan memastikan tidak adanya praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi seperti:

1. Pembuatan Surat Pernyataan Komitmen Perwira Subholding Gas dalam menerapkan GCG dan Etika Usaha/Etika Kerja termasuk komitmen tidak menerima suap/gratifikasi atau tidak memberikan suap (anti suap) melalui aplikasi GOLS (GCG *Online Systems*).

PROGRAMS AND PROCEDURES

PGN is committed to carrying out business activities by adhering to and implementing the Anti-Corruption Policy and by enforcing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System with the 4 NO's principles:

- No Bribery, no bribery or extortion allowed;
- No Kickback, no commissions, and no receipts, either in the form of money or other forms;
- No Gift, no gifts/gratuities that are contrary to applicable rules and regulations; and
- No Luxurious Hospitality, no extravagant receptions, and no entertainment.

In 2023, PGN has extended the scope of implementing SMAP ISO 37001:2016 to ensure that the Company's business processes are carried out in accordance with the principles of clean governance.

In addition, several PGN subsidiaries have implemented the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, including PT Nusantara Regas, PT Transportation Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution, and PT Permata Graha Nusantara.

The Company's Anti-Bribery Management System is under the management and responsibility of Legal Counsel and Compliance.

Programs or Procedures for Overcoming Corruption, Kickbacks, Fraud, Bribery, and/or Gratification Practices

During 2023, PGN implemented various programs or procedures that could encourage and ensure the absence of corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification, such as:

1. Issuing a Commitment Statement for Subholding Gas Employees in implementing GCG and Business Ethics/Work Ethics, including a commitment not to accept or give bribes (anti-bribery) through the GOLS (GCG Online Systems) application.

2. Penandatanganan pakta integritas yang menyatakan pemahaman atas kebijakan *bribery and corruption* oleh seluruh karyawan setiap tahunnya melalui aplikasi GOLS (GCG *Online Systems*).
3. Penilaian aspek integritas pada proses rekrutmen bagi calon Perwira Subholding Gas dan *fit and proper test* pada proses promosi Perwira Subholding Gas.
4. Pembuatan Pakta Integritas bagi Perwira Subholding Gas yang diangkat jabatannya atau dipromosikan.
5. Pembuatan Pakta Integritas pada setiap dilakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa bagi Calon Penyedia Barang dan Jasa maupun Pengguna Barang Jasa.
6. Pembuatan Pakta Integritas bagi Pengelola Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Menayangkan Video Sosialisasi terkait Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan pada setiap proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam tahap Rapat Penjelasan (*pre-bid meeting*) dan Rapat Klarifikasi & Negosiasi.
8. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyuapan yang dituangkan dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
9. Dalam penerapan SMAP ISO 37001:2016 telah dilaksanakan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) pada tanggal 29 Desember 2023.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI

Setiap tahun, PGN secara rutin telah melakukan kampanye kesadaran anti korupsi, anti penyuapan, pengendalian gratifikasi, *fraud*, melalui *channel* digital berupa *email blasting* kepada seluruh pekerja, dan selama tahun 2023 Program *awareness*/pelatihan/sosialisasi Antikorupsi yang dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

1. Pembuatan pernyataan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik etika usaha/kerja, anti korupsi, anti suap serta pengendalian gratifikasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan audit internal SMAP 23-25 Agustus 2023 di satuan kerja yang masuk dalam *scope* sertifikasi SMAP.
3. *Sharing session* ke anak perusahaan dan SOR PGN di antaranya PGASOL, PLI, PGASCOM, dan Area Medan.
4. *Sharing session* ke perusahaan lain diantaranya PT Pelindo Solusi Logistik.
5. Mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Pengendalian Gratifikasi melalui *e-learning* KPK.

2. The signing of an integrity pact stating understanding of the bribery and corruption policy by all employees every year through the GOLS (GCG Online Systems) application.
3. Assessment of integrity aspects in the recruitment process for prospective Subholding Gas Employees and fit and proper tests in the Subholding Gas Employee promotion process.
4. Making an Integrity Pact for Promoted Subholding Gas Employees.
5. Making an Integrity Pact at every stage of the Procurement of Goods and Services for Prospective Goods and Service Providers as well as Users of Goods and Services.
6. Making an Integrity Pact for Managers of the Procurement of Goods and Services.
7. Showing Socialization Videos related to Quality, HSSE, and Anti-Bribery Policies in each process of selecting goods/service providers in the Pre-Bid Meeting and Clarification & Negotiation Meeting stages.
8. Overseeing the implementation of the procurement of goods and services that are free of Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as Bribery, as outlined in the Preparation of Minutes of Investigation and Minutes of Work Handover.
9. Implementing the SMAP ISO 37001:2016 by conducting the Anti-Bribery Compliance Function Review on December 29, 2023.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ SOSIALIZATION

Every year, PGN routinely conducts anti-corruption awareness campaigns, anti-bribery, gratification control, fraud, through digital channels in the form of email blasting to all employees, and during 2023 Anticorruption awareness/training/socialization programs implemented by the Company, among others:

1. Made a statement of commitment to implementing good corporate governance, business/work ethics, anti-corruption, anti-bribery, and gratification control for the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Conducted an internal audit of SMAP on August 23–25, 2023, in work units within SMAP certification.
3. Conducted sharing sessions with PGN subsidiaries and SORs, including PGASOL, PLI, PGASCOM, and Medan Area.
4. Sharing sessions with other companies, including PT Pelindo Solusi Logistik.
5. Participated in activities to improve understanding of gratification control through KPK e-learning.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Gratification Control

Pengendalian gratifikasi merupakan komitmen Perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PGN memiliki dan menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi sesuai Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi No. P-004/0.11 dan ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 15 September 2021. Kebijakan tersebut menjadi dasar penerapan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja, pencegah benturan kepentingan serta pencegah kecurangan.

Controlling gratification shows the company's commitment to implementing good corporate governance principles. PGN has and implements appropriate Conflict of Interest and Gratification Control Policies in accordance with the President Director's Guidelines for Conflicts of Interest and Gratification Control No. P-004/0.11 dated September 15, 2021. The policy serves as the foundation for implementing gratification control in order to encourage the practice of business and work ethics, as well as to prevent conflicts of interest and fraud.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pengelolaan Gratifikasi melalui Tim UPG, semula berada di Satuan Kerja Audit Internal, di mana terdapat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tim tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Tugas No. 004000.ST/PW/IAU/2023 tertanggal 28 Februari 2023 dengan masa tugas tim terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Namun berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nomor 051300.ND/OT.00.00/PDO/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Pemberitahuan Pengalihan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi dari Satuan Kerja *Internal Audit* ke Satuan Kerja *Legal Counsel and Compliance*, terhitung tanggal 1 November 2023 pengelolaan pengendalian gratifikasi kemudian dialihkan dari Satuan Kerja Audit Internal ke Satuan Kerja *Legal Counsel and Compliance* (LCC).

Pengalihan tersebut bertujuan agar peran Satuan Kerja Audit Internal sebagai fungsi yang menjalankan *third lines of defense* menjadi lebih independen dan objektif.

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi.

Berdasarkan Pedoman tersebut, UPG akan menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG baik yang dalam penanganan maupun tindak lanjut penetapan kepemilikan dan pemanfaatan gratifikasi kepada KPK secara berkala setiap bulan. Selain itu, UPG menyampaikan laporan perkembangan dan evaluasi hasil implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di

GRATIFICATION MANAGEMENT

Gratification Management through the UPG Team, originally part of the Internal Audit Work Unit, specifically the Gratification Control Unit Team. The team was established based on Assignment Letter No. 004000.ST/PW/IAU/2023 on December 28, 2023, and served from January 1, 2023, to December 31, 2023.

However, on 1 November 2023, based on the Official Memorandum of the President Director of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Number 051300.ND/OT.00.00/PDO/2023 dated 1 November 2023 regarding Notification of the Transfer of Gratification Control Management from the Internal Audit Work Unit to the Legal Counsel and Compliance Work Unit, starting from 1 November 2023, the gratification control management was then transferred from the Internal Audit Work Unit to the Legal Counsel and Compliance (LCC) Work Unit.

This transfer aims to make the role of the Internal Audit Work Unit as a function that carries out the third line of defense more independent and objective.

The Gratification Control Unit Team has duties as stated in the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines.

Based on these guidelines, GCU will submit a recapitulation report on the handling of reports on receiving gratification managed by GCU, both in handling and following up on determining the ownership and utilization of gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK) on a monthly basis. In addition, GCU submits progress reports and evaluates the results of the implementation of the Gratification Control

lingkungan perusahaan kepada Direksi secara berkala setiap bulan.

ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja PGN mengatur Etika Kerja Menerima dan Memberi Hadiah adalah sebagai berikut:

1. Perwira Subholding Gas tidak menerima hadiah/cendera mata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:
   a. Menerima *hospitality* dalam bentuk jamuan makan dalam suatu acara yang berlaku umum.
   b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang berlaku umum dan bukan dimaksud untuk menyuap.
2. Perwira Subholding Gas dapat memberikan hadiah/cendera mata/gratifikasi dan *hospitality* kepada pihak lain dengan syarat:
   a. Menunjang kepentingan Perusahaan.
   b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap.
   c. Telah di rencanakan atau dianggarkan oleh Perusahaan.

Penjabaran lebih lengkap terkait penerimaan dan pemberian Hadiah dijelaskan dalam Kebijakan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2023

PGN dengan tegas melarang penerimaan gratifikasi yang juga disampaikan pada *website* Perusahaan. Setiap pihak yang mengetahui adanya Perwira Subholding Gas yang memberikan/menerima hadiah atau gratifikasi kepada/dari *stakeholders* dengan mengatasnamakan pribadi maupun PGN, dapat melaporkan kepada Perusahaan melalui *Whistleblowing System*. Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi di Perusahaan yang telah dilaporkan ke KPK dan telah mendapatkan penetapan status oleh KPK.

BUDAYA ANTI GRATIFIKASI

PGN menanamkan budaya anti gratifikasi kepada seluruh Perwira Subholding Gas melalui berbagai cara, di antaranya:

1. *E-mail blast* GCG "Perwira Subholding Gas tidak menerima hadiah/cendera mata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya".
2. Surat Edaran No. 013000. SE/PW/P00/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Hadiah Terkait Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang merupakan

Program within the Company to the Board of Directors periodically every month.

ETHICS RELATED TO GRATIFICATION

PGN's Code of Business Ethics and Work Ethics regulates Work Ethics in Receiving and Giving Gifts as follows:

1. Subholding Gas Employees do not accept gifts/souvenirs/gratification in any form related to their position or work, except:
   a. Receiving hospitality in the form of a banquet at a certain event that is generally accepted.
   b. Receiving promotional items that include the logo/name of the giving company, which is generally accepted and is not intended to be bribery.
2. Subholding Gas Employees may give gifts/souvenirs/gratification and hospitality to other parties under the following conditions:
   a. Supporting the interests of the Company.
   b. Not intended as a bribery.
   c. Has been planned or budgeted by the Company.

A detailed description of the acceptance and giving of gifts is stipulated in the Conflicts of Interest and Gratification Control Policy.

GRATIFICATION CONTROL REPORT 2023

PGN strictly prohibits receiving gratification which is also conveyed on the Company's website. Any party who is aware of any Gas Subholding Employee giving/receiving gifts or gratification to/from stakeholders on behalf of themselves or PGN, can report it to the Company through the Whistleblowing System. In 2023, there was 1 (one) gratification report in the Company which had been submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) and had obtained status by the Corruption Eradication Committee.

ANTI-GRATIFICATION CULTURE

PGN instills an anti-gratification culture among all Gas Subholding Employees through various means, including:

1. GCG email blast "Gas Subholding Employees do not accept gifts/souvenirs/gratification in any form related to their work."
2. Circular No. 013000. SE/PW/P00/2023 dated 12 April 2023 on Prohibition of Accepting and/or Giving Gifts Related to Religious Holidays or Other Holiday Celebrations for Board of Directors, Board of Commissioners and Employees within PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which is a form

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Gratification Control

bentuk komitmen Perwira Subholding Gas untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

3. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi telah melaksanakan sosialisasi kepada Perwira Subholding Gas dan *refreshment* terkait pengendalian gratifikasi kepada Satuan Kerja dan Anak Perusahaan dalam setiap Rapat Pembukaan Audit. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi juga mengkoordinasikan pelaksanaan pengisian Surat Pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun oleh seluruh Pekerja di lingkungan Subholding Gas.

commitment of Gas Subholding Employees to refuse gratification in any form.

3. The Gratification Control Unit Team has conducted outreach to Gas Subholding Employees and refreshments regarding gratification control to Work Units and Subsidiaries at each Opening Audit Meeting. The Gratification Control Unit Team also coordinates the implementation of filling out Statement Letters regarding rejection, acceptance and/or giving of Gratification periodically 2 (two) times a year by all Employees in the Gas Subholding entity.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM

Perwira Subholding Gas berkomitmen untuk senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, terutama informasi yang belum dipublikasikan. Setiap Perwira Subholding Gas, yang dalam pekerjaannya memiliki akses ke informasi rahasia, dilarang untuk menggunakan atau berbagi informasi tersebut untuk tujuan lain kecuali untuk kepentingan Perusahaan.

Seluruh informasi tentang Perseroan yang belum dipublikasikan dianggap sebagai informasi rahasia atau sebagai Informasi Orang Dalam. Jika informasi tersebut disalahgunakan, khususnya terkait perdagangan efek, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang dalam (*insider trading*). *Insider trading* dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja No. P-002/A014 Perwira Subholding Gas memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang lebih memadai;
2. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
3. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja;
4. Menjaga kerahasiaan informasi dan data tentang pelanggan maupun jaringan/infrastruktur Perseroan serta data-data atau informasi lainnya yang dianggap informasi rahasia oleh Perseroan.

PREVENTION AGAINST INSIDER TRADING

Gas Subholding Employees are committed to maintaining the confidentiality of Company information, especially ones that have yet been published. Every Gas Subholding Employee, who has access to confidential information, is prohibited from using or sharing such information for other purposes except for the interests of the Company.

All information about the Company that has yet been published shall be considered confidential information or as Insider Information. This information, when abused, especially regarding securities trading, may be categorized as insider trading. Insider trading is prohibited by provisions laws and regulations.

Based on Business Ethics and Work Ethics Guidelines No. P-002/A014, Gas Subholding Employees utilize Company data and information to improve its added value and decision making process by:

1. Using a more adequate data security system;
2. Preventing disseminating data and information to other unauthorized parties during and after their employment period;
3. Submit all data relating to the Company upon termination of employment;
4. Maintaining the confidentiality of information and data on customers and the Company's network/ infrastructure as well as other data or information deemed confidential by the Company.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Officials' Wealth Reports

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

PGN memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Direksi No. 012800.K/KP.00/HCGS/2017 tanggal 29 September 2017 dan Surat Keputusan Direktur Direksi PT Pertamina (Persero) Nomor: No. Kpts-03/C00000/2021-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Anak Perusahaan. Kebijakan ini mengatur pejabat di lingkungan PGN yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK, sanksi bagi wajib lapor yang tidak mengisi, melaporkan dan menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan koordinator unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN.

WAJIB LAPOR LHKPN

Pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN berdasarkan Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan, yaitu:

a. Direksi dan Dewan Komisaris PGN
b. Pekerja PGN setingkat PRL 13 sampai dengan 24
c. Pekerja PGN yang diperbantukan di Anak Perusahaan/Afiliasi termasuk yang ditugaskan sebagai Direktur Anak Perusahaan/Afiliasi

PENGELOLA LHKPN PGN

Pelaksanaan pelaporan LHKPN di PGN dikelola oleh unit Pengelolaan e-LHKPN dengan menunjuk Pejabat Struktural sebagai Koordinator Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan e-LHKPN yang berada pada *Human Capital Management Division*.

PELAKSANAAN LHKPN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terdapat pelaksanaan pendampingan pengisian dan bimbingan teknis terkait LHKPN. Kegiatan tersebut dilakukan pada periode Januari sampai Maret 2023 oleh *Human Capital Management Division*. Informasi tingkat kepatuhan Pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN telah ditampilkan pada *website* Perusahaan bagian e-LHKPN. Hingga Desember 2023, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayawan pejabat PGN sebesar 100%.

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORTS (LHKPN) SUBMISSION AND MANAGEMENT POLICY

PGN has and implements a policy regarding compliance with the reporting of assets of state officials based on the Decree of the Board of Directors No. 012800.K/KP.00/HCGS/2017 dated September 29, 2017 and Decree of the Director of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) Number: No.Kpts-03/C00000/2021-S0 concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and Subsidiaries. This policy regulates officials within PGN who are obliged to fill in and submit LHKPN to KPK, sanctions for reporters who do not fill in, report and submit LHKPN according to the predetermined time limit, and unit coordinators responsible for LHKPN management activities.

LHKPN COMPULSORY REPORT

Based on State Official's Wealth Report Policy, officals who are required to complete and report their wealth are:

a. PGN Board of Directors and Board of Commissioners
b. PGN employees at PRL 13 to 24 levels
c. PGN employees who are seconded to Subsidiaries/Affiliates including those assigned as Directors of Subsidiaries/Affiliates

PGN LHKPN MANAGEMENT

The implementation of LHKPN reporting in PGN is managed by the e-LHKPN Management unit by appointing a Structural Official as the Unit Coordinator responsible for e-LHKPN management in the Human Capital Management Division.

LHKPN IMPLEMENTATION IN 2023

In 2023, there was an implementation of assistance in filling out and technical guidance regarding LHKPN. This activity was conducted in the period January to March 2023 by the Human Capital Management Division. Information on the compliance level of officials who are required to fill out and report the LHKPN has been displayed on the Company's e-LHKPN website. As of December 2023, the compliance rate for reporting the PGN officials' assets is 100%.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

PGN menerapkan sistem manajemen risiko dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023 terutama pada BAB III Penerapan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.

Mengacu pada peraturan Menteri BUMN di atas, sistem manajemen risiko yang diimplementasikan oleh PGN bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan melalui langkah-langkah:
- Penetapan kebijakan manajemen risiko;
- Perencanaan, penerapan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan; dan
- Proses pelaporan manajemen risiko baik kepada Pertamina selaku Holding Migas maupun Direksi dan Komisaris PGN sebagai manajemen puncak Perusahaan.

PGN implements a risk management system guided by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises which were stipulated on 3 March 2023, especially in CHAPTER III Risk Management Implementation for State-Owned Enterprises.

Referring to the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) regulations above, the risk management system implemented by PGN aims to protect and create value for the Company through the following steps:
- Determination of risk management policy;
- Planning, implementation, monitoring and evaluation of the Company's risk management implementation; And
- Risk management reporting process to both Pertamina as the Oil and Gas Holding and the Directors and Commissioners of PGN as the Company's top management.

PROFIL DIVISION HEAD RISK MANAGEMENT

PROFILE OF DIVISION HEAD RISK MANAGEMENT

Eri Surya Kelana



PROFIL	PROFILE
• Warga Negara Indonesia, lahir di Padang pada 21 Maret 1971. Usia 52 tahun. Domisili di Jakarta.	• Indonesian citizen, born in Padang on March 21, 1971. 52 years old. Domiciled in Jakarta.
• Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan program Master Ilmu Administrasi pada Universitas Indonesia.	• Graduated from Trisakti University with Bachelor's Degree in Accounting and received a Master degree of Administrative Studies from University of Indonesia.
• Riwayat pekerjaan: Pada tahun 1997 beliau memulai kariernya di PGN. Sejumlah posisi penting dicapai beliau di antaranya sebagai Kepala Divisi Akuntansi pada tahun 2010 – 2011, Direktur Keuangan PT Saka Energi Indonesia di tahun 2011 – 2013, Direktur Keuangan & Administrasi PT PGN LNG Indonesia tahun 2013 – 2017, *Senior Officer Taxation* PGN (2017 – 2019), Direktur Keuangan & Administrasi PT Gagas Energi Indonesia di tahun 2019 – 2021, *Group Head Treasury* PGN tahun 2021 – 2022 dan Group/Division Head Risk Management PGN mulai bulan April 2022 hingga saat in.	• Work experience: In 1997 he started his career at PGN. He assumed a number of important positions, including Head of Accounting Division in 2010 - 2011, Finance Director of PT Saka Energi Indonesia in 2011 - 2013, Director of Finance & Administration of PT PGN LNG Indonesia in 2013 - 2017, Senior Officer Taxation PGN (2017 - 2019), Director of Finance & Administration of PT Gagas Energi Indonesia in 2019 – 2021, Group Head Treasury PGN in 2021 – 2022 and Group/Division Head Risk Management PGN from April 2022 until now.
• Sertifikasi yang dimiliki: Certified Risk Professional (Manajemen Risiko Utama) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).	• Certification: Certified Risk Professional (Primary Risk Management) by the National Professional Certification Agency.

TUGAS SATUAN KERJA RISK MANAGEMENT

Tugas satuan kerja Risk Management terkait dengan fungsi implementasi manajemen risiko Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi PGN No. 061100.K/KU/FIN/2023 tentang Tata Kerja Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko tanggal 27 November 2023 antara lain:

1. Mengelola strategi, kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko Perusahaan serta pelaksanaan dan pengelolaan risiko termasuk kegiatan *advisory* dan konsultasi atas implementasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan PGN dan Subholding Gas *Group*;
2. Mengelola profil risiko Korporat, melakukan *challenge session* atau FGD serta merumuskan risiko utama (*top risk*) PGN dan Subholding Gas *Group*;
3. Memonitor implementasi *risk treatment* sesuai dengan *acceptable residual risk level* PGN;
4. Mengelola pelaksanaan perhitungan, penyusunan, dan *cascading* Batas Toleransi Risiko (BTR) kepada Satuan Kerja dan Anak Perusahaan/Afiliasi;
5. Mengelola level maturitas implementasi manajemen risiko termasuk program budaya sadar risiko Subholding Gas *Group*;
6. Melakukan penyelarasan kebijakan dan implementasi manajemen risiko *ongoing business*, Proyek/Investasi, *strategic* dan finansial dengan Kebijakan Holding Migas;
7. Melakukan analisa risiko *deterministic* dan *stocasthic* dalam perhitungan keekonomian (NPV/IRR);
8. Melakukan analisa risiko keuangan, dan analisa kemampuan finansial calon partner, buyer maupun pelanggan korporat dan industri sebagai bagian dari asesmen risiko;
9. Melakukan perhitungan, monitoring dan *update premium rate* yang digunakan dalam perhitungan *hurdle rate* Subholding Gas *Group*;
10. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Risiko sebagai *tools* yang digunakan dalam implementasi proses manajemen risiko dan pengelolaan risiko yang terintegrasi di Subholding Gas *Group*; dan
11. Menyusun laporan manajemen risiko kepada Direksi, ERM Pertamina, maupun *Stakeholder* lainnya yang terkait.

Selanjutnya untuk mendukung tugas-tugas tersebut, satuan kerja *Risk Management* menjalankan proses bisnis yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PGN No. 014600.K/OT.00/FIN/2023 tanggal 05 April 2023, antara lain:

- *Risk Assessment* (Project/Investasi & Finansial) pada '*Select Phase*'.
- *Risk Assessment* (Project/Investasi & Finansial) pada *'Define Phase*'.

RISK MANAGEMENT WORKING UNIT DUTIES

Risk Management working unit related to the Company's risk management implementation function as stipulated in the PGN Directors Decree Number 061100.K/KU/FIN/2023 concerning Work Procedures of the Directorate of Finance and Risk Management dated November 27, 2023, including:

1. Managing the Company's risk management strategy, policies, procedures and systems as well as implementation and risks management, including advisory and consulting activities on the implementation of risk management policies within PGN and the Gas Subholding Group;
2. Managing corporate risk profiles, conducting challenge sessions or FGDs and formulating top risks of PGN and Subholding Gas Group;
3. Monitoring the implementation of risk treatment in accordance with PGN's acceptable residual risk level;
4. Managing the implementation of calculations, preparation and cascading of Risk Tolerance Limits for Working Units and Subsidiaries/Affiliates;
5. Managing the maturity level of risk management implementation including the Gas Subholding Group's risk awareness culture program;
6. Aligning policies and implementation of ongoing business, project/investment, strategic and financial risk management with the Oil and Gas Holding Policy;
7. Performing deterministic and stochastic risk analysis in economic calculations (NPV/IRR);
8. Conducting financial risk analysis, and analyzing the financial capacity of prospective partners, buyers and corporate and industrial customers as part of the risk assessment;
9. Calculating, monitoring and updating the premium rate used in calculating of the Gas Subholding Group's hurdle rate;
10. Managing Risk Management Information System as a tool used in implementing of integrated risk management and risk management processes in the Gas Subholding Group; And
11. Preparing risk management reports for the Board of Directors, Pertamina ERM, and other related stakeholders.

Furthermore, to support these duties, the Risk Management working unit carries out business processes established by PGN Directors Decree Number 014600.K/OT.00/FIN/2023 dated 5 April 2023, including:

- Risk Assessment (Project/Investment & Financial) in the 'Select Phase'.
- Risk Assessment (Project/Investment & Financial) in the 'Define Phase'.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

- *Risk Monitoring* (Project/Investasi) pada '*Execute Phase*'.
- *Risk Assessment* dan *Risk Monitoring* (*Ongoing Business*) pada 'Operate *Phase*'.

TUGAS DAN FUNGSI *RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM*

Dalam rangka penerapan pengelolaan risiko untuk masing-masing satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN, maka pemilik risiko (*risk owner*) perlu dibantu *Risk Management Champions Team* (RCT) dalam melaksanakan proses manajemen risiko.

RCT merupakan personel-personel terpilih, cakap dan mampu untuk bertugas berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 009203.K/PR.06.01/FIN/2023 tanggal 23 Februari 2023. Adapun tugas RCT antara lain :

- Menjalankan fungsi manajemen risiko dengan cara melakukan koordinasi dan memfasilitasi proses manajemen risiko (penentuan konteks, kriteria, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring*, kaji ulang, konsultasi, dokumentasi, melaporkan serta komunikasi) yang dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*);
- Melakukan pemantauan atas besaran biaya pengendalian risiko (*cost of risk*) yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/ Afiliasi PGN dan menetapkan metode untuk pengukuran efisiensi dan efektivitas biaya pengendalian risiko tersebut dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai;
- Dengan persetujuan dari pemilik risiko (*risk owner*), melaporkan pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fungsi Risk Management selaku Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan melaporkannya secara periodik maupun sewaktu-waktu jika diperlukan oleh SKMR;
- Melaporkan pemantauan pelaksanaan penanganan risiko pada Satuan Kerja PGN atau Anak Perusahaan/ Afiliasi PGN secara berkala. Untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan kategori *'Low'*, '*Low to Moderate*', *'Moderate'*, dan '*Moderate to High*' dilakukan monitoring melalui laporan triwulanan untuk kategori *'High'* monitoring dilakukan minimal sekali dalam setiap bulannya atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Manajemen PGN maupun SKMR. Untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan dengan kategori *Top Risk* diatur dalam ketentuan terpisah.

- Risk Monitoring (Project/Investment) in the 'Execute Phase'.
- Risk Assessment and Risk Monitoring (Ongoing Business) in the 'Operate Phase'.

RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM DUTIES AND FUNCTIONS

In the context of implement risk management for each working unit in PGN and PGN's subsidiaries/ affiliates, the risk owner should be assisted by the Risk Management Champions Team (RCT) in conducting the risk management process.

RCT s are selected and capable personnel qualified to serve based on PGN Directors Decree No. 009203.K/ PR.06.01/FIN/2023 dated 23 February 2023. The duties of the RCT include:

- Implementing the risk management function by coordinating and facilitating the risk management process (determining context, criteria, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk handling, monitoring, review, consultation, documentation, reporting and communication) conducted by the risk owner;
- Monitoring the amount cost of risk control required by Working Units at PGN or PGN Subsidiaries/ Affiliates and determine methods for measuring the efficiency and effectiveness of cost of risk control compared to the results that have been achieved;
- With the approval of the risk owner, reporting the implementation of risk management in the Working Unit at PGN or PGN Subsidiary/Affiliate by utilizing the information system application in accordance with the provisions stipulated by the Risk Management function as the Risk Management Working Unit and report it periodically or at any time if required;
- Reporting the implementation monitoring of risk management in PGN Working Units or PGN Subsidiaries/Affiliates on a regular basis. To monitor the implementation of risk management in the 'Low', 'Low to Moderate', 'Moderate', and 'Moderate to High' categories, the monitoring is conducted through quarterly reports. For the 'High' category, monitoring is carried out at least once a month or as determined by PGN Management and Risk Management Working Units. Monitoring the implementation of risk management with the Top Risk category is regulated in separate provisions.

Untuk tahun 2023 terdapat penambahan peran RCT sebagai *Implementator* BCMS yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kapabilitas dalam penyusunan, evaluasi dan pembaruan dokumen (kertas kerja) dan dokumen pendukung lainnya dalam implementasi dan pengelolaan *Business Continuity Management System* (BCMS) berdasarkan ISO 22301:2019.

IMPLEMENTASI *FRAMEWORK* ISO 31000:2018

Perusahaan terus mengikuti perkembangan dan pemutakhiran konsep, prosedur dan pelaporan manajemen risiko, tidak hanya yang diterapkan oleh BUMN lainnya tetapi perusahaan-perusahaan lain yang lebih unggul dalam mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko.

Merujuk pada Survei Nasional Manajemen Risiko 2018 yang dilakukan '*Center for Risk Management Studies Indonesia*' (CRMS Indonesia), diketahui sekitar 67,5% perusahaan di Indonesia telah menerapkan ISO 31000 (versi 2009 maupun 2018) disusul COSO-ERM 15% dan standar lainnya 17,5%.

Secara keseluruhan ISO 31000 dapat digunakan luas pada berbagai industri, sebab sifat ISO 31000 tidak spesifik ditujukan untuk menyeragamkan implementasi manajemen risiko lintas perusahaan, tetapi memberikan standar pendukung acuan penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini menjadi landasan bagi Perusahaan untuk menerapkan standar ISO 31000:2018 dalam implementasi pengelolaan manajemen risiko kepada satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sejak tahun 2019 yang digunakan dalam rangka registrasi risiko, *monitoring* pemantauan risiko dan penyusunan profil risiko secara *online* dan *real-time* sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan manajemen atas risiko terkait aspek operasional maupun proyek/investasi serta monitoring yang dilakukan oleh Pertamina selaku Holding Migas.

Kemudian pada tahun 2020, PGN mengembangkan serta menyempurnakan SIMR baik untuk '*Ongoing Business Risk*' maupun '*Project Risk*', dengan tetap mengutamakan kemudahan penggunaan aplikasi SIMR oleh RCT maupun pemantauan *dashboard* SIMR oleh manajemen PGN. Peningkatan implementasi dan utilisasi SIMR untuk seluruh RCT baik dalam lingkup satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN juga didukung dengan ditetapkannya Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Instruksi Kerja.

In 2023, there was an additional role for RCT as a BCMS Implementer who assumes the duties, responsibilities and capabilities to prepare, evaluate and update documents (working papers) and other supporting documents in the implementation and management of the Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301:2019

IMPLEMENTATION OF ISO 31000:2018 FRAMEWORK

The Company continues to follow the development and updates of risk management concepts, procedures and reporting, not only those implemented by other State-Owned Enterprises but also by other companies deemed to have implemented better risk management.

The 2018 National Risk Management Survey conducted by the 'Center for Risk Management Studies Indonesia' (CRMS Indonesia) suggests that around 67.5% of companies in Indonesia have adopted ISO 31000 (2009 and 2018 versions), 15% COSO-ERM while the remaining 17.5% have adopted other standards.

Overall, ISO 31000 can be widely used in various industries, due to the nature of ISO 31000 that is not specifically aimed at uniforming the implementation of risk management across companies, but rather provides a standard supporting reference for the implementation of risk management to support the achievement of company goals. This is the basis for the Company to apply the ISO 31000:2018 standard in the Risk Management for working units implementation at PGN and PGN subsidiaries/affiliates.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT

The Company has implemented the Risk Management Information System since 2019 which is used for risk register, risk monitoring and risk profiles preparation by online and in real-time to facilitate management decision making on risks related to operational and project/investment aspects while monitoring is exercised by Pertamina as the Oil and Gas Holding Company.

Furthermore, in 2020, PGN developed and refined RMIS for both 'Ongoing Business Risk' and 'Project Risk', while still prioritizing ease of use of the RMIS application by RCTs and monitoring the dashboard by PGN management. Improving the implementation and utilization of SIMR for all RCTs both within the scope of work units at PGN and PGN's subsidiaries/affiliates, is also supported by the establishment of Work Reference Documents in the form of Work Instructions.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

Pada tahun 2022, pengembangan dan penyempurnaan SIMR '*Ongoing Business Risk*' maupun '*Project Risk*' kembali dilakukan dengan konsentrasi pada penambahan fitur dan *tools* yang dapat melengkapi implementasi dan utilisasi SIMR seperti fungsi *auto-generate database*.

In 2022, the SIMR 'Ongoing Business Risk' and 'Project Risk' was further developed and improved with a concentration on the adition of more features and tools that complement the current implementation and utilization of SIMR, such as the auto-generate database function.

Selanjutnya pada perkembangannya di tahun 2023, Pertamina selaku Holding Migas memberikan arahan strategis inisiatif untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi yaitu *Enterprise Risk Management Systems* versi 2.0 (ERMS 2.0) baik untuk risiko yang dimiliki oleh satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN. Sehingga pada tahun 2023 pelaporan manajemen risiko PGN dan Pertamina telah terintegrasi dengan sempurna dan efektif dalam satu tahun anggaran.

Moreover, as things were progressing in 2023, Pertamina as the Oil and Gas Holding gave strategic direction for the initiative to implement an integrated risk management information system, referred to as Enterprise Risk Management Systems version 2.0 (ERMS 2.0), for risks in working units at PGN and PGN subsidiaries/ affiliates. Therefore, in 2023 PGN and Pertamina's risk management reporting was completely and effectively integrated in one budget year.

Pada tahun 2023, fungsi *Risk Management* PGN juga mengembangan Sistem Database Manajemen Risiko (DAMARA) sebagai salah satu inovasi yang ditujukan untuk mengelola digitalisasi surat, dokumen kajian risiko dan dokumen pendukung lainnya dalam memastikan kemudahan pencarian arsip yang diperlukan oleh Manajemen Puncak.

In 2023, PGN's Risk Management function also developed the Risk Management Database System as one of the innovations aimed at managing the digitization of letters, risk assessment documents and other supporting documents for Top Management to search with ease.



EVALUASI ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO
PGN sebagai Subholding Gas telah menerapkan penilaian maturitas pengelolaan manajemen risiko pada tahun 2022, menggunakan metodologi yang ditetapkan dalam '*Pertamina Risk Maturity Self- Assessment*' (PRISMA).

RISK MANAGEMENT SYSTEM EVALUATION
PGN as Subholding Gas has implemented a risk management maturity assessment in 2022, using the methodology specified in the 'Pertamina Risk Maturity Self-Assessment' (PRISMA).

Pada metode ini, parameter yang diukur mengadopsi 3 (tiga) pilar ISO 31000:2018, yaitu *Principles, Framework* dan *Process*. Pada parameter *Principles*, aspek yang diukur terkait keselarasan pengelolaan risiko dengan perencanaan strategis dan *performance management*. Sementara pada parameter *Framework*, aspek yang diukur adalah terkait kebijakan dan *tools* serta metode dalam pengelolaan risiko. Kemudian pada parameter *Process*, aspek yang diukur adalah terkait implementasi pengelolaan risiko.

Berdasarkan hasil penilaian dan pengukuran yang telah dilakukan oleh para *assessor* serta mempertimbangkan hasil konsolidasi dan validasi maupun *management's concern*, PGN ditetapkan berada pada tingkat maturitas "*Managed*" atau Level 4 dari 5 (lima) level maturitas pengelolaan risiko dengan skor *Risk Maturity Index* (RMI) sebesar 4.18.

Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan monitoring dan perbaikan atas peluang perbaikan (OFI) yang telah dipetakan dalam laporan pelaksanaan PRISMA sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian *Risk Maturity Index* (RMI) agar lebih optimal pada pelaksanaan evaluasi maturitas risiko berikutnya di tahun 2024.

ROADMAP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Integrasi dan implementasi kebijakan pengelolaan risiko di Perusahaan diharapkan mencapai level optimal. Hal tersebut memerlukan proses dan implementasi dalam jangka waktu cukup panjang dan senantiasa dievaluasi atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan.

In this method, the measured parameters adopt the 3 (three) ISO 31000:2018 pillars, namely Principles, Framework and Process. In the Principles parameters, the measured aspects are related to the alignment of risk management with strategic planning and performance management. Meanwhile, in the Framework parameters, the measured aspects are related to policies and tools as well as methods in risk management. Then in the Process parameter, the measured aspect is related to the implementation of risk management.

Based on the results of assessment and measurement conducted by assessors and considering the results of consolidation and validation as well as management's concerns, PGN is determined to be at the "Managed" maturity level or Level 4 of 5 (five) of risk management maturity levels with a Risk Maturity Index (RMI) score. of 4.18.

Furthermore, in 2023 monitoring and improvements was carried out on opportunities for improvement (OFI) which were mapped in the previous PRISMA implementation report. This aims to increase the achievements of the Risk Maturity Index (RMI) so that it is more optimal during the implementation of the next risk maturity evaluation in 2024.

RISK MANAGEMENT ROADMAP

The integration and implementation of risk management policies in the Company is expected to reach optimal level. This requires a process and implementation in a long period of time and is constantly evaluated for the achievements that have been made.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

Pasca dilakukannya pengukuran PRISMA tahun 2022, selanjutnya ditetapkan *Opportunity For Improvement* (OFI) dan *Action For Improvement* (AFI) sebagai bagian dari *Roadmap* Pengelolaan Manajemen Risiko perusahaan secara berkesinambungan.

Following the successful PRISMA measurements in 2022, Opportunity For Improvement (OFI) and Action For Improvement (AFI) were determined as part of the company's continuous Risk Management Roadmap.

SERTIFIKASI PERSONEL
Penyusunan dan pengawasan profil risiko memerlukan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami proses pengelolaan risiko mulai tahap identifikasi hingga penanganan risiko secara optimal. Hingga akhir tahun 2023, PGN telah memiliki beberapa personel yang memiliki sertifikasi manajemen risiko, antara lain:

PERSONNEL CERTIFICATION
Preparing and monitoring risk profiles require human resources with strong comprehension of the entire risk management process from the identification stage to running an optimum risk management. By the end of 2023, PGN has certified personnel in risk management certification, as listed below:

Sertifikasi Personel Manajemen Risiko
Risk Management Personnel Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Eri Surya Kelana	Division Head, Risk Management	Certified Risk Professional oleh BNSP Certified Risk Professional by BNSP
Rezki Anindhito	Principal Expert I, Business Support Risk Management	
Aristeus L. Saleppang	Principal Expert I, Risk Management Implementation	
M. Rofiq Arrosyid	Principal Expert I, Business Support Risk Management	
Diana Yulianty	Sr. Expert II, Business Support Risk Management	
Devi Damayanti	Sr. Expert II, Business Support Risk Management	
Leli Mulyani	Sr. Expert I, Risk Management Implementation	
Armynas Handyas	Sr. Analyst II, Business Support Risk Management	
Puji Arman	Sr. Analyst II, Risk Management Implementation	
Bima Satria Agung	Sr. Analyst I, Risk Management Implementation	
Heru Setiawan	Analyst II, Risk Management Implementation	
Kevin Situmeang	Assistant, Business Support Risk Management	

PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Selama tahun 2023, PGN sebagai Subholding Gas mengelola risiko korporat terintegrasi yang meliputi risiko dari masing-masing satuan kerja di PGN maupun risiko yang berasal dari anak perusahaan/afiliasi PGN.

Pelaporan dan *monitoring* pengelolaan risiko korporat disampaikan kepada Pertamina dan Manajemen Puncak PGN dalam bentuk '*Top Risk Subholding Gas 2023*' dengan periode *monitoring* yang dilakukan dalam jangka waktu 1 kali dalam sebulan secara berkesinambungan.

RISK MANAGEMENT IN THE COMPANY

Throughout 2023, PGN as Gas Subholding managed integrated corporate risks which covered risks of each working unit in PGN as well as risks originating from PGN's subsidiaries/affiliates.

Corporate risk management reporting and monitoring is submitted to Pertamina and PGN Top Management in the form of 'Top Risk Gas Subholding 2023' with a monitoring period carried out once a month on an ongoing basis.

Proses penetapan *top risk* tersebut dilakukan menggunakan mekanisme identifikasi dan analisis 2 (dua) arah yaitu *top-down* dan *bottom-up* atas *all-risk* yang telah diregistrasi oleh pemilik risiko (*risk owner*). *All-risk* tersebut selanjutnya dilakukan seleksi kandidat *top risk* dengan menggunakan skema *funneling process* meliputi *treshhold, self-asesssment, sorting, scoring* dan *clustering,* yang selanjutnya kandidat *top risk* akan disahkan oleh Dewan Komisaris Subholding Gas sebagai *Top Risk Subholding Gas 2023* dalam buku RKAP 2023.

Penjabaran *Top Risk* Korporat Subholding Gas 2023 untuk kategori '*Ongoing Business*' untuk risiko yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif adalah sebagai berikut:

Top Risk Ongoing Business – 2023:
1. *Top risk* terkait arbitrase
2. Peningkatan beban keuangan dampak sengketa pajak PGN *Group* terkait PPh, PPN untuk transaksi perusahaan dalam rentang waktu 2013 – 2020
3. Penurunan *gross margin* niaga gas sektor industri dan kelistrikan HGBT
4. Potensi penghapusan aset (*asset write-off*) pada blok *South* Sesulu
5. *Top Risk* terkait *review tariff* pada pipa transmisi PGN
6. Penurunan *gross margin* niaga gas
7. Tidak optimalnya pemanfaatan pembayaran uang muka pembelian gas
8. Kehilangan/kerusakan/kebocoran data pada sistem komputer *database* Perusahaan
9. Transaksi jual beli LNG yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan kontrak
10. Terjadinya pelanggaran pedoman HSSE

Top Risk Project – 2023:
1. Proyek pipanisasi Rokan
2. Proyek pembangunan pipa Senipah – Balikpapan
3. Proyek pembangunan pipa Gresik – Semarang
4. Proyek LNG Jatim
5. Proyek Pembangunan Jargas (Bekasi Selatan, Pasar Kemis, Periuk dan Bintaro)

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Struktur Tata Kelola manajemen risiko di PGN adalah sebagai berikut:

a. Secara struktur organisasi, fungsi manajemen risiko berada pada satuan kerja *Risk Management* dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja setingkat *Division Head* yang secara nomenklatur berada di bawah naungan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan pada Keputusan Direksi PGN No. 009201.K/OT.0/PDO/2022 tanggal 01 Maret 2022.

The top risk determination process was conducted using a 2 (two) way identification and analysis mechanism, namely top-down and bottom-up for all-risk registered by the risk owner. The all-risk candidates were then selected using a funneling process scheme including threshold, self-assessment, sorting, scoring and clustering, after which the top risk candidates were ratified by the Gas Subholding Board of Commissioners as the 2023 Gas Subholding Top Risk in the 2023 Company Work Plan and Budget.

The description of the 2023 Corporate Gas Subholding Top Risks for the 'Ongoing Business' category for quantitative and qualitative risks is as follows:

Top Risks Ongoing Business 2023:
1. Top risks related to arbitrage
2. Increase in financial burden due to PGN Group tax disputes related to PPh, VAT for company transactions in the period 2013 – 2020
3. Decrease in the gross margin of gas trading in the HGBT industrial and electricity sectors
4. Potential asset write-off in the South Sesulu block
5. Top Risk related to tariff review on PGN transmission pipes
6. Decrease in gas trading gross margin
7. Utilization of advance payments for gas purchases was not optimal
8. Loss/damage/leakage of data on the Company's database computer system
9. LNG sale and purchase transactions that cannot be carried out in accordance with the contract
10. Violation of HSSE guidelines

Top Risk Project – 2023:
1. Rokan pipeline project
2. Senipah–Balikpapan pipeline construction project
3. Gresik–Semarang pipeline construction project
4. East Java LNG Project
5. Jargas Development Project (South Bekasi, Pasar Kemis, Periuk and Bintaro)

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

The risk management governance structure at PGN is as follows:

a. In terms of organizational structure, the risk management function is in the Risk Management working unit led by the Head of the Working whose nomenclature is under the Directorate of Finance and Risk Management based on PGN Directors Decree Number 009201.K/OT.0/PDO/2022 dated 01 March 2022.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

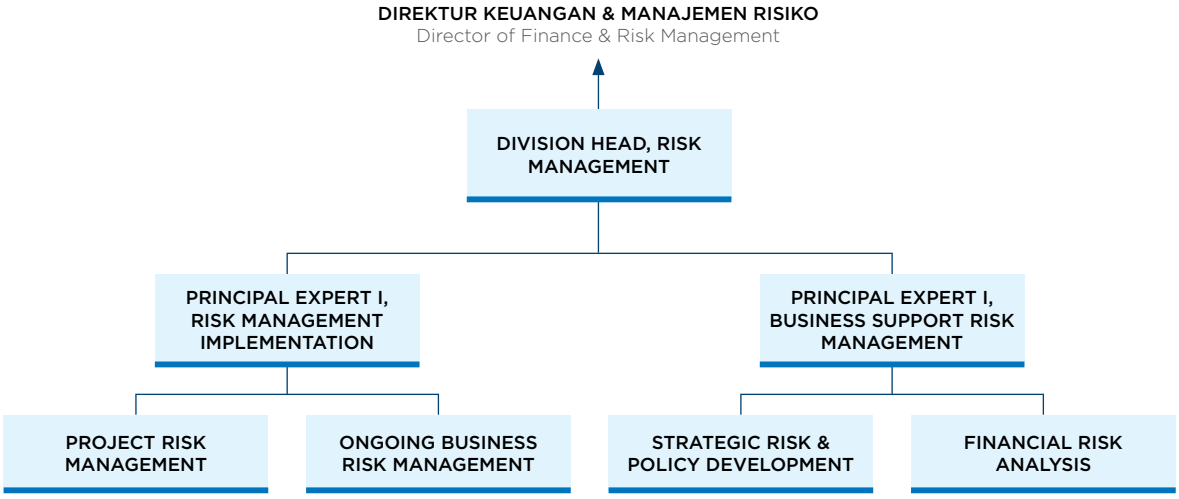

b. Terkait sistem pelaporan, fungsi manajemen risiko melaporkan pengelolaan manajemen risiko kepada Direktur Keuangan & Manajemen Risiko selaku '*Chief Risk Officer*' (CRO) berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 007301.K/PR.06.01/PDO/2021 yang diperbarui melalui Keputusan Direksi PGN No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 tentang 'Pembentukan Chief Risk Officer (CRO) dan Komite Manajemen Risiko' tanggal 16 Juli 2021.

b. Regarding the reporting system, the risk management function reports risk management to the Director of Finance & Risk Management as 'Chief Risk Officer' (CRO) based on PGN Directors Decree Number 007301.K/PR.06.01/PDO/2021 which was updated through PGN Directors Decree No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 concerning 'Establishment of a Chief Risk Officer (CRO) and Risk Management Committee' dated 16 July 2021.

Hingga saat ini PGN mengadopsi prinsip *Three Lines Model* sebagai acuan tata kelola pengelolaan risiko sejalan dengan pengelolaan risiko yang di-implementasikan oleh Holding Migas. Penerapan *three lines model* juga ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan responsibilitas masing-masing lini dalam menghadapi serta mengelola taksonomi risiko yang dihadapi Perusahaan.

Until now, PGN has adopted the Three Lines Model principle as a reference for risk management governance in line with the risk management implemented by Oil and Gas Holding. The application of the three lines model is also aimed at ensuring the accountability and responsibility of each line in facing and managing the taxonomy of risks faced by the Company.

PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN

Risk Management sebagai satuan kerja yang bertugas dalam mengelola manajemen risiko PGN pada tahun 2023 telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan *awareness* dan maturitas manajemen risiko Perusahaan melalui kegiatan sebagai berikut:

- *Upskilling* dan *Refreshment* Aplikasi ERMS 2.0 Pertamina di lingkup Subholding Gas;
- *Refreshment* Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 melalui *cross-sharing* dengan satuan kerja PGN lainnya maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelaksanaan *Sharing Session* mengenai BCMS ISO 22301:2019 kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;

PROGRAM TO IMPROVE COMPANY'S RISK AWARENESS CULTURE

Risk Management, as the working unit that has duties in managing PGN's risk management in 2023 has implemented several programs to improve awareness and maturity of the Company's risk management through the following activities:

- Upskilling and Refreshment of Pertamina's ERMS 2.0 Application in the Gas Subholding scope;
- Refreshment of Risk Management based on ISO 31000:2018 through cross-sharing with other PGN working units and PGN subsidiaries/affiliates;
- Implementation of a Sharing Session regarding Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301:2019 for RCTs at PGN working units and PGN subsidiaries/affiliates;

- Pembuatan *banner* Budaya Sadar Risiko sebagai artefak visual yang di-distribusikan kepada seluruh area kerja PGN;
- Pelaksanaan *Risk Management Forum* (RMF) Pertamina Across the Group pada bulan Agustus 2023 dengan tema '*Navigating Risks in the LNG Industry: Strategies for Success*';
- *Benchmark* pengelolaan risiko ke Holding Pupuk Indonesia;
- Pelaksanaan *Risk Management Forum* (RMF) di lingkup internal Subholding Gas;
- Penyelenggaraan Pembekalan dan Bedah Tuntas PER-2/MBU/03/2023 kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelatihan dan sertifikasi Auditor Internal BCMS ISO 22301:2019 lingkup Subholding Gas;
- Paparan implementasi *Living Core Values* (LCV) AKHLAK lingkup Pertamina Group tahun 2023;
- Pemberian RCT *Awards* dan BCMS *Awards* Tahun 2023; dan
- Pelaksanaan renewal c*ertification* CRP dan sertifikasi CRP oleh BNSP.

- Creation of a Risk Awareness Culture banner as a visual artifact to be distributed to all PGN work areas;
- Implementation of Risk Management Forum (RMF) Pertamina Across the Group in August 2023 with the theme 'Navigating Risks in the LNG Industry: Strategies for Success';
- Benchmark risk management for Pupuk Indonesia Holding;
- Implementation of the Risk Management Forum (RMF) within the internal scope of Gas Subholding;
- Organizing Complete Debriefing and Discussion on PER-2/MBU/03/2023 for RCTs at PGN working units and PGN subsidiaries/affiliates;
- Training and certification of Internal Auditors BCMS ISO 22301:2019 Gas Subholding scope;
- Exposure to the implementation of Living Core Values (LCV) AKHLAK within Pertamina Group in 2023;
- Presenting the 2023 RCT Awards and BCMS Awards; And
- Implementation of CRP certification renewal and CRP certification by BNSP.





IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS

Sepanjang tahun 2023, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada ketidakpastian dan ketidakstabilan, terutama akibat ketegangan geopolitik di Eropa Barat dan Timur Tengah yang secara tidak langsung mempengaruhi *supply demand* energi global bahkan hingga di regional Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, kinerja ekonomi dalam negeri mencatat pertumbuhan yang positif dan tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global meskipun dengan faktor ketidakpastian yang masih cukup tinggi dirasakan oleh industri domestik.

Menghadapi tantangan makroekonomi global dan nasional, PGN terus menerapkan sistem manajemen kelangsungan bisnis (*Business Continuity Management Systems*) atau Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

The global economic condition throughout 2023 was still marked with uncertainty and instability, especially due to geopolitical tensions in Western Europe and the Middle East which indirectly affected global energy supply and demand even in the Southeast Asia region, including Indonesia. In 2023, domestic economic performance recorded positive growth and remained strong amidst global economic challenges although certain industries here still experienced quite high levels of uncertainty.

Facing global and national macroeconomic challenges, PGN continues to implement Business Continuity Management Systems (BCMS) based on ISO 22301:2019 for one full cycle starting in 2022. Through this system,

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System

(SMKB) dengan mengacu pada ISO 22301:2019 untuk satu siklus penuh (*full cycle*) sejak tahun 2022. Melalui sistem ini, PGN senantiasa berusaha merumuskan kembali terkait risiko-risiko yang dihadapi ke depannya. Termasuk pada risiko *ongoing business* maupun proyek/ investasi strategis perusahaan hingga anak perusahaan/ afiliasi PGN. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan manajemen risiko selaras antara PGN sebagai entitas Subholding dengan anak perusahaan/afiliasi.

Pada tahun 2023, fungsi *Risk Management* kembali mendapatkan kepercayaan sebagai koordinator tim implementasi SMKB di lingkup Subholding Gas untuk satu siklus penuh. Selanjutnya pada tahun ini, dilakukan perluasan cakupan implementasi SMKB untuk 4 (empat) SOR dan 19 (sembilan belas) Area untuk melengkapi 21 (dua puluh satu) lingkup Satuan Kerja Kantor Pusat PGN yang telah mengimplementasikan SMKB sebelumnya di tahun 2022. Sedangkan untuk lingkup 9 (sembilan) Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN telah dilakukan pengenalan dan *awareness* SMKB di tahun 2023 dengan rencana implementasi satu siklus penuh di tahun 2024.

PGN is always trying to reformulate the risks that will be faced in the future. This includes ongoing business risks and strategic projects/investments from companies to PGN subsidiaries/affiliates. It aims to ensure that risk management policies are aligned between PGN as a Subholding entity and its subsidiaries/affiliates.

In 2023, the Risk Management function was again entrusted as the coordinator of the BCMS implementation team in the Gas Subholding sector for one full cycle. Furthermore, this year, the scope of BCMS implementation was expanded to 4 (four) SORs and 19 (nineteen) Areas to complete the 21 (twenty one) PGN Head Office Work Unit scopes that had implemented BCMS previously in 2022. Meanwhile, for scope 9 (nine) PGN Subsidiaries and Affiliates have introduced and raised BCMS awareness in 2023 with a full cycle implementation plan in 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di PGN tidak lepas dari komitmen Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Manajemen Puncak yang selaras dengan *frameworks* manajemen risiko ISO 31000:2018. Bentuk komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi Subholding Gas di tahun 2023 oleh seluruh Direksi PGN serta diketahui dan disetujui oleh seluruh Direktur Utama Anak Perusahaan/Afliliasi PGN. Piagam tersebut juga dilakukan pemutakhiran secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bentuk pemenuhan terhadap PER-2/MBU/03/2023 BUMN.

Pengelolaan risiko di PGN juga telah dilengkapi dengan Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Pedoman, Prosedur Operasi serta Instruksi Kerja yang digunakan sebagai dasar dari seluruh kegiatan manajemen risiko di perusahaan. Pada tahun 2023, satuan kerja *Risk Management* telah melakukan penyusunan dan penyelarasan Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pedoman Pengelolaan SMKB sejalan dengan arahan Pertamina selaku Holding Migas.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management at PGN cannot be separated from the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners as Top Management which is in line with the ISO 31000:2018 risk management framework. This commitment is realized by the signing of the Gas Subholding Risk & Resilience Management Charter in 2023 by all PGN Directors and acknowledged and approved by all President Directors of PGN Subsidiaries/ Affiliates. The charter is also updated periodically at least once a year as a form of compliance with BUMN PER-2/MBU/03/2023.

Risk management at PGN has also been equipped with Work Reference Documents in the form of Guidelines, Operational Procedures and Work Instructions which are used as the basis for all risk management activities in the company. In 2023, the Risk Management work unit has prepared and aligned the Risk Management Guidelines and SMKB Management Guidelines in line with Pertamina's direction as the Oil and Gas Holding.

Selama tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem manajemen risiko yang dimiliki PGN telah memadai dan mampu mengantisipasi setiap risiko yang dimiliki Perusahaan. PGN juga melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko secara periodik, mulai dari tingkat fungsi, satuan kerja, hingga level manajemen senior. Hal ini tercermin dalam agenda rutin rapat Direksi yang selalu menyertakan pengelolaan risiko menjadi salah satu mata acara pembahasan utama.

Selanjutnya melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) di tingkat Direksi yang merupakan bentuk penguatan dan kelengkapan implementasi manajemen risiko di seluruh lini Perusahaan. Efektivitas sistem manajemen risiko PGN telah tercermin pada hasil pengukuran maturitas PRISMA tahun sebelumnya (2022) yang menetapkan level PGN berada pada skala 4 dari 5 dengan skor RMI 4,18 dilanjutkan pada tahun 2023 dengan melakukan monitoring dan implementasi peluang perbaikan (OFI).

Monitoring dan implementasi perbaikan tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan di tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan akan kecukupan sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perusahaan terutama untuk pelaksanaan evaluasi maturitas risiko selanjutnya di tahun 2024 untuk mencapai target yang diharapkan sesuai *Roadmap* ERM PGN Tahun 2020 - 2025.

During 2023, the Board of Directors and Board of Commissioners assess that PGN's risk management system is adequate and able to anticipate every risk the Company has. PGN also evaluates risk management periodically, starting from the function level, work unit, to senior management level. This is reflected in the routine agenda for Board of Directors meetings which always includes risk management as one of the main discussion items.

Furthermore, through the formation of a Risk Management Committee at the Board of Directors level, which is a form of strengthening and completing the implementation of risk management throughout all lines of the Company. The effectiveness of PGN's risk management system has been reflected in the results of the previous year's PRISMA maturity measurement (2022), which determined PGN's level to be on a scale of 4 out of 5 with an RMI score of 4.18, continuing in 2023 by monitoring and implementing opportunities for improvement (OFI).

Monitoring and implementation of these improvements continue to be carried out on an ongoing basis in 2023. This aims to increase the level of confidence in the adequacy of the risk management system implemented in the Company, especially for the implementation of the next risk maturity evaluation in 2024 to achieve the expected targets according to PGN's 2020-2025 ERM Roadmap.


PIAGAM MANAJEMEN RISIKO & RESILIENSI
Subholding Gas
PERTAMINA GAS NEGARA

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
Legal Cases

Hingga 31 Desember 2023, terdapat 7 (tujuh) perkara atau gugatan hukum bernilai material terhadap Perseroan. Perkara tersebut adalah perkara lanjutan atau belum diputuskan dan/atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun sebelumnya. Informasi mengenai perkara hukum material yang dihadapi PGN, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi pokok perkara, status perkara, serta pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan sebagai berikut:

As of 31 December 2023, 7 (seven) cases or lawsuits of material value against the Company had remained unsettled, meahing none of the cases had been legally settled and/or has permanent legal force when the previous year ended. Given below is information on material legal cases faced by PGN, its subsidiaries, members of the Boards of Directors and Commissioners including the subject matter, the status of the case, and its impact on the Company:

PT KALIMANTAN JAWA GAS (KJG)

Deklarasi Keadaan Kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang Tambak Lorok oleh PCML.

PT KALIMANTAN JAWA GAS (KJG)

Declaration of Force Majeure in Gas Transportation Agreement Kepodang Tambak Lorok by PCML.

Lembaga Agency	International Chamber of Commerce (ICC) Hong Kong	
Para Pihak Parties in Dispute	• KJG (sebagai Penggugat) • Petronas Carigali Muriah Limited (PCML) (sebagai Tergugat) • PLN (sebagai Tergugat)	• KJG (as Claimant) • Petronas Carigali Muriah Limited (PCML) (as Respondent) • PLN (as Respondent)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Cases
Nilai Perkara Case Value	USD373 juta	USD373 million
Pokok Perkara Subject Matter	Pada 29 Agustus 2018, KJG mengajukan gugatan terhadap PCML dan PLN di Arbitrase ICC Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban SOP sebagaimana diatur dalam *Gas Transportation Agreement* (GTA) oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi GTA, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018. Pada intinya gugatan terkait dengan: (i) PCML sepatutnya tidak dapat menghindari kewajiban atas tuntutan SOP KJG sejak tahun 2016 sampai dengan 13 Desember 2019 serta ganti rugi atas berakhirnya GTA senilai komitmen SOP dalam GTA yaitu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2026 berdasarkan GTA dengan nilai gugatan sebesar USD373 juta; (ii) PLN bertanggung jawab atas pengembalian pemotongan pembayaran tarif kepada KJG sebesar USD2,1 juta (belum termasuk bunga); dan (iii) Bunga dan biaya ICC serta biaya Konsultan Hukum KJG maupun biaya- biaya lain yang dikeluarkan KJG.	On August 29, 2018, KJG filed a lawsuit against PCML and PLN in Hong Kong ICC Arbitration in connection with the failure to implement SOP obligations as stipulated in the Gas Transportation Agreement (GTA) by PCML and compensation for the termination of GTA, while the lawsuit against PLN was made in connection with a deduction of Monthly bills from March 2018 to September 2018. This lawsuit in connection with: (i) PCML should not be able to avoid the obligation for KJG's SOP claims from 2016 to December 13, 2019 as well as the compensation for the termination of GTA as per the amount of SOP in the GTA from December 14, 2019 untill the end of 2026 based on the GTA with a claim amounting to USD373 million; (ii) PLN is responsible refunding the tariff payment to KJG of USD2.1 Million (not including interest); and (iii) The ICC interest and fees as well as KJG's Legal Consultant fees and any other costs incurred by KJG.

Status Saat Ini Current Condition	Pada tanggal 6-7 September 2023 KJG telah melakukan rapat persiapan hearing bersama Konsultan Hukum dan *Technical Expert*. Pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2023 telah dilaksanakan *hearing* di ICC Singapore, dengan agenda: *Opening Statement* dari masing-masing Pihak, keterangan dari *Technical Expert* dan *Closing Submissions*. Pada tanggal 15 Desember 2023, KJG telah mengirimkan data *Submission Cost* kepada Tribunal, yang didalamnya memuat biaya Konsultan Hukum, biaya *Expert* dan *tribunal cost* yang sudah terbayar maupun yang masih *outstanding*.	On September 6-7 2023 KJG held a preparation meeting for hearing with legal consultant and technical expert. The Abritrase Hearing was held on 30 October - 3 November 2023, with the agenda: Opening Statement from each Party, information from Technical Expert and Closing Submissions. On 15 December 2023, KJG submitted a Submission Cost to the Tribunal, which included paid and outstanding Legal Counsel fees, Expert fees and tribunal cost.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PT PGN LNG INDONESIA (PLI)

Perkara Arbitrase Perjanjian Sewa Operasi dan Pemeliharaan *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) Lampung

PT PGN LNG INDONESIA (PLI)

Arbitration Dispute on Operation and Maintenance Lease Agreement of Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Lampung

Lembaga Agency	Singapore International Arbitration Centre (SIAC)	
Para Pihak Parties in Dispute	• PLI (sebagai Penggugat) • PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Tergugat)	• PLI (as Claimant) • PT Hoegh LNG Lampung (as Respondent)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	+/- USD470 juta	+/- USD470 million
Pokok Perkara Subject Matter	Pada Agustus 2021, PT PGN LNG Indonesia ("PLI"), anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan seluruhnya oleh PGN telah mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") terhadap PT Hoegh LNG Lampung ("PT Hoegh") terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan FSRU Lampung ("LOM *Agreement*") dengan tuntutan antara lain berupa pembatalan LOM *Agreement*, dan/atau pengakhiran LOM *Agreement*, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PLI. Pada September 2021, PT Hoegh juga mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC terhadap PLI dan PGN terkait dengan LOM *Agreement* dan jaminan yang diberikan oleh PGN terhadap pemenuhan kewajiban PLI atas LOM *Agreement* sebagaimana tertuang dalam *Transferor Guarantee*, dengan tuntutan antara lain berupa ganti rugi. Pada Juni 2022, PLI telah mengajukan dokumen gugatan (*Statement of Claim*) terhadap PT Hoegh. PT Hoegh juga telah mengajukan dokumen gugatan (*Statement of Claim*) terhadap PGN dan gugatan balik (*counterclaim*) terhadap PLI, dengan tuntutan antara lain agar PGN memenuhi semua kewajiban PLI berdasarkan LOM *Agreement*, termasuk ganti rugi.	In August 2021, PT PGN LNG Indonesia ("PLI"), a wholly owned and controlled subsidiary of PGN has submitted an arbitration notice to the Singapore International Arbitration Center ("SIAC") against PT Hoegh LNG Lampung ("PT Hoegh") related to the lease, operation and maintenance agreement of FSRU Lampung ("LOM Agreement") with claim, among other, of cancellation of the LOM Agreement, and/or termination of the LOM Agreement, and/or providing damages to PLI. In September 2021, PT Hoegh also submitted a notification of arbitration to SIAC against PLI and PGN regarding LOM Agreement and the guarantee provided by PGN for the fulfillment of PLI's obligations under the LOM Agreement as stated in the Transferor Guarantee, with claim, among other, of damages. In June 2022, PLI has submitted a Statement of Claim against PT Hoegh. PT Hoegh has also submitted a Statement of Claim against PGN and a counterclaim against PLI, with claim, among other, to have PGN fulfills all of PLI's obligations under the LOM Agreement, including damages.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
Legal Cases

Status Saat Ini Current Condition	Atas gugatan-gugatan tersebut, PGN dan PLI telah menyampaikan dokumen berupa jawaban pembelaan (*Statement of Defence*) pada September 2022 dan replik (*Reply*) pada September 2023. Para Pihak telah sepakat untuk memundurkan jadwal penyerahan Duplik dari semula 27 November 2023 menjadi 9 Februari 2024 terkait dengan rencana pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Berdasarkan dinamika proses arbitrase FSRU Lampung yang sedang berlangsung, PGN dan PLI tidak memiliki ekspektasi putusan majelis arbitrase akan diterbitkan dalam waktu dekat. Dengan demikian, PGN dan PLI memandang secara hukum hubungan kontraktual antara PT PGN LNG Indonesia PLI dan PT Hoegh LNG Lampung akan tetap berlanjut selama periode ini.	Due to those claims, PGN and PLI have submitted the Statement of Defence in September 2022 and Reply in September 2023. The Parties have agreed to postpone the deadline of Rejoinder submission from 27 November 2023 to 9 February 2024 due to parties' intention to withdraw the cases. Based on the ongoing arbitration process on FSRU Lampung, PGN and PLI does not expect that the tribunal's will render an award in the near time. Therefore, PGN and PLI in the opinion that contractual relationship between PLI and PT Hoegh LNG Lampung still continue as normal during this period.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Sengketa PPN dalam Niaga Gas Bumi PGN untuk Periode Tahun 2012-2013

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
VAT Dispute on Natural Gas Trading PGN for 2012-2013 Period

Lembaga Agency	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Supreme Court The Republic of Indonesia
Para Pihak Parties in Dispute	• Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) • PGN (sebagai Termohon Peninjauan Kembali	• The Directorate General of Tax Affairs (as Applicant for Judicial Review) • PGN (as Respondent for Judicial Review)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Pajak	Taxation
Nilai Perkara Case Value	Rp4,15 triliun	Rp4.15 trillion
Pokok Perkara Subject Matter	Sengketa PPN 2012-2013 terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara DJP dan PGN terkait kegiatan niaga gas bumi yang dilakukan oleh PGN. DJP berpandangan bahwa untuk periode tahun 2012, gas yang dijual oleh PGN merupakan gas hasil pengolahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai barang sehingga dikenakan PPN sebesar 10% dan terdapat jasa distribusi atau pengangkutan gas dalam kegiatan niaga gas PGN sehingga dikenakan PPN untuk periode tahun 2013. PGN berpandangan bahwa tidak terdapat proses pengolahan dalam gas yang dijual oleh PGN kepada pelanggan dan PGN menerima gas sesuai *Gas Sales Agreement* (GSA) dari KKKS dengan spesifikasi yang telah diatur oleh regulasi pemerintah dan lamgsung proses/pengolahan untuk periode tahun 2012. Untuk periode tahun 2013, PGN melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan titik serah di lokasi pelanggan sehingga kegiatan niaga gas dan penyaluran gas kepada pelanggan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan adanya komponen rupiah dalam harga jual gas bumi guna menghindari risiko kurs mengingat krisis moneter seperti tahun 1998. Bahwa atas perkara tersebut pada tingkat PK yang dimohonkan oleh DJP, terdapat 18 (delapan belas) putusan yang mengabulkan permohonan DJP dan 6 (enam) perkara yang menolak permohonan DJP.	The 2012-2013 VAT dispute is occurred due to different opinion between DGT and PGN regarding natural gas trading activities by PGN. DGT stated that, the natural gas sold by PGN was processed gas which results in an increase in the value of goods so that 10% VAT was imposed and there were gas distribution or activities, so that it was subject to VAT for the 2013 period. Meanwhile, PGN stated that there was no processed gas in the natural gas sold by PGN to costumers and PGN received the gas according to the Gas Sales Agreement from KKKS with its specification set by government regulations and directly sell the gas to costumers without any processing for the 2012 period, For the 2013, PGN conducted natural gas trading activities with delivery points at the costumer's locations, that the natural gas trading activities and its distribution to the costumers were inseparable and the use of rupiah currency in the selling price of natural gas so as to avoid exchange rate risks following a monetary crisis like the one occurred in 1998. Whereas for the said cases at the judicial review level filed by DGT, there are 18 (eighteen) verdicts that granted DGT's requests and 6 (six) verdicts that rejected DGT's requests.

Status Saat Ini Current Condition	Atas 18 (delapan belas) perkara yang telah putus tersebut, PGN melakukan PK kedua dan atas 6 (enam) perkara yang memenangkan PGN, DJP juga mengajukan PK kedua. Sampai Desember 2023, 15 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus NO (*Niet Onvantkelijkverklaard*). Adapun untuk 6 permohonan PK Kedua yang diajukan DJP juga telah diputus NO. Putusan *Niet Onvantkelijkverklaard* (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat formal. Konsekuensi atas Putusan NO tidak dapat disamakan dengan putusan ditolak, mengingat masih dimungkinkan untuk mengajukan kembali permohonan sepanjang telah memenuhi syarat formal.	For the 18 (eighteen) cases that have been decided, PGN will conduct a second judicial review and for the 6 (six) cases that won PGN, DGT also submitted a second judicial review. Until December 2023, 15 judicial review applications submitted by PGN decided NO (Niet Onvantkelijkverklaard). Meanwhile 6 judicial review applications submitted by DJP also decided NO. The Niet Onvantkelijkverklaard (NO) decision is a decision stating that the lawsuit cannot be accepted because it is of fulfill the formal requirements. NO Decision cannot be equated with a rejected decision, considering that it is still possible to resubmit the application as long as the formal requirements are satisfied.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Sengketa PPh Badan Tahun 2013

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Corporate Income Tax Dispute Year 2013

Lembaga Agency	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Supreme Court the Republic of Indonesia
Para Pihak Parties in Dispute	• Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) • PGN (sebagai Termohon Peninjauan Kembali)	• The Directorate General of Tax Affairs (as Applicant for Judicial Review) • PGN (as Respondent for Judicial Review)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Pajak	Taxation
Nilai Perkara Case Value	USD12.605.936	USD12.605.936
Pokok Perkara Subject Matter	Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan tahun 2013, PGN dinyatakan kurang bayar sebesar USD33,8 juta, yang termasuk sanksi administrasi 100%. Selama tahun 2017 dan 2018, Perusahaan telah membayar SKPKB sebesar USD14,4 juta dan dicatat sebagai beban. Atas SKPKB PPH Badan tahun 2013, keberatan yang diajukan PGN ditolak pada Mei 2018 dan PGN telah mengajukan banding pada Agustus 2018. Pada tanggal 16 Desember 2021, telah dilakukan pembacaan putusan banding dengan putusan kurang bayar sebesar USD21,2 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 dilakukan tambahan pembayaran sebesar USD6,7 juta. Selanjutnya PGN mencatat beban provisi sampai dengan 13 Desember 2022 sebesar USD25,2 juta.	Based on a Tax Underpayment Letter of Corporate Income Tax Year 2013, PGN was stated underpayment in the amount of USD33,8 million, including an 100% administrative sanction. Throughout the year 2017 and 2018, the Company has paid the Tax underpayment Letter in the amount of USD14,4 million and been recorded as expenses. Regarding the Tax Underpayment Letter of Corporate Income Tax year 2013, the objection submitted by PGN was refused in May, 2018 and PGN has filed an appeal in August, 2018. On December 16, 2021, a recitation of the appeal decision has been conducted with an underpayment decision in the amount of USD21,2 million. Next, on February 22, 2022, an additional payment was conducted in the amount of USD6,7 million. Next, PGN recorded a provision expense until December 13, 2022 in the amount of USD25,2 million.
Status Saat Ini Current Condition	Atas Putusan Banding tersebut, DJP mengajukan PK dengan menyampaikan memori PK tanggal 24 Maret 2022 melalui Pengadilan Pajak. Selanjutnya PGN menyampaikan kontra memori tanggal 22 Februari 2023 melalui Pengadilan Pajak dimana PGN menyetujui putusan banding Hakim Pengadilan Pajak. Pada tanggal 27 November 2023, PK PPh Badan 2013 dengan nomor register perkara 5166 B/PK/PJK/2023 telah diputus dengan amar putusan menolak permohonan PK Ditjen Pajak yang artinya PGN menang atas perkara dimaksud.	Regarding the appeal decision, DGT filed a judicial review with conveying a memory of the judicial review through the Tax Court. Next, PGN conveyed a counter memory on February 22, 2022 through the Tax Court where PGN agreed the appeal decision of the Tax Court Judges. On November 27 2023, the 2013 Corporate Income Tax PK with case registration number 5166 B/PK/PJK/2023 was decided with a decision rejecting the DGT judicial review application, which means PGN won the case.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
Legal Cases

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Sengketa PPh Badan Tahun 2015

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Corporate Income Tax Dispute Year 2015

Lembaga Agency	Mahkamah Agung Republik Indonesia	The Supreme Court of the Republic of Indonesia
Para Pihak Parties in Dispute	• Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) • PGN (sebagai Termohon Peninjauan Kembali	• The Directorate General of Tax Affairs (as Applicant for Judicial Review) • PGN (as Respondent for Judicial Review)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Pajak	Taxation
Nilai Perkara Case Value	USD18.176.818	USD18.176.818
Pokok Perkara Subject Matter	Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan tahun 2015, PGN dinyatakan kurang bayar sebesar USD16,7 juta. Atas SKPKB PPh Badan tahun 2015, PGN mengajukan keberatan pada tanggal keberatan 25 Juli 2017 dengan Nilai Lebih Bayar USD11,9 juta, namun keberatan yang diajukan PGN ditolak pada 7 Mei 2018 ditolak seluruhnya. PGN telah mengajukan banding pada tanggal 6 Agustus 2018. Pada tanggal 23 September 2021, telah dilakukan pembacaan putusan banding dengan putusan lebih bayar sebesar USD1,4 juta.	Based on a Tax Underpayment Letter of Corporate Income Tax Year 2015, PGN was stated underpayment in the amount of USD16,7 million. Regarding the Tax Underpayment Letter of Corporate Income Tax year 2015, PGN filed an objection dated July 25, 2017 with an overpaid value of USD11,9 million, however, the objection submitted by PGN was refused on May 7, 2018 entirely. PGN has submitted an appeal on August 6, 2018. On September 23, 2021, a recitation of the appeal decision has been conducted with an overpayment decision in the amount of USD1,4 million.
Status Saat Ini Current Condition	Atas Putusan Banding tersebut, DJP mengajukan PK dengan menyampaikan memori PK tanggal 27 Desember 2021 melalui Pengadilan Pajak. Selanjutnya PGN menyampaikan kontra memori tanggal 27 April 2022 melalui Pengadilan Pajak dimana PGN menyetujui putusan banding Hakim Pengadilan Pajak. Pada tanggal 14 Agustus 2023, PK PPh Badan 2015 dengan nomor register perkara 3211 B/PK/PJK/2023 telah diputus dengan amar putusan menolak permohonan PK Ditjen Pajak yang artinya PGN menang atas perkara dimaksud.	Regarding the appeal decision, DGT filed a judicial review with conveying a memory of the judicial review on December 27, 2021 through the Tax Court. Next, PGN filed a counter memory on April 27, 2022 through the Tax Court where PGN agreed the appeal decision of the Tax Court Judges. On August 14 2023, the 2015 Corporate Income Tax PK with case registration number 3211 B/PK/PJK/2023 was decided with a decision rejecting the DGT judicial review application, which means PGN won the case.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK DAN PT SAKA ENERGI INDONESIA
Gugatan Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK AND PT SAKA ENERGI INDONESIA
Lawsuit Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Lamongan	The District Court of Lamongan
Para Pihak Parties in Dispute	• Lemasko (Penggugat) • Saka Energi Indonesia & PGN (Tergugat)	• Lemasko (Plaintiff) • Saka Energi Indonesia & PGN (defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp1.401.000.000.000	Rp1,401,000,000,000

Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 3 April 2023, SEI dan PGN menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa SEI telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar, mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Kontrak Bagi Hasil sesuai kesepakatan dengan SKK Migas.	On April 3, 2023, SEI and PGN received a lawsuit letter on the subject that SEI has taken control of ex-PT Freeport Indonesia's pipe inventories which are claimed to be belonged to the Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) as a grant from PT Freeport Indonesia. Management believes that the lawsuit is baseless, considering that SEI only controls of goods related to Oil and Gas activities, and Oil and Gas assets being controlled by SEI are State-Owned Goods and legally obtained in accordance with applicable legal provisions and the Production Sharing Contract as agreed with SKK Migas.
Status Saat Ini Current Condition	SEI dan PGN telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan Desember 2023, SEI dan PGN masih menjalani proses hukum yang ada dan manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar.	SEI and PGN has appointed the legal consultant to handle the lawsuit. As of December 2023, SEI and PGN is still undergoing the legal process and management continues to be of the opinion that the lawsuit is baseless
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	The District Court of Blambangan Umpu
Para Pihak Parties in Dispute	• PTPN VII (Penggugat) • 12 Masyarakat (Tergugat) • PGN (Tergugat 13) • Bumi Madu Mandiri (Tergugat 14) • Kantah Kabupaten Way Kanan (Tergugat 15) • Kanwil BPN Provinsi Lampung (Tergugat 16) • BPN RI (Turut Tergugat)	• PTPN VII (Plaintiff) • 12 Communities (defendant) • PGN (Defendant 13) • Bumi Madu Mandiri (defendant 14) Land office Way Kanan Regency (defendant 15) Regional office of Lampung Province (defendant 16) • BPN RI (Co-defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Immaterial Proporsional terhadap Para Tergugat	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Immaterial Proportional for Defendants
Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah"). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingingasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Penguasahaan Hitan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972. PTP VII sedang dalam proses sertifikasi sehingga PTPN VII melakukan pengukuran tematik atas obyek sengketa dan telah terbit Peta Tematik Nomor Peta 6/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Turut Tergugat). PTPN VII menyatakan peta tematik tersebut menggambarkan bukti kepemilikan PTPN VII atas tanah dan memperkuat SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/I/72 tanggal 24 Januari 1972.	On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad's forest consession area ("Land"). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972. PTPN VII is currently in the certification process, and as part of this, PTPN VII conducted thematic mapping of the disputed area. Thematic Map Number 6/2021 has been issued by the BPN RI, who is also a Co-defendant. PTPN VII asserts that this thematic map serves as evidence of PTPN VII's ownership of the land, thereby strengthening the Minister of Agriculture's Decree Number 31/Kpts/UM/I/72 dated January 24, 1972.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
Legal Cases

Status Saat Ini Current Condition	Pada 03 Januari 2024 telah dilakukan agenda sidang pemeriksaan dokumen para pihak. Kemudian, telah dilakukan pertemuan lanjutan dengan BPN Way Kanan. BPN menjelaskan bahwa peta tematik merupakan visualisasi lokasi dan luas lahan berdasar dokumen yang diajukan pemohon sehingga bukan sebagai alas hak. Berdasar peta tersebut tergambar luasan tanah dibawah penguasaan PGN yang telah disertifikatkan. Kemudian, sidang perkara akan dilaksanakan Kembali tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda mediasi.	On Januari 03, 2024, the hearing agenda, in the form of examining documents from all parties, has been conducted. Subsequently, a follow up meeting was held with BPN Way Kanan. BPN explained that thematic maps are visualizations of location and land extent based on documents submitted by the applicant, thematic maps do not serve as the legal basis for land rights. Based on the map, the land area under the control of PGN has been certified. Subsequently, a case hearing will be reconvened on Januari 10, 2024, with the agenda of mediation.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	This case which may affect the consolidated profit/loss of the Company.

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
Information on Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan Otoritas Pasar Modal atau otoritas lainnya kepada PGN, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.

Throughout 2023, no administrative sanctions were imposed by the Capital Markets Authority or other authorities on PGN, members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN SERTA ASPEK KEBERLANJUTAN

Management and Control of Tax and Sustainability Aspects

Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan merupakan tanggung jawab strategis yang memegang peranan penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks ini, PGN memandang perpajakan tidak hanya sebagai kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai elemen integral dalam manajemen keuangan yang berdampak pada keseimbangan dan pertumbuhan Perusahaan.

Management and control of tax aspects are strategic responsibilities that are essential for an organization's sustainability and success. In this context, PGN views taxation as not only a legal obligation but also as an integral element of financial management that affects the Company's balance and growth.

Untuk itu, memahami pentingnya pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan, PGN terus mengelola dan meminimalkan risiko perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan, pengoptimalan struktur perpajakan, serta penerapan kebijakan internal yang memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemahaman atas pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan membuahkan hasil yang baik bagi Perusahaan, yakni PGN mampu memitigasi risiko pengenaan sanksi perpajakan secara optimal yang dibuktikan dengan tidak adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dalam tiga tahun terakhir.

As a result of its understanding of the importance of tax management and control, PGN continues to manage and minimize tax risks. This includes a thorough understanding of tax regulations, optimizing the tax structure, and implementing internal policies to ensure that the Company's tax rights and obligations are carried out in accordance with the provisions of the relevant tax laws and regulations. Understanding tax management and control led to positive results for the Company, which is that PGN is able to minimize the risk of imposition of tax sanctions, as evidenced by no issuance of Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) or Tax Collection Letters (STP) in the last three years.

Berkaitan dengan aspek keberlanjutan, Pelaksanaan keberlanjutan di PGN sangat penting untuk memperkuat penerapan GCG yang dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi. Aspek keberlanjutan juga akan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya, risiko, dan limbah, serta meningkatkan efisiensi energi. PGN memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan aspek keberlanjutan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perusahaan dengan mendorong inovasi, akses ke energi bersih, dan menciptakan nilai jangka panjang. Lebih lanjut, PGN juga berkomitmen untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, kebijakan, dan preferensi konsumen terhadap bisnis.

Regarding sustainability, implementing sustainability at PGN is critical to strengthening GCG implementation, which can ensure transparency, accountability, and regulatory compliance. Sustainability aspects will also improve operational efficiency by reducing costs, risks, and waste while increasing energy efficiency. PGN is committed to implementing sustainability measures that will support the company's sustainable growth by encouraging innovation, providing access to clean energy, and creating long-term value. Furthermore, PGN is committed to anticipating how climate change, policies, and consumer preferences will affect business.

Lebih lanjut, pelaksanaan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan juga penting untuk mengelola risiko serta meningkatkan reputasi dan daya tarik PGN, sehingga dapat menarik investor dan mitra bisnis yang berkelanjutan. Informasi secara lengkap mengenai hal ini telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.

Furthermore, implementing sustainability within the Company is critical for risk management and increasing PGN's reputation and attractiveness, allowing it to attract investors and sustainable business partners. Complete information regarding this matter has been disclosed in the Sustainability Report.

KODE ETIK PERUSAHAAN
Company's Code of Ethics

PGN memberlakukan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja No. P-002/A014 yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 30 Desember 2022, yang menjadi acuan perilaku bagi Perwira Subholding Gas dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, bersifat wajib bagi Perwira Subholding Gas untuk diuji pemahamannya terhadap etika kerja dan etika usaha melalui aplikasi GOLS (GCG *Online Systems*). Uji pemahaman ini dilakukan 1x dalam setahun berupa Surat Pernyataan. Selain itu Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja menjadi referensi atas pedoman lain, seperti Pedoman Benturan Kepentingan & Pengendalian Gratifikasi.

Penanggung jawab pelaksanaan penerapan etika ini adalah *Group Head, Legal Counsel and Compliance* sesuai SK Tata Kerja Direktorat Utama Nomor: 013000.K/OT/PDO/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama. Seluruh Perwira Subholding Gas membuat pernyataan pemahaman Etika melalui aplikasi internal PGN yaitu GCG *Online System* (GOLS)/ www.pgn.gols.co.id secara rutin setiap tahunnya, sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kode Etik. Pada tahun 2023, PGN mencatat persentase pernyataan komitmen atas Kode Etik Perusahaan mencapai 100% yang membuktikan bahwa seluruh Perwira Subholding Gas berkomitmen untuk patuh pada Kode Etik Perusahaan.

PGN implements Business Ethics and Work Ethics Guidelines No. P-002/A014, which were ratified by the President Director on December 30, 2022, as a guideline for Subholding Gas Employees in carrying out all business activities to achieve the Company's Vision, Mission, and Goals.

In practice, the implementation of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines is mandatory for all Gas Subholding Personnel to be tested on their understanding of work ethics and business ethics through the GOLS (GCG Online Systems) application. The understanding test is carried out once a year in the form of a Statement Letter. In addition, the Business Ethics and Work Ethics Guidelines serves as a reference for other guidelines, such as the Conflict of Interest & Gratification Control Guidelines.

The Group Head, Legal Counsel, and Compliance are responsible for implementing this ethical implementation in accordance with Principle Directorate Work Procedures Decree No. 013000.K/OT/PDO/2022 dated March 31, 2022 concerning Principle Directorate Work Procedures. As part of their adherence to the Code of Ethics, all Subholding Gas Employees creating an Ethics comprehension statement through PGN's internal GCG Online Systems (GOLS)/www.pgn.gols.co.id on a yearly basis. In 2023, PGN recorded that the percentage of statements of commitment to the Company's Code of Ethics had reached 100%, demonstrating that all Subholding Gas Employees are committed to complying with the Company's Code of Ethics.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang menjadi standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib diterapkan dalam menjalani kegiatan sehari-hari di Perusahaan, sekaligus merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi budaya kerja Perusahaan.

Etika Usaha

Pedoman Etika Usaha PGN berisi tentang standar perilaku yang harus dilaksanakan pada saat PGN berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan Perusahaan dalam hal keterbukaan informasi, perlakuan setara dan

CODE OF ETHICS PRINCIPLES

Code of Conducts are a set of norms, values, and actions that represent the Company's ideal standards of behavior. This ideal behavior must be implemented in the Company's daily operations while also representing the high values that define the Company's work culture.

Business Ethics

The PGN Business Ethics Guidelines outline the standards of behavior that must be complied with when PGN interacts with stakeholders. This is demonstrated by the Company's efforts in terms of information disclosure, equal treatment and fulfillment of stakeholder rights,

pemenuhan hak pemangku kepentingan, anti monopoli, perlindungan hak asasi manusia, gratifikasi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan lain-lainnya. Beberapa Etika Usaha yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas meliputi:

- Etika Perseroan dengan Perwira Subholding Gas
- Etika Perseroan dengan Pelanggan
- Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
- Etika Perseroan dengan Kreditur
- Etika Perseroan dengan Pemerintah
- Etika Perseroan dengan Masyarakat
- Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
- Etika Perseroan dengan Pemasok Gas Bumi

Etika Kerja

PGN telah menyusun Etika Kerja yang menjadi panduan bagi Perwira Subholding Gas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa Etika Kerja yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas sebagai berikut:

- Komitmen Individu
- Kerja Sama Antar Perwira Subholding Gas
- Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
- Benturan Kepentingan
- Penerima Hadiah
- Pemberi Hadiah
- Perlindungan Aset PGN
- Mencatat Data dan Pelaporan
- Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
- Aktivitas Politik
- Integritas Laporan Keuangan
- Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)
- Penggunaan Media Sosial

Kebijakan Sosial dan Politik

PGN mengalokasikan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan *Corporate Social and Responsibility* (CSR) sesuai Peraturan Menteri BUMN No 3 Tahun 2023. Dana tersebut merupakan salah satu komitmen serta kontribusi PGN dalam jangka panjang kepada lingkungan dan masyarakat, khususnya komunitas di sekitar lokasi jaringan (*site*) dan kantor PGN. Informasi secara rinci terkait dengan kegiatan CSR PGN selama tahun 2023 disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Laporan Tahunan ini dan juga Laporan Keberlanjutan 2023 yang dibuat secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

PGN berkomitmen penuh untuk tidak memberikan dana untuk kegiatan partai politik manapun selaras dengan Surat Edaran Direksi Nomor: 034300.SE/KP.04/HCGS/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

anti-monopoly, human rights protection, gratification, intellectual property rights protection, and other areas. Subholding Gas Employees should adhere to the following business ethics:

- Company Ethics with Subholding Gas Employees
- Company Ethics with Customers
- Company Ethics with Goods and Service Providers
- Company Ethics with Creditors
- Company Ethics with the Government
- Company Ethics with the Community
- Company Ethics with Shareholders
- Company Ethics with Natural Gas Suppliers

Work Ethics

PGN has developed a Work Ethics which serves as a guide for Subholding Gas Employees in carrying out their duties and responsibilities. Some of the Work Ethics that apply to Subholding Gas Employees are as follows:

- Individual Commitment
- Cooperation between Subholding Gas Employees
- Compliance with Laws and Regulations
- Conflict of Interest
- Prize Recipient
- Gift Giver
- PGN Asset Protection
- Recording Data and Reporting
- Maintain the confidentiality of Company Data and Information
- Occupational Safety and Health and Environmental Management
- Political Activities
- Integrity of Financial Reports
- Insider Information (Insider Trading)
- Use of Social Media

Social and Political Policy

PGN allocates funds to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities in accordance with SOEs Ministerial Regulation No. 3 of 2023. This fund is one of PGN's long-term commitments and contributions to the environment and society, particularly in the communities surrounding its network locations (sites) and offices. Detailed information related to PGN's CSR activities in 2023 is presented in the Corporate Social Responsibility section of this Annual Report, as well as the 2023 Sustainability Report, which is prepared separately from this Annual Report.

PGN is fully committed not to provide funds for the activities of any political party in line with the Board of Directors' Circular Letter No. 034300.SE/KP.04/HCGS/2023 dated November 10, 2023 concerning the involvement of the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board, Supporting Organs

KODE ETIK PERUSAHAAN
Company's Code of Ethics

Pengawas Serta Seluruh Pekerja Di Lingkungan Sub Holding Gas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Dan/Atau Sebagai Pengurus Partai Politik Atau Pejabat Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun demikian, PGN memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk menyalurkan aspirasinya dalam kegiatan politik, namun dengan senantiasa menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menjadi anggota parlemen, legislatif atau eksekutif dengan batasan-batasan tertentu agar terhindar dari munculnya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

of the Board of Commissioners/Board Supervisors, and all employees in the Gas Sub-Holding Environment during General Elections, Regional Head Elections, and/or as Political Party Administrators or Regional Head and Deputy Regional Head Officials. However, PGN allows all employees to channel their political aspirations while remaining neutral, not engaging in practical politics, and not becoming members of parliament, legislature, or executive, subject to certain restrictions to avoid potential conflicts of interest.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI
Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja PGN wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Perwira Subholding Gas di semua level organisasi termasuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan Etika Kerja dan Etika Usaha secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas sehari hari.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK
Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja yang merupakan kode etik Perusahaan senantiasa disebarluaskan serta dipublikasikan melalui berbagai media antara lain:

1. *Website* Perusahaan https://pgn.co.id.
2. Portal internal PGN-Quality: www.pgnq.pgn.co.id; Aplikasi PGN-Q merupakan sistem informasi kumpulan Dokumen Acuan Kerja yang dimiliki oleh Perseroan untuk kepentingan Perwira Subholding Gas dalam memperoleh informasi dokumen yang berkaitan dengan prosedur dan operasi bisnis Perseroan.
3. Aplikasi kepegawaian pekerja "EASY" yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh Perwira Subholding Gas; Aplikasi "EASY" merupakan sistem informasi digital kepegawaian sebagai sarana Perseroan untuk kepentingan Perwira Subholding Gas untuk memperoleh informasi hak & kewajiban sebagai pekerja Perwira Subholding Gas.
4. Aplikasi *GCG Online System* (GOLS) merupakan sistem informasi digital sebagai sarana Perseroan untuk meningkatkan *awareness* GCG dan salah satu sarana bagi Perwira Subholding Gas untuk menyatakan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Budaya Perusahaan.
5. Melalui media lain yang dimiliki Perseroan, seperti: media sosial, *banner, flyer*, dan *media advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

CODE OF ETHICS COMMITMENTS FOR ALL LEVELS
PGN's Business Ethics and Work Ethics Guidelines must be adhered to and implemented by all Gas Subholding Employees at all levels of the organization, including the Board of Commissioners and Directors, in consistently implementing Work Ethics and Business Ethics as a work culture in daily activities.

CODE OF ETHICS DISSEMINATION
Code of Conducts which constitute the Company's code of ethics, are always disseminated and published in various media, including:

1. Company Website https://pgn.co.id.
2. The internal portal of PGN-Quality: www.pgnq.pgn.co.id; The PGN-Q application is an information system for the collection of the Company's Working Reference Documents that allows Gas Subholding Employees in obtaining document information related to the Company's business procedures and operations.
3. "EASY" employee personnel application which can be easily accessed by all Gas Subholding Employees; The EASY application is a digital personnel information system that allows Gas Subholding Employees to obtain information on their rights & obligations as Gas Subholding Employees.
4. The GCG Online System (GOLS) application is a digital information system as a means for the Company to increase GCG awareness and a means for Gas Subholding Employees to express their commitment to implementing GCG principles and Corporate Culture values.
5. Through other media owned by the Company, such as: social media, banners, flyers and other advertising media in the Company's office area.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Upaya penerapan dan penegakkan Kode Etik Perseroan dilakukan antara lain dengan:

a. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di satuan/ unit kerja masing-masing;
b. Perwira Subholding Gas yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Etika Kerja memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama;
c. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama; dan
d. Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*), yang diatur secara tersendiri.
e. Perseroan menetapkan fungsi FKAP memiliki tanggung jawab sebagai wadah konsultasi terkait isu etika.

SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi yang dikenakan untuk setiap pelanggaran etika usaha disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dokumen perikatan terkait lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran etika kerja diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Perwira Subholding Gas.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2023

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran Etika Usaha yang dilakukan Perusahaan, seluruh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk Pelanggaran terhadap Etika Kerja telah diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Pekerja.

MONITORING DAN EVALUASI

Secara berkala, Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, dengan melaksanakan *Assessment* GCG. Perseroan juga terus melakukan perbaikan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja dengan berkelanjutan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, serta rekomendasi hasil *assessment* GCG.

CODE OF ETHICS IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

Efforts to implement and enforce the Company's Code of Ethics include:

a. The Board of Directors decides to provide fostering actions, disciplinary sanctions and/or corrective and preventive measures which must be implemented by the direct superior in each working unit/unit;
b. Gas Subholding Employees who violate Business Ethics and Work Ethics have the right to have their explanation heard before their immediate superior prior to administering guidance or disciplinary action, referring to the Collective Labor Agreement;
c. Implementation of fostering actions, disciplinary punishments and/or corrective and preventive measures are conducted by the direct superior, referring to the Collective Work Agreement; and
d. The Company prepares provisions governing the reporting mechanism for alleged irregularities (Whistleblowing System), which are regulated separately.
e. The Company determines that the FKAP function has the responsibility as a consultation forum related to ethical issues.

SANCTIONS FOR CODE OF ETHICS VIOLATION

Sanctions imposed for any violation of business ethics are in accordance with applicable regulations and other related binding documents. Sanctions for violations of work ethics are regulated in the Collective Labor Agreement between the Company and Gas Subholding Employees.

VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS AND SANCTIONS IN 2023

Until the end of 2023, there were no violations of Business Ethics committed by the Company, all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. As for violations of Work Ethics, sanctions have been given in accordance with the Collective Labor Agreement between the Company and Workers.

MONITORING AND EVALUATION

Periodically, the Company monitors and evaluates the implementation of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines, by conducting GCG Assessments. The Company always makes improvements to Business Ethics and Work Ethics Guidelines. This is carried out in accordance with applicable laws and regulations, adjusting to the Company's developments and needs, as well as recommendations from the GCG assessment results.

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN

PGN Corporate Culture Development and Employee Engagement Improvement

PGN turut serta dalam menerapkan *core values* BUMN AKHLAK sebagai budaya Perusahaan. Perwira Subholding Gas berperan sebagai *agent of change* dalam penerapan budaya Perusahaan. Penyelarasan budaya Perusahaan dilakukan melalui program-program budaya berdasarkan *Critical Behaviour* yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi di Perusahaan, yaitu:

- *Ethics and Safety Ambassador*, yaitu program sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Etika Usaha & Etika Kerja serta program intervensi terhadap *unsafe/sub standard* di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi;
- *Coffee Morning Briefing Online/Offline* (C'Mon Bro), yaitu rapat koordinasi rutin masing-masing Satuan Kerja yang berfokus pada program kerja dan upaya pencapaian target kinerja;
- *Cross Sharing* yaitu program *sharing* yang menghadirkan narasumber dari Satuan Kerja lain di lingkungan Pertamina Group dengan tema sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja;
- *Sharing dan Coaching* (SharChing) yaitu program berbagi pengetahuan dan program *coaching* yang dilakukan oleh sesama Perwira Sub Holding Gas.
- *Living Core Values* (LCV) AKHLAK yaitu program budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing Satuan Kerja dan Anak Perusahaan/ Afiliasi.

Perusahaan secara konsisten melaksanakan Program Budaya AKHLAK Subholding Gas dan mengevaluasi pelaksanaannya setiap 1 (satu) bulan sekali melalui *self-assessment*. Pelaksanaan *self-assessment* dilakukan setiap awal bulan oleh Perwira Ksatriya (Pertamina Wira Komunitas Internalisasi Budaya) yang ada di Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi. Bagi 3 (tiga) Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi yang mendapatkan skor *self-assessment* tertinggi di bulan berjalan akan mendapatkan apresiasi untuk menambah motivasi dan semangat dalam mengimplementasikan program budaya AKHLAK.

PGN participates in implementing BUMN AKHLAK's core values as corporate culture. Gas Subholding Employees act as agents of change in implementing Company culture. Alignment of Company culture is carried out through cultural programs based on Critical Behavior required by each function in the Company, namely:

- Ethics and Safety Ambassador, which is a dissemination program and application of Business Ethics & Work Ethics values as well as an intervention program for unsafe/sub standard in each Work Unit/ Subsidiary/Affiliate;
- Coffee Morning Briefing Online/Offline (C'Mon Bro), which is a routine coordination meeting of each Work Unit that focuses on work programs and efforts to achieve performance targets;
- Cross Sharing, which is a sharing program that presents keynote speakers from other Work Units within the Pertamina Group in themes according to the needs of each Work Unit;
- Sharing and Coaching (SharChing), which is a knowledge-sharing and coaching program carried out by fellow Gas SubHolding Employees.
- The AKHLAK Living Core Values (LCV), which is a cultural program tailored to the business needs of each Work Unit and Subsidiaries/Affiliates.

The Company consistently implements the Gas Subholding AKHLAK Culture Program and evaluates its implementation monthly through self-assessment. The self-assessment is conducted at the beginning of each month by the Ksatriya Employee (Community for Internalizing Pertamina Wira Culture) in the Work Unit/ Subsidiary/Affiliate. Three Work Units/Subsidiaries/ Affiliates who get the highest self-assessment scores in the current month will receive appreciation to increase motivation and enthusiasm in implementing the AKHLAK culture program.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, Perusahaan mengadakan *Corporate Culture Award* setiap 1 tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi yang telah mengimplementasikan Budaya AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh Satuan Kerja/Anak Perusahaan/ Afiliasi di lingkungan Subholding Gas.

Based on the self-assessment results, PGN holds a yearly Corporate Culture Award to appreciate Work Units/Subsidiaries/Affiliates that have implemented the AKHLAK Culture seriously and consistently. This event also involves all Work Units/Subsidiaries/Affiliates within the Gas Subholding environment.

Pada tahun 2023, PGN menyelenggarakan *Corporate Culture Award,* dengan kategori yang ada dalam penghargaan tersebut meliputi *The Best Perwira Ksatriya 2023, Top Perwira Kesatria in Working Unit* dan *Top Perwira Ksatriya in Subsidiary and Affiliation.* Kegiatan *Corporate Culture Award* diharapkan menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh Perwira Subholding Gas dalam mengimplementasikan budaya perusahaan, hal ini pun dapat berdampak bagi Perusahaan untuk mempertahankan budaya yang positif dan berkelanjutan.

In 2023, PGN held a Corporate Culture Award, with categories in the award including The Best Ksatriya Employee 2023, Top Ksatriya Employee in Working Unit and Top Kesatria Employee in Subsidiary and Affiliation. The event aims to encourage and motivate for all Gas Subholding Employees in implementing corporate culture and eventually to help the Company maintain a positive and sustainable culture.

Pada tahun 2023, Satuan Kerja dan Anak Perusahaan PGN Group juga mengikuti *Assessment Living Core Values* (LCV) AKHLAK yang dilaksanakan oleh Pertamina untuk melihat sejauh mana implementasi dan komitmen *leader* terhadap pelaksanaan program budaya AKHLAK. *Assessment* tersebut dilakukan oleh seluruh VP dan GM yang ada di Pertamina *Group*. Hasil dari *assessment* tersebut yakni Empat orang *leader* yaitu Direktur Utama PT PGAS Solution dan Direktur Utama PT Saka Energi Indonesia berhasil mendapatkan peringkat 1 dan 3 *The Best Leader Implementing LCV AKHLAK* kategori GM di Pertamina Group serta *Group Head, Engineering and Technology* dan *Group Head, Gas and LNG System Management* berhasil mendapatkan peringkat 1 dan 2 *The Best Leader Implementing LCV AKHLAK* kategori VP di Pertamina Group. Empat *leader* tersebut bersaing dengan 261 VP dan 105 GM lainnya yang berasal dari entitas lain di Pertamina *Group*. Dari segi Subholding Gas secara keseluruhan, rata-rata skor *Assessment* LCV AKHLAK adalah sebesar 374 dengan *Maturity Level Commitment*. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata *leader* yang berada di Subholding Gas telah menjadi *role model* dalam mendorong implementasi budaya terhadap pencapaian kinerja di unit/fungsi di bawahnya.

In 2023, PGN Group Work Units and Subsidiaries took part in the AKHLAK Living Core Values (LCV) Assessment conducted by Pertamina to see the extent of the Leader's implementation and commitment to the AKHLAK culture program implementation. The assessment was carried out by all VPs and GMs in the Pertamina Group. The results of this assessment were that four leaders, namely the President Director of PT PGAS Solution and the President Director of PT Saka Energi Indonesia, won the 1st and 3rd places in The Best Leader Implementing LCV AKHLAK in the GM category in the Pertamina Group as well as Group Head, Engineering and Technology and Group Head, Gas and LNG System Management won 1st and 2nd places in The Best Leader Implementing LCV AKHLAK in the VP category at Pertamina Group. The four leaders competed with 261 VPs and 105 other GMs who came from other entities in the Pertamina Group. In terms of overall Gas Subholding, the average AKHLAK LCV Assessment score is 374 with Maturity Level Commitment. This shows that on average the leaders in Gas Subholding have become role models in encouraging the implementation of culture towards achieving performance in the units/functions under their leadership.

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN

PGN Corporate Culture Development and Employee Engagement Improvement

PGN juga memiliki program tambahan untuk penguatan Budaya Perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan *employee engagement,* yaitu:

- Surat Edaran Anti Pelecehan Seksual di Lingkungan Subholding Gas, PGN aktif mengkampanyekan gerakan anti pelecehan seksual untuk mencegah adanya tindakan pelecehan seksual;
- *Cross Talent Mobility,* program ini bertujuan untuk mendapatkan talent yang berpengalaman di lingkungan holding migas, penguatan kompetensi, dan *melting culture;* dan
- *Millennials Empowering*, program ini bertujuan untuk menguatkan kompetensi millennials dalam rangka akselerasi program pengembangan pekerja millennials.

Di tahun 2023, PGN telah melakukan *Employee Engagement Survey* dengan hasil score 4,45 (kategori sangat tinggi dari skala 1-5). Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja PGN merasa terlibat dan terikat secara positif dengan pekerjaan yang diemban dan tujuan perusahaan. Sehingga secara tidak langsung pekerja PGN berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja financial dan operasional perusahaan.

Selain *Employee Engagement Survey*, PGN melakukan pengukuran *Practice Pulse Check* (PPC) setiap 1 (satu) tahun sekali, salah satu tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas implementasi Budaya Perusahaan. Pada tahun 2023, perolehan nilai PPC untuk aspek pengukuran budaya dan iklim organisasi adalah sebesar 91,21 dari 100. Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya AKHLAK Perwira Subholding Gas telah terinternalisasi pada diri sendiri dan menerapkan budaya secara konsisten.

PGN also has developed additional programs to strengthen Company Culture, create a positive work environment, and increase employee engagement, namely:

- Circular on Anti-Sexual Harassment in the Gas Subholding Environment, PGN actively campaigns for the anti-sexual harassment movement to prevent acts of sexual harassment;
- Cross Talent Mobility, this program aims to obtain experienced talent in the oil and gas holding environment, strengthening competence and melting culture; And
- Millennials Empowering, this program aims to strengthen the competence of millennials to accelerate the development programs of millennials employees.

In 2023, PGN has conducted an Employee Engagement Survey with a score of 4.45 (very high category on a scale of 1-5). This indicates that PGN employees feel positively involved and connected to the work they do and the company's goals. Therefore, indirectly, PGN employees strive to always improve the company's financial and operational performance

In addition to the Employee Engagement Survey, PGN conducted a measurement of annual Practice Pulse Check (PPC) measurements, which aims to measure the effectiveness of the implementation of Corporate Culture. In 2023, the PPC score for the aspect of measuring organizational culture and climate was 91.21 out of 100. The results of this score indicate that the Gas Subholding Employee's AKHLAK cultural values have been internalized within themselves and they apply the culture consistently.

PROGRAM ESOP/MSOP
ESOP/MSOP Program

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 November 2003, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 dari Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui program kepemilikan saham oleh karyawan (ESA) dan program kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) dengan syarat dan ketentuan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tersebut, Perusahaan menetapkan 3 program untuk peserta ESA, sebagai berikut:

a. Memberikan peserta ESA saham secara gratis sebagai penghargaan atas kontribusi kepada Perusahaan masing-masing sebesar rata-rata 2 kali jumlah penghasilan bulanan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
b. Peserta ESA juga dapat membeli saham dengan pembayaran menggunakan bonus tahun 2003 dengan sebanyak-banyaknya 3 kali penghasilan bulanannya. Pembelian saham melalui cara ini memperoleh diskon sebesar 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
c. Apabila peserta ESA bersedia menggunakan haknya pada program 1 dan 2, maka peserta ESA diberi kesempatan membeli saham secara tunai menggunakan dana sendiri dengan diskon 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di bursa efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.

Berdasarkan rapat Dewan Komisaris pada 17 November 2003, yang berhak mengikuti program MSOP adalah Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen senior pada tingkatan tertentu. Dalam program ini, jumlah saham baru yang akan diterbitkan tidak melebihi 5% dari modal ditempatkan dan disetor dengan maksimum periode penerbitan saham 3 tahun dan dilaksanakan dalam 3 tahap dengan jangka waktu pelaksanaan program keseluruhan selama 5 tahun dengan perincian berikut:

1. Tahap Pertama
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 50% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham 110% dari harga penawaran umum perdana atau

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 3 November 2003, as stated in Deed No. 5 from Fathiah Helmi, S.H., shareholders approved the employee share ownership program (ESA) and management share ownership program (MSOP) with terms and conditions determined by the Board of Commissioners. Based on the results of the EGMS decision, the Company determined 3 programs for ESA participants, as follows:

a. Providing ESA participants with free shares as appreciation for their respective contributions to the Company amounting to an average of 2 times their monthly income. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the date of listing of the Company's shares on the Stock Exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.
b. ESA participants can also buy shares with payments using the 2003 bonus with a maximum of 3 times their monthly income. Purchasing shares with bonus will receive a discount of 18% from the offering price. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the date of listing of the Company's shares on the Stock Exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.
c. If ESA participants are willing to exercise their rights in programs 1 and 2, then ESA participants are given the opportunity to buy shares in cash using their own funds at a discount of 18% from the offering price. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the date of listing of the Company's shares on the stock exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.

Based on the Board of Commissioners meeting on 17 November 2003, those entitled to participate in the MSOP program are the Directors, Board of Commissioners and Senior Management at certain levels. In this program, the number of new shares to be issued does not exceed 5% of the issued and paid-up capital with a maximum share issuance period of 3 years and is implemented in 3 stages with an overall program implementation period of 5 years with the following details:

1. First Stage
   The maximum number of shares to be issued is 50% x 5% x the amount of issued and fully paid capital with a share exercise price of 110% of the initial public offering price or IDR 1,650. The granting of rights

PROGRAM ESOP/MSOP
ESOP/MSOP Program

sebesar Rp1.650. Pemberian hak dilakukan pada 15 Desember 2003 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Desember 2004.

2. Tahap Kedua
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan Dewan Komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata-rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2005 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2006.
3. Tahap Ketiga
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata-rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2006 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2007. Program MSOP tahap pertama sebanyak 108.024.675 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2005, tahap kedua sebanyak 53.930.825 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2007 dan tahap ketiga sebanyak 53.551.388 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2008.

Sepanjang tahun 2023, tidak ada program kepemilikan saham ESOP/MSOP oleh karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris yang dilaksanakan di PGN.

URAIAN SINGKAT KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN

PGN telah mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. PGN juga memastikan bahwa Perusahaan memiliki dan melaksanakan kebijakan untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan. Pada tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kepemilikan saham Perusahaan.

was carried out on 15 December2003 with a period of obtaining compensation rights for 1 year. The 1 year implementation period began on 15 December 2004.

2. Second Stage
   The maximum number of shares to be issued is 25% x 5% x the amount of issued and fully paid-up capital with the share exercise price to be determined by the Board of Commissioners with the minimum price being the average share price during the 25 trading days prior to the announcement of the relevant general meeting of shareholders. . The granting of rights was carried out on 15 February 2005 with a period of 1 year to obtain compensation rights. The 1 year implementation period began on 15 February 2006.
3. Third Stage
   The maximum number of shares to be issued is 25% x 5% x the amount of issued and fully paid up capital with the share exercise price to be determined by the commissioner with the minimum price being the average share price during the 25 trading days prior to the announcement of the relevant general meeting of shareholders. The granting of rights was carried out on 15 February 2006 with a period of 1 year to obtain compensation rights. The 1 year implementation period started on 15 February 2007. The first phase of the MSOP program of 108,024,675 shares was completed in 2005, the second phase of 53,930,825 shares was completed in 2007 and the third phase of 53,551,388 shares was completed in 2008.

Throughout 2023, there was no ESOP/MSOP share ownership program for employees, Board of Directors or Board of Commissioners implemented at PGN.

BRIEF DESCRIPTION OF MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE POLICY

PGN has disclosed the share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors members in the Company Profile chapter of this Annual Report. PGN also ensures that the Company has established and implemented a policy to disclose share ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after ownership or any change in ownership of Company's shares. In 2023, there was no transactions carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the Company's share ownership.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Perseroan memiliki dan menjalankan Pedoman *Whistleblowing System* No. P-002/A011 tanggal 2 Agustus 2021. Sejalan dengan komitmen dalam implementasi GCG, PGN senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman *Whistleblowing System* merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di Perusahaan yang tidak dapat terselesaikan melalui prosedur normal.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing System* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga pihak-pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran.

Tujuan pelaksanaan *Whistleblowing System* ini sebagai berikut:
1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Stakeholder.
2. Sebagai saluran pelaporan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur normal organisasi.
3. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.
4. Menghindari publikasi negatif terhadap Perseroan.
5. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perseroan dengan stakeholder sebagai pelaku usaha dan mitra Perseroan.
6. Sebagai salah satu upaya pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Selama periode tahun 2023, PGN telah melaksanakan sosialisasi terkait *whistleblowing system* kepada para karyawan yang disampaikan melalui:
1. Agenda *entry meeting* audit.
2. *Broadcast email* setiap bulan.
3. Survei Indeks *Fraud Perception* (PERFECT) pada bulan September 2023.

MECHANISM TO SUBMIT VIOLATION REPORT

The Company has established and implemented the Whistleblowing System Guidelines Number P-002/A011 dated 2 August 2021. In line with its commitment to implementing GCG, PGN always pays attention to the interests of stakeholders based on the principles of fairness and equality. Whistleblowing System Guidelines are systems that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information regarding violation acts that are indicated in companies that cannot be resolved through normal procedures.

Reports obtained from the Whistleblowing System mechanism need to get attention and follow-up, including the appropriate sentencing to provide a deterrent effect for perpetrators of violations and also for those who intend to commit violations.

The purpose of implementing Whistleblowing System are as follows:
1. As a basis or guideline for implementation of handling reports of violations from Stakeholders.
2. As a reporting channel for matters that cannot be resolved through the organization's normal procedures.
3. Ensure that an effective violation reporting resolution mechanism is implemented within an adequate time period.
4. Prevent negative publications regarding the Company.
5. Support the principle of fairness in the relations between the Company and stakeholders as business actors and the Company's partners.
6. As an measure to disclose various problems in companies that are not in accordance with the ethical standards applicable in the Company.

During the 2023 period, PGN has carried out socialization regarding the whistleblowing system to employees which was conveyed through:
1. Audit meeting entry agenda.
2. Monthly email broadcast.
3. Fraud Perception Index Survey (PERFECT) in September 2023.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

PROSES *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Ketentuan dalam Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan terdiri dari:

1. Kewajiban Perusahaan menerima dan menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran. Dalam hal ini Perusahaan:
   a. Wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal;
   b. Wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak (anonim);
   c. Menyediakan saluran pengelolaan pelaporan pelanggaran yaitu melalui Komite Etik;
   d. Komite Etik akan meneruskan pelaporan pelanggaran sesuai dengan konteks pihak yang dilaporkan.
2. Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, yaitu:
   a. Pelaporan pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi maupun Perwira Subholding Gas;
   b. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan pada saat/di luar jam kerja;
   c. Pelaporan pelanggaran disampaikan melalui *e-mail, website*, surat, atau datang langsung ke Komite Etik;
   d. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis;
   e. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan pelanggaran;
   f. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa resmi lainnya dengan mekanisme sebagai berikut:
      1) Melalui *website* Perseroan yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: https://wbs.pgn.co.id
      2) Melalui *e-mail* pengelola WBS yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: pgn.etik@pertamina.com;

WHISTLEBLOWING SYSTEM PROCESS

Provisions in managing the Company violation report consist of:

1. Company obligations on receiving and completing violation reports. In this case the Company:
   a. Must receive violation reports from internal and external parties;
   b. Must accept and complete violation reports from reporters who include their identity and those who do not (anonymous);
   c. Providing a channel for managing violation reports, namely through the Ethics Committee;
   d. The Ethics Committee will follow-up violation reports in accordance with the context of the reported parties.
2. The Company has regulated a mechanism in receiving Violation Reports, namely:
   a. Violation reporting are submitted to the Ethics Committee, both concerning the Board of Commissioners, Board of Directors and Gas Subholding Employees;
   b. Violation reporting can be done during/outside working hours;
   c. Violation reporting is submitted via e-mail, website, letter, or directly to the Ethics Committee;
   d. The Company accepts every violation report submitted by stakeholders and/or stakeholder representatives either verbally or in writing;
   e. The Company provides an explanation regarding the policies and procedures for resolving violation reports when stakeholders and/or stakeholder representatives submit a violation reporting;
   f. Reporting of the alleged violations can be submitted in writing or orally in Indonesian or other official languages with the following mechanism:
      1) Through the Company's operating website, it accepts violation reports every day (Monday-Sunday) for 24 hours at the address: https://wbs.pgn.co.id
      2) Via e-mail, the operational WBS manager receives violation reports every day (Monday-Sunday) for 24 hours at the address: pgn.atik@pertamina.com;

3) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan c.q Komite Etik PGN, dengan cara diantar langsung atau pos ke Perseroan dengan alamat: Komite Etik PT PGN Tbk, Gedung Graha PGAS Lantai 3, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140. Sistem *whisthleblowing* tersebut tersedia bagi seluruh karyawan, vendor, pemasok, masyarakat, dan pemangku lainnya.

3. Pelaporan pelanggaran secara tertulis disarankan untuk dilengkapi bukti pendukung yang berkaitan dengan bukti indikasi awal terjadinya pelanggaran;
4. Jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas maka Perseroan memberikan tanda terima, dan jika pelaporan pelanggaran tidak dilengkapi dengan identitas maka akan dicatat dalam daftar pelaporan pelanggaran;
5. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
   a. Fotokopi bukti identitas *stakeholders* dan perwakilan *stakeholders*;
   b. Surat Kuasa dari *stakeholders* kepada perwakilan *stakeholders* yang menyatakan bahwa *stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*;
   c. Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
6. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perlindungan bagi Pelapor juga menjadi hal yang diperhatikan dalam Pedoman *Whistleblowing System* Perusahaan. Beberapa hal yang diatur sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor pelanggaran;
2. Perlindungan pelapor pelanggaran dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan Pelapor yang meliputi:
   a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan;
   b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.

3) Submit an official letter addressed to the Company c.q PGN Ethics Committee, by direct delivery or post to the Company at the address: PT PGN Tbk Ethics Committee, Graha PGAS Building, 3rd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, West Jakarta 11140. The whistleblowing system is available to all employees, vendors, suppliers, communities and other stakeholders.

3. Written violation reports are recommended to be completed with supporting evidence relating to evidence of the initial indications of the violation;
4. If the reporting of the violation is submitted in writing with an identity, the Company will provide a receipt, and if the reporting of the violation is not accompanied by an identity, it will be recorded in the violation reporting list;
5. If a violation report is submitted by a stakeholder representative, then in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:
   a. Copy of evidence of identity of stakeholders and stakeholder representatives;
   b. Power of Attorney from the stakeholder to the stakeholder representative stating that the stakeholder gives authority to act for and on behalf of the stakeholder;
   c. If the stakeholder representative is an institution or legal entity, it must be attached with a document stating that the party submitting a report of violation is authorized to represent the institution or legal entity.
6. The Company is required to submit proof of receipt of the violation reporting to stakeholders and/or representatives of stakeholders who submitted reporting.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Protection for Whistleblowers is also a matter of concern in the Company's Whistleblowing System Guidelines. Issues regulated as protection for whistleblowers are as follows:

1. The Company is obliged to protect whistleblowers;
2. Protection of whistleblowers is intended to boost the courage to report violations;
3. Whistleblower Protection which includes:
   a. Guarantee that the identity of the reporter and the contents of the report shall be kept confidential;
   b. Security guarantee for the reporter and his/her family.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

4. Terhadap pelapor pelanggaran yang merupakan pekerja di lingkungan perusahaan akan mendapatkan perlindungan dari upaya balas dendam (*retaliation*) yang berpotensi timbul, antara lain:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan;
   d. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi (*personal file record*).

PENANGANAN PENGADUAN

Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, di antaranya:

1. Pelaporan Pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PGN Group baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja Perusahaan atau *Stakeholders* lain. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Komite Etik melalui sarana/media Pelaporan Pelanggaran resmi yang telah disediakan baik yang disampaikan pada saat/di luar jam kerja, secara lisan maupun tertulis dan dengan identitas maupun tanpa identitas (anonim).
2. Dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran, pelapor disarankan untuk melampirkan bukti/ indikasi awal yang dapat berupa dokumen, surat, barang maupun informasi yang dapat menunjukkan bahwa suatu dugaan pelanggaran telah terjadi untuk memudahkan proses verifikasi.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh Perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas, pelapor diminta untuk menyerahkan dokumen tambahan sebagai berikut:
   a. Fotokopi identitas *Stakeholders* dan Perwakilan *Stakeholders*.
   b. Surat kuasa dari *Stakeholders* kepada Perwakilan *Stakeholders* yang menyatakan bahwa *Stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *Stakeholders*. Jika Perwakilan *Stakeholders* adalah Lembaga atau badan Hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili Lembaga atau badan hukum tersebut.

4. A whistleblower will receive protection from the Company against adverse treatment, such as:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion;
   c. Harassment or discrimination in any form whatsoever, and;
   d. Adverse records in personal data files (personal file record).

HANDLING OF COMPLAINTS

The Company has regulated the mechanism for Receiving Violation Reports, including:

1. Committee for alleged violations that occur within the PGN Group, whether involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, Company Employees or other Stakeholders. Violation Reports are addressed to the Ethics Committee through the official Violation Reporting facilities/media that have been provided, whether submitted during/outside working hours, verbally or in writing and with identity or without identity (anonymous).
2. In submitting a Violation Report, the wistleblower is advised to attach initial evidence/indications which can be in the form of documents, letters, goods or information that can show that an alleged violation has occurred to facilitate the verification process.
3. In the event that a Stakeholders Representative submits Violation Report, then in addition to the above documents, the wistleblower is asked to submit the following additional documents:
   a. Photocopy of identity of Stakeholders and Stakeholders Representatives.
   b. Power of attorney from the Stakeholders to the Stakeholders' Representative stating that the Stakeholders grant authority to act for and on behalf of the Stakeholders. In the event that the Stakeholders Representative is an Institution or Legal Entity, it must be attached by a document stating that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the Institution or Legal Entity.

4. Komite Etik akan membuat tanda terima Pelaporan Pelanggaran dan menyampaikan tanda terima tersebut kepada Pelapor Pelanggaran atau perwakilannya. Terhadap Pelaporan Pelanggaran yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor (anonim), Komite Etik akan mencatat pelaporan tersebut ke dalam daftar/*database* Pelaporan Pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik akan menindaklanjuti setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan
   Komite Etik menerima setiap pelaporan pelanggaran dari pelapor melalui berbagai saluran pelaporan WBS yang telah disediakan, melakukan pengelolaan *database* pelaporan dan *monitoring* atas status setiap Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima.

2. Verifikasi Laporan
   Komite Etik melaksanakan pemeriksaan administratif atas Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima melalui WBS untuk melihat terpenuhi atau tidaknya kriteria pelanggaran yang dilaporkan untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Penelaahan Laporan
   Komite Etik melakukan pemeriksaan substantif atas Pelaporan Pelanggaran yang diterima dan telah memenuhi kriteria, untuk melihat kecukupan bukti permulaan untuk dapat dilakukan investigasi lebih lanjut.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Perusahaan membentuk Komite Etik sebagai organ independen yang berfungsi untuk mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PGN *Group*. Dalam kondisi Perusahaan belum membentuk unit khusus pengelola WBS (Komite Etik), maka pengelolaan WBS diserahkan kepada Satuan Kerja Audit Internal, dengan personil yang dapat berasal dari fungsi atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi Internal Audit, Hukum, GCG dan Sumber Daya Manusia. Saat ini pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS di Perusahaan dilaksanakan oleh Komite Etik yang berasal dari unsur pekerja Satuan Kerja *Internal Audit* PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang independensi dan objektivitasnya diatur dalam Piagam *Internal Audit* dan Kode Etik *Auditor*.

4. The Ethics Committee will make a receipt for Violation Reporting and submit the receipt to the Whistleblower or its representative. For Violation Reports with no identity of the reporter (anonymous), the Ethics Committee will record the report in the Violation Reporting list/database.

In carrying out its duties, the Ethics Committee will follow-up on any Violation Report received through the following stages:

1. Receipt of Report
   The Ethics Committee receives every violation report from the whistleblower through the various WBS reporting channels that have been provided, manages the reporting database and monitors the status of each Violation Report that has been received.
2. Verification of Report
   The Ethics Committee carries out administrative examinations on Violation Reports that have been received through the WBS to see whether the criteria for reported violations are met to be followed up.

3. Review of Report
   The Ethics Committee carries out substantive examinations of the Violation Reports that are received and have met the criteria, to determine the adequacy of the initial evidence for further investigation.

PARTIES AUTHORIZED TO MANAGE REPORTS

The Company established an Ethics Committee as an independent organ whose function is to manage the Violation Reporting System or Whistleblowing System (WBS)in the PGN Group. In the event that the Company has not yet established a special WBS management unit (Ethics Committee), the management of the WBS is handed over to the Internal Audit Work Unit, with personnel from functions or work units that have Internal Audit, Legal, GCG and Human Resources duties and functions. Currently, the management of the Violation Reporting System or WBS in the Company is conducted by the Ethics Committee which comes from the employees of the Internal Audit Work Unit of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. whose independence and objectivity are regulated in the Internal Audit Charter and Auditor Code of Ethics.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA

Apabila terdapat Pelaporan Pelanggaran yang didapati telah memenuhi unsur kecukupan bukti permulaan, maka atas rekomendasi Komite Etik, Perusahaan dapat membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi atas permasalahan atau pelanggaran yang dilaporkan. Komite Etik akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut seluruh Pelaporan Pelanggaran yang diterima.

COMPLAINT HANDLING AND FOLLOW-UP RESULTS

If there is a reporting of violations are found to to meet the adequacy of preliminary evidence, the Company will form an Investigation Team to conduct an investigation of the reported problem or violation. The Ethics Committee will monitor the follow-up of all reporting violation received.

PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2023

Terdapat 12 (dua belas) pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2023 melalui saluran pengaduan *Whistleblowing System* dan pengelolaan 5 (lima) laporan pengaduan luncuran dari tahun sebelumnya dengan progres sebagai berikut:

COMPLAINTS VIA THE WHISTLEBLOWING SYSTEM IN 2023

Throughout 2023, there were 12 (twelve) reports received through the Whistleblowing System and 5 (five) complaint reports from the previous year are still in processed with the following progress:

No.		Uraian Description	Total
A		*Outstanding* pelaporan WBS per 1 Januari 2023 Outstanding WBS reporting as of January 1, 2023	5
B		Tambahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Additional WBS reporting until December 31, 2023	12
C		Total pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Total WBS reporting until December 31, 2023	17
D		Selesai ditindaklanjuti hingga 31 Desember 2023 Complete follow-up until December 31, 2023	12
E	E1	*Outstanding* pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Outstanding WBS reporting as of December 31, 2023	5
	E2	Verifikasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Verification of WBS reporting until December 31, 2023	1
		Penelaahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Review of WBS reporting until December 31, 2023	4
	E3	Investigasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2023 Investigation of WBS reporting as at December 31, 2023	0

PENYUSUNAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements Preparations

Perusahaan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh *Accounting Group* yang didukung oleh tenaga akuntan profesional yang dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang Akuntansi, baik dari lembaga internasional maupun lembaga nasional sebagai berikut:

a) 18 orang Akuntan memiliki sertifikat *Chartered Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (The Indonesian Institute of Accountants);
b) 14 orang Akuntan bersertifikat *Certified Professional Management Accountant* (CPMA) dari Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (The Indonesian Institute of Management Accountants);
c) 7 orang Akuntan bersertifikat *Certified* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (CPSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (The Indonesian Institute of Accountants);
d) 1 orang Akuntan bersertifikat Sertifikat Ahli Kepabeanan (PPJK) dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
e) 9 orang Akuntan bersertifikat *Certified Management Accountant* (CMA) dari The Institute of Management Accountants;

Selain sertifikasi profesi, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, personel *Accounting Group* juga turut aktif dalam mengikuti forum seminar, kongres, konferensi, simposium dan pelatihan nasional maupun internasional, seperti Seminar *International Financial Reporting Standards* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kongres Akuntansi yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

The Company prepares the Consolidated Financial Statements based on the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies. The preparation of Financial Statements is carried out by the Accounting Group, which is supported by professional accountants with professional certificates in the field of Accounting, both from international and national institutions as follows:

a) 18 Accountants with Chartered Accountant certificate from the Institute of Indonesia Chartered Accountants;
b) 14 Accountants with Certified Professional Management Accountant (CPMA) certificate from the Indonesian Institute of Management Accountants;
c) 7 Certified Accountants Statements of Financial Accountings Standards (CPSAK) from the Institute of Indonesia Chartered Accountants);
d) 1 Accountants with Customs Certificate from the Financial Education and Training Agency;
e) 9 Accountants with Certified Management Accountant (CMA) certificate from The Institute of Management Accountants;

In addition to professional certification, to improve competence and professionalism, Accounting Group personnel are also active in participating in seminar forums, congress, conferences, national and international training and training, such as the International Financial Reporting Standards seminar organized by the Institute of Indonesia Chartered Accountant, Indonesian Management Accountants Association and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and Accounting Congress organized by the Institute of Indonesian Chartered Accountant.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

Pemenuhan terhadap kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan dilakukan Perusahaan selaras dengan ketentuan berlaku. Upaya ini dilakukan dengan penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web www.pgn.co.id.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tanggal yang telah ditetapkan serta telah dipublikasikan pada situs web PGN.
2. Laporan Tahunan PGN yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, investor, *rating agency*, dan lainnya, serta dipublikasikan melalui situs web Perusahaan.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, di antaranya adalah Visi, Misi, Budaya Perusahaan, Komposisi dan Profil Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web PGN.
2. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, atau bentuk tertulis lainnya dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan pada situs web PGN, media sosial, dan lainnya agar investor, dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perusahaan.
3. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan Perusahaan dipublikasikan pada Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan.

Fulfillment of transparency obligations and publication of financial and non-financial conditions are carried out by the Company in line with applicable regulations. This effort is carried out by conveying and publishing information, both through print media and the website, www.pgn.co.id.

TRANSPARENCY OF COMPANY'S FINANCIAL CONDITIONS

1. The Quarterly Published Financial Report was submitted to the regulator in accordance with the provisions and on the specified dates and published on the PGN website.
2. The PGN Annual Report is prepared and presented in accordance with regulations, submitted to regulators, investors, rating agencies, and others, and published on the Company's website.

TRANSPARENCY OF COMPANY NON-FINANCIAL CONDITIONS

1. Information on Corporate Governance, such as the Vision, Mission, Corporate Culture, Composition, and Profile of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as internal provisions related to governance that include the Articles of Association and the Committee Charters, are published on the PGN website.
2. Information on Company Products and Services is published in the Annual Report or other written form, as well as electronic information available on the PGN website, social media, and other channels, so that investors and the general public can easily access information on the Company's products and services.
3. Information regarding the transparency of the Company's ownership structure is published in the Annual Report and on the Company's website.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
Conflict of Interest Guidelines

PGN memiliki dan menerapkan kebijakan yang terkait dengan Benturan Kepentingan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi Nomor P-004/A011. Pedoman tersebut terakhir diperbarui pada 15 September 2021. Pedoman ini senantiasa disosialisasikan agar setiap Perwira Subholding Gas dapat menjaga integritas, etika, dan keberlanjutan bisnis. Adapun isi dari Pedoman Benturan Kepentingan yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:

PRINSIP DASAR
a. Insan PGN yang di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
b. Setiap potensi maupun kenyataan terjadinya Benturan Kepentingan wajib dilaporkan kepada Atasan Langsung.

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Situasi Benturan Kepentingan yang dapat dihadapi oleh Insan PGN, antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Situasi yang menyebabkan Insan PGN menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak Pemberi;
b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset PGN untuk kepentingan pribadi atau golongan;
c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau informasi PGN dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
d. Situasi rangkap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan PGN atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

PGN has established and implemented a Conflict of Interest policy as stated in the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines Number P-004/A011, last updated on 15 September 2021. These guidelines are continuously disseminated so that every Gas Subholding Employee can maintain integrity, ethics and business sustainability. The contents of the Company's Conflict of Interest Guidelines are as follows:

BASIC PRINCIPLES
a. PGN employees who in carrying out their activities have the potential to face Conflict of Interest, are not allowed to participate in the decision-making process.
b. Any potential or actual occurrence of a Conflict of Interest must be reported to the Direct Supervisor.

CONFLICT OF INTEREST SITUATIONS
Conflict of interest situations that PGN employees may face include, but are not limited to:
a. Situations that cause PGN Employees to accept gratification or giving or receiving gifts/souvenirs or entertainment for a decision or position that benefits the Giver;
b. Situations that cause the use of positions or PGN assets for personal or group interests;
c. Situations that cause confidential position information or PGN information to be used for personal or group interests;
d. The situation of having multiple positions in several companies that have a direct or indirect relationship, similar or dissimilar, can result in the use of one position for the benefit of another position;
e. Situations that provide special access to PGN Employee or certain parties for not following the applicable procedures and provisions;
f. Situations that cause the supervision process to not be in accordance with procedures due to the influence and expectations of the party being supervised;

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
Conflict of Interest Guidelines

g. Situasi di mana terdapat kesempatan penyalahgunaan jabatan;
h. Situasi di mana seseorang dapat menentukan sendiri besaran gaji/remunerasi;
i. Situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PGN;
j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi untuk menyalahgunakan wewenang;
k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan PGN, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di PGN; dan
l. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara Insan PGN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan PGN sehubungan dengan jabatannya di PGN.

g. Situations where there is an opportunity for abuse of office;
h. Situations where someone can determine the amount of salary/remuneration themselves;
i. The situation of working outside the main job, unless it is in accordance with the rules and regulations that apply at PGN;
j. Situations that allow the use of discretion to abuse authority;
k. Situations that make it possible to provide more information than has been determined by PGN, privileges and opportunities for prospective providers of goods/services to win in the process of procuring goods/services at PGN; and
l. Situations where there is an affiliate/familial relationship between PGN Personnel and other parties who have an interest in the decisions and/ or actions of PGN Personnel in connection with their position at PGN.

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

a. Setiap Insan PGN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan situasi Benturan Kepentingan tersebut melalui penyusunan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung (dengan tembusan: UPG PGN) segera setelah berada dalam situasi Benturan Kepentingan tersebut.
b. Insan PGN wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan Keluarga Inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PGN; dan
c. Pelaporan atas terjadinya situasi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan PGN ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

CONFLICT OF INTEREST REPORTING

a. Every PGN Employee who has the potential and/ or has been in a Conflict of Interest situation, is obliged to report the Conflict of Interest situation by preparing a Statement of Potential Conflict of Interest to the Direct Supervisor (with a copy: UPG PGN) immediately after being in the Conflict of Interest situation.
b. PGN Personnel are required to make a Statement of Potential Conflict of Interest, if they have a blood relationship in the Nuclear Family relationship with PGN members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
c. Reporting of a Conflict of Interest situation must be done in good faith and not constitute a personal complaint regarding a PGN policy or be based on bad intentions/slander.

AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor

PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja EY, firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia, untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Mei 2023, yang menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young)* untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan dalam audit laporan keuangan Perseroan tahun berjalan dan melaporkannya pada RUPS mendatang. Direksi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP hingga kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melakukan kajian terhadap calon Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dalam RUPS.
- Komite Audit mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan urutan peringkat hasil penilaian.
- Dewan Komisaris menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahunan dan meminta wewenang kepada RUPS untuk menetapkan besaran nilai jasa KAP tersebut.
- Apabila RUPS menerima usulan dari Dewan Komisaris, maka RUPS akan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris. Namun, apabila RUPS menolak usulan tersebut, maka RUPS akan menetapkan Kantor Akuntan Publik.
- Direksi melaksanakan kontrak jasa pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik sesuai keputusan RUPS. Salinan

EXTERNAL AUDITOR APPOINTMENT PROCESS

The Company appointed Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm, a member firm of Ernst & Young global network in Indonesia, to audit the Financial Statements for Fiscal Year 2023. This appointment was made based on the Annual General Meeting of Shareholders on 30 May 2023, which appointed the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) to carry out the 2023 Financial Year Consolidated Financial Report Audit, PSA 62 Compliance Audit, Micro and Small Business Funding Financial Report Audit related to Social and Environmental Responsibility Programs, and Implementation of Agreed Procedures On the Report on the Performance Evaluation Results of Corporate KPIs and Individual KPIs for the 2023 Financial Year.

The Board of Commissioners is responsible for proposing a Public Accounting Firm (KAP) that will be assigned to audit the Company's financial statements for the current year and report it at the upcoming GMS. The Board of Directors assists the Board of Commissioners in implementing the procurement of KAP services until the contract is implemented in accordance with applicable regulations.

- The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, conducts a study of the prospective Public Accounting Firm proposed at the GMS.
- The Audit Committee proposes candidates for Public Accounting Firms to the Board of Commissioners based on the ranking of the assessment results.
- The Board of Commissioners determines the Public Accounting Firm that will be proposed to the GMS.
- The Board of Commissioners proposes to the GMS to appoint a Public Accounting Firm that will audit the annual financial reports and request authority from the GMS to determine the value of the KAP's services.
- If the GMS accepts the proposal from the Board of Commissioners, the GMS will determine the Public Accounting Firm proposed by the Board of Commissioners. However, if the GMS rejects the proposal, the GMS will appoint a Public Accounting Firm.
- The Board of Directors carries out a service contract for auditing the Company's financial statements with the Public Accounting Firm in accordance with

AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor

kontrak antara Direksi dengan Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani.

Adapun ruang lingkup jasa audit yang dilakukan Ernst & Young (EY) adalah sebagai berikut:
- Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023.
- Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PGN Tahun Buku 2023.
- Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) tahun buku 2023.
- Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti jika KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Pada tahun 2023, total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku sebesar Rp3.218.468.000,00 (termasuk OPE dan PPN). Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) juga ditunjuk untuk melakukan jasa audit, sebagai berikut:
1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Saka Energi Indonesia Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp2.127.870.000,00 (termasuk OPE dan PPN);
2. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Solution Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp339.438.000,00 (termasuk OPE dan PPN);
3. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Gagas Energi Indonesia Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp308.580.000,00 (termasuk OPE dan PPN);
4. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGN LNG Indonesia Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp310.800.000,00 (termasuk OPE dan PPN);

the GMS decision. A copy of the contract between the Board of Directors and the Public Accounting Firm is submitted to BPK RI no later than 7 (seven) days after the contract is signed.

The scope of audit services provided by Ernst & Young (EY) is as follows:
- General Audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2023 Fiscal Year.
- Audit on the Financial Statement of the PGN Partnership and Community Development Program for the 2023 Fiscal Year.
- Audit Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Regulations (PSA 62) for Fiscal Year 2023.
- Implementation of Agreed Procedures on the Report on the Performance Evaluation Results of Corporate KPI and Individual KPI for the 2023 Fiscal Year.

The Board of Commissioners also has the authority to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other requirements, including appointing a replacement Public Accounting Firm if the appointed KAP cannot complete its work.

In 2023, the total costs incurred for audit of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year was Rp3,218,468,000.00 (including OPE and VAT). Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of the Ernst & Young global network in Indonesia) was also appointed to conduct audit services, as follows:
1. General Audit on PT Saka Energi Indonesia Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 at a cost of Rp2,127,870,000.00 (including OPE and VAT);
2. General Audit on PT PGAS Solution Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 at a cost of Rp339,438,000.00 (including OPE and VAT);
3. General Audit on PT Gagas Energi Indonesia Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 at a cost of Rp308,580,000.00 (including OPE and VAT);
4. General Audit on PT PGN LNG Indonesia Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 at a cost of Rp310,800,000.00 (including OPE and VAT);

5. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permata Graha Nusantara Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp308.580.000,00 (termasuk OPE dan PPN);
6. Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Kalimantan Jawa Gas Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp306.915.000,00 (termasuk OPE dan PPN);
7. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Tahun Buku 2023 dengan biaya Rp306.249.000,00 (termasuk OPE dan PPN); dan
8. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Gas Tahun Buku 2023 dengan biaya sebesar Rp3.596.400.000,00 (termasuk OPE dan PPN).

Total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan jasa audit terhadap PGN dengan ruang lingkup tersebut dan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak sebesar Rp7.604.832.000,00 (termasuk OPE dan PPN). Daftar Akuntan dan Kantor Akuntan Publik PGN dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

5. General Audit on PT Permata Graha Nusantara Consolidated Financial Statements of for the 2023 Fiscal Year at a cost of Rp 308,580,000.00 (including OPE and VAT);
6. General Audit on PT Kalimantan Jawa Gas Financial Statements for Fiscal Year 2023 at a cost of Rp306,915,000.00 (including OPE and VAT);
7. General Audit on PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year at a cost of Rp 306,249,000.00 (including OPE and VAT); And
8. General Audit on PT Pertamina Gas Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year at a cost of Rp3,596,400,000.00 (including OPE and VAT).

The total costs incurred for the implementation of audit services on PGN with this scope and the general audit of the financial statements of Subsidiaries amounted to Rp7,604,832,000.00 (including OPE and VAT). List of PGN Accountants and Public Accounting Firms in the last 5 (five) years is as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Firms	**Akuntan Publik** Public Accountant
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (member firm of PricewaterhouseCoopers global network in Indonesia)	Yusron Fauzan
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (member firm of PricewaterhouseCoopers global network in Indonesia)	Toto Harsono
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (member firm of PricewaterhouseCoopers global network in Indonesia)	Daniel Kohar
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro &Surja (member firm of Ernst & Young global network in Indonesia)	Irwan Haswir
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro &Surja (member firm of Ernst & Young global network in Indonesia)	Irwan Haswir

JASA LAIN

Pihak yang telah ditunjuk Perusahaan sebagai Auditor Eksternal PGN Tahun Buku 2023 tersebut telah menyelesaikan tugasnya secara independen, sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada PGN.

OTHER SERVICES

The party appointed by the Company as PGN's External Auditor for the 2023 Fiscal Year has completed its duties independently, in accordance with the professional standards of public accountants, work agreements and the established audit scope. Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm does not provide other consulting services to PGN.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, PGN berkomitmen untuk terus memberikan data dan informasi terbaru mengenai Perusahaan kepada Publik. Informasi yang disampaikan kepada publik atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakses melalui media-media berikut ini:

a. Pelaporan terhadap informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal baik melalui surat maupun pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
b. PGN juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi Korporasi yang dilakukan melalui *press release* dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dapat diakses melalui *website* PGN. Pada *website* bahasa Indonesia dan Inggris, tersedia akses informasi untuk Laporan Tahunan.
c. Pemberian informasi yang cukup kepada investor dan calon investor melalui media komunikasi seperti telepon, *conference call, e-mail*, dan *website* Perusahaan.
d. Pemberian informasi melalui pertemuan tatap muka secara langsung maupun virtual seperti *one-on-one/group meeting*, kunjungan lapangan, *non-deal roadshow* dan *conference*. Secara proaktif, Perseroan juga mengikuti kegiatan-kegiatan temu publik yang diselenggarakan mandiri maupun institusi pemerintah serta sekuritas di dalam ataupun di luar negeri melalui konferensi, paparan publik, dan *investor summit*.

Sepanjang 2023, Perseroan melalui Investor Relation Division telah mengadakan 173 kali pertemuan/*conference/video call* dengan mengundang dan telah dihadiri oleh analis sekuritas, investor institusi pasar modal, serta pemegang saham untuk berpartisipasi dalam forum pasar modal pada kegiatan sebagai berikut:

- *Mandiri Investment Forum* pada 2 Februari 2023
- *Barclyas Bond Investor Conference* pada 7 Maret 2023

In order to provide convenience for its stakeholders and to fulfill the provisions of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and Financial Services Authority Regulation no. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, PGN is committed to continuing to provide the latest data and information regarding the Company to the Public. Information submitted to the public or stakeholders can be accessed through the following media:

a. Reporting material information and facts to the capital market authority either by letter or electronic reporting to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange through the Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies owned by the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange.
b. PGN also actively publishes every corporate action through press releases in two languages, namely Indonesian and English which can be accessed via the PGN website. On the Indonesian and English websites, access to information for the Annual Report is available.
c. Providing sufficient information to investors and potential investors through communication media such as telephone, conference calls, e-mail and the Company's website.
d. Providing information through direct or virtual face-to-face meetings such as one-on-one/group meetings, field visits, non-deal roadshows and conferences. Proactively, the Company also participates in public gathering activities held independently and by government institutions as well as domestic and foreign securities through conferences, public exposure and investor summits.

In 2023, the Company, through its Investor Relations Division, has held 173 meetings/conferences/video calls with securities analysts, capital market investors and shareholders to participate in capital market forums in the following activities:

- Mandiri Investment Forum on 2 February 2023
- Barclays Bond Investor Conference on 7 March 2023

- Retail Webinar Komunitas Investor Rivan Kurniawan pada 23 Maret 2023
- *HSBC Conference* pada 13 Juni 2023
- *Pertamina Investor Day* pada 3 – 4 Juli 2023
- *Barclays Bond Investor Roadshow* pada 3 Oktober 2023
- *Public Expose* Tahunan pada 29 November 2023

Pertemuan/*conference*/*video call* tersebut juga telah diungkapkan dalam situs web Perseroan di https://pgn.co.id. Secara umum, penyelenggaraan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut di atas, dilakukan dalam rangka mendorong para pemegang saham agar terlibat dan berinteraksi dengan Perseroan di luar RUPS. Di samping itu, di antara pertemuan-pertemuan tersebut, Perseroan juga mengundang *existing shareholders* untuk datang serta terlibat secara aktif dalam RUPS Perseroan.

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Investor, analis dan Pemegang Saham dapat memperoleh informasi mengenai Perseroan dengan langsung menghubungi *Investor Relation Division* dengan mengirimkan *e-mail* ke PGN.InvestorRelation@pertamina.com ataupun telepon di (6221) 633 4838.

Untuk pelanggan dan calon pelanggan, informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, dapat diperoleh dengan mengirimkan *e-mail* ke pcc135@pertamina.com maupun menghubungi *contact center* di nomor 135.

PGN juga senantiasa memperkuat platform teknologi informasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui *website* Perseroan (www.pgn.co.id), dan sosial media yaitu:

- Instagram (gas_negara),
- Twitter (@Gas_Negara),
- Facebook (Perusahaan Gas Negara),
- YouTube (Perusahaan Gas Negara), serta
- Portal Kementerian BUMN.

- Rivan Kurniawan Investor Community Retail Webinar on 23 March2023
- HSBC Conference on 13 June 2023
- Pertamina Investor Day on 3 – 4 July 2023
- Barclays Bond Investor Roadshow on 3 October 2023
- Annual Public Expose on 29 November 2023

The meeting/conference/video call has also been disclosed on the Company's website at https://pgn.co.id. In general, the holding of all the meetings mentioned above is carried out in order to encourage shareholders to get involved and interact with the Company outside the GMS. In addition, between those meetings, the Company also invites existing shareholders to come and be actively involved in the Company's GMS.

INFORMATION AND COMMUNICATION ACCESS

Investors, analysts and Shareholders can obtain information about the Company by directly contacting the Investor Relations Division by sending an e-mail to PGN.InvestorRelation@pertamina.com or telephone at (6221) 633 4838.

Customers and potential customers can obtained further information about the Company by sending an e-mail to pcc135@pertamina.com or calling the contact center on 135.

PGN also continues to strengthen its information technology platform to maintain and improve reliability in providing integrated, timely and targeted manner information through the Company's website (www.pgn.co.id), and social media, namely:

- Instagram (gas_negara),
- Twitter (@Gas_State),
- Facebook (State Gas Company),
- YouTube (State Gas Company), as well as
- Portal of the Ministry of BUMN.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance

Secara berkala, PGN menyelenggarakan *assessment* GCG untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG di lingkungan Subholding Gas *Group*. Selain itu, Perseroan juga melakukan perbaikan, penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil *assessment* GCG. Secara berkelanjutan, PGN melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen. Pada tahun 2023 PGN telah melakukan *assesment* GCG dengan berbagai parameter sebagai berikut:

PENERAPAN PARAMETER BUMN

Tahun 2023 terjadi perubahan yang mandasar dalam melakukan *review* dan evaluasi implementasi GCG dengan dikeluarkannnya peraturan dari Kementerian BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023. tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Diketahui SK-16/Parameter BUMN selama ini dijadikan acuan oleh PGN dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Tahun 2022 PGN telah melakukan *assessment* GCG menggunakan parameter BUMN SK-16 dengan hasil 99,004. Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi atau *review* (*self assesment)* atas tindak lanjut rekomendasi *assessment* tahun 2022 dengan bantuan pihak independen dan terdapat potensi peningkatan skor sebesar 0,45.

Periodically, PGN conducts GCG assessments to monitor and evaluate the implementation of GCG within the Gas Subholding Group. In addition, the Company also makes improvements, adjustments to the Company's developments and needs, and recommendations from the GCG assessment results. On an ongoing basis, PGN assesses the quality of GCG implementation in collaboration with third parties to obtain more independent assessment results.. In 2023 PGN has carried out a GCG assessment with various parameters as follows:

BUMN (STATE-OWNED ENTERPRISES) PARAMETERS IMPLEMENTATION

In 2023, there was fundamental changes in reviewing and evaluating GCG implementation with the issuance of regulations from the Ministry of BUMN Number PER-2/MBU/02/2023 dated 3 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN, as well as based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-12/S.MBU/08/2023 dated 16 August 2023. concerning the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. It is known that SK-16/BUMN Parameters has been used as a reference by PGN in assessing the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

In 2022, PGN has conducted a GCG assessment using BUMN SK-16 parameters with results of 99.004. In 2023, an evaluation or review (self-assessment) was conducted on the follow-up to the 2022 assessment recommendations with the help of an independent party and there was potential for an increase in the score of 0.45.

Area of Improvement

Beberapa *improvement* yang masih on progress sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu:

Aspek V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

1. *Redesign website* agar lebih *userfriendly* termasuk dokumen pendukungnya berupa PO Pengelolaan *Website* agar informasi yang disajikan tetap mutakhir.
2. Usulan kelengkapan Laporan Berkelanjutan dengan informasi terkait Biaya Perlindungan Konsumen dan Program Pengembangan Seni Budaya pada Laporan Tahunan 2023.

PENERAPAN PARAMETER ACGS (*ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD*)

Pada tahun 2023 PGN telah melakukan pengukuran GCG menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) menggunakan parameter versi terbaru (2023) yang telah rilis dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan menjadi salah satu dasar penyusunan *Sustainability Report* tahun 2023 PGN. PGN berhasil memperoleh skor *assessment* atau *adaption rate* sebesar 72,73% dari standar yang diharapkan untuk diterapkan dan melebihi standar minimum (terpenuhi kriteria maksimal 193) dari hasil pengukuran dan evaluasi GCG secara mandiri dengan bantuan konsultan independen.

Untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan terbuka di level internasional, khususnya negara ASEAN serta untuk memberikan visibilitas internasional yang lebih baik mengenai perusahaan terbuka di ASEAN, PGN melakukan penilaian penerapan GCG yang mengacu kepada Parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard* ("ACGS") *new version October 2023*. Tingkat pemenuhan penilaian secara mandiri (*self-assessment*) untuk periode masa pengukuran 1 Juli 2022–31 Desember 2023 sebagai berikut:

Areas of Improvement

Several improvements that were still in progress until the end of 2023, namely:

Aspect V Information Disclosure and Transparency

1. Redesign the website to be more user friendly, including supporting documents in the form of a Website Management PO so that the information presented remains up to date.
2. Proposed completeness of the Sustainability Report with information related to Consumer Protection Costs and the Arts and Culture Development Program in the 2023 Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACGS (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD) PARAMETERS

In 2023, PGN has carried out GCG measurements using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) using the latest version of parameters (2023) which have been released from the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and are one of the bases for preparing PGN's 2023 Sustainability Report. PGN succeeded in obtaining an assessment or adaptation rate score of 72.73% of the standards expected to be implemented and exceeding the minimum standards (fulfilling the maximum criteria of 193) from the results of independent GCG measurements and evaluations with the help of independent consultants.

To improve the standards and practices of public company governance at the international level, especially in ASEAN countries and to provide better international visibility regarding public companies in ASEAN, PGN conducted an assessment of the implementation of GCG which refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard ("ACGS") parameters new version October 2023. The level of fulfillment of self-assessment for the measurement period 1 July 2022–31 December 2023 is as follows:

Aspek ACGS ACGS Aspects	**Jumlah Kriteria** Number of Criteria	**Praktik Pengungkapan** Disclosure Practice			**Diterapkan (%)** Applied (%)
		N/A	**Diterapkan** Applied	**Belum Diterapkan** Not Applied	
Level 1 - Standar Minimum Yang Diharapkan | Level 1 - Minimum Expected Standard					
Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	3	16	11	59,26%
Sustainability and Resilience	22	0	16	6	72,73%
Disclosure and Transparency	34	1	25	8	75,76%
Responsibility of the Board	63	2	43	18	70,49%
Level 2 - Melebihi Standar Minimum | Level 2 - Exceeding the Minimum Standard					
Bonus	18	0	10	8	55,56%
Penalty	26	0	26	0	100,00%
Total	**193**	**6**	**136**	**51**	**72,73%**

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance

1) Level 1 (satu) memenuhi 100 dari 149 Kriteria;
2) Level 2 (dua) memenuhi:
   a) Bonus : mencapai bobot 10 memenuhi 18 Kriteria.
   b) Penalti : tidak terdapat nilai pengurang dari 26 kriteria

Total pemenuhan kriteria ACGS : Level 1 dan Level 2 adalah 72,73%.

Selain pemenuhan ACGS, PGN juga melakukan evaluasi tata kelola berdasarkan POJK 21/2015 mencapai predikat *Comply* untuk "Seluruh Aspek", serta melakukan evaluasi tata kelola dengan metode terbaru yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) yaitu PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan mencapai predikat : *Apply* untuk "Seluruh Prinsip".

1) Level 1 (one) meets 100 of 149 Criteria;
2) Level 2 (two) meets:
   a) Bonus: reaching a weight of 10 fulfilling 18 criteria.
   b) Penalty: there is no deductible value from the 26 criteria

Total fulfillment of ACGS criteria: Level 1 and Level 2 is 72.73%.

In addition to complying with ACGS, PGN also conducted a governance evaluation based on POJK 21/2015 achieving the Comply predicate for "All Aspects", as well as carried out a governance evaluation using the latest method issued by the KNKG (National Committee for Governance Policy), namely PUGKI (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance) 2021 by achieving the title: Apply for "All Principles".

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

Selaras dengan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Memahami hal ini, PGN telah menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "telah sesuai atau dengan penjelasan" (*comply or explain*), sebagai berikut:

In line with the implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on Public Company Governance Guidelines, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) recommendations for implementation of aspects and principles of good corporate governance. Understanding this, PGN has implemented these aspects, principles and recommendations based on the "comply or explain" approach, as follows:

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
A.	**HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM** RELATIONS BETWEEN A PUBLICLY LISTED COMPANY AND SHAREHOLDERS IN ENSURING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS		
	Prinsip 1 - Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 - Improving the Value of Organizing GMS		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. A Public Listed Company has a method or technical procedure for collecting votes both publicly and privately that prioritizes independence and the interests of shareholders.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply PGN telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 25. Prosedur pengambilan suara juga terdapat dalam Tata Tertib RUPS tentang Pemungutan Suara. Pada saat pembukaan RUPS, Pembawa Acara menyampaikan mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan dalam RUPS yang dibagikan kepada para Pemegang Saham. PGN has established a method or technical procedure for GMS voting, as outlined in Article 25 of the Company's Articles of Association, dated May 11, 2021. The voting procedure is also specified in the GMS Rules for Voting. At the start of the GMS, the Master of Ceremonies informs the Shareholders about the Meeting Rules, which are also distributed to them.	260-264, 268-269
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a Publicly Listed Company shall attend the Annual GMS.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan 2022 seperti dijelaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 51 tanggal 30 Mei 2023. All members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors attended the 2022 Annual GMS as described in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PGN No. 51 dated May 30, 2023.	268-269

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of GMS minutes shall be made available on the Publicly Listed Company's Website for at least 1 (one) year.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah mengunggah Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perusahaan pada menu "*Investor*" sub menu "AGMS/RUPS" dan akan tersedia lebih dari 1 (satu) tahun. The Company has uploaded the Summary of Minutes of the Annual GMS for the Financial Year 2023 in Indonesian and English through the Company's website on the "Investors" submenu "AGMS/RUPS" and will be made available for more than 1 (one) year.	270-274, 442-443
	Prinsip 2 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2 - Improving the Quality of Communication with Shareholders or Investors		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau *investor*. A Publicly Listed Company shall have a communication policy with Shareholders or investors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang tercantum dalam Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor Nomor: O-001/0.13 berdasarkan Instruksi Direksi Nomor: 0007000.1/KU.06/FIN/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGN melalui divisi Investor Relations melakukan proses komunikasi dengan pemegang saham, investor, serta aparat pendukung pasar modal. Bentuk komunikasi PGN dengan pemegang saham atau investor dilakukan melalui pelaksanaan RUPS, *public expose*, pertemuan investor/*investor summit*, *analyst meeting* serta melalui publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Selain itu, pemegang saham dan *investor* juga dapat mengakses informasi terkini Perseroan melalui situs web PGN. The Company has established a communication policy with shareholders or investors as stated in the Operating Procedure for Disseminating Company Information to Investors No. O-001/0.13, which is based on the Board of Directors Instruction No. 0007000.1/KU.06/FIN/2017 dated January 16, 2017, on the Operating Procedure for Disseminating Company Information to Investors of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGN, through the Investor Relations Division, conducts a communication process with shareholders, investors, and capital market supporting apparatus. PGN's communication with shareholders or investors is carried out through the implementation of the GMS, public exposes, investor meetings/ investor summits, and analyst meetings, as well as through the publication of Financial Statements and Annual Reports. In addition, shareholders and investors can also access the Company's latest information through the PGN's website.	442-443

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau *investor* dalam Situs Web. A Publicly Listed Company shall disclose its communication policy with Shareholders or investors on its Website.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah mempublikasikan kebijakan komunikasi Perusahaan dan informasi penting Perusahaan dalam situs web Perusahaan. Salah satunya adalah di bagian Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor pada menu "*Investor*" sub menu "*Investor Relation Home*". The Company has published the Company's communication policy and important information on the Company's website. One of them is a disclosure of Operating Procedures for Disseminating Company Information to Investors in the "Investors" submenu of "Investor Relations Home".	442-443
B.	**FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS |** FUNCTION AND ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS		
	Prinsip 3 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3 - Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of the number of members of the Board of Commissioners shall consider the condition of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan jumlah Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu Pasal 14: a. Ayat (1) Huruf a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. b. Ayat (1) Huruf b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Dewan Komisaris PGN per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 6 (enam) orang anggota, termasuk 4 orang di antaranya adalah Komisaris Independen. The determination of the number of Board of Commissioners has taken into account the condition of the Company, referring to the Company's Articles of Association, Article 14: a. Paragraph (1) Letter a. Supervision of the Company shall be carried out by the Board of Commissioners, the number of which shall be adjusted to the needs, consisting of at least 2 (two) persons, one of whom shall be appointed as President Commissioner, and if necessary, one of whom may be appointed as Deputy President Commissioner. b. Paragraph (1) Letter b. The Board of Commissioners consists of Commissioners and Independent Commissioners. The number of Independent Commissioners shall be in accordance with the prevailing laws and regulations. The number of members of PGN's Board of Commissioners as of December 31, 2023 is 6 (six) members, including 4 Independent Commissioners.	278-302
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners shall take into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota Dewan Komisaris. The determination of the composition of the Board of Commissioners has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required, which can be seen in the profile of each member of the Board of Commissioners.	340-342

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
	Prinsip 4 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4 - Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners shall have a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam *Board Manual* Bab III Angka 3.12 tentang Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has established a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners as stated in the Board Manual Chapter III Section 3.12 on Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners.	298-299
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners shall be disclosed in the Annual Report of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang berdasar pada *Board Manual* dengan menggunakan kriteria yang tertuang dalam *Key Performance Indicator (KPI),* telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, which is based on the Board Manual using the criteria set out in the Key Performance Indicator (KPI), has been disclosed in the Company's Annual Report.	298-299
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners shall have a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Ayat (25). The Board of Commissioners has established a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association Article 16 Paragraph (25).	364

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang tercantum di dalam *Board Manual* Bab II Dewan Komisaris Angka 3.13 Kebijakan Suksesi Direksi. The Board of Commissioners has formulated a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors, which is stated in the Board Manual Chapter II Board of Commissioners Section 3.13 on the Succession Policy of the Board of Directors.	563-564
C.	**FUNGSI DAN PERAN DIREKSI |** FUNCTION AND ROLE OF BOARD OF DIRECTORS		
	Prinsip 5 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5 - Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors shall take into account the condition of the Publicly Listed Company as well as its effectiveness in decision-making.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Direksi ayat (2) Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur atau lebih dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi PGN per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 6 (enam) orang anggota. The determination of the number of members of the Board of Directors has taken into account the condition of the Publicly Listed Company as well as its effectiveness in decision-making based on the Company's Articles of Association, Article 16 paragraph (2), which states that the Board of Directors shall consist of at least 3 (three) persons, including 1 (one) President Director and 2 (two) Directors or more, by adhering to the prevailing laws and regulations. As of December 31, 2023, there are a total of 6 (six) members of PGN's Board of Directors.	306-334
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors shall take into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota Direksi. The determination of the composition of the Board of Directors has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required, which can be seen in the profile of each member of the Board of Directors.	340-342

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance shall have expertise and/or knowledge in accounting.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keputusan RUPS Tahun 2021 yang telah disahkan melalui Akta Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 3 Mei 2021, menetapkan Fadjar Harianto Widodo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Fadjar Harianto Widodo memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 1992. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting or finance. The 2021 Annual GMS resolution, which was ratified through the Deed of Decision of the Annual GMS dated May 3, 2021, appointed Fadjar Harianto Widodo as Director of Finance and Risk Management. Fadjar Harianto Widodo obtained his Bachelor of Economics Degree from Diponegoro University in 1992.	306-309
	Prinsip 6 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6 - Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors shall have a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi yang tercantum di dalam *Board Manual* Bab II Direksi Angka 2.16 tentang Kinerja Perseroan. Direksi menyampaikan laporan triwulan pencapaian KPI kepada Dewan Komisaris setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dalam Rapat Gabungan. Dewan Komisaris kemudian melakukan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan pencapaian KPI Direksi yang dilaporkan dalam RUPS. The Board of Directors has established a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors as stated in the Board Manual Chapter II Directors Section 2.16 on Company Performance. The Board of Directors submits a quarterly report on the achievement of KPIs to the Board of Commissioners every 20th day of the following month, after the quarter ends, for discussion at the Joint Meeting. The Board of Commissioners then assesses the performance of the Board of Directors in accordance with the achievement of the KPIs reported in the GMS.	300-301
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors shall be disclosed in the annual report of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi tercantum dalam *Board Manual* dan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Mekanisme penilaian kinerja Direksi merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan mengacu kepada pencapaian KPI Direksi dan Perseroan. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is stated in the Board Manual and has been disclosed in the Company's Annual Report. The mechanism for assessing the performance of the Board of Directors is the responsibility of the Board of Commissioners with reference to the achievement of the KPIs of the Board of Directors and the Company.	300-301

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors shall have a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Direksi sudah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (23). The Board of Directors has already established a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association Article 11 paragraph (23).	364
D.	**PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN |** STAKEHOLDER PARTICIPATION		
	Prinsip 7 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 - Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Publicly Listed Company shall have a policy to prevent insider trading.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang tercantum di dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) dengan Nomor Dokumen: P-004/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. Penjelasan mengenai *insider trading* terdapat pada Bab IV Etika Kerja, Angka 4.13 tentang Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*). Perusahaan juga mempunyai Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 011000.K/132/UT/2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Kebijakan ini mengklasifikasikan informasi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Informasi Rahasia; 2. Informasi Terbatas; dan 3. Informasi Biasa. Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan juga menjelaskan bahwa pengungkapan informasi kepada publik dan *stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. The Company has established a policy to prevent insider trading as stated in the Code of Conduct Document No. P-004/A017 Revision Number: 00, which was signed by the President Director on April 26, 2021. An explanation of insider trading is contained in Chapter IV of Work Ethics, Section 4.13 on Insider Trading. The Company also owns a Corporate Information Management Policy based on the Decision of the Board of Directors No. 011000.K/132/UT/2006, signed by the President Director. This policy classifies information into 3 (three) categories, as follows: 1. Confidential Information. 2. Restricted Information. 3. Regular Information. The Company's Information Management Policy also explains that the disclosure of information to the public and other stakeholders shall be carried out reasonably by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of the concerned parties in accordance with applicable regulations.	398

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan memiliki kebijakan Anti *Fraud* dan Anti Korupsi, yang tercantum dalam berbagai kebijakan sebagai berikut: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan Nomor Dokumen: P- 003/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. 2. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, dengan Nomor Dokumen: P-004/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. 3. Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi, dengan Nomor Dokumen: P-004/A011 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 15 September 2021. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, serta anti penyuapan (SMMHSSEAP) No. P-002/15.03 tanggal 9 Januari 2023. 4. Penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2023.	394-396
	A Publicly Listed Company shall have an Anti-corruption and anti-fraud policy.	The Company owns Anti-Fraud and Anti-Corruption policies, which are stated in various policies as follows: 1. Good Corporate Governance Guidelines, Document No. P- 003/A017, Revision No. 00, which was signed by the President Director on April 26, 2021. 2. Code of Business Ethics and Work Ethics, Document No. P-004/A017, Revision No. 00, signed by the President Director on April 26, 2021. 3. Guidelines for Conflict of Interest and Gratification Control, Document No. P-004/A011, Revision No. 00, which was signed by the President Director on September 15, 2021. Guidelines for Quality Management Systems, Occupational Safety and Health, Security, and anti-bribery (SMMHSSEAP) No. P-002/15.03 dated January 9, 2023. 4. Implementation of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System that is valid until December 21, 2023.	

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor.*	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* melalui kebijakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor Dokumen: P-001/31.00/2023 Tanggal Berlaku: 30 Oktober 2023. Penjelasan terkait seleksi pengadaan barang dan jasa dimuat pada Bab III Pengadaan Barang dan Jasa angka 3.1 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Perusahaan telah melakukan peningkatan kemampuan kepada pemasok berupa penjelasan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan saat penjelasan pengadaan pekerjaan. Selain itu Perusahaan juga mengadakan sosialisasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) terkait K3, Etika Usaha, serta Anti Penyuapan dengan Penyedia Barang/Jasa.	392-393
	A Publicly Listed Company shall have a policy on the selection and improvement of suppliers or vendors.	The Company has established a policy for selecting and improving suppliers or vendors under the Goods and Services Procurement Guidelines policy, Document No. P-001/31.00/2023, with an effective date of October 30, 2023. Explanations regarding the selection of goods and services for procurement are provided in Chapter III of Goods and Services Procurement, Section 3.1 on How to Procure Goods and Services. The Company has conducted an improvement for suppliers in the form of the dissemination of information regarding the goods and services procurement policy that applies to the Company during the briefing of work procurement. In addition, the Company also conducts Contractor Safety Management System (CSMS) dissemination on Occupational Safety and Health (K3), Business Ethics, and Anti-bribery policies with Goods/Services Providers.	
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Hak dan kewajiban Perusahaan kepada Kreditur tercantum di dalam kontrak dengan Kreditur di mana penyusunan kontrak mengacu pada kebijakan pihak Kreditur yang bekerja sama dengan Perusahaan. Pelaksanaan hubungan dengan Kreditur diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja pada Bab III Etika Usaha Angka 3.4 tentang Etika Perseroan dengan Kreditur yang di antaranya mengatur tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak kreditur sesuai perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan.	421
	A Publicly Listed Company shall have a policy on the fulfillment of creditors' rights.	The Company's rights and obligations to Creditors are stated in the contract with Creditors, in which the drafting of the contract adheres to the policies of the Creditors who cooperate with the Company, The implementation of relations with Creditors is regulated in the Code of Business Ethics and Work Ethics in Chapter III Business Ethics, Section 3.4 regarding the Company's Ethics with Creditors, which, among others, regulates the obligation to respect the rights of creditors in accordance with the binding agreement and statutory provisions.	

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to Financial Services Authority Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. A Publicly Listed Company shall have a policy on whistleblowing system.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki Pedoman *Whistlebowing System* dengan Nomor Dokumen: P-002/A011 Revisi Ke: 0 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Agustus 2021 yang bertujuan untuk memberikan arahan terkait pengelolaan *whistleblowing system* agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. The Company has established a Whistlebowing System Guideline, with Document No. P-002/A011, Revision No. 0, signed by the President Director on August 2, 2021, which aims to provide direction regarding the management of the whistleblowing system so that the system can run effectively and accountably.	429-434
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. A Publicly Listed Company shall have a policy of granting longterm incentives to the Board of Directors and employees.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan insentif jangka panjang untuk Direksi tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 30 Mei 2023. Dimana Mata Acara Rapat 4 yaitu mengenai "Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/ Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023. Sementara kebijakan insentif jangka panjang untuk karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021-2023 yaitu Pasal 44 tentang Insentif Kerja Pekerja (IKP). Besaran dan tata cara pembayaran IKP diatur melalui Keputusan Direksi. The long-term incentive policy for the Board of Directors is stated in the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk dated May 30, 2023, in which Meeting Agenda 4 discussed "Determination of Tantiem for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2022, as well as Salary/Honorarium, along with Facilities and Allowances for the Financial Year 2023. Meanwhile, the long-term incentive policy for employees is stated in the 2021-2023 Collective Labor Agreement, Article 44 on Worker Incentives (IKP). The amount and procedures for payment of IKP are regulated through a Decision of the Board of Directors.	427-428

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or With Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2023 Disclosures on PGN AR 2023
E.	**KETERBUKAAN INFORMASI** | INFORMATION DISCLOSURE		
	Prinsip 8 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 - Improving the Implementation of Information Disclosure		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. A Publicly Listed Company shall take advantage of the broader use of information technology in addition to the Website as a medium for information disclosure.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi di antaranya melalui: **Kebutuhan Informasi** Investor : pgn.investorrelation@pertamina.com Pelanggan : pcc135@pertamina.com Selain itu, Perusahaan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui media sosial, sebagai berikut: – *Facebook* (Perusahaan Gas Negara) – *Twitter* (@Gas_Negara) – *Instagram* (@gas_negara) – *Youtube* (Perusahaan Gas Negara) – *Whatsapp* (+62 815-1150-0645) The Company has utilized the broader use of information technology in addition to the website as a medium for information disclosure, including through: **Information Requires** Investor : pgn.investorrelation@pertamina.com Pelanggan (Customer) : pcc135@pertamina.com In addition, the Company also utilizes information technology through social media, as follows: – Facebook (Perusahaan Gas Negara) – Twitter (@Gas_Negara) – Instagram (@gas_negara) – Youtube (Perusahaan Gas Negara) – WhatsApp (+62 815-1150-0645)	166, 227-230
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the main and controlling shareholders.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Laporan Tahunan 2023 telah mengungkapkan komposisi Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham porsi besar pada bab Profil Perusahaan. The 2023 Annual Report has disclosed the composition of Majority Shareholders and Large Shareholders in the Company Profile chapter.	145-149

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

PGN melakukan penilaian dan evaluasi GCG berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Penilaian dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip governansi korporat dari perspektif kalangan bisnis di Indonesia yang diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan komitmen PGN untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, dan PGN terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

PGN implements GCG assessments and evaluations based on the 2021 Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI) published by the National Committee for Governance Policy (KNKG). This assessment and evaluation is carried out in order to strengthen the implementation of good corporate governance in accordance with the principles of corporate governance from the perspective of business circles in Indonesia, which is expected to play an important role in increasing the trust of investors and stakeholders. This is in line with PGN's commitment to realizing the 4 (four) pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability, and PGN continues to strive to implement the 8 (eight) principles of Indonesian corporate governance, including the following:

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 1 - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 1 - ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of the Board of Directors **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahap dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors performs its leadership role and seeks to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in running the business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. able to gradually grow (corporate resilience).	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi. Perusahaan telah menetapkan standar etika bisnis yang tinggi melalui Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) dengan nomor dokumen: P-002/A014 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 30 Desember 2022. Sebagai wujud untuk menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa Pegawai bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai standar etika. To achieve sustainable value creation, the Board of Directors performs its leadership role and seeks to accomplish governance results. The Company has established high standards of business ethics through the Code of Conduct with document no. P-002/A014 Revision: 00, which was signed by the President Director pn December 30, 2022. As a manifestation to foster a corporate culture which ensures that Employees are responsible for behaving in accordance with ethical standards.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors ensures that the Company's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are aligned with long-term goals through effective utilization of innovation and technology.	Direksi telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang seperti tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2026. The Board of Directors has ensured that the mission, vision, goals, targets, strategies, and annual and medium-term plans are aligned with the long-term objectives outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2023 and Long Term Plan (RJPP) 2021-2026.
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and in accordance with applicable laws, regulations, and standards.	Direksi telah memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors has ensured that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives and strategies, and in accordance with applicable laws, regulations, and standards.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the timely and accurate disclosure of all material information about the Company.	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi telah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku dan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan semua informasi material terkait korporasi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dan telah mempublikasikannya di dalam situs web Perseroan. The Board of Directors has ensured that the integrity of the Company's accounting and financial reporting system is in compliance with applicable accounting provisions and that the Financial Report, Annual Report, and all material information related to the Company in line with the specified deadlines and have been published on the Company's website.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is prepared appropriately.	Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan persetujuan terhadap isi Laporan Keberlanjutan dengan menandatangani Lembar Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors has ensured that the sustainability report was properly prepared in accordance with applicable regulations and has approved its contents by signing the Board of Commissioners and Directors Approval Sheet.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors sets a framework for the Company's information technology (IT) governance that is in line with the Company's business needs and priorities, promotes business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi. The Board of Directors has developed a framework for the Company's information technology (IT) governance that is in line with its business needs and priorities.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For companies that conduct business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure the authority and availability of sufficient supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can perform its duties effectively.	Perusahaan bergerak di bidang pengembangan dan pemanfaatan gas bumi, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3. The company according to its Articles of Association, it is involved in the development and utilization of natural gas in Article 3.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. Periodically, the Charter of the Board of Directors is reviewed. The Charter, among other things, specifies the allocation of roles among individual Directors, which can be regulated by the Directors' Charter or a Directors' Decree.	Perusahaan telah memiliki Piagam Direksi yang disebut *Board Manual* yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2021. The company has a Directors' Charter known as the Board Manual, which was ratified on December 13, 2021.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are found to have made a mistake.	Direksi sudah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (23). The Board of Directors already has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes, as stated in Article 11 paragraph 23 of the Company's Articles of Association.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya** Performance Assessment – the Board of Directors and Members **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an annual objective and independent evaluation of the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur sesuai *Board Manual* yang mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengimplementasikan *Key Performance Index* (KPI), dan melakukan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan pencapaian KPI Direksi yang dilaporkan dalam RUPS. The Board of Commissioners has conducted an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director in accordance with the Board Manual, which regulates that the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company implement the Key Performance Index (KPI), and assess the performance of the Board of Directors based on the KPI achievements of the Board of Directors that are reported at the General Meeting of Shareholders (GMS).
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, telah memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, yaitu berdasarkan RKAP. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, has ensured that the President Director's performance evaluation is based on predetermined criteria and communicated to the Board of Commissioners, as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the Company's strategy at least once a year and approves the mission, vision, and strategy developed by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises on, and approves the Company's business, long-term, and short-term financial plans. The Board of Commissioners also advises and oversees the Board of Directors' implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in critical decisions for the Company, as outlined in the Company's Articles of Association.	Dewan Komisaris telah meninjau strategi korporasi di dalam RJPP dan RKAP paling tidak setiap tahun, untuk memastikan strategi masih relevan dengan kondisi terkini. Keseluruhan tugas tersebut diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan. The Board of Commissioners has reviewed the Company's strategy in the RJPP and RKAP at least once a year to ensure that it remains relevant to current conditions. All of these tasks are governed by the Company's Articles of Association.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	PGN telah mengungkapkan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 sub bab Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan di bab Laporan Dewan Komisaris. PGN has disclosed the types of decisions that require Board of Commissioners approval in the 2023 Annual Report sub-chapter Implementation of the Board of Commissioners' Duties as well as the Board of Commissioners Report Chapter.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. The Board of Commissioners proposes to the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, taking into account the Nomination and Remuneration Committee's recommendations. In proposing the above, the Board of Commissioners emphasizes diversity, non-discriminatory elements, and equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election procedures for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are formal and transparent.	Dewan Komisaris memastikan telah memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan serta sesuai kebutuhan Perusahaan. The Board of Commissioners ensures that diversity is considered, non-discriminatory elements, and equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is formal and transparent and that it meets the Company's needs.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners, or the Committee that carries out the nomination function, develops a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the President Director's reports on the implementation of development and succession plans.	Kebijakan suksesi proses nominasi anggota Direksi oleh Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual*. Anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. The Board Manual governs the succession policy for the nomination process of the members of the Board of Directors by the Board of Commissioners. Members of the Company's Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, which is attended and approved by Series A Dwiwarna Shareholders.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.5	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; 2. secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 1. submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable Company development and the long-term interests of the Company and shareholders; 2. review the Board of Directors and Board of Commissioners' remuneration systems on a regular basis.	Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi kepada PT Pertamina (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan untuk menetapkan besaran tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya. Secara berkala telah dilakukan tinjauan sistem remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris, sebelum diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. The Board of Commissioners has proposed remuneration to PT Pertamina (Persero) as the proxy for Dwiwarna Series A shareholders in accordance with the Annual GMS, to determine the amount of tantiem, salary/honorarium, allowances, facilities, and other incentives. The remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners has been reviewed on a regular basis prior to being proposed to Series A Dwiwarna Shareholders.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of the Company's governance policies and their implementation and proposes changes as necessary.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite telah mengawasi efektivitas kebijakan governansi Perusahaan dan implementasinya serta mengusulkan perubahan (jika diperlukan). The Board of Commissioners, supported by the Committees, has monitored the effectiveness of the Company's governance policies, their implementation, and proposed changes (if necessary).
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners oversees and guides the Company to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the Company's goals, objectives, and strategies, as well as compliance with applicable laws, regulations, codes of conduct, and standards.	Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Perusahaan dengan memantau dan menyampaikan masukan terkait manajemen risiko dan sistem pengendalian internal melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Komite dengan Direksi maupun Pejabat satu level di bawah Direksi atau melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas pada Perusahaan. The Board of Commissioners has provided guidance on the implementation of the Company's risk management and internal control system by monitoring and providing input on the risk management and internal control system through Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, Committee meetings with the Board of Directors or officials one level below the Board of Directors, or letters from the Board of Commissioners to Directors. The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee in evaluating/assessing the effectiveness of controls at the entity and operational/activity levels of the Company.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and guides the achievement of the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	Dewan Komisaris telah mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat serta independensi fungsi audit internal dan eksternal dalam bentuk penelaahan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal. The Board of Commissioners has overseen and guided the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions, through the review of the effectiveness of the implementation of external and internal audits.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Company's annual and sustainability reports, ensuring their integrity, as well as overseeing the Company's disclosure and communication processes.	Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dengan menandatangani Lembar Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners approved the Annual Report and Sustainability Report by signing the Board of Commissioners and Directors Approval Sheet.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang termuat di dalam *Board Manual* rutin ditinjau, dengan pemutakhiran terakhir pada 13 Desember 2021 (sebelumnya di 2020). The guidelines for implementing the duties of the Board of Commissioners contained in the Board Manual are routinely reviewed, with the last update on December 13, 2021 (previously in 2020).
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are found to have made a mistake.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Ayat (25). The Board of Commissioners has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes, as stated in Article 16 Paragraph 25 of the Company's Articles of Association.
1.3.12	Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at the Board of Commissioners meetings.	Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi berperan dan berkontribusi aktif seperti komisaris non independen untuk bekerja bagi kepentingan terbaik Perusahaan. Independent commissioners, who have no affiliate relationship with shareholders, other members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, participate and contribute actively in the best interests of the Company, similar to non-independent commissioners.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner coordinates the Board of Commissioners and ensures their effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of transparency and constructive dialogue that allows for the expression of a variety views, including coordinating the setting up of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, the Board of Commissioners must have the opportunity to meet with the Board of Directors and senior management.	Komisaris Utama mengkoordinasikan pembagian peran pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris dan penetapan agenda rapat dengan jajaran Direksi dan manajemen senior sebagaimana tercantum di dalam *Board Manual*. The President Commissioner coordinates the allocation of supervisory roles among Board of Commissioners members through Board of Commissioners Decisions, as well as the determination of meeting agendas with the Board of Directors and senior management, in accordance with Board Manual guidelines.
1.4	**Pembentukan Komite** Establishment of Committees **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Company has committees under the Board of Commissioners, consisting of at least: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	Perseroan memiliki 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit 2. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha. The Company has 3 (three) Committees under the Board of Commissioners, as follows: 1. Audit Committee 2. Nomination, Remuneration, and GCG Committee. 3. Risk Management and Business Development Monitoring Committee.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent, and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles in an effective and independent manner.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen. Independensi Komite Audit dan Komite lain yang di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada Profil Komite. The Board of Commissioners ensured that all members of the Audit Committee are independent, and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties. The independence of the Audit Committee and other committees under the Board of Commissioners can be seen in the Committee Profile.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure the monitoring of the implementation of duties by the Audit Committee is carried out in an objective and independent manner, the President Commissioner is not allowed to be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report.	Komisaris Utama PGN tidak menjadi Ketua Komite Audit, dapat dilihat pada Profil Komite. PGN's President Commissioner is not the Chairman of the Audit Committee, which can be seen in the Committee Profile.
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Assessment – the Board of Commissioners and its Members **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif melalui penilaian sendiri (*self-assessment*) kinerja Dewan Komisaris yang diatur di dalam *Board Manual*. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively through self-assessment of the performance of the Board of Commissioners, as regulated in the Board Manual.
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflicts of Interest **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors with concurrent positions outside the Company must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function prior to accepting a new appointment as Director or Commissioner of a public company, other Director positions, or other positions with a significant time commitment.	Dewan Komisaris telah memberikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai Direktur atau Komisaris di korporasi lain seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. The Board of Commissioners has established clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who are or wish to be Directors or Commissioners in other companies, as stated in the Articles of Association and Board Manual.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan. All of the Board of Commissioners and Board of Directors have signed a Statement of No Conflicts of Interest.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Competency Improvement for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics, and operations of the corporation, relevant laws and regulations, and other applicable standards and obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the required skills and knowledge to carry out their roles on the Board.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka sejak baru diangkat melalui program pengenalan yang formal dan memadai. Dewan Komisaris dan Direksi juga rutin mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi.Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun kajian dari fungsi *Legal Counsel & Compliance*. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities from the time they are appointed by providing a formal and appropriate induction program. The Board of Commissioners and Board of Directors also regularly participate in a variety of training and competency development programs. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors receives accurate, timely, and clear information about the most recent developments in relevant laws and regulations, as well as other applicable standards and obligations, risk factors, and the corporate business environment, through Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors and reviews of the Legal Counsel & Compliance function.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 2 - KOMPOSISI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 2 - COMPOSITION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
2.1	**Komposisi Direksi** Composition of the Board of Directors **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas, namun juga bisa menggunakan sumber/konsultan independen. In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders but can also use independent sources/consultants.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and take into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi yang dapat dilihat dalam profil Anggota Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and take into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors, which can be seen in the profiles of the members of the Board of Directors.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Company policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bab Tata Kelola. The Company policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report in the Governance chapter.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in order to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan, Kebijakan dan prosedur telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bab Tata Kelola. The Board of Commissioners ensured that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners were clear and transparent. The policies and procedures have been disclosed in the Annual Report in the Governance chapter.
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners, and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.	Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tercantum di dalam: 1. Undang-Undang RI Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 14 Ayat (12); 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The arrangements for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are contained in: 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 dated August 16, 2007, on Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; 3. Company's Articles of Association dated May 11, 2021, Article 14 Paragraph (12); 4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Anggota Dewan Komisaris PGN mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Members of the PGN Board of Commissioners reflect diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender. The diversity of members of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potential for conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners with a limited term of office, and there is disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a company perspective.	Dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, 4 (empat) anggota atau lebih dari 50% (lima puluh persen) adalah Komisaris Independen. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Of the 6 (six) members of the Board of Commissioners, 4 (four) members or more than 50% (fifty percent) are Independent Commissioners. According to the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed for a term that starts on the date determined by the GMS that appointed them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS following the date of appointment, but cannot exceed 5 (five) years.
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the Board of Directors and Board of Commissioners function effectively and increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures a formal, strict, and transparent process for selecting and appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Ketentuan terkait tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2022. The Nomination and Remuneration Committee Charter, which was ratified on December 22, 2022, contains provisions regarding the Nomination and Remuneration Committee's responsibilities and roles in the process of appointing and assigning members to the Board of Directors and Board of Commissioners.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors, the economic situation, and the company's performance.	Pedoman penetapan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dengan tembusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham seri B/mayoritas PGN. Usulan remunerasi mempertimbangkan peran setiap anggota, situasi ekonomi serta kinerja korporasi. RUPS kemudian akan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Guidelines for determining the salary/honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners proposes the remuneration of the Board of Directors to the Minister of SOEs as an A series Dwiwarna shareholder, with a copy to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the B series/major shareholder of PGN. The remuneration proposal considers the role of each member, the economic situation, and the Company's performance. The GMS will subsequently determine the salary/honorarium, allowances, facilities, and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners includes a structure that is oriented towards sustainable company development and encourages the achievement of long-term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering each member's role, the economic situation, and the Company's performance. Furthermore, his or her position as President Commissioner, and Chairman, as well as committee membership, should be taken into account.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Proses penyampaian usulan hingga penetapan tantiem dan gaji/honorarium Dewan Komisaris dapat dilihat pada prinsip 2.2.1 di atas. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners includes a remuneration structure that is oriented toward the Company's sustainable development and encourages the achievement of long-term objectives. The process for submitting proposals and determining tantiem and salaries/honorariums for the Board of Commissioners can be seen in Principle 2.2.1 above.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi,kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the performance, qualifications, and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the performance of company operations, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah mengusulkan remunerasi berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar. The Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and has proposed remuneration based on the performance, qualifications, and competencies of Directors and Commissioners, taking into account the Company's operational performance, individual performance, and market conditions.
PRINSIP 3 - HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 3 - WORK RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Nature of Work Relationships **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to ensure that confidential information does not leak.	Diskusi antara Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Rapat Gabungan dapat dilihat di Laporan Tahunan pada bagian Rapat Gabungan. Discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners are conducted in Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Board of Directors, with information kept confidential. Joint Meetings can be seen in the Annual Report in the Joint Meetings section.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the Company's missions, visions, and strategies and regularly discusses the implementation.	Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners to develop the Company's mission, vision, and strategy, and the Board of Commissioners and Directors hold joint meetings on a regular basis to discuss their implementation.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays an important role in ensuring the effectiveness of the Board of Directors' and Board of Commissioners' working relationships, as well as encouraging the implementation of good corporate governance practices such as effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekretaris Perusahaan PGN berperan penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, khususnya dalam hal mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik serta komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. The PGN Corporate Secretary contributes significantly to the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, particularly in terms of encouraging the implementation of good corporate governance practices and effective communication with shareholders and stakeholders.
3.2	**Akses Informasi Dewan Komisaris** Access to Information for the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the Company. The Board of Commissioners may at any time request additional information to the Board of Directors.	Direksi memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai kewenangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. Penyampaian informasi biasanya dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Meski demikian, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta informasi tambahan dari Direksi. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners ensures that it has sufficient information. The Board of Directors regularly provides the Board of Commissioners with timely and comprehensive information on all matters related to the Company. The Board of Commissioners may at any time request more information from the Board of Directors.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
3.3	**Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Impact of the Ownership Structure on the Company **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap Korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between Company shareholders, which may have an impact on the Company's management and operations.	Sampai dengan laporan ini disusun, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham PGN, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Saham yang ditandatangani pada awal tahun 2023 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan Kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara bulanan juga disampaikan dalam situs web Perusahaan, menu "Investor" sub menu "IDX *Announcements*". Until the preparation of this report, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as their families, did not own PGN shares, according to the Share Ownership Statement signed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors at the beginning of 2023. Monthly share ownership reports for members of the Board of Directors and Board of Commissioners are also available on the Company's website under the "Investor" sub-menu "IDX Announcements".
PRINSIP 4 - PERILAKU ETIS PRINCIPLE 4 - CODE OF ETHICS		
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** Code of Conducts **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan. This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly state the Company's expectation that each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja No. Dok.: P-002/A014 Revisi ke: 00 yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah diungkapkan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PGN. The Company already has the Code of Business Ethics and Work Ethics Number Doc.: P-002/A014, Revision No.: 00, approved by the President Director on December 30, 2022, and disclosed in PGN's Annual Report and Sustainability Report.
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	Perusahaan telah memiliki kebijakan/pedoman untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis di antaranya melalui Pedoman Etika Usaha dan Etika Perilaku dan Pedoman Sistem Manajamen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan serta Anti Penyuapan. The Company has policies/guidelines in place to prevent money laundering and terrorist financing, anti-corruption, offering or accepting bribes, and payments for acts that violate laws and regulations or are unethical, such as the Business Ethics and Behavior Code and The Company's Anti-Bribery Management System is under the management and responsibility of Legal Counsel and Compliance..

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
4.2	**Nilai-nilai dan Budaya Organisasi** Organization Values and Culture **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The company articulates, develops, and discloses its culture and values.	Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN turut mengimplementasikan *core values* BUMN AKHLAK sebagai budaya Perusahaan. Program Budaya AKHLAK Subholding Gas secara konsisten dilakukan dan dievaluasi pelaksanaannya setiap 1 (satu) bulan sekali melalui *self-assessment*. As part of the Oil and Gas Holding, PGN implements the core values of SOEs, AKHLAK, into its Company culture. The AKHLAK Gas Subholding Cultural Program is consistently carried out, and its implementation is evaluated once a month through self-assessment.
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** Communication and Enforcement of the Code of Ethics, Values, and Culture **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The Company's code of conduct and ethics are effectively communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into the Company's strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and strictly enforced.	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi melalui penerapan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. Setiap pelanggaran yang terbukti akan dikenakan sanksi. The Company's code of conduct and code of ethics are effectively communicated and integrated into the Company's strategies and operations through the implementation of the Code of Business Ethics and Work Ethics. Any proven violation will be subject to sanctions.
PRINSIP 5 - MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PRINCIPLE 5 - RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL, AND COMPLIANCE		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and Company's compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Company's annual report.	Laporan Tahunan PGN telah memuat informasi mengenai efektivitas operasional sistem governasi, pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang dapat dilihat di bab Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. PGN's Annual Report has contained information on the operational effectiveness of the governance system, risk management, and internal control, which can be seen in the Internal Control System and Risk Management chapter.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management	
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk is a unity, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko dengan berlandaskan Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. Perusahaan juga memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko, menyusun kebijakan dan *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko yang berada di bawah Direktur Keuangan & Manajemen Risiko yaitu *Division Head, Risk Management*. The Board of Directors manages the implementation of risk management in accordance with the Risk Management & Resilience Chart, which is signed by all members of the Board of Directors. The Company also has a function in charge of implementing risk management programs, developing policies, and monitoring risk management implementation, which is under the Director of Finance & Risk Management, i.e., Division Head, Risk Management.
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists in the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for oversight of the Company's risk management.	Perseroan memiliki Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam menciptakan mekanisme yang transparan, fokus dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Company has a Risk Management and Business Development Monitoring Committee, which assists the Board of Commissioners in creating a transparent, focused, and independent mechanism for supervising the Company's risk management.
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.3.1	Direksi membangun sistem Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity to ensure that the Company can achieve its objectives.	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC melalui fungsi GCG dan *Compliance* yang berada dalam *Legal Counsel and Compliance* di bawah Direktorat Utama serta Divisi *Risk Management* di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. The Board of Directors ensures coordination and capability improvement within the GRC primary system through GCG and Compliance functions, which are in the Legal Counsel and Compliance and report to the Principal Directorate and the Risk Management Division under the Directorate of Finance and Risk Management.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently perform functions that could lead to a conflict of interest.	Bagian yang membawahi fungsi kepatuhan di PGN tidak merangkap fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The section that oversees the compliance function at PGN does not have any concurrent functions that could lead to conflicts of interest.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
5.4	**Audit Internal** Internal Audit **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, oversees and ensures that the internal audit function assists the Company in achieving its goals by using an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. Selain itu Komite Audit juga mengkaji efektivitas pelaksanaan *internal audit* secara berkala. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources, and access to information to perform its roles effectively. Furthermore, the Audit Committee also reviews the effectiveness of internal audits on a regular basis.
PRINSIP 6 - PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI PRINCIPLE 6 - DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		
6.1	**Kebijakan Pengungkapan** Policy on Disclosure **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures in place to ensure that material information is disclosed while also safeguarding sensitive information and corporate secrets.	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perusahaan, di antaranya tercantum dalam: 1. Keputusan Direksi Perusahaan Nomor: 011000.K/132/UT/2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 21 April 2006 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan. 2. Pedoman Tata Kelola yang Baik Nomor P-001/A014 tanggal 30 Desember 2022. The Company has a disclosure and transparency policy and procedure that ensures the disclosure of material information and safeguards the Company's sensitive and confidential information, as stated in: 1. Decree of the Company's Board of Directors No. 011000.K/132/UT/2006, signed by the President Director on April 21, 2006, on Company Information Management Policy 2. Good Governance Guidelines Number P-001/A014 dated December 30, 2022.
6.1.2	Hak Pemegang Saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely relevant material information regarding the Company must be met.	Perusahaan telah melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi material yang relevan tentang korporasi secara teratur dan tepat waktu kepada pemegang saham, baik melalui publikasi Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, pengumuman di media masa, serta informasi di situs web Perusahaan dan *online reporting* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). The Company has carried out its obligation to disclose relevant material information about the Company regularly and in a timely manner to shareholders, both through the publication of Financial Reports, Annual reports, and Sustainability Reports, announcements in the mass media, as well as information on the Company's website, the Financial Services Authority's online reporting (OJK), and the Indonesian Stock Exchange (BEI).

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial and Sustainability Reports **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The company discloses systems and procedures for ensuring that interim financial reports that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate and complete and that investors have the information they need to make the right investment decisions.	PGN memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau ditinjau oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang tepat oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sesuai. PGN ensures that interim financial statements that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and prepared using appropriate accounting standards by human resources with the necessary capacity.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audits on financial reports carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Komite Audit memastikan kualitas audit yang dilaksanakan auditor eksternal sesuai dengan yang dibutuhkan. The Audit Committee ensures that external auditors perform audits that meet the required standards.
6.2.3	Laporan berkelanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Laporan berkelanjutan PGN telah disiapkan dengan mengacu kepada: 1. POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan; 2. SE OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan; 3. *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021; 4. GRI Sector Index 2021 Oil and Gas Sector. PGN's sustainability report has been prepared with reference to: 1. POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance 2. OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports. 3. 2021 Global Reporting Initiative (GRI) 4. 2021 GRI Sector Index in the Oil and Gas Sector.
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The company publishes an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects, allowing shareholders and stakeholders to understand the Company's strategic goals and progress in creating sustainable value.	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang dan prospek korporasi di masa depan. Laporan Tahunan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. The Company has published an integrated Annual Report that puts historical performance intox context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects. The Annual Report is approved and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
6.3	**Diseminasi Informasi** Dissemination of Information **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	Perusahaan menyediakan akses yang setara, tepat waktu dan relatif murah untuk semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Perseroan yaitu melalui situs web PGN dan media sosial : • *Website:* www.pgn.co.id • Instagram: gas_negara • Facebook: Perusahaan Gas Negara • Twitter: @gas_negara • Youtube: Perusahaan Gas Negara PGN
	Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.	The Company provides equal, timely, and relatively inexpensive access for all parties who need information about the Company, which is through the PGN website and social media platforms: • Website: www.pgn.co.id • Instagram: gas_negara • Facebook: Perusahaan Gas Negara • Twitter: @gas_negara • YouTube: Perusahaan Gas Negara PGN
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.	Penerapan PUGKI dapat dilihat di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PGN 2023. Untuk saat ini Perusahaan belum memuat pernyataan tahunan terhadap penerapan PUGKI di situs web Perseroan.
	The Company ensures that an annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including an explanation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for at least five years.	The implementation of PUGKI can be seen in the PGN Annual Report and Sustainability Report for 2023. Currently, the Company has not made an annual statement on the implementation of PUGKI available on its website.
6.3.3.	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing,* kriteria dan prosedur *cross listing,* kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan.	Perusahaan hanya terdaftar di Pasar Modal di yurisdiksi asal atau Bursa Efek Indonesia.
	Companies listed on the capital market in jurisdictions other than their origin must clearly disclose the applicable laws and regulations on corporate governance. Cross-listing criteria and procedures, as well as those for recognizing primary listing requirements, should be transparent and documented.	Companies are only listed on the capital market in their home country or on the Indonesian Stock Exchange.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 7 - HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PRINCIPLE 7 - RIGHTS OF HAREHOLDERS		
7.1	**Hak Pemegang Saham** Rights of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Company has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau *Investor* yang tercantum dalam Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor dan PGN melalui divisi *Investor Relations* melakukan proses komunikasi dengan pemegang saham, *investor*, serta aparat pendukung pasar modal. Uraian detil dapat dilihat pada bab GCG tentang Hubungan *Investor* pada laporan Tahunan ini. The company has a policy for communicating with shareholders or investors, which is outlined in the Operational Procedure for Submitting Company Information to Investors, and PGN, through the Investor Relations division, manages the communication process with shareholders, investors, and capital market supporting officials. A detailed description can be seen on GCG chapter regarding Investor Relations in this Annual Report.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Parent companies ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and common control entities in which they have a significant investment.	Perusahaan memastikan bahwa kebijakan governansi korporat yang dimiliki telah selaras dengan kebijakan governansi korporat anak dan entitas sepengendali di antaranya melalui Pedoman Tata Kelola Hubungan PGN sebagai Perusahaan Induk (*Subholding Gas*) dengan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 051000.K/OT.00/PDO/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan pedoman lainnya. The company ensures that its corporate governance policies are consistent with the corporate governance policies of subsidiaries and common control entities, including the Governance Guidelines for the Relationship of PGN as a Holding Gas Company with Subsidiaries and/or Affiliates as determined by Board of Directors' Decree No. 051000.K/OT.00/PDO/2019 dated December 27, 2019, as well as other guidelines.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Companies have rules and procedures that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions, such as mergers and sales of significant corporate assets, to ensure that the transactions take place in a transparent and reasonable manner while also protecting the rights of all shareholders based on class.	PGN memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset korporasi yang substansial di dalam Anggaran Dasar Perusahaan. PGN has rules and procedures in place governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of significant Company's assets in the Company's Articles of Association.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: 1. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara 2. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Companies have rules and procedures that ensure 1. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally. 2. Disclosure of the rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Perusahaan memastikan untuk memberikan informasi dan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham. Contohnya dengan memberikan informasi dengan muatan dan waktu yang sama melalui situs web www.pgn.co.id pada menu "*Investor*". The Company is committed to providing all shareholders with equal information and treatment, including information with the same content and timing through the "Investor" menu on the www.pgn.co.id website.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the Company and shareholders.	Perusahaan memiliki kebijakan yang ditetapkan melalui Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi nomor dokumen: P-004/A011 Revisi: 00 tanggal 15 September 2021 yang memastikan proses transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat serta mampu melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has a policy established through the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines Document number: P- 004/A011 Revision: 00 dated 15 September 2021 which ensures that the transaction process runs in accordance with applicable regulations and is managed appropriately and is able to protect the interests of the corporation and its shareholders.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Company has established and disclosed policies to prevent insider trading. The Company has clear rules in place for any trading in the Company's shares by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	PGN telah memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang tercantum dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. Pedoman tersebut telah dipublikasikan dalam situs web Perusahaan, dalam menu "Tata Kelola". PGN has established and disclosed policies to prevent insider trading, as outlined in the Business Ethics and Work Ethics Guidelines. These guidelines are available on the Company's website, under the "Governance" menu.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The company implements the notice for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are distributed electronically, such as through the Company's website.	PGN berupaya melakukan panggilan RUPS 28 hari sebelum RUPS. Meski demikian panggilan RUPS pada 8 Mei 2023 hanya terpaut 23 hari dari pelaksanaan RUPS di 30 Mei 2023. Panggilan RUPS telah dipublikasikan di situs web Perusahaan menu "Investor" sub menu "AGMS/RUPS" yang juga memuat mata acara rapat, penjelasan dan ketentuan umum. PGN strives to implement the GMS notice no later than 28 days prior to the GMS. However, the summons for the GMS, which was issued on May 8, 2023, was only 23 days prior to the GMS that was implemented on May 30, 2023. The GMS invitation is available on the Company's website under the "Investor" menu, submenu "AGMS/GMS," which also includes meeting agenda items, explanations, and general provisions.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholder participation and effective voting at the GMS.	PGN memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang tercantum dalam Tata Tertib RUPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" (untuk yang hadir secara fisik). Perusahaan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS yaitu biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi. PGN has a technical method or procedure for voting listed in the GMS Rules of Procedure, which states that voting is conducted by "raising hands" (for those who are physically present). The company has appointed independent parties to count and/or verify votes at the GMS, which is the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and the Notary Office, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS dengan memfasilitasi pemegang saham untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners through the GMS by facilitating shareholder participation and voting at the GMS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Company ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Perusahaan memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The Company ensures that external auditors attend the GMS and answer questions from shareholders related to the audit of financial statements.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The submission of voting results, as well as a full summary of the GMS minutes, will be made public the following working day.	PGN telah menyampaikan hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap ke publik pada hari kerja berikutnya melalui situs web Perseroan, *online reporting* OJK dan BEI serta pengumuman di media massa. PGN has submitted the voting results and a full summary of the GMS minutes to the public on the following working day through the Company's website, OJK and IDX online reporting, and media announcements.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 8 – HAK-HAK PEMANGKU KEPENTINGAN PRINCIPLE 8 – RIGHTS OF STAKEHOLDER		
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci** Stakeholders Engagement **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Company, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the Company on them.	PGN melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci. Saluran/media komunikasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan atau menyuarakan keluhan, diantaranya melalui *call center* 135, situs web Perusahaan (www.pgn.co.id) dan *email* sebagai berikut: - *Investor*/pemegang saham: pgn.investorrelation@pertamina.com - Pelanggan: pcc135@pertamina.com Selain itu Perusahaan juga melakukan pertemuan langsung seperti Temu Pelanggan serta pertemuan *investor/investor summit*. PGN, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders. Communication channels/media for stakeholders to convey their opinions, inputs, or complaints include the 135 call center, the Company website (www.pgn.co.id), and email as follows: - Investors/shareholders: pgn.investorrelation@pertamina.com - Customers: pcc135@pertamina.com In addition, the Company also holds in-person meetings such as Temu Pelanggan/ customer meetings and investor meetings/investor summits.
8.2	**Integrasi keberlanjutan dalam Model Bisnis** Integration of sustainability in Business Model **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko The Board of Commissioners and the Board of Directors are jointly responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including the development of corporate sustainability strategies, priorities, and objectives. The Board of Directors and Board of Commissioners consider sustainability when carrying out their roles, such as developing and implementing corporate strategies, business plans, major action plans, and risk management.	Dewan Komisaris dan Direksi melalui Laporan Manajemen di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023 telah menyatakan komitmennya atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi juga memasukkan pertimbangan keberlanjutan dalam menjalankan perannya termasuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners and Directors through the Management Report in the 2023 Annual Report and Sustainability Report have stated their commitment to sustainability governance, including setting sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Commissioners and Directors also include sustainability considerations in carrying out their roles, including integrating sustainability aspects in the development and implementation of Company's strategies, business plans, major action plans, and risk management.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** Protection for Stakeholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the Company's operations reflect the implementation of high standards of ethical, social, and environmental responsibilities throughout the organization, as well as the implementation of appropriate policies and procedures to respect and comply with stakeholder rights.	Direksi memastikan bahwa operasi korporasi telah mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi untuk menghormati hak-hak pemangku kepentingan. Perusahaan telah menjalankan dan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan juga karyawan Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diintegrasikan di seluruh lini bisnis Perseroan dan telah diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan 2023 PGN. PGN juga mengedepankan kebijakan persaingan sehat yang tercantum di dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. The Board of Directors ensures that the Company's operations reflect the implementation of high standards of ethical, social, and environmental responsibilities throughout the organization to respect stakeholder rights. The Company has implemented a policy governing its responsibilities to customers, suppliers, and employees. In addition, the Company has Social and Environmental Responsibility Guidelines (TJSL), which are integrated across all of the Company's business lines and are disclosed in PGN's 2023 Sustainability Report. PGN also prioritizes healthy competition policies, as outlined in the Business Ethics and Work Ethics Guidelines.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the Company's long-term interests while prioritizing sustainability.	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan di antaranya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan pemberian insentif yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selain itu Perusahaan menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi, yang tujuannya adalah kepada manajemen karier dan promosi. The Board of Directors encourages employees to work for the Company's long-term interests while prioritizing sustainability, including by focusing on employee welfare through a policy of providing incentives that are tailored to applicable regulations and prioritizing employee safety and comfort at work. Furthermore, the company provides a variety of education and training programs to help employees improve their competence, with the goal of career management and promotion.

RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2024
GCG Strengthening Plan for 2024

Memandang ke depan, PGN akan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi serta *area of improvement* dari hasil *self assessment* pada tahun 2023, serta berupaya mengaplikasikannya untuk memperkuat penerapan GCG Perusahaan di 2024 dan tahun-tahun mendatang.

Looking ahead, PGN will focus on and follow up on recommendations and areas for improvement based on the self-assessment results in 2023 and strive to apply them to strengthen the Company's GCG implementation in 2024 and beyond.

Agar selaras dengan *Holding* maka pada tahun 2024 pembaharuan pernyataan komitmen Perwira akan dialihkan ke COMPOLS (*Compliance Online Systems*).

To be in line with the Holding, in 2024, the update of the employee's commitment statement will be redirected to COMPOLS (Compliance Online Systems).

Pada aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, maka PGN akan memperbaharui pernyataan Komitmen pihak Manajemen dan beberapa Pedoman.

In terms of commitment to implementing good corporate governance in a sustainable manner, PGN will update the Management Commitment Statement and several Guidelines.

Tidak hanya menjalankan tata kelola yang baik, di tahun 2024 PGN perlu menerapkan tata kelola terintegrasi dan tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, yang telah mengatur suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi. Dalam bidang anti penyuapan akan dilakukan resertifikasi dan sekaligus memperluas ruang lingkup sistem manajemen anti penyuapan ISO:37001:2016 dan melakukan penyelarasan budaya AKHLAK dengan 4 NO's.

In addition to implementing good governance, PGN needs to implement integrated governance and three lines of model risk governance by 2024 in accordance with the Ministry of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for SOEs' Governance and Significant Company Activities, which has regulated a governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism, and fairness in an integrated manner in conglomerated SOEs. In terms of anti-bribery, there will be a re-certification and scope extension to the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, as well as a realignment of AKHLAK culture with 4 NO's.

06.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



Informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2023 PT Perusahaan Gas Negara Tbk secara komprehensif telah diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan.

Information on PT Perusahaan Gas Negara Tbk's Social and Environmental Responsibility 2023 has been comprehensively disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance Highlights

KINERJA EKONOMI
Economic Performance

Portofolio Pipa Distribusi PGN
PGN's Distribution Pipeline Portfolio

2023	6.872 km
2022	5.715 km
2021	5.613 km

Pendapatan
Revenue
(Juta USD | USD Million)

2023	3.646
2022	3.569
2021	3.036

Laba Bersih*)
Net Profit*)
(Juta USD | USD Million)

2023	278
2022	326
2021	304

Nilai Ekonomi yang Diperoleh
Economic Value Generated
(Juta USD | USD Million)

2023	3.777
2022	3.679
2021	3.179

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan
Economic Value Distributed
(Juta USD | USD Million)

2023	3.776
2022	3.719
2021	3.376

Total Kontribusi Kepada Negara
Total Contribution to the State
(Juta USD | USD Million)

2023	340
2022	400
2021	613

Porsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal
Portion of Expenditure on Local Supplier
(Juta USD | USD Million)

2023	97,6% senilai / worth 333
2022	99,9% senilai | worth 78
2021	99,6% senilai | worth 38

*) **Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk**
Profit for the year attributable to owners of the parent entity

KINERJA LINGKUNGAN
Environmental Performance

Konsumsi Air
Water Consumption
(m^3)

2023	278.525
2022	255.663
2021	208.200

Intensitas Energi
Energy Intensity
(GJ/MMSCFD)

2023	415,13
2022	447,096
2021	491,12

Penghematan Energi
Energy Saving
(GJ)

2023	26.203,93
2022	25.319,23
2021	25.358,20

Limbah B3 yang Dihasilkan
Hazardous Waste Generated
(TON)

2023	13.607
2022	14.646
2021	12.678

Limbah Non-B3 yang Dihasilkan
Non-Hazardous Waste Generated
(TON)

2023	142,2
2022	163,3
2021	115,1

Pengurangan Emisi
Emission Reduction
(Ton CO_2eq)

2023	598,39
2022	220
2021	-

- Data pengurangan emisi untuk tahun 2022 telah dinyatakan lang gun mencerminkan perubahan lingkup data konsolidasi Perusahaan, serta untuk memperkenalkan metode perhitungan ini sebagai standar untuk tahun-tahun mendatang. Untuk data 2021, meskipun tidak dilakukan penghitungan ulang karena adanya kompleksitas proses konsolidasi, Perusahaan tetap melakukan perhitungan yang menunjukkan angka pengurangan emisi secara *stand alone* sebesar 89.626,76 Ton CO2 eq/MMSCED.
  The emissions reduction data for 2022 have been restated to reflect changes in the Company's consolidated data scope and to establish this calculation method as the standard for the coming years. For the 2021 data, although a recalculation was not conducted due to the complexity of the consolidation process, the Company still performed calculations that showed a standalone emission reduction figure of 89,626.76 Ton CO2 eq/MMSCFD.

KINERJA SOSIAL
Social Performance

Terkait SDM | Human Resources Related

Jumlah Perwira Subholding Gas
Number of Gas Subholding Employees
(orang | people)

2023
3.318
2022 3.198
2021 3.239

Jam Kerja Aman
Safe Working Hours
(jam | hours)

2023
134.567.527
2022 122.370.329
2021 136.293.670

***Total Recordable Injury Rate* (TRIR)**
Total Recordable Injury Rate (TRIR)

2023
0,08
2022 0,23
2021 0,32

Keterikatan Pekerja[*)]
Employee Engagement[*)]

2023
4,45
2022 4,07
2021 4,02

Terkait Pelanggan | Customer Related

Indeks Kepuasan Pelanggan[*)]
Customer Satisfaction Index[*)]

2023
4,58 Sangat Baik / Very Good
2022 4,53
2021 4,57

Indeks Loyalitas Pelanggan[*)]
Customer Loyalty Index[*)]

2023
4,59 Sangat Baik / Very Good
2022 4,64
2021 4,60

Terkait Masyarakat | Community Related

6 **Desa binaan dengan ribuan penerima manfaat**
Assisted Villages with Thousands of Beneficiaries

Investasi Sosial
Social investment
IDR66.567.107.458
2022 IDR56.603.241.363
2021 IDR49.422.853.067

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Community Satisfaction Index (CSI)**

2023 **3,55**
2022 3,71
2021 3,65

Nilai mutu pelayanan: Kategori A
Predikat: Sangat Puas
Service quality score: **Category A**
Predicate: **Very Satisfied**

*) **Skala maksimum 5 |** A maximum scale of 5
) **Skala maksimum 4 | A maximum scale of 4

TATA KELOLA
Governance

Hasil Penilaian Penerapan GCG
GCG Implementation Assessment Results

Peringkat Risiko ESG oleh Sustainalytics
ESG Risk Rating by Sustainalytics
24,7

Adaption Rate ACGS
ACGS Adoption Rate

2023
72,73*)

* **Menggunakan parameter ACGS dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), dengan maksimal skor 100%**
Using ACGS parameters from the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), with a maximum score of 100%.

Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kasus Korupsi
Code of Ethics Violation and Corruption Cases

2023
NIL

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan:
Sustainability Governance Structure:
Pembentukan Komite Keberlanjutan dan Tim Environment, Social and Governance (ESG)
Establishment of Sustainability Committee and Environment, Social and Governance (ESG) Team

Anti Korupsi:
Anti-Corruption:
Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
Implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS)
13 sesi sosialisasi dan pelatihan mengenai pencegahan korupsi yang diikuti oleh total 604 karyawan PGN.
13 socialization and training sessions on corruption prevention attended by a total of 604 PGN employees.

Budaya Organisasi (AKHLAK):
Organizational Culture (AKHLAK):
Terdapat 6 nilai budaya yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
There are 6 cultural values, namely Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative

IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN
Sustainability Implementation

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). PGN meyakini bahwa keuangan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai ekonomi yang rendah karbon dan berkeadilan, di mana PGN hadir menjadi mitra pemerintah dan *agent of change*, yang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan lingkungan.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is committed to support the implementation of Sustainable Finance and sustainability principles that are in line with the Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects. PGN believes that sustainable finance is required to achieve a low-carbon and just economy, in which PGN is present as a government's partner and agent of change with a positive influence on society and the environment.

VISI KEBERLANJUTAN

Perusahaan Gas Nasional Terkemuka dan Terpercaya Berstandar Kelas Dunia dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Gas Bumi serta diakui sebagai Perusahaan Ramah Lingkungan, Perusahaan Bertanggung Jawab Sosial, Perusahaan dengan Tata Kelola yang Baik.

SUSTAINABILITY VISION

Leading and Trusted National Gas Company with World-Class Standard in the Provision and Utilization of Natural Gas as well as recognized as Environmentally Friendly Company, Socially Responsible Company, Company with Good Governance.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN DAN *NET ZERO EMISSION*

PGN berkomitmen untuk menerapkan prinsip ESG melalui berbagai aspek yang berkorelasi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG) serta mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai standar nasional/internasional. Untuk mendorong implementasi ESG melalui program-program operasional dan bisnis perusahaan, PGN menetapkan Organisasi dalam bentuk Komite Keberlanjutan Subholding Gas sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PGN No. 037200.K/UT.00/PDO/2022 dan Komite ESG Management sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PGN No. 037201.K/OT.00/PDO/2022 tanggal 5 September 2022.

SUSTAINABILITY COMMITMENT AND NET ZERO EMISSION

PGN is committed to implementing ESG principles through various aspects that correlate with the Sustainable Development Goals (SDG) and complying with applicable provisions in accordance with national/international standards. To encourage ESG implementation through company operational and business programs, PGN established an organization in the form of a Gas Subholding Sustainability Committee in accordance with PGN President Director Decree No. 037200.K/UT.00/PDO/2022 and the ESG Management Committee in accordance with PGN President Director Decree No. 037201.K/OT.00/PDO/2022 dated 5 September 2022.

PGN juga memiliki komitmen dalam mendukung pencapaian target menuju *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat, dimana Subholding Gas memegang peranan penting dalam masa transisi energi menuju NZE tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai *Net Zero Emission* dapat diliat pada Laporan Berkelanjutan PGN 2023.

PGN is also committed to supporting the achievement of the target towards Net Zero Emission (NZE) in Indonesia in 2060 or sooner, where Subholding Gas plays an important role in the energy transition period towards NZE. Further information regarding Net Zero Emissions can be seen in the 2023 PGN Sustainability Report.

Untuk mencapai visi, komitmen keberlanjutan dan *Net Zero Emission*, PGN telah menetapkan 4 (*focus*) keberlanjutan yang menjadi panduan pelaksanaan ESG yaitu *Achieving NZE Target by Enabling the Use of Natural Gas in Energy Transition Phase, Protecting the Nature, Building Cohesive and Resilient Societies Programs,* dan *Responsible Business Practice.*

To achieve its vision, commitment to sustainability and Net Zero Emissions, PGN has established 4 (focus) sustainability guidelines for ESG implementation, namely Achieving NZE Target by Enabling the Use of Natural Gas in Energy Transition Phase, Protecting the Nature, Building Cohesive and Resilient Societies Programs, and Responsible Business Practice.

Untuk menjalankan 4 (empat) fokus keberlanjutan Subholding Gas, terdapat 14 inisiatif utama pada Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh fungsi-fungsi di PGN, yaitu:

1. *Expanding the use of Natural Gas in Energy Transition Phase*
2. *Cost Optimal Paths to Net Zero*
3. *Reduce Environment Footprint*
4. *Promotion of Biodiversity Programs*
5. *Enhancement Safety and Health Programs*
6. *Promoting Human Rights*
7. *Prioritize the use of domestic products and services*
8. *Sustainability-focused Research & Innovation*
9. *Improve the quality of lives of employees and societies*
10. *Enhance GCG Management*
11. *Cybersecurity Structure & Culture*
12. *ESG Rating*
13. *ESG Communication & Engagement*
14. *ESG Financing*

Pelaksanaan keberlanjutan di PGN berperan penting dalam memperkuat penerapan GCG serta dapat meningkatkan efisiensi operasional. Di samping itu, penerapan aspek keberlanjutan juga dapat mengelola risiko, meningkatkan reputasi, serta mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi, akses ke energi bersih, dan menciptakan nilai jangka panjang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam transmisi dan distribusi gas bumi, PGN mengambil peran aktif dalam pemenuhan gas bumi domestik dengan mengintegrasikan aspek LST dalam proses/praktik bisnis Perusahaan. PGN juga senantiasa mensosialisasikan budaya keberlanjutan di internal Perusahaan secara proaktif, mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke seluruh karyawan. Sosialisasi ini diselenggarakan melalui berbagai kanal seperti uji pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) dan implementasi *code of conduct* bagi setiap pekerja, penerapan aplikasi *GCG Online System* (GOLS) untuk meningkatkan *awareness* GCG serta *branding* GCG.

Bagi PGN, nilai keberlanjutan menjadi fondasi dalam melakukan bisnis dan operasional sehingga Perusahaan dapat memberikan manfaat terbaik bagi para pemegang saham beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya, berkontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, dan berperan aktif guna menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

To implement the 4 (four) sustainability focuses of Subholding Gas, there are 14 main initiatives in 2023 that have been implemented by different functions at PGN, namely:

1. Expanding the use of Natural Gas in Energy Transition Phase
2. Cost Optimal Paths to Net Zero
3. Reduce Environmental Footprint
4. Promotion of Biodiversity Programs
5. Enhancement Safety and Health Programs
6. Promoting Human Rights
7. Prioritize the use of domestic products and services
8. Sustainability-focused Research & Innovation
9. Improve the quality of lives of employees and societies
10. Enhance GCG Management
11. Cybersecurity Structure & Culture
12. ESG Ratings
13. ESG Communication & Engagement
14. ESG Financing

The implementation of sustainability plays a crucial role in strengthening GCG implementation and can increase operational efficiency. In addition, the implementation of the sustainability aspects can also manage risks, improve reputation, as well as support the Company's sustainable growth by encouraging innovations, access to clean energy, and generating long-term values.

As a company engaging in the transmission and distribution of natural gas, PGN plays an active role in the supply of natural gas with integrating the ESG aspects in the Company's business processed/ practices. PGN also remains proactive in disseminating a culture of internal sustainability, starting from the highest level of leadership to all employees through various channels, including tests on Good Corporate Governance (GCG) and code of conduct implementation understanding for every employee, implementing the GCG Online System (GOLS) application to raise GCG awareness, and GCG branding.

For PGN, sustainability values is the foundation in conducting business and operations, enabling the Company to provide the best benefits for shareholders and all other stakeholders, contribute positively to the environment and society, encourage Indonesia's long-term economic growth, and play an active role in creating a better future for future generations.

IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN
Sustainability Impelementation

KERANGKA DAN STANDAR PENGELOLAAN KEBERLANJUTAN PGN

PGN memfokuskan inisiatif-inisiatif keberlanjutan selama beberapa tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha dengan berwawasan lingkungan dan pengembangan kapasitas. PGN juga mengembangkan sistem manajemen untuk mengelola aspek keberlanjutan termasuk perubahan-perubahan pada organisasi, manajemen risiko, sistem dan prosedur serta dokumen-dokumen terkait yang diperlukan agar penerapan aspek keberlanjutan dapat berjalan efektif.

PGN telah memiliki kerangka dalam pengelolaan aspek keberlanjutan yang selaras dengan ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan *international best practice* lainnya. Standar pengelolaan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada standar sistem manajemen internasional, mulai dari ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan hingga ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tahun 2023, Perusahaan juga terus mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis ISO 22301:2019 untuk memperkuat ketahanan organisasi Perseroan.

Rincian pencapaian penerapan keberlanjutan pada periode pelaporan 2023 dijabarkan lebih rinci dalam Laporan Keberlanjutan.

PGN'S SUSTAINABILITY MANANAGEMENT FRAMEWORKS AND STANDARDS

PGN has focused on sustainability initiatives over the last few years with the objective of improving the management of business activities that emphasize on the environment, capacity building, and developing a management system to manage sustainability aspects, including changes to the organization, management, risk, system and procedures, as well as relevant documents that are required to ensure that the implementation of the sustainability aspects run effectively.

PGN has established a framework for the management of sustainability that is in line with the provision of POJK No. 51/POJK.03/2017 and other international best practices. Sustainability management standards within the Company is carried out by implementing best practices in accordance with applicable regulatory provisions and referring to the standards of international management systems, ranging from ISO 14001:2015 on Environmental Management System, to ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System. In 2023, the Company also continued to optimize the implementation of ISO 22301:2019 business sustainability management system to strengthen the Company's organizational resilience.

Details of achievements in sustainability implementation in the 2023 reporting period are described in the Sustainability Report.

PILAR LINGKUNGAN
Environmental Pillar

PGN menjalankan kegiatan operasional dengan mengutamakan keseimbangan lingkungan. Hal ini terefleksi pada komitmen untuk mencapai target nol emisi karbon atau NZE sesuai dengan target negara pada 2060, atau lebih cepat. Upaya PGN sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero) bersama dengan Subholding Pertamina lainnya, mengembangkan dan menyusun peta jalan/*roadmap* NZE yang mencakup dekarbonisasi serta pengembangan bisnis baru berbasis *clean and green energy*.

PGN carries out operations activities by emphasizing environmental balance. This is reflected in the commitment to achieve net zero emissions or NZE in accordance with the state's target by 2060, or sooner. PGN's efforts as Gas Subholding of PT Pertamina (Persero) along with other Pertamina Suholdings, are to develop and formulate the NZE roadmap that includes decarbonization, as well as the development of new businesses based on clean and green energy.

PENGUKURAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Berbagai inisiatif efisiensi konsumsi energi yang dilakukan sepanjang tahun telah berdampak langsung pada berkurangnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan. Selama tahun 2023, PGN mencatat pengurangan emisi sebesar 598 Ton CO_2eq, lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 220 Ton CO_2eq.

MEASUREMENT OF GREEN HOUSE GAS (GHG) EMISSIONS

Various energy consumption efficiency initiatives that have been carried out throughout the year have had a direct impact on reducing Green House Gas (GHG) emissions. During 2023, PGN recorded a reduction in emissions of 598 ton CO_2eq, greater than in 2022, which reached 220 ton CO_2eq.

PENGELOLAAN LIMBAH

Terkait pembuangan air limbah, PGN hanya membuang air yang berasal dari kegiatan domestik serta kegiatan pemeliharaan infrastruktur seperti pembersihan pipa dan mesin. Melalui kebijakan HSSE, PGN berkomitmen mencegah pencemaran lingkungan dengan prinsip *reduce, reuse, recycle & recovery* (4R) melalui peningkatan kualitas pembuangan limbah cair. Dalam hal pengelolaan limbah, PGN senantiasa berpedoman pada prinsip pengurangan, daur ulang, dan penggantian bahan baku.

WATER DISCHARGE

In terms of wastewater disposal, PGN only disposes of water deriving from domestic activities as well as infrastructure maintenance activities, such as cleaning of pipelines and machines. Through the HSSE policy, PGN is committed to prevent environmental pollution with the reduce, reuse, recycle & recovery (4R) principles by improving the quality of liquid waste disposal. In terms of waste management, PGN always refers to the principles of reduction, recycle, and replacement of raw materials.

PENGGUNAAN AIR

PGN menggunakan air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan air tanah yang pengambilannya disesuaikan dengan ketetapan batas penggunaan yang berlaku. Aliran air dari kedua sumber tersebut tidak memberikan gangguan pada badan air bagi masyarakat ataupun kebutuhan ekologis akan air.

Pengambilan dan konsumsi air pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan optimalisasi sistem kerja *Work From Office* (WFO).

WATER USAGE

PGN uses water from the regional Drinking Water Company (PDAM) and ground water whose extraction is adjusted to the applicable usage limit provisions. The flow of water from these two sources does not interfere with water bodies for the community or the ecological needs of water.

Water intake and consumption in 2023 increased by 8.9% compared ot the previous year, in line with the optimization of the Work From Office (WFO) work system.

PILAR LINGKUNGAN
Environmental Pillar

PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS
PGN mengadopsi praktik penggunaan ulang untuk sampah kertas yang baru dipakai pada satu sisi agar dapat digunakan kembali pada sisi yang lain.

PGN juga berkomitmen dalam hal penggunaan material yang ramah lingkungan dan diwujudkan dengan menerapkan inisiatif efisiensi dalam penggunaan kertas atau paperless pada kegiatan pendukung. Inisiatif tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK RAMAH LINGKUNGAN
PGN telah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015, yang menunjukkan komitmen kami terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab. PGN telah mengimplementasikan berbagai inovasi berkelanjutan, seperti pemasangan Solar Panel *Offshore* – Sidayu dan mengembangkan inovasi dalam peningkatan efisiensi energi melalui penerapan metode Penggantian Bundel O-Ring untuk optimalisasi distribusi gas, serta metode TWIN (Pengurasan Air Waktu) untuk memperbaiki kinerja kompresor udara.

Informasi lengkap mengenai pengurangan dampak lingkungan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PGN yang diterbitkan terpisah namun masih satu kesatuan dengan Laporan Tahunan.

REDUCTION IN PAPER USAGE
PGN adopts the practice of reusing paper waste that has just been used on one side, allowing it to be reused on the other side.

PGN is also committed to using environmentally friendly materials, which it realized by implementing efficiency initiatives in the use of paper or going paperless in supporting activities. This initiative is carried out through the utilization of information technology.

ENVIRONEMTALLY FRIENDLY POLICIES AND PRACTICES
PGN has implemented the ISO 14001:2015 environmental management system, showcasing our commitment to responsible environmental practices. PGN has implemented various sustainable innovations Including the installation of Offshore Solar Panels - Sidayu and has developed innovations in energy efficiency improvement through the application of O-Ring Bundle Replacement method for gas distribution optimization, and the TWIN method (Time Water Drainage) to enhance air compressor performance.

Complete information regarding reducing environmental impacts can be viewed in the PGN Sustainability Report, which is published separately but still an integral part of the Annual Report.

PILAR SOSIAL
Social Pillars

Pada Pilar Sosial, PGN memfokuskan dukungannya pada pengembangan karyawan, pelanggan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. PGN juga senantiasa berupaya melakukan mitigasi risiko yang ada serta meningkatkan manfaat keberadaan Perusahaan yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya.

In the social pillar, PGN focuses its support on the development of employees, customers, and communities in the vicinity of the Company's operational areas. PGN also continuously seek to mitigate existing risks as well as increasing the benefits of the Company's existence to all other stakeholders.

BUDAYA KEBERLANJUTAN

Penerapan budaya keberlanjutan diawali dengan peningkatan kapasitas Perwira Subholding Gas untuk menguasai topik-topik LST yang relevan dengan bisnis Perusahaan, terutama dalam hal adaptasi organisasi untuk mengintegrasikan LST ke dalam sistem dan prosedur Perusahaan.

Keterlibatan seluruh Perwira Subholding Gas sangat penting untuk menjalankan budaya keberlanjutan dengan membangun kesadaran untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dalam kegiatannya sehari-hari. Program-program budaya keberlanjutan meliputi peningkatan kapasitas teknis dan keahlian terkait LST untuk seluruh level pegawai dan unit kerja, melalui *training, workshop,* webinar, maupun sertifikasi.

Komite Keberlanjutan dan Tim ESG berperan menjadi koordinator LST di lingkungan Perusahaan kemudian berperan sebagai penanggung jawab dan menjembatani info-info yang berkaitan dengan LST di area kerjanya masing-masing. Kampanye budaya berkelanjutan juga dilakukan melalui penyebaran informasi kepada karyawan, mitra dan pemasok Perusahaan.

PGN secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam mendukung tercapainya *ESG awareness* di lingkungan internal Perusahaan. Sosialisasi telah dilaksanakan kepada unit kerja dengan agenda yang dibahas diawali dengan komitmen global dan nasional, ketentuan regulator, dan implementasi LST yang telah dilaksanakan di Perusahaan pada masing-masing aspek. Selain itu, sosialisasi juga diselaraskan dengan ruang lingkup pekerjaan dari unit kerja terkait guna memperoleh dukungan dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

SUSTAINABILITY CULTURE

The implementation of the sustainability culture begins with increasing the capacity of Gas Subholding Employees to master relevant ESG topics in terms of the Company's business, particularly in terms of organizational adaptation to integrate ESG into the Company's systems and procedures.

The participation of all Gas Subholding Employees is crucial to implement the sustainability culture by raising the awareness to protect and preserve the environment in their daily activities. Sustainability culture programs include increasing technical capacity and expertise related to ESG for all level of employees and work units, through trainings, workshops, webinars, as well as certifications.

The Sustainability Committee and ESG Team serve as the ESG coordinator within the Company and act as the people in charge and convey information related to ESG in their respective work areas. The sustainability culture campaign is also carried out by disseminating information to employees, partners, and suppliers of the Company.

PGN actively carries out outreach activities in supporting the achievement of ESG awareness in the Company's internal environment. Socialization has been carried out to work units with the agenda discussing global and national commitments, regulatory provisions, and ESG implementation that has been implemented in the Company for each aspect. In addition, the socialization is also aligned with the scope of work of the relevant work units to obtain support in achieving Net Zero Emission (NZE).

PILAR SOSIAL
Social Pillar

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PERWIRA SUBHOLDING GAS

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tercapainya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), PGN melakukan pengelolaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjalankan program pendidikan dan pelatihan (diklat) *inhouse* dan *public training,* sertifikasi serta *sharing knowledge*. Pada tahun 2023, PGN melaksanakan pengukuran hasil Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2) dengan hasil capaian sebesar 124,02% guna mengukur efektivitas dari pelatihan yang dilaksanakan. Di samping itu, PGN juga memiliki fasilitas *online learning management system* dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta *sharing knowledge*. Informasi lengkap mengenai pengembangan SDM PGN dapat dilihat pada sub bab Profil Perwira Subholding Gas dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT FOR GAS SUBHOLDING EMPLOYEES

In order to support sustainable business growth and achieve the Company's Long-Term Plan (RJPP), PGN manages and develops Human Resources (HR) by organizing inhouse education and training programs, public trainings, certifications, as well as knowledge sharing. In 2023, PGN measured the results of Level 2 (L2) Training Evaluation with an achievement of 124.02% in order to measure the effectiveness of the training that has been implemented. In addition, PGN also has online learning management system facilities to improve services in the implementation of the education and training as well as knowledge sharing programs. Detailed information regarding PGN HR development can be viewed in the Gas Subholding Employee Profile sub-chapter in this Annual Report.

MEMPROMOSIKAN HAK ASASI MANUSIA

PGN mejalankan berbagai upaya untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh karyawan, dengan mengedepankan aspek keragaman dan penyetaraan gender melaui beberapa kegiatan seperti:

a. Mengelola pelaksanaan pelatihan tentang keberagaman bagi seluruh pekerja termasuk untuk pekerja baru.
b. Menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pekasanaan aplikasi PRISMA, yaitu aplikasi yang bertujuan memfasilitasi perusahaan untuk menilai dirinya sendiri dalam memetakan kondisi riil atas potensi risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis.

PROMOTING HUMAN RIGHTS

PGN carries out various efforts to ensure the creation of a comfortable working environment for all employees, by prioritizing the aspects of diversity and gender equality through several activities, such as:

a. Manage the implementation of training on diversity for all employees, including for new employees.
b. Collaborating with the Ministry of Law and Human Rights to develop the PRISMA application, namely an application that aims to facilitate companies to assess themselves in mapping the real conditions of potential risks for human rights violations caused by business activities.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

PGN berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tingkat remunerasi yang kompetitif, fasilitas pasca pensiun dan fasilitas kerja yang memadai untuk meningkatkan employee engagement serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

EMPLOYEE WELFARE

PGN is committed to providing health facilities, competitive remuneration levels, post-retirement facilities, and adequate work facilities to increase employee engagement and create a safe and comfortable work environment.

PERLINDUNGAN PELANGGAN

PGN memberikan perlindungan terkait keamanan produk dan layanan pelanggan, diantaranya dengan melakukan kontrol rutin terhadap seluruh infrastruktur agar memenuhi aspek keamanan.

CUSTOMER PROTECTION

PGN provides protection in terms of product safety and customer services. This includes carrying out routine controls on all infrastructure to ensure that it meets the security aspects.

Sementara terkait layanan, PGN menyediakan akses bagi pelanggan untuk menyampaikan kebutuhannya melalui berbagai saluran seperti Pertamina Call Center 135 dan platform digital *official* PGN termasuk sarana komunikasi terbaru WhatsApp Chatbot untuk melayani permintaan yang bersifat umum.

Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai matriks *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan *Customer Loyalty Index* (CLI) PGN berada pada kriteria sangat baik. Tingkat CSI dan CLI PGN pada tahun 2023 masing-masing berada pada level 4,58 dan 4,59, yang mengindikasikan kriteria sangat baik (dengan skala indeks 1-5). Pada tahun 2023, juga tidak terjadi pelanggaran terkait pelanggan.

PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

PGN berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada operasional Perusahaan. Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah untuk memberdayakan Industri dalam negeri. Realisasi komitmen TKDN Perusahaan ditahun 2023 atas seluruh pengadaan barang/jasa adalah sebesar 54,72%.

Furthermore, in relations to services, PGN provides access for customers to convey their needs through various channels, such as Pertamina Call Center 135 and the official PGN digital platforms, including the latest WhatsApp Chatbot communication media to help with general requests.

In the last fve years, PGN's Customer Satisfaction Index (CSI) and Customer Loyalty Index (CLI) matrix scores are in the very good criteria. PGN' CSI and CLI level in 2023 are at the levels of 4,58 and 4,59, respectively, indicating a very good criterion. In 2023, there were also no customer-related violations.

PRIORITIZING THE USE OF LOCAL PRODUCTS

PGN is committed to ensuring the implementation of the policy to use domestic products by implementing the Domestic Component Level (TKDN) in the Company's operations. This is in line with the Government's policy to empower domestic industry. The realization of the Company's TKDN commitment in 2023 for all procurement of goods/services is 54.72%.

PILAR TATA KELOLA
Governance Pillar

PGN mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan prinsip-prinsip GCG, TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness*). Prinsip GCG tersebut saat ini telah dikembangkan menjadi empat pilar governansi korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yakni: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan.

PGN implements Good Corporate Governance (GCG) based on the GCG principles, namely TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness). These GCG principles have been developed into four pillars of Indonesian corporate governance by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely: Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

TATA KELOLA LST

Dalam rangka pengelolaan aspek LST dapat berjalan baik dan tepat sasaran, PGN berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan penerapan Tata Kelola Keberlanjutan di seluruh lini bisnis dan operasional Perseroan. Penerapan Tata Kelola Keberlanjutan merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) yang bersandar pada kepatuhan hukum dan prinsip-prinsip GCG.

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Struktur tata kelola PGN di antaranya merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sebagai perusahaan *listed,* PGN juga merujuk pada peraturan OJK dan peraturan Bursa Efek Indonesia. Informasi lengkap terkait Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS serta organ Tata Kelola lain seperti Komite Dewan Komisaris, termasuk penjelasan tentang uraian tugas, pengalaman kerja, tanggung jawab dan kewenangan, serta informasi lainnya dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

ESG GOVERNANCE

In order to ensure that the ESG aspects are properly and appropriately implemented, PGN is committed to consistently improving the implementation of Sustainability Governance in all lines of business and operations of the Company. The implementation of Sustainability Governance is part of Good Corporate Governance (GCG), which relies on compliance with the laws and GCG principles.

STRUCTURE OF SUSTAINABILITY GOVERNANCE

The structure of PGN's governance according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Detailed information regarding theh Board of Commissioners and Board of Directors, GMS, as well as other Governance organs, sich as Committees of the Board of Commissioners, including description of the duties, work experiences, responsibilities and authority, as well as other information can ve viewed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN LST

PGN memastikan tata kelola LST berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. PGN memantau pelaksanaan tata kelola LST secara terus menerus agar hal-hal yang terkait dengan keberlanjutan terinternalisasi dalam struktur tata kelola secara keseluruhan. PGN juga telah menetapkan tujuan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan LST secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan serta memperhatikan praktik-praktik LST yang diterapkan oleh industri dan inisiatif global.

Dewan Komisaris berperan penting dalam mengawasi arah dan kebijakan Perusahaan. Sedangkan Direksi berperan penting dalam menetapkan arah Perusahaan melalui kebijakan, strategi, dan sasaran keberlanjutan dalam topik sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk isu perubahan iklim, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan dan strategi PGN. Dewan Komisaris dan Direksi juga senantiasa aktif melakukan identifikasi dan evaluasi dalam mengelola dampak aspek keberlanjutan.

ESG MANAGEMENT AND SUPERVISION

PGN ensures that ESG governance runs effectively in accordance with stakeholders' expectations. PGN consistently monitors the implementation of ESG governance to ensure that matters related to sustainability have been internalized in the overall governance structure. PGN has also set a goal to handle ESG-related matters effectively, in accordance with regulatory provisions, as well as taking into considerations ESG practices being implemented by the global industries and initiatives.

The Board of Commissioners and Board of Directors have a crucial role in determining the direction of the Company through policies, strategies, and sustainability targets in the social, economic, and environmental topics, including climate change issues, which are then realized in PGN's policies and strategies. The Board of Commissioners and Board of Directors are also always active in identifying and evaluating the impacts of the sustainability aspects.

07.

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statement





The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1/1 - 4	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2/1 - 2	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3/1	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4/1 - 2	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5/1 - 222	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PERTAMINA
GAS NEGARA

Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak

Directors' statement letter relating to the responsibility on the consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended PT Perusahaan Gas Negara Tbk and its Subsidiaries

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama	:	Arief Setiawan Handoko	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No.20, Jakarta	*Office address*
	Alamat Domisili	:	Kebayoran Heights, Blok A.10 No.10 RT/RW 002/007, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan	*Residential Address*
	Nomor Telepon	:	+6221633 9524	*Telephone*
	Jabatan	:	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2.	Nama	:	Fadjar Harianto Widodo	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No.20, Jakarta	*Office address*
	Alamat Domisili	:	Jl. Pulo Sirih Barat VIII Blok FE No 445, Taman Galaxi RT/RW 002/015, Jaka Setia Bekasi Selatan, Kota Bekasi	*Residential Address*
	Nomor Telepon	:	+6221633 9524	*Telephone*
	Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/*Director of Finance and Risk Management*	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group");*
2. *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of the Group have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for the internal control systems of the Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 8 Maret/March 2024

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance and Risk Management*
Arief Setiawan Handoko	**Fadjar Harianto Widodo**

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk setiap hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For each of the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matters is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal-hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal-hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Provisi kontrak memberatkan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat provisi kontrak memberatkan atas kontrak penjualan *liquefied natural gas* ("LNG") jangka panjang sebesar US$68.540.528. Provisi ini mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Pengungkapan terkait provisi kontrak memberatkan atas kontrak penjualan LNG jangka panjang disajikan dalam Catatan 18a dan 35t atas laporan keuangan konsolidasian. Asesmen provisi kontrak memberatkan atas kontrak penjualan LNG jangka panjang memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan karena ketidakpastian estimasi tarif penalti yang harus dihitung oleh Grup, harga LNG sesuai harga acuan, dan suplai yang akan diperoleh oleh Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Provision for onerous contract

Description of key audit matter:

As of December 31, 2023, the Group recorded provision for onerous contract related to long-term liquefied natural gas ("LNG") sales contract amounted to US$68,540,528. This provision reflects the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it. The related disclosures of provision for onerous long-term LNG sales contract are included in Notes 18a and 35t to the consolidated financial statements. Assessment of provision for onerous long-term LNG sales contract requires significant judgment and estimates due to the uncertainty of the estimation of the penalty tariff that must be accounted for by the Group, LNG prices according to the benchmark prices, and supply that will be obtained by the Group.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Provisi kontrak memberatkan (lanjutan)

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman terhadap kajian provisi kontrak memberatkan atas kontrak penjualan LNG jangka panjang dan melakukan diskusi dengan manajemen atas perkembangannya di tahun ini, termasuk pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan penting dalam kontrak. Kami mendapatkan daftar semua kontrak penjualan LNG jangka panjang dan memastikan kelengkapan daftar tersebut. Kami memeroleh dan melakukan evaluasi terhadap kajian manajemen dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dari posisi Grup dalam transaksi ini. Kami menguji akurasi dari perhitungan provisi dan menilai serta menguji kewajaran asumsi utama yang digunakan, seperti tarif penalti, harga LNG acuan, ketersediaan suplai dan tingkat diskonto. Kami juga memeriksa kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Provision for onerous contract (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the assessment of the provision for onerous long-term LNG sales contract and conducted discussions with management on the developments during the year, including understanding of the key terms of the contracts. We obtained a list of all long-term LNG sales contracts and ensured completeness of the list. We obtained and evaluated the management's assessment considering the most recent update on the Group's position on the transaction. We tested the mathematical accuracy of the calculation of the provision, and assessed and tested the reasonableness of the key assumptions used, such as penalty tariff, LNG benchmark prices, availability of supply and discount rates. We also checked the adequacy of the disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup mengakui beban depresiasi, deplesi, dan amortisasi ("beban DD&A") konsolidasian sebesar US$246.535.411 atau sama dengan 8,5% dari total beban pokok pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Cadangan minyak dan gas bumi digunakan dalam perhitungan beban DD&A yang merupakan pos material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3j atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, estimasi cadangan minyak dan gas bumi merupakan hal yang kompleks, karena terdapat ketidakpastian estimasi signifikan dalam menilai jumlah dan tingkat cadangan di setiap blok minyak dan gas bumi, serta asumsi data ekonomi yang digunakan, antara lain, asumsi harga minyak dan gas bumi, dan asumsi biaya operasi dan modal di masa mendatang, yang dapat berubah dari tahun ke tahun.

Respons audit:

Kami memeroleh suatu pemahaman mengenai proses estimasi Grup atas cadangan minyak dan gas bumi serta pengendalian terkait yang ditetapkan oleh manajemen, termasuk proses sertifikasi yang dilakukan oleh konsultan perminyakan independen atas estimasi cadangan minyak dan gas bumi yang dibuat oleh manajemen. Kami juga mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas konsultan. Kami menguji asumsi-asumsi utama yang mendasari penentuan cadangan dengan membandingkan proyeksi harga yang digunakan terhadap proyeksi harga minyak dari pihak ketiga dan mengevaluasi proyeksi biaya modal terhadap rencana jangka panjang Grup dan pengeluaran biaya modal yang telah terjadi.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Estimation of oil and gas reserves

Description of key audit matter:

The Group recognized consolidated depreciation, depletion and amortization expenses (the "DD&A expenses") amounted to US$246,535,411 or equivalent to 8.5% of total consolidated cost of revenues for the year ended December 31, 2023. Oil and gas reserves are used in the calculation of DD&A expenses, which are material line items in the accompanying consolidated financial statements. As described in Note 3j to the accompanying consolidated financial statements, the estimation of oil and gas reserves is complex, as there is significant estimation uncertainty in assessing the quantities and level of reserves in each oil and gas block, as well as economic data assumptions, such as oil and gas price assumptions, and future operating and capital cost assumptions, which may change from year to year.

Audit response:

We obtained an understanding of the oil and gas reserves estimation process of the Group and the relevant controls established by management, including the certification process performed by the independent petroleum engineering consultant on the estimate of oil and gas reserves prepared by management. We also evaluated the consultant's competence, capabilities, and objectivity. We tested key assumptions underlying reserves determination by comparing forecast prices used in the reserves' calculation to the crude oil prices forecast from third party and evaluated the future capital expenditures with the Group's long-term planning and historical capital expenditures.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Irwan Haswir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726/*Public Accountant Registration No. AP.1726*

8 Maret 2024/*March 8, 2024*

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4a	1.244.731.682	1.447.650.817	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	14.400.810	213.499	*Restricted cash*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5	23.178.224	27.720.100	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	6	180.065.076	325.756.170	*Related parties*
Pihak ketiga	6	268.118.427	242.574.061	*Third parties*
Piutang lain-lain - neto				*Other receivables - net*
Pihak berelasi	7	13.127.319	24.739.941	*Related parties*
Pihak ketiga	7	24.569.947	21.176.764	*Third parties*
Persediaan - neto	8	70.980.682	59.592.739	*Inventories - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak	21a	15.999.792	22.669.848	*Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*
Uang muka	9	10.978.544	17.370.800	*Advances*
Beban dibayar di muka	10	26.274.552	22.900.334	*Prepaid expenses*
Total aset lancar		**1.892.425.055**	**2.212.365.073**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	128.772.206	115.021.834	*Restricted cash*
Piutang usaha - pihak ketiga	6	45.825.293	47.069.180	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain pihak ketiga	11	63.853.371	65.356.756	*Other non-current receivables*
Uang muka - bagian tidak lancar	9	35.019.565	48.889.741	*Advances - non-current portion*
Beban dibayar di muka - bagian tidak lancar	10	37.365.518	40.129.147	*Prepaid expenses - non-current portion*
Penyertaan saham dan ventura bersama	12	307.204.288	302.802.841	*Investment in shares and joint ventures*
Aset tetap - neto	13a	2.621.188.016	2.633.417.390	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	14a	413.211.228	462.366.828	*Right-of-use assets - net*
Aset eksplorasi dan evaluasi	15a	11.127.331	108.512.959	*Exploration and evaluation assets*
Properti minyak dan gas - neto	15b	870.126.444	946.687.700	*Oil and gas properties - net*
Aset takberwujud - neto	13d	2.487.768	2.443.873	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak	21a	51.502.778	53.920.162	*Prepaid taxes and Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	21d	111.401.302	147.823.262	*Deferred tax assets*
Lain-lain		7.728.306	8.053.236	*Others*
Total aset tidak lancar		**4.706.813.414**	**4.982.494.909**	***Total non-current assets***
TOTAL ASET		**6.599.238.469**	**7.194.859.982**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	16	182.631.999	136.079.428	*Related parties*
Pihak ketiga	16	62.578.145	100.138.534	*Third parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	17	117.290.669	174.524.897	*Third parties*
Utang bank jangka pendek	19a	2.590.841	-	*Current bank loans*
Utang obligasi	20	552.633.015	-	*Bonds payable*
Liabilitas yang masih harus dibayar jangka pendek	18a	352.673.261	395.562.599	*Accrued liabilities -current*
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	19b	39.689.089	16.718.211	*Current portion of non-current bank loans*
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	14b	34.826.814	31.445.959	*Current portion of lease liabilities*
Utang pajak jangka pendek	21b	33.601.051	51.524.967	*Current taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22	75.864.486	66.259.651	*Current employee benefit liabilities*
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	18b	8.038.209	20.315.329	*Current portion of deferred revenues*
Total liabilitas jangka pendek		**1.462.417.579**	**992.569.575**	***Total current liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES (continued)***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka panjang	19b	519.958.791	335.314.805	*Non-current bank loans*
Liabilitas sewa jangka panjang	14b	395.855.249	442.993.556	*Non-current lease liabilities*
Utang pajak jangka panjang	21b	57.321.373	130.241.300	*Non-current taxes payable*
Utang obligasi jangka panjang	20	-	1.323.114.950	*Non-current bonds payable*
Liabilitas pajak tangguhan	21d	116.394.012	93.653.829	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka Panjang	18a	68.540.528	56.850.817	*Accrued liabilities - Non-current*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	23	146.690.321	108.322.308	*Asset abandonment and site restoration obligations*
Liabilitas imbalan pascakerja	22d	136.120.605	122.971.619	*Post-employment benefit obligation*
Pendapatan ditangguhkan	18b	155.536.632	147.056.585	*Deferred revenues*
Total liabilitas jangka panjang		**1.596.417.511**	**2.760.519.769**	***Total non-current liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**3.058.835.090**	**3.753.089.344**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to the owners of the parent entity***
Modal saham – nilai nominal IDR100 per saham Modal dasar – 70.000.000.000 saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	24a	344.018.831	344.018.831	*Share capital - par value of IDR100 per share Authorised - 70,000,000,000 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 Series B shares Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	24b	(467.574.628)	(467.574.628)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan		2.592.201.898	2.494.329.989	*Appropriated*
- Tidak dicadangkan		278.091.179	326.239.697	*Unappropriated*
Komponen ekuitas lainnya		(47.882.475)	(62.816.612)	*Other components of equity*
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.698.854.805	2.634.197.277	*Net equity attributable to the owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	841.548.574	807.573.361	*Non-controlling interests*
EKUITAS NETO		**3.540.403.379**	**3.441.770.638**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.599.238.469**	**7.194.859.982**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2023	2022	
PENDAPATAN	27	3.646.304.165	3.568.594.775	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	28	(2.912.724.687)	(2.788.052.353)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**733.579.478**	**780.542.422**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	31a	24.623.337	29.097.489	*Other income*
Beban umum dan administrasi	29	(201.720.154)	(198.664.089)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	31b	(14.065.047)	(18.800.468)	*Other expenses*
LABA OPERASI		**542.417.614**	**592.175.354**	***OPERATING PROFIT***
Bagian laba dari ventura bersama	12	64.835.104	81.020.133	*Share of profit from joint ventures*
Pendapatan keuangan	30b	48.464.033	26.401.503	*Finance income*
Laba selisih kurs	31c	7.352.655	(6.854.476)	*Gain foreign exchange*
Beban keuangan	30a	(97.628.154)	(132.447.530)	*Finance costs*
(Penambahan)/pembalikan atas sengketa pajak	21f	(29.864.532)	9.435.765	*(Addition)/reversal of tax disputes*
Provisi atas kontrak LNG yang memberatkan	35t	(11.689.711)	(56.850.817)	*Provision for Onerous contract of LNG*
Pemulihan nilai properti minyak dan gas - neto	15b	-	44.341.650	*Impairment reversal of oil and gas properties - net*
Penurunan nilai aset tetap		-	(14.517.321)	*Impairment of fixed assets*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**523.887.009**	**542.704.261**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21c	**(147.271.108)**	**(141.361.720)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**376.615.901**	**401.342.541**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	22d	(2.454.911)	4.558.538	*Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak		17.478.693	(15.389.991)	*Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak		(89.645)	(604.903)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
SUBTOTAL		**17.389.048**	**(15.994.894)**	***SUBTOTAL***
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		**14.934.137**	**(11.436.356)**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME(LOSS)***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**391.550.038**	**389.906.185**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		278.091.179	326.239.697	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	98.524.722	75.102.844	*Non-controlling interests*
		376.615.901	**401.342.541**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		293.025.316	314.803.341	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	98.524.722	75.102.844	*Non-controlling interests*
		391.550.038	**389.906.185**	
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN	32	**0,0115**	**0,0135**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 3/1 *Page*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to the owners of the parent entity*										
					Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*						
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak/ *Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak/ *Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Total komponen ekuitas lainnya/ *Total other components of equity*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas neto/ *Net equity*	
			Dicadangkan/ *Appropriated*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*							
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.396.462.090**	**303.823.865**	**(33.027.867)**	**(19.015.657)**	**663.268**	**(51.380.256)**	**759.574.656**	**3.284.924.558**	***Balance as of January 1, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	326.239.697	-	-	-	-	75.102.844	401.342.541	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	(15.389.991)	4.558.538	(604.903)	(11.436.356)	-	(11.436.356)	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(205.955.966)	-	-	-	-	(27.104.139)	(233.060.105)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	97.867.899	(97.867.899)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.494.329.989**	**326.239.697**	**(48.417.858)**	**(14.457.119)**	**58.365**	**(62.816.612)**	**807.573.361**	**3.441.770.638**	***Balance as of December 31, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	278.091.179	-	-	-	-	98.524.722	376.615.901	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	17.478.693	(2.454.911)	(89.645)	14.934.137	-	14.934.137	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(228.367.788)	-	-	-	-	(64.549.509)	(292.917.297)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	97.871.909	(97.871.909)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.592.201.898**	**278.091.179**	**(30.939.165)**	**(16.912.030)**	**(31.280)**	**(47.882.475)**	**841.548.574**	**3.540.403.379**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangankonsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*, 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		3.739.835.270	3.510.859.494	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga		48.464.033	26.401.503	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok		(2.082.229.607)	(1.732.769.836)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya		(436.379.766)	(394.330.465)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi penerimaan dari tagihan pajak		(253.201.247)	(101.252.687)	*Payments for taxes after deduction from tax refunds*
Pembayaran kepada karyawan		(141.141.075)	(169.025.265)	*Payments to employees*
Pembayaran beban keuangan		(76.950.929)	(119.550.801)	*Payments for finance cost*
Pembayaran sengketa pajak	21f	(27.599.264)	(21.469.065)	*Payments for tax disputes*
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		(27.937.683)	(12.385.018)	*Placement of restricted cash*
Pembayaran bunga atas sewa	14b	(19.171.128)	(16.777.988)	*Payments for interest on lease*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		**723.688.604**	**969.699.872**	***Net cash generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari ventura bersama	12	61.015.276	117.423.870	*Dividend received from joint ventures*
Penerimaan dari pelepasan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5	3.600.000	44.000.000	*Proceeds from disposal of financial asset at fair value through other comprehensive income*
Penambahan aset tetap		(52.055.522)	(75.123.791)	*Additions of fixed assets*
Penambahan property minyak dan gas		(69.172.678)	(55.186.312)	*Additions of oil and gas properties*
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi		(1.054.564)	(2.389.909)	*Additions of exploration and valuation assets*
Penerimaan piutang lain-lain jangka panjang		-	1.658.061	*Receipts of others long-term receivables*
Kas neto yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi		**(57.667.488)**	**30.381.919**	***Net cash (used in)/generated from investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	19	303.238.552	17.000.000	*Proceeds of bank loans*
Penerimaan pinjaman dari ventura bersama		4.223.035	4.223.033	*Proceeds of loans from joint ventures*
Pembayaran obligasi - *buyback*	20	(773.291.000)	(644.307.929)	*Payments of obligation - buyback*
Pembayaran dividen	25,26	(292.917.297)	(233.060.105)	*Payments of dividend*
Pembayaran pinjaman	19	(76.900.048)	(47.189.792)	*Payments of loans*
Pembayaran liabilitas sewa	14b	(38.903.352)	(42.408.886)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran biaya transaksi utang bank		(3.655.000)	-	*Payment of bank loan transaction cost*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham - neto		-	(49.999.999)	*Net repayments of shareholder loan*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(878.205.110)**	**(995.743.678)**	***Net cash used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(212.183.994)**	**4.338.113**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas		9.264.859	(59.980.989)	*Net effects of foreign exchange on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4a	**1.447.650.817**	**1.503.293.693**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4a	**1.244.731.682**	**1.447.650.817**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perusahaan") pada awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. Kemudian, Perusahaan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM) pada tahun 1950, saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama Perusahaan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, Perusahaan didirikan sebagai Perusahaan Negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/1984, PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum ("Perum") dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara.

Status Perusahaan diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara ("Persero") dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37/1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7729HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (the "Company") initially named Firm L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage, was established in 1859. The Company was renamed NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM), when the Dutch Government took control in 1950. In 1958, when the Government of the Republic of Indonesia took over the entity, the Company's name was changed to Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) and then later became BPU-PLN in 1961. On May 13, 1965, based on Government Regulation No. 19/1965, the Company was established as a state owned company ("Perusahaan Negara") and became known as Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Based on Government Regulation No. 27/1984, PN. Gas was converted into a public service enterprise ("Perum") under the name Perusahaan Umum Gas Negara.

The status of the Company was changed from a Perum to a state owned limited liability company ("Persero") and the name was changed to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) based on Government Regulation No. 37/1994 and the Deed of Establishment No. 486 dated May 30, 1996 as notarised by Adam Kasdarmaji, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-7729HT.01.01.Th.96. dated May 31, 1996 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 8508 Supplement No. 80 dated October 4, 1996.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas dan nama Perusahaan berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6/2018. Perubahan status Perusahaan ini kemudian diikuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 48 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 29 Juni 2018. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 11 Mei 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 1 Juni 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") meliputi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan niaga gas buatan; dan jasa telekomunikasi; serta pengelolaan properti Perusahaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pada saat ini, usaha utama Perusahaan adalah niaga dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. Pemegang saham langsung Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan pemegang saham utama Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The status of the Company was changed to a limited liability company and the Company's name was changed to PT Perusahaan Gas Negara Tbk based on Government Regulation No. 6/2018. The change in the Company's status was followed by amendment to the Company's Articles of Association based on Notarial Deed No. 48 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 29, 2018. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 28 dated May 11, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The amendment was reported to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acknowledgment Letter No. AHU-AH.01.03-0342118 dated June 1, 2021.

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's objective is to implement and support the Government's economic and national development programs, particularly in developing the use of natural gas for the benefit of the public as well as in the supply of a sufficient volume and quality of gas for public consumption. The scope of activities of the Company and its subsidiaries (together, the "Group") comprises planning, construction, operation, and development of natural gas downstream business which includes processing, transporting, storing and trading, planning, construction, production development, supplying and distribution of processed gas; telecommunication services; managing the Company's property and providing manpower services. Currently, the Company's principal business is the trading and transmission of natural gas to industrial, commercial and household users.

The Company's Head Office is located at Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. The Company's immediate parent is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Grup

Pada tanggal 5 Desember 2003, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, dan 820.987.000 saham baru. Saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2003.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Juni 2008 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 49 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 13 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dari IDR500 per saham menjadi IDR100 per saham, sehingga jumlah saham Perusahaan meningkat dari 14 miliar saham menjadi 70 miliar saham dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 4.593.437.193 saham akan meningkat menjadi 22.967.185.965 saham.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD1.350.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (Catatan 20a).

Pada tanggal 26 April 2017, PT Saka Energi Indonesia ("SEI"), anak perusahaan, menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD625.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (Catatan 20b).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan sesuai tanggal Surat Pernyataan Direksi.

1. GENERAL (continued)

b. The Group's Public Offerings

On December 5, 2003, the Company obtained an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to conduct a public offering of 1,296,296,000 of its shares, which comprised 475,309,000 shares divested by the Government of the Republic of Indonesia, and 820,987,000 newly issued shares. The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 15, 2003.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 13, 2008, which was notarised in Notarial Deed No. 49 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 13, 2008, the shareholders ratified the stock split of the nominal value of the Series A Dwiwarna share and Series B shares from IDR500 per share to IDR100 per share resulting in an increase in the Company's authorised shares from 14 billion shares to 70 billion shares and an increase in the issued and paid-up capital from 4,593,437,193 shares to 22,967,185,965 shares.

On May 12, 2014, the Company issued and listed USD1,350,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (Note 20a).

On April 26, 2017, PT Saka Energi Indonesia ("SEI"), the Company's subsidiary, issued and listed USD625,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (Note 20b).

c. Completion of the consolidated financial statements

The Group's interim consolidated financial statements have been completed and authorized to be issued by the Company's Board of Directors on the date of the Board of Directors' Statement Letter.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the percentage of ownership of the Company, either directly or indirectly, and total assets of the subsidiaries is as follows:

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022		31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/ *Held directly by the Company*					
PT Saka Energi Indonesia ("SEI") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2011	1.434	1.786
PT PGN LNG Indonesia ("PLI") Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Indonesia. 26 Juni/*June* 2012	100,00%	100,00%	2014	617	749
PT Permata Graha Nusantara ("PGN MAS") Pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan/ *Management and leasing buildings and equipment* Indonesia, 17 Juni/*June* 2014	100,00%	100,00%	2014	92	97
PT PGAS Solution ("PGASSOL") Konstruksi/*Construction* Indonesia, 6 Agustus/*August* 2009	99,91%	99,91%	2010	129	129
PT Gagas Energi Indonesia ("GEI") Niaga gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2012	73	72
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASKOM") Telekomunikasi/ *Telecommunication*, Indonesia.10 Januari/*January* 2007	99,93%	99,93%	2009	44	39
PT Pertamina Gas ("Pertagas") Niaga gas bumi/ *Distribution of natural gas* Indonesia, 23 Februari/*February* 2007	51,00%	51,00%	2007	2.389	2.358

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL (continued)***

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi(lanjutan) / ***d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)***

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022		31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Dimiliki melalui Pertagas/ *Held through Pertagas*					
PT Pertagas Niaga ("PTGN") Perniagaan gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 23 Maret/*March* 2010	99,00%	99,00%	2010	180	146
PT Perta Arun Gas ("PAG") Pengolahan LNG/ *Processing of LNG* Indonesia, 18 Maret/*March* 2013	99,95%	99,95%	2013	270	261
Dimiliki melalui PGASKOM/ *Held through PGASKOM*					
PGAS Telecommunications International Pte. Ltd. ("PTI") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Singapura/*Singapore,* 24 November/*November* 2009	100,00%	100,00%	2010	4	4
PT Telemedia Dinamika Sarana ("TDS") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Indonesia, 2 Oktober/*October* 2002	90,00%	100,00%	2013	5	5
Dimiliki melalui PGN MAS/ *Held through PGN MAS*					
PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") Transmisi gas/*Gas transmission* Indonesia, 23 Juli/*July* 2013	80,00%	80,00%	2015	79	78
Dimiliki melalui PGASSOL/ *Held through PGASSOL*					
PT Solusi Energy Nusantara ("Sena") Enginering, konsultasi dan jasa/ *Engineering, consultancy and services*, Indonesia, 20 April 2015	99,90%	99,90%	2016	13	10
Dimiliki melalui GEI/ *Held through GEI*					
PT Widar Mandripa Nusantara ("Widar") Jasa kelistrikan/*Electricity service* Indonesia, 29 Juli/*July* 2015	99,99%	99,99%	2)	7	5
Dimiliki melalui PLI/ *Held through PLI*					
PT Lamong Nusantara Gas Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Surabaya, 1 Oktober/*October* 2019	51,00%	51,00%	2)	10	10
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI*					
Saka Indonesia Pangkah B.V. ("SIPBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 3 Agustus/ *August* 2007	100,00%	100,00%	2007	205	234
PT Saka Energi Muara Bakau ("SEMB") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 10 Februari/ *February* 2014	100,00%	100,00%	2017	354	409

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022		31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI* (lanjutan/*continued*)					
PT Saka Ketapang Perdana ("SKP") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 17 Oktober/ *October* 2012	99,98%	99,98%	2015	95	126
PT Saka Energi Internasional ("SI") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 20 Februari/ *February* 2014	99,99%	99,99%	2014	2)	1)
Saka Energi Overseas Holding B.V. ("SEOHBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
PT Saka Bangkanai Klemantan ("SBK") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 11 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	2016	71	75
PT Saka Energi Sumatera ("SES") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 24 September 2012	99,95%	99,95%	2014	2)	1)
PT Saka Indonesia Sesulu ("SIS") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 7 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	2)	108	106
PT Saka Energi Bangkanai Barat ("SEBB") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 12 Mei/*May* 2014	100,00%	100,00%	2)	10	10
PT Saka Energi Investasi ("SEINVS") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 18 Juli/*July* 2014	99,99%	99,99%	2)	2)	1)
PT Saka Energi Wokam ("SEW") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 14 September 2015	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
Dimiliki melalui SEOHBV/ *Held through SEOHBV*					
Saka Energi Exploration Production B.V. ("SEEPBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands,* 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2015	41	41

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*		31 Desember/ *dDecember 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*
Dimiliki melalui SEEPBV/ *Held through SEEPBV*					
Saka Energi Muriah Limited ("SEML") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Virgin Britania Raya/ *British Virgin Islands*, 15 Juli/ *July* 2009	100,00%	100,00%	2015	63	59
Dimiliki melalui SI/*Held through SI*					
PT Saka Energi Yamdena Barat ("SEYB") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 26 Mei/*May* 2017	100,00%	100,00%	2)	5	5
PT Saka Energi Sepinggan ("SEP") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 1 April 2015	100,00%	100,00%	2)	3	3
PT Saka Eksplorasi Ventura ("SEV") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 Desember/ *December* 2016	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
PT Saka Eksplorasi Baru ("SEB") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 30 Agustus/ *August* 2016	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
PT Saka Eksplorasi Timur ("SET") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 September 2016	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
Saka Energi Asia Pte. Ltd. ("SEAPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	217	385
PT Saka Energi Investama ("SEINV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 9 November 2017	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
PT Saka Energi Sepinggan Timur ("SEST") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 November 2019	100,00%	100,00%	2)	2)	1)
Saka Energy Fasken LLC ("Fasken") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Amerika Serikat/*USA*, 25 April 2014	100,00%	100,00%	2014	174	168

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022		31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Dimiliki melalui SIPBV/ *Held through SIPBV*					
Saka Indonesia Pangkah Limited ("SIPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Inggris/*United Kingdom*, 5 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	461	437
Saka Pangkah LLC ("SPLLC") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Cayman/*Cayman Islands*, 12 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	60	58
Dimiliki melalui SEAPL/ *Held through SEAPL*					
Saka Energi East Kalimantan Pte. Ltd. ("SEEKPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	43	43
Saka Energi Sanga Star Pte. Ltd. ("SESSPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/*June* 2016	100,00%	100,00%	2016	13	13
Dimiliki melalui SEEKPL/ *Held through SEEKPL*					
Saka Energi Sanga-sanga Ltd. ("SESL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Persemakmuran Bahama/ *Commonwealth of The Bahamas*, 18 November 1983	100,00%	100,00%	1983	77	91
Dimiliki melalui SEINVS/*Held through SEINVS*					
Saka Energi International Ventures Ltd. ("SEIV") Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 14 Februari/ *February* 2018	100,00%	100,00%	2018	164	164
Dimiliki melalui SEINVS dan PLI/ *Held through SEINVS and PLI*					
Bentang Energi Indonesia Ltd. ("BEI")[3] Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 31 Januari/ *January* 2018	100,00%	100,00%	2018	[1]	[1]

Keterangan:
1) Total aset di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat.
2) Belum beroperasi komersial.
3) PLI dan SEINVS masing-masing memiliki saham BEI sebesar 75% dan 25% sehingga kepemilikan efektif Grup atas BEI adalah 100%.

Remarks:
1) The total assets are below one million United States dollar.
2) Not yet started commercial operations.
3) PLI and SEINVS own 75% and 25% interests in BEI's shares, respectively, therefore the Group's effective ownership in BEI is 100%.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan)

Grup mempunyai kerjasama operasi minyak dan gas sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)

The Group has interests in oil and gas joint operations as follow:

Wilayah Kerja/ *Working Area*	Negara/ *Country*	Tanggal Efektif Kontrak/ *Effective Date of Contract*	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak/ *Expiry Date of Contract*	Hak kepemilikan (%)/ *Participating interest (%)*	
				31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Blok/*Block* Bangkanai	Indonesia	30 Desember 2005/ *December 30, 2005*	30 Desember 2035/ *December 30, 2035*	30%	30%
Blok/*Block* Ujung Pangkah	Indonesia	8 Mei 1996/ *May 8, 1996*	8 Mei 2026/ *May 8, 2026*	100%	100%
Blok/*Block* Ketapang	Indonesia	11 Juni 1998/ *June 11, 1998*	11 Juni 2028/ *June 11, 2028*	19,4%	19,4%
Blok/*Block* Sesulu Selatan	Indonesia	5 Mei 2009/ *May 5, 2009*	5 Mei 2039/ *May 5, 2039*	100%	100%
Blok/*Block* Fasken	Amerika Serikat/ *United States of America*	15 Juli 2014/*July 15, 2014*	Produksi selesai/ When production ends	36%	36%
Blok/*Block* Muriah	Indonesia	20 Mei 1991/ *May 20, 1991*	31 Desember 2026/*December 31, 2026*	100%	100%
Blok/*Block* Bangkanai Barat	Indonesia	15 Mei 2013/ *May 15, 2013*	15 Mei 2043/ *May 15, 2043*	30%	30%
Blok/*Block* Muara Bakau	Indonesia	30 Desember 2002/ *December 30, 2002*	30 Desember 2032/ *December 30, 2032*	11,67%	11,67%
Blok/*Block* Pekawai	Indonesia	14 Mei 2018/*May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Yamdena Barat	Indonesia	14 Mei 2018/ *May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Sangkar	Indonesia	30 Mei 2023/ *May 30, 2023*	30 Mei 2053/ *May 30, 2053*	100%	0%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan persetujuan pengalihan hak kepemilikan Wilayah Kerja ("WK") Ketapang porsi Perusahaan dari 20% menjadi 19,4% melalui surat nomor T-669/MG.04/MEM.M/2022 tanggal 21 November 2022. Pada tanggal 26 Desember 2022, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas"), melalui surat nomor SRT-0053/SKKIE0000/2022/S9, mengesahkan pengalihan hak kepemilikan tersebut.

The Minister of Energy and Mineral Resources has approved the transfer of participating interest in Ketapang Working Area ("WK") portion of the Company from 20% to be 19.4% through letter No. T-669/MG.04/MEM.M/2022 dated November 21, 2022. On December 26, 2022, the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas"), through its letter No. SRT-0053/SKKIE0000/2022/S9, approved the transfer of this participating interest.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan)

PT Petrogas Jatim Sampang Energi selaku entitas penerima hak yang dialihkan, telah menandatangani *Side Letter* terhadap Perjanjian *Farmout* Wilayah Kerja Ketapang pada tanggal 6 Juni 2023.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan melalui entitas anak SET telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil ("PSC") atas pengelolaan minyak dan gas di Wilayah Kerja Sangkar, Jawa Timur. PSC tersebut telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 19 Juni 2023.

Informasi mengenai ventura bersama dan entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL (continued)*

d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)

PT Petrogas Jatim Sampang Energi as the interest receiving entity, has signed a Side Letter to the Farmout Agreement of Ketapang Working Area on June 6, 2023.

On May 30, 2023, the Company through SET has signed a Production Sharing Contract ("PSC") for oil and gas operations in Sangkar Block, East Java. The PSC was approved by the Minister of Energy and Mineral Resources on June 19, 2023.

Information about joint ventures and associates entities in which the Group has an interest as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

Ventura bersama dan entitas asosiasi/ *Joint ventures and associate entities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	Tahun komersial dimulai dan domisili/ *Year commercial operations started and domicile*	Kegiatan usaha/ *Business activities*
Ventura bersama/ *Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia ("Transgasindo")	59,87%	59,87%	2002, Jakarta	Transportasi gas bumi melalui jaringan pipa transmisi/*Transportation of natural gas through transmission pipelines*
PT Permata Karya Jasa ("Perkasa")	60,00%	60,00%	2015, Jakarta	Jasa perbengkelan, pembinaan, penyaluran jasa tenaga kerja/*Workshop services, guidance, distribution of labour services*
PT Nusantara Regas ("Regas")	40,00%	40,00%	2012, Jakarta	Pengelolaan fasilitas *Floating Storage Regasification Terminal* ("FSRT") termasuk Pembelian *Liquid Natural Gas* ("LNG") dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT/*Managing Floating Storage Regasification Terminal ("FSRT") facilities including purchase of LNG and marketing of output from the operations of FSRT facilities*
PT Perta-Samtan Gas ("PSG")	66,00%	66,00%	2008, Banyuasin	Pengolahan *Liquefied Petroleum Gas* ("LPG")/ *LPG processing*
PT Perta Daya Gas ("PDG")	65,00%	65,00%	2012, Jakarta	Pengolahan LNG dan *Compressed Natural Gas* ("CNG")/*LNG and CNG processing*
Jakarta Utilitas Propertindo ("JUP")	51,00%	51,00%	2015, Jakarta	Pemanfaatan Stasiun Pengisian Bahan Gas ("SPBG")/*Fuel Gas Filling Station utilization*
Entitas asosiasi/*Associate*				
PT Gas Energi Jambi ("GEJ")	40,00%	40,00%	[1] Jambi	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*
PT Baskara Asri Ghas	0,14%	0,14%	2012, Banten	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*

Keterangan:
1) Belum beroperasi komersial.

Remarks:
1) Not yet started commercial operations.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak, pengaturan bersama, dan entitas asosiasi (lanjutan)

Perusahaan mengakui keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham lain Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan JUP yang menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki hak yang setara dengan Perusahaan dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham lainnya, Perusahaan hanya memiliki pengaturan bersama atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting meskipun Perusahaan memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

e. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, joint arrangements, and associate entities (continued)

The Company considered the existence of substantive participating rights held by the other shareholders of Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG and JUP which provide such shareholders with the same rights as the Company over the significant financial and operating policies. Considering the other shareholders' rights, the Company only has joint control over the financial and operating policies even though the Company has more than 50% share ownership.

e. Boards of Commissioners, Directors and employees

As of December 31, 2023, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 14, 2023, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	*Chairman of the Board of Commissioners*
Komisaris Independen	Dini Shanti Purwono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Christian H. Siboro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Abdullah Aufa Fuad	*Independent Commissioner*
Komisaris	Luky Alfirman	*Commissioner*
Komisaris	Warih Sadono	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arief Setiawan Handoko	*Chairman of the Board of Directors*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Fadjar Harianto Widodo	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur *Sales* dan Operasi	Ratih Esti Prihatini	*Director of Sales and Operation*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Harry Budi Sidharta	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Beni Syarif Hidayat	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Rosa Permata Sari	*Director of Strategy and Business Development*

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Arcandra Tahar	*Chairman of the Board of Commissioners*
Komisaris Independen	Christian H. Siboro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dini Shanti Purwono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Paiman Raharjo	*Independent Commissioner*
Komisaris	Luky Alfirman	*Commissioner*
Komisaris	Warih Sadono	*Commissioner*

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Muhamad Haryo Yunianto	*Chairman of the Board of Directors*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Fadjar Harianto Widodo	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur *Sales* dan Operasi	Faris Aziz	*Director of Sales and Operation*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Achmad Muchtasyar	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Beni Syarif Hidayat	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Heru Setiawan	*Director of Strategy and Business Development*

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Dini Shanti Purwono	*Chairman*
Anggota	Abdullah Aufa Fuad	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi	*Member*
Anggota	Rini Yulius	*Member*
Anggota	Luki Karunia	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Paiman Raharjo	*Chairman*
Anggota	Dini Shanti Purwono	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi	*Member*
Anggota	Rini Yulius	*Member*
Anggota	Luki Karunia	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing adalah 3.316 orang dan 3.198 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners, Directors and employees (continued)

As of December 31, 2022, based on the Annual General Meeting of Shareholders on May 27, 2022, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

As of December 31, 2023, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

As of December 31, 2022, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Group had a total of 3,316 employees and 3,198 employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2e untuk informasi mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in United States dollar, unless otherwise specified. Refer to Note 2e for the information on the Group's functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan standar akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting standards

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that do not have significant impact to the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi (lanjutan)

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan *item* yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas *item-item* yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting standards (continued)

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting standards (continued)

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),* dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards (*"IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by Financial Accounting Standard Board of the Indonesian institute of Accountants ("DSAK IAI").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:
- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:
- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik (lanjutan)

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback (continued)

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed.The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 (lanjutan)

PSAK 74: Kontrak Asuransi (lanjutan)

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2025 (continued)

PSAK 74: Insurance Contracts (continued)

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

d. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan, dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (lanjutan)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquirer is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with PSAK 71: Financial Instruments, in profit or loss and other comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas dalam Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquirer and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquire over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss and other comprehensive income.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with PSAK 38 "Business Combination of Entities Under Common Control". The difference between the transfer price paid and the carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between companies within the Group are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, the amounts reported by subsidiaries are adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang memiliki mata uang fungsional selain Dolar AS sebagai mata uang fungsional, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup Jisdor pada akhir periode pelaporan. Disisi lain, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan rata-rata kurs penutup Jisdor ketika periode laba-rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam Dolar AS disajikan dalam akun "Penghasilan komprehensif lain - Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak" sebagai bagian dari komponen ekuitas lainnya pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

For purposes of consolidating subsidiaries using currency other than US Dollar as fuctional currency, assets and liabilities are translated using the Jisdor closing rate at the end of the reporting period. On the other hand, revenue and expenses are translated using the average Jisdor closing rate during the profit and loss period.

The difference arising from the translation of subsidiaries' financial statements into US Dollar is presented as "Other comprehensive income - Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements" account as part of other components of equity in the equity section of the consolidated statements of financial position.

ii. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss and other comprehensive income. The initial carrying amount is the fair value for the remeasurement purposes of the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This means amounts previously recognised in other comprehensive income might be reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian laba dari ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss and other comprehensive income. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of profit from joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only for the portion of other investors' interests in the associates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

v. Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki operasi bersama dan ventura bersama.

(1) Operasi bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama dalam sebuah pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama bagian kepemilikan dalam operasi bersama, Grup mengakui:

1) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
2) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
3) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
4) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
5) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates (continued)

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

v. Joint arrangements

Under PSAK 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group has joint operations and joint ventures.

(1) Joint operations

A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties own joint control of the arrangement that have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.

The Group has interests in several joint operations whereby the Group is included as a party which has joint control of a joint operation (joint operator), or as a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation.

In relation to its interests in joint operations, the Group recognises its:

1) Assets, including its share of any assets held jointly;
2) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
3) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
4) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
5) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

v. Pengaturan bersama (lanjutan)

(1) Operasi bersama (lanjutan)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

(2) Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

v. Joint arrangements (continued)

(1) Joint operations (continued)

When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognise gains and losses resulting from such transaction only for the portion of the other parties' interests in the joint operation.

(2) Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing

Masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam pelaksanaan.

Nilai tukar yang digunakan adalah kurs penutup Jisdor untuk Rupiah dan kurs penutup Bank Indonesia ("BI") untuk SGD dan JPY sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign currency translation

Each entity within the Group considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company determined that its functional currency is the United States dollar ("USD" or "US dollar") and decided that the presentation currency for these consolidated financial statements is the US dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss, except for foreign exchange differentials that can be attributed to qualifying assets which are capitalised to construction in progress.

The rates of exchange used Jisdor closing rate for Rupiah and Bank Indonesia ("BI") closing rate for SGD and JPY as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
1 dolar AS/JPY (nilai penuh)	140,93	133,80	*1 US dollar/JPY (full amount)*
1 dolar AS/Rupiah (nilai penuh)	15.439	15.731	*1 US dollar/Rupiah (full amount)*
1 dolar AS/SGD (nilai penuh)	1,32	1,35	*1 US dollar/SGD (full amount)*

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss ("FVTPL").*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL adalah investasi pada instrumen utang yang dicatat pada akun "Aset Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain".

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, restricted cash, account receivables, and other receivables.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognised in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognised in other comprehensif income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's financial asset at FVOCI is investments in debt securities recorded under "Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income" account.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognised as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk investasi ekuitas yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas diakui sebagai pengurang nilai investasi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued)

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognised in the statement of profit or loss.

This category includes equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on equity investments are recognized as deduction of investment value when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 360 hari dari tanggal jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial asets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 360 days past due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Fitch, S & P, dan Moody's, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Fitch, S & P, dan Moody's baik untuk menentukan apakah risiko kredit dalam instrumen utang telah meningkat secara signifikan dan juga untuk mengestimasi KKE.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 360 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial asets (continued)

Impairment (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Fitch, S & P, dan Moody's and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Fitch, S & P, dan Moody's both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 360 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued liabilities, bank loans, bonds payable, and lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost

i) Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas kecil, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi jangka pendek lainnya dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas" melainkan disajikan pada akun "Dana dibatasi penggunaannya".

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual atau diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup. Sesuai peraturan OJK, piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lain-lain dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

Restricted cash in banks and time deposits used for collateral are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents" instead presented in "Restricted Cash" account.

h. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods and services sold or provided in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group. In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances on other receivables from related parties to be presented as current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost, less any provision for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi". Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui pada "Pendapatan lain-lain" pada laba rugi.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya bahan baku dan perlengkapan, termasuk suku cadang, pemeliharaan dan alat pengeboran yang digunakan untuk operasi dinilai dengan biaya rata-rata tertimbang. Minyak mentah dan gas bumi yang diproduksi dan tidak dijual tidak dicatat sebagai persediaan karena hak atas minyak tidak berpindah ke Kontraktor sampai minyak diangkat atau dimuat ke kapal atau gas ditransfer ke dalam pipa. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Trade and other receivables (continued)

Collectibility of trade and other receivables are reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses". When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised on "Other income" in profit or loss.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. The cost of materials and supplies, which include spare parts, consumables, maintenance and drilling tools used for ongoing operations is valued at the weighted average. Crude oil and natural gas produced and not sold is not recorded as inventory because the title does not pass to the Contractor until the oil is lifted or off-loaded into the crude tankers or the gas is transferred into pipelines. Allowance for inventory obsolescence is provided based on periodic review of the condition of the inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Lihat Catatan 2l terkait kebijakan kapitalisasi dan depresiasi atas properti minyak dan gas hulu.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Umur manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan dan prasarana	20	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	16 - 30	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*Vehicles*
Peralatan kantor	4 - 8	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	4 - 8	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	16	*Uninstalled assets*

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16, Aset Tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Furthermore, when a significant inspection is carried out, the cost of the inspection is recognised in the carrying amount of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are met. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss when incurred.

See Note 2l regarding capitalisation and depreciation policies for upstream oil and gas properties.

Fixed assets except land, are depreciated using the straight-line method.

The useful lives of the assets are as follows:

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent the underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 16, Fixed Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode/tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perusahaan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset kerjasama operasi dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is presented under "Fixed Assets" and is stated at cost. The accumulated cost of the asset constructed is transferred to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

Joint operation assets are the Company's land used to carry out the joint operation activities. Office buildings obtained as compensation in the joint operation and the respective unearned income are recognised when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Unearned income is recognised over the period of the joint operation.

Joint operation assets are stated at the estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognised as a loss in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya telah selesai secara substansial.

Aset tetap dinilai penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada Catatan 2m.

k. Aset eksplorasi dan evaluasi

Grup menerapkan PSAK 64 "Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral", yang menetapkan bahwa beban eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur eksplorasi termasuk biaya pengeboran sumur tes stratigrafi tahap eksplorasi dan biaya lainnya yang terkait untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi dikapitalisasi dan disajikan terpisah sebagai akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognised as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalisation of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalisation of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets for their intended use are substantially completed.

Fixed assets are assessed for impairment in line with the policy set out in Note 2m.

k. Exploration and evaluation assets

The Group adopted PSAK 64 "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", which allows exploration and evaluation expenditures, including geological and geophysical costs, costs of drilling exploratory wells, including in the stratigraphic test well drilling costs of exploration stage and other costs related to evaluating the technical feasibility and commerciality of extraction of oil and gas, to be capitalised and presented separately as "Exploration and Evaluation Assets" in the consolidated statements of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu *area of interest* dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya, dengan basis *area of interest*, apabila izin untuk melakukan eksplorasi di *area of interest* tersebut masih berlaku dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

- Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut; atau

- Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* atau melalui penjualan *area of interest.*

Aset eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan terdiri dari biaya-biaya yang terjadi setelah izin eksplorasi diperoleh dan sebelum dimulainya pengembangan *area of interest* antara lain mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, dan geologi dan geofisika.

Aset eksplorasi dan evaluasi dinilai untuk penurunannya pada saat terdapat bukti dan keadaan yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke properti minyak dan gas pada saat kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi tersebut dapat dibuktikan.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka Grup akan mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Exploration and evaluation assets (continued)

Costs of exploration and evaluation in an area of interest are charged to profit or loss as incurred, unless these costs can be deferred, on an area of interest basis, if the permit to carry out exploration activities in the area of interest is current and meets one of the following conditions:

- *Exploration and evaluation activities as of the date of the consolidated financial statements have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of whether economically recoverable reserves exist, and active and significant activities in the related area of interest are still ongoing; or*

- *These costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale.*

Exploration and evaluation assets include costs incurred after obtaining the exploration license and prior to commencement of development of the area of interest and includes accumulated costs associated with general investigation, administration and licensing, and geological and geophysical expenditure.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when evidence and circumstances indicate that the carrying amount of the asset may exceed its recoverable amount. Exploration and evaluation assets are reclassified to oil and gas properties at the time the technical feasibility and commerciality of the extraction of the oil and gas can be proved.

The recoverability of exploration and evaluation assets depends on the successful development and commercial exploitation in such an area (area of interest). Exploration and evaluation assets are tested for impairment if certain facts and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable value. In such conditions, the Group will measure, present and disclose the impairment loss as required under PSAK 48, Impairment of Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

I. Properti minyak dan gas

1. Aset pengembangan

Biaya-biaya pengeboran sumur dalam pengembangan termasuk biaya pengeboran sumur pengembangan yang tidak menghasilkan dan sumur pengembangan stratigrafi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian sumur pengembangan hingga proses pengeboran selesai. Pada saat pengembangan sumur telah selesai pada lapangan tertentu, maka sumur tersebut akan ditransfer sebagai sumur produksi.

2. Aset produksi

Aset produksi merupakan agregasi aset eksplorasi dan evaluasi dan pengeluaran pengembangan (termasuk pembayaran untuk memperoleh *participating interests*) yang berhubungan dengan sumur berproduksi.

Di tahun 2022, Grup mengubah estimasi metode perhitungan beban deplesi aset minyak dan gas bumi dari semula unit produksi berdasarkan "cadangan terbukti (proved) dan probable" menjadi unit produksi berdasarkan "cadangan terbukti (proved)" untuk menyesuaikan dengan standarisasi estimasi metode perhitungan unit produksi beban deplesi aset minyak dan gas bumi di Grup Pertamina. Perubahan estimasi perhitungan metode beban deplesi ini berlaku efektif tahun 2022 secara prospektif.

Dampak dari perubahan tersebut di tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah penambahan beban deplesi USD55.036.298 pada blok berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Oil and gas properties

1. Development assets

The costs of drilling development wells, including the costs of drilling unsuccessful development wells and development-type stratigraphic wells, are capitalised as part of development well assets under construction until drilling is completed. When the development well is completed on a specific field, it is transferred to production wells.

2. Production assets

Production assets are aggregated into exploration and evaluation assets, development expenditures associated with the producing wells and production facilities (including payments to acquire participating interests) associated with the producing wells.

In 2022, the Group changed the estimation method for calculating oil and gas asset depletion expense from originally unit of production based on "proved and probable reserves" to unit of production based on "proved reserves" to conform with the standardized estimation method for calculating unit of production for depletion expense of oil and gas assets in the Pertamina Group. The change in the estimated calculation of the depletion expense method is effective in 2022 prospectively.

The effect of this change in the year ended December 31, 2022 was an additional depletion expense of USD55,036,298 for the following blocks:

Blok / *Blocks*	Beban deplesi berdasarkan cadangan terbukti *(proved)* dan *probable*/ *Depletion expense based on proved and probable reserves*	Beban deplesi berdasarkan cadangan terbukti *(proved)*/ *Depletion expense based on proved reserves*	Perubahan/*Change*
- Ketapang, Jawa Timur	19.146.398	26.568.146	7.421.748
- Bangkanai, Kalimantan	5.865.876	6.326.864	460.988
- Pangkah, Jawa Timur	169.015.548	209.089.918	40.074.370
- Fasken, Amerika Serikat	13.595.197	6.253.653	(7.341.544)
- Muriah, Jawa Tengah	3.416.503	5.809.830	2.393.327
- Muara Bakau, Kalimantan	62.908.332	74.935.741	12.027.409
Total	**273.947.854**	**328.984.152**	**55.036.298**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

l. Properti minyak dan gas (lanjutan)

2. Aset produksi (lanjutan)

Properti minyak dan gas dinilai penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada Catatan 2m.

m. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas – misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap untuk digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Oil and gas properties (continued)

2. Production assets (continued)

Oil and gas properties are assessed for impairment in line with the policy set out in Note 2m.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life – for example, goodwill or intangible assets not ready for use – are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses on assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

o. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas pembelian gas yang telah diperoleh dari pemasok. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar atas barang dan jasa selain pembelian gas yang dilakukan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha dan utang lain-lain tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for gas purchased from suppliers. Other payables are obligations for goods or services other than gas purchases that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade and other payables are classified as short-term liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as long-term liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Borrowings (continued)

Fees paid to obtain loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

q. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
  1. *The Group has the right to operate the asset; or*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:
- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

r. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:
- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

r. Employee benefits

i. Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

ii. Pension benefits and other post-employment benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos pendapatan komprehensif lain pada tahun terjadinya.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statements of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms to the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan, penghargaan pengabdian dan masa persiapan pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, namun pengukuran kembali atas kewajiban imbalan kerja diakui langsung sebagai beban atau pendapatan pada laba rugi.

iii. Program imbalan iuran pasti

Grup mempunyai program asuransi pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Pembayaran premi awal sekaligus dan premi periodik ditentukan berdasarkan perhitungan secara periodik yang disetujui oleh Grup dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selisih antara premi pertanggungan dengan kontribusi karyawan ditanggung oleh Grup.

Grup juga menyediakan tambahan tunjangan kesehatan bagi para pensiunan karyawan berdasarkan perhitungan tertentu yang disetujui oleh Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebagai pengelola dana.

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam *Production Sharing Contract* ("PSC") atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Estimasi awal biaya pembongkaran aset dan restorasi area properti minyak dan gas bumi diakui sebagai komponen biaya perolehan, yang disusutkan atau dideplesikan dengan menggunakan metode satuan unit produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The Group also provides other post-employment benefits, such as long service reward, jubilee rewards and pension preparation program. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan; however, remeasurement of the employee benefit obligation is directly recognized as expense or income in profit or loss.

iii. Defined contribution benefit program

The Group has a retirement insurance plan covering all of its qualified permanent employees. One-time initial retirement premium and periodic premium payments are based on periodic calculations agreed between the Group and the Financial Institution Pension Fund. The difference between the premium and employee contributions is covered by the Group.

The Group provides additional post-retirement health care benefits to its retired employees based on certain computations agreed between the Company and Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara as the fund manager.

s. Asset abandonment and site restoration obligation

The Group recognises its obligations for future dismantlement of assets and site restoration of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets in accordance with the provisions in the Production Sharing Contract ("PSC") or in line with applicable regulations.

The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognised as part of the acquisition costs of the assets and are subsequently depreciated or depleted using the unit-of-production method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (lanjutan)

Pada umumnya, aktivitas pembongkaran aset dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait terjadi pada beberapa tahun di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan restorasi area di masa yang akan datang adalah berupa estimasi terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan. Perkiraan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area di masa yang akan datang tersebut melibatkan estimasi manajemen mengenai saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas tersebut harus dilakukan, dan juga teknologi yang akan digunakan di masa depan.

Estimasi tersebut diperiksa setiap periode/tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian dicerminkan dalam nilai kini atas provisi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan dilakukan penyesuaian dengan jumlah yang sama atas nilai buku aset yang bersangkutan.

Pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi diakui sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dikelompokkan ke dalam arus kas terkait aktivitas operasi.

t. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Asset abandonment and site restoration obligation (continued)

In most instances, the dismantlement of assets and site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets will occur many years in the future. The provision for future dismantlement of assets and site restoration obligations is the best estimate of the present value of the future expenditures required to undertake the dismantlement of assets and site restoration at the reporting date, based on current legal requirements. The estimate of the obligation for future dismantlement of assets and site restoration, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of those activities, the extent of those activities required and future technologies.

Such estimates are reviewed on a periodic/annual basis and adjusted each period/year as required. Adjustments are reflected in the present value of the provision for the obligation for dismantlement of assets and site restoration with a corresponding change in the book value of the associated assets.

The unwinding of the effect of discounting the provision is recognised as a finance cost in profit or loss.

Placement of restricted cash for the funding of asset abandonment and site restoration obligations are classified as cash flows related to operating activities.

t. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Modal saham (lanjutan)

Ketika entitas anak Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

u. Pendapatan dan beban

Pendapatan Grup berasal dari kegiatan niaga gas bumi, jasa transmisi minyak dan gas bumi, penjualan minyak mentah, gas bumi, LPG, LNG, dan jasa lainnya.

Pendapatan dari niaga gas bumi dan jasa transmisi minyak dan gas bumi diakui pada saat gas atau minyak bumi telah didistribusikan kepada pelanggan berdasarkan pencatatan pada angka meteran. Kontrak Grup dapat dinegosiasikan dari waktu ke waktu dan harga diskon khusus dapat diberikan kepada pelanggan setelah Perjanjian Jual Beli Gas terkait yang mengatur harga diskon disepakati antara Grup dan pelanggan. Bergantung pada sifat perubahannya, Grup akan melakukan modifikasi kontrak yang ada berdasarkan komitmen volume yang disetujui sebelum dan sesudah modifikasi kontrak dan perubahan harga yang timbul dari modifikasi tersebut.

Pendapatan sehubungan dengan pengoperasian aset dan jaringan pipa transmisi diakui setelah jasa diberikan, dan diukur sebesar satuan gas yang telah diangkut selama suatu periode.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Share capital (continued)

Where the Company or any subsidiaries within the Group purchase the Company's equity share capital (treasury stock), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes), is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

u. Revenue and expense

Revenues of the Group are earned from gas trading, crude oil and natural gas transmission services, sale of crude oil, natural gas, LPG, LNG, and other services.

Revenues from gas trading and oil and natural gas transmission services are recognized when natural gas or crude oil is distributed to the customer based on the meter readings. The Group's contracts may be negotiated from time to time and special discounted prices may be given to customers after the respective Gas Sales and Purchase Agreement which governs the discounted prices is agreed between the Group and the customers. Subject to the nature of these changes, the Group accounts for modification of the existing contract based on agreed volume commitments before and after the contract modification and the price changes arising from the modification.

Revenue arising from the operation of the asset and pipeline transmission is recognised after the service is rendered and is measured based on the units of gas which have been transported during such period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari produksi minyak mentah, gas bumi, LPG dan LNG (bersama-sama disebut sebagai hidrokarbon) diakui berdasarkan volume aktual yang dijual kepada pelanggan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada pendapatan untuk setiap perbedaan antara volume yang dijual ke pelanggan dan volume yang tidak terjual yang berhak dijual oleh Grup berdasarkan hak kepemilikannya. Pendapatan sehubungan dengan volume tersebut hanya diakui jika ada transfer output ke pelanggan Grup. Namun, jika *lifting* tidak sesuai dengan hak kepemilikan, penyesuaian dilakukan pada beban pokok pendapatan yang mencerminkan jumlah terutang/tagihan dari *partner* yang merupakan pergerakan *overlifting/underlifting*.

Perbedaan *lifting* aktual hidrokarbon menghasilkan piutang ketika *entitlements* final melebihi *lifting* (posisi *underlifting*) dan menghasilkan hutang ketika *lifting* hidrokarbon melebihi *entitlements* final (posisi *overlifting*). Volume *underlifting* dan *overlifting* dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang tahunan Minyak Mentah Indonesia (untuk minyak mentah) dan harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas yang bersangkutan (untuk gas bumi, LPG dan LNG).

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

Revenues from the production of crude oil, natural gas, LPG and LNG (together referred to as hydrocarbons) are recognised based on the actual volumes sold to customers. No adjustments are made to revenue for any differences between volumes sold to customers and unsold volumes which the Group is entitled to sell based on its participating interest. Revenue in respect of such volumes is only recognised when there is a transfer of output to the Group's customers. However, where liftings do not match participating interest, an adjustment is made to cost of revenue representing the amount due to/from partners representing overlifting/underlifting movements.

Differences between the actual liftings of hydrocarbons result in a receivable when final entitlements exceed the liftings (underlifting position) and in a payable when liftings exceed final entitlements (overlifting position). Underlifting and overlifting volumes are valued based on the annual weighted average Indonesia Crude Price (for crude oil) and the prices as determined in the respective Sale and Purchase Contracts (for natural gas, LPG and LNG).

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut (lanjutan):

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri *relative* diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

a. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

v. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment (continued):

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:

a. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

v. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. The management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If necessary, management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated statements of financial position. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini" dalam laba rugi. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini".

w. Laba per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

x. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan di periode dimana pembagian dividen diumumkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expense - Current" in profit or loss. The Group also presents interest/penalties, if any, as part of "Income tax expense - Current".

w. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is the same as basic earnings per share.

x. Dividends

Dividends distributed to the Group's shareholders are recognized as a liability in the Group's statement of financial position in the period in which the dividends are declared.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

y. Segmen operasi

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

z. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7.

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Operating segments

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);
b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
c. For which discrete financial information is available.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The directors are the Group's chief operating decision-maker. The segments are based on the nature of business. All transactions between segments have been eliminated.

z. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7.

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Provisi kontrak memberatkan

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Jika Grup terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Provision for onerous contract

An onerous contract is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it. If the Group has a contract that is onerous, the present obligation under the contract shall be recognised and measured as a provision.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Grup memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Grup menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Grup untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Grup menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Grup mempertimbangkan berikut ini:

(1) Apakah pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah; dan
(2) Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
   - Bentuk hukum dari entitas terpisah;
   - Persyaratan pengaturan kontraktual; atau
   - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

b. Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

c. Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control over an arrangement, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent.

The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operational and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, the Group considers the following:

(1) Whether the joint arrangement is structured through a separate entity; and
(2) When the arrangement is structured through a separate entity, the Group also considers the rights and obligations arising from:
   - *The legal form of the separate entity;*
   - *The terms of the contractual arrangement; or*
   - *Other relevant facts and circumstances.*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion about both joint control, and whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting treatment.

b. Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

c. Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition financial liabilities based on PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

Sehubungan dengan perjanjian antara PLI dengan PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") untuk penggunaan fasilitas *Floating Storage and Regasification Unit* ("FSRU") Lampung (Catatan 35d), manajemen mengevaluasi bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa dan PLI sebagai *lessee* telah mengakuinya sebagai aset sewa guna usaha sesuai dengan PSAK 73, Sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of a leased asset based on PSAK 73: Leases, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the twelve month period ended December 31, 2023, there is no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

In relation to the agreement between PLI and PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") for the use of the Lampung Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") facility (Note 35d), management has evaluated that such agreement contains a lease and PLI as the lessee has classified it as a right-of-use asset in line with PSAK 73, Leases.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun taksiran tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya di Kantor Pajak, dalam proses banding di Pengadilan Pajak maupun proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk pajak yang belum diakui harus diakui.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 21f, Grup melakukan estimasi ketidakpastian eksposur perpajakan yang material atas sengketa pajak pengalihan *participating interest* tidak langsung di blok Pangkah terkait PPh Pasal 26 (4), 4 (2) dan sengketa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Perusahaan. Manajemen Grup dibantu oleh ahli pihak ketiga dalam menyiapkan analisa pajak yang komprehensif untuk mempertahankan posisi pajak Grup. Jangka waktu penyelesaian atas sengketa pajak ini tidak dapat diestimasi saat ini karena tergantung proses penyelesaian di Mahkamah Agung.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

e. Uncertain tax exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assesses whether the amounts recorded as claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, management also assesses the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection with the Tax Office, appeal process in the Tax Court and under judicial review by the Supreme Court.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all income tax positions to determine if a tax liability for unrecognised tax should be recognised.

As disclosed in Note 21f, the Group has made material estimations in relation to uncertain tax exposures related to tax disputes on the indirect transfer of a participating interest in Pangkah block related to withholding tax article 26 (4), 4 (2) and the Company's Value Added Tax ("VAT") tax dispute. The Group's management is assisted by third party experts in preparing a comprehensive tax analysis to defend the Group's tax position. The settlement period of these tax disputes can not currently be estimated as it depends on the settlement process at the Supreme Court.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Estimasi atas suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") dari suatu sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

b. Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

a. Estimating the incremental borrowing rate ("IBR") of a lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

b. Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets to be within four to 40 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore future depreciation charges could be revised.

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan tersebut belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan.

Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah dilakukan kapitalisasi atas biaya berdasarkan kebijakan ini, suatu pertimbangan dibuat bahwa pemulihan biaya dianggap tidak dimungkinkan, biaya yang telah dikapitalisasi tersebut akan dibebankan ke dalam laba rugi.

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu yang serupa dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi yang dijelaskan di atas.

d. Imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

c. Exploration and evaluation assets

The Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure results in certain items of expenditure being capitalised for an area of interest where it is considered likely to be recoverable through future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of the existence of reserves.

This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalised the expenditure under the policy, a judgement is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalised amount will be written off to profit or loss.

Development activities commence after a project is sanctioned by the appropriate level of management. Judgement is applied by management in determining when a project is economically viable. In exercising this judgement, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for the capitalisation of exploration and evaluation expenditure.

d. Employee benefits

The present value of the pension and other long-term benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Those assumptions include discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of employee service. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension and other long-term benefit obligations.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This interest rate should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension and other long-term benefit obligations.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya yang bersangkutan.

Untuk kenaikan gaji masa depan, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa depan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

e. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas, fasilitas dan infrastruktur. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto, biaya yang diharapkan untuk membongkar semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area, dan waktu pelaksanaan pembongkaran aset serta restorasi area.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Employee benefits (continued)

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension and other long-term benefit obligations.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it with future business plans.

Other key assumptions for pension obligation and other long-term benefits are based on current market conditions.

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

e. Asset abandonment and site restoration obligations

The Group recognises a provision for asset abandonment and site restoration obligations associated with its oil and gas wells, facilities and infrastructure. In determining the amount of the provision, the required assumptions and estimates consist of discount rate, the expected cost to dismantle all the structures from the site and restore the site and timing of assets dismantlement and restoration of the area.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Ketersediaan laba kena pajak di masa depan untuk merealisasi aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

g. Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu

Provisi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan *unutilised gas volume*, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah.

h. Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

f. Availability of future taxable profits to realise deferred tax assets

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, provisions and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the sufficiency of the future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depends on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales of goods and services, prices, operating costs, capital expenditure and other future transactions.

g. Provision for adjustment to the purchase price of certain natural gas

This provision will be recorded periodically based on the estimation in accordance with the addition of unutilized gas volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by the Ministry of Energy and Mineral Resources ("EMR") for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. The Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government.

h. Impairment of financial assets

The implementation of PSAK 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to the provision for loss on impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables.

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang. Untuk seluruh piutang lain-lain Grup menerapkan cadangan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasikan. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

i. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat terpulihkan dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

h. Impairment of financial assets (continued)

The Group determines lifetime and point of initial recognition of receivables. For all other receivables the Group applies the 12 months expected loss provision. To measure the expected credit losses, other receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognises a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

i. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated each reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indications exist, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss will be recognised to the extent of the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit of a group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Aset yang memiliki masa manfaat yang terbatas, seperti *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap untuk digunakan, tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai.

Properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap, ditelaah untuk penurunan nilai ketika kejadian dan perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai terpulihkan aset akan diestimasi.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai untuk properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, tingkat diskonto menggunakan *weighted average cost of capital* ("WACC"), harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya *tolling*, cadangan atas properti minyak dan gas (lihat "Estimasi Cadangan Minyak dan Gas Bumi" di bawah), umur manfaat pipa, biaya operasi, biaya pembongkaran dan restorasi serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai terpulihkan aset. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

Lihat Catatan 13b untuk penurunan nilai aset tetap dan Catatan 15c untuk penurunan nilai properti minyak dan gas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

i. Impairment of non-financial assets (continued)

Assets that have indefinite useful lives for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation and are tested annually for impairment.

Proven oil and gas properties and fixed assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated.

The determination of fair value and value in use for proven oil and gas properties and fixed assets requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, discount rate using weighted average cost of capital ("WACC"), commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), tolling fees, reserves for oil and gas properties (see "Oil and Gas Reserve Estimates" below), pipelines' useful lives, operating costs, decommissioning and site restoration cost and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

See Note 13b for impairment of fixed assets and Note 15c for impairment of oil and gas properties.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Nilai tercatat untuk deplesi, penyusutan dan untuk amortisasi beserta pemulihan nilai tercatat properti minyak dan gas, yang digunakan untuk memproduksi minyak dan gas tergantung pada estimasi cadangan minyak dan gas. Faktor utama yang mempengaruhi estimasi tersebut adalah penilaian teknis atas kuantitas produksi cadangan minyak dan gas yang ada dan kendala ekonomis, seperti ketersediaan pasar komersial atas produksi minyak dan gas bumi maupun asumsi yang terkait dengan antisipasi harga komoditas dan biaya pengembangan dan produksi cadangan tersebut.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu dan data geologi bertambah selama masa operasi, oleh karena itu perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Penyisihan untuk aktivitas purna-operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan-kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup menggunakan ahli pihak ketiga dalam memperkirakan cadangan minyak dan gas untuk semua blok.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

j. Oil and gas reserve estimates

The amounts recorded for depletion, depreciation and amortisation, as well as the recovery of the carrying value of oil and gas properties involving production of oil and gas reserves depend on the estimated reserves of oil and gas. The primary factors affecting these estimates are technical engineering assessments of producible quantities of oil and gas reserves in place and economic constraints, such as the availability of commercial markets for oil and gas production, as well as assumptions related to anticipated commodity prices and the costs of development and production of the reserves.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and additional geological data are generated during the course of operations, therefore estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial performance and financial position in a number of ways, including the following:

- *Asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows.*
- *Depreciation and amortisation charged in the profit or loss and other comprehensive income may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change.*
- *Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.*
- *The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

As of December 31, 2023, the Group engaged a third-party expert to estimate the oil and gas reserves for all blocks.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

l. Kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

k. Financial instrument

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

l. Expected credit loss

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 12 bulan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit.

m. Kontrak memberatkan

Estimasi kewajiban kini dari kontrak yang memberatkan yang diperkirakan akan ditanggung Grup dibuat dengan membandingkan nilai terendah antara total biaya pemenuhan kontrak dan biaya untuk membatalkan kontrak tersebut.

Dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak, pembayaran yang jatuh tempo pada periode dimana kontrak tidak dapat dibatalkan harus turut dipertimbangkan. Jika terdapat pilihan untuk membatalkan kontrak dan membayar denda, maka nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar pada saat pembatalan kontrak juga harus dipertimbangkan, dan kontrak diukur pada biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak. Biaya-biaya yang harus diperhitungkan dalam hal ini harus merupakan biaya yang tidak dihindarkan yang bisa dikaitkan langsung dengan kewajiban Perusahaan. Biaya yang tidak dihindarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan biaya-biaya langsung variabel dalam kontrak dan karena itu merupakan incremental terkait dengan kontrak.
- Tidak termasuk biaya alokasi atau biaya pembagian.
- Tidak bisa dihindari oleh rencana masa depan Perusahaan.

Biaya yang akan terjadi terlepas apakah kontrak akan dipenuhi atau tidak, bukan merupakan biaya inkremental. Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental adalah biaya yang sifatnya tetap dan tidak dapat dibatalkan seperti biaya depresiasi atas aset tetap, biaya sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan, dan lain-lain.

Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental tersebut tidak perlu dimasukkan dalam analisis kontrak memberatkan karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya untuk menjalankan bisnis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

l. Expected credit loss (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 12-month past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group.

m. Onerous contract

An estimate of the present obligation of a onerous contract that is expected to be borne by the Group is made by comparing the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it.

In determining the cost of fulfilling a contract, payments that are due in the period in which the contract cannot be canceled must also be considered. If there is an option to cancel the contract and to pay a penalty, then the present value of the amount to be paid at the time of the contract cancelled must also be considered, and the contract is measured at the lower net cost to be unbound from the contract. Costs that must be considered in this case is an unavoidable costs that can be directly related to the Company's obligation. The unavoidable costs criteria are as follow:

- *Direct costs of the contract and therefore incremental cost in relation to the contract.*
- *Does not represent allocation or distribution costs.*
- *Unavoidable cost by the Company's future plans.*

Costs that will be occured regardless the contract is fulfilled or not do not represent incremental costs. Non-incremental costs are fixed and irrevocable costs, such as depreciation expense on fixed assets, noncancelable operating lease costs, and others.

Non-incremental costs are excluded in the onerous contract analysis since they are costs to run the business.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH*

a. Kas dan setara kas / *a. Cash and cash equivalents*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kas	**74.343**	**76.119**	***Cash on hand***
Kas pada bank			*Cash in bank*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	114.611.135	175.472.567	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	14.678.572	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	12.232.557	51.201.656	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	9.442.533	5.843.130	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	29.116	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")*
Subtotal	150.993.913	232.517.353	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Citibank N.A.	2.558.465	2.835.863	*Citibank N.A.*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore("SMBC")	300.616	3.710.718	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore("SMBC")*
JP Morgan Chase, Texas	182.501	317.815	*JP Morgan Chase, Texas*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	61.928	774.456	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Bank ANZ Indonesia	29.773	29.844	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-	191.382	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia")	-	21	*PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia")*
Subtotal	3.133.283	7.860.099	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	124.423.140	138.855.736	*Bank Mandiri*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	100.505.532	43.770.399	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")*
BNI	46.650.517	89.329.878	*BNI*
BRI	28.787.113	70.121.887	*BRI*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	1.539.875	2.701.348	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	303.516	292.016	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
Bank Jateng	15.311	15.021	*Bank Jateng*
Subtotal	302.225.004	345.086.285	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)*

a. Kas dan setara kas (lanjutan) / *a. Cash and cash equivalents (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kas pada bank (lanjutan)			*Cash in bank (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	256.774	89.248	*PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*
PT Bank Central Asia Tbk.	41.640	11.381	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank DBS Indonesia	29.846	1.228	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	24.757	493.999	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank UOB Indonesia	13.135	12.817	PT *Bank UOB Indonesia*
Subtotal	366.152	608.673	*Subtotal*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
Pihak ketiga			***Third party***
Citibank N.A., Jakarta	329.641	28.113	*Citibank N.A., Jakarta*
Yen Jepang			*Japanese Yen*
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	880	1.207	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
PT Bank ANZ Indonesia	-	128	*PT Bank ANZ Indonesia*
Subtotal	330.521	29.448	*Subtotal*
Jumlah kas pada bank	**457.048.873**	**586.101.858**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka dan setara kas lainnya			*Time deposits and other cash equivalents*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	189.175.642	458.955.000	*BRI*
BNI	96.350.000	81.487.159	*BNI*
Bank Mandiri	54.500.000	6.000.000	*Bank Mandiri*
Subtotal	340.025.642	546.442.159	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	3.400.000	-	*SMBC*
Subtotal	3.400.000	-	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	145.936.079	140.241.145	*BRI*
BTN	140.405.305	72.306.405	*BTN*
Bank Syariah Indonesia	100.755.990	3.206.773	*Bank Syariah Indonesia*
BNI	43.778.128	50.648.892	*BNI*
BTN Syariah	6.635.906	18.074.367	*BTN Syariah*
Bank Mandiri	1.489.734	25.149.755	*Bank Mandiri*
Subtotal	439.001.142	309.627.337	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)*

a. Kas dan setara kas (lanjutan) / *a. Cash and cash equivalents (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Deposito berjangka dan setara kas lainnya (lanjutan)			*Time deposits and other cash equivalents (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	4.533.972	4.767.656	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*
PT Bank KB Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin")	647.710	635.688	*PT Bank KB Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin")*
Subtotal	5.181.682	5.403.344	Subtotal
Total deposito berjangka dan setara kas lainnya	**787.608.466**	**861.472.840**	***Total time deposits and other cash equivalents***
Jumlah kas dan setara kas	**1.244.731.682**	**1.447.650.817**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat bunga deposito berjangka dan setara kas lainnya adalah sebagai berikut: / *The interest rates of time deposits and other cash equivalents are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rekening Rupiah	2,15% - 7,70%	2,05% - 6,05%	*Rupiah Accounts*
Rekening Dolar AS	1,50% - 7,15%	0,45% - 4,00%	*US Dollar Accounts*

Nisbah bagi hasil deposito berjangka syariah untuk Grup adalah 69,5% - 79,94% (2022 : 44,14% - 57%). / *The Group's portion of profit sharing from shariah time deposit is 69.5% - 79.94% (2022 : 44.14% - 57%).*

b. Kas yang dibatasi penggunaannya / *b. Restricted cash*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
Rekening bersama dengan SKK Migas dan jaminan atas bank garansi			***Joint accounts with SKK Migas and collateral on bank guarantee***
Bank Mandiri	117.891.403	103.528.781	*Bank Mandiri*
BNI	23.000.026	11.493.053	*BNI*
Rupiah			*Rupiah*
Jaminan Pelaksanaan Proyek			***Project perfotmance Bond***
Bank Mandiri	2.026.600		*Bank Mandiri*
BNI	254.987	213.499	*BNI*
Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya	**143.173.016**	**115.235.333**	***Total restricted cash***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(128.772.206)	(115.021.834)	*Non-current portion*
Kas yang dibatasi penggunaannya, bagian lancar	**14.400.810**	**213.499**	***Restricted cash, current portion***

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

b. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Grup diharuskan menempatkan bank garansi terkait *firm commitments* pada PSC Pangkah, PSC Pekawai, PSC Yamdena Barat, dan PSC Sangkar. Di bulan Juni 2021, Grup memperoleh Surat Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pekawai dan Yamdena Barat yang berlaku sampai Mei 2024. Jumlah bank garansi sehubungan dengan *firm commitments* ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah USD10.905.297 dan USD9.405.297.

Rekening bersama dengan SKK Migas merupakan rekening yang ditempatkan di Bank Mandiri dan BNI (entitas berelasi dengan Pemerintah) untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area sehubungan dengan operasi hulu minyak dan gas. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan rekening bersama sebesar USD120.866.909 dan USD105.616.537.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tabun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor ("DHE") dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan. dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“SDA") mengatur paling sedikit sebesar 30% DHE SDA dalam Grup ditempatkan ke dalam rekening khusus DHE SDA paling tidak selama 3 bulan sejak DHE SDA diterima dan ditempatkan. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan DHE SDA sebesar USD9.000.000.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Grup melalui Keputusan Direksi No. 036200.K/KP.03/PDO/2023 memutuskan sebesar 12% dari nilai tantiem masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris SEI ditangguhkan selama 3 tahun dan dibayarkan secara pro rata di tahun-tahun tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan penangguhan pembayaran tantiem tersebut sebesar USD119.223.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan jaminan pelaksanaan jasa pekerjaan konstruksi. Kas yang dibatasi penggunaannya ini tersimpan di dalam rekening bank Perusahaan yang ditahan sebesar USD2.281.587 dan USD213.499.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

b. Restricted cash (continued)

The Group is required to place bank guarantees in relation to firm commitments in Pangkah PSC, Pekawai PSC, West Yamdena PSC, and Sangkar PSC. In June 2021, the Group extended the bank guarantees for Pekawai PSC and West Yamdena PSC until May 2024. As of December 31, 2023 and 2022, bank guarantees in relation to these firm commitments amounted to USD10,905,297 and USD9,405,297.

Joint accounts with SKK Migas represent bank accounts placed in Bank Mandiri and BNI (Government-related entities) for the funding of asset abandonment and site restoration obligations relating to upstream oil and gas operations. As of December 31, 2023 and 2022, restricted cash in relation to these joint accounts amounted to USD120,866,909 and USD105,616,537 respectively.

Indonesia Government Regulation No. 36 of 2023 regarding Export Proceeds ("DHE") from Natural Resources ("SDA") Business, Management, and/or Processing regulates that at least 30% of the DHE SDA in the Group need to be placed into a special DHE SDA account for at least 3 months since the DHE SDA was received and placed. As of December 31, 2023, the amount of restricted cash regarding the DHE SDA was USD9,000,000.

On August 8, 2023, Group through Boards' Resolution No. 036200.K/KP.03/PDO/2023 decide that 12% of each SEI Director and Board of Commissioners tantiem to be deferred for 3 years and paid proportionally in those years. As of December 31, 2023, the amount of restricted cash for the deferral were USD119,223.

Restricted cash represents performance bonds for construction services. The restricted cash is stored in the Company's bank account which is withheld amounted to USD2,281,587 dan USD213,499

5. ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan investasi pada instrumen utang yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

5. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Financial assets at fair value through other comprehensive income represent investments in debt instruments which are categorised as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income include the following:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah Indonesia			*The Government of Indonesia*
- Obligasi BRI	16.618.970	17.120.063	*BRI bonds -*
- Obligasi Mandiri	6.559.254	6.715.407	*Mandiri bonds -*
Pertamina			*Pertamina*
- Obligasi Pertamina	-	3.884.630	*Pertamina bonds -*
Total	**23.178.224**	**27.720.100**	***Total***

Berikut adalah mutasi aset keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

The movement of the financial assets measured at fair value through other comprehensive income of the Group is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	27.720.100	72.977.664	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	Addition
Pelepasan	(3.600.000)	(44.000.000)	Redemption
Kerugian dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(89.645)	(604.903)	*Unrealised loss from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Selisih kurs	(852.231)	(652.661)	*Foreign exchange differences*
Saldo akhir	**23.178.224**	**27.720.100**	***Ending balance***

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat efek utang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 the credit rating of the Group's financial assets at fair value through other comprehensive income are as following:

	Fitch	*Bloomberg*	*Moody's*	
Obligasi BRI	BBB	BBB	Baa2	*BRI Bonds*
Obligasi Mandiri	BBB-	BBB-	Baa2	*Mandiri Bonds*

Aset keuangan di atas belum ada yang melewati tanggal jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Eksposur maksimum atas risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

None of these financial assets are either overdue or impaired. The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of the debt instrument measured at fair value through other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

As of December 31, 2023, the Group's management believes that no indication of impairment for financial assets at fair value through other comprehensive income.

6. PIUTANG USAHA - NETO / *6. TRADE RECEIVABLES - NET*

Piutang usaha terdiri dari: / *Trade receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
Niaga gas bumi			*Gas trading*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	62.724.167	56.431.347	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")*
PT Pupuk Iskandar Muda	20.269.552	17.770.536	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Kilang Pertamina Internasional	9.487.537	11.368.351	*PT Kilang Pertamina Internasional*
PT Iglas (Persero)	8.411.897	8.387.923	*PT Iglas (Persero)*
PT Kertas Leces (Persero)	3.973.117	3.958.546	*PT Kertas Leces (Persero)*
PT Patra Logistic	1.365.188	-	*PT Patra Logistic*
PT Krakatau Daya Listrik	-	1.674.001	*PT Krakatau Daya Listrik*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	5.426.033	12.383.827	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	111.657.491	111.974.531	*Subtotal*
Minyak dan gas			*Oil and gas*
PLN	4.009.396	4.981.333	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	1.432.713	2.185.404	*PT Pertamina Patra Niaga*
Lain-lain (di bawah USD1.000.000)	-	1.195.529	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	5.442.109	8.362.266	*Subtotal*
Transmisi gas			*Gas transmission*
Pertamina	28.992.226	30.953.102	*Pertamina*
PLN	16.726.490	145.618.649	*PLN*
PT Pertamina EP	13.449.347	17.465.102	*PT Pertamina EP*
PT Pertamina Hulu Rokan	12.932.278	15.316.851	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina Patra Niaga	6.166.809	2.571.666	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pertamina Hulu Energi	4.284.150	5.710.115	*PT Pertamina Hulu Energi*
PT Pupuk Sriwidjaja	2.234.078	2.385.313	*PT Pupuk Sriwidjaja*
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	2.045.228	2.860.364	*PT Petrokimia Gresik ("PKG")*
PT Pertamina Trans Kontinental	1.057.676	1.532.538	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pupuk Iskandar Muda	598.834	4.899.236	*PT Pupuk Iskandar Muda*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	1.055.355	6.391.494	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	89.542.471	235.704.430	*Subtotal*
Total pihak berelasi	**206.642.072**	**356.041.227**	**Total related parties**
Pihak ketiga			***Third parties***
Niaga gas bumi	309.124.221	272.809.991	*Gas trading*
Transmisi gas	54.956.172	24.298.557	*Gas transmission*
Minyak dan gas	43.400.568	61.968.799	*Oil and gas*
Konstruksi, operasi dan pemeliharaan	23.262.782	40.196.378	*Construction, operation and maintenance*
Sewa fiber optik	8.322.422	7.634.250	*Fiber optic rental*
Total pihak ketiga	439.066.165	406.907.975	**Total third parties**
Jumlah piutang usaha sebelum cadangan penurunan nilai	**645.708.236**	**762.949.202**	***Total trade receivables before allowance for impairment***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai			*Allowance for impairment*
Pihak berelasi	(26.576.995)	(30.285.057)	*Related parties*
Pihak ketiga	(125.122.445)	(117.264.734)	*Third parties*
	(151.699.440)	(147.549.791)	
Jumlah piutang usaha sesudah cadangan penurunan nilai	494.008.796	615.399.411	*Total trade receivables after allowance for impairment*
Dikurangi:			*Deducted by:*
Bagian tidak lancar			*Non-current portion*
Pihak ketiga	45.825.293	47.069.180	*Third parties*
Bagian lancar	**448.183.503**	**568.330.231**	***Current portion***
Piutang usaha bagian lancar, bersih			*Trade receivables current portion, net*
Pihak berelasi	180.065.076	325.756.170	*Related parties*
Pihak ketiga	268.118.427	242.574.061	*Third parties*
Total	**448.183.503**	**568.330.231**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komposisi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022 the allowance for impairment losses on the Group's trade receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Penurunan individual	144.474.669	138.948.785	*Individual impairment*
Penurunan kolektif	7.224.771	8.601.006	*Collective impairment*
Total	**151.699.440**	**147.549.791**	***Total***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	147.549.791	131.731.391	*Beginning balance*
- Penambahan tahun berjalan	5.485.151	17.314.040	*Addition during the year -*
- Dampak selisih kurs	(1.335.502)	(1.495.640)	*Foreign exchange impact -*
Total	**151.699.440**	**147.549.791**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Allowance for impairment for individual receivables is provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Allowance for impairment for collective receivables is provided for customers that have insignificant balances and possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables based on invoice dates is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Belum jatuh tempo	367.514.515	496.766.983	*Current*
Jatuh tempo:			Overdue:
sampai dengan 3 bulan	48.629.444	14.728.037	up to 3 months
3 bulan - 6 bulan	6.546.432	9.587.592	3 months - 6 months
6 bulan - 1 tahun	8.348.122	32.885.267	6 months - 1 year
> 1 tahun	214.669.723	208.981.323	> 1 year
Total	**645.708.236**	**762.949.202**	***Total***

Rincian piutang usaha sebelum penyisihan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables before allowance based on denominated currency are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dolar AS	573.337.348	678.472.834	*US Dollar*
Rupiah	72.370.888	84.476.368	*Rupiah*
Total	**645.708.236**	**762.949.202**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

12,78% (31 Desember 2022: 18,60%) dari piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun merupakan piutang usaha dari entitas berelasi dengan pemerintah, yaitu masing-masing 7,02% (31 Desember 2022: 12,69%) dari PLN, 3,92% (31 Desember 2022: 4,01%) dari PT Iglas (Persero), dan 1,85% (31 Desember 2022: 1,89%) dari PT Kertas Leces (Persero). Manajemen terus berupaya melakukan langkah-langkah negosiasi untuk mengusahakan penagihan terkait dengan piutang-piutang usaha tersebut

Nilai tercatat dari piutang usaha sama dengan nilai wajarnya.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Termasuk di dalam piutang usaha merupakan piutang *Ship-or-Pay* ("SOP") yang timbul dari Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG") Kalija I (Catatan 35e) dan kasus arbitrase terkait deklarasi keadaan kahar oleh Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), *shipper* di PPG Kalija I (Catatan 36a).

Kolektabilitas piutang atas *Ship-or-Pay* bergantung pada keputusan arbitrase yang saat ini sedang berlangsung dan kemampuan keuangan PCML dan PLN untuk memenuhi kewajiban *Ship-or-Pay* dalam PPG Kalija I. Grup berpendapat bahwa:
(1) keputusan arbitrase akan berdampak positif ke Grup;
(2) PCML dan PLN akan dapat memenuhi kewajiban *ship-or-pay* dalam PPG Kalija I; dan
(3) provisi penurunan nilai piutang atas sewa pembiayaan yang dibuat oleh Grup mencukupi sehubungan dengan keadaan yang dijelaskan di Catatan 36a.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman maupun kontrak lainnya.

6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

12.78% (December 31, 2022: 18.60%) of the trade receivables that are past due by more than one year represent amounts due from government-related entities, comprising 7.02% (December 31, 2022: 12.69%) due from PLN, 3.92% (December 31, 2022: 4.01%) due from PT Iglas (Persero) and 1.85% (December 31, 2022: 1.89%) due from PT Kertas Leces (Persero). Management is continuously taking negotiation steps to pursue the collection of those receivables.

The carrying value of trade receivables is the same as their fair value.

The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

Included in trade receivables are Ship-or-Pay receivables in relation to Gas Transportation Agreement ("GTA") Kalija I (Note 35e) and the arbitration case related to the force majeure condition declared by Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), the shipper for GTA Kalija I (Note 36a).

The collectability of the Ship-or-Pay receivables depends on the outcome of the ongoing arbitration case and the financial capacity of PCML and PLN to fulfill the Ship-or-Pay obligation under GTA Kalija I. The Group is of the opinion that:
(1) the result of the arbitration will be favourable to the Group;
(2) PCML and PLN will be able to fulfill the ship-or-pay obligation under GTA Kalija I; and
(3) the Group has made sufficient provision for impairment of the finance lease receivable in relation to the situation explained in Note 36a.

As of December 31, 2023, no account receivables are pledged in relation with debt or other contracts.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - NETO / *7. OTHER RECEIVABLES – NET*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
Uang muka pembelian LNG dari Pertamina	7.789.257	8.478.723	*Advances to purchase of LNG from Pertamina*
Piutang pinjaman dari PDG	4.223.033	4.223.034	*Loan receivable from PDG*
Piutang bunga aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.605.290	1.757.453	*Interest receivable from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang bunga pinjaman dari PDG	812.377	812.377	*Interest loan receivables from PDG*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.302.638)	(1.302.638)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Jargas dari Pertamina	-	10.770.992	*Jargas receivable from Pertamina*
Subtotal pihak berelasi	13.127.319	24.739.941	*Subtotal related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Panjar dinas	8.324.720	8.325.785	*Advances to employees*
Piutang dari operasi bersama	7.198.218	5.651.315	*Joint operation receivables*
Lain-lain	9.047.009	7.199.664	*Others*
Subtotal pihak ketiga	24.569.947	21.176.764	*Subtotal third parties*
Jumlah piutang lain-lain, bersih	**37.697.266**	**45.916.705**	***Total other receivables, net***

Piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai bagian dari aset lancar karena berdasarkan perjanjian kontraktual, pembayaran piutang lain-lainnya dari pihak berelasi dijadwalkan selesai dalam atau kurang dari satu tahun.

Other receivables from related parties are classified as current assets because according to the contractual agreements, the repayment of other receivables from related parties is expected within one year or less.

Piutang lain-lain dari pihak ketiga merupakan piutang yang timbul sehubungan dengan operasi di PSC dimana Grup adalah *partner* bukan operator dari blok-blok tersebut.

Other receivables from third parties represent the receivables arising from PSC operations where the Group is a non-operating partner of those PSC blocks.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	1.302.638	1.302.719	*Beginning balance*
Pembalikan	-	(81)	*Reversal*
Saldo akhir	**1.302.638**	**1.302.638**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover any loss from uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN - NETO / *8. INVENTORIES - NET*

Persediaan terdiri dari: / *Inventories consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Suku cadang minyak dan gas, perlengkapan sumur dan lainnya	42.692.676	41.813.808	*Oil and gas spareparts, well supplies and others*
Suku cadang	16.687.210	5.362.870	*Spareparts*
Gas alam dan LNG	7.784.018	8.632.513	*Natural gas and LNG*
Persediaan *real-estate*	4.293.832	4.260.602	*Real-estate inventory*
Jumlah persediaan, kotor	**71.457.736**	**60.069.793**	***Total inventories, gross***
Dikurangi dengan:			*Deducted by:*
Provisi penurunan nilai persediaan	(477.054)	(477.054)	*Provision for impairment - of inventories*
Jumlah persediaan, bersih	**70.980.682**	**59.592.739**	***Total inventories, net***

Mutasi provisi untuk penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut: / *Movement of provision for impairment of inventories is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	477.054	787.715	*Beginning balance*
Pengurangan selama tahun berjalan	-	(310.661)	*Reductions during the year*
Saldo akhir	**477.054**	**477.054**	***Ending balance***

Suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya terdiri dari persediaan yang berhubungan dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Spare parts, well supplies and others represent inventories which are related to the exploration and production of oil and gas.

Pada tanggal 31 Desember 2023, persediaan tidak dijadikan jaminan dan persediaan Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar IDR69.602.618.352.

As of December 31, 2023, Inventories are not pledged and are insured against losses from fire and other risks under blanket policies for IDR69,602,618,352.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa provisi tersebut di atas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on a review at the reporting dates, management believes that the above provision is adequate to cover possible losses from impairment of inventories.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Uang muka bangunan Kerja Sama Operasi	29.955.628	28.196.605	*Advance for Joint Operation building*
Pembelian barang dan jasa	9.125.406	9.798.313	*Purchase of goods and services*
Uang muka cash call	2.814.387	1.873.246	*Cash call advances*
Lain-lain	3.913.029	5.531.210	*Others*
Pembelian dan transmisi gas bumi			*Purchase and transmission of natural gas*
- Transgasindo	189.659	1.867.559	*Transgasindo* -
- Medco E&P Grissik Ltd	-	18.993.608	*Medco E&P Grissik Ltd.* -
Total uang muka	45.998.109	66.260.541	*Total advances*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar			*Non-current portion*
- Uang muka bangunan Kerja Sama Operasi	(29.955.628)	(28.196.605)	*Advance for Joint Operation building* -
- Pembelian gas bumi	-	(18.423.336)	*Purchase of natural gas* -
- Pembelian barang dan jasa	(5.063.937)	(2.269.800)	*Purchase of goods and services* -
	(35.019.565)	(48.889.741)	
Uang muka, bagian lancar	**10.978.544**	**17.370.800**	***Advances, current portion***

Uang muka pembelian gas bumi merupakan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan *"Make-Up Gas"* untuk selisih jumlah gas yang dialirkan dengan jumlah kuantitas pembelian gas minimum seperti yang tertera dalam Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG"). Uang muka tersebut akan dikreditkan dengan kelebihan kuantitas gas yang dialirkan dengan jumlah kuantitas pembelian gas bumi minimum yang terjadi setelahnya.

The advances for purchase of natural gas represents payments made under the Make-Up Gas arrangements for the difference between the delivered quantity and the minimum purchase quantity of natural gas as stated in the Gas Sale and Purchase Agreements ("GSPA"). Such advances will be applied against future deliveries of quantities over the minimum specified purchase of natural gas.

Uang muka *cash call* merupakan akumulasi pembayaran *cash call* setelah dikurangi pengeluaran yang dilakukan oleh operator dari kerjasama operasi minyak dan gas bumi.

Cash call advances are the accumulated payments for cash calls net of expenditure incurred by the operator of the oil and natural gas joint operations.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh uang muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such advances can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

Beban dibayar di muka terdiri dari: / *Prepaid expenses consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Sewa dan beban dibayar dimuka lainnya	54.451.159	55.287.033	*Rent and other prepaid expense*
Joint interest billing dari aktivitas minyak dan gas	8.721.557	5.203.637	*Joint interest billing from oil and gas activities*
Lain-lain	467.354	2.538.811	*Others*
Total beban dibayar di muka	63.640.070	63.029.481	*Total prepaid expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(37.365.518)	(40.129.147)	*Non-current portion*
Beban dibayar dimuka, bagian lancar	**26.274.552**	**22.900.334**	***Prepaid expenses, current***

Manajemen berpendapat bahwa seluruh beban dibayar di muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such prepaid expense can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

11. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA / *11. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES*

Piutang lain-lain jangka panjang terdiri dari: / *Other long-term receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
PPN yang dapat ditagihkan	46.866.786	51.176.301	*Reimbursable VAT*
Piutang *carry* dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")	7.771.788	7.771.788	*Carry receivables from Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")*
Garansi bank atas proyek	5.005.724	-	*Bank Guarantee for projects*
Piutang dari ventura bersama			*Receivables from joint ventures*
- Transgasindo	3.894.134	3.896.211	*Transgasindo* -
- Regas	14.522	3.379	*Regas* -
Piutang pinjaman dari PDG	-	4.223.034	*Loan receivable from PDG*
Lain-lain	3.324.118	1.659.583	Others
Sub-total	66.877.072	68.730.296	*Sub-total*
Penyesuaian nilai wajar	(3.023.701)	(3.373.540)	*Fair value adjustment*
Saldo akhir	**63.853.371**	**65.356.756**	***Ending balance***

Pergerakan penyesuaian nilai wajar adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value adjustment were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	(3.373.540)	(3.341.162)	*Beginning balance*
Penambahan	-	(32.378)	*Addition*
Amortisasi	274.631	-	*Amortisation*
Penyesuaian lain-lain	75.208	-	Other adjustments
Saldo akhir	**(3.023.701)**	**(3.373.540)**	***Ending balance***

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Piutang dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC") merupakan kewajiban pajak yang terutang di SIPBV yang akan ditanggung oleh KUFPEC sesuai dengan Perjanjian Jual Beli KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. antara SEI dengan KUFPEC tertanggal 24 April 2013, dengan tingkat bunga diskonto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar 4,53%. Piutang ini akan dibayar ketika Pangkah mencapai equity to be split ("ETS") yang diperkirakan di tahun 2025.

Nilai wajar piutang lain-lain jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dihitung dengan menggunakan metode arus kas terdiskonto. Perhitungan nilai wajar ini diklasifikasikan sebagai tingkat tiga dalam hirarki nilai wajar.

Manajemen Grup berpendapat bahwa saldo seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

11. OTHER LONG-TERM RECEIVABLES (continued)

Receivables from Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC") represent the tax obligation of SIPBV, which will be borne by KUFPEC based on the Sale and Purchase Agreement of KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. between SEI and KUFPEC dated April 24, 2013, with a discounted interest rate as of December 31, 2023 and December 31, 2022 of 4.53%. This receivable will be settled when Pangkah achieves equity to be split ("ETS"), which is expected to be in 2025.

The fair value of other long-term receivables as at December 31, 2023 and December 31, 2022 were calculated using the discounted cash flow method. This fair value measurement is within level three of the fair value hierarchy.

The Group's management believes that all of the receivables are collectible. Hence, no allowance for impairment losses has been provided.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA / *12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES*

Rincian penyertaan adalah sebagai berikut: / *The details of joint ventures are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Investasi saham (nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)	2.718	2.718	***Investments in shares (FVOCI)***
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
Transgasindo	130.552.797	130.667.239	*Transgasindo*
Regas	96.810.292	98.919.470	*Regas*
PSG	62.585.407	59.289.639	*PSG*
Perkasa	8.730.045	7.382.168	*Perkasa*
PDG	8.368.868	6.320.748	*PDG*
JUP	154.161	220.859	*JUP*
Subtotal	307.201.370	302.800.123	
Jumlah penyertaan saham	**307.204.288**	**302.802.841**	***Total investment in shares***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut. / *The movement of investment in joint ventures are as followings.*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pada awal tahun	302.800.123	338.964.799	*At beginning of year*
Bagian laba ventura bersama	64.835.104	81.020.133	*Share of profit of joint ventures*
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari ventura bersama	581.619	239.061	*Share of other comprehensive income from joint ventures*
Dividen tunai	(61.015.276)	(117.423.870)	*Cash dividends*
Pada akhir tahun	307.201.570	302.800.123	*At the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Nama entitas/ *Name of entity*	Kedudukan usaha/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *% of ownership*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Metode pengukuran/ *Measurement method*
Transgasindo	Jakarta, Indonesia	59,87%	Keterangan/*Remarks* 1	Ekuitas/*Equity*
Regas	Jakarta, Indonesia	40,00%	Keterangan/*Remarks* 2	Ekuitas/*Equity*
Perkasa	Jakarta, Indonesia	60,00%	Keterangan/*Remarks* 3	Ekuitas/*Equity*
PSG	Banyuasin, Indonesia	66,00%	Keterangan/*Remarks* 4	Ekuitas/*Equity*
PDG	Jakarta, Indonesia	65,00%	Keterangan/*Remarks* 5	Ekuitas/*Equity*
JUP	Jakarta, Indonesia	51,00%	Keterangan/*Remarks* 6	Ekuitas/*Equity*

Keterangan:
1) Transgasindo bergerak di bidang transportasi gas dan memiliki infrastruktur pipa gas jaringan pipa Transmisi Grissik-Duri dan Grissik-Singapura.
2) Regas didirikan untuk pengelolaan fasilitas FSRT termasuk pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT.
3) Perkasa bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, pembinaan dan penyaluran jasa tenaga kerja.
4) PSG bergerak dalam bidang pengolahan gas serta menyediakan layanan jasa dan infrastruktur terkait pemrosesan gas.
5) PDG bergerak dalam bidang LNG dan gas pengangkutan/transportasi LNG, penyimpanan dan regasifikasi.
6) JUP bergerak dalam bidang pemanfaatan SPBG.

Remarks:
1) Transgasindo is engaged in gas transportation and owns the Grissik- Duri and Grissik-Singapore pipelines.
2) Regas was established to manage FSRT facilities including purchase of LNG and marketing of products arising from the operations of FSRT facilities.
3) Perkasa is engaged in workshop services, development and distribution of labour services.
4) PSG is engaged in the business of gas processing and providing services and infrastructure for gas processing.
5) PDG is engaged in LNG and gas transportation, storage and regasification.
6) JUP is engaged in Fuel Gas Filling Station utilisation.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh beban dibayar di muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such prepaid expense can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Set out below is the summarised financial information of the joint ventures which are accounted for using the equity method.

(1) Transgasindo
Ringkasan informasi keuangan Transgasindo adalah sebagai berikut:

(1) Transgasindo
Summarised financial information for Transgasindo is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	133.758.521	123.470.469	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	22.406.147	25.088.796	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	111.827.309	119.635.979	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(23.468.323)	(24.370.286)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(4.575.257)	(2.087.409)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas keuangan jangka panjang	(11.681.328)	(12.268.293)	*Long-term financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(9.463.209)	(10.474.254)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	218.803.860	218.995.002	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(1) Transgasindo (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(1) Transgasindo (continued)

	Tahun yang berakhir pada *tanggal 31 Desember / Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	121.330.690	141.373.256	*Revenue*
Biaya, depresiasi dan amortisasi	(55.220.040)	(71.096.895)	*Expenses, depreciation and amortisation*
Pendapatan/(beban) lainnya	2.994.079	4.325.790	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	2.605.628	496.791	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	71.710.357	54.548.418	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(17.917.135)	(12.124.184)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	53.793.222	42.424.234	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) Komprehensif lainnya	830.732	323.376	*Other comprehensive Income(Expense)*
Dividen yang dibayarkan	(54.815.104)	(82.877.286)	*Dividend paid*

Transgasindo merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Transgasindo.

Transgasindo is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Nilai buku pada awal tahun	130.667.239	147.274.461	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	32.206.002	32.817.804	*Share of profit for the period/year*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	497.359	193.605	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Penerimaan dividen	(32.817.803)	(49.618.631)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	130.552.797	130.667.239	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(2) Regas

Ringkasan informasi keuangan Regas adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(2) Regas

Summarised financial information for Regas is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	235.752.895	242.146.598	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	22.149.677	34.669.329	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	76.104.905	93.874.204	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(32.514.634)	(26.976.151)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(14.796.506)	(25.862.850)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(43.337.724)	(69.219.573)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	243.358.613	248.631.557	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	81.075.626	344.215.925	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(47.701.817)	(305.617.013)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(11.145.792)	(2.616.524)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	9.839.324	2.023.452	*Finance income*
Beban keuangan	(3.487.530)	(577.777)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	28.579.811	37.348.742	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(4.703.904)	(7.989.249)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	23.875.907	29.359.493	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) Komprehensif lainnya	210.642	113.642	*Other comprehensive Income/(Expense)*
Dividen yang dibayarkan	29.359.493	52.016.258	*Dividens paid*

Regas merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Regas.

Regas is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investasi pada ventura bersama (lanjutan) / ***Investment in joint ventures (continued)***

(2) Regas (lanjutan) / *(2) Regas (continued)*

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai buku pada awal tahun	98.919.470	107.936.720	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap period/tahun berjalan	9.550.362	11.743.796	*Share of profit for the period/year*
Dividen yang dibayarkan	(11.743.797)	(20.806.503)	*Dividends paid*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	84.257	45.457	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Nilai buku pada akhir tahun	96.810.292	98.919.470	*Carrying amount at the end of the year*

(3) Perkasa / *(3) Perkasa*

Ringkasan informasi keuangan Perkasa adalah sebagai berikut:

Summarised financial information for Perkasa is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	3.238.212	535.579	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	12.958.316	12.483.249	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	669.300	883.363	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(1.669.817)	(1.268)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(4.861.654)	(4.771.094)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(139.466)	(272.204)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	10.194.891	8.857.625	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada *tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	55.777.831	48.125.954	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(49.405.676)	(43.827.744)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(2.290.232)	(1.040.690)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	33.665	171.794	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	4.115.588	3.429.317	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(846.337)	(947.968)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	3.269.251	2.481.349	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	1.022.793	735.392	*Dividens paid*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(3) Perkasa (lanjutan)

Rekonsiliasi dari nilai investasi pada Perkasa adalah sebagai berikut:

12. *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investment in joint ventures (continued)

(3) Perkasa (continued)

Reconciliation of investment in Perkasa is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Nilai buku pada awal tahun	7.382.168	6.290.426	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	1.961.553	1.532.977	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(613.676)	(441.235)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	8.730.045	7.382.168	*Carrying amount at the end of the year*

Perkasa merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Perkasa.

Perkasa is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

(4) PSG

PSG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PSG.

(4) PSG

PSG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut:

Summarised financial information for PSG is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	72.454.704	58.348.619	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	16.638.432	16.980.362	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	43.428.278	55.369.599	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(17.133.847)	(17.804.127)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(15.780.266)	(18.174.496)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	99.607.301	94.719.957	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(4) PSG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut: (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(4) PSG (continued)

Summarised financial information for PSG is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada *tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	115.038.080	150.154.522	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(79.769.789)	(81.407.435)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	785.199	(2.311.142)	*Other income/(expenses)*
Beban keuangan	(632.825)	(367.843)	*Finance costs*
Pendapatan keuangan	1.706.535	593.697	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	37.127.200	66.661.799	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(8.133.612)	(14.717.739)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	28.993.588	51.944.060	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	24.000.000	70.000.000	*Dividens paid*

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Nilai buku pada awal tahun	59.289.639	71.183.838	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	19.135.768	34.305.801	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(15.840.000)	(46.200.000)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	62.585.407	59.289.639	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(5) PDG

Ringkasan informasi keuangan PDG adalah sebagai berikut:

12. *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investment in joint ventures (continued)

(5) PDG

Summarised financial information for PDG is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	1.766.480	854.555	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	5.605.911	5.884.559	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	18.462.773	21.970.695	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(10.723.372)	(10.155.108)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(417.926)	(7.480.389)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	14.693.866	11.074.312	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada *tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	14.034.550	13.891.117	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(5.790.958)	(5.219.918)	*Cost of revenue*
Beban lainnya	(3.100.580)	(5.030.287)	*Other expenses*
Pendapatan keuangan	46.088	544.181	*Finance income*
Beban keuangan	(729.121)	(1.169.574)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	4.459.979	3.015.519	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(1.309.025)	(678.727)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	3.150.954	2.336.792	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	-	550.000	*Dividens paid*

Rekonsiliasi dari investasi pada PDG adalah sebagai berikut:

Reconciliation of investment in PDG is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Nilai buku pada awal tahun	6.320.748	5.974.880	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	2.048.120	703.368	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	-	(357.500)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	8.368.868	6.320.748	*Carrying amount at the end of the year*

PDG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PDG.

PDG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investasi pada ventura bersama (lanjutan) / ***Investment in joint ventures (continued)***

(6) JUP / *(6) JUP*

Ringkasan informasi keuangan JUP adalah sebagai berikut: / *Summarised financial information for JUP is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	67.363	136.857	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	30	78.930	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	596.065	512.979	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(32.386)	(90.482)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(288.529)	(362.851)	*Other short-term liabilities*
Aset bersih	342.543	275.433	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Beban pokok penjualan	-	(25.567)	*Cost of revenue*
Beban lainnya	(130.781)	(135.062)	*Other expenses*
Rugi tahun berjalan	(130.781)	(160.629)	*Loss for the year*

Rekonsiliasi dari investasi pada JUP adalah sebagai berikut: / *Reconciliation of investment in JUP is summarised as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai buku pada awal tahun	220.860	304.474	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian rugi diserap tahun berjalan	(66.698)	(83.614)	*Share of loss for the year*
Nilai buku pada akhir tahun	154.162	220.860	*Carrying amount at the end of the year*

JUP merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham JUP. / *JUP is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.*

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET*

a. Aset tetap / *a. Fixed assets*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of fixed assets are as follows:*

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	111.542.778	36	(374.117)	38.766	111.207.463	*Land*
Bangunan dan prasarana	229.347.643	264.809	(52.418)	2.267.373	231.827.407	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	4.979.480.770	46.892.202	(94.112)	23.058.007	5.049.336.867	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	8.594.728	3.925.266	(1.092.242)	-	11.427.752	*Vehicles*
Peralatan kantor	23.765.421	69.919	(610.299)	179.706	23.404.747	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	15.186.427	79.486	(324.771)	194.524	15.135.666	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	8.337.798	-	(1.226.274)	-	7.111.524	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	224.993.416	125.161.230	(651.149)	(36.926.696)	312.576.801	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.601.248.981	176.392.948	(4.425.382)	(11.188.320)	5.762.028.227	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	121.595.972	11.229.619	(52.418)	-	132.773.173	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	2.695.345.391	161.671.611	(631.854)	-	2.856.385.148	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4.559.040	271.016	(184.275)	-	4.645.781	*Vehicles*
Peralatan kantor	21.633.207	1.134.754	(461.523)	-	22.306.438	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	13.108.124	719.433	(322.360)	-	13.505.197	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	5.107.051	186.694	(552.077)	-	4.741.668	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	2.861.348.785	175.213.127	(2.204.507)	-	3.034.357.405	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.633.417.390**				**2.621.188.016**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	102.406.715	-	(156.368)	9.292.431	111.542.778	*Land*
Bangunan dan prasarana	221.324.675	220.650	(1.732.612)	9.534.930	229.347.643	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	4.508.210.476	2.480.044	(7.667.083)	476.457.333	4.979.480.770	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	9.107.179	872.489	(1.384.940)	-	8.594.728	*Vehicles*
Peralatan kantor	23.469.935	495.068	(199.582)	-	23.765.421	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	14.679.759	575.634	(384.311)	315.345	15.186.427	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	8.427.593	1.550.902	(1.640.697)	-	8.337.798	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	579.363.069	156.200.698	(14.970.312)	(495.600.039)	224.993.416	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.466.989.401	162.395.485	(28.135.905)	-	5.601.248.981	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	111.571.471	11.074.525	(1.050.024)	-	121.595.972	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	2.555.128.771	144.209.906	(3.993.286)	-	2.695.345.391	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	5.286.789	468.577	(1.196.326)	-	4.559.040	*Vehicles*
Peralatan kantor	20.544.532	1.476.553	(387.878)	-	21.633.207	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	12.576.807	751.997	(220.680)	-	13.108.124	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	5.272.861	194.119	(359.929)	-	5.107.051	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	2.710.381.231	158.175.677	(7.208.086)	-	2.861.348.785	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.650.125.364**				**2.633.417.390**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

a. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dibebankan ke:

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

a. Fixed assets (continued)

Depreciation was charged to the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	**2022**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	168.078.885	151.710.822	*Cost of revenues (Notes 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	7.134.242	6.464.855	*General and administrative expenses (Notes 29)*
Total	**175.213.127**	**158.175.677**	***Total***

Asuransi aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan untuk pipa onshore sebesar USD1.220.885.910 dan nilai pertanggungan untuk pipa offshore sebesar USD337.400.000 dengan keseluruhan nilai pertanggungan sebesar USD1.684.101.510. Untuk peralatan mesin sebesar USD40.793.672 dan sebesar IDR16.702.069.728.875 untuk aset lainnya. Aset tetap entitas anak diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan total nilai pertanggungan untuk fasilitas pendukung FSRU Lampung sebesar USD407.400.000, aset SPBG PT Gagas Energi Indonesia sebesar IDR300.687.163.433, aset PT Kalimantan Jawa Gas sebesar USD316.531.775, dan aset PT Widar Mandripa Nusantara sebesar USD1.302.405.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets insurance

As of December 31, 2023, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies of sum insured totaling USD1,220,885,910 and sum insured totaling USD337,400,000 for offshore pipeline with overall asset coverage USD1,684,101,510, USD40,793,672 for machinery breakdown and IDR16,702,069,728,875 for other assets. The Subsidiaries' fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies for with sum insured for support facilities Lampung FSRU of USD407,400,000, SPBG PT Gagas Energi Indonesia asset for IDR300,687,163,433, PT Kalimantan Jawa Gas asset for USD316,531,775, and PT Widar Mandripa Nusantara asset for USD1,302,405.

Management believes that the amounts insured are adequate to cover possible losses from insured assets.

Aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar USD297.694.777 dan USD270.260.238.

Fixed assets that have been fully depreciated but are still in use

As of December 31, 2023 and 2022, the cost of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but are still in use in the operational activities amounted to USD297,694,777 and USD270,260,238, respectively.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap

Penurunan nilai aset LPG Mundu

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup membebankan aset dalam penyelesaian sehubungan dengan proyek LPG Mundu sejumlah USD14.517.321. Pada awalnya, proyek LPG Mundu direncanakan untuk memproduksi LPG, namun dalam perjalanannya tidak tersedia pasokan gas propana dan butana yang cukup sehingga proyek LPG Mundu dihentikan.

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang – Tambak Lorok

Grup mencatat provisi penurunan nilai aset tetap KJG sebesar USD106.482.806. Perhitungan penurunan nilai aset tetap dilakukan oleh manajemen atas dasar volume penyaluran gas yang didukung oleh komitmen penjualan gas. Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada penambahan atau pembalikan provisi penurunan nilai aset tetap di KJG.

Jumlah terpulihkan unit penghasil kas ("UPK") dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan transmisi gas yang bersumber dari gas lapangan Kepodang di blok Muriah hingga tahun 2026 dengan metode *value-in-use* ("VIU") dimana lebih tinggi dari metode *fair value less cost to sell*.

Perhitungan arus kas diskontoan yang digunakan meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

b. Impairment test on fixed assets

Impairment of Mundu LPG asset

As of December 31, 2022, the Group expensed construction in progress in relation to the Mundu LPG project amounting to USD 14,517,321. Initially, the Mundu LPG project was planned to produce LPG, but in the process there was no sufficient supply of propane and butane gas so that the Mundu LPG project was terminated.

Impairment of Kepodang – Tambak Lorok transmission pipe

The Group recorded a provision for the impairment of KJG's fixed assets amounting to USD106,482,806. The calculation of the impairment of fixed assets was carried out by management based on the volume of gas distribution supported by the commitment of gas sales. As of December 31, 2023, there were no additions or reversals of provisions for the impairment of fixed assets in KJG.

The recoverable amount of the cash generating units ("CGU") is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from gas transmission with the gas source from Kepodang field in Muriah block up to 2026 using value-in-use methods, which is higher than fair value less cost to sell method.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap (lanjutan)

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang – Tambak Lorok (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

b. Impairment test on fixed assets (continued)

Impairment of Kepodang – Tambak Lorok transmission pipe (continued)

The key assumptions used for value-in-use calculations as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Volume gas dari blok Muriah (mscf)			*Volume gas from Muriah block (mscf)*
2023	-	5.485.517	*2023*
2024	4.691.830	5.500.545	*2024*
2025	-	5.485.517	*2025*
2026	-	5.485.517	*2026*
Tarif jasa pengangkutan	USD2,326/MMBTU	USD0,901/MMBTU	*Toll-fee*
Tingkat diskonto	8,91%	9,70%	*Discount rate*
Periode arus kas	Sampai/*Until* 2024	Sampai/Until 2026	*Cash flows period*
Metode yang digunakan untuk nilai terpulihkan	VIU	VIU	*Method used for recoverable amount*

c. Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian. Rincian aset dalam penyelesaian signifikan adalah sebagai berikut:

c. Construction in progress

Construction in progress represent projects that have not been completed at the date of the consolidated financial statements. Significant items of construction in progress are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023		
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date***
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	35.922.447	2026
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	95,17%	29.347.024	2024
Pekerjaan pembangunan Pipa Gas Senipah RU V/ *Construction of Senipah RU V Pipeline*	99,26%	76.364.799	2024

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)*

c. Aset dalam penyelesaian (lanjutan) / *c. Construction in progress (continued)*

Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date*
	31 Desember/*December* 31, 2022		
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	35.612.092	Juni/*June* 2023
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	85,53%	18.789.929	2023
Pekerjaan pembangunan Pipa Gas Senipah RU V/ *Construction of Senipah RU V Pipeline*	51,41%	53.265.797	2023

Selain dari aset dalam penyelesaian yang dinyatakan di atas, Grup masih memiliki aset dalam penyelesaian yang terdiri dari pengembangan jaringan dan infrastruktur untuk pelanggan kecil dan rumah tangga dalam jalur distribusi gas Grup.

Outside of the construction in progress stated above, the Group still has construction in progress assets which consist of the development of networks and infrastructure for small customers and household within the Group's gas distribution lines.

d. Aset takberwujud / *d. Intangible assets*

Perubahan dalam akun aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The changes in intangible assets account for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
	31 Desember/*December 31*, 2023				
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	9.514.234	860.783	-	10.375.017	*Software*
Hak atas tanah	1.971.164	146.012	478	2.116.698	*Land rights*
	11.485.398	1.006.795	478	12.491.715	
Akumulasi amortisasi					***Accumlulated amortisation***
Piranti lunak	(7.953.450)	(857.988)	-	(8.811.438)	*Software*
Hak atas tanah	(1.088.075)	(104.912)	(478)	(1.192.509)	*Land rights*
	(9.041.525)	(962.900)	(478)	(10.003.947)	
Nilai buku bersih	**2.443.873**	**43.895**	**-**	**2.487.768**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS – NET (continued)*

d. Aset takberwujud (lanjutan) / *d. Intangible Assets (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	8.282.082	1.232.152	-	9.514.234	*Software*
Hak atas tanah	1.971.164	-	-	1.971.164	*Land rights*
	10.253.246	1.232.152	-	11.485.398	
Akumulasi amortisasi					***Accumlated amortisation***
Piranti lunak	(6.768.763)	(1.184.687)	-	(7.953.450)	*Software*
Hak atas tanah	(941.995)	(146.080)	-	(1.088.075)	*Land rights*
	(7.710.758)	(1.330.767)		(9.041.525)	
Nilai buku bersih	**2.542.488**	**(98.615)**	**-**	**2.443.873**	***Net book value***

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD326.836 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD636.064 dimana berjumlah USD962.900. Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD327.758 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD1.003.009 dimana berjumlah USD1.330.767.

Amortization expenses of intangible assets for the year ended December 31, 2023 were recorded in Cost of Revenues of USD326,836 and General and Administrative Expenses of USD636,064 amounting to USD962,900. The amortization expenses of the intangible assets for the year ended on December 31, 2022 were recorded in the Cost of Revenue of USD327,758 and General and Administrative Expenses of USD1,003,009 amounting to USD1,330,767.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh aset takberwujud tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such intangible assets can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

14. SEWA / *14. LEASES*

a. Aset hak-guna / *a. Right-of-use assets*

Catatan ini menyajikan informasi untuk sewa dimana Grup bertindak sebagai *lessee:*

This note provides information for leases where the Group acts as a lessee:

	31 Desember/*December* 31, 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")*
Tug boats	67.150.566	-	2.891.283	70.041.849	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	24.788.938	2.181.488	(7.841.259)	19.129.167	*Buildings and improvements*
Kendaraan	8.798.414	2.126.233	(1.268.471)	9.656.176	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	50.836.484	-	(10.964.586)	39.871.898	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	3.916.943	125.704	(3.894.119)	148.528	*Other equipment*
Total nilai tercatat	601.823.170	4.433.425	(21.077.152)	585.179.443	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(92.878.299)	(30.959.433)	-	(123.837.732)	*FSRU*
Tug boats	(15.446.195)	(3.917.408)	(3.398.854)	(22.762.457)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(9.294.547)	2.237.858	855.701	(6.200.988)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(5.422.191)	(3.801.967)	2.108.450	(7.115.708)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(13.015.179)	(8.458.994)	9.478.922	(11.995.251)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(3.399.931)	(78.942)	3.422.794	(56.079)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(139.456.342)	(44.978.886)	12.467.013	(171.968.215)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**462.366.828**			**413.211.228**	***Net book value***

14. SEWA (lanjutan) / *14. LEASES (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / *a. Right-of-use assets (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2022*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")*
Tug boats	67.150.566	-	-	67.150.566	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	20.647.987	4.195.855	(54.905)	24.788.938	*Buildings and improvements*
Kendaraan	6.928.037	1.981.255	(110.878)	8.798.414	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	50.836.484	-	-	50.836.484	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	150.492	3.766.451	-	3.916.943	*Other equipment*
Total nilai tercatat	592.045.391	9.943.561	(165.783)	601.823.170	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(61.918.866)	(30.959.433)	-	(92.878.299)	*FSRU*
Tug boats	(11.202.326)	(4.243.869)	-	(15.446.195)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(5.587.499)	(3.707.048)	-	(9.294.547)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(3.637.080)	(1.785.111)	-	(5.422.191)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(11.012.013)	(2.003.166)	-	(13.015.179)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(102.657)	(3.297.275)	-	(3.399.932)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(93.460.441)	(45.995.901)	-	(139.456.342)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**498.584.950**			**462.366.828**	***Net book value***

Penyusutan dibebankan ke: / *Depreciation was charged to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	42.607.329	43.742.799	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	2.371.557	2.253.102	*General and administrative expenses (Note 29)*
	44.978.886	45.995.901	

Sehubungan dengan arbitrase yang dilakukan oleh Grup (lihat Catatan 36b), Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai FSRU. Tidak ada penurunan nilai yang perlu dibukukan pada tanggal 31 Desember 2023.

In connection with the arbitration conducted by the Group (see Note 36b), the Group has carried out an impairment test for the FSRU. There were no impairment needs to be recorded at December 31, 2023.

b. Liabilitas sewa / *b. Lease liabilities*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	474.439.515	510.075.606	*Beginning balance*
Beban bunga	19.171.128	16.777.988	*Interest expense*
Penambahan	3.839.597	6.062.533	*Additions*
Penyesuaian	(8.693.697)	710.262	*Adjustments*
Pembayaran	(58.074.480)	(59.186.874)	*Payments*
Saldo akhir	430.682.063	474.439.515	*Ending balance*
Bagian jangka pendek	34.826.814	31.445.959	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**395.855.249**	**442.993.556**	***Non-current portion***

14. SEWA (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban bunga (Catatan 30a)	19.171.128	16.777.988	*Interest expense (Note 30a)*
Beban terkait sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah	48.574.215	52.716.443	*Expenses relating to short-term and low-value assets leases*

Laporan arus kas konsolidasian interim menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembayaran kepada pemasok	(48.574.215)	(52.716.443)	*Payments to suppliers*
Pembayaran beban keuangan	(19.171.128)	(16.777.988)	*Payments of finance costs*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pembayaran liabilitas sewa	(38.903.352)	(42.408.886)	*Repayments of lease liabilities*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa FSRU, gedung, peralatan berat, kendaraan, dan kapal *(time charter*). Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 sampai dengan 5 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 3. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

14. LEASES (continued)

b. Lease liabilities (continued)

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

The interim consolidated statements of cash flows show the following amounts related to leases:

The Group entered into several lease agreements which are mainly related to rental of FSRU, buildings, heavy equipment, vehicles and shipping vessels (time charter). Rental agreements are typically made for fixed periods of 1 to 5 years but may have extension options as described in Note 3. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but leased assets may not be used as security for borrowing purposes.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET

a. Aset eksplorasi dan evaluasi

a. Exploration and evaluation assets

Pergerakan aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Movements of exploration and evaluation assets are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deduction)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	98.017.068	(98.017.068)	-	*South Sesulu, East Kalimantan* -
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	5.883.762	138.130	6.021.891	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Pekawai, Kalimantan Timur	1.090.574	338.314	1.428.888	*Pekawai, East Kalimantan –*
- Yamdena Barat, Maluku	3.521.555	104.997	3.626.552	*West Yamdena, Maluku –*
- Sangkar, Jawa Tengah	-	50.000	50.000	*Sangkar, Central Java* -
Total	**108.512.959**	**(97.385.627)**	**11.127.331**	***Total***

	31 Desember/December 31, 2022			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	96.233.329	1.783.739	98.017.068	*South Sesulu, East Kalimantan –*
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	5.802.535	81.227	5.883.762	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Pekawai, Kalimantan Timur	837.605	252.969	1.090.574	*Pekawai, East Kalimantan –*
- Yamdena Barat, Maluku	3.249.581	271.974	3.521.555	*West Yamdena, Maluku –*
Total	**106.123.050**	**2.389.909**	**108.512.959**	***Total***

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Sesulu Selatan terdiri dari tiga sumur eksplorasi, yaitu sumur SIS-A#1, SIS-G#1, dan West SIS-A#1 dengan total pengeluaran masing-masing USD53.011.198, USD23.384.530, dan USD22.086.924. Di tahun 2019, Grup telah menyampaikan kepada SKK Migas penemuan cadangan gas bumi di struktur SIS-A dan Grup telah melaksanakan komitmen program kerja eksplorasi sesuai dengan PSC Sesulu Selatan. Sesuai dengan ketentuan komersialitas wilayah kerja di dalam PSC, Grup diberi waktu 3 tahun untuk menyerahkan *plan of development* ("POD") sejak penemuan cadangan gas bumi di struktur SIS-A, yaitu sampai dengan bulan Mei 2022 dan mendapat perpanjangan hingga Mei 2023. Manajemen telah menyampaikan dokumen POD I Lapangan SIS-A pada tanggal 8 Maret 2023 dan telah menerima persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana disampaikan oleh Surat SKK Migas nomor SRT-0334/SKKIA0000/2023/S1 tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan POD tersebut, *sunk cost* WK South Sesulu senilai US$110,23 juta dapat dipulihkan dari POD SIS-A tersebut serta POD selanjutnya melalui mekanisme *Ring Fencing Block Basis*.

The exploration and evaluation assets in South Sesulu block consist of three exploration wells, namely SIS-A#1, SIS-G#1, and West SIS-A#1 wells with total expenditure of USD53,011,198, USD23,384,530 and USD22,086,924, respectively. In 2019, the Group has communicated to SKK Migas the discovery of natural gas reserves in the SIS-A structure and that the Group fulfilled the firm commitment for exploration activities under South Sesulu PSC. Pursuant to the commerciality of working area provisions in PSC, the Group is required to submit a plan of development ("POD") within 3 years from natural gas reserves discovery at SIS-A, that is until May 2022 and was extended until May 2023. The Management has submitted the SIS-A Field POD I document on March 8, 2023 and has been approved by the Minister of Energy and Mineral Resources as conveyed by SKK Migas letter number SRT-0334/SKKIA0000/2023/S1 dated August 22, 2023. Based on the POD, South Sesulu Block's sunk cost amounting to US$110.23 million can be recovered by SIS-A POD and subsequent PODs through the Block Basis Ring Fencing mechanism.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)

a. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Atas dasar kedua hal tersebut, manajemen Grup mereklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi di blok Sesulu Selatan ke Properti Minyak dan Gas pada tahun 2023.

Untuk sumur SIS-G#1 dan West SIS-A#1, Grup menemukan potensi gas biogenik (2C *resources*) dan telah menyusun rencana kerja untuk melanjutkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan di struktur SIS-G dan West SIS-A.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh aset ekplorasi dan evaluasi tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

a. Exploration and evaluation assets (continued)

On that basis, Group's management have reclassified the exploration and evaluation assets in South Sesulu block to Oil and Gas Properties in 2023.

For SIS-G#1 and West SIS-A#1 wells, the Group discovered potential biogenic gas (2C resources) and has prepared a work plan to continue exploration and development activities in the SIS-G and West SIS-A structures.

The management is of the opinion that all of such exploration and evaluation assets can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

b. Properti minyak dan gas

b. Oil and gas properties

Pergerakan properti minyak dan gas adalah sebagai berikut:

Movement of oil and gas properties is as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	119.424.281	3.182.118	(3.585.350)	-	119.021.049	*Muriah, Jawa Tengah*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	-	465.583	-	98.017.068	98.482.651	*South Sesulu, Kalimantan Timur*
Ketapang, Jawa Timur	346.919.827	7.066.256	(2.567.356)	-	351.418.726	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	1.347.451.592	68.746.825	(173.794)	-	1.416.024.623	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	97.310.166	234.082	(4.347.390)	-	93.196.858	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	620.323.592	4.344.027	(1.084.963)	-	623.582.656	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	361.190.516	444.739	(767.690)	-	360.867.565	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat	2.929.018.771	84.483.630	(12.526.544)	98.017.068	3.098.992.926	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(80.555.774)	(3.564.511)	-	-	(84.120.285)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(244.057.932)	(25.978.005)	-	-	(270.035.937)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(874.261.591)	(136.876.828)	-	-	(1.011.138.419)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(33.833.382)	(4.846.858)	-	-	(38.680.240)	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(414.215.260)	(58.410.011)	-	-	(472.625.271)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(190.484.796)	(16.859.198)	-	-	(207.343.994)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(1.873.807.532)	(246.535.411)	-	-	(2.120.342.943)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	-	-	-	-	-	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	-	-	-	-	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(108.523.539)	-	-	-	(108.523.539)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**946.687.700**				**870.126.444**	***Net book value***

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

b. Properti minyak dan gas (lanjutan)

b. Oil and gas properties (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	118.664,029	760.252	-	-	119.424.281	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	326.746.140	20.173.687	-	-	346.919.827	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	1.345.837.212	1.614.380	-	-	1.347.451.592	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	96.006.234	1.303.932	-	-	97.310.166	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	614.602.127	5.721.465	-	-	620.323.592	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	352.561.124	8.629.392	-	-	361.190.516	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat *Total carrying value*	2.890.815.663	38.203.108	-	-	2.929.018.771	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(74.745.944)	(5.809.830)	-	-	(80.555.774)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(217.489.786)	(26.568.146)	-	-	(244.057.932)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(642.433.122)	(209.089.918)	-	(22.738.551)	(874.261.591)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(27.506.518)	(6.326.864)	-	-	(33.833.382)	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(339.279.519)	(74.935.741)	-	-	(414.215.260)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(181.808.921)	(6.253.653)	-	(2.422.222)	(190.484.796)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(1.519.662.607)	(328.984.152)	-	(25.160.773)	(1.873.807.532)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(51.111.819)	-	28.373.268	22.738.551	-	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(18.390.604)	-	15.968.382	2.422.222	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(178.025.962)	-	44.341.650	25.160.773	(108.523.539)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**1.193.127.094**				**946.687.700**	***Net book value***

Beban penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 28) masing-masing sebesar USD246.535.411 dan USD 328.984.152.

Depreciation expense for the period ended December 31, 2023 and 2022 was allocated to cost of revenues (Note 28) amounting to USD246,535,411 and USD328,984,152 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD1.576.540.000.

As of December 31, 2023, all wells and related equipment and facilities were insured for an amount of USD1,576,540,000.

PSC Sanga-sanga, dimana SESL memiliki *participating interest,* telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Seluruh properti minyak dan gas PSC Sanga-sanga telah disusutkan penuh.

The Sanga-sanga PSC, in which SESL owns a participating interest, expired on August 8, 2018 and was returned to the Government of the Republic of Indonesia. All oil and gas properties related to the Sanga-sanga PSC had been fully depreciated.

Berdasarkan surat SKK Migas pada tanggal 13 Agustus 2018, Grup akan menerima pembayaran atas pengembalian biaya investasi PSC Sanga-sanga sebesar USD42.312.836 yang akan diverifikasi lebih lanjut oleh Pertamina. Jumlah ini telah diperlakukan sebagai aset kontinjensi.

Based on a letter from SKK Migas dated August 13, 2018, the Group will receive a payment for unrecovered investment costs of Sanga-sanga PSC amounting to USD42,312,836, which will be further verified by Pertamina. This amount has been treated as a contingent asset.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

b. Properti minyak dan gas (lanjutan)

Pada tanggal 20 September 2021, SKK Migas melalui suratnya No. SRT-0595/SKKMA0000/2021/S4 menyatakan bahwa kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2017 dan perubahannya dalam rangka pengembalian biaya investasi PSC Sanga-sanga belum terpenuhi sehingga nilai pembayaran atas pengembalian biaya investasi yang disetujui adalah nihil. Tidak ada dampak terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup karena Grup tidak mengakui aset kontijensi tersebut.

Pengalihan *participating interest* dan pengelolaan blok Muriah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan persetujuan pengalihan *participating interest* blok Muriah dari PCML kepada SEML melalui surat No. 186/13/MEM.M/2020 tanggal 17 Juni 2020. Pada tanggal 20 Juni 2020, SKK Migas, melalui surat No. SR-0125/SKKMI0000/2020/S9, mengesahkan perubahan Operator di blok Muriah menjadi SEML dengan kepemilikan *participating interest* sebesar 100%. Tidak ada kas yang dikeluarkan oleh Grup terkait pengalihan *participating interest* di blok Muriah.

c. Uji penurunan nilai atas properti minyak dan gas

Pengujian penurunan nilai atas properti minyak dan gas dilakukan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatat properti minyak dan gas tersebut mengalami penurunan. Dalam hal ini, manajemen Grup menentukan hak kepemilikan pada masing-masing blok sebagai satu UPK.

Nilai terpulihkan UPK dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan produksi minyak dan gas dengan periode proyeksi hingga akhir masa PSC atau konsesi dengan metode *value-in-use* atau *fair value less cost to sell*, yang mana yang lebih tinggi. Rencana produksi pada proyeksi arus kas ini tidak melampaui cadangan minyak dan gas atau akhir masa PSC atau konsesi.

Perhitungan arus kas diskonto yang meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

b. Oil and gas properties (continued)

On September 20, 2021, SKK Migas through its letter No. SRT-0595/SKKMA0000/2021/S4 stated that the criteria required in Regulation of the Ministry of EMR No. 26 of 2017 and its amendments regarding payment for unrecovered investment costs of the Sanga-sanga PSC have not been fulfilled so that the agreed payment for unrecovered investment costs is nil. No impact to the Group's financial position and cash flows since the Group did not recognizes this contingent asset.

Transfer of participating interest and operatorship of Muriah block

The Minister of Energy and Mineral Resources has approved the transfer of participating interest in the Muriah block from PCML to SEML through its letter No. 186/13/MEM.M/2020 dated June 17, 2020. On June 20, 2020, SKK Migas, through its letter No. SR-0125/SKKMI0000/2020/S9, approved the change of Operatorship in Muriah block to SEML with a participating interest of 100%. There was no cash payment made by the Group in relation to the transfer of participating interest in the Muriah block.

c. Impairment test on oil and gas properties

An impairment test on oil and gas properties is performed when there is an indication that the carrying value of oil and gas properties may be impaired. For this purpose, management of the Group has determined the participating interests in the respective blocks as the relevant CGUs.

The recoverable amount of the CGUs is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from oil and gas production with projection periods up to the PSC or concession expiration date and using value-in-use or fair value less cost to sell methods, whichever is higher. The production plans used in the cash flow projections also do not exceed oil and gas reserves or the end of the PSC or concession period.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

c. Uji penurunan nilai atas properti minyak dan gas (lanjutan)

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai properti minyak dan gas adalah sebagai berikut:

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

c. Impairment test on oil and gas properties (continued)

Management determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

Movements in the allowance for impairment losses on oil and gas properties were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	108.523.539	178.025.962	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Addition*
Pembalikan	-	(69.502.423)	*Reversal*
Saldo akhir	**108.523.539**	**108.523.539**	***Ending balance***

Pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen berpendapat tidak ada indikasi penurunan nilai terhadap properti minyak dan gas buminya, oleh karena itu uji penurunan nilai tidak diperlukan.

As of December 31, 2023, management believes that there is no indication of impairment in the value of its oil and gas properties and therefore an impairment test was not required.

Pada akhir tahun 2022, Grup memulihkan provisi penurunan nilai atas properti minyak dan gas di Blok Pangkah dan Fasken masing-masing sebesar USD51.111.819 dan USD18.390.604 dengan nilai buku tersusutkan masing-masing sebesar USD28.373.268 dan USD15.968.382. Pemulihan penurunan nilai ini disajikan pada laporan laba rugi sebagai "pemulihan penurunan nilai properti minyak dan gas".

At the end of 2022, the Group recognised a reversal in impairment of oil and gas properties in Pangkah and Fasken Block amounting to USD51,111,819 dan USD18,390,604 respectively, with a depreciated balance of USD28,373,268 and USD15,968,382. These reversals is presented as "impairment reversal of oil and gas properties" in statement of profit and loss.

Pemulihan provisi penurunan nilai Blok Pangkah dan Blok Fasken dilakukan manajemen atas dasar kenaikan volume produksi akibat keberhasilan pengeboran pada lapangan Sidayu dan *West Pangkah* serta kinerja positif pada kedua lapangan tersebut, serta keberhasilan pengeboran lapangan eksplorasi Austin Chalk dengan realisasi produksi diatas estimasi awal. Perhitungan cadangan produksi blok migas dilakukan oleh lembaga independen PT LAPI ITB.

The reversal of impairment losses in Pangkah and Fasken were made based on management's assessment that there were increases in production volume related to the successful drilling of Sidayu and West Pangkah fields along with the positive performance on both fields, and the successful drilling of Austin Chalk exploration field with production beyond the initial estimation. The reserve production calculations were performed by an independent institution PT LAPI ITB.

Asumsi lain yang digunakan oleh manajemen adalah lifting, estimasi pergerakan harga jual, tingkat diskonto, periode arus kas, beban operasi, dan belanja modal. Lifting tahunan, arus kas, dan beban operasi dan modal diproyeksikan berdasarkan rencana bisnis manajemen yang telah disetujui secara formal dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan ekspektasi masa depan.

Other assumptions used by management are lifting, selling price trends, discount rate, cash flow period, operating expenditure and capital expenditure. The projected annual lifting, cash flows, and operating and capital expenditure are based on formally approved management business plans taking into consideration the current conditions and future expectations.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Kilang Pertamina Internasional	64.938.554	55.098.911	*PT Kilang Pertamina Internasional*
PT Pertamina EP	38.405.572	29.299.262	*PT Pertamina EP*
Pertamina	38.218.531	24.130.373	*Pertamina*
PT Pertamina Hulu Energi	17.812.289	14.913.928	*PT Pertamina Hulu Energi*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	4.037.828	-	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Patra Drilling Contractor	3.652.009	6.971.572	*PT Patra Drilling Contractor*
PT Pertamina Training & Consulting	3.594.465	-	*PT Pertamina Training & Consulting*
PT Elnusa Tbk	2.756.781	1.860.353	*PT Elnusa Tbk*
PT Pertamina Trans Kontinental	2.035.675	2.113.404	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pertamina Patra Niaga	1.044.102	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	6.136.193	1.691.625	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	182.631.999	136.079.428	*Subtotal*
Pihak ketiga	62.578.145	100.138.534	***Third parties***
Total utang usaha	**245.210.144**	**236.217.962**	***Total trade payables***

Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga yang nilainya memerlukan penyajian terpisah. Semua utang usaha berstatus lancar. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

There are no payables to third parties which meet the threshold for separate disclosure. All trade payables are current. Due to their short-term nature, their fair value is equal to their carrying amount.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	48.466.206	113.566.274	*Liabilities to contractors and suppliers*
Jaminan gas	34.619.061	29.840.311	*Gas guarantee deposits*
Pendapatan diterima di muka dari pelanggan	22.177.997	16.396.989	*Unearned revenue from customers*
Utang *cash call*	10.407.479	11.958.025	*Cash calls payable*
Lain-lain	1.619.926	2.763.298	*Others*
Subtotal	117.290.669	174.524.897	*Subtotal*
Total utang lain-lain	**117.290.669**	**174.524.897**	***Total other payables***

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok sebagian besar merupakan liabilitas sehubungan dengan pembangunan proyek-proyek oleh Divisi *Program Management Office* ("PMO") beserta liabilitas kepada kontraktor terkait aktivitas hulu minyak dan gas.

Liabilities to contractors and suppliers primarily represent liabilities related to the construction of projects by the Program Management Office ("PMO") and liabilities to contractors related to upstream oil and gas activities.

Utang jaminan gas merupakan uang jaminan gas yang diterima oleh Grup dari pelanggan dalam rangka transaksi penjualan gas.

Gas guarantee deposits payable represents gas deposits received by the Group from customers in relation to gas sales transactions.

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *17. OTHER PAYABLES (continued)*

Utang *cash call* merupakan utang kepada operator yang berkaitan dengan kegiatan operasional di blok Fasken, Muara Bakau, dan Ketapang.

Cash call payables represent payables to operators related to operational activities in Fasken, Muara Bakau, and Ketapang blocks.

Pendapatan diterima di muka dari pelanggan merupakan kas yang diterima dari pelanggan terkait penjualan minyak mentah dan gas bumi yang akan terealisasi dengan penjualan di kemudian hari.

Unearned revenue from customers represents cash received from customers from sales of crude oil and natural gas that will be realized through future sales.

18. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *18. ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED REVENUE*

a. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar / *a. Accrued Liabilities*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	210.963.891	145.145.650	*Liabilities to contractors and suppliers*
Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu (Catatan 36c)	82.284.759	172.910.373	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas (Note 36c)*
Provisi kontrak LNG (Catatan 35t)	68.540.528	56.850.817	*Provision for LNG contract (Note 35t)*
Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas	30.286.539	23.935.473	*Liabilities for oil and gas activities*
Provisi sengketa pajak	6.903.937	4.922.313	*Provision for tax dispute*
Bunga	4.874.183	10.976.993	*Interest*
Liabilitas *Take or Pay* dan Kelebihan Bayar Pelanggan	3.850.534	22.984.760	*Take or Pay Liabilities and Customer's Overpayments*
Lain-lain	13.509.418	14.687.038	*Others*
Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar	**421.213.789**	**452.413.417**	***Total accrued liabilities***
Bagian jangka pendek	352.673.261	395.562.599	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	68.540.528	56.850.817	*Long-term portion*

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok merupakan liabilitas dimana tagihan atas liabilitas tersebut belum diterima Grup.

Liabilities to contractors and suppliers represent liabilities for which the related invoices for such amounts have not yet been received by the Group.

Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas merupakan liabilitas yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Liabilities for oil and gas activities represent liabilities relating to oil and gas exploration and production activities.

Biaya bunga yang masih harus dibayar terdiri dari biaya bunga pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan bunga obligasi.

Accrued interest consists of interest on short-term bank borrowings, long-term bank borrowings and bonds.

18. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

18. ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED REVENUE (continued)

b. Pendapatan Ditangguhkan

b. Deferred Revenue

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Bagian lancar			*Current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* Pelanggan	8.038.209	20.315.329	*Take or Pay and Ship or Pay Customer*
Bagian tidak lancar			*Non – current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* dari pelanggan	153.931.086	145.292.594	*Take or Pay and Ship or Pay from customer*
Perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO")	1.605.546	1.763.991	*Joint Operation ("JO") Agreement*
Subtotal	**155.536.632**	**147.056.585**	***Subtotal***
Jumlah	**163.574.841**	**167.371.914**	***Total***

Pendapatan yang ditangguhkan timbul dari transaksi penjualan gas bumi dan transportasi gas bumi oleh Grup dimana Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") memiliki skema *Take-or-Pay* dan PPG memiliki skema *Ship-or-Pay*.

Deferred revenue arose from natural gas sales transactions by the Group for which the Gas Sales and Purchase Agreements ("GSPA") contain a Take-or-Pay scheme and GTA contain a Ship-or-Pay scheme.

Dalam skema *Take-or-Pay* dan *Ship-or-Pay*, pembeli harus membayar jumlah minimum jika kuantitas gas aktual yang diambil (*Take-or-Pay*) atau dialirkan (*Ship-or-Pay*) kurang dari kuantitas minimum yang telah disepakati.

In a Take-or-Pay and Ship-or-Pay scheme, the buyers have to pay a minimum amount if the actual gas taken (Take-or-Pay) or transported (Ship-or-Pay) is less than the agreed minimum quantities.

Pembeli memiliki hak untuk mengambil (*Take-or-Pay*) atau menyalurkan (*Ship-or-Pay*) gas yang telah dibayar dari periode 6 - 12 bulan dari diakuinya *Take-or-Pay* atau *Ship-or-Pay*.

The buyers are entitled to take (Take-or-Pay) or transport (Ship-or-Pay) gas that has been paid for from period of 6 - 12 months following the recognition of Take-or-Pay or Ship-or-Pay.

Bagian lancar atas pendapatan ditangguhkan adalah estimasi penjualan gas kepada pembeli dalam 12 bulan kedepan.

The current portion of deferred revenue represents the estimated gas sales portion for the next 12 months.

19. PINJAMAN / *19. LOANS*

a. Pinjaman bank jangka pendek / *a. Short-term bank loans*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related-party loans***
Bank Mandiri	**2.590.841**	**-**	*Bank Mandiri*

Pinjaman bank tersebut merupakan fasilitas kredit *revolving joint facility term loan* antara Bank Mandiri dan SENA, anak perusahaan PGASSOL. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk untuk mendanai operasional proyek. Pinjaman ini berjangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2024 dan memiliki tingkat suku bunga JIBOR + 1,3%. Tidak ada jaminan yang diserahkan sehubungan dengan pinjaman bank ini. Berdasarkan perjanjian, Grup diwajibkan memenuhi kovenan tertentu seperti rasio *debt service* minimal 1 kali dan rasio *leverage* maksimal 300%. Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah memenuhi persyaratan kovenan tersebut.

The short-term bank loan represents revolving joint facility credit facility between Bank Mandiri and SENA, a subsidiary of PGASSOL. The loan will be used to finance project operations. This loan is effective until August 15, 2024 and bears interest at JIBOR + 1.3%. No collateral are pledged against this bank loan. Based on the agreement, the Group is required to comply with several covenants such as minimum debt service ratio of 1x asnd maximum leverage ratio of 300%. As of December 31, 2023, the Group has complied with all covenants requirements.

Selama tahun 2023, SENA telah melakukan penarikan utang bank sebesar IDR50.000.000.000 (setara dengan USD3.258.552), dan telah melakukan pelunasan sebagian utang sebesar IDR10.000.000.000 (setara dengan USD647.711).

During 2023, SENA has made bank loan drawdown amounted to IDR50,000,000,000 (equivalent to USD3,258,552) and has partially repaid such loan amounted to IDR10,000,000,000 (equivalent to USD647,711).

b. Pinjaman bank jangka panjang / *b. Long-term bank loans*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Two-step loans			***Two-step loans***
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	220.290.287	243.779.082	*Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")*
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	13.322.401	18.253.934	*International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")*
Pihak berelasi			***Related-party loans***
Bank Mandiri	74.008.798	-	*Bank Mandiri*
BRI	74.008.798	-	*BRI*
Jumlah pinjaman pihak berelasi	148.017.596	-	*Total related party loans*
Pihak ketiga			***Third-party loans***
PT Bank OCBC NISP	74.008.798	-	*PT Bank OCBC NISP*
DBS Indonesia	15.000.000	45.000.000	*DBS Indonesia*
PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")	89.008.798	45.000.000	*PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")*
Jumlah pinjaman pihak ketiga	178.017.596	90.000.000	*Total third party loans*
Jumlah pinjaman	**559.647.880**	**352.033.016**	***Total loans***
Bagian jangka pendek	39.689.089	16.718.211	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	519.958.791	335.314.805	*Long-term portion*

19. PINJAMAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan) / *Long-term bank loans (continued)*

Two-step loans merupakan pinjaman jangka panjang yang diorganisir oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diteruskan ke Grup.

Two-step loans represent long-term loans organized by the Government of the Republic of Indonesia and passed through to the Group.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facility* (mata uang asal/*original currency*)	Periode pinjaman/ *Loan term*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Pembatasan pinjaman/ *Debt covenants*
JBIC	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	*Principal* I: 45.335.142.633 *Principal* II: 3.203.219.503	28 Mei/ *May* 2003 - 20 Maret/ *March* 2043	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (20 Maret/*March* dan/*and* 20 September)	*Principal* I: 1,30% *Principal* II: 1,1%	Tidak ada/*None*
IBRD	Dolar AS/ *US Dollar*	*Principal* I: 41.709.099 *Principal* II: 20.055.983	3 April/ *April* 2006 - 15 Februari/ *February* 2026	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (15 Februari/*February* dan/*and* 15 Agustus/ *August*)	*Principal* I: 5,48% *Principal* II: Tingkat bunga IBRD + 1% / IBRD rate *plus 1%.*	*Debt to equity ratio 70:30* *Debt to service ratio: minimal 1,5x*
DBS Indonesia & BTPN	Dolar AS/ US Dollar	*Principal* I: 120.000.000	10 Desember/ *December* 2021 - 10 Desember/ *December* 2026	Bulanan/ *Monthly*, Triwulanan/ *Quarterly* Setengah tahunan/ *Semiannually (10 Juni/June* dan/and 10 Desember/ *December)*	*Principal* I: JIBOR atau SOFR ditambah margin/ *JIBOR or SOFR plus margin*	*EBITDA to Interest payable: min 3x* *Net debt to net tangible worth: max 2x*
Mandiri, BRI, BTPN, OCBC	Dolar AS/ US Dollar	*Principal* I: 300.000.000	9 Mei/ May 2023 -9 Mei/ May 2028	Triwulanan/ *Quarterly*	Principal I: *SOFR + 1,35%*	*Gross Debt to Equity*: *max* 2,3x *Debt to service ratio minimal 1,3x*

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003) / *JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003)*

Pada tanggal 27 Maret 2003, JBIC menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan JPY49.088.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga masing-masing untuk JBIC A dan JBIC B sebesar 0,95% dan 0,75% per tahun. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

On March 27, 2003, JBIC agreed to provide a loan to the Government for a total aggregate amount equivalent to JPY49,088,000,000 to assist the Government in financing the development of a gas transmission pipeline from South Sumatera to West Java and a distribution pipeline in West Java. This loan is subject to an interest rate for JBIC A and JBIC B of 0.95% and 0.75% per annum, respectively. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

Pada tanggal 28 Mei 2003, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1156/DP3/2003, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari JBIC ini dengan jumlah tidak melebihi JPY49.088.000.000 kepada Perusahaan.

On May 28, 2003, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1156/DP3/2003, which provides for the Government's relending of the JBIC loan proceeds not exceeding JPY49,088,000,000 to the Company.

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank panjang (lanjutan)

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003) (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar JPY1.591.118.000 (setara dengan USD11.320.805).

2. IBRD (Perjanjian No. SLA-1201/DP3/2006)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 7 Februari 2006, IBRD menyetujui memberikan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan USD80.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai Proyek Pengembangan Pasar Gas Domestik. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5,48% untuk IBRD A dan tingkat suku bunga IBRD ditambah margin sebesar 1% per tahun for IBRD B.

Pada tanggal 3 April 2006, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan hasil pinjaman dari IBRD sebesar USD80.000.000 kepada Perusahaan yang akan melaksanakan Proyek. Pada bulan Desember 2011, jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi USD69.381.312. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar USD4.931.533.

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

1. JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003) (continued)

During the year ended December 31, 2023, the Company has already paid installments amounted to JPY1,591,118,000 (equivalent to USD11,320,805).

2. IBRD (Agreement No. SLA-1201/DP3/2006)

Based on the loan agreement dated February 7, 2006, IBRD agreed to provide a lending facility to the Government in an aggregate amount equivalent to USD80,000,000 to assist the Government in financing the Domestic Gas Market Development Project. This loan is subject to interest of 5.48% for IBRD A and IBRD interest rate plus a margin of 1% per annum for IBRD B.

On April 3, 2006, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement, which provides for the Government's relending of the IBRD loan proceeds of USD80,000,000 to the Company, which shall undertake the Project. In December 2011, the total facilities were amended to USD69,381,312. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

As of December 31, 2023, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

During the year ended December 31, 2023, the Company has already paid installments amounted to USD4,931,533.

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

3. DBS Indonesia dan BTPN

Pada tanggal 30 November 2021, Pertagas menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *club deal* berjangka dengan PT Bank BTPN Tbk dan PT Bank DBS Indonesia. Pinjaman ini untuk pendanaan belanja modal Pertagas dengan nilai sebesar USD135.000.000. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Pertagas.

Penambahan pinjaman dilakukan melalui mekanisme *dropping* dana dengan *dropping* dana pertama dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021, senilai USD103.000.000. Jangka waktu pinjaman 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama dilakukan, yaitu bulan Desember 2026.

Pada tanggal 27 Mei 2022, Pertagas melakukan penarikan fasilitas pinjaman senilai USD17.000.000. Fasilitas tersisa yang belum ditarik telah dibatalkan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Pertagas diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan dan batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Pertagas telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran dipercepat angsuran sebesar USD60.000.000.

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

3. DBS Indonesia and BTPN

On November 30, 2021, the Company and Pertagas entered into a club deal facility loan agreement with PT Bank BTPN Tbk and PT Bank DBS Indonesia. This loan will be used for financing of Pertagas capital expenditures amounting to USD135,000,000. There is no collateral of this bank loan that the Pertagas must submit.

Additional drawdowns of the loan are performed through a cash call mechanism with the first drawdown on 10 December 2021 amounted to USD103,000,000. The loan terms are 60 months after the first drawdown date, that is the loan will be due in December 2026.

On May 27, 2022, Pertagas has withdrawn the credit facility in amount of USD17,000,000. The remaining undrawn facilities has been cancelled.

As specified by the loan agreement, Pertagas is required to comply with covenants, such as financial ratio covenants and no substantial change in the general business.

As of December 31, 2023, Pertagas has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

During the year ended December 31, 2023, the Company made early repayment amounted to USD60,000,000.

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

4. *Club Deal* (Mandiri, BRI, BTPN, dan OCBC)

Pada tanggal 9 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *club deal* berjangka dengan PT Bank Mandiri. (Persero) Tbk., Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank BTPN Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk. dengan total fasilitas pinjaman sebesar USD800.000.000. Pinjaman ini untuk pendanaan *Liability Management* dengan nilai sebesar USD300.000.000. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman senilai USD300.000.000.

Pada 28 Desember 2023 PGN telah melakukan amandemen pertama dengan memperpanjang periode ketersediaan dari sebelumnya 180 hari setelah tanda tangan perjanjian menjadi sampai dengan 30 Juni 2024.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan belum melakukan pembayaran pokok.

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

4. Club Deal (Mandiri, BRI, BTPN, dan OCBC)

On May 9, 2023, the.Company entered into a club deal facility loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank BTPN Tbk and PT Bank OCBC NISP Tbk. in which he total loan facility amounted to USD800,000,000. This loan will be used for financing of Liability Management amounting to USD300,000,000. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

On May 30, 2023, The Company has withdrawn the credit facility in amount of USD300,000,000.

On December 28, 2023, PGN has made the first amendment by extending the availability period from 180 days after signing the agreement to June 30, 2024.

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants, no substantial change in the general business.

As of December 31, 2023, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

During the year ended December 31, 2023, the Company has not made any principal.

19. PINJAMAN (lanjutan) / *19. LOANS (continued)*

c. Fasilitas yang belum digunakan / *c. Unused facilities*

Berikut ini adalah fasilitas yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2023:

Below are unused facilities as of December 31, 2023:

Bank	Jenis fasilitas/*Types of facilities*	Akhir periode/ *End of period*	Pembatasan/ *Covenants*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Sisa fasilitas/ *Remaining facilities*
Pihak berelasi/ *Related parties*:					
Bank Mandiri	*Standby Letter of Credit* ("SBLC"), Bank Garansi ("BG"), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), dan *Letter of Credit* ("L/C")/ *Standby Letter of Credit ("SBLC"), Bank Guarantee ("BG"), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") and Letter of Credit ("L/C")*	15 Agustus/ *August* 2024	*Debt service ratio > 1,3x Leverage ratio: 300%*	70.000.000	16.401.877
Bank Mandiri	*Revolving Joint Credit Facility*	15 Agustus/ *August* 2024/	*Debt service ratio: min 1,3x Leverage ratio: 300%*	32.285.142	32.285.142
BNI	SBLC, BG, SKBDN, dan/*and* L/C	18 Desember/ *December* 2023	*Current ratio: min 1,0x Debt to equity ratio: min 3,0x EBITDA to interest: 200%*	140.000.000	132.763.755
BRI	SBLC dan/*and* BG	5 April/ *April* 2024	Tidak ada/*None*	250.000.000	108.425.801
Pihak ketiga/ *Third party*:					
Bank ANZ Indonesia	SBLC dan/*and* BG atau/*or revolving credit facility*	18 Desember/ *December* 2023	Tidak ada/*None*	40.000.000	20.744.200
PT Bank BTPN Tbk	*Revolving Joint Credit Facility*	*31* Juli/ *July* 2023 *Dalam proses perpanjangan/ In renewal process*	*Debt service ratio: 1,3x Debt to equity ratio max 233%*	32.285.142	32.285.142
PT Bank BTPN Tbk	*Revolving uncommitted credit facility atau/or SBLC* dan/*and BG*	*31* Juli/ *July* 2023 *Dalam proses perpanjangan/ In renewal process*	*Debt service ratio: 1,3x Debt to equity ratio: max 233%*	80.000.000	80.000.000
PT Bank DBS Indonesia	*Revolving Joint Credit Facility*	30 Juni/ *June* 2024	Tidak ada/*None*	48.427.714	48.427.714
Citibank Indonesia	SLBC dan/*and* BG	*As noticed*	Tidak ada/*None*	50.000.000	50.000.000

20. UTANG OBLIGASI / *20. BONDS PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Senior Unsecured Fixed Rate Notes			***Senior Unsecured Fixed Rate Notes***
Nilai nominal	396.709.000	950.000.000	*Nominal value*
Diskonto	(3.820.308)	(13.000.500)	*Discount*
Biaya penerbitan	(1.659.481)	(5.486.632)	*Issuance cost*
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	5.215.681	16.107.202	*Amortisation of discount and issuance cost*
Nilai tercatat	396.444.892	947.620.070	*Carrying value*
SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*			***SEI Senior Unsecured Fixed Rate Notes***
Nilai nominal	156.252.000	376.252.000	*Nominal value*
Biaya penerbitan	(1.682.774)	(5.938.548)	*Issuance cost*
Amortisasi biaya penerbitan	1.618.897	5.181.428	*Amortisation of issuance cost*
Nilai tercatat	156.188.123	375.494.880	*Carrying value*
Jumlah utang obligasi	**552.633.015**	**1.323.114.950**	***Total bonds payable***
Bagian jangka pendek	552.633.015	-	*Current portion*
Bagian jangka panjang	-	1.323.114.950	*Non-current portion*

a. *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan USD1.350.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,037%. Wali amanat atas obligasi ini adalah *The Bank of New York Mellon*.

Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,125% per tahun yang terhutang setengah tahunan setiap tanggal 16 Mei dan 16 November, dimulai pada tanggal 16 November 2014. Obligasi ini dicatatkan pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. Dana dari obligasi diterima pada tanggal 16 Mei 2014 dan dipergunakan untuk penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya. Berdasarkan *Moody's Investors Services* dan *Fitch Rating*, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa2 dan BBB- per tanggal 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan obligasi ini, Perusahaan dibatasi dalam melakukan konsolidasi, penggabungan usaha, mengalihkan, menyewakan, atau menjual semua atau sebagian besar asetnya. Tidak ada jaminan atas obligasi ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

a. Senior Unsecured Fixed Rate Notes

On May 12, 2014, the Company issued USD1,350,000,000 of Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will be due on May 16, 2024, with an issue price of 99.037%. The trustee of these bonds is The Bank of New York Mellon.

These bonds bear an interest rate of 5.125% per annum payable semiannually on May 16, and November 16, starting on November 16, 2014. These bonds were listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The bonds proceeds were received by the Company on May 16, 2014 and were used for additional working capital and other general corporate purposes. Based on Moody's Investors Services and Fitch Rating, as of December 31, 2023, the bonds were rated at Baa2 and BBB-, respectively.

In relation to these bonds, the Company is restricted in conducting consolidation, merger, transfer, lease or disposal of all or substantially all of it assets. There is no collateral of this bonds that the must be pledged by the Company.

As of December 31, 2023, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

a. *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* (lanjutan)

Nilai wajar dari utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah USD395.399.860 dan USD942.770.500. Nilai wajar ini dihitung menggunakan harga penawaran dan merupakan level 1 pada hirarki nilai wajar.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali obligasi sebesar USD553.291.000 (2022 : USD400.000.000).

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali sebagian obligasi sebesar USD953.291.000 (2022 : USD400.000.000) dengan metode *open market purchase* dan *tender offer*.

b. SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*

Pada tanggal 26 April 2017, SEI menerbitkan USD625.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 100%. Wali amanat atas obligasi ini adalah Citicorp International Limited. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 4,45% per tahun yang terhutang setengah tahunan setiap tanggal 5 Mei dan 5 November, dimulai pada tanggal 5 November 2017. Obligasi ini dicatatkan pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*.

Dana dari obligasi diterima pada tanggal 5 Mei 2017 dan dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi, mendanai aktivitas investasi, aktivitas akuisisi, penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya. Berdasarkan Moody's Investors Services dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah B2 dan B+ pada tanggal 31 Desember 2023.

SEI tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang obligasi ini.

Sehubungan dengan obligasi ini, SEI dibatasi dalam melakukan konsolidasi, penggabungan usaha, mengalihkan, menyewakan, atau menjual semua atau sebagian besar asetnya. Tidak ada jaminan atas obligasi ini yang harus diserahkan SEI.

Pada tanggal 31 Desember 2023, SEI telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

20. BONDS PAYABLE (continued)

a. Senior Unsecured Fixed Rate Notes (continued)

The fair value of the bonds payable as of December 31, 2023 and 2022 was USD395,399,860 and USD942,770,500, respectively. The fair value is calculated using the bid price which is within level 1 of the fair value hierarchy.

During the year ended December 31, 2023, the Company repurchased bonds amounting to USD553,291,000 (2022 : USD400,000,000).

Until December 31, 2023, Company has repurchased a portion of the bonds amounted to USD953,291,000 (2022 : USD400,000,000) at par using the open market purchase and tender offer method.

b. SEI Senior Unsecured Fixed Rate Notes

On April 26, 2017, SEI issued USD625,000,000 of Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will be due on May 5, 2024, with an issue price of 100%. The trustee of these bonds is Citicorp International Limited. These bonds bear interest of 4.45% per annum payable semi annually on May 5, and November 5, starting on November 5, 2017. These bonds were listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

The bonds proceeds were received on May 5, 2017 and were used to refinance syndicated loans, finance capital expenditures, acquisition activities, working capital requirements and other general corporate purposes. Based on Moody's Investor Service and Fitch Rating, the bonds were rated B2 and B+, respectively, as of December 31, 2023.

SEI is not required to make sinking fund payments with respect to these bonds.

In relation to these bonds, SEI is restricted in conducting consolidation, merger, transfer, lease or disposal of all or substantially all of it assets. There is no collateral of this bonds that must be pledged by SEI.

As of December 31, 2023, SEI has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan) / *20. BONDS PAYABLE (continued)*

b. SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* (lanjutan) / *b. SEI Senior Unsecured Fixed Rate Notes (continued)*

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, SEI telah melakukan pembelian kembali obligasi sebesar USD220.000.000 (2022 : USD248.748.000 sebelum dikurangi diskon pembelian kembali sebesar USD4.440.071).

During the year ended December 31, 2023, the Company repurchased bonds amounting to USD220,000,000 (2022 : USD248,748,000 before deducting the repurchase discount of USD4,440,071).

Sampai dengan 31 Desember 2023, SEI telah melakukan pembelian kembali sebagian obligasi sebesar USD468.748.000 (2022 : USD248.748.000 sebelum dikurangi diskon pembelian kembali sebesar USD4.440.071) dengan metode *tender offer*.

Until December 31, 2023, SEI has repurchased a portion of the bonds USD468,748,000 (2022 : USD248,748,000 before deducting the repurchase discount of USD4,440,071) using the tender offer method.

Nilai wajar dari utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD154.866.045 dan USD360.581.104 Nilai wajar ini dihitung menggunakan harga penawaran dan merupakan level 1 pada hirarki nilai wajar.

The fair value of the bonds payable as of December 31, 2023 and 2022 was USD154,866,045 and USD360,581,104 respectively. The fair value is calculated using the bid price which is within level 1 of the fair value hierarchy.

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak / *a. Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pajak penghasilan pasal 21	121.690	-	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 22	1.998	-	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	910.437	2.144.064	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 24	10.065.979	1.962.411	*Income tax article 24*
Pajak penghasilan pasal 28a	31.916.221	32.776.580	*Income tax article 28a*
Pajak pertambahan nilai	24.486.245	39.706.955	*Value added tax*
Total	**67.502.570**	**76.590.010**	***Total***

Bagian lancar dan tidak lancar Pajak dibayar di muka dan Taksiran Tagihan Pajak adalah sebagai berikut: / *Current and non-current portion of prepaid taxes and estimated claims for tax refund are as following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Bagian lancar	15.999.792	22.669.848	*Current portion*
Bagian tidak lancar	51.502.778	53.920.162	*Non-current portion*
Total	**67.502.570**	**76.590.010**	***Total***

Lihat Catatan 21f untuk pembahasan mengenai taksiran tagihan pajak. / *See Note 21f for discussion of claims for tax refund.*

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pajak penghasilan pasal 4(2)	680.091	1.227.337	*Income tax article 4(2)*
Pajak penghasilan pasal 21	4.036.111	4.455.393	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 22	17.772	723.847	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	3.962.117	4.483.264	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 24	1.804.767	483.900	*Income tax article 25*
Pajak penghasilan pasal 25 dan 29	16.797.725	29.942.638	*Income tax article 25 and 29*
Pajak pertambahan nilai	6.299.373	9.385.932	*Value added tax*
Pajak *first tranche petroleum (FTP)*	57.321.373	130.241.300	*First tranche petroleum (FTP)*
Lainnya	3.095	822.656	*Others*
Total	**90.922.424**	**181.766.267**	**Total**
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(33.601.051)	(51.524.967)	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	57.321.373	130.241.300	*Long-term portion*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	2022	
Kini			*Current*
Perusahaan	10.727.833	49.015.736	*The Company*
Entitas anak	78.800.856	72.299.507	*Subsidiaries*
Subtotal	89.528.689	121.315.243	*Subtotal*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	21.688.411	(18.232.767)	*The Company*
Entitas anak	36.054.008	38.279.244	*Subsidiaries*
Subtotal	57.742.419	20.046.477	*Subtotal*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**147.271.108**	**141.361.720**	***Consolidated Income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

Pajak atas laba sebelum pajak Grup berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian dalam jumlah sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	523.887.009	542.704.261	*Consolidated profit before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	145.838.369	183.163.851	*Tax calculated at applicable tax rate*
Dampak pajak penghasilan dari:			*Income tax effect from:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	50.128.951	56.971.167	*Non-deductible expenses*
Perubahan asset pajak tangguhan yang tidak diakui	9.285.387	(40.408.070)	*Changes in unrecognised deferred tax assets*
Bagian laba dari ventura bersama	(32.293.228)	(48.869.138)	*Share of profit from joint ventures*
Penghasilan tidak kena pajak dan dikenai pajak final	(25.688.371)	(6.282.743)	*Income subject to final tax*
Pembalikan provisi dari Sengketa pajak	-	(1.614.094)	*Reversal of provision - for Tax Disputes*
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	2.985.000	*Prior year adjustments*
Penyesuaian saldo awal akibat perubahan kebijakan	-	(4.584.253)	*Beginning balance adjustments due to policy changes*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**147.271.108**	**141.361.720**	***Consolidated income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak, seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax, as shown in consolidated profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	523.887.009	542.704.261	*Consolidated profit before income tax*
Ditambahkan/(dikurangi):			*Added/(deducted) by:*
Laba sebelum pajak entitas anak	(337.710.252)	(357.839.010)	*Profit before tax of subsidiaries*
Penyesuaian konsolidasian	123.548.514	188.589.684	*Consolidation adjustments*
Laba sebelum beban pajak Perusahaan	309.725.271	373.454.935	*Profit before tax expense of the Company*
Beda temporer:			***Temporary differences:***
Provisi atas penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu	(90.356.869)	52.467.193	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas*
Penyisihan (pembayaran) bonus dan insentif	2.839.508	(1.080.432)	*Allowance (payment) of bonus and incentives*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	12.234.311	(3.473.242)	*Allowance (payment) of bonus and incentives*
Provisi atas kontrak LNG	11.689.711	56.850.817	*Provision for LNG Contract*
Penyisihan piutang	(6.712.205)	-	*Receivable impairment*
Aset hak guna dan liabiltas sewa	(217.437)	(143.070)	*Right of use assets and lease liability*
Beban penyusutan	(50.338.753)	(32.786.983)	*Depreciation Expense*
Sub-total	(120.861.734)	71.834.283	*Sub-total*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Beban pajak dan sanksi	27.602.495	-	*Tax and penalty expense*
Beban sewa pembiayaan (PSAK 73)	-	-	*Financial lease Expense (PSAK 73)*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	27.824.759	51.064.422	*Non - deductible expenses*
Pembalikan provisi sengketa pajak - neto	-	(8.495.234)	*Reversal of provision for tax disputes - net*
Penghasilan yang dikenakan pajak final - neto	(17.864.151)	(13.210.696)	*Income subject to final tax - net*
Bagian laba anak perusahaan dan ventura bersama	(169.964.360)	(216.669.149)	*Share of profit from subsidiaries and joint ventures*
Sub-total	(132.401.257)	(187.310.657)	*Sub-total*
Estimasi laba kena pajak	56.462.280	257.978.458	*Estimated taxable income*
Beban pajak kini - Perusahaan	**10.727.833**	**49.015.737**	***Current tax expense - the Company***
Dikurangi pembayaran pajak dimuka - Perusahaan			*Less prepaid taxes - Company*
Pasal 22	(6.365.089)	(6.252.836)	*Article 22*
Pasal 23	(4.609.548)	(4.380.845)	*Article 23*
Pasal 25	(8.105.152)	(26.053.032)	*Article 25*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	(8.351.956)	12.329.024	*Underpayment of corporate income tax - the Company*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Entitas anak	16.263.653	6.585.307	*Underpayment of corporate income tax - Subsidiaries*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Konsolidasian	**7.911.697**	**18.914.331**	*Underrpayment of corporate income tax – Consolidated*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU 7/2021), Pemerintah Indonesia menyesuaikan tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan seterusnya (tidak berlaku untuk Perusahaan dan SEI).

Berdasarkan UU tersebut, Perusahaan dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 19% untuk tahun pajak 2022 dan 2023. Tarif pajak ini berlaku untuk Perusahaan karena Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i) Lebih dari 40% modal disetor Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh publik; dan

ii) Modal saham tersebut dimiliki lebih dari 300 individual, masing-masing memiliki kurang dari 5% saham;

iii) Seluruh persyaratan diatas sudah terpenuhi sejak awal tahun (lebih dari 183 hari).

Pada tanggal 4 Januari 2024 dan 4 Januari 2023 Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria di atas untuk tahun pajak 2023 dan 2022.

Entitas anak yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 44% sampai 48% dan di luar Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 35%.

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Based on Law No. 7/2021 regarding Harmonisation of Tax Regulations (Law 7/2021), the Government of Indonesia adjusted the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and onward (except for the Company and SEI).

Based on the above Law, the Company is entitled to a corporate income tax rate of 19% for the fiscal year 2022 and 2023. This tax rate is applicable to the Company after the Company fulfills the following requirements:

i) More than 40% of the Company's paid-up shares listed for trading on the Indonesian Stock Exchange are held by the public; and

ii) Those shares are owned by more than 300 individuals, each holding less than 5% of the paid-in shares;

iii) All criteria above shall have been fulfilled since the beginning of year (more than 183 days).

On January 4, 2024 and January 4, 2023 the Company obtained the notification letter from the Securities Administration Agency regarding the fulfillment of such criteria for fiscal years 2023 and 2022.

The subsidiaries involved in oil and gas exploration and production in Indonesia are subject to income tax at rates of 44% to 48% and outside Indonesia are subject to income tax at a rate of 35%.

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

The tax effects of significant temporary differences between commercial and tax reporting are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2023*	Reklasifikasi Pajak/ *Reclassification*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	*Dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	19.839.453	-	2.324.517	(584.881)	21.579.089	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	8.447.177	-	539.506	-	8.986.683	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.720.590	-	(1.275.319)	-	6.445.271	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(9.076)	-	(41.313)	-	(50.389)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 89/91 dan 134/135	32.023.318	-	(17.167.805)	-	14.855.513	*Provision for implementation of Kepmen 89/91 and 134/135*
Aset tetap	(21.358.343)	-	(9.564.361)	-	(30.922.704)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak memberatkan	10.801.655	-	2.221.045	-	13.022.700	*Provision of onerous contract*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(8.249.721)	-	1.275.319	-	(6.974.402)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**49.305.693**	**-**	**(21.688.411)**	**(584.881)**	**27.032.401**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	53.915.685	-	(6.562.710)	-	47.352.975	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	413.744	-	23.618.432	-	24.032.176	*Allowance for impairment losses*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	1.816.603	-	(1.084.374)	-	732.229	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Pencadangan piutang	7.250.958	-	4.363.273	-	11.614.231	*Allowance receivables*
Cadangan persediaan	9.990.678	-	(9.990.678)	-	-	*Allowance for inventory*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	3.772.659	-	1.635.264	(576.862)	4.831.062	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	468.465	-	561.412	-	1.029.877	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	(4.294.223)	-	7.457.332	-	3.163.109	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	27.770.337	-	(572.021)	-	27.198.316	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	7.289.739	-	(38.063.984)	-	(30.774.245)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(9.877.067)	-	3.147.085	-	(6.729.982)	*Oil and gas properties*
Lain-lain	-	-	1.919.153	-	1.919.153	*Others*
Aset pajak tangguhan	**98.517.568**	**-**	**(13.571.814)**	**(576.862)**	**84.368.901**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	160.707	-	(29.413)	-	131.294	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(7.354.983)	-	(617.543)	-	(7.972.526)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	78.294	-	35.817	-	114.111	*Allowance for inventory obsolescence*
Cadangan kerugian penurunan piutang	-	-	(68.800)	-	(68.800)	*Allowance for receivable impairment*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.459.312	-	264.391	(257.987)	1.465.715	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	(5.881.845)	-	1.536.852	-	(4.344.993)	*Asset abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	118.098.643	-	(77.485.457)	-	40.613.186	*Tax loss carry forward*
Implementasi PSAK 73	4.131.799	-	-	-	4.131.798	*Implementaion of PSAK 73*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(4.989.243)	-	5.577.560	-	588.317	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(199.356.513)	-	49.068.116	-	(150.288.397)	*Oil and gas properties*
Lain - lain	-	-	(763.717)	-	(763.717)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(93.653.829)**	**-**	**(22.482.194)**	**(257.987)**	**(116.394.012)**	***Deferred tax liabilities***
Beban manfaat pajak tangguhan konsolidasian		**-**	**(57.742.417)**	**(1.419.730)**		***Consolidated deferred tax expense***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**147.823.261**				**111.401.302**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(93.653.829)**				**(116.394.012)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	1 Januari/ *January 1, 2022*	Dampak perubahan Tarif/ reklas pajak *Impact of changes in tax rate/reclass*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/*Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	15.399.481	4.584.253	(659.916)	515.635	19.839.453	*Post employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	8.652.459	-	(205.282)	-	8.447.177	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.720.590	-	-	-	7.720.590	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	-	-	(27.183)	-	(27.183)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 89/91 dan 134/135	22.054.551	-	9.968.767	-	32.023.318	*Provision for implementation of Kepmen 89/91 and 134/135*
Aset tetap	(15.128.816)	-	(6.229.527)	-	(21.358.342)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak Memberatkan	-	-	10.801.655	-	10.801.655	*Provision of onerous contract*
Lain-lain	-	-	-	18.107	18.107	*Others*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(8.249.721)	-	-	-	(8.249.721)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**30.539.184**	**4.584.253**	**13.648.514**	**533.742**	**49.305.693**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	56.669.435	-	(2.753.750)	-	53.915.685	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	740.854	-	(327.110)	-	413.744	*Allowance for impairment losses*
Implementasi PSAK 73	1.157.948	-	658.655	-	1.816.603	*Implementation of PSAK 73*
Pencadangan piutang	-	-	7.250.958	-	7.250.958	*Allowance receivables*
Cadangan kerugian persediaan usang	2.076	-	9.988.602	-	9.990.678	*Allowance for inventory obsolence*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	4.818.052	-	(1.038.349)	(7.044)	3.772.659	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	338.024	-	130.441	-	468.465	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	11.412.464	-	(15.706.687)	-	(4.294.223)	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	60.841.697	-	(33.071.360)	-	27.770.337	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(30.134.491)	-	37.424.223	-	7.289.739	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(14.091.282)	-	4.214.215	-	(9.877.067)	*Oil and gas properties*
Aset pajak tangguhan	**91.754.777**	**-**	**6.769.836**	**(7.044)**	**98.517.568**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	24.658	-	136.049	-	160.707	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(6.511.075)	-	(843.908)	-	(7.354.983)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	136.691	-	(58.397)	-	78.294	*Allowance for inventory obsolescence*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.175.569	-	182.127	101.616	1.459.312	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	5.040.131	-	(10.921.976)	-	(5.881.845)	*Assets abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	260.584.174	-	(142.485.531)	-	118.098.643	*Tax loss carry forward*
First tranche petroleum	(150.925.604)	150.925.602	-	-	-	*First tranche petroleum*
Implementasi PSAK 73	2.809.529	-	1.322.270	-	4.131.799	*Implementation of PSAK 73*
Liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui	-	-	(4.989.243)	-	(4.989.243)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(311.966.040)	-	112.609.527	-	(199.356.513)	*Oil and gas properties*
Liabilitas pajak tangguhan	**(199.631.967)**	**150.925.602**	**(45.049.082)**	**(101.616)**	**(93.653.829)**	***Deferred tax liabilities***
Beban manfaat pajak tangguhan konsolidasian		**155.509.855**	**(38.279.246)**	**425.082**		***Consolidated deferred tax expense***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**122.293.961**				**147.823.262**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(199.631.967)**				**(93.653.829)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo liabilitas pajak tangguhan Blok Pangkah adalah sebesar USD61.888.153. Berdasarkan analisis manajemen atas realisasi pajak tangguhan Blok Pangkah, liabilitas pajak tangguhan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2029 setelah PSC Gross Split efektif.

e. Rugi pajak

Entitas anak Grup memiliki rugi pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak masa depan. Perusahaan tidak memiliki rugi pajak.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. SEI memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Beberapa entitas anak SEI belum mencapai posisi *equity to be split* sehingga masih mengakumulasikan kerugian fiskal.

21. TAXATION (continued)

d. Deferred tax (continued)

As of December 31, 2023, the balance of Pangkah Block's deferred tax assets totalled USD 61.888.153. Based on management's analysis of deferred tax realisation for Pangkah Block, the deferred tax assets will be realised in 2029 after the PSC Gross Split is effective.

e. Tax losses

Subsidiaries of the Group had tax losses that can be used as deductions from future taxable income. The Company has no tax losses.

The tax losses can be utilised against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the tax loss was incurred. SEI believes that it is not probable that future taxable profit will be available to utilise accumulated tax losses before their expiry. SEI's subsidiaries have not reached the equity to be split position and are therefore still accumulating tax losses.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP")

Grup menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dan memiliki sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Perusahaan

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat diterima/ *Period letter received*	Jumlah kurang bayar (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment (in million Rupiah)*	Jumlah kurang bayar (dalam Dolar AS)/ *Amount of underpayment (in USD)*	Status/*Status*
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2012	SKPKB	Januari/ *January* 2017	3.258.454	211.053.449	1)
PPN atas penjualan gas/ *VAT for gas sales*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	892.062	57.779.831	2)
PPh 26/ *Income tax article 26*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	146	9.451	3)
PPh Badan/ *Corporate Income tax*	2015	SKPKB	April/ *April* 2017	272.234	18.176.818 6)	4)
PPh Badan/ *Corporate Income tax*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	188.799	12.605.936 6)	5)

Keterangan:
1) Kalah di Mahkamah Agung untuk 9 kasus, Perusahaan mengajukan PK dan diputus N.O. Menang untuk 3 kasus, DJP mengajukan PK kedua dan sudah diputus dengan hasil PK kedua NO.
2) Kalah di Mahkamah Agung untuk 9 kasus, Perusahaan mengajukan PK dan 6 permohonan diputus N.O, 3 permohonan belum diputus. Menang untuk 3 kasus, DJP mengajukan PK kedua dan sudah diputus dengan hasil PK kedua NO.
3) Perusahaan memenangkan keputusan banding dan saat ini Direktorat Jendral Pajak ("DJP") telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
4) MA menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh DJP, tanggal keputusan 14 Agustus 2023
5) DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. MA telah memutuskan untuk menolak Peninjaukan Kembali dari DJP
6) Nilai asli dalam Dolar Amerika Serikat

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP")

The Group received underpayment tax assessment letters ("SKPKB") from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia - Directorate General of Taxation ("DGT") and has outstanding tax disputes in the Tax Court and the Supreme Court, as follows:

The Company

Remarks:
1) Unfavourable decision at Supreme Court for 9 cases, the Company submitted PK decided by N.O. Favourable decision for 3 cases DGT submitted second PK and and decided as N.O.
2) Unfavourable decision at Supreme Court for 9 cases, the Company submitted PK and 6 application were decided by N.O, 3 application have not been decided. Favourable decision for 3 cases DGT submitted second PK and and decided as N.O.
3) Appeal results in favour of the Company and Directorate General of Tax ("DGT") has submitted judicial review.
4) Supreme Court rejected DGT's request for judicial review, decision dated August 14, 2023.
5) DGT has submitted judicial review. The Supreme Court had decided to reject the judicial review from DGT.
6) Original currency in US Dollars

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Januari dan Februari 2017, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan 18 Surat Tagihan Pajak sebesar IDR414 miliar karena Perusahaan dinilai belum menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan gas bumi periode 2012-2013.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah memenangkan sengketa pajak PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di Pengadilan Pajak. DJP telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan Perusahaan telah mengajukan kontra memori terhadap permohonan tersebut.

Pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak karena Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang menguntungkan Perusahaan, bahwa penjualan gas bumi tidak dikenakan PPN, sehingga nilai Surat Tagihan Pajak nihil.

Pada triwulan keempat 2020, Perusahaan kalah atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (18 perkara dari 24 perkara). Sengketa PPN terkait dengan gas bumi yang dijual seharusnya dikenakan PPN menurut pandangan DJP. Dari total IDR3,25 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR892 miliar (untuk tahun 2013), Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan kalah untuk Perusahaan sebesar IDR2,4 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR666 miliar (untuk tahun 2013). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencatat beban sengketa pajak sebesar IDR4,2 triliun (setara dengan USD278,4 juta) dan USD15,9 juta sebagai kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi dan mencatat provisi sengketa pajak sebesar USD294,3 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

In January and February 2017, the Directorate General of Taxes ("DGT") issued 18 Tax Collection Letters of IDR414 billion because the Company was considered to not have issued Tax Invoices on the sale of natural gas for the period of 2012-2013.

In 2019, the Company obtained favourable decisions of VAT tax disputes for 2012 and 2013 at the Tax Court. The DGT has submitted judicial review requests to the Supreme Court and the Company has submitted contra memory on the judicial review requests.

In December 2019 and January 2020, the DGT issued 18 Reduction Decisions on Tax Collection Letter because the Tax Court issued a favorable decision for the Company, that the sale of natural gas was not subject to VAT, so the value of Tax Collection Letters was nil.

In the fourth quarter of 2020, the Company received unfavourable decisions for its VAT disputes for years 2012 and 2013 at the Supreme Court level (18 cases out of 24 cases). The VAT disputes were related to gas sold which should be subject to VAT according to the DGT's point of view. From the total of IDR3.25 trillion (for year 2012) and IDR892 billion (for year 2013), the Supreme Court has issued its written decisions which were unfavourable for the Company of IDR2.4 trillion (for year 2012) and IDR666 billion (for year 2013). For the year ended December 31, 2020, the Company has recorded tax dispute expenses of IDR4.2 trillion (equivalent to USD278.4 million) and USD15.9 million as loss on foreign exchange in the statement of profit or loss and recorded a provision for tax disputes of USD294.3 million as of December 31, 2020.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada 6 Mei 2021 dan 16 September 2021, Perusahaan menang atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (4 perkara dari 6 perkara yang keputusannya belum keluar di 31 Desember 2020). Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan menang untuk Perusahaan sebesar IDR859 miliar (untuk tahun 2012) dan IDR78 billion (untuk tahun 2013). Untuk sisa sengketa sejumlah IDR148 billion (untuk tahun 2013), perkara tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada bulan Maret 2022.

Pada bulan Mei dan Juni 2022, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Perubahan atas Surat Tagihan Pajak karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan bagi Perusahaan, bahwa penjualan gas bumi dikenakan PPN. Surat Perubahan DJP telah melewati batas waktu pemungutan pajak. Selain itu, Perusahaan juga telah mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 21 April 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR937 miliar (setara dengan USD65,1 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR148 miliar (setara dengan USD10,3 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas 18 kasus untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp IDR3 triliun atas keputusan MA yang mengabulkan permohonan PK dari DJP. Selain itu DJP mengajukan PK kedua atas 6 putusan sebesar IDR1 triliun, dimana putusan MA menolak permohonan PK DJP.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

On May 6, 2021 and September 16, 2021, the Company received favourable decisions for its VAT disputes for 2012 and 2013 at the Supreme Court level (4 cases out of 6 cases pending decision on December 31, 2020). The Supreme Court has issued its written decisions which were favourable for the Company of IDR859 billion (for year 2012) and IDR78 billion (for year 2013). For the remaining disputed amount of IDR148 billion (for 2013), the cases were decided by the Supreme Court on March 2022.

In May and June 2022, DGT issued 18 Amendment Letter of Reduction Decisions on Tax Collection Letter because the Supreme Court issued an unfavorable decision for the Company, that the sale of natural gas was subject to VAT. The DGT's Amendment Letter is over the due of the tax collection period. Besides that, the Company has also filed further legal action against the Supreme Court Decision on April 21, 2022.

For the year ended December 31, 2021, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR937 billion (equivalent to USD65.1 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR148 billion (equivalent to USD10.3 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has submitted a PK to the Supreme Court for 18 cases for 2012 and 2013 in the amount of IDR 3 trillion based on the Supreme Court decision which granted the PK request from the DGT. In addition, DGT submitted a second PK of 6 decisions in the amount of IDR1 trillion, where the Supreme Court's decision rejected the DGT's PK application.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Per 31 Desember 2023, 15 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Perusahaan telah membayar senilai USD27.599.264 atas seluruh Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN tahun 2012 dan 2013 pada tanggal 25 Agustus, 7 September, dan 27 September 2023 dan telah membebankannya ke laba rugi konsolidasian.

SEI

SEI dan anak perusahaannya menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

As of December 31, 2023, 15 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are dicided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by supreme court. The Company has paid amounted USD27,599,264 for all VAT Tax Collection Letters ("STP") for 2012 and 2013 on August 25, September 7, and September 27, 2023 and expensed to consolidated profit or loss.

SEI

SEI and its subsidiaries received several SKPKBs as follows:

Perusahaan/ *Company*	Beban pajak Terkait/ *related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat Diterima/ *period letter received*	Jumlah yang disengketakan termasuk sanksi (dalam dolar AS)/ *Disputed amount including penalty (in USD)*	Status/*Status*
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2013	KEP	28 Feb/ *Feb* 2020	3.527.998[3]	Banding/*Appeal*
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2015	KEP	6 Okt/Oct 2019	1.689.746	Banding/*Appeal*
SESSL	Pajak penghasilan badan/ Corporate income tax	2014	Putusan Mahkamah Agung/ *Supreme Court Decision*	13 Mar/*Mar* 2023	237.190[3]	Kalah di Mahkamah Agung/*Unfavourable decision at the Supreme Court* [1]
SESSL	PPh Pasal 26 (4)/ *Income tax Article 26 (4)*	2014	Putusan Mahkamah Agung/ *Supreme Court Decision*	16 Des/*Dec* 2022	11.887.654	Kalah di Mahkamah Agung/*Unfavourable decision at the Supreme Court* [1]
SESSL	PPh Pasal 26 (4)/ *Income tax Article 26 (4)*	2015	Putusan Pengadilan Pajak/ *Tax Court Decision*	17 Mar/*Mar* 2021	4,331,929	Banding diterima/ *Appeal granted* [2]
SESSL	PPh Pasal 4 (2)/ *Income tax Article 4 (2)*	2018	KEP	4 Mei/*May* 2021	7,967[4]	Banding/*Appeal*
SEBB	PPh Pasal 4 (2)/ *Income tax Article 4 (2)*	2018	KEP	21 Feb/*Feb 2022*	329[3]	Banding/*Appeal*

Keterangan:
1) Perusahaan memenangkan keputusan banding dan saat ini Direktorat Jendral Pajak ("DJP") telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
2) DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali
3) Nilai asli dalam Rupiah
4) Permohonan banding ditolak oleh pengadilan pajak

Remarks:
1) Appeal results in favour of the Company and Directorate General of Tax ("DGT") has submitted judicial review.
2) DGT has submitted judicial review
3) Original currency in IDR
4) Appeal is rejected by tax court.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 26 (4)

Pada bulan Oktober 2019, SEI telah kalah dalam sengketa pajak atas SPLLC terkait PPh Pasal 26 (4) di Pengadilan Pajak. SEI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan mencatat taksiran tagihan pajak sebesar USD39.684.338 (termasuk 100% penalti) di laporan posisi keuangan 31 Desember 2020.

Pada bulan Desember 2020, SEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 4943/B/PK/Pjk/2020 yang memenangkan SEI dalam sengketa pajak atas SPLLC terkait PPh Pasal 26 (4). SEI telah menerima pengembalian pokok sengketa pajak pada 8 Juli 2021 sebesar IDR287,6 miliar (atau setara USD19.842.140). SEI juga telah menerima pengembalian atas denda STP kenaikan 100% dari DJP sebesar IDR295,2 miliar (atau setara USD19.842.140) pada 14 Oktober 2022.

Pada September 2021, SEI melalui entitas anak SESSL menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB tahun pajak 2014 atas sengketa Pajak penghasilan pasal 26(4). Pada Desember 2022, SEI telah menerima seluruh pengembalian dana sebesar IDR170.017.227.364 (setara USD10.803.662).

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan Tax Treaty oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

Pada Maret 2023, SESSL menerima putusan kalah Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. SESSL menerima Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar USD11.887.654. SESSL telah membayar pajak tersebut pada 13 April 2023.

Pada Maret 2021, SESSL juga menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB Pasal 26 ayat (4) atas tahun pajak 2015 sebesar IDR62.466.416.180. Pada Desember 2022, Grup telah menerima pengembalian dana sebesar IDR62.341.601.281 (setara USD3.961.467). Grup mencatat taksiran tagihan pajak PPh Pasal 4(2) tahun 2018 sebesar IDR122.995.467 (setara USD7.819) dan membebankan selisihnya pada laba rugi tahun berjalan.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 26 (4)

In October 2019, the SEI received an unfavourable decision on the SPLLC income tax article 26 (4) dispute at the Tax Court. SEI has submitted a judicial review request to the Supreme Court and recorded the estimated claims for tax refund amounting to USD39,684,338 (including 100% penalty) in the statement of financial position as of December 31, 2020.

In December 2020, the Supreme Court accepted the judicial review for tax article 26(4) with the result No.4943/B/PK/Pjk/2020. The Group partially received the tax refund for the principal amount on July 8, 2021 amounting to Rp287.6 billion (equivalent to US$19,842,140). SEI also has received refund of STP on 100% penalty from DGT amounting to IDR295,2 billion (or equivalent to USD19,842,140) on October 14, 2022.

In September 2021, SEI on SESSL received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2014 of dispute on Income Tax Article 26(4). In December 2022, SEI received the tax refund amounting to IDR170,017,227,364 (equivalent to USD10,803,662).

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously BPEK).

In March 2023, SESSL received unfavourable decision from Supreme Court. SESSL received Letter of Implementation on Supreme Court Decision with tax amount to be paid USD11,887,654. SESSL has paid the tax on April 13, 2023.

In March 2021, SESSL also received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2015 of dispute on Income Tax Article 26(4) amounting to IDR62,466,416,180. In December 2022, The Group received the tax refund amounting to IDR62,341,601,281 (equivalent to USD3,961,467). The Group record claim for tax refund of Tax Art 4(2) year 2018 amounting to IDR122,995,467 (equivalent to USD7,819) and charged the remaining difference to tax expense in current year statement of profit or loss.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan *Tax Treaty* oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

Pajak penghasilan badan

Pada bulan Desember 2018, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sebesar IDR54.638.102.020 (setara dengan USD3.538.276). SEI telah mengajukan banding pada bulan Agustus 2020.

Pada bulan Agustus 2019, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 sebesar USD1.689.746. SEI telah mengajukan banding pada bulan Desember 2020.

Sampai pada tanggal laporan ini, SEI masih menunggu hasil banding. SEI tidak mencatat provisi untuk sengketa pajak ini.

Pada September 2021, SEI melalui entitas anak SESSL menerima putusan menang banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB tahun pajak 2014 atas sengketa Pajak penghasilan badan SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BP East Kalimantan Ltd ("BPEK")). Pada Desember 2022, SEI telah menerima pengembalian dana atas sengketa tersebut sebesar IDR3.392.291.380 (setara USD215.562).

Pada Mei 2023, SESSL menerima putusan kalah Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. SESSL menerima Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar USD237.190. SESSL telah membayar pajak tersebut pada 27 Juni 2023.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously BPEK).

Corporate income tax

In December 2018, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax of 2013 amounting to IDR54,638,102,020 (equivalent to USD3,538,276*). SEI has submitted an appeal in August 2020.*

In August 2019, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax year 2015 amounting to USD1,689,746. SEI has submitted an appeal in December 2020.

Up to the date of this report, SEI is still waiting for the appeal result. SEI has not recorded any provision for these tax disputes.

In September 2021, SEI on SESSL received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2014 of dispute on Corporate Income Tax SESSL, prior owned by SEI (previously BP East Kalimantan Ltd ("BPEK")). In December 2022, SEI received the tax return for such dispute amounting to IDR3,392,291,380 (equivalent to USD215,562).

In May 2023, SESSL received unfavourable decision from Supreme Court. SESSL received Letter of Implementation on Supreme Court Decision with tax amount to be paid USD237.190. SESSL has paid the tax on June 27, 2023.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 4 (2) (pajak pengalihan) atas restrukturisasi *sub-holding* gas oleh Pemerintah

SESSL

Pada Januari 2020, SEI melalui entitas anak SESSL menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2). Pada Maret 2020, SEI mengirimkan surat kepada KPP Migas sehubungan dengan pengurangan nilai kurang bayar pajak dengan mempertimbangkan porsi hutang pajak. Pada Agustus 2020, DJP menolak permintaan SEI atas pengurangan/pembebasan denda administrasi perpajakan. Pada April dan September 2020, SEI membayar kekurangan pajak tersebut masing-masing sebesar IDR4.025.774.676 dan IDR1.690.825.364.

Pada April 2021, SEI telah menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") PPh 4(2) tahun 2018 sebesar IDR124.814.899 sehubungan dengan denda administrasi dari pembayaran pajak sebelumnya. Pada Mei 2021, SEI menyampaikan Permohonan Pembebasan Denda Pajak sehubungan dengan STP tersebut. Pada Oktober 2021, DJP menyampaikan surat nomor KEP-02902/NKEB/WPJ.07/2021 yang menolak permohonan tersebut. Pada November 2021, SEI menyampaikan Kembali Permohonan Pembebasan Denda Pajak tersebut.

Pada Maret 2022, SEI menerima surat nomor KEP-00482/NKEB/WPJ.07/2022 yang menolak permohonan tersebut. SEI mencatat taksiran tagihan pajak sebesar IDR122.995.467 (setara USD8.186) dan membebankan selisihnya pada laba rugi tahun berjalan. Pada April 2022, SEI menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Pada bulan November 2023, SESSL menerima Keputusan Pengadilan Pajak No.PUT-003514.99/2022/PP/M.VIIIB tanggal 25 Oktober 2023 yang menolak permohonan banding. Grup mencatat IDR122.995.467 (setara dengan USD7.967) sebagai beban pada laporan laba rugi tahun berjalan.

SEBB

Pada Januari 2020, SEI melalui entitas anak SEBB telah menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2) sebesar IDR1.220.899.561 dan denda administrasi sebesar IDR512.777.816 atas perubahan Hak Kepemilikan. Pada Maret 2020, SEI telah menyampaikan surat kepada DJP sehubungan dengan pengurangan denda pajak menjadi sebesar IDR120.098.389 yang telah dibayar pada 1 April 2020.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 4 (2) (transfer tax) from sub-holding gas restructuring by the Government

SESSL

In January 2020, SEI on SESSL received Tax Underpayment Assessment Letter related to Tax Art 4(2). In March 2020, SEI filed a letter to KPP Migas in relation to reduction of tax underpayment by considering portion of payables. In August 2020, DGT rejected SEI request for tax reduction/waiver on administration penalty request. In April and September of 2020, SEI paid the Tax Underpayment amounting to IDR4,025,774,676 and IDR1,690,825,364 respectively.

In April 2021, SEI received Tax Collection Letter of Tax Art 4(2) of 2018 amounting to IDR124,814,899 related to previous payment of administration penalty. In May 2021, SEI file Tax Penalty Waiver Request in relation to the Tax Collection Letter. In October 2021, DGT released KEP-02902/NKEB/WPJ.07/2021 which rejected the request. In November 2021, SEI file another Tax Penalty Waiver Request.

In March 2022, SEI received KEP-00482/NKEB/WPJ.07/2022 which rejected the request. The Group recorded IDR122,995,467 (equivalent to USD8,186) as claim for tax refund and charged the remaining to current year statement of profit or loss. In April 2022, SEI filed appeal to Tax Court.

In November 2023, SESSL received Tax Court Decision No.PUT-003514.99/2022/PP/M.VIIIB dated October 25, 2023 which rejected the appeal request. The Group recorded IDR122,995,467 (equivalent to USD7,967) as expense to current year statement of profit or loss.

SEBB

In January 2020, SEI on SEBB received Tax Underpayment Assessment Letter related to Tax Art 4(2) amounting to IDR1,220,899,561 and administration penalty amounting to IDR512,777,816 on changes in Participating Interest. In March 2020, SEI filed a letter to DGT in relation to reduction of tax penalty to IDR120,098,389 which is paid on April 1, 2020.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

SEBB (lanjutan)

Pada Agustus 2020, SEI telah menerima surat nomor KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 mengenai pengurangan sebagian denda pajak menjadi sebesar IDR201.577.206. Pada September 2020, SEI telah membayar sisanya sebesar IDR81.478.817.

Pada Agustus 2021, Perusahaan telah menerima STP sebesar IDR5.084.444 (atau setara USD329) sehubungan dengan denda administrasi dari pembayaran pajak sebelumnya. Pada September 2021, SEI menyampaikan Permohonan Pembebasan Denda Pajak sehubungan dengan STP tersebut.

Pada November 2021, DJP menyampaikan surat nomor KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 yang menolak permohonan tersebut. Pada Desember 2021, Grup menyampaikan kembali Permohonan Pembebasan Denda Pajak tersebut.

Pada 21 Februari 2022, SEI menerima surat nomor KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 yang menolak permohonan tersebut. Pada Maret 2022, SEI menyampaikan surat Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Pengadilan Pajak belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa resolusi dari sengketa pajak yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

SEBB (continued)

In August 2020, SEI received KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 which partially agreed to reduce tax penalty to IDR201,577,206. In September 2020, SEI paid the remaining difference of IDR81,478,817.

In August 2021, The Company received Tax Collection Letter amounting to IDR5,084,555 (equivalent to USD329) related to previous payment of administration penalty. In September 2021, SEI file Tax Penalty Waiver Request in relation to the Tax Collection Letter.

In November 2021, DGT released KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 which rejected the request. In December 2021, The Group filed another Tax Penalty Waiver Request.

On February 21, 2022, SEI received KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 which rejected the request. In March 2022, SEI filed objection letter to Tax Court. As of the completion date of the financial statements, the Tax Court has not yet issued decisions on the appeal.

Management believes that the resolution of the ongoing tax disputes will not have a material impact on the Group's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Pertagas

Pertagas menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima /*Letter received*	Periode surat diterima/ *Period of letter received*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment including penalty (in millions of Rupiah)*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam Dolar AS)/ *Amount of underpayment including penalty (in thousands of USD)*	Status/*Status*
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2014	SKPKB	Februari/ *February* 2019	65,099	4,175	2)
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	69,299	4,000	3)
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	6,503	421	3)
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2016	SKPKB	Desember/ *December* 2020	20,534	1,330	3)

1) Mata uang asli dalam dolar AS
2) Peninjauan kembali
3) Banding dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak, pengembalian sudah diterima, namun DJP mengajukan peninjauan kembali

Sampai dengan 31 Desember 2023, Manajemen telah membukukan provisi pajak atas sengketa pajak sebesar USD4.389.662. Manajemen berkeyakinan bahwa sengketa pajak yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

Pertagas

Pertagas received several SKPKBs as follows:

1) Original currency in US dollar
2) Judicial Review
3) Appeal was partially granted by the tax court, the refund has received, but tax office filed a judicial review

As of December 31, 2023. Management has recorded a tax provision of USD4.389.662*. Management is of the opinion that the ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the Group's financial position and cash flows.*

22. IMBALAN KERJA / *22. EMPLOYEE BENEFITS*

Akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari: / *Current employee benefits liabilities account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Akrual gaji dan bonus karyawan	67.426.456	57.005.126	*Employee salaries and bonus accruals*
Porsi jangka pendek atas liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan jangka Panjang lainnya	8.438.030	9.254.525	*Short-term portion of liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Total	**75.864.486**	**66.259.651**	***Total***

Akun liabilitas imbalan kerja jangka Panjang terdiri dari: / *Long-term employee benefits liabilities account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya setelah dikurangi porsi jangka pendek	**136.120.605**	**122.971.619**	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits - net of short-term portion*

a. Akrual gaji dan bonus karyawan / *a. Employee salary and bonus accruals*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Perusahaan	47.456.573	41.036.565	*The Company*
Entitas anak	19.969.883	15.968.561	*Subsidiaries*
Total	**67.426.456**	**57.005.126**	***Total***

b. Tunjangan kesehatan hari tua / *b. Post-retirement health care benefits*

Perusahaan menyediakan tambahan tunjangan kesehatan hari tua bagi seluruh karyawan tetap, para pensiunan dan mantan direksi yang ditetapkan oleh perjanjian bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 3% dan 6% dari penghasilan dasar.

The Company provides additional post-retirement health care benefits for its eligible permanent employees, retired employees and ex-members of the board of directors, as covered in a cooperative agreement with Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 3% and 6% of basic income, respectively.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

c. Imbalan pensiun iuran pasti / *c. Defined contribution pension plan*

Sejak Februari 2009, Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia dan Bringin Jiwa Sejahtera yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002000.K/KP.05/UM/2009 tanggal 6 Februari 2009. Dana pensiun ini didirikan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan masing-masing dalam Surat Keputusannya No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 dan No. KEP.184/KM.17/1995. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 4,55% dan 14,07% dari penghasilan dasar pensiun. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban untuk program pensiun iuran pasti ini adalah masing-masing sebesar USD 2.644.493 dan USD1.983.581.

Since February 2009, the Company established a defined contribution plan for all of its eligible permanent employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia and Bringin Jiwa Sejahtera, the establishment of which was approved based on Director's Decision Letter No. 002000.K/KP.05/UM/2009, dated February 6, 2009. Both pension plans were established based on the approval from the Ministry of Finance in its Decision Letters No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 and No. KEP.184/KM.17/1995. The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 4.55% and 14.07%, respectively, of the basic Pension income. For the year then ended December 31, 2023 and 2022, pension expenses for this defined contribution plan were USD2,644,493 and USD1,983,581 respectively.

d. Imbalan kerja jangka panjang / *d. Long-term employee benefits*

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan PKB yang dibandingkan dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003), mana yang lebih tinggi.

The Group provides long-term employees' benefits to its employees in accordance with the CLA and Labour Law No. 13 year 2003 (Law No. 13/2003), whichever is higher.

Saldo kewajiban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The balance of employee benefits obligations recognised in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	158.968.432	144.148.098	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Aset Program	(14.409.797)	(11.921.954)	*Plan Asset*
Liabilitas neto	**144.558.635**	**132.226.144**	***Net liabilities***
Dikurangi porsi jangka pendek	(8.438.030)	(9.254.525)	*Less short-term portion*
Porsi jangka panjang, neto	**136.120.605**	**122.971.619**	***Long term-portion, net***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan mengakui sejumlah alokasi kewajiban terkait imbalan-imbalan kerja yang diberikan oleh Pertamina kepada Pekerja Perbantuannya yang diperbantukan di Perusahaan. Alokasi kewajiban ini meliputi seluruh imbalan kerja yang berlaku di Pertamina yaitu Dana Pensiun Pertamina ("DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP") dan Kesehatan Pasca Pensiun. Akumulasi alokasi kewajiban pekerja perbantuan yang telah dicatat pada periode selama masa perbantuan sampai dengan berakhir masa perbantuan, akan tetap dicatat di Perusahaan dengan nilai Kewajiban yang tetap (*freeze liability*) dan tidak akan berubah karena faktor apapun di masa mendatang. Kewajiban tersebut tidak akan dipindahbukukan ke Pertamina kecuali pada saat pekerja perbantuan tersebut berakhir hubungan kerjanya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, alokasi kewajiban karyawan perbantuan Pertamina adalah sebesar USD370.915.

Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka Panjang lainnya yang diakui oleh Perusahaan meliputi program Tunjangan Purna Bakti, Masa Persiapan Pensiun dan Imbalan Kesetiaan Kerja.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The Company acknowledged an amount of allocations of obligations related to employee benefits provided by the Pertamina to its Assigned Employees who are seconded in the Company. This liability allocation covers Dana Pensiun Pertamina ("the DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP"), and Post Retirement Healthcare. Accumulated allocation of assigned employee's liabilities that have been recorded during the period of assignment until the end of the assignment period will be recorded in the Company amounted to a fixed amount of Liability (freeze liability) and will not change due to any factors in the future. This obligation will not be transferred to the Pertamina, except when the secondee employee's employment period has been ended.

As of December 31, 2023, the allocated liabilities of Pertamina's secondee employees is amounted to USD370,915.

Post-employment and other long-term benefit recognized by the Company consists of Post-employment benefits, Pension Retirement Program and Jubilee Program.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perhitungan program imbalan pasca kerja Perusahaan pada pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya pada 15 Februari 2024 dan 10 Februari 2023.

Aset program SEI terdiri dari kas dan setara kas yang seluruhnya dialokasikan ke pasar uang. Aset Program SEI dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja dan liabilitas jangka panjang lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The calculation of the Company's Employees Benefit Program as of December 31, 2023 and 2022 were performed by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, based on its reports dated February 15, 2024 and February 10, 2023, respectively.

SEI's plan assets consist of cash and cash equivalents wholly allocated to money market. SEI's plan assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

The movement in the post-employment and other long-term benefit over the year is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	**144.150.099**	**137.258.382**	***Present value of liability - beginning of the year***
Biaya (penghasilan) yang diakui di laba rugi - neto:			*Expenses (income) recognized in profit or loss – net:*
- Biaya jasa kini	8.092.475	3.755.572	*- Current service cost*
- Beban bunga atas liabilitas	7.451.152	3.318.594	*- Interest expense on liability*
- Dampak selisih kurs dan penyesuaian lainnya	1.569.886	(73.495)	*Impact of foreign exchange and other adjustments*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:			*Remeasurement of defined benefit liability - net*
- Perubahan asumsi ekonomi	4.093.046	(1.170.476)	*Economic assumptions change*
- Penyesuaian pengalaman	(1.354.336)	3.173.653	*Experience adjustments*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(5.033.890)	(2.112.131)	*Benefit paid for the current year*
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	**158.968.432**	**144.150.099**	***Present value of liability - end of the year***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / ***d. Long-term employee benefits (continued)***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program SEI adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of plan assets of SEI

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai wajar aset program - awal tahun	**11.923.954**	**9.599.950**	***Fair value of plan assets - beginning of the year***
Pembayaran iuran program oleh pemberi kerja	3.126.844	2.002.271	*Payment of program contribution from the employer*
Penghasilan keuangan aset program	171.760	731.058	*Finance income of plant asset*
Dampak selisih kurs	(812.761)	(409.325)	*Impact of foreign exchange*
Nilai wajar aset program - akhir tahun	**14.409.797**	**11.923.954**	***Fair value of plan assets - end of the year***

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pasca kerja dan liabilitas jangka panjang lain - neto yang diakui oleh Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation of post-employment and other long-term benefit - net recognized by the Group are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai - akhir tahun	158.968.432	144.148.098	*Present value of unfunded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas yang didanai - akhir tahun	(14.409.797)	(11.921.954)	*Present value of funded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas neto- akhir tahun	**144.558.635**	**132.226.144**	***Present value of net liability - end of the year***

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lain adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining expenses and liabilities for post employment benefit and other long-term benefit are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Tingkat diskonto aktuaria	6,55%-6,70% per tahun/ *per annum*	7,50%-7,75% per tahun/ *per annum*	*Actuarial discount rate*
Tingkat kematian (mortalitas)	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Kenaikan gaji	10% di tahun pertama dan 6% di tahun berikutnya/ *10% in the first year and 6% in the following years*	10% di tahun pertama dan 6% di tahun berikutnya/ *10% in the first year and 6% in the following years*	*Salary increment*
Umur pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	*Disability rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Rata-rata tertimbang durasi program

Pada tanggal 31 Desember 2023, rata-rata tertimbang durasi kewajiban adalah 11,43 tahun.

Penyesuaian pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

Rincian penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

Weighted average program duration

As of December 31, 2023, the weighted average duration of the liability are 11.43 years.

Experience adjustments to defined benefit obligation

Details of experience adjustments to the present value of the defined benefit obligation for the year ended December 31, 2023, and for the years ended December 31, 2022, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2019	2020	2021	2022	2023	
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	1.051.468	(9.914.607)	(5.413.617)	3.171.653	(1.173.341)	*Experience adjustment on plan liabilities*

Tidak ada penyesuaian pengalaman atas nilai wajar aset program karena aset program ditempatkan pada deposito berjangka.

There is no experience adjustment on fair value of plan assets as the assets are placed in time deposits.

Analisis sensitivitas

Sensitivitas liabilitas secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan gaji adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis

Sensitivity of the overall liability to changes in the discount rate and salary increase rate assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	Dampak terhadap liabilitas/ *Impact on liability*	
31 Desember 2023			***December 31, 2023***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD13,4 juta/*million* naik/*increase by* USD13,6 juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD14,1 juta/*million* turun/*decrease by* USD14,1 juta/*million*	*Salary increase rate*
31 Desember 2022			***December 31, 2022***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD6 juta/*million* naik/*increase by* USD19 juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD20 juta/*million* turun/*decrease by* USD7 juta/*million*	*Salary increase rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pascakerja) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi utama aktuaria yang digunakan sama dengan asumsi penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas asset

Dalam memenuhi kewajiban imbalan kerja, Grup menggunakan dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan investasi pada obligasi Negara dan obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara parsial dengan kenaikan dari nilai obligasi Perusahaan yang dimiliki.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the post-employment benefit obligation) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

The actuarial assumptions used are the same as the calculation of post-employment benefit obligation.

e. Risk management related to employee benefit program

The Group is exposed to a number of risks through its post-employment benefit and other long-term benefits. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

In order to fulfill the Group's employment benefit obligations, the Group uses funds generated from its operations and invested in government and corporate bonds listed on the Indonesian Stock Exchange.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the Company's bond holdings.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA / *23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS*

Mutasi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area adalah sebagai berikut:

The movement in asset abandonment and site restoration obligations is presented below:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal	108.322.308	128.033.268	*Beginning balance*
Penambahan	34.043.355	-	*Addition*
Beban akresi	6.837.736	2.497.152	*Accretion cost*
Penyesuaian karena perubahan estimasi dan lainnya	(2.513.078)	(22.208.112)	*Adjustment due to change in estimates and others*
Saldo akhir	**146.690.321**	**108.322.308**	***Ending balance***

Sesuai dengan surat Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 perihal Penugasan kepada Perusahaan dan Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai pada tanggal 26 Februari 2019 dan surat Perusahaan No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 perihal Penugasaan Perusahaan kepada Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai tanggal 30 April 2019, Pertagas telah melakukan pembangunan Pipa Minyak Rokan Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai.

In accordance with a letter from Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 regarding the Assignment of Pertamina to Perusahaan and Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on February 26, 2019, and a letter from the Company No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 regarding the Assignment from the Company to Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on April 30, 2019, Pertagas has carried out the construction of the Rokan Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor.

Atas pembangunan pipa Rokan tersebut, Pertagas bermitra dengan PT Rukun Raharja, Tbk. (“RAJA”) dalam bentuk perjanjian KSO (Catatan 35w). Berdasarkan perjanjian kedua pihak sepakat untuk menerapkan provisi terkait kegiatan pasca operasi yang termasuk namun tidak terbatas pada pembongkaran pipa Rokan secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas-fasilitas terkait pipa Rokan lainnya, serta melakukan pemulihan lingkungan pipa Rokan. Pertagas dan RAJA juga menyepakati untuk mencatat liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dari aset tersebut sesuai dengan bagian partisipasi para pihak. Di tahun 2023, Pertagas mencatat penambahan liabilitas pembongkaran sebesar USD34.043.355 sesuai dengan bagian partisipasi Pertagas.

Regarding the construction of the Rokan pipeline, Pertagas partnered with PT Rukun Raharja, Tbk. ("RAJA") in form of JO agreement Agreement (Note 35w). Based on the agreement both parties agreed to implement provisions related to post-operation activities including but not limited to the permanent dismantling of the Rokan crude pipeline, cessation of operations, and removal of the capabilities of other related Rokan crude pipeline facilities, as well as environmental restoration of the Rokan pipeline. Pertagas and RAJA also agree to record the liabilities of asset dismantling and area restoration from this asset according to the respective parties' participation portion. In 2023, Pertagas records an additional liability for dismantling of USD34,043,355 according to the Pertagas participation portion.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA (lanjutan)

Provisi ini merupakan kewajiban Pertagas dan RAJA untuk pembongkaran aset pipa Rokan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat perjanjian pipa Rokan selesai.

Provisi diakui sebesar nilai kini atas beban pembongkaran yang akan terjadi di masa depan. Amortisasi diskonto yang merupakan dampak dari nilai waktu uang atas kewajiban pembongkaran aset ini diakui sebagai beban akresi.

Estimasi terkini untuk kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS (continued)

These provisions constitute the obligations of the Pertagas and RAJA for the dismantling of Rokan pipeline asset that will occur in the future when the Rokan crude pipeline agreement is completed.

The provisions are recognized at present value for future dismantling expenses. Discounted amortization, which is the impact of the time value of money on the asset dismantling obligations, is recognized as an accretion expense.

The current estimate for asset dismantling liabilities and area restoration is made by management. Management believes that the accumulated provisions are sufficient to cover all liabilities arising from area restoration activities and asset dismantling.

24. MODAL SAHAM DAN MODAL DISETOR LAINNYA / *24. SHARE CAPITAL AND OTHER PAID-IN CAPITAL*

a. Modal saham / *a. Share capital*

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

The details of the shareholders based on the report prepared by PT Datindo Entrycom, a Securities Administration Agency, are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Series A Dwiwarna Share Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B) Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Common Stock (Series B) Pertamina*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.432.469.440	43,03%	148.050.440	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

	31 Desember/*December 31, 2022*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Series A Dwiwarna Share Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B) Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Common Stock (Series B) Pertamina*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.432.469.440	43,03%	148.050.440	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

24. MODAL SAHAM DAN MODAL DISETOR LAINNYA (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak untuk mencalonkan direksi dan komisaris, menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi, perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Januari 2018 Pemerintah Indonesia telah mengalihkan 56,97% kepemilikan atas saham Perusahaan kepada Pertamina. Selain itu, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Perusahaan untuk:

- Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan;
- Mengangkat anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan calon anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan.

24. CAPITAL STOCKS AND OTHER PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Share capital (continued)

The Series A Dwiwarna share represents a share which provides the holder rights to propose directors and commissioners, attend and approve the appointment and dismissal of commissioners and directors, change in Articles of Association including changes in capital, closure and liquidation, merger and acquisition of the Company.

Series B shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 25, 2018 the Government of Indonesia transferred 56.97% ownership in the Company's shares to Pertamina. Furthermore, the Government of Indonesia as the owner of the Series A Dwiwarna share gave the authority to the Company's majority shareholder to do the following:

- *Change the Company's Articles of Association;*
- *Appoint members of the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose candidates for the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders; and*
- *Request and access the Company's data and documents.*

24. MODAL SAHAM DAN MODAL DISETOR LAINNYA (lanjutan) / *CAPITAL STOCKS AND OTHER PAID-IN CAPITAL (continued)*

b. Modal disetor lainnya / *Other paid-in capital*

Modal disetor lainnya terdiri dari: / *Other paid-in capital consists of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal	202.346.493	202.346.493	*Excess of proceeds over par value*
Dampak implementasi PSAK 65, "Laporan keuangan konsolidasian"	127.085.001	127.085.001	*Impact of PSAK 65, "Consolidated Financial Statements" implementation*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	(787.215.590)	(787.215.590)	*Difference arising from transactions among entities under common control*
Biaya emisi saham	(9.790.532)	(9.790.532)	*Share issuance cost*
Total	**(467.574.628)**	**(467.574.628)**	***Total***

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *NON-CONTROLLING INTERESTS*

Rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak adalah sebagai berikut: / *Details of non-controlling interests portion in equity and share of subsidiaries' net results are as follows:*

	31 Desember/*December* 31, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	827.206.227	100.437.673	-	(64.549.509)	863.094.391	*Pertagas*
PGN MAS	(21.323.317)	(1.917.670)	-	-	(23.240.987)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.690.451	4.719	-	-	1.695.170	*Others*
Jumlah	**807.573.361**	**98.524.722**	**-**	**(64.549.509)**	**841.548.574**	***Total***

	31 Desember/*December* 31, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	777.177.796	77.132.570	-	(27.104.139)	827.206.227	*Pertagas*
PGN MAS	(19.280.915)	(2.042.402)	-	-	(21.323.317)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.677.775	12.676	-	-	1.690.451	*Others*
Jumlah	**759.574.656**	**75.102.844**	**-**	**(27.104.139)**	**807.573.361**	***Total***

26. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk menyisihkan cadangan dari keuntungan wajib paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2023 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 14 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 9 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar USD326.239.697 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR3.419.350.889.793 (setara dengan USD 228.367.788) atau IDR141,05 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 37 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 27 Mei 2022, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2021 sebesar USD303.823.865 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR3.016.128.449.746 (setara dengan USD205.955.966) atau IDR124,42 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

26. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME

Under Indonesian Limited Company Law, the Company and each of its subsidiaries is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 30, 2023 which was notarised in the Notarial Deed No.14 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated June 9, 2023, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2022 financial year in the amount of USD326,239,697 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR3,419,350,889,793 (equivalent to USD228,367,788) or IDR141.05 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 27, 2022 which was notarised in the Notarial Deed No.37 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 27, 2022, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2021 financial year in the amount of USD303,823,865 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR3,016,128,449,746 (equivalent to USD205,955,966) or IDR124.42 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

27. PENDAPATAN / *27. REVENUES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PIHAK BERELASI			***RELATED PARTY***
Niaga gas bumi	684.630.037	826.703.452	*Gas trading*
Transmisi gas	189.725.314	180.378.067	*Gas transmission*
Pendapatan jasa regasifikasi	127.630.285	102.563.174	*Income from gas regasification*
Transportasi minyak	125.760.811	49.777.470	*Oil transportation*
Penjualan minyak dan gas bumi	81.024.054	139.103.422	*Crude oil and natural gas sales*
Pendapatan pemrosesan gas bumi	31.614.517	46.528.971	*Income from gas processing*
Lain-lain	7.475.471	-	*Others*
Subtotal	**1.247.860.489**	**1.345.054.556**	***Subtotal***
PIHAK KETIGA			***THIRD PARTY***
Niaga gas bumi	1.888.468.241	1.669.302.469	*Gas trading*
Penjualan minyak dan gas bumi	350.585.941	446.168.702	*Crude oil and natural gas sales*
Transportasi minyak	35.264.660	7.195.212	*Oil transportation*
Pendapatan pemrosesan gas bumi	34.596.367	25.890.051	*Income from gas processing*
Transmisi gas	25.351.629	26.538.740	*Gas transmission*
Jasa jaringan	22.442.463	22.593.723	*Network services*
Lain-lain	41.734.375	25.851.322	*Others*
Subtotal	**2.398.443.676**	**2.223.540.219**	***Subtotal***
Jumlah pendapatan	**3.646.304.165**	**3.568.594.775**	***Total revenues***

Pendapatan niaga gas bumi terdiri dari niaga gas kepada: / *Revenues from gas trading consists of natural gas sales to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pelanggan industri dan komersial	2.544.452.195	2.473.846.655	*Industrial and commercial customers*
Pelanggan rumah tangga	25.173.404	19.847.165	*Households customers*
SPBG	3.472.679	2.312.101	*SPBG*
Jumlah	**2.573.098.278**	**2.496.005.921**	***Total***

Penjualan minyak dan gas merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas Grup dari aktivitas hulu dari kerjasama operasi minyak dan gas. / *Crude oil and natural gas sales represent the Group's sales of oil and gas from upstream oil and gas joint operations.*

Penyediaan jaringan kepada para pelanggan merupakan pendapatan PGASKOM dengan menggunakan fiber optik. / *Network services to the customers represents PGASKOM's revenues by using the fiber optic.*

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan PGASSOL atas penyediaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa dan PGN MAS atas penyediaan jasa pengamanan, sewa kendaraan, dan perumahan kepada pelanggannya. / *Other revenue represents PGASSOL's revenue of pipeline construction and maintenance services and PGN MAS' revenue of security services, vehicle rental and housing to the customers.*

27. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) masing-masing sebesar USD530.672.823 atau 14,55% dan USD742.666.147 atau 20,81% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

27. REVENUES (continued)

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) amounting to USD530,672,823 or 14.55% and USD742,666,147 or 20.81% from total consolidated revenues for the nine-month period ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:

28. COST OF REVENUES

The components of cost of revenue based on their nature are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pembelian dan transmisi gas bumi			***Purchase and transmission natural gas***
Pihak ketiga	1.283.459.806	1.367.321.429	*Third parties*
Pihak berelasi	631.363.554	430.019.993	*Related parties*
Subtotal	1.914.823.360	1.797.341.422	*Subtotal*
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi			***Oil and gas upstream operations***
Beban penyusutan, deplesi dan amortisasi	246.535.411	328.984.153	*Depreciation, depletion and amortisation*
Beban produksi dan lifting	120.195.953	107.506.746	*Production and lifting costs*
Subtotal	366.731.364	436.490.899	*Subtotal*
LNG			***LNG***
Beban penyusutan	47.765.993	47.872.355	*Depreciation expenses*
Beban terkait LNG	15.831.612	15.575.073	*LNG related expenses*
Subtotal	63.597.605	63.447.428	*Subtotal*
Pemrosesan gas	27.688.510	40.390.599	***Gas processing***
Sewa dan jasa lainnya	28.082.897	16.958.934	***Rent and other services***
Beban niaga dan infrastruktur			***Trading and infrastructure expenses***
Penyusutan	162.920.221	147.581.266	*Depreciation*
Perbaikan dan pemeliharaan	77.498.149	65.267.709	*Repairs and maintenance*
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	75.177.433	77.293.659	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Jasa umum	67.686.113	37.308.049	*General services*
Sewa	37.408.438	42.633.457	*Rent*
Bahan bakar dan kimia	26.179.416	4.018.287	*Fuel and chemicals*
Iuran badan pengatur hilir minyak dan gas bumi	13.880.122	12.638.931	*Downstream oil and gas regulatory agency levy*
Amortisasi	8.691.979	8.693.407	*Amortisation*
Honorarium professional	7.304.095	4.210.709	*Professional fees*
Peralatan dan suku cadang	7.041.392	6.707.932	*Tools and spareparts*
Komunikasi	6.580.220	4.051.928	*Communication*
Perjalanan dinas dan transportasi	4.133.915	2.892.463	*Traveling and transportation*
Asuransi asset	3.126.889	4.544.084	*Asset insurance*
Survei dan studi	2.824.087	1.736.268	*Survey and study*
Pajak dan retribusi	2.083.033	3.738.234	*Tax and retributions*
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	1.916.673	1.946.966	*Corporate social and environmental responsibilty*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	7.348.776	8.159.722	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	511.800.951	433.423.071	*Subtotal*
Total beban pokok pendapatan	**2.912.724.687**	**2.788.052.353**	***Total cost of revenues***

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Pembelian neto dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari Pertamina dan entitas anaknya, masing-masing sebesar USD559.392.373 atau 15,34% dan USD394.172.413 atau 10,77% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Selain itu, pembelian neto dari pihak ketiga yang melebihi 10% jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari Medco E&P Grissik Ltd., masing-masing sebesar USD951.465.575 atau 26,08% dan USD982.970.266 atau 27,55% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

28. COST OF REVENUES (continued)

Net purchases from related parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from Pertamina and its subsidiaries, amounting to USD559,392,373 or 15.34% and USD394,172,413 or 10.77% of total consolidated revenues for the nine-month period ended December 31, 2023 and 2022, respectively. Meanwhile, net purchases from third parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from Medco E&P Grissik Ltd., amounting to USD951,465,575 or 26.08% and USD982,970,266 or 27.55% of total consolidated revenues for the nine-month period ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	104.045.408	92.953.564	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Pengelolaan Fasilitas	17.856.143	19.169.813	*Facilities management*
Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah	11.165.777	10.082.986	*Short-term leases and leases of low value assets*
Jasa umum	10.455.958	8.168.387	General services
Honorarium profesional	10.272.524	10.549.497	*Professional fees*
Penyusutan	9.505.799	8.717.958	*Depreciation*
Perjalanan dinas dan transportasi	6.020.488	4.852.235	*Traveling and transportation*
Perbaikan dan pemeliharaan	5.964.998	4.019.750	*Repairs and maintenance*
Cadangan Kerugian penurunan nilai	4.820.217	18.943.940	*Allowance for Impairment losses*
Representasi dan jamuan	4.202.670	2.965.477	*Representation and entertainment*
Pendidikan dan Pelatihan	2.963.088	3.166.392	*Education and training*
Tanggung jawab sosial Dan bina lingkungan	2.623.590	1.457.466	*Corporate social and environmental responsibility*
Pajak dan retribusi	2.506.488	1.846.953	*Tax and retributions*
Komunikasi	1.294.238	1.076.242	*Communication*
Amortisasi sewa lahan dan aset takberwujud	1.266.036	1.978.549	*Land rent and intangible asset amortization*
Asuransi Aset	1.182.771	2.480.405	*Asset insurance*
Survei dan studi	1.147.197	1.831.426	*Survey and study*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	4.426.764	4.403.049	*Others (each below US$1,000,000)*
Jumlah beban umum dan administrasi	**201.720.154**	**198.664.089**	***Total general and administrative expenses***

30. BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN / *30. FINANCE COST AND INCOME*

a. Beban keuangan / *a. Finance costs*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2023	2022	
Bunga utang obligasi	55.676.573	103.881.075	*Interest on bonds payable*
Beban bunga sewa pembiayaan	19.171.128	16.777.988	*Interest expenses on finance leases*
Bunga pinjaman dari pemegang saham	-	-	*Interest on shareholder loan*
Beban akresi	6.837.735	2.887.466	Accretion expense
Bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dari Pemerintah:			*Interest on two-step loans from the Government:*
- JBIC	2.910.092	3.351.908	*JBIC -*
- IBRD	1.101.558	1.123.233	*IBRD -*
Bunga pinjaman dari pinjaman bank:			*Interest on bank loans:*
- *Club Deal*	9.848.084	-	*Club Deal -*
- PT Bank DBS Indonesia	995.186	381.043	*PT Bank DBS Indonesia -*
- BTPN	995.186	381.043	*BTPN -*
Penyesuaian nilai wajar piutang lain-lain jangka panjang	92.612	3.663.774	*Fair value adjustment of other long-term receivables*
Jumlah beban keuangan	**97.628.154**	**132.447.530**	***Total finance costs***

b. Pendapatan keuangan / *b. Finance income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2023	2022	
Bunga jasa giro	29.292.738	12.883.537	*Interest from current accounts*
Bunga deposito	18.207.738	11.980.333	*Interest from time deposits*
Bunga investasi jangka pendek	963.557	1.537.633	*Interest from short-term investment*
Jumlah pendapatan keuangan	**48.464.033**	**26.401.503**	***Total finance income***

31. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN DAN SELISIH KURS

a. Pendapatan lain-lain

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan sewa, pendapatan jasa operasi, keuntungan dari pelepasan aset keuangan dan lain-lain.

b. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pajak final jasa konstruksi	4.431.308	5.141.037	*Final tax on construction services*
Lainnya	9.633.739	13.659.431	*Others*
Jumlah	**14.065.047**	**18.800.468**	***Total***

c. Laba/(rugi) selisih kurs

Laba/(rugi) selisih kurs terutama berasal dari translasi aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan perbedaan nilai tukar transaksi dari kegiatan usaha Grup dalam mata uang asing, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar dolar AS terhadap Yen Jepang dan Rupiah.

31. OTHER INCOME AND EXPENSES AND FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE

a. Other income

During the years ended December 31, 2023 and 2022, other income consists of rental income, income from service operation, gain from disposal of financial assets and others.

b. Other expenses

This account consists of the following:

c. Gain/(loss) on foreign exchange

Gain/(loss) on foreign exchange mainly results from translation of assets and liabilities in foreign currencies and differences in exchange rates on the Group's operational transactions denominated in foreign currencies, primarily due to changes in the exchange rate of the US dollar against the Japanese Yen and Rupiah.

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pembelian kembali saham Perusahaan yang dilakukan selama tahun berjalan.

32. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period including buyback of the Company's shares made during the year.

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (lanjutan) / *32. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	278.091.179	326.239.697	*Net income attributable to owners of the parent*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	24.241.508.196	24.241.508.196	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**0,0115**	**0,0135**	***Basic earnings per share (full amount)***

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group did not have any dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023 and 2022.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties***	**Transaksi/ *Transactions***
Pemerintah Republik Indonesia/*Government of the Republic of Indonesia*	Pemegang saham utama/*Ultimate parent*	Pembayaran dividen, penerusan pinjaman dan debitur obligasi/*Payment of dividends, two-step loans and debtor of bonds*
Pertamina	Pemegang saham langsung/*Immediate parent*	Debitur obligasi, penjualan dan pembelian minyak dan gas bumi, dan pinjaman dari pemegang saham/*Debtor of bonds, purchase and sale of oil and gas, and loan from shareholder*
PT Bank Raya Indonesia Tbk ("BRI Agro")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ Subsidiaries of State-Owned Enterprises ("SOEs") controlled by the Government	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transactions*
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash Loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line*/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing facility, Treasury Line facility*
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas kredit investasi/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, investment credit facility*
BRI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas *Standby Letter of Credit*, fasilitas bank garansi dan fasilitas penangguhan jaminan impor/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, Standby Letter of Credit Facility, bank guarantee facility and guarantee of suspension of import facility*
BSI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya/*Placement of unrestricted time deposits*
BTN Syariah	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro/*Placement of current accounts*
PHE dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Pertamina EP	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Uang muka pembelian gas bumi, pemasok gas, pelanggan, uang muka *ship-or-pay* pemasok gas, Pelanggan/*Advance of take or pay, gas supplier, customer, advance of ship or pay gas supplier, Customer*
PLN, PT Barata Indonesia (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	Pelanggan/*Customers*
PT Wijaya Karya Intrade, PT Wijaya Karya Beton, PT Krakatau Steel	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of State-Owned Enterprises ("SOEs") controlled by the Government*	Pelanggan/*Customers*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transactions*
PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petrogas Jatim Utama, Kaltim Methanol Industri,	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan minyak dan gas/*Oil and gas customers*
PT Pertamina Drilling Service, PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Patra Niaga, PT Tugu Pratama, PT Elnusa Tbk, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok/*Suppliers*
PT Kilang Pertamina Internasional	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok dan Pelanggan/ *Supplier and Customer*
PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Persero)	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	Pemasok/*Suppliers*
Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Perjanjian Kerja Sama Operasional Kilang LNG Arun/*Operational Cooperation Agreement of Arun LNG Plant*
PT PLN Batam, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja, PKG, PT Patra Logistik	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan transmisi dan niaga gas/*Gas transmission and trading customer*
PT Aneka Tambang Tbk, PT Pegadaian (Persero)	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	Debitur obligasi/*Bond debtors*
PT Nusantara Regas	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*
Transgasindo	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham dan transportasi gas bumi/*Investment in shares and gas transportation*
PT Perta-Samtan Gas	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Pendapatan / ***Revenues***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Niaga gas bumi			***Gas trading***
PLN	242.747.342	371.421.646	*PLN*
PT PLN Batam	123.523.449	109.469.512	*PT PLN Batam*
PT. Kilang Pertamina Internasional	103.365.587	104.518.580	*PT. Kilang Pertamina Internasional*
PT Pupuk Iskandar Muda	96.645.830	115.730.008	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Indonesia Power	50.971.638	-	*PT Indonesia Power*
PT Pupuk Kujang	45.721.385	48.441.708	*PT Pupuk Kujang*
Krakatau Steel Group	10.064.454	22.306.966	*Krakatau Steel Group*
PT Pertamina	5.896.418	1.016.048	*PT Pertamina*
PT Krakatau Daya Listrik	-	21.666.360	*PT Krakatau Daya Listrik*
PT Pertamina Hulu Rokan	-	18.990.000	*PT Pertamina Hulu Rokan*
Lainnya	5.693.934	13.142.624	*Others*
Jumlah	**684.630.037**	**826.703.452**	***Total***
Transmisi gas			***Gas transmision***
PLN	57.511.985	65.195.000	*PLN*
PT Pertamina EP	36.355.895	47.047.042	*PT Pertamina EP*
PT Pupuk Sriwidjaja	27.122.989	26.435.128	*PT Pupuk Sriwidjaja*
PT Petrokimia Gresik	19.395.531	21.482.975	*PT Petrokimia Gresik*
PT Indonesia Power	12.190.925	-	*PT Indonesia Power*
PT Pupuk Kalimantan Timur	11.434.077	11.176.930	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Kilang Pertamina International	8.175.188	8.375.992	*PT Kilang Pertamina International*
Lainnya	17.538.724	665.000	*Others*
Jumlah	**189.725.314**	**180.378.067**	***Total***
Penjualan minyak dan gas			***Oil and gas sales***
PLN	55.918.409	98.772.321	*PLN*
Pertamina Patra Niaga	23.853.719	39.615.278	*Pertamina Patra Niaga*
Pertamina	1.251.926	-	*Pertamina*
PT Kilang Pertamina International	-	715.824	*Petro Jatim*
Jumlah	**81.024.054**	**139.103.423**	***Total***

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pendapatan (lanjutan) / ***Revenues (continued)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pemrosesan gas			***Gas processing***
PT Pertamina Patra Niaga	22.550.392	36.668.458	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pertamina Trans Kontinental	4.228.708	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pertamina Hulu Energi	1.792.006	5.561.054	*PT Pertamina Hulu Energi*
Lainnya	3.043.411	4.299.460	*Others*
Jumlah	**31.614.517**	**46.528.971**	***Total***
Transportasi minyak			***Oil processing***
PT Pertamina Hulu Rokan	108.879.094	31.482.613	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina EP	16.881.717	18.294.857	*PT Pertamina EP*
Jumlah	**125.760.811**	**49.777.470**	***Total***
Jasa regasifikasi			***Gas regasification***
PLN	126.359.066	97.807.668	*PLN*
PT Pupuk Iskandar Muda	1.271.219	4.755.505	*PT Pupuk Iskandar Muda*
Jumlah	**127.630.285**	**102.563.173**	***Total***
Lain-lain			***Others***
PT Pertamina Hulu Rokan	5.394.579	-	*PT Pertamina Hulu Rokan*
Lainnya	2.080.892	-	*Others*
Jumlah	**7.475.471**	**-**	***Total***
Jumlah	**1.247.860.490**	**1.345.054.557**	***Total***
Persentase dari total pendapatan konsolidasian	34,22%	37,69%	*Percentage from total consolidated revenues*
Pembelian gas bumi			***Purchases of natural gas***
PT Pertamina EP	385.966.584	197.874.728	*PT Pertamina EP*
PHE	156.666.778	170.666.423	*PHE*
SKK Migas/Ditjen Migas	71.971.181	45.847.580	*SKK Migas/Ditjen Migas*
PT Pertamina Patra Niaga	11.235.713	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
Pertamina	5.523.298	15.631.262	*Pertamina*
Jumlah	**631.363.554**	**430.019.993**	***Total***
Persentase dari total beban pokok pendapatan konsolidasian	21,68%	15,42%	*Percentage from total consolidated cost of revenues*

Transaksi pembelian gas kepada SKK Migas/Ditjen Migas merepresentasikan tambahan provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang diakui oleh Grup secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan unutilised gas volume /sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 91/2023, No. 134/2021, dan No.135/2021 (Catatan 18a dan 36c).

Gas purchase transactions to SKK Migas/Ditjen Migas represents additional provisions for adjustments to the purchase price of certain natural gas in which periodically recognized by the Group based on estimation in accordance with the addition of unutilised gas volumes based on Ministry of EMR Decree No. 91/2023, No. 134/2021, and No.135/2021 *(Notes 18a dan 36c)*.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 20,84% dan 20,12% dari total aset konsolidasian.

Aset keuangan pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lainnya dan aset keuangan tersedia untuk dijual
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo investasi jangka pendek yang ditempatkan pada pihak berelasi adalah sebesar 0,35% dan 0,39% dari total aset konsolidasian.

Piutang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 3,13% dan 3,79% dari total aset konsolidasian.

Piutang lain-lain dan piutang lain-lain jangka Panjang
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang lain-lain pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,20% dan 0,34% dari total aset konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang lain-lain jangka panjang pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,06% dan 0,11% dari total aset konsolidasian.

Utang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 5,97% dan 3,63% dari total liabilitas konsolidasian.

Utang lain-lain
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0% dan 0% dari total liabilitas konsolidasian.

Pinjaman
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang dipinjamkan dari pihak berelasi, termasuk penerusan pinjaman, pinjaman pemegang saham, dan pinjaman bank jangka pendek masing-masing sebesar 12,56% dan 6,98% dari total liabilitas konsolidasian.

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant balance with related parties are as follows:

Cash and cash equivalents and restricted cash
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of cash and cash equivalents and restricted cash placed with related parties amounted to 20.84% and 20.12%, respectively, of total consolidated assets.

Financial assets at fair value through other comprehensive income and available-for-sale financial assets
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of short-term investments placed with related parties are amounted to 0.35% and 0.39%, respectively, of total consolidated assets.

Trade receivables
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of trade receivables from related parties amounted to 3.13% and 3.79% respectively, of total consolidated assets.

Other receivables and other long-term receivables
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of other receivables from related parties amounted to 0.20% and 0.34%, respectively, of total consolidated assets. As of December 31, 2023 and 2022, the balances of other long-term receivables from related parties are amounted to 0.06% and 0.11% respectively, of total consolidated assets.

Trade payables
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of trade payables due to related parties amounted to 5.97% and 3.63%, respectively, of total consolidated liabilities.

Other payables
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of other payables due to related parties amounted to 0% and 0%, respectively, of total consolidated liabilities.

Loans
As of December 31, 2023 and 2022, the balances of long-term and short-term loans due to related parties, including two-step loans, shareholder loan and short-term bank loans, amounted to 12.56% and 6.98%, respectively, of total consolidated liabilities.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Kompensasi dan imbalan lain

Grup memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Compensation and other benefits

The Group provided compensation and other benefits to Commissioners and Directors of the Group with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Komisaris	5.545.119	4.801.660	*Commissioners*
Direksi	11.798.989	10.394.182	*Directors*
Total	**17.344.108**	**15.195.842**	***Total***

34. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

34. PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Sejak tahun 2016, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk tidak mengalokasikan anggaran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK"), sehingga Perusahaan hanya melaksanakan penagihan pada pinjaman yang sedang bergulir dan menyelesaikan kontrak yang sudah ditandatangani dengan menggunakan sisa alokasi laba bersih tahun 2012. Perusahaan juga menetapkan kebijakan dengan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dananya berasal dari anggaran yang ditetapkan sebagai biaya yang dananya dikelola di rekening terpisah.

Since 2016, the Company established a policy not to allocate budget to the Micro Business and Small Business Funding ("UMK") Program, so the Company's only remaining activity for this program is to collect the remaining loans being rolled over and to complete the remaining contract that was already signed using the remaining allocation of net profit from 2012. The Company also established a policy to implement a Social and Environmental Responsibility Program to be funded from the budget set as the cost of funds deposited into a separate account.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat beban atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada operasi berjalan yang disajikan pada akun "Beban pokok pendapatan serta Beban umum dan administrasi - tanggung jawab sosial dan bina lingkungan" pada laba rugi masing-masing sebesar USD4.540.263 dan USD3.404.432.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded the Corporate Social and Environmental Responsibility expense in current operations which is presented as part of "Cost of revenues and General and administrative expenses - Corporate Social and Environmental Responsibility" account in profit or loss amounted to USD4,540,263 and USD3,404,432, respectively.

Dana yang berasal dari anggaran Perusahaan yang penetapannya disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut ditempatkan dalam rekening bank terpisah. Saldo dana dalam rekening bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah USD95.948 dan USD138.539 yang dilaporkan sebagai bagian kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The funds, which originated from the Company's budget and have been approved by the Board of Commissioners, are deposited into designated bank accounts. The balance of such funds as of December 31, 2023 and 2022 were USD95,948 and USD138,539, respectively, which are reported as part of cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a. PJBG

Grup harus membeli dan membayar jumlah pembelian minimum per tahun/kuartal/bulan untuk setiap PJBG di bawah ini. Perbedaan antara jumlah kuantitas pembelian nyata dan kuantitas pembelian minimum dicatat sebagai "*Make-Up Gas*", yang dapat direalisasikan setiap saat jika kuantitas minimum atau bagian dari jumlah kontrak tahunan/kuartalan/bulanan (mana yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing PJBG) telah diambil pada tahun/kuartal/bulan tertentu selama jangka waktu perjanjian. Saldo "*Make-Up Gas*" disajikan sebagai bagian dari "Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements:

a. GSPA

The Group is required to purchase and pay for a minimum purchase quantity per year/quarter/month for each of the GSPA below. The difference between the purchased quantity and the minimum purchase quantity is recorded as "Make-Up Gas", which can be realised any time if the minimum quantity or part of annual/quarterly/monthly contract quantity (which is applicable in accordance with the respective GSPA) has been taken or at a specified year/quarter/month during the period of the agreement. The outstanding balance of the "Make-Up Gas" is presented as part of "Advances" in the consolidated statements of financial position.

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/ *Gas field***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase Medan*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP area kerja Asset 1/*Oil and gas field of PT Pertamina EP working area Asset 1*	3 MMSCFD (2018-2021) 7 MMSCFD (2022)	4 April/*April* 4, 2002	31 Desember/ *December 31,* 2023	Berlaku sampai dengan kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP Region Jawa, Jawa Bagian Barat/*Oil and gas field of PT Pertamina EP Java Region, West Java*	Titik serah/ *Delivery point* Bongas 0,5 MMSCFD (2021-2023) Titik Serah/ *Delivery point* Sunyaragi, Pondok Tengah, Citarik dan Serpong 8 MMSCFD (2021-2024)	1 Januari/ *January 1,* 2021	31 Desember/ *December 31,* 2024	-
Minarak Brantas Gas Inc. (dahulu/ *previously* Lapindo Brantas, Inc.	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kabupaten Sidoarjo/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Sidoarjo Regency*	Lapangan Brantas/*Brantas field*	0,6 MMSCFD 8 Sep 2020 – 26 Apr 2028 0,4 MMSCFD 27 Apr 2028 – 7 Sep 2030	8 September/ *September 8,* 2020	7 September/ *September 7,* 2030	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/ *Gas field*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas/*Mutual Agreement of City Gas distribution*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP/oil and gas field of PT Pertamina EP	5,1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	31 Desember/ *December 31,* 2024	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG Jargas masih dalam proses pembahasan/ *Up to the date of this financial statements, the amendment of GSA Jargas is ongoing.*
PT Pertamina EP	PJBG Sumatera Selatan-Jawa Barat/*GSPA South Sumatra-West Java*	DOH Sumatera Selatan/*South Sumatera*	1.006 TSCF	26 Juni/ *June 26,* 2003	31 Desember/ *December 31,* 2025	Berlaku sampai dengan kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Minarak Brantas Gas Inc. (dahulu/ *previously* Lapindo Brantas, Inc.	Kesepakatan Bersama Kelanjutan Pasokan Gas/ *Agreement of Gas Supply Continuity*	Lapangan Brantas/ *Brantas field*	16,6 BBTUD	20 April/ *April 20,* 2020	31 Maret/*March 31,* 2025 atau ditanda-tangani dan berlaku efektifnya PJBG/*or GSA effectively signed*	-
Medco Madura Offshore Pty. Ltd. (dahulu/ *previously* Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.)	PJBG/*GSPA* Santos Maleo	Lapangan Maleo/ *Maleo Field*	11 BBTUD	31 Mei/*May 31,* 2005	31 Des/Dec 31 2023	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Husky CNOOC Madura Ltd.	Kesepakatan Bersama untuk Amandemen PJBG Jargas /*Mutual Agreement for Amendment of GSPA Jargas*	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	1,55 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	17 Agustus 2032/August 17, 2032	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Husky CNOOC Madura Ltd.	PJBG/*GSPA* Husky	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	20 MMSCFD (*Gas in* 13 November / *November 13,* 2017) 60 MMSCDF (mulai/*start from* 14 November / *November 14,* 2017)	30 Oktober/ *October 30,* 2007	31 Oktober/ *October 30,* 2032	-
PT Medco E&P Indonesia	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas Kota Tarakan/*Mutual Agreement of City Gas Distribution in Tarakan*	Lapangan di Wilayah Kerja Tarakan/*Field in Tarakan working area*	0,3 MMSCFD	14 Januari/ *January 14,* 2016	7 September/ *September 7,* 2030	-
PT Medco E&P Indonesia	PJBG untuk Jargas Musi Banyu Asin/ *GSPA of City Gas Distribution in Musi Banyu Asin*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan/*Field in South Sumatera working area*	0,25 BBTUD	25 September/ *September 25,* 2017	19 Juli/*July 19,* 2027	-
PT Pertamina EP Cepu	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Lamongan/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Lamongan*	Wilayah kerja Cepu/*Cepu working area*	0,2 MMSCFD	1 Januari/ *January 1,* 2023	12 September/ *September 12,* 2029	-
Triangle Pase Inc.	PJBG/*GSPA*	Blok Pase/*Pase Block*	5 BBTUD 2019 6 BBTUD 2020 7 BBTUD 2021-2032	15 Desember/ *December 15,* 2017	Sampai dengan berakhirnya PSC TPI/ *Until the end of TPI's PSC*	-
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, dan Kontraktor WMO/ *and WMO Contractors*	PJBG/*GSPA*	Wilayah kerja West Madura *Offshore*/*West Madura Offshore Area*	30 BBTUD (2019-2020) 19 BBTUD (2021-2023)	19 Desember/ *December 19,* 2006	31 Desember/ *December 31,* 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG masih dalam proses untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2034/ *Up to the date of this financial statements, the amendment of GSA is in process to extend the period until 31 December 2034.*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, dan Kontraktor WMO/ *and WMO Contractors*	PJBG Jargas/*GSPA City Gas* Surabaya	Wilayah kerja West Madura *Offshore*/*West Madura Offshore Area*	0,9 BBTUD	23 November/ *November 23,* 2015	31 Desember/ *December 31,* 2023	-
PT Pema Global Energi	Perjanjian Jual Beli untuk Pupuk Iskandar Muda dan industri di Aceh dan Sumatera Utara/ *Gas Sales and Purchase Agreement for Pupuk Iskandar Muda and industry in Aceh and North Sumatera*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	45 MMSCFD 2020-2023 (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja North Sumatera Offshore/*in total with volume from North Sumatera Offshore working area*	18 Mei / *May 18,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, masih dalam proses penyelesaian dokumen untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2028/ *Up to the date of this financial statements, under process to finalise the document to extend the period until 31 December 2028.*
PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	Kesepakatan Bersama/ *Mutual Agreement*	Wilayah kerja Ogan Komering/*Ogan Komering working field*	3,7 MMSCFD 2019 2,6 MMSCFD 2020 1,9 MMSCFD 2021 1,3 MMSCFD 2022 4,12 MMSCFD 2023 1,56 MMSCFD 2024	30 November / *November 30,* 2018	31 Desember / *December 31,* 2024	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen Kesepakatan Bersama masih dalam proses finalisas perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2024/ *Up to the date of these financial statements, the amendment of Mutual Agreement is in the final process of extension until 31 December 2024*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas North Sumatera Offshore untuk Pupuk Iskandar Muda dan industry di Aceh dan Sumatera Utara/*Mutual Agreement of North Sumatera Offshore for Gas Sales and Purchase or Pupuk Iskandar Muda and industry in Aceh and North Sumatera*	Lapangan di wilayah kerja NSO/*Field in NSO working area*	55 MMSCFD 2019 45 MMSCFD 2020-2023 (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area*)	4 Oktober / *October 4,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, masih dalam proses penyelesaian dokumen untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2024/ *Up to the date of this financial statements, under process to finalise the document to extend the period until 31 December 2024.*
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Wilayah kerja Jambi Merang/*Jambi Merang working field*	34,5 BBTUD	10 Februari/ *February 10,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2025	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	PJBG North Sumatera Offshore untuk Jargas/*GSPA North Sumatera Offshore for Gas Sales and Purchase for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja NSO/*Field in NSO working area*	Aceh Utara 0,2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0,2 MMSCFD Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area*	3 November/ *November 3,* 2019	23 Juli/*July 23,* 2029	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dibangun oleh Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya/*Memorandum of agreement gas Supply Through Gas*	Lapangan TSB/ *TSB field*	0,2 MMSCFD	9 September/ *September 9,* 2022	13 November/ *November 13,* 2030	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Kangean Energy Indonesia Ltd. (lanjutan)	*Distribution Network for Households and Small Customers Built by the Government in Bojonegoro Regency, Jombang Regency, and Surabaya City*					
PT Inti Alasindo Energy	PJBG/*GSPA* PGN-IAE	Lapangan Madura BD/*Madura BD field*	15 MMSCFD	5 April 2019	4 April 2025	-
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	Novasi Kesepakatan Bersama North Sumatera Offshore untuk Jargas Lhokseumawe Lhoksukon /*Novation of Mutual Agreement of North Sumatera Offshore Gas Sales and Purchase for Jargas Lhokseumawe Lhoksukon*	Lapangan di wilayah kerja NSO/*Field in NSO working area*	Lhokseumawe-Lhoksukon 0,5 MMSCFD (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area)*	1 November/ *November 1,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, masih dalam proses penyelesaian dokumen untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 7 September 2030/ *Up to the date of this financial statements, under process to finalise the document to extend the period until 7 September 2030.*
Husky CNOOC Madura Ltd.	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Lapangan MDA-MBH-MDK/MDA-MBH-MDK *field (3M)*	5 MMSCFD	21 Oktober/ *October 21,* 2022	31 Oktober/ *October 31,* 2032	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Balikpapan/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Balikpapan*	Wilayah kerja Kalimantan Timur East Kalimantan working Area	0,5 MMSCFD	25 Oktober/ *October 25,* 2020	24 Oktober/ *October 24,* 2028	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Kalimantan Timur East Kalimantan working Area	0,1 MMSCFD	17 Februari/ *February 17,* 2021	26 Agustus/ *August 26,* 2030	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Bontang/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Bontang*	Wilayah kerja Mahakam	0,5 MMSCFD	8 September / *September 8,* 2020	7 September/ *September 7,* 2030	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Mahakam/ working Area	0,2 MMSCFD	6 Februari/ *February 6,* 2020	23 Juli/*July 23,* 2029	-
PT Medco E&P Indonesia	PJBG Jargas Palembang/ *GSPA Jargas Palembang*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan/*Field in South Sumatera working area*	0,2 MMSCFD	8 September / *September 8,* 2020	27 November/ *November 27,* 2033	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT PHE Jambi Merang	Kesepakatan Bersama Untuk Jargas Musi Banyuasin dan Muaro Jambi/ *Mutual Agreement for Jargas Musi Banyuasin and Muaro Jambi*	Wilayah kerja Jambi Merang/ *Jambi Merang working area*	0,2 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/*in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	31 Desember/ *December 31,* 2023	-
PT PHE Jambi Merang	Kesepakatan Bersama Untuk Jargas Batam/ *Mutual Agreement for Jargas Batam*	Wilayah kerja Jambi Merang/ *Jambi Merang working area*	0,1 MMSCFD	1 Agustus/ *August 1,* 2020	31 Juli/*July 31,* 2024	-
EMP Bentu	Kesepakatan Bersama Jargas Pelalawan/*Mutual Agreement Jargas Pelalawan*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	1 November/ *November 1,* 2022	17 Agustus/ *August 17,* 2032	-
Triangle Pase Inc.	PJBG/GSPA Jargas Kota Medan	Blok Pase / Block Pase	0,2 MMSCFD	14 Januari/ *January 14,* 2019	28 April/*Aprill 28,* 2028	Diakhiri lebih dahulu pada 1 Desember 2022 melalui Berita Acara Pengakhiran 10 November 2023/*Terminated earlier on 1 December 2022 by Minutes of Termintation 10 November 2023*
PIM Area: Sumatera Bagian Utara/ *Northern Sumatra Area*	Novasi dan Amendemen PJBG antara Pertamina, PIM dan Perusahaan/ *Novation and Amendment of GSPA between Pertamina, PIM and the Company*	Lapangan minyak dan gas bumi NSO dan NSB dioperasikan oleh PHE NSO dan NSB/*Oil and gas field of NSO and NSB operated by PHE NSO and NSB*	54 MMSCFD	1 Juni/ June 1, 2020	31 Desember/*December 31,* 2032	-
PetroChina Jabung Ltd.	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Tanjung Jabung Barat/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in West Tanjung Jabung*	Wilayah kerja Jabung/*Jabung working area*	0,2 MMSCFD	16 Desember/ *December 16,* 2022	17 Agustus/ *August 17,* 2032	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT Sele Raya Belida	Kesepakatan Bersama/Mutual Agreement	Lapangan gas Cantik/ *Cantik gas field*	2.5 BBTUD 1 Nov 2020-31 Des/Dec 2022 3.38 BBTUD 2023-2030	1 November/ *November 1,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2030	-
Energy Equity Epic Sengkang	PJBG Jargas Sengkang dan Wajo/*GSPA Jargas Sengkang and Wajo*	Wilayah kerja Sengkang/ *Sengkang working field*	0,6 MMSCFD	8 September/ *September 8,* 2020	17 Agustus/ *August 17,* 2032	-
Petrogas (Basin) Ltd	PJBG Jargas Sorong/*GSPA Sorong*	Blok Kepala Burung/ Kepala Burung *block*	0,2 MMSCFD	15 Oktober/ *October 15,* 2020	7 September/ *September 7,* 2030	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Jargas Jombang, Bojonegoro, dan Surabaya/*Mutual Agreement of Gas and Sales Purchase for Jargas Jombang, Bojonegoro, and Surabaya*	Lapangan TSB	Jombang 0,2 MMSCFD Bojonegoro 0,2 MMSCFD Surabaya 0,1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan	13 November/ *November 13,* 2030	-
EMP Bentu	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Jargas Dumai/ *Mutual Agreement of Gas and Sales Purchase for Jargas Dumai*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	19 November/ *November 19,* 2019	23 Juli/*July 23,* 2029	-
JOB Tomori	Kesepakatan Bersama Jargas Banggai/*Mutual Agreement Jargas Banggai*	Lapangan di wilayah kerja Senoro-Tolli/ *Field in Senoro-Tolli working area*	0,2 MMSCFD	20 Desember/ *December 20,* 2019	23 Juli/ July 23, 2029	-
PT Pertamina EP Cepu	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Bumi Jimbaran Tiung Biru /*Joint Cooperation Agreement of Jimbaran Tiung Biru Gas Operation and Delivery*	Wilayah kerja Cepu/*Cepu working area*	172 BBTUD	20 September/ *September 20,* 2022	31 Desember/ *December 31*, 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2024 sudah ditandatangani PGN namun masih proses tanda tangan Pertamina/ *Up to the date of these financial statements, the amendment of the agreement to extend the period until* 30 June 2024 have been signed by PGN, but currently is under process to be signed by Pertamina.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Medco EP Grissik Ltd. (dahulu/*previously* ConocoPhillips (Grissik) Ltd.)	Perjanjian Jual Beli Gas/ *Gas Sales and Purchase Agreement*	Blok Koridor/ *Corridor Block*	335 BBTUD 1 Okt/Oct-19 Des/Dec 2023 410 BBTUD 20 Des/Dec 2023-31 Des/Dec 2024 271 BBTUD 2025 238 BBTUD 2026 185 BBTUD 2027 129 BBTUD 2028	1 Oktober/October 1, 2023	31 Desember/December 31, 2028	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau tanggal penandatanganan PJBG, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or the signing date of the GSPA, whichever comes first.*
Medco Madura Offshore Pty. Ltd. (dahulu/ *previously* Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.)	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase*	Lapangan/*Field Meliwis*	28.3 TBTU	1 September/ September 1, 2023	3 Desember/ December 3, 2027	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG masih dalam proses pembahasan, berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu / *Up to the date of this financial statements, the amendment of GSA is ongoing, it is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT Pema Global Energi	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas WK B untuk Jargas/*Mutual Agreement of WK B Gas Sales and Purchase Offshore for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	Aceh Utara 0.2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0.2 MMSCFD Lhokseumawe-Lhoksukon 0.5 MMSCFD (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja North Sumatera Offshore/*in total with volume from North Sumatera Offshore working area)*	18 Mei/ *May* 18, 2021	26 Agustus/ *August 26,* 2030	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

a. PJBG (lanjutan)

Dalam menyalurkan gas kepada pelanggan, PGN memiliki komitmen volume penyaluran gas kepada pelanggan. Komitemen tersebut tertuang di dalam perjanjianjian jual beli gas antara PGN dengan Pelanggan dengan volume terkontrak sebesar ±1,150 BBTUD dan dengan rata – rata Harga jual tertimbang sebesar USD 7,6/MMBTU.

b. PJB LNG

Grup menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian LNG dengan beberapa *Counterparts* untuk bisnis niaga LNG sebagai berikut :

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. GSPA (continued)

In delivering gas to customers, PGN has a commitment to the volume of gas distribution to customers. This commitment is stated in the gas sales agreement between PGN and the Customer, with a contracted volume of 1,150 BBTUD and weighted average gas price of USD 7,60/MMBTU.

b. LNG SPA

The Group entered into LNG Sales and Purchase Agreement with several Counterparts for the LNG trading business as follows:

Counterparts	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
			Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Petronas LNG Ltd.	Perjanjian Jual Beli LNG DES/ *LNG Sales and Purchase Agreement DES*	7 kargo /cargoes	1 Januari/*January 1* 2024	30 November/ *November 30,* 2025	PGN sebagai pembeli, *back to back* dengan PJB LNG CNTIC/*PGN as buyer, back to back with CNTIC LNG SPA*
China National Technical IMP & EXP Corp (CNTIC)	Perjanjian Jual Beli LNG FOB/ *LNG Sales and Purchase Agreement FOB*	7 kargo /cargoes	1 Januari/*January 1,* 2024	30 November/ *November 30,* 2025	PGN sebagai penjual, *back to back* dengan PJB LNG Petronas/*PGN as seller, back to back with Petronas LNG SPA*
Gunvor Singapore Pte. Ltd.	*Master LNG Sale and Purchase Agreement* ("MSPA") dan *Confirmation Notice* DES	8 kargo /cargoes	1 Januari/*January 1,* 2024	31 Desember/ December 31, 2027	PGN sebagai Penjual, /*PGN as seller*
PT Kayan LNG Nusantara	Perjanjian Jual Beli LNG FOB/ *LNG Sales and Purchase Agreement FOB*	3,0 BBTUD 2023 5,0 BBTUD 2024-2028	1 Januari/*January 1,* 2023	23 Febuari/ *February 23,* 2028	PGN, Pertagas Niaga, dan GEI sebagai pembeli/*PGN and Pertagas Niaga as buyers (multibuyer)*
Chevron, TipTop, ENI, Pertamina	Perjanjian Jual Beli LNG/*LNG Sales and Purchase Agreement*	Tahun 2023: 0.64 kargo Tahun 2024: 1 kargo	1 September 2023	31 Desember/ *December* 2024	PGN dan Pertagas Niaga sebagai Pembeli/PGN and Pertagas Niaga as Buyers

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

c. Perjanjian Pengangkutan Gas

Grup menandatangani kontrak Perjanjian Pengangkutan Gas dengan PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) dengan rincian sebagai berikut :

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Gas Transportation Agreement

The Group entered into Gas Transportation Agreement with PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) as follows :

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Transgasindo	Perjanjian Pengangkutan Gas / *Gas Transportation* Agreement	Grissik - Panaran	67 MMSCFD 1 Jan 2023 – 30 Sep 2023 95 MMSCFD 1 Okt/Oct 2023 – 31 Des/Dec 2023 75 MMSCFD 2024-2025 0 MMSCFD* 2026-2028	26 November/ November 26, 2019	31 Desember/ December 31, 2028	*Volume kontrak periode 2026-2028 akan dikonfirmasi PGN paling lambat 1 Desember 2025/Contract volume for 2026-2028 will be confirmed by PGN at the latest on 1 Desember 2025
Transgasindo	Perjanjian Pengangkutan Gas PGN Duri-Dumai / *Gas Transportation* Agreement Duri-Dumai	Grissik - Duri	14.79 MMSCFD 1 Jan 2023-29 Mei/May2023 26.867 MMSCFD 30 Mei/May2023-19 Des/Dec 2023 23.29 MMSCFD 20 Des/Dec– 31 Des/Dec 2025	13 November/ November 13, 2017	31 Desember/ *December 31,* 2025	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

d. Perjanjian Sewa, Operasi dan Perawatan dengan Hoegh Lampung

Pada tanggal 25 Januari 2012, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan yang berlaku dari tanggal pengiriman dan berakhir 20 tahun setelah tanggal pengiriman.

Pada tanggal 21 Februari 2014, PLI, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani Perjanjian Novasi atas *Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement* dimana hak dan kewajiban Perusahaan terkait dengan perjanjian tersebut di atas beralih ke PLI. Melalui perjanjian novasi tersebut Hoegh Lampung akan menyediakan FSRU Lampung dan melakukan proses regasifikasi selama 20 tahun dengan opsi perpanjangan untuk dua periode masing-masing lima tahun.

e. Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok

Pada tanggal 14 September 2015, KJG, PLN, SEML, PT Bakrie & Brothers, Tbk. dan PCML, telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberlakuan Novasi dan Perubahan Terhadap PPG Kalija I dimana KJG bertindak sebagai Transporter, PLN bertindak sebagai *Offtaker*, dan PCML, sebagai *Shipper*. Berdasarkan ketentuan dalam *Gas Transportation Agreement*, *Transporter* setuju memberikan jasa transportasi gas dari lapangan Kepodang ke fasilitas pembangkit milik PLN di Tambak Lorok.

f. Perjanjian KSO dengan PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ")

Pada tanggal 2 April 2004, Perusahaan dan CTJ mengadakan perjanjian KSO. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan tanah yang terletak di Surabaya untuk dibangun pusat perbelanjaan oleh CTJ dengan nilai sekitar IDR336.245.000.000. CTJ akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun hingga 2 April 2032. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan akan menjadi milik Perusahaan.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Lease, Operation and Maintenance Agreement with Hoegh Lampung

On January 25, 2012, the Company and Hoegh Lampung entered into a lease, operation and maintenance agreement starting from the delivery date until 20 years from the delivery date.

On February 21, 2014, PLI, the Company and Hoegh Lampung entered into a Novation Agreement for the Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement, where the rights and obligations related to the above agreement of the Company were transferred to PLI. Through the novation agreement, Hoegh Lampung will provide FSRU Lampung and perform regasification process for 20 years with two extension period of five years each.

e. Transportation Gas Agreement Kepodang - Tambak Lorok

On September 14, 2015, KJG, PLN, SEM, PT Bakrie & Brothers, Tbk. and PCML, put into effect the Novation and Amendment to The GTA Kalija I wherein KJG is the Transporter, PLN is the Offtaker, and PCML, is the Shipper. Based on the Gas Transportation Agreement, Transporter agreed to provide gas transportation service from Kepodang field to PLN's power plant facilities in Tambak Lorok.

f. JO Agreement with PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ")

On April 2, 2004, the Company entered into a joint operation agreement with CTJ. In this agreement, the Company will provide its land located at Surabaya for CTJ to build a shopping centre with total value of approximately IDR336,245,000,000. CTJ will have the rights to operate the shopping centre from the completion date of the construction of the building until April 2, 2032, or for 28 years period. At the end of the operational period, the shopping centre will be transferred to the Company.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

f. Perjanjian KSO dengan PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ") (lanjutan)

CTJ berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan berupa pendirian bangunan dengan nilai IDR20.750.000.000, yang terdiri dari gedung kantor dan rumah dinas Perusahaan, serta pembayaran royalti sebesar IDR200.000.000 termasuk pajak penghasilan setiap tahunnya dari tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan 20 Maret 2031.

Perusahaan akan memberikan hak prioritas kepada CTJ untuk memperoleh hak pengelolaan tahap kedua dengan jangka waktu 25 tahun apabila tahap pengelolaan pertama telah berakhir, yaitu pada tanggal 2 April 2032.

g. Perjanjian KSO dengan PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek")

Pada tanggal 10 Maret 2005, Perusahaan dan Winatek mengadakan perjanjian KSO. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan lahan yang terletak di Jakarta Pusat kepada Winatek untuk dibangun pusat perbelanjaan dan perkantoran termasuk fasilitas parkir dan fasilitas pendukungnya, senilai sekitar IDR80.000.000.000 atau sepadan bangunan minimal 20.000 meter persegi. Winatek akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun enam bulan. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan dan perkantoran akan menjadi milik Perusahaan.

Winatek berkewajiban untuk memberikan kompensasi awal sebesar IDR18.935.005.000 kepada Perusahaan, berupa bangunan kompensasi seluas 12.250 meter persegi.

Perjanjian ini telah diamendemen sebanyak dua kali, dan terakhir kali diamendemen pada tanggal 29 November 2005. Amendemen ini merubah ketentuan periode pengelolaan menjadi 29 tahun, serta merubah ketentuan luas minimal bangunan menjadi 21.000 meter persegi atau minimal senilai IDR80.000.000.000.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. JO Agreement with PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ") (continued)

CTJ is obliged to give compensation to the Company in the form of building compensation with total value of IDR20,750,000,000, consisting of the Company's office building and the employee's house and annual royalty payment for IDR200,000,000 including income tax from March 20, 2010 until March 20, 2031.

The Company will give priority to CTJ to obtain the right to operate and manage the second operational period for 25 years at the end of the first operational phase which is April 2, 2032.

g. JO Agreement with PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek")

On March 10, 2005, the Company entered into a JO agreement with Winatek. In this agreement, the Company will provide its land located at Central Jakarta to build a shopping centre and office building including parking area and other facilities with approximately value of IDR80,000,000,000 or equal to the value at a minimum of a 20,000 square meters building. Winatek will have the rights to operate the shopping centre, starting from the agreement date until the next 28 years and six month period. At the end of the operational period, the shopping centre and office building will be transferred to the Company.

Winatek is obliged to give initial compensation amounting to IDR18,935,005,000 to the Company, in the form of building compensation with an area of 12,250 square meters.

This agreement has been amended two times, and lastly amended on November 29, 2005. Those amendments changed the provision of the operational period to become 29 years, and changed the provision of minimum width of the building area to become 21,000 meters squared or with minimum value of IDR80,000,000,000.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

h. Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa antara Pertagas dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") Untuk Area Sumatera Bagian Selatan

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Pertagas menandatangani Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG") dengan PUSRI untuk Area Sumatera Bagian Selatan No. 116/PG0000/2019-S0. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dimulai sampai dengan 31 Desember 2027.

i. Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari Duri Dumai antara Pertagas dengan Pertamina

Pada tanggal 27 Desember 2019, Pertagas menandatangani PPG dengan Pertamina No. 188/PG0000/2019-S0. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dimulai sampai dengan 31 Desember 2026.

j. Perjanjian Pengangkutan Gas antara Pertagas dan PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pertagas dan PKT menandatangani Perjanjian Pengangkutan Gas No. 026/PG0000/2020-SO untuk memenuhi kebutuhan gas pada *Plant* PKT-1A, PKT-2 dan PKT-3 sejak Januari 2020, *Plant* PKT-5 di tahun 2022 dan *Plant* PKT-4 di tahun 2023.

k. Amendemen II Perjanjian Pengangkutan Gas melalui Pipa Transmisi Ruas Grissik-PUSRI antara Pertagas dan PUSRI

Pada tanggal 17 Februari 2020, Pertagas dan PUSRI menandatangani amendemen II Perjanjian Pengangkutan Gas melalui Pipa Transmisi Ruas Grissik-PUSRI untuk penerapan penetapan Peraturan BPH Migas No. 1 tahun 2020, Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pertagas untuk Ruas Transmisi Grissik ke PUSRI sebesar USD0,877/MSCF (tanpa PPN).

Pada tanggal 18 November 2020, Pertagas dan PUSRI menandatangani amendemen III No. 261/PG0000/2020-S0 untuk penetapan Peraturan BPH Migas No. 3 tahun 2020, Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pertagas untuk Ruas Transmisi Grissik ke PUSRI sebesar USD1,027/MSCF (tanpa PPN).

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Natural Gas Transportation Agreement through pipeline between Pertagas and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") for the Southern Sumatra Area

On August 5, 2019, Pertagas signed PPG with PUSRI for the Southern Sumatra Area No. 116/PG0000/2019-S0. This agreement is valid from its start date through to December 31, 2027.

i. Natural Gas Transportation Agreement through Pipeline from Duri Dumai between Pertagas and Pertamina

On December 27, 2019, Pertagas signed PPG with Pertamina No. 188/PG0000/2019-S0. This agreement is valid from its start date through to December 31, 2026.

j. Transportation Gas Agreement between Pertagas and PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")

On March 2, 2020, Pertagas and PKT signed Transportation Gas Agreement No. 026/PG0000/2020-SO to fulfill the need for Gas at Plant PKT-1A, PKT-2 and PKT-3 since January 2020, Plant PKT-5 in 2022 and Plant PKT-4 in 2023.

k. Amendment II Transportation Gas Agreement through Grissik-PUSRI roads Transmission Pipeline between Pertagas and PUSRI

On February 17, 2020, Pertagas and PUSRI signed amendment II Transportation Gas Agreement through Grissik-PUSRI roads Transmission Pipeline between Pertagas and PUSRI for applying BPH Migas's Regulation No. 1 year 2020, Transportation Gas Rate through Pertagas's transmission pipeline for Grissik to PUSRI amounting to USD0.877/MSCF (exclude VAT).

On November 18, 2020, Pertagas and PUSRI signed amendment III No. 261/PG0000/2020-S0 for applying BPH Migas's Regulation No. 3 year 2020, Transportation Gas Rate through Pertagas's transmission pipeline for Grissik to PUSRI amounting to USD1.027/MSCF (exclude VAT).

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

l. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi antara Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk

Pada tanggal 31 Januari 2020, Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi No. 008/PG0000/2020-SO untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas milik PT Cikarang Listrindo Tbk untuk penyaluran gas dari *Metering Station* KP 72 sampai dengan *Metering Station* CL MM2100. Perjanjian ini berlaku sejak 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2028 dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan untuk tahun 2020 sebesar USD10.879/bulan dan eskalasi 2% per tahun.

m. Perjanjian Jual Beli Pipa Gas Bumi antara Pertagas dan PKG

Pertagas melakukan pembelian atas Pipa Wunut yang terkoneksi dengan *Eastern Java* Gas Pipeline milik Pertagas di KP 21.050 di Wunut, Jawa Timur dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan niaga gas di wilayah Wunit sekitar 5,8 MMSCFD serta untuk pemanfaatan pipa Wunut untuk pemenuhan kebutuhan gas di *Plant* PKG sekitar 5 - 10 MMSCFD.

n. Perjanjian Jual Beli LNG antara PTGN dan PIM

Pada tanggal 21 September 2019, PTGN sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama No. 140/PN0000/2019-S0 dengan PIM tentang pengaliran LNG dengan volume sebesar 800.000 MMBTU.

Pada tanggal 23 Mei 2022, PTGN dan PIM menandatangani amandemen kedua No. 035/PN000/2022-S0, terkait dengan KEPMEN ESDM No. 134K/2021. Perjanjian berlaku sejak 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2033.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l. Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility between Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk

On January 31, 2020, Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk signed Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility No. 008/PG0000/2020-SO for operating and maintenance PT Cikarang Listrindo Tbk's facilities for supplying gas from Metering Station KP 72 until Metering Station CL MM2100. This agreement is valid since August 19, 2020 until August 18, 2028 with operation and maintenance cost amounting to USD10,879/month in 2020 and 2% escalation every year.

m. Natural Gas Pipelines Sales Agreement between Pertagas and PKG

Pertagas has purchased Wunut's pipelines that are connected with the Eastern Java Gas Pipeline that is owned by Pertagas at KP 21,050 at Wunut, East Java for maintaining the sustainability of gas trading activities in Wunut of around 5.8 MMSCFD and for pipe utilisation in Wunut to fulfil the need for gas in PKG's Plant of around 5 - 10 MMSCFD.

n. LNG Sales and Purchase Agreement between PTGN and PIM

On September 21, 2019, PTGN signed a mutual agreement No. 140/PN0000/2019-S0 with PIM related to LNG supply with the volume of 800,000 MMBTU.

On 23 May 2022, PTGN and PIM signed the second amendement No. 035/PN000/2022-S0, related to KEPMEN ESDM No. 134K/2021. The agreement valid from 1 June 2022 to 31 December 2033.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

o. Amendemen Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli LNG antara Pertamina dan PTGN

Pada tanggal 30 Desember 2019, PTGN menandatangani Amendemen Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli LNG No. 179/PN0000/2019-S0 dengan Pertamina terkait pembelian 12,7 TBTU LNG dari Pertamina oleh PTGN selama 2019 hingga 2023. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

p. Perjanjian Sewa Fasilitas Kilang LNG Arun

Pada tanggal 2 April 2015, PAG melalui Pertamina menandatangani kesepakatan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap kilang LNG Arun berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan nilai sewa IDR146.777.016.184. Berdasarkan kesepakatan dengan Pertamina, sewa aset tersebut dibebankan kepada PAG sebagai pengguna aset.

Pada tanggal 28 Desember 2018, PAG dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani adendum No. PRJ-108/LMAN/2018 terkait dengan biaya kontrak dan perpanjangan jangka waktu sewa yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2032.

q. Perjanjian Regasifikasi antara PAG dan PLN

Pada tanggal 11 Oktober 2013, PAG melalui Pertamina menandatangani amendemen perjanjian dengan PLN No. 02/C00000/2013-S0 tentang penyediaan jasa regasifikasi LNG untuk kebutuhan pusat listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Bagian Utara. Jangka waktu jasa regasifikasi mengikuti kesepakatan bersama yang diperbaharui.

Pada tanggal 29 Januari 2021, Perusahaan menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN tentang penyediaan jasa regasifikasi LNG untuk kargo lanjutan di tahun 2021 dengan No. PAG: 001/PAG0000/2021-S0 dan No. PLN: 0010.Pj/EPI.01.02/B01050000/2021 ("KB 29").

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN tentang penyediaan jasa regasifikasi LNG untuk kargo lanjutan di tahun 2022 dengan No. PAG: 008/PAG0000/2022-S0 dan No. PLN: 0381.Pj/EPI.01.02/C01050000/2022 ("KB 31").

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. The Third Amendment and Restatement of LNG Sales Agreement between Pertamina and PTGN

On December 30, 2019, PTGN signed the Third Amendment and Restatement of the LNG Sales and Purchase Agreement No. 179/PN0000/2019-S0 with Pertamina related to the purchase of 12.7 TBTU LNG from Pertamina to PTGN during 2019 until 2023. This agreement is valid until December 31, 2023.

p. Lease Agreement for the Arun LNG Plant Facilities

On April 2, 2015, PAG through Pertamina entered into a lease agreement with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for Arun LNG plant assets such as land, buildings, equipment and machinery for the period from January 1, 2015 through December 31, 2017 involving lease payments amounting to IDR146,777,016,184. Based on an agreement with Pertamina, the asset lease cost incurred was charged to the PAG as the asset user.

On December 28, 2018, PAG and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia executed the addendum No. PRJ-108/LMAN/2018 related to the contract amount and extension of the service period from January 1, 2018 to December 31, 2032.

q. Regasification Agreement between PAG and PLN

On October 11, 2013, PAG through Pertamina signed an amendment agreement with PLN No. 02/C00000/2013-S0 regarding the provision of LNG regasification services for electricity center needs in Aceh and Northern Sumatera. The period of regasification services follows an updated agreement.

On January 29, 2021, the Company signed an agreement with PLN regarding the provision of LNG regasification for future cargoes in 2021 No. PAG: 001/PAG0000/2021-S0 and No. PLN: 0010.Pj/EPI.01.02/B01050000/2021 ("KB 29").

On June 30, 2022, the Company signed an agreement with PLN regarding the provision of LNG regasification for future cargoes in 2022 No. PAG: 008/PAG0000/2022-S0 and No. PLN: 0381.Pj/EPI.01.02/C01050000/2022 ("KB 31").

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

q. Perjanjian Regasifikasi antara PAG dan PLN (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perusahan menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PAG: 019/PAG0000/2022-S0 dan No. PLN: 0049.Pj/EPI.01.02/F01010600/2022 (KB 32) tentang penyediaan jasa regasifikasi LNG untuk kargo lanjutan di tahun 2023 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

r. Perjanjian No. 87.PJ/061/IP/2013 tanggal 11 Juni 2013 antara PDG dan PT Indonesia Power ("IP") untuk Pekerjaan Jasa Sewa CNG Plant Untuk Memenuhi Kebutuhan Beban Puncak PLTGU Tambak Lorok, dengan amendemen terakhir pada tanggal 10 September 2019.

Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2029. Tarif untuk pekerjaan ini dihitung berdasarkan tarif harian yaitu IDR387.340.240/hari sudah termasuk PPN.

s. Perjanjian Pengangkutan Gas Melalui Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Sumatera Utara

Pada tanggal 4 Februari 2014, Perusahaan dan PLN telah menandatangani Perjanjian Pengangkutan Gas Melalui Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Sumatera Utara, dimana Perusahaan setuju memberikan jasa transportasi gas dari Titik Terima sampai dengan Titik Serah. Perjanjian berlaku sejak tanggal dimulai sampai dengan lima tahun atau sampai dengan berakhirnya PJBG antara PLN dengan PT Pertamina EP untuk gas dari sumur Benggala-1.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. Regasification Agreement between PAG and PLN (continued)

On 28 December 2022, the Company signed a mutual agreement with PLN No. 019/PAG0000/2022-S0 and No. 0049.Pj/EPI.01.02/C01010600/2022 (KB 32) regarding the provision of LNG regasification for future cargo in 2023 for the period 1 January up to 31 December 2023

r. Agreement No. 87.PJ/061/IP/2013 dated June 11, 2013 between PDG and PT Indonesia Power ("IP") for the Work of CNG Plant Rental Service to Fulfill the Need of Tambak Lorok PLTGU Peak Load, with the latest amendment dated September 10, 2019.

The agreement term covers the period from May 1, 2013 up to November 14, 2029. The tariff is calculated based on daily rate which is IDR387,340,240/day including VAT.

s. Transportation Gas Agreement through North Sumatera Transportation Pipeline System

On February 4, 2014, the Company and PLN signed a Transportation Gas Agreement through the North Sumatera Transportation Pipeline System whereby the Company agreed to provide transportation services from the Receiving Point into the Delivery Point. The agreement is valid from the start date up to five years or until the GSPA between PLN and PT Pertamina EP for gas from Benggala-1 wells ends.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

t. Komitmen Kontrak Pembelian dan Penjualan LNG Jangka Panjang

Pada Tahun 2022 Perusahaan menandatangani komitmen kontrak pembelian LNG jangka Panjang dengan Petronas LNG Ltd (jangka waktu 2024-2025) dan PT Kayan LNG Nusantara (jangka waktu 2023-2028) serta komitmen kontrak penjualan LNG jangka Panjang dengan China National Technical IMP.&EXP.CORP (jangka waktu 2024-2025) dan Gunvor Singapore Pte Ltd (jangka waktu 2024-2027).

Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian dan penjualan tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi untuk kontrak memberatkan dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain harga, pembelian dan penjualan per tanggal pelaporan. Suatu estimasi nilai manfaat ekonomis telah dihitung dan dibandingkan dengan estimasi ganti rugi apabila perusahaan tidak menjalankan komitmen sesuai kontrak.

Untuk komitmen kontrak penjualan LNG jangka panjang dengan Gunvor Singapore Pte Ltd, Perusahaan mengakui nilai yang lebih rendah antara estimasi nilai manfaat ekonomis dibandingkan dengan estimasi ganti rugi sebagai provisi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang memberatkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD68.540.528 dan dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD11.689.711.

Pada tanggal 3 November 2023, perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Gunvor Singapore Pte. Ltd. terkait pelaksanaan kontrak. Perusahaan memperkirakan kondisi *Force Majeure* tersebut untuk beberapa bulan pada tahun 2024. Pada saat pelaporan, belum terdapat dampak atas kejadian, informasi ,atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perusahaan.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

t. Long Term LNG Purchase and Sales Contract Commitment

In 2022 the Company signed a long-term LNG purchase contract commitment with Petronas LNG Ltd (term 2024-2025) and PT Kayan LNG Nusantara (term 2023-2028) as well as a long-term LNG sales contract commitment with China National Technical IMP.&EXP.CORP (term 2024-2025) and Gunvor Singapore Pte Ltd (term 2024-2027).

Management has estimated the economic benefits for all of the purchase and sale contract commitments in accordance with the criteria stated in PSAK 57 regarding provisions, contingent liabilities and contingent assets for onerous contracts by considering several parameters including price, purchases and sales as of the reporting date. An estimate of the value of economic benefits has been calculated and compared with an estimated compensation if the company does not fulfill the commitments according to the contract.

For the long- term LNG sales contract commitment with Gunvor Singapore Pte Ltd, the Company recognizes a lower value between the estimated economic benefit valuecompared to the estimated compensation as aprovision, measured and presented as a provision for onerous contract of LNG in the consolidated financial position as of December 31, 2023 of USD68,540,528 and in the consolidated statement profit or loss for the year ended December 31, 2023 of USD11,689,711.

On November 3, 2023, the company submitted Force Majeure notice to Gunvor Singapore Pte. Ltd. in relation to implementation of the contract. Company's estimate of the force majeure for several months of year 2024. At the time of reporting, there is no impact from the incident, information or material facts on the operational activities, legal, and financial condition of the company.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

u. Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR.

Pada tanggal 18 November 2022 Pertagas dan PHR menandatangani Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR No. 192/PG00000/2022-S0. Perjanjian berlaku sejak 18 November 2022 sampai dengan 8 Agustus 2041.

v. Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas antara Perusahaan dengan PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP")

Pada tanggal 29 April 2016, Pertagas dan PT Media Karya Sentosa (saat ini berubah nama menjadi PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas No. 046/PG0000/2016-S0 untuk melakukan pemrosesan *feed gas*. Perjanjian berlaku sampai dengan 27 Januari 2032.

Pabrik LPG milik ENP yang berada di Gresik, Jawa Timur, dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan produk LPG di Pertamina.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

u. Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR.

On 18 November 2022 Pertagas and PHR signed Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR No. 192/PG00000/2022-S0. The agreement valid from November 18, 2022 to August 8, 2041.

v. Gas Processing Agreement between the Company and PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP").

On 29 April 2016, Pertagas and PT Media Karya Sentosa (currently changing its name to PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP") signed a Gas Processing Agreement No. 046/PG0000/2016-S0 to perform feed gas processing. The agreement valid until January 27, 2032.

The LPG plant owned by ENP located in Gresik, East Java, is operated to meet the demand for LPG products at Pertamina.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

w. Perjanjian KSO antara Pertagas dengan RAJA

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Pertagas dan RAJA menandatangani Perjanjian No. 245/PG0000/2020-S0 melalui skema KSO non-administratif untuk bersama-sama membagi kontribusi pendanaan terhadap nilai investasi, risiko, dan manfaat/keuntungan dan pelaksanaan kegiatan Proyek Pipa Rokan sesuai dengan bagian partisipasi. Kepemilikan aset pipa Rokan dicatatkan seluruhnya di dalam pembukuan Pertagas sebagai aset yang dimiliki oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan minyak bumi dengan PHR di wilayah kerja Rokan.

Pada tanggal 14 April 2021 dan 30 Agustus 2021, telah dilakukan amandemen pertama dan kedua atas KSO dengan RAJA yang antara lain berisi perubahan bahwa Pertagas dan RAJA masing-masing merupakan pemegang dan pemilik aset atas pipa Rokan, dan berhak untuk mencatatkan pipa Rokan tersebut sebagai aset, sesuai dengan bagian partisipasi para pihak dan RAJA sepakat untuk memberikan hak pengusahaan pipa Rokan milik RAJA kepada Pertagas, sehingga dengan demikian pipa Rokan dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Pertagas.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

w. JO Agreement between Pertagas and RAJA

On October 21, 2020, Pertagas and RAJA signed agreement No. 245/PG0000/2020-S0 through a non-administrative JO to jointly share contributions to the financing value, risks, and benefits/gains, and the implementation of the Rokan Pipeline Project activities with the respective parties' participation portion. Ownership of the Rokan pipeline assets is entirely recorded in the Pertagas's books as assets owned by the Company. This agreement is valid until the end of the crude transportation agreement with PHR in the Rokan working area.

On April 14, 2021 and August 30, 2021, the first and the second amendment to the JO with RAJA was made, which among other things, include changes stating that Pertagas and RAJA respectively are holders and owners of the Rokan pipeline assets, and have the right to record the Rokan pipeline as assets, in accordance with the respective parties' participation portion and RAJA agreed to grant the operating rights of the Rokan pipeline owned by RAJA to the Company, thus enabling the Company to fully control and manage the Rokan pipeline

36. IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML

Pada tanggal 29 Agustus 2018, KJG mengajukan gugatan terhadap PCML dan PLN di Arbitrase International Chambers of Commerce ("ICC") Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban SOP diatur dalam PPG oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi PPG, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan Tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018.

Karena ketidakmampuan PCML dalam memenuhi komitmen volume gas yang telah disepakati dalam PG Kalija I, maka sesuai ketentuan PPG Kalija I timbul kewajiban SOP yang harus diselesaikan oleh pihak yang menyebabkan SOP tersebut. KJG telah melakukan musyawarah dengan PCML terkait kewajiban SOP tahun 2016 sejak awal tahun 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2017, PCML belum menyelesaikan kewajiban SOP tersebut. Selain itu PCML juga menyampaikan klaim kahar sesuai surat PCML tanggal 7 Juni 2017. Atas klaim kahar tersebut KJG menyampaikan penolakan sesuai surat tanggal 13 Juni 2017, dimana KJG menyampaikan bahwa sesuai PPG Kalija I maka syarat untuk keadaan kahar berlaku adalah adanya penetapan oleh konsultan mandiri yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh SKK Migas.

PCML telah menunjuk Lemigas sebagai konsultan independen untuk memeriksa keadaan kahar tersebut. Namun, KJG menganggap penunjukan dan hasil laporan Lemigas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PPG Kalija I.

Dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat keadaan kahar sesuai PPG Kalija I, KJG berpendapat bahwa semua hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku khususnya terkait dengan kewajiban SOP. KJG juga sudah meminta bantuan BPH Migas untuk menjadi mediator atas permasalahan SOP tersebut. BPH Migas mengundang para pihak dalam PPG pada tanggal 20 Maret 2018 dan 8 Mei 2018, namun PCML tidak hadir dalam kedua rapat tersebut. Mengingat KJG sudah melakukan upaya musyawarah dan mediasi dengan PCML tanpa hasil, maka KJG mengajukan gugatan arbitrase tersebut.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML

On August 29, 2018, KJG filed a lawsuit against PCML and PLN in the Hongkong Arbitration International Chambers of Commerce ("ICC") in connection with the non performing SOP obligation as agreed in the Gas Transportation Agreement by PCML and compensation for a GTA termination, while the lawsuit to PLN was conducted in connection to a Monthly Invoice deduction since March 2018 until September 2018.

Due to PCML's inability to fulfil the gas volume commitment which has been agreed in GTA Kalija I, in accordance with GTA Kalija I, ship-or-pay liability arose and should be settled by the party who causes the ship-or-pay. KJG has conducted discussions with PCML in relation to the 2016 ship-or-pay liability since early 2017, nevertheless up until the end of 2017, PCML has not settled its ship-or-pay liability. Moreover, PCML has declared force majeure through its letter dated June 7, 2017. Regarding the force majeure claim, KJG has sent an objection letter dated June 13, 2017 in which KJG notified that in accordance with GTA Kalija I, force majeure should be determined by an independent consultant as agreed by each party and then should be examined and approved by SKK Migas.

PCML has appointed Lemigas as the independent consultant to assess the force majeure. However, KJG believes that the appointment of Lemigas including Lemigas's report are not in accordance with GTA Kalija I.

As the force majeure terms in accordance with GTA Kalija I have not been fulfilled, KJG believes that all rights and obligations of the parties are still valid, particularly related to the ship-or-pay obligation. KJG has requested BPH Migas's assistance as mediator for this ship-or-pay matter. BPH Migas has invited the parties in GTA Kalija I on March 20, 2018 and May 8, 2018, but PCML has failed to attend both meetings. Since KJG has already strived to engage PCML in negotiation and mediation without success, KJG then has submitted the arbitration claim.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

PCML telah menghentikan pengaliran gas sejak tanggal 23 September 2019 dan KJG telah melakukan terminasi PPG melalui surat tanggal 13 November 2019, yang berlaku efektif sejak tanggal 13 Desember 2019 karena KJG melihat tidak ada itikad baik dari PCML untuk melanjutkan dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dan disepakati dalam PPG. Terkait terminasi tersebut, KJG telah memasukan gugatan ganti rugi dalam *Statement of Claim* ("SOC") tertanggal 28 Februari 2020 ke ICC.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, PCML telah menyerahkan *Statement of Defense* atas *Cross-Claim* yang disampaikan PLN. Pada tanggal 5 Februari 2021, KJG telah mengajukan respon atas *Statement of Defense* dari PCML dan PLN. Selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak maka pada bulan Mei 2021, PCML serta PLN akan menjawab respon dari KJG dan menjawab respon atas *cross claim* dari PCML kepada PLN maupun *cross claim* PLN kepada PCML.

Dalam Reply Memorial tersebut, KJG menyampaikan bahwa (i) PCML sepatutnya tidak dapat menghindari kewajiban atas SOP KJG sejak tahun 2016 sampai dengan 13 Desember 2019 serta ganti rugi atas berakhirnya PPG senilai komitmen SOP dalam PPG yaitu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2026 berdasarkan PPG dengan nilai gugatan sebesar USD 373 juta (ii) PLN bertanggung jawab atas pengembalian pemotongan pembayaran tarif kepada KJG sebesar USD 2,1 juta (belum termasuk bunga); dan (iii) bunga dan biaya ICC serta biaya Konsultan Hukum KJG maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan KJG.

Sebagai bentuk sinergi BUMN dan untuk mendukung pengaliran kembali gas dari Lapangan Kepodang untuk pembangkit listrik Tambak Lorok, pada tanggal 26 Februari 2021 KJG dan PLN telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang pada intinya menyepakati nilai yang harus dikembalikan oleh PLN atas klaim pemotongan tagihan bulanan KJG dalam Arbitrase ICC.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Perdamaian tersebut, pada tanggal 31 Maret 2021 PLN telah melakukan pembayaran atas nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian yaitu sebesar USD1.054.495.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

PCML has stopped the gas flow since September 23, 2019 and KJG terminated the GTA in a letter dated November 13, 2019, effective as of December 13, 2019, because KJG determined that there was no good faith from PCML to continue and carry out its obligations in accordance with the terms stipulated and agreed in the GTA. In relation to the termination, KJG has submitted a claim for compensation in the Statement of Claim ("SOC") dated February 28, 2020 to the ICC.

On October 9, 2020, PCML submitted a Statement of Defense on the Cross-Claim submitted by PLN. On February 5, 2021, KJG submitted a response to the Statement of Defense from PCML and PLN. Furthermore, according to the schedule agreed upon by the Parties in May 2021, PCML and PLN will answer the response from KJG and answer the response on the cross claims from PCML to PLN and the cross claims from PLN to PCML.

In the Reply Memorial, KJG stated that (i) PCML cannot avoid the liability for KJG's SOP claims from 2016 to December 13, 2019 and the compensation for the end of the GTA equal to the SOP commitment in the GTA, namely from December 14, 2019 until the end of 2026 based on the GTA with a claims value of USD 373 million (ii) PLN is responsible for returning the tariff payment to KJG in the amount of USD 2.1 million (not yet including interest); and (iii) all interests and ICC fees and also all KJG's Legal Consultant fees and other costs incurred by KJG.

As a form of a BUMN synergy and to support the return of gas from the Kepodang Field to the Tambak Lorok power plant, on February 26, 2021, KJG and PLN signed a Settlement Agreement which essentially agreed on the value that must be returned by PLN for the claim for deducting the KJG monthly invoice in the ICC Arbitration.

As a follow-up to the Settlement Agreement, on March 31, 2021, PLN has paid the amount agreed in the Settlement Agreement in the amount of USD1,054,495.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

Karena adanya kendala kesehatan dari Ketua Arbiter yang diketahui oleh Para Pihak dalam proses Pra Hearing tanggal 13 April 2022, maka Konsultan hukum KJG merekomendasikan untuk melakukan penggantian Ketua Arbiter. Penggantian tersebut juga diusulkan oleh semua Pihak dalam arbitrase dan dengan adanya penggantian tersebut, maka proses *hearing* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 telah dijadwalkan ulang oleh ICC menjadi bulan Oktober 2023 (berdasarkan Surat dari Sekretariat International *Court of Arbitration* tanggal 26 September 2022).

Perubahan Jadwal Hearing menjadi Oktober 2023 antara lain dikarenakan mempersiapkan Arbiter Ketua yang baru sebelum sidang hearing, untuk:
- Informasi kasus dan pelaksanaan Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase ICC;
- Seluruh proses persidangan yang sudah berjalan sejak awal;
- Korespondensi para pihak dan korespondensi Arbitrase;
- Profil para Co-Arbiter

Pada tanggal 26 Juni 2023, telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan Konsultan hukum internal *King and Spalding ("*KS") dalam rangka penyampaian hasil kajian KHI terhadap SOC KJG untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari KS.

Pada tanggal 6-7 September 2023 KJG telah melakukan rapat persiapan hearing bersama Konsultan Hukum dan *Technical Expert*.

Pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2023 telah dilaksanakan hearing di ICC Singapore, dengan agenda: *Opening Statement* dari masing-masing Pihak, keterangan dari Technical Expert dan Closing Submissions.

Pada tanggal 15 Desember 2023, KJG telah mengirimkan data *Submission Cost* kepada Tribunal, yang didalamnya memuat biaya Konsultan Hukum, biaya Expert dan *tribunal cost* yang sudah terbayar maupun yang masih outstanding.

Arbitrase diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak dan dapat selesai pada triwulan kedua 2024. Manajemen memiliki keyakinan yang kuat bahwa Perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam proses Arbitrase ini.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

Due to the health problem of the Tribunal President which was discovered by the Parties during the Pre Hearing on April 13, 2022, KJG's legal consultant recommended replacing the Tribunal President. The replacement was also proposed by all Parties in the arbitration and with the replacement, the hearing process which was planned to be held in May 2022 has been rescheduled by the ICC to October 2023 (based on the Letter from the Secretariat of the International Court of Arbitration dated 26 September 2022).

Hearing Schedule postpone to October 2023 due to preparing the new Chief Arbitrator before the hearing:
- *Give Information on cases and implementation of Arbitration under the Rules ICC Arbitration;*
- *The entire trial process that has been running since the beginning;*
- *Correspondence of the parties and Arbitration correspondence;*
- *Profiles of Co-Arbitrators.*

On June 26 2023, further coordination was carried out with the KS in order to submit the KHI study results to the KJG SOC to obtain clarification and confirmation from the KS.

On September 6-7 2023 KJG held a preparation meeting for hearing with legal consultant and technical expert.

The Abritrase Hearing was held on 30 October - 3 November 2023, with the agenda: Opening Statement from each Party, information from Technical Expert and Closing Submissions.

On 15 December 2023, KJG submitted a Submission Cost to the Tribunal, which included paid and outstanding Legal Counsel fees, Expert fees and tribunal cost.

The arbitration is expected to be carried out according to the schedule agreed by the parties and to be completed by the second quarter of 2024. Management believes strongly that the Company has a strong position in this Arbitration process.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengajuan tuntutan kepada PT Hoegh LNG Lampung

Pada Agustus 2021, PT PGN LNG Indonesia (sebagai Penggugat), anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan seluruhnya oleh PGN, telah mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") terhadap PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Tergugat) terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan FSRU Lampung ("LOM *Agreement*") dengan tuntutan berupa pembatalan LOM *Agreement*, dan/atau pengakhiran LOM *Agreement*, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PT PGN LNG Indonesia. Atas pengajuan gugatan tersebut, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat Rekonpensi) telah menyampaikan tanggapan dan gugatan baliknya kepada PT PGN LNG Indonesia (sebagai Tergugat Rekonpensi).

Pada September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat) juga mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC terhadap Perusahaan (sebagai Tergugat) terkait dengan jaminan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban PT PGN LNG Indonesia atas LOM *Agreement* sebagaimana tertuang dalam *Transferor Guarantee*, dengan tuntutan antara lain berupa ganti rugi.

Pada tanggal 13 Juni 2022, PT PGN LNG Indonesia dan PT Hoegh LNG Lampung masing-masing telah menyampaikan gugatan (*Statement of Claim*) kepada SIAC. Isi dari gugatan tersebut yaitu penjelaskan dasar gugatan yang berisi penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Claim submission to PT Hoegh LNG Lampung

In August 2021, PT PGN LNG Indonesia (as Claimant), a wholly owned and wholly controlled subsidiary of PGN, has submitted an arbitration notice to the Singapore International Arbitration Center ("SIAC") against PT Hoegh LNG Lampung (as Respondent) related to the lease, operation and maintenance agreement of FSRU Lampung ("LOM Agreement") with a claim of cancellation of the LOM Agreement, and/or termination of the LOM Agreement, and/or providing damages to PT PGN LNG Indonesia. Upon the claim submission, PT Hoegh LNG Lampung (as Claimant of Counterclaim) has submitted its response and counterclaim to PT PGN LNG Indonesia (as Respondent of Counterclaim).

In September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (as Claimant) also submitted a notification of arbitration to SIAC against the Company (as Respondent) regarding the guarantee provided by the Company for the fulfillment of PT PGN LNG Indonesia's obligations under the LOM Agreement as stated in the Transferor Guarantee, with claim of damages..

On June 13, 2022, PT PGN LNG Indonesia and PT Hoegh LNG Lampung each submitted a Statement of Claim to SIAC. The content of the lawsuit is an explanation of the basis of the lawsuit which contains an explanation regarding the violations committed by each party.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengajuan tuntutan kepada PT Hoegh LNG Lampung (lanjutan)

Atas gugatan-gugatan tersebut, PGN dan PLI telah menyampaikan dokumen berupa jawaban pembelaan *(Statement of Defence)* pada September 2022 dan replik *(Reply)* pada September 2023.

Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Pada tanggal 5 Februari 2024, PGN, PLI dan PT Hoegh LNG Lampung bersama-sama telah menandatangani *Settlement Agreement*/Perjanjian Perdamaian yang pada intinya memuat kesepakatan para pihak untuk mencabut perkara-perkara tersebut dan melanjutkan dengan iktikad baik negosiasi dan diskusi berbagai hal komersial yang berkaitan dengan Perjanjian LOM. Para Pihak juga telah memberitahu Tribunal dan SIAC perihal diatas pada tanggal yang sama.

Pada tanggal 12 Februari 2024, Tribunal dan SIAC telah menyatakan menerima notifikasi permohonan pencabutan perkara-perkara yang diajukan oleh PGN, PLI dan Hoegh. Tribunal dan SIAC sedang mempersiapkan proses administrasi untuk finalisasi pencabutan perkara-perkara tersebut.

c. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 135 tahun 2021 dan 91 Tahun 2023

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Kepmen No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 juncto Kepmen No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri dan No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang berlaku efektif masing-masing pada tanggal 30 Juli 2021 dan 2 Agustus 2021. Kedua peraturan ini mengatur tentang harga gas bumi tertentu bagi industri dan pembangkit tenaga Listrik berdasarkan Perpres 121 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan harga gas bumi tertentu dituangkan dalam side letter implementasi harga gas bumi tertentu dan/atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati antara industri dan pembangkit tenaga Listrik penerima harga gas bumi tertentu dengan PGN.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Claim submission to PT Hoegh LNG Lampung (continued)

Due to those claims, PGN and PLI have submitted the Statement of Defence in September 2022 and Reply in September 2023.

The Parties have agreed to withdraw the cases. On February 5, 2024, PGN, PLI and PT Hoegh LNG Lampung jointly signed a Settlement Agreement which essentially contains an agreement between the parties to withdraw the cases and continue in good faith the negotiation and discussion on various commercial matters relating to the LOM Agreement. The Parties have also informed the Tribunal and SIAC on matter above on the same date.

Whereas on February 12, 2024, the Tribunal and SIAC have stated receiving the notification of the request for withdrawal of the cases submitted by PGN, PLI and Hoegh. The Tribunal and SIAC are preparing the administration process for finalizing the withdrawal of the cases.

c. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Ministry of EMR Decree No. 135 year 2021 and 91 year 2023

The Minister of Energy and Mineral Resources has issued Ministerial Decree No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 juncto Kepmen No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023regarding Specific Customers and Price of Natural Gas in the Industrial Sectors and No.135.K/HK.02/MEM.M/2021 regarding Price of Natural Gas at the Electricity Power Plant Gate effective on July 30, 2021 and August 2, 2021, respectively. These two regulations regulate the price of certain natural gas for industry and electricity generation based on Presidential Decree 121 of 2020.

In its implementation specific gas sales price will be stated in side letter and/or other written documents agreed upon between the industry and the Electric Power Generation Business Entity with PGN.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 135 tahun 2021 dan 91 Tahun 2023 (lanjutan)

SKK Migas sesuai kewenangannya akan mengkoordinasikan penyesuaian harga gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontraktor PSC. Untuk melaksanakan fungsinya, SKK Migas menerbitkan Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Bagi Hasil Kontraktor PSC dari Penurunan Harga Gas Bumi Melalui Mekanisme Perhitungan *Provisional Entitlement* dan *Final Entitlement*. Berdasarkan kajian manajemen, penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak mempengaruhi bagian pendapatan Kontraktor PSC (segmen usaha hulu minyak dan gas bumi) secara signifikan di masa mendatang dikarenakan adanya kompensasi dari Pemerintah melalui mekanisme entitlement.

BPH Migas memiliki kewenangan dalam menentukan tarif transmisi gas. Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan, Grup menantikan tindak lanjut dari BPH Migas untuk mengimplementasikan Kepmen ini.

Penentuan harga beli dan jual dan alokasi ini ditentukan secara tahunan oleh Kementerian ESDM. Dalam operasi Grup, akibat dari pengaturan ini, terdapat Unutilised Gas Volume, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Dalam hal ini, manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sejumlah USD82.284.759 dan USD172.910.373 (lihat Catatan 18). Manajemen Grup berpendapat jumlah provisi yang telah dibukukan mencukupi untuk penyelesaian kewajiban Grup kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan selisih harga pembelian gas bumi ini.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Ministry of EMR Decree No. 135 year 2021 and 91 year 2023 (continued)

SKK Migas, in accordance with its authority, will coordinate the adjustment of natural gas prices from upstream oil and gas business activities with PSC Contractors. To carry out its function, SKK Migas issued Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 regarding Technical Guidelines for Adjustment of Production Sharing for PSC Contractors from Decrease in Natural Gas Prices through the Provisional Entitlement and Final Entitlement Calculation Mechanism. Based on management's assessment, adjustments to the natural gas prices will not significantly affect the PSC Contractor's share of revenue (oil and gas upstream business segment) in the future due to the compensation provided by the Government through the entitlement mechanism.

BPH Migas has the authority to determine the tariff for gas transmission. As of the issuance date of these financial statements, the Group is awaiting for BPH Migas' action in order to implement this Ministerial Decree.

The determination of the purchase and sale prices and the allocation is set annually by the Ministry of EMR. In the Group's operations, as a result of this arrangement, there is Unutilised Gas Volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by the Ministry of EMR for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. In this case, the Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government. As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas recorded in the consolidated statements of financial position amounted to USD82,284,759 and USD172,910,373 respectively (see Note 18). The Group's management believes that the provision that has been recorded is adequate to settle the Group's obligations to the Government of Indonesia in relation to the difference in the purchase price of this natural gas.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

Pada 3 April 2023, Perusahaan menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa Perusahaan telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar mengingat Perusahaan hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh Perusahaan adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh Perusahaan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan PSC yang telah ditandatangani bersama dengan SKK Migas.

Perusahaan telah menunjuk Kantor Hukum RAJ & Associates sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menjalani beberapa proses persidangan termasuk menghadirkan beberapa saksi penting baik dari PT Freeport Indonesia maupun dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar.

e. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad (“Tanah’’). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingingasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Penguasahaan Hitan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Claim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

On April 3 2023, the Company received a lawsuit letter with the main case being that the Company had taken control of ex-PT Freeport Indonesia pipe goods which were claimed to be goods belonging to the Kamoro Tribe Traditional Council of Deliberative Institutions (LEMASKO) which was the result of a grant from PT Freeport Indonesia. Management is of the opinion that the lawsuit is baseless considering that the Company only controls goods related to activities related to Oil and Natural Gas, and Oil and Natural Gas assets controlled by the Company are State Property and are legally controlled by the Company based on applicable legal provisions and the PSC which has been signed together with SKK Migas.

The company has appointed RAJ & Associates Law Firm as legal counsel to handle the lawsuit. Up to the date of completion of these consolidated financial statements, the Company has undergone several trial processes including presenting several important witnesses both from PT Freeport Indonesia and from the Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Management remains of the opinion that the lawsuit received is baseless.

e. Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad’s forest consession area (‘‘Land’’). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (lanjutan)

Adapun tanah milik PGN yang menjadi obyek gugatan, PGN telah memiliki SHGB atas tanah obyek tanah tersebut.

Pada tanggal 6 februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL

Terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PGASSOL yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda dan Febri Utama ("kreditor") dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2022, dengan hasil dikabulkannya permohonan PKPU. Adapun nilai permohonan yang dikabulkan dalam putusan adalah sebesar Rp38.874.128.785,00, dari Para Pemohon dan Kreditur Lain.

Pada tanggal 12 Oktober 2022 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian antara PT PGAS Solution dan kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berakhir.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, terdapat permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT PGAS Solution yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, dan Syafnir.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (continued)

Regarding the land owned by PGN that is the subject of the lawsuit, PGN already holds a Right of Building Use Certificate (SHGB) for the said land.

On February 6, 2024, PTPN VII withdrew its lawsuit regarding the matter in question. Subsequently, on February 12, 2024, PGN received a notification of the lawsuit withdrawal from PTPN VII with the decree stating:

1. *Granting the plaintiff's petition;*
2. *Declaring case Number 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu withdrawn;*
3. *Ordering the plaintiff to pay the case costs.*

f. Application For Postponement Of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL

There was an application for Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU") against PGASSOL submitted by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda and Febri Utama ("creditors") there for there has been a decision on the PKPU application based on the Jakarta Commercial Court Decision number 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst dated August 24, 2022, with the result that the PKPU application was granted so that currently PGASSOL is in a Temporary PKPU condition. The value of the application granted in the decision is Rp38,874.128,785.00, from the Petitioners and Other Creditors.

On October 12, 2022, a Reconciliation Truce Agreement has been made and signed between PT PGAS Solution and creditors at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and stated Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) has ended.

On October 19, 2022, there was a request for cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia against PT PGAS Solution's Completion Endorsement (Homologasi) Decision submitted by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, and Syafnir.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL (lanjutan)

Adapun proses kasasi terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT PGAS Solution yang telah berjalan adalah:

Penyampaian Memori Kasasi kepada Panitera Mahkamah Agung RI oleh PT UPN, cv ravianda, febri utama dan syafnir melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 14 November 2022;

Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT PGAS Solution: 27 Oktober 2022;

Pengiriman berkas perkara Kasasi Kepailitan Akta Nomor: 99 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Panitera Mahkamah Agung RI;

Permintaan Kelengkapan berkas perkara Kasasi Pailit No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 3 Januari 2023;

Pengiriman Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pailit No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung RI: 19 Januari 2023;

Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit: 31 Januari 2023.

Pada tanggal 16 Maret 2023, Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan Kasasi yang diajukan PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama dan Syafnir dengan amar putusan Tolak Kasasi.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Application For Postponement Of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL (continued)

The process of cassation against PT PGAS Solution's Peace Endorsement Decision (Homologation) which has been running is:

Submission of the Memorandum of Cassation to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia by PT UPN, cv ravianda, febri utama and syafnir through the Registrar of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court: 14 November 2022;

Submission of Contra Memorandum of Cassation to Registrar of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court by PT PGAS Solution: October 27, 2022;

Delivery of Bankruptcy Cassation case file Deed Number: 99 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number: 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. from the Central Jakarta District Court to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;

Request for Completeness of Bankruptcy Cassation Case No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst from the Supreme Court of the Republic of Indonesia to the Chairman of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court: January 3, 2023;

Delivery of complete Bankruptcy Cassation Case No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst from the Chairman of the Central Jakarta District Court to the Supreme Court of the Republic of Indonesia: January 19, 2023;

Notification of Bankruptcy Cassation Case Register Number: January 31, 2023.

On March 16, 2023, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided on the cassation request filed by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama and Syafnir with a decision of Rejecting Cassation.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL (lanjutan)

PKPU PGASSOL telah berakhir dengan tercapainya Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Putusan Homologasi) pada tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuktikan dengan Salinan Putusan Homologasi tanggal 12 Oktober 2022 dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

g. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME")

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, ME menyatakan secara tegas dan sekaligus mengakui adanya utang kepada Perusahan. Terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa ME akan menyerahkan sebagian kepemilikan aset milik ME kepada Pertagas sebagai offsetting utang. Para pihak sepakat akan dilakukan serah terima aset kepada Pertagas setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang independen. Namun hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ME belum menyepakati nilai aset yang tercantum dalam laporan KJPP. Pertagas telah mengajukan gugatan perdata wanprestasi kepada ME di Pengadilan Negeri ("PN") Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2020.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, ME menyampaikan surat permohonan perdamaian yang menyatakan bahwa ME bersedia memberikan hak kepemilikan pipa Pondok Tengah - Tegal Gede sebesar 60% kepada Pertagas sebagai penyelesaian utang ME. Namun, Pertagas belum menerima penawaran ini dan melanjutkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan wanprestasi dari Pertagas kepada ME.

Pada tanggal 5 Desember 2022, manajemen telah mengajukan banding dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ("PTJ") dengan perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f Application For Postponement Of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL (continued)

PGASSOL's PKPU ended with the achievement of Peace Agreement Validation Ruling (Homologation Decision) on October 12th, 2022, which proven by the copy of Homologation decision dated October 12th, 2022 and data from Trade Court's Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) from Central Jakarta District Court.

g. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME")

Based on Debt-Receivable Settlement Agreement, ME explicitly stated and also recognized its debt to Pertagas. There has been a mutual agreement between the two parties that ME would handover its assets entitlement partially to Pertagas in order to offset their debt. Both parties agreed that the assets would be transferred to Pertagas once the assets are appraised by the independent public appraiser ("KJPP"). However, as of the issuance date of these consolidated financial statements, ME has not agreed to the assets' valuation stated in the KJPP's report. Pertagas has filed a civil lawsuit against ME on the breach of contract in South Jakarta District Court, with the Case Register No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dated April 13, 2020.

On October 28, 2021, ME submitted a letter of reconciliation which stated that ME was willing to give 60% of ownership rights to the Pondok Tengah - Tegal Gede pipeline to Pertagas as a settlement of ME's debt. However, Pertagas did not accept the offer and continue the civil lawsuit in South Jakarta District Court. On November 22, 2022, South Jakarta District Court rejected provisional demands of Pertagas to ME.

On December 5, 2022, the management filed an appeal and has been accepted by the Jakarta High Court with case No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME") (lanjutan)

Pada tanggal 29 Agustus 2023, manajemen telah menerima putusan dari PTJ, dimana putusan tersebut menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan. Pertagas tidak melanjutkan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih merencanakan upaya terbaik untuk dapat menagihkan seluruh piutang dari ME.

h. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas

Pertagas menjadi salah satu tergugat atas 2 (dua) gugatan hukum yang diajukan oleh GPS (Penggugat). Gugatan pertama ditujukan ke beberapa pihak, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia (Tergugat I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Tergugat II), PT Elnusa, Tbk. (Tergugat III), Pertagas (Tergugat IV), PT Ansi Mega Instrumenindo (Tergugat V) dan PT Pratiwi Putri Sulung (Tergugat VI). Dalil gugatan tersebut terkait dengan pembangunan pipa gas PT Cikarang Listrindo Tbk., yang dianggap melanggar Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghentikan sementara pembangunan dimaksud. Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR0,15 triliun. Selanjutnya, GPS juga melakukan gugatan terhadap ESDM Republik Indonesia (Tergugat I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Tergugat II), dan Pertagas (Tergugat III), dengan dalil para tergugat telah melakukan tindakan persekongkolan atau konspirasi atas penerbitan izin pembangunan pipa gas PT Cikarang Listrindo Tbk. sebagai cadangan. Dalam gugatan ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR1,88 triliun.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME") (continued)

*On August 29, 2023, the management received a decision from the Jakarta High Court, affirming the verdict of the South Jakarta District Court. Pertagas has opted not to pursue further legal actions in the form of cassation to the Supreme Court of the Republic of Indones**ia.***

As the date of the issuance of these consolidated financial statements, the management is still planning the best course of action to collect all receivables from ME.

h. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas.

Pertagas is one of the defendants to 2 (two) lawsuits filed by GPS (the Plaintiff). The first lawsuit is againts several parties, such as Minister of Energy and Mineral Resources ("MEMR") of the Republic of Indonesia (Defendant I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Defendant II), PT Elnusa Tbk. (Defendant III), Pertagas (Defendant IV), PT Ansi Mega Instrumenindo (Defendant V), and PT Pratiwi Putri Sulung (Defendant VI). The grounds for the lawsuit are related to the construction of the gas pipeline by PT Cikarang Listrindo Tbk., which is alleged to violate the Interim Decision of the Administrative Court of Jakarta to temporarily halt the said construction. The Plaintiff seeks joint and several indemnification in the amount of IDR0.15 trillion. Furthermore, GPS also initiates a lawsuit against the MEMR of the Republic of Indonesia (Defendant I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Defendant II), and Pertagas (Defendant III), on the grounds that the defendants have engaged in collusion or conspiracy in the issuance of the permit for the construction of the gas pipeline by PT Cikarang Listrindo Tbk. as a backup. In this lawsuit, the Plaintiff seeks indemnification in the amount of IDR1.88 trillion on a joint and several basis

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR1 miliar untuk gugatan pertama dan IDR333,8 miliar untuk gugatan kedua. Pada tanggal 14 September 2021, Pertagas telah mengajukan banding kepada PTJ atas kedua gugatan tersebut.

i. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME")

Pada tanggal 14 Juni 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan pertama. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Februari 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan kedua dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR77,3 miliar. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, manajemen belum menerima salinan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan kasasi Pertagas.

Dalam hal proses perkara hukum tersebut, masih terdapat upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Pertagas, yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manajemen yakin bahwa Pertagas memiliki posisi hukum yang kuat atas gugatan ini, maka dari itu, manajemen tidak mencatat penyisihan atas nilai tuntutan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas (continued).

On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court partially granted the petitioner's claims and ordered the respondent to jointly and severally pay damages to the Plaintiff amounting to IDR1 billion for the first lawsuit and IDR 333.8 billion for the second lawsuit. On September 14, 2021, Pertagas filed an appeal to the Jakarta High Court against both lawsuits.

i. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME")

On June 14, 2022, the Jakarta High Court affirmed the decision of Central Jakarta District Court regarding the first claim. On July 25, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the first claim.

On February 14, 2022, the Jakarta High Court upheld the decision of Central Jakarta District Court for the second claim and partially granted the Plaintiff's claims, ordering the defendants jointly and severally to pay the amount of IDR 77.3 billion.
On May 17, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the second claim.

As the date of the issuance of these consolidated financial statements, the management has not received a copy of the decision issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on Pertagas's cassation petition.

In the legal process, Pertagas can still opt for an extraordinary legal action in the form of a petition for Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Management is confident that Pertagas has a strong legal position in this lawsuit; therefore, no provision for the claim amount is recorded in the consolidated financial statements.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi, utang usaha dan lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa dan utang obligasi. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Grup. Grup juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas dan piutang usaha, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Direksi menyediakan kebijakan tertulis untuk manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis untuk area khusus, seperti risiko nilai tukar mata uang, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai secara ekonomis atas risiko keuangan. Masing-masing unit bisnis melaksanakan manajemen risiko berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Komite Manajemen Risiko memonitor pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Grup

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

a. Risiko kredit

   Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan atas penjualan barang dan jasa.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The principal financial liabilities of the Group consist of trade and other payables, accrued liabilities, short-term bank loans, lease liabilities, long-term loans and bonds payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Group. The Group also has various financial assets such as cash and cash equivalents and trade receivables, which arised directly from their operations.

The Group's business involves taking risks in a targeted manner and managing them professionally. The core functions of the Group's risk management are to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

The Group's aim in managing the financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

The Directors provide written policies for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group identifies, evaluates and economically hedges its financial risks. Each business unit carries out the risk management based on the written policies approved by the Directors. Risk Management Committee monitors the risk management carried out by the Group.

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks, which includes credit risk, market risk and liquidity risk.

a. Credit risk

   Credit risk is the risk of suffering financial loss, when the Group's customers fail to fulfil their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from trade receivables from the sale of goods and services to customers.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Grup menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

- Meminta jaminan dalam bentuk kas atau *standby L/C* senilai dua bulan pemakaian gas;
- Memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik; dan
- Menerima pelanggan baru dan penjualan disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan delegasi kekuasaan Grup.

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap piutang usaha dan piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

The Group implements a range of policies and practices to mitigate the credit risk. The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:

- *Taking of deposits in form of cash or standby L/C that equivalent to two months' gas usage;*
- *Selecting customers with a strong financial condition and good reputation; and*
- *Accepting new customers and sales that are approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.*

Maximum credit risk exposure relating to trade and other receivables in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
Piutang usaha	494.008.796	615.399.411	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	37.697.266	45.916.705	*Other receivables*
Piutang lain-lain jangka panjang	63.853.371	65.356.756	*Other long-term receivables*
Total	**595.559.433**	**726.672.872**	***Total***

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset keuangan pada nilai wajar melalui komprehensif lain, risiko kredit yang dihadapi Grup timbul karena wanprestasi dari *counterparties*. Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 5.

With respect to credit risk arising from the other financial assets, which comprise cash and cash equivalent, restricted cash and investment at fair value through other comprehensive income, the Group's exposure to credit risk arises from default of the counterparties. The Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and only put the investments in banks with a high credit ratings. The maximum exposure equal to the carrying amount as disclosed in Notes 4 and 5.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat piutang usaha (memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan operasi utama.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

The following table breaks down the Group's credit exposure at carrying amounts of trade receivables (taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the main operations.

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
Belum jatuh tempo	367.514.515	496.766.983	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
0 bulan - 3 bulan	48.629.444	14.728.037	*0 month - 3 months*
3 bulan - 6 bulan	6.546.432	9.587.592	*3 months - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	8.348.122	32.885.267	*6 months - 1 year*
> 1 tahun	214.669.723	208.981.323	*> 1 year*
Subtotal	645.708.236	762.949.202	*Subtotal*
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai	(151.699.440)	(147.549.791)	*Allowance for impairment*
Piutang usaha - neto	**494.008.796**	**615.399.411**	***Trade receivables - net***

b. Risiko pasar

Grup memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Grup memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para kreditur.

(i) Risiko tingkat bunga

Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman Grup dengan tingkat bunga variabel.

b. Market risk

The Group is exposed to market risk, in particular interest rate risk and foreign currency risk.

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group's short-term and long-term debt is charged with floating interest rates. Group strictly monitors the market interest rate fluctuation and if the interest rate significantly increases, they will renegotiate the interest rate to the lenders.

(i) Interest rate risk

Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The table below summarises the Group's borrowings with floating interest.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

37. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	-	42.279.930	519.958.791	*Bank loans*
Total	**-**	**42.279.930**	**519.958.791**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	-	1.620.873	94.396.989	*Bank loans*
Total	**-**	**1.620.873**	**94.396.989**	***Total***

Analisis sensitivitas untuk risiko suku bunga

Selama tahun 2023, jika tingkat suku bunga pinjaman bank dengan suku bunga mengambang meningkat menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar USD1.756.201.

Sensitivity analysis for interest rate risk

During 2023, had the interest rate of the bank loans with floating interest rate been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before tax for the year that ended would have been USD1,756,201 lower/higher.

(ii) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas perubahan nilai tukar Dolar AS sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, khususnya Rupiah dan Yen Jepang. Risiko ini muncul disebabkan aset dan kewajiban dan transaksi operasional Grup sebagian dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yen Jepang sehingga pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah dan Yen Jepang dapat secara negatif mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup.

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that arises from the changes of the exchange rate of US Dollar as the reporting currency against foreign currencies, in particular Rupiah and Japanese Yen. This risk Some of the Group's assets, liabilities and operational transactions are conducted in Rupiah or Japanese Yen, therefore, weakening of US Dollar against Rupiah and Japanese Yen will negatively impact the result and financial position of the Group.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada kas dan setara kas, piutang lain-lain, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, taksiran tagihan pajak, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja, utang pajak, liabilitas yang masih harus dibayar dan liabiltas sewa.

Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Catatan 39.

Analisis sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2023, penurunan (kenaikan) nilai tukar dolar AS terhadap mata uang asing sebesar 100 *basis point* dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akan naik (turun) masing-masing sebesar USD2.468.731 dan (USD2.419.845), terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, taksiran tagihan pajak, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pajak, liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan liabilitas sewa.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Foreign exchange risk (continued)

Monetary balances denominated in currencies other than US Dollar were included in cash and cash equivalents, trade receivables, other receivable, trade payables, estimated claim tax for refund, other payable, employee's benefit liabilities, tax payable, accrued liabilities and lease liabilities.

The Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2023 and December 31, 2022 were presented in Note 39.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of December 31, 2023, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in Indonesian Rupiah, Japanese Yen, and Singapore Dollar.

As of December 31, 2023, decrease (increase) in the exchange rates of the US dollar against foreign currencies by 100 basis point with all other constant variables, profit before tax for the year ended would increase (decrease) by USD2,468,731 and (USD2,419,845) respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, estimated claim for tax refund, other payables, short-term employee's benefit liabilities, accrued liabilities, taxes payable, long-term employee's benefit liabilities and lease liabilities.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Grup mempunyai aset finansial berupa investasi pada instrumen utang, yang nilai wajarnya sangat terpengaruh dengan risiko harga pasar. Grup mengelola risiko ini dengan mendiversifikasikan ke beberapa investasi. Direksi melakukan reviu dan menyetujui setiap keputusan investasi jangka pendek.

Risiko harga terhadap pendapatan Grup dinilai tidak material karena seluruh pendapatan Grup dari penjualan gas, penjualan minyak bumi, jasa sewa fiber optik, dan jasa konstruksi dilakukan oleh Grup dengan harga final berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk

The Group has financial assets in the form of debt investments, for which the fair value of these investments is affected by the market price risk. The Group manages this risk through diversification the investments. Directors review and approve all short-term investments decision.

Price risk related to the Group's revenue is considered immaterial since all of the Group's revenue from sales of gas, sales of crude oil, fiber optic rental and construction services are done with a final price based on agreements that have been agreed with the customers.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The Group evaluates and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of funds to settle the due obligations. In general, funds needed to settle the short-term and long-term liabilities are obtained from settlement of trade receivables from the customers with one month credit term.

	31 Desember/*December* 31, 2023				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ ***On demand and within 1 year***	**Dalam waktu 1 tahun sampai sampai dengan 5 tahun/*Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years***	**Total/** ***Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang obligasi	552.633.015	-	-	552.633.015	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	34.826.814	193.731.454	202.123.795	430.682.063	*Lease liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar	352.673.261	68.540.528	-	421.213.789	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	2.590.841	-	-	2.590.841	*Short-term bank loan*
Pinjaman bank jangka panjang	39.689.089	519.958.791	-	559.647.880	*Long-term bank loan*
Utang usaha	245.210.144	-	-	245.210.144	*Trade payables*
Utang lain-lain	117.290.669	-	-	117.290.669	*Other payables*
Jumlah	**1.344.913.833**	**782.230.773**	**202.123.795**	**2.329.268.401**	**Total**

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk (lanjutan)

	31 Desember/*December 31*, 2022				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ *On demand within 1 year*	**Dalam waktu 1 tahun sampai sampai dengan 5 tahun/*Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang obligasi	-	1.323.114.950	-	1.323.114.950	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	31.445.959	151.436.964	291.556.592	474.439.515	*Lease liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang	16.718.211	335.314.805	-	352.033.016	*Long-term bank loan*
Liabilitas yang masih harus dibayar	367.655.526	-	-	367.655.526	*Accrued liabilities*
Utang usaha	236.217.962	-	-	236.217.962	*Trade payables*
Utang lain-lain	128.287.597	-	-	128.287.597	*Other payables*
Jumlah	**780.325.255**	**1.809.866.719**	**291.556.592**	**2.881.748.566**	***Total***

Jumlah yang disertakan pada tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan, termasuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Akibatnya, jumlah tersebut tidak akan sesuai dengan jumlah yang disajikan pada laporan posisi keuangan, kecuali untuk utang jangka pendek di mana pendiskontoan tidak berlaku.

The amounts included in the table are the contractual undiscounted cash flows, including interest and principal payment. As a result, these amounts will not reconcile to the amounts disclosed on the statement of financial position except for short term payables which discounting is not applied.

d. Manajemen modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas.

d. Capital management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximising shareholder value.

Some of the Group's debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. The Group has complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements, primarily for debt to equity ratio.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen modal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun-akun Grup yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Capital management (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's debt to equity ratio accounts are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
Pinjaman bank jangka panjang	559.647.880	352.033.016	*Long-term bank loans*
Utang obligasi	552.633.015	1.323.114.950	*Bond payables*
Pinjaman bank jangka pendek	2.590.841	-	*Short-term bank loans*
Total pinjaman	**1.114.871.736**	**1.675.147.966**	***Total debt***
Total ekuitas	**3.540.403.379**	**3.441.770.638**	***Total equity***
Rasio utang terhadap ekuitas	0,31	0,49	***Debt to equity ratio***

38. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat instrumen keuangan Grup dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following tables set forth the carrying values of the Group's financial instruments in its consolidated statement of financial position as of December 31, 2023 and December 31, 2022:

	Jumlah/*Total*	Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/*Financial assets/liabilities measured at amortised cost*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/*Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
31 Desember/*December 31*, 2023				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.244.731.682	1.244.731.682	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	143.173.016	143.173.016	-	-
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	23.178.224	-	-	23.178.224
Piutang usaha/*Trade receivables*	494.008.796	494.008.796	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	37.697.266	37.697.266	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	63.853.371	63.853.371	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.006.642.355**	**1.983.464.131**	**-**	**23.178.224**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	245.210.144	245.210.144	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	117.290.669	117.290.669	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	421.213.789	421.213.789	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	430.682.063	430.682.063	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	2.590.841	2.590.841	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	559.647.880	559.647.880	-	-
Utang obligasi/*Bonds payable*	552.633.015	552.633.015	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**2.329.268.401**	**2.329.268.401**	**-**	**-**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	Jumlah/*Total*	Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/ *Financial assets/liabilities measured at amortised cost*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
31 Desember/*December 31, 2022*				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.447.650.817	1.447.650.817	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	115.235.333	115.235.333	-	-
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	27.720.100	-	-	27.720.100
Piutang usaha/*Trade receivables*	568.330.231	568.330.231	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	45.916.705	45.916.705	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	65.356.756	65.356.756	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.270.209.942**	**2.242.489.842**	**-**	**27.720.100**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	236.217.962	236.217.962	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	128.287.597	128.287.597	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	367.655.526	367.655.526	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	474.439.515	474.439.515	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loan*	-	-	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	352.033.016	352.033.016	-	-
Utang obligasi/*Bonds payable*	1.323.114.950	1.323.114.950	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**2.881.748.566**	**2.881.748.566**	**-**	**-**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

   Nilai tercatat seluruh aset keuangan di atas telah mendekati nilai wajar aset keuangan tersebut.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

1. *Cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, and other receivables.*

   The carrying values of the above financial assets approximate the fair value of the financial assets.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

2. Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Aset keuangan di atas diukur pada harga kuotasian yang dipublikasikan dalam pasar aktif.

3. Utang usaha, utang lain-lain dan liabilitas yang masih harus dibayar.

   Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar.

4. Piutang lain-lain jangka panjang dan pinjaman

   Piutang lain-lain jangka panjang merupakan piutang tanpa bunga yang pada pencatatan awal diakui pada nilai wajar berdasarkan bunga pasar pada tanggal pengakuan awal. Selanjutnya, penyesuaian nilai wajar diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

   Pinjaman bank jangka panjang merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah terutang pinjaman bank jangka panjang tersebut mendekati nilai wajar.

   Nilai wajar dari utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah USD550.265.905 dan USD1.303.351.604. Nilai wajar ini dihitung menggunakan harga penawaran dan merupakan level 1 pada hirarki nilai wajar.

   Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat kewajiban keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

5. Hirarki nilai wajar

   Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2. Financial assets at fair value through other comprehensive income

   The above financial assets are measured at published quoted market price in active market.

3. Trade payables, other payables and accrued liabilities.

   All of the above financial liabilities are due within 12 months, therefore the carrying value of the financial liabilities approximate their fair value.

4. Other long-term receivables and loans

   Other long-term receivables represent non-interest bearing receivables that are initially recognised at fair value based on the market rate on their initial recognition date. Subsequently, fair value adjustments are amortised using the effective interest method.

   Long-term bank loan is a liability with floating interest rates which are adjusted with the movement of market interest rates, therefore the carrying value of long-term bank loan approximate their fair values.

   The fair value of the bonds payable as at December 31, 2023 and December 31, 2022 were USD550,265,905 and USD1,303,351,604, respectively. The fair value is calculated using the bid price which is within level 1 of the fair value hierarchy.

   All of the above financial liabilities are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted in the movements of market interest rates, therefore the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

5. Fair value hierarchy

   Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

5. Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:
- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

5. Fair value hierarchy (continued)

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:
- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).*

The Company's fair value hierarchy as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Jumlah/*Total*	Harga pasar yang dikuotasikan untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/*Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)*	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ *Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)*	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ *Significant unobservable inputs (Level 3)*
Aset keuangan lancar/*Current financial assets*				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	23.178.224	23.178.224	-	-
Jumlah/*Total*	**23.178.224**	**23.178.224**	**-**	**-**

	31 Desember/*December 31*, 2022			
	Jumlah/*Total*	Harga pasar yang dikuotasikan untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/*Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)*	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ *Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)*	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ *Significant unobservable inputs (Level 3)*
Aset keuangan lancar/*Current financial assets*				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	27.720.100	27.720.100	-	-
Jumlah/*Total*	**27.720.100**	**27.720.100**	**-**	**-**

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
Aset dalam Rupiah					*Assets in Rupiah*
Kas dan setara kas	IDR	11.565.816.695.929	IDR	10.393.875.045.200	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	IDR	1.111.059.656.839	IDR	1.328.897.749.035	*Trade receivables-net*
Taksiran tagihan pajak	IDR	549.073.501.804	IDR	1.094.771.228.254	*Estimated claim for tax refund*
Piutang lain-lain - neto	IDR	208.436.762.332	IDR	77.333.176.011	*Other receivables-net*
Sub total	IDR	13.434.386.616.904	IDR	12.894.877.198.500	*Sub-total*
Aset dalam Yen Jepang					*Assets in Japanese Yen*
Kas dan setara kas	JPY	123.916	JPY	178.685	*Cash and cash equivalents*
Sub total	JPY	123.916	JPY	178.685	*Sub-total*
Aset dalam Dolar Singapura					*Assets in Singapore Dollar*
Kas dan setara kas	SGD	434.553	SGD	37.931	*Cash and cash equivalents*
Sub total	SGD	434.553	SGD	37.931	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD**	**870.489.638**	**USD**	**819.740.668**	***US dollar equivalents***
Liabilitas dalam Rupiah					*Liabilities in Rupiah*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	IDR	2.101.566.015.019	IDR	1.934.466.538.489	*Long-term employee's benefits liabilities*
Utang pajak	IDR	1.403.751.302.378	IDR	2.859.365.139.080	*Taxes payable*
Liabilitas yang masih harus dibayar	IDR	667.160.268.170	IDR	681.673.748.907	*Accrued Liabilities*
Liabilitas sewa	IDR	477.449.575.875	IDR	7.437.793.400.468	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	IDR	412.311.559.019	IDR	298.970.810.852	*Other payables*
Pinjaman bank jangka pendek	IDR	40.000.000.000	IDR	-	*Non-current Bank Loan*
Sub total	IDR	6.273.510.520.413	IDR	14.254.600.207.677	*Sub-total*
Liabilitas dalam Yen Jepang					*Liabilities in Japanese Yen*
Pinjaman jangka panjang	JPY	31.026.801.000	JPY	32.617.919.000	*Long-term loans*
Sub total	JPY	31.026.801.000	JPY	32.617.919.000	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD**	**626.491.680**	**USD**	**1.149.926.193**	***US dollar equivalents***

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Sebagian besar pembelian gas dalam mata uang Dolar AS juga dijual dalam dolar AS, sehingga lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing terjadi secara alami. Saat ini, liabilitas yang timbul dari pembiayaan dalam mata uang asing tidak dilindung nilai.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain dolar AS pada tanggal 31 Desember 2023 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, aset moneter neto akan turun sekitar USD4.852.162.

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Most purchases of gas were in US Dollars which also sold in US dollar, therefore naturally hedging the related foreign currency exposures. Currently, liabilities denominated in foreign currency arising from financing activities are not hedged.

If assets and liabilities in currencies other than US dollar as of December 31, 2023 are translated using the exchange rate as of the issuance date of these consolidated financial statements, the total net monetary assets will decrease by approximately USD4,852,162.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Niaga dan transmisi gas

   Segmen niaga dan transmisi gas melakukan kegiatan niaga dan transmisi gas dan pengolahan LNG kepada pelanggan industri, komersial dan rumah tangga.

2. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

   Segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

3. Operasi lainnya

   Segmen operasional lainnya terkait dengan jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

40. SEGMENT INFORMATION

For management purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

1. *Gas trading and transmission*

   The gas trading and transmission segment is involved in trading and transmission of gas and processing of LNG to industrial, commercial and household customers.

2. *Exploration and production of oil and gas*

   The exploration and production of oil and gas segment is mainly involved in exploration, exploitation and business development in oil and gas.

3. *Other operations*

   The other operations segment provides fiber optic rental for network services and constructions and maintenance services to the customers and management and leasing buildings and equipment.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Grup.

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table represents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments.

	31 Desember/*December 31, 2023*					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	3.089.499.002	452.999.126	491.587.560	(387.781.523)	3.646.304.165	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(2.723.751.304)	(371.691.464)	(197.681.233)	380.399.314	(2.912.724.687)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(32.533.536)	(5.269.691)	(6.267.990)	-	(44.071.217)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(278.667)	(192.835)	(18.847.895)	10.714.780	(8.604.617)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(659.273)	-	(3.615.245)	-	(4.274.518)	*Depreciation*
Lain-lain	(31.290.009)	(5.126.057)	(21.344.980)	1.326.913	(56.434.133)	*Others*
Jumlah beban segmen	(2.788.512.789)	(382.280.047)	(247.757.343)	392.441.007	(3.026.109.172)	*Total segment expenses*
Laba segmen	300.986.213	70.719.079	243.830.217	(4.659.484)	620.194.993	***Segment profit***
Beban perusahaan dan entitas anak yang tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	88.335.669	*Unallocated expenses of the Company and*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	24.623.337	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(14.065.047)	*Other expense*
Laba operasi					542.417.614	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(97.628.154)	*Finance cost*
Laba selisih kurs	-	-	-	-	7.352.655	*Gain on foreign exchange*
Provisi atas sengketa pajak	-	-	-	-	(29.864.532)	*Provision for tax disputes*
Provisi atas kontrak LNG	-	-	-	-	(11.689.711)	*Provision for LNG contract*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	48.464.033	*Finance income*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	64.835.104	*Share of profit from joint ventures investment*
Laba sebelum pajak penghasilan					523.887.009	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	8.342.180.034	1.434.514.829	196.360.495	(3.373.816.889)	6.599.238.469	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					6.599.238.469	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	2.768.506.400	824.086.015	86.929.526	(620.686.851)	3.058.835.090	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					3.058.835.090	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	138.010.077	85.115.071	8.772.941	-	231.898.089	***Capital expenditures***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *40. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	2.896.026.019	611.482.201	412.504.325	(351.417.770)	3.568.594.775	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(2.488.978.228)	(440.201.020)	(192.880.904)	334.007.799	(2.788.052.353)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(31.252.426)	(7.125.982)	(3.459.811)	-	(41.838.219)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(1.556.560)	(243.209)	(20.018.606)	-	(21.818.375)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(29.829)	-	(3.158.913)	-	(3.188.742)	*Depreciation*
Lain-lain	(45.979.671)	(5.556.652)	(13.149.681)	-	(64.686.004)	*Others*
Jumlah beban segmen	(2.567.796.714)	(453.126.863)	(232.667.915)	334.007.799	(2.919.583.693)	*Total segment expenses*
Laba segmen	328.229.305	158.355.338	179.836.410	(17.409.971)	649.011.082	***Segment profit***
Beban perusahaan dan entitas anak yang tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	(77.151.004)	*Unallocated expenses of the Company and subsidiaries*
Eliminasi biaya lain-lain	-	-	-	-	10.018.255	*Expenses elimination*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	29.097.489	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(18.800.468)	*Other expense*
Laba operasi					592.175.354	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(132.447.530)	*Finance cost*
Laba selisih kurs	-	-	-	-	(6.854.476)	*Gain on foreign exchange*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	26.401.503	*Finance income*
Provisi atas kontrak LNG	-	-	-	-	(56.850.817)	*Provision for LNG contract*
Penghapusan asset tetap	-	-	-	-	(14.517.321)	*Write-off fixed assets*
Pembalikan penurunan properti minyak dan gas	-	-	-	-	44.341.650	*Reversal of the impairment of oil and gas property*
Pembalik provisi sengketa pajak	-	-	-	-	9.435.765	*Reversal from tax dispute provision*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	81.020.133	*Share of proft from joint ventures investment*
Laba sebelum pajak penghasilan					542.704.261	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	8.752.454.444	1.787.062.911	214.246.953	(3.558.904.326)	7.194.859.982	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					7.194.859.982	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	3.206.768.632	1.189.413.326	85.387.424	(728.480.038)	3.753.089.344	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					3.753.089.344	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	**160.231.644**	**40.593.016**	**13.993.896**	**-**	**214.818.556**	***Capital expenditures***

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) (Catatan 27), dimana tercatat sebagai pendapatan pada segmen niaga dan transmisi, dan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) (Note 27), in which recorded as revenues on trading and transmission, and exploration and production of oil and gas segments.

41. TRANSAKSI NON-KAS / *41. NON-CASH TRANSACTIONS*

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Penambahan aset hak guna	3.839.597	6.062.533	*Addition of right-of-use assets*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud melalui utang, beban akrual, kapitalisasi biaya pinjaman dan penambahan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	125.344.221	88.503.846	*Acquisition of fixed assets and intangible assets through payables, accrued expense, capitalisation of finance cost and addition to assets abandonment and site restoration obligations*
Penambahan/(Pengurangan) aset minyak dan gas yang berasal dari penambah atau penyesuaian biaya pembongkaran, dan lainnya	15.310.952	(16.983.204)	*Addition/(Deduction) of oil and gas properties from additions or adjustments of dismantling costs, and others*

42. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN / *42. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES*

	1 Januari/ *January* 2023	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Perubahan non-kas/*Non-cash change*: Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Perubahan non-kas/*Non-cash change*: Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December,31* 2023
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	352.033.016	303.238.552	(80.555.048)		(12.477.799)	-	562.238.721
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	474.439.515	-	(38.903.352)	(19.171.128)	14.317.028	-	430.682.063
Utang obligasi/ *Bonds payable*	1.323.114.950	-	(773.291.000)		-	2.809.065	552.633.015
	2.149.587.481	**303.238.552**	**(892.749.400)**	**(19.171.128)**	**19.922.740**	**2.809.065**	**1.545.553.799**

42. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)

42. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)

	1 Januari/ *January* 2022	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from Financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*: Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*: Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December,31* 2022
Pinjaman bank jangka panjang/Long-term bank loans	422.998.318	17.000.000	(47.189.792)		(40.775.510)	-	352.033.016
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	510.075.606	-	(42.408.886)	(16.777.988)	23.550.783	-	474.439.515
Pinjaman Pemegang saham/ *Shareholder loan*	49.999.999	-	(49.999.999)		-	-	-
Utang obligasi/ *Bonds payable*	1.967.358.761	-	(644.307.929)	-	(6.161.512)	6.225.630	1.323.114.950
	2.950.432.684	**17.000.000**	**(783.906.606)**	**(16.777.988)**	**23.386.239**	**6.225.630**	**2.149.587.481**

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tambahan ini adalah informasi keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (entitas induk saja) pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas pengendalian bersama dan asosiasi berdasarkan metode biaya dan bukan metode ekuitas.

43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY

The supplementary financial information represents financial information of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (parent entity only) as of December 31, 2023 and for the year then ended, which present the Company's investments in subsidiaries under the cost method and investment in joint ventures and associated entities under the cost method, as opposed to the equity method.

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31,2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	308.444.576	461.128.168	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	23.178.224	27.720.099	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang usaha - neto	190.299.449	198.236.420	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	16.114.564	26.075.085	*Other receivables - net*
Piutang dari entitas anak	58.570.242	49.112.445	*Receivable from subsidiaries*
Taksiran tagihan pajak	8.364.050	20.537	*Estimated claims for tax refund*
Persediaan - neto	3.708.279	2.169.553	*Inventories - net*
Uang muka	14.237.112	27.797.983	*Advances*
Beban dibayar di muka	8.034.122	5.776.141	*Prepaid expenses*
Total aset lancar	630.950.618	798.036.431	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka, bagian tidak lancar	29.955.628	31.776.157	*Advances, non-current portion*
Pinjaman kepada entitas anak, bagian tidak lancar	443.800.145	522.106.198	*Loan provided to subsidiaries, non-current portion*
Penyertaan saham	2.928.498.080	3.051.719.549	*Investment in shares*
Aset tetap - neto	1.210.806.661	1.191.507.933	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - neto	6.659.117	8.641.305	*Right-of-use assets - net*
Aset takberwujud - neto	1.812.133	1.713.199	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan pajak	-	-	*Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	27.032.401	49.305.693	*Deferred tax assets*
Lain-lain	7.515.946	8.477.963	*Others*
Total aset tidak lancar	4.656.080.111	4.865.247.997	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**5.287.030.729**	**5.663.284.428**	***TOTAL ASSETS***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	184.475.820	177.837.456	*Trade payables*
Utang lain-lain	19.731.752	36.898.010	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	185.854.935	256.552.199	*Accrued liabilities*
Utang obligasi	396.444.892	-	Bonds payables
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	23.939.089	16.718.211	*Short-term portion of long-term bank loans*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan	6.575.869	15.970.432	*Income taxes -*
- Pajak lain-lain	-	8.922.888	*Other taxes -*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	45.928.660	41.036.565	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang kepada entitas anak	72.098.353	84.943.052	*Payable to subsidiaries*
Total liabilitas jangka pendek	935.049.370	638.878.813	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka panjang	505.708.791	245.314.805	*Long-term bank loans*
Utang obligasi	-	947.620.069	*Bonds payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	68.540.528	56.850.817	*Accrued liabilities - long term*
Liabilitas imbalan pascakerja	118.069.866	104.667.142	*Post-employment benefits obligation*
Liabilitas sewa jangka panjang	196.261	197.632	*Long-term portion of lease liabilities*
Pendapatan diterima di muka	1.605.547	1.763.992	*Unearned income*
Total liabilitas jangka panjang	694.120.993	1.356.414.457	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**1.629.170.363**	**1.995.293.270**	***TOTAL LIABILITIES***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal IDR100 per saham Modal dasar - 70.000.000.000 dari saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	344.018.831	344.018.831	*Share capital - par value of IDR100 per share Authorized - 70,000,000,000 shares consists of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 series B shares Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares of which consist of 1 Series A Dwiwarna and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	284.339.313	284.339.313	*Additional paid-in capital*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	2.826.831.298	2.830.561.756	*Appropriated -*
- Tidak dicadangkan	221.363.165	224.637.330	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya	(18.692.241)	(15.566.072)	*Others components of equity*
TOTAL EKUITAS	**3.657.860.366**	**3.667.991.158**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.287.030.729**	**5.663.284.428**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / ***43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PENDAPATAN	2.400.376.912	2.282.752.013	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.116.545.839)	(1.988.247.057)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**283.831.073**	**294.504.956**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(89.103.668)	(79.275.296)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(1.038.995)	(7.889.362)	*Other expenses*
Pendapatan lain-lain	4.017.183	22.808.936	*Other income*
LABA OPERASI	**197.705.593**	**230.149.234**	***OPERATING INCOME***
Beban keuangan	(55.098.695)	(86.675.109)	*Finance costs*
Pendapatan keuangan	33.681.538	30.964.596	*Finance income*
Laba selisih kurs	2.761.465	28.887.005	*Profit on foreign exchange*
Provisi atas kontrak LNG	(11.689.711)	(56.850.817)	*Provision for LNG contract*
(Provisi)/ pembalikan provisi atas sengketa pajak	(27.599.264)	10.309.825	*(Provision for)/reversal of provision from tax dispute*
Pendapatan dividen	114.018.483	98.635.565	*Dividend income*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**253.779.409**	**255.420.299**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(32.416.244)	(30.782.969)	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA TAHUN BERJALAN	**221.363.165**	**224.637.330**	***PROFIT FOR THE YEAR***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	(3.036.525)	3.978.544	*Remeasurement of post-employment obligation, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(89.644)	(604.903)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(3.126.169)	3.373.641	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**218.236.996**	**228.010.971**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 5/217 *Page*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Changes in fair value of available-for-sale financial assets*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Keuntungan/ kerugian aktuarial/ *Actuarial gain/(loss)*	Saldo laba telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**995.263**	**(19.934.976)**	**2.756.373.031**	**280.144.691**	**3.645.936.153**	***Balance at January 1, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	224.637.330	224.637.330	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(205.955.966)	(205.955.966)	Payment of cash dividends
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	74.188.725	(74.188.725)	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(604.903)	3.978.544	-	-	3.373.641	*Other comprehensive income / (loss) for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**390.360**	**(15.956.432)**	**2.830.561.756**	**224.637.330**	**3.667.991.158**	***Balance at December 31, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	221.363.165	221.363.165	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(228.367.788)	(228.367.788)	*Payment of cash dividends*
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	(3.730.458)	3.730.458	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(89.644)	(3.036.525)	-	-	(3.126.169)	*Other comprehensive income / loss for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**(18.992.957)**	**2.826.831.298**	**221.363.165**	**3.657.860.366**	***Balance at December 31, 2023***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / ***43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)***

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	2.418.380.286	2.280.257.979	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga	37.525.699	32.851.019	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok	(1.928.288.351)	(1.600.391.293)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(215.105.877)	(171.519.168)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran kepada karyawan	(70.775.093)	(99.430.470)	*Payments to employees*
Pembayaran untuk beban keuangan	(53.673.859)	(85.428.855)	*Payments for finance cost*
Pembayaran pajak penghasilan	(112.891.027)	(60.277.525)	*Payments of income taxes*
Pembayaran sengketa pajak	(27.599.264)	(21.469.065)	*Payments for tax disputes*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**47.572.514**	**274.592.622**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari anak perusahaan dan ventura bersama	113.671.979	99.472.307	*Dividends received from subsidiaries and joint ventures*
Penerimaan atas pelepasan investasi di entitas anak	123.221.468	-	*Proceeds from disposal of investment in a subsidiaries*
Pelepasan investasi jangka pendek	3.600.000	44.000.000	*Disposal of short-term investments*
Penambahan aset tetap	(18.966.428)	(37.150.330)	*Additions of fixed assets*
Pelunasan pinjaman pemegang saham dari anak perusahaan	77.614.408	-	*Receipt of shareholder loan from subsidiaries*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	**299.141.427**	**106.321.977**	***Net cash provided by investing activities***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / ***43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)***

LAPORAN ARUS KAS (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman jangka panjang	300.000.000	-	*Proceeds of long-term loans*
Pembayaran obligasi - buyback	(553.291.000)	(400.000.000)	*Payments of obligation - buyback*
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(228.367.788)	(205.955.966)	*Payments of dividend to owners of the parent entity*
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(16.252.338)	(17.189.792)	*Repayments of long-term bank loans*
Pembayaran biaya transaksi utang bank	(3.655.000)	-	*Payment of bank loan transaction*
Pembayaran liabilitas sewa	-	(4.559.213)	*Payments of lease liabilities*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(501.566.126)**	**(627.704.791)**	***Net cash used in financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(154.852.185)**	**(246.790.372)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas	2.168.593	(13.630.902)	*Net effects foreign exchange from cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**461.128.168**	**721.549.442**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**308.444.576**	**461.128.168**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan PSAK 4, Laporan Keuangan Tersendiri.

PSAK 4 mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

PSAK 4 memperkenankan (i) metode biaya perolehan, (ii) sesuai PSAK 71 - Instrumen Keuangan, atau (iii) metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan menerapkan metode biaya perolehan dalam laporan keuangan entitas induk saja pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi.

43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)

a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the PSAK 4, Separate Financial Statements.

PSAK 4 regulates that when an entity elects to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

PSAK 4 allows the use of (i) the cost method, (ii) in accordance with PSAK 71 - Financial Instruments, or (iii) equity method to record the investment in subsidiaries, joint ventures, and associates in the separate financial statements. The Company implemented cost method in the financial statements of the parent entity only as at and for the years ended December 31, 2023 and 2022.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

b. Penyertaan saham pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi berikut:

b. Investments in shares of subsidiaries, associates and joint ventures

As of December 31, 2023 and 2022, the parent entity has the following investments in shares of subsidiaries, joint ventures and associates:

Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2023 Biaya perolehan 1 Januari 2023/ *Acquisition cost January 1, 2023*	2023 Penambahan/ (Pengurangan) *Additions / (Deduction)*	2023 Nilai tercatat 31 Desember 2023/ *Carrying value December 31, 2023*
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	376.845.403	(123.221.468)	253.623.935
PT Permata Graha Nusantara	99,99%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59.87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40.00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40.00%	111.453	-	111.453
PT Banten Gas Sinergy	0.14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**3.051.719.548**	**(123.221.468)**	**2.928.498.080**

Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2022 Biaya perolehan 1 Januari 2022/ *Acquisition cost January 1, 2022*	2022 Penambahan/ *Additions*	2022 Nilai tercatat 31 Desember 2022/ *Carrying value December 31, 2022*
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,98%	376.845.403	-	376.845.403
PT Permata Graha Nusantara	99,95%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40,00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40,00%	111.453	-	111.453
PT Banten Gas Sinergy	0,14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**3.051.719.548**	**-**	**3.051.719.548**

43. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *43. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

c. Penerimaan dividen dari ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas induk menerima dividen atas penyertaan saham pada entitas anak dan ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

c. Dividend received from joint ventures

As of December 31, 2023 and 2022, the parent entity has received dividend in shares of subsidiaries and joint ventures with detail as follows:

Nama entitas/ *Entity name*	2023 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2023 Penerimaan dividen/ *Dividend received*
Entitas anak/*Subsidiary*		
PT Pertamina Gas	51,00%	67.184.185
PT PGAS Solution	99,91%	1.157.593
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	681.663
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	433.442
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	32.817.803
PT Nusantara Gas	40,00%	11.743.797

Nama entitas/ *Entity name*	2022 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2022 Penerimaan dividen/ *Dividend received*
Entitas anak/*Subsidiaries*		
PT Pertamina Gas	51,00%	28.210.431
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	49.618.631
PT Nusantara Gas	40,00%	20.806.503

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally left blank



08.

REFERENSI
References

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik	√	a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum	√	b. Issuers are parties who make public offerings
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	√	c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik	√	d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically- listed Company
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business
f. Direksi:		f. Board of Directors:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity

Keterangan	Halaman Page	Description
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	√	2. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	√	3. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan	√	4. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports
II. Bentuk Laporan Tahunan		Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami	√	3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf	√	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format
III. Isi Laporan Tahunan		Content Of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting	20-23	a. Summary of key financial information
b. Informasi saham (jika ada)	26-28	b. Stock information (if any)
c. Laporan Direksi	71-93	c. The Board of Directors report
d. Laporan Dewan Komisaris	56-67	d. The Board of Commissioners report
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	98-166	e. Profile of Issuer or Public Company
f. Analisis dan pembahasan manajemen	167-247	f. Management discussion and analysis
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	248-489	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	486-499	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	500	i. Audited annual report

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	96-97	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	20-23	a. Summary of Key Financial Information
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	20-23	Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan	20	1) Income/sales
2) Laba bruto	20	2) Gross profit
3) Laba (rugi)	20	3) Profit (loss)
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	20	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non- controlling interest
5) Total laba (rugi) komprehensif	20	5) Total comprehensive profit (loss)
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	20	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest
7) Laba (rugi) per saham	20	7) Earning (loss) per share
8) Jumlah aset	21	8) Total assets
9) Jumlah liabilitas	21	9) Total liabilities
10) Jumlah ekuitas	21	10) Total equities
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	21	11) Profit (loss) to total assets ratio
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	21	12) Profit (loss) to equities ratio
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan	21	13) Profit (loss) to income ratio
14) Rasio lancar	21	14) Current ratio
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas	21	15) Liabilities to equities ratio
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	21	16) Liabilities to total assets ratio
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	21	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry.
b. Informasi Saham	26-28	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	26-28	Stock Information (if any) at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	26-28	1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar	26	a) number of outstanding shares
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	26	b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	26	c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on
d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	26	d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on

Keterangan	Halaman Page	Description
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek	26-28	Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	28	2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi	28	a) date of corporate action
b) Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham	28	b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi	28	c) number of outstanding shares prior to and after corporate action
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada)	28	d) The number of convertible securities exercised (if any)
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi	28	e) share price prior to and after corporate action
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut	28	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut	28	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting
c. Laporan Direksi	71-93	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat:	71-93	The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	71-93	1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	74-76	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	76	b) Roleofthe Boardof Directorsinformulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik	76-77	c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan	77-81	d) comparison between achievement of results and targets
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik	81-83	e) challenges faced by the Issuer or Public Company
2) Gambaran tentang prospek usaha	83-86	2) description on business prospects
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	86-88	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	91-92	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any)
d. Laporan Dewan Komisaris	56-67	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	56-67	The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik	58-60	1) Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik	61	2) Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi	62-63	3) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	64-65	4) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	66	5) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any)
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	98-166	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	98-166	Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku	100-103	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	100	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat	100	a) Address
b) Nomor telepon	100	b) Telephone number
c) Nomor faksimile	100	c) Facsimile number
d) Alamat surat elektronik	100	d) E-mail address
e) Alamat Situs Web	100	e) Website address
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	100-103	3) Brief history of the Issuer or Public Company
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik	106	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan	100, 108-116	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik	117	6) Operational area of the Issuer or Public Company
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan	118	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles
8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	165	8) List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	126-131	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengantugas dan tanggung jawab	126-131	a) Name and short description of duties and functions
b) Foto terbaru	126-131	b) Latest photograph

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Usia	126-131	c) Age
d) Kewarganegaraan	126-131	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan	126-131	e) Education
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	126-131	f) history position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yangbersangkutan	126-131	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	126-131	(2) Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	126-131	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company.
g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsungsampai kepada pemilik individu, meliputinama pihak yang terafiliasi	126-131	g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or PublicCompany shall disclose this matter
h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	91-92, 132	h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and thereasons for the changes. In the event thatthere is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikitmemuat:	120-125	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a) Nama	120-125	a) Name
b) Foto terbaru	120-125	b) Latest photograph
c) Usia	120-125	c) Age
d) Kewarganegaraan	120-125	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan	120-125	e) Education
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	120-125	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yangbersangkutan	120-125	(1) Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company
(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan	120-125	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	120-125	(3) Dual position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member ofcommittee and other position (if any)
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	120-125	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	120-125	g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada)	305	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any)

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	66, 132	i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya	132	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku	133-136	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contracted) in the fiscal year Disclosure of information can be presented in tabular form
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik	145-148	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik	147-148	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik	146-147	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik	146	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	146-147	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	147-148	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal	147-148	a) Ownership of local institutions
b) Kepemilikan institusi asing	147-148	b) Ownership of foreign institutions
c) Kepemilikan individu lokal	147-148	c) Ownership of local individual
d) Kepemilikan individu asing	147-148	d) Ownership of foreign individual.
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan	145-146, 149	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram

Keterangan	Halaman Page	Description
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada) Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	150-156	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any) For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada)	157-160	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	161-162	19) Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any)
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:	163	20) Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/ associations/alliances include:
a) nama dan alamat	163	a) name and address
b) periode penugasan	163	b) period of assignment
c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan	163	c) information on scope of audit and/or non-audit services
d) biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku	163	d) Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year
e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut	163	e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	163-165	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	168-247	f. *Management* Discussion and Analysis
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	168-247	Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	172-183	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya	172-183	a) Production, including process, capacity, and growth
b) Pendapatan/penjualan	172-183	b) Income/sales
c) Profitabilitas.	172-183	c) Profitability.
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	184-194	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	190-191	a) Current assets, non-current assets, and total assets
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	191-193	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities
c) Ekuitas	193	c) Equities
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif	185-190	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss)
e) Arus kas.	193-194	e) Cash flows.

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	195	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios
4) Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	195	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios
5) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud	196-197	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	197	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut	197	a) The purpose of such ties
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut	197	b) Source of funds expected to fulfill the said ties
c) Mata uang yang menjadi denominasi	197	c) Currency of denomination
d) Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	197	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks.
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	198	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal	198	a) Type of investment of capital goods
b) Tujuan investasi barang modal	198	b) Objective of the investment of capital goods
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	198	c) Value of the investment of capital good.
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada)	200	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any)
9) Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	201-207	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	208-211	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan	208-211	a) Income/sales
b) Laba (rugi)	208-211	b) Profit (loss)
c) Struktur modal (capital structure)	208-211	c) Capital structure or
d) Kebijakan dividen atau	208-211	d) Dividend policy or
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	208-211	e) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company.
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	211-213	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan	211-213	a) Income/sales
b) Laba (rugi)	211-213	b) Profit (loss)
c) Struktur modal (*capital structure*)	211-213	c) Capital structure or
d) Kebijakan dividen atau	211-213	d) Dividend policy
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	211-213	e) Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company.

Keterangan	Halaman Page	Description
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar	214-226	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	231	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen	231	a) Dividend policy
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas	231	b) The date of the payment of cash dividend and/ or date of distribution of non-cash dividend
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas)	231	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash)
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar	231	d) Amount of dividend per year paid
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	231	Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	232	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	232	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	232	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	233-238	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi	233-238	a) Transaction date, value, and object
b) Nama pihak yang melakukan transaksi	233-238	b) Name of transacting parties
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada)	233-238	c) Nature of related parties (if any)
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	233-238	d) Description of the fairness of the transaction
e) Pemenuhan ketentuan terkait	233-238	e) Compliance with related rules and regulations
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	233-238	f) In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms- length principle*)	233-238	1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms- length principle*)	233-238	2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut	233-238	g) For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut	233-238	h) For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	233-238	i) In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	238-240	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any)
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	241-243	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any)
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	248-489	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	248-489	Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	260	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	248-489	a) Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku	263-277	(1) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year
(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan	263-277	(2) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	264, 269	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed
2) Direksi, mencakup antara lain:	306	2) The Board of Directors, covering:
a) tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota Direksi	306-309	a) The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi	309	b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS	312-334	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	335-337	d) Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)	335-337	(1) Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any)
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).	335-337	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any).
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	334	e) The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1) prosedur penilaian kinerja	334	(1) Performance appraisal procedures
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	334	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings
f) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	334	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	278	3) The Board of Commissioners, among others include:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	278-279	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris	279-280	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS	286-298	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	335-337	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada)	335-337	(1) Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any)
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada)	335-337	(2) Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any)
e) Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	298-301	e) The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	298-301	(1) procedure for the implementation of performance assessment
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	298-301	(2) Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings
(3) Pihak yang melakukan penilaian.	298-301	(3) Assessor.
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	301-302	f) Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja	301-302	(1) Performance appraisal procedures
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	301-302	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	340, 284-285, 310-312	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	340, 284-285, 310-312	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	284-285, 310-312	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	284-285, 310-312	(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya	284-285, 310-312	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	284-285, 310-312	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N.A	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) Nama	N.A	a) name
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah	N.A	b) Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah	N.A	c) Period of assignment of the sharia supervisory board
d) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	N.A	d) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	N.A	e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	343-351	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	343-351	a) Name and position in the committee
b) Usia	343-351	b) Age
c) Kewarganegaraan	343-351	c) Citizenship
d) Riwayat pendidikan	343-351	d) Education background
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	343-351	e) History of position including:
(1) Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite	343-351	(1) Legal basis for appointment as committee member
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	343-351	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	343-351	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit	343-351	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Pernyataan independensi Komite Audit	343-351	g) statement of independence of the Audit Committee
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	343-351	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut	343-351	i) Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit	343-351	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	352-363	7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	352-363	a) Name and position in committee membership
b) Usia	352-363	b) Age
c) Kewarganegaraan	352-363	c) Nationality
d) Riwayat pendidikan	352-363	d) Educational history
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	352-363	e) Position history, including information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	352-363	(1) Legal basis for appointment as committee member
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	352-363	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	352-363	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota komite	352-363	f) Period and term of office of the committee members
g) Pernyataan independensi komite	352-363	g) Statement of committee independence
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	352-363	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Uraian tugas dan tanggung jawab	352-363	i) Description of duties and responsibilities
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite	352-363	j) A statement that it has a guideline or charter
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	352-363	k) Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	352-363	l) Brief description of the implementation of activities in the fiscal year
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	352-363	m) In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite	352-363	(1) Reasons for not forming the committee
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	352-363	(2) The party carrying out the nomination and remuneration function
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	364-373	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	364-373	a) Name and position in the Committee
b) Usia	364-373	b) Age

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Kewarganegaraan	364-373	c) Citizenship
d) Riwayat pendidikan	364-373	d) Education background
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	364-373	e) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	364-373	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	364-373	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	364-373	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota komite	364-373	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee
g) Pernyataan independensi komite	364-373	g) Statement of committee independence
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	364-373	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Uraian tugas dan tanggung jawab	364-373	i) Description of duties and responsibilities
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite	364-373	j) A statement that the committee has had guidelines or charters
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	364-373	k) Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	364-373	l) A brief description of the committee's activities for the fiscal year
9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	376-379	9) Corporate Secretary, including:
a) Nama	376-379	a) name
b) Domisili	376-379	b) domicile
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	376-379	c) history of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan	376-379	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	376-379	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
d) Riwayat pendidikan	376-379	d) education background
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	376-379	e) education and/or training during the year under review
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku	376-379	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review
10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	380-388	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala Unit Audit Internal	380-388	a) Name of Head of Internal Audit Unit
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	380-388	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal	380-388	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	380-388	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada)	380-388	c) Qualification or certification as internal auditor (if any)

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	380-388	d) Education and/or training during the year under review
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal	380-388	e) Structure and position of Internal Audit Unit
f) Uraian tugas dan tanggung jawab	380-388	f) Description of duties and responsibilities
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Unit Audit Internal	380-388	g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter
h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit	380-388	h) Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year, including the policy and implementation of the meeting frequency with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or audit committee
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	388-390	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya	388-390	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	388-390	b) Review on the effectiveness of internal control systems
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal	388-390	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	400-411	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	400-411	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya	400-411	b) Types of risk and the management
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	400-411	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko	400-411	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	412-418	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan	412-418	a) Substance of the case/claim
b) Status penyelesaian perkara/gugatan	412-418	b) Status of settlement of case/claim
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik	412-418	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada)	418	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any)
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	420-423	15) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik	420-423	a) Key points of the code of conduct
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	420-423	b) Socialization of the code of conduct and enforcement
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	420-423	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Ownership Program/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	427-428	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP)
a) Jumlah saham dan/atau opsi	427-428	a) Number of shares and/or options
b) Jangka waktu pelaksanaan	427-428	b) Implementation period
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	427-428	c) Requirements for eligible employees and/or management
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	427-428	d) Exercise price or determination of exercise price
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	428	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka	428	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud	428	b) Implementation of the policy
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	429-434	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran	429-434	a) Mechanism for violation reporting
b) Perlindungan bagi pelapor	429-434	b) Protection for the whistleblower
c) Penanganan pengaduan	429-434	c) Handling of violation reports
d) Pihak yang mengelola pengaduan	429-434	d) Unit responsible for handling of violation report
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	429-434	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	429-434	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year
(2) Tindak lanjut pengaduan	429-434	(2) Follow up of complaints
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	394-395	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik	394-395	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik	394-395	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	447-457	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan /atau	447-457	a) statement regarding recommendation that have been implemented /or
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	447-457	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any)
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	486	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:
a) Penjelasan strategi keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Explanation of the sustainability strategy
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental)
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	c) Brief profile of the Issuer or Public Company
d) Penjelasan Direksi	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	d) Explanation of the Board of Directors
e) Tata kelola keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	e) Sustainability governance
f) Kinerja keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	f) Sustainability performance
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	g) Written verification from an independent party, if any
h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	h) Feedback sheet for readers, if any
i) Anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	i) The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi /atau	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report / or

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company
4) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Contains all the information as referred to in number 1)
b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek	500	i. Audited Annual Financial Statement Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Boardmof Directors on the financial report or the legislationsmin the Capital Markets sector governing the periodicmreports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	96-97	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority

LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Appendix VII - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
I. BAB I - INTRODUCTION		CHAPTER I - INTRODUCTION
1.1. Kondisi Umum	71-73, 170-171	1.1. General Condition
1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan	77-79, 184	1.2. Brief Overview of Company Performance
II. BAB II - KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2023		CHAPTER II - COMPANY PERFORMANCE IN 2023
2.1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri, paling sedikit mengenai:	172-183	2.1. Operating review by business segment according to industry type, at least regarding:
2.1.1. Produksi;	172-183	2.1.1. Production;
2.1.2. Pangsa pasar;	172-183	2.1.2. Market share;
2.1.3. Ekspor (jika ada);	N.A	2.1.3. Export (if any);
2.1.4. Pendapatan/Penjualan; dan	172-183	2.1.4. Income/Sales; and
2.1.5. Profitabilitas	172-183	2.1.5. Profitability
2.2. Teknologi	227-230	2.2. Technology
2.3. Penelitian dan Pengembangan	203-207	2.3. Research and Development
2.4. Hukum	412-418	2.4. Legal
2.5. Sumber Daya Manusia	133-143	2.5. Human Resources
2.6. Investasi dan Sumber Pembiayaan	197-200	2.6. Investment and Financing Sources
2.7. Laporan Keuangan (diupdate apabila audit sudah terbit)	500	2.7. Financial Statements (updated if the audit has been published)
2.7.1. Laporan Posisi Keuangan;	500	2.7.1. Statement of Financial Position;
2.7.2. Laporan Laba Rugi;	500	2.7.2. Statement of Profit or Loss;
2.7.3. Laporan Arus Kas;	500	2.7.3. Statement of Cash Flows;
2.7.4. Laporan Perubahan Ekuitas;	500	2.7.4. Statement of Changes in Equity;
2.7.5. Penjelasan terhadap perubahan akun-akun material;	500	2.7.5. Explanation of changes in material accounts
2.7.6. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; dan	195	2.7.6. Ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations; and
2.7.7. Tingkat kolektibilitas piutang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	195	2.7.7. Receivables collectibility by presenting relevant ratio calculations.
2.8. Informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat hutang, setoran modal, akuisisi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, restrukturisasi utang/modal, dan lainnya yang terjadi pada triwulan berjalan.	28, 236	2.8. Information on the realization of corporate action plans such as asset sales, issuance of debt securities, capital deposits, acquisitions, divestments, business mergers/consolidations, debt/capital restructuring, and others that occurred in the current quarter.

LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Appendix VII - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
2.9. Kontribusi kepada Negara	243	2.9. Contribution to the State
2.9.1. Pajak;	243	2.9.1. Taxes;
2.9.2. Dividen; dan	231	2.9.2. Dividend; and
2.9.3. PNBP Lainnya.	243	2.9.3. Other Non-Tax Revenue.
BAB III - LAPORAN PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN	244	CHAPTER III - REPORT OF KPI ACHIEVEMENT AND SOUNDNESS LEVEL
BAB IV - RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2023	58, 60, 81-83	CHAPTER IV - DETAILS OF ISSUES ARISING DURING 2023
BAB V -LAPORAN MANAJEMEN RISIKO	400-411	CHAPTER V - RISK MANAGEMENT REPORT
5.1. Laporan penerapan Manajemen Risiko;	400-411	5.1. Report of Risk Management implementation;
5.2. Laporan Audit Internal; dan	385-390	5.2. Internal Audit Report; and
5.3. Laporan Tata Kelola Terintegrasi (jika ada)	N.A	5.3. Integrated Governance Report (if any)
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	490-499	CHAPTER VI IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS
BAB VII - LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN (jika ada)	N.A	CHAPTER VII REPORT OF ADDITIONAL USE OF PMN (if any)
BAB VIII - PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN (jika ada)	199	CHAPTER VIII IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS (if any)
BAB IX - TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS	263-277, 386-387	CHAPTER IX FOLLOW-UP ON AUDITOR'S FINDINGS AND GMS RESOLUTIONS

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2023

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

STRENGTHENING PRESENCE

PERTAMINA
GAS NEGARA

KANTOR PUSAT
Head Office

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140
Indonesia
F : +62 21 397 00645; 6334 838
T : +62 21 6333 080
E : pcc135@pertamina.com

www.pgn.co.id